Irfan Tamwifi

ISLAM & KEGAGALAN DEMOKRASI

Menelusuri Jejak Politik Indonesia Hingga Penghujung Orde Baru

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

ISLAM DAN KEGAGALAN DEMOKRASI

Menelusuri Jejak Politik Indonesia Hingga Penghujung Era Orde Baru

Irfan Tamwifi

ISLAM DAN KEGAGALAN DEMOKRASI
Menelusuri Jejak Politik Indonesia Hingga Penghujung Era Orde Baru

Penulis
Irfan Tamwifi

Cet. 1 - Surabaya : UIN SA Press, Mei 2014
ix + 518 hlm : 16 x 23 cm

ISBN : 978-602-7912-71-7

Tata Letak :
Rizki Kurniawan

Cover :
Citra Ayu M.

Diterbitkan :
UIN Sunan Ampel Press
Anggota IKAPI
Gedung SAC.Lt.2 UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
☎(031) 8410298-ext. 138
Email : sunanampelpress@yahoo.co.id

Copyright © 2014, UIN Sunan Ampel Press (UIN SA Press)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

KATA PENGANTAR

Buku ini semula merupakan naskah penelitian disertasi pertama, yang selesai saya tulis pada akhir tahun 2003. Selama bertahun-tahun naskah ini hanya tersimpan di file komputer, bahkan nyaris terbuang, karena harus mengerjakan dua tema lain untuk penelitian disertasi saya. Saya baru percaya diri untuk menerbitkan naskah ini setelah beberapa kolega di *National Centre for Civic Education* (NCCE), Gus Bonawi Cs., yang sempat membacanya memberikan apresiasi positif.

Penulisan naskah ini dilaterbelakangi kenyataan di mana dunia Islam, termasuk Indonesia, pernah mengalami kegagalan dalam menerapkan demokrasi. Hingga naskah ini diterbitkan, masih banyak negara, seperti Mesir, Libya, Suriah, dan Irak, yang masih dirundung persolan politik yang pelik berhadapan dengan tuntutan demokratisasi. Kegagalan penerapan demokrasi bahkan sering kali terjadi setelah serangkaian prosedur dan menaknisme demokrasi politik sudah dilalui.

Penelitian ini didasari asumsi bahwa demokrasi bukan semata persoalan prosedur mekanistik. Demokrasi merupakan ekspresi berfikir, sebuah filosofi yang terekspresikan dalam konteks kebudayaan suatu komunitas yang tidak selalu sejalan dengan budaya komunitas lain. Ibarat anggur, demokrasi yang di Eropa berbuah merah, manis, dan menyegarkan, ternyata ketika ditanam beberapa dunia Islam sering berbuah hijau, masam dan menimbulkan keracunan. Sepertinya demokrasi membutuhkan lahan sosial yang memiliki iklim sosial, kebudayaan dan politik tertentu, agar berbuah sama dengan di negeri asalnya, Eropa.

Atas dasar itulah, kesulitan, kegagalan dan berbagai persoalan penerapan demokrasi yang dialami oleh berbagai bangsa perlu dipahami bukan dalam konteks pertarungan kepentingan belaka, sebab sepertinya hal itu hanya berpotensi menambah panjang konflik kepentingan. Barangkali karena alasan itulah, salah seorang promotor

saya menilai penulisan naskah ini terlalu berlebihan untuk sebuah penelitian disertasi.

Terlepas dari tercapai tidaknya harapan tersebut, serta berbagai kekurangan yang tak terhindarkan, saya berterima kasih kepada teman-teman kerja di UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah membuat saya berani menerbitkan naskah ini. Secara khusus saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Nur Syam, sebagai orang pertama yang bersedia membaca naskah ini dan memberikan berbagai kritik dan saran.

Terima kasih *wa jazâ kumullah katsiran* kepada segenap pengasuh dan *masyayikh* Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, serta segenap pimpinan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA), sekarang Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang yang telah mengantarkan saya menempuh jenjang pendidikan S1 di kampus bersahaja tersebut dan melanjutkan ke jenjang S2 dan S3 di Yogyakarta.

Berbagai kekurangan dan kelemahan bukan mustahil dijumpai dalam naskah ini, tetapi saya berharap karya ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.

Papringan, 15 April 2014

Penulis,

IRFAN TAMWIFI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah ideologi modern dan sistem pemerintahan progresif, demokrasi telah menjadi *icon* penting yang menuntut respon seluruh negara di berbagai belahan dunia. Demokrasi telah menjadi bagian dari kesadaran baru manusia yang menjanjikan sistem tatanan sosial politik yang memungkinkan setiap orang memiliki kesamaan akses dan kesempatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Belum ada sistem tandingan yang secara signifikan mampu menolaknya secara konseptual maupun praktik ketatanegaraan. Sedemikian idealnya janji yang ditawarkan, seolah menjadikan demokrasi sebagai tata nilai kemanusiaan baru, bahkan puncak perjalanan peradaban, yang oleh Fukuyama disebut sebagai penghujung sejarah (*the end of history*) pencarian tatanan sosial politik ideal.[1]

Perkembangan global menggeser pandangan tentang pengelolaan sistem tatanan sosial politik, dan demokrasi seakan menjadi jalan terakhir. Tidak satupun pemerintahan republik yang

---

[1]Franz Magnis-Suseno, "Kedaulatan Rakyat, Bukan Kedaulatan Tuhan" pengantar dalam Mohammad AS Hikam, ***Demokrasi dan Civil Society***, (Jakarta: LP3ES, 1996), p. xiv. Simak pula Francis Fukuyama, ***The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal***, terj. M.H. Amrullah, (Yogyakarta: CV Qalam, 2003), p. 443-4.

rela dinyatakan tidak demokratis. Berbagai kebijakan, keputusan dan tindakan politik berbagai negara selalu diupayakan sedemikian rupa agar memenuhi kriteria untuk disebut sebagai keputusan demokratis. Pemerintahan yang tidak atau belum mengapresiasi demokrasi menjadi sasaran kritik dan tekanan politik, seolah menunggu pembebasan dari kungkungan peradaban masa lalu.

Sebaliknya, pemerintahan di negara-negara yang merasa sebagai kampium demokrasi berusaha menebar paham dan sistem demokrasi dengan penuh semangat. Dalam situasi tertentu, paham dan sistem tersebut bahkan tidak jarang dipaksankan melalui berbagai cara dan media. Hal ini dapat dicermati dari bagaimana menyeruaknya isu demokratisasi di Indonesia dan berbagai negara sejak era 1990-an, yang di antaranya merupakan salah satu dampak dari propaganda perluasan demokrasi (*enlargement of democracy*) yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah Amerika Serikat.[2]

Sebagaimana produk-produk pemikiran Barat pada umumnya - filsafat, sains, teknologi dan nasionalisme – paham demokrasi turut membanjiri alam pemikiran dan mempengaruhi visi sosial politik dunia Islam. Perkembangan dan kemajuan Barat, terutama sejak periode akhir era kolonial, disusul munculnya isu globalisme era komunikasi dan informasi kian mengukuhkan Barat sebagai kiblat negara-negara baru yang umumnya bekas jajahan baik dalam pilihan ideologi, sistem pendidikan, gaya hidup, seni, sistem tatanan sosial politik maupun aspek kehidupan secara lebih luas. Mengemukanya

[2]Selama paruh terakhir abad ke-20, pra-modernitas: monarkhi terpusat; aristokrasi turun-temurun; serta oligarki berdasarkan hak pilih terbatas dan sempit; komunisme; fasisme dan rezim militeristik yang dianggap "musuh demokrasi" telah gagal dan kehilangan legitimasi. Kalaupun bertahan, secara malu-malu bertahan dengan berselubung demokrasi semu. Robert A. Dahl, ***Perihal Demokrasi***, terj. A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), p. 1. Simak juga Anthony Giddens, ***The Third Way, The Renewal of Social Democracy***, (Cambridge: Polity Press, 1999), p. 66. Simak pula Samuel P. Huntington, ***The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order***, (New York: Simon and Schuster, 1996), p. 192.

isu demokrasi pada kurun berikutnya, menjadikan dunia Islam sulit menghindarkan diri dari keharusan untuk memberikan respon, baik secara konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan.[3]

Masalahnya, implementasi demokrasi di dunia Islam, sebagaimana berlangsung di negara-negara dunia ketiga pada umumnya, tidak berjalan seperti pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika. Benih demokrasi yang ditanam di negara-negara bekas jajahan hampir tidak pernah berbuah sama dengan negeri asalnya, Barat. Di negeri-negeri Barat demokrasi membuahkan kemapanan sistem sosial politik, mekanisme kontrol publik, perbaikan etika politik dan pemerintahan, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan. Dialektika demokrasi bahkan telah menghasilkan perkembangan konsep tatanan sosial dan politik yang mengarah pada kecenderungan kependudukan global (*sense of global citizenship*). Setelah globalisme meretas batas-batas kebangsaan, nasionalisme abad ke-19 seolah menjadi tidak *up to date* lagi.[4]

Penerapan demokrasi di dunia Islam bahkan lebih sering menghasilkan kekacauan, anarki dan berbagai bentuk kekerasan dibanding kemapanan tatanan sosial, politik dan kemasyarakatan. Penerapan demokrasi bahkan seringkali menimbulkan situasi yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Demokrasi bukan menghasilkan pemerintahan demokratis yang memberikan jaminan kesetaraan dan kesejahteraan, melainkan totalitarian. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan kelompok, dalam situasi tertentu justeru memicu instabilitas, ketidaktenteraman, ancaman disintegrasi, *chaos* serta pertikaian antar *elite* kekuasaan hingga *grass root*. Tidak jarang

[3]The European union is the prototype, but the softening of boundaries is happening in other parts of the world, too. Giddens, ***The Third Way...***, p. 130. Simak pula Harun Nasution, "Sekitar Persoalan Modernisasi dalam Islam" dalam ***Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran***, Cetakan V, (Bandung: Mizan, 1998) p. 182.

[4] Giddens, ***The Third Way...***, p.130-1.

pula penerapan sistem demokrasi bermuara pada bentuk-bentuk penindasan yang mengatasnamakan demokrasi itu sendiri.[5]

Pasca era kolonial, banyak negeri muslim kehilangan momentum untuk melanjutkan sistem monarkhi dan memilih republik sebagai sistem politik dan ketatanegaraan, yang konsekwensinya harus menerapkan demokrasi.[6] Hanya saja, terlalu sedikit republik di dunia Islam yang berhasil memperoleh predikat sebagai negara demokrasi dalam arti memiliki tatanan sosial politik yang mapan secara sistemik, pertanggungjawaban publik yang jelas, kesamaan akses dan perlakuan terhadap setiap individu di hadapan hukum dan pemerintahan, dan apalagi menikmati pemerataan distribusi kesejahteraan sosial ekonomi. Belum ada satu negarapun yang praktik demokrasinya dapat disejajarkan dengan Barat, dalam hal pola, perilaku maupun hasilnya.[7]

Mesir, Pakistan, Bangladesh dan Aljazair sebagara negara republik banyak diwarnai gejolak yang berdarah-darah, sementara Irak dan Indonesia jatuh bangun di bawah rejim totalitarian. Di Indonesia, kebebasan dan keterbukaan yang diperoleh sejak runtuhnya rejim Orde Baru yang dinilai sebagai momentum penting demokratisasi justeru membuka peluang penyelewengan tanpa

---

[5] Kekhawatiran Arend Lipjhart, sebagaimana diulas Setiawan, berkaitan bahaya penerapan demokrasi di masyarakat plural akan membentuk pola demokrasi sentrifugal. Setiawan, "Demokrasi Konsosiasional, Cara Lain Berdemokrasi Menurut Arend Lipjhart" dalam ***Basis***, Nomor 11-12, tahun ke-48, November-Desember 1999, p. 60-1. Simak pula I. Wibowo "Transisi ke Demokrasi (2)" dalam ***Basis***, Nomor 3-4, tahun ke-48, Maret-April 1999, p. 51-2.

[6] Dalam teori ketatanegaraan, negara yang menganut sistem republik, secara otomatis harus menerapkan demokrasi sebagai sistem tatanan sosial politik. Soehino, ***Ilmu Tata Negara***, cetakan ke-II (Yogyakarta: Liberty, 1986), p. 149-154.

[7]Demokrasi di negara-negara berkembang beresiko meningkatkan konfik nasionalis dan SARA secara signifikan dengan beragam bentuk dan intensitas. Konflik tersebut semakin menghangat ketika kelompok elit terancam oleh perubahan akibat tuntutan demokratisasi. Jack Snyder, ***Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, Demokratisasi dan Konflik Nasionalis***, terj. Martin Aleida dan Parakitri T. Simbolon, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), p. 361.

kontrol. Turki, Iran dan Malaysia yang relatif tanpa gejolak tidak lepas dari kendali kelompok kekuatan tertentu yang berposisi sebagai "garda penyangga" yang mendiktekan sistem sosial, politik dan ketatanegaraan. Beberapa negara yang berhasil menerapkan prosedur dan mekanisme demokraasi baru mencapai *level* demokrasi formalistik, yaitu demokrasi semu, yang kurang lebih mirip dengan praktik demokrasi di Indonesia era Orde Baru, dan tentu saja tidak memadai untuk disebut sebagai pemerintahan demokratis.[8]

Berdasarkan tinjauan nilai-nilai tradisi dan ajaran agama, Huntington memandang sulitnya implementasi demokrasi tersebut sebagai akibat Islam dari segi ajaran dan nilai-nilai kulturalnya tidak kompatabel dengan demokrasi. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di dunia Islam seperti halnya Konfusianisme, yang bahkan oleh Huntington divonis nyata-nyata bertolakbelakang (*clearly contradiction*) dengan demokrasi. Sementara menurutnya, demokrasi berkembang di Barat dikarenakan nilai tradisi dan ajaran Protestanisme dan Katolikisme, yang secara konseptual lebih kompatabel dengan demokrasi.[9]

---

[8] Kasus Bangladesh menunjukkan bahwa demokrasi menjadi ajang balas dendam politik antar berbagai unsur kekuatan. Dhuroruddin Mashad "Antara Demokrasi dan otoritarianisme: Dilema Penerapan konsep *Civil Society* di Bangladesh" dalam ***Analisa CSIS***, No. 3, Mei-Juni, 1996, p. 199-112. Untuk kasus Timur Tengah simak Riza Sihbudi "Masalah Ekonomi dan Demokratisasi Politik: Kasus Timur Tengah" dalam ***Analisa CSIS***, No. 2, Maret-April, 1996, p. 107-17. Demokrasi Turki yang menganut *extreme form of secularism*, disangga oleh intervensi militer. Metin Heper and Şule Toktaş "Islam, Modernity and Democracy in Contemporary Turkey" dalam ***The Muslim World***, Vol. 9 No. 2, April 2003, p. 157-9. Dominasi UMNO di Malaysia dapat dicermati dalam Badlihisham Mohd. Nasir "Islamic Movement in Malaysia: A Change and Challage in the Post Islamic Resurgence Period" dalam ***Hamdard Islamicus***, Vol. XXII, No. 1, p. 27-3.

[9] Demokrasi bercorak liberal yang dikembangkan Barat tidak mampu berdialog secara sehat dengan kultur dan masyarakat dunia Islam. Huntington, ***The Clash of Civilizations…***, p. 114.

Meski menyinggung realitas sosial politik di Amerika Latin dan negara-negara Blok-Timur yang juga mayoritas penganut agama Nasrani, Huntington seolah melupakan bahwa pengalaman demokrasi di kawasan itu juga tidak semulus saudara mereka di Eropa dan Amerika utara. Lagi pula dimensi teologis kedua agama yang menempatkan pemimpin agama tersebut sebagai representasi Tuhan yang tidak mungkin salah, tentunya tidak sejalan dengan prinsip humanitas yang dijunjung tinggi dalam demokrasi.[10]

Gellner sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa di antara tiga agama monotheisme; Yahudi, Kristen dan Islam, Islam adalah agama yang paling dekat dengan modernitas. Ajaran tentang universalisme, skripturalisme yang memungkinkan semua penganutnya memiliki hak yang sama untuk memahami ajaran lepas dari herarkhi keagamaan. Egalitarianisme dengan tidak adanya sistem kerahiban, memungkinkan partisipasi yang lebih dekat dengan demokrasi.[11]

Tinjauan normatif yang menempatkan agama sebagai variabel penghambat demokrasi tampaknya perlu dikritisi kembali, mengingat dinamika sosial politik dipengaruhi oleh variabel sosial dan kultural yang kompleks, bukan semata dikarenakan tradisi atau konsep keagamaan yang dianut oleh masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan salah satu variabel pembentuk kultur sosial yang bersinergi dalam memberi corak sebuah peradaban. Hanya saja, variabel ajaran agama semata tidak memadai untuk dijadikan dasar tingkat penerimaan demokrasi, sebab dinamika tatanan kehidupan

[10] Hikam, ***Demokrasi...***, p. 31.

[11]Nurcholish Madjid "Universalisme Islam dan Kosmopolitanis-me Budaya Islam" dalam Nurcholish Madjid, ***Islam Doktrin dan Peradaban***, cetakan ke-II (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), p. 467-8.

sosial politik tidak selalu berbanding lurus dengan nilai-nilai normatif keagamaan.[12]

Perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa peradaban bukan sesuatu yang tetap, tetapi selalu bergeser dan bahkan saling mempengaruhi satu sama lain. [13] Variabel sosial, ekonomi, kutural, intelektual, serta kematangan pengalaman bernegara lebih menentukan paradigma sistem sosial politik suatu komunitas dibanding variabel keyakinan.

Demokrasi yang berkembang di Barat terbentuk oleh sejarah panjang bahkan konon berakar sejak era Yunani kuno. Sejak *renaissance*, demokrasi mengemuka sebagai impian Barat yang dimulai dengan sekulerisasi, pemisahan agama dari negara, dan bukan dengan menggali nilai-nilai normatif Protestanisme dan Katolikisme. Demokrasi Barat berproses tahap demi tahap sejalan dengan dinamika pola pikir, kondisi sosial, ekonomi, intelektual dan kultural masyarakatnya. Dapat dicermati pengalaman demokrasi Barat, di mana kesetaraan dan kesamaan akses bagi setiap elemen sosial, terutama wanita dan warga kulit hitam, belum dapat dikatakan lama. Tidak sejak mula sistem demokrasi diterapkan, wanita dan warga kulit hitam memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki kulit putih.[14]

---

[12] Sementara Huntington menyatakan *Religion is a central defining characteristic of civilization…… Christianity, Islam, Hinduism, and Confucianism - are associated with major civilization*. Huntington, ***The Clash of Civilizations...***, p. 47.

[13] Marwah Daud Ibrahim mengutip pernyataan Toynbee, bahwa civilization is a movement and not a condition, a voyage and both a harbor. Marwah Daud Ibrahim, "Benturan atau Pengkayaan Peradaban" dalam ***Jurnal Ulumul Qur'an***, No. 5, Vil. IV, 1993, p. 3.

[14] Demokrasi di Barat dalam arti persamaan hak tidak berlangsung sekali jadi, melainkan ditempuh melalui proses panjang. Meski sudah beberapa abad menerapkan sistem parlementer, namun baru 1918 wanita di Inggris memperoleh hak memilih. Di tempat lain, termasuk Amerika Serikat bahkan lebih lambat dari itu. Donald Kagan, Steven Ozment dan Frank M. Turner, ***The Western Heritage***, Volume II, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), p. 819-20.

Dunia Islam, lebih khusus lagi Indonesia, juga tidak kering dari pemikiran dan praktik tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Apresiasi masyarakat Islam atas demokrasi tidak kalah besar dibanding komunitas lain. Bahkan secara diskursif, sangat sedikit pemikiran Islam yang menolak demokrasi, meski sebagian penerimaan tersebut disertai syarat-syarat tertentu. Respon tersebut mengemuka bukan sebagai akibat ketidakberdayaan menahan imperasi sosio intelektual seperti pengalaman agama Nasrani era *renaissance*. Diskursus demokrasi di kalangan pemikir muslim bahkan banyak berangkat dengan mengedepankan sudut pandang keagamaanIslam, meski demokrasi tidak dikenal dalam terminologi Islam.[15]

Berbagai paradoks tentu saja dijumpai dalam konteks ini, mengingat Islam dan juga agama apapun secara spesifik memang bukan hadir untuk merancang sebuah sistem tatanan sosial politik. Problem penerapan demokrasi perlu mengelaborasi pendekatan ide dan kultural. Bukan berarti hal ini menafikan unsur ajaran agama sebagai variabel yang menentukan paradigma demokrasi, sebab agama adalah bagian integral dari keutuhan aspek pembentuk realitas kemasyarakatan suatu negara.

Paradigma demokrasi yang terbentuk di suatu negara perlu dipahami dengan terlebih dahulu memahami realitas sosial, ekonomi, intelektual, kultural serta dinamika sosial secara lebih luas dan utuh, sebab demokrasi bukan semata persoalan prosedur mekanistik. Lipset, sebagaimana diulas Wibowo, memiliki pandangan lebih realistis dengan melihat bahwa untuk menuju demokrasi diperlukan beberapa prasyarat, seperti tingkat GNP, tingkat melek huruf serta

---

[15]Banyak tokoh intelektual muslim Indonesia dengan berbagai telaah berpendapat bahwa Islam kompatabel dengan demokrasi. Nurcholish Madjid misalnya, dengan banyak mengutip Robert N. Bellah dan Ernest Gellner mengisyaratkan adanya bibit-bibit demokrasi sejak masa nabi, di samping dalam ajaran Islam sendiri. Nurcholish Madjid "Iman dan Perwujudan Masyarakat yang Adil, Terbuka serta Demokratis" dalam Madjid, ***Islam Doktrin...***, p. 113-5.

tingkat jaminan kesehatan sosial. Hal itu mengisyaratkan bahwa problem-problem penerapan demokrasi perlu dipahami secara lebih kontekstual, bukan normatif.[16]

Problematika penerapan demokrasi perlu didahului dengan pemahaman terhadap paradigma dan problematika kultural suatu kawasan di mana paham dan sistem tersebut diterapkan. Asumsinya, layaknya sebuah varietas tanaman, demokrasi memerlukan atmosfir dan iklim sosial, kultural dan filosofis yang sesuai. Penerapan demokrasi di tengah paham dan nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan lingkungan idealnya berpotensi mengantarkan pada hasil yang berbeda, bahkan bertolak-belakang dengan tatanan dan nilai-nilai demokrasi seperti selama ini terjadi.

Tema ini dipilih didasarkan pada kenyataan bahwa di dunia Islam demokrasi merupakan persoalan problematik. Indonesia layak dijadikan pilihan studi kasus mengingat keberadaannya sebagai bagian dari dunia Islam yang berpenduduk mayoritas muslim, bahkan dengan jumlah penganut terbesar di dunia.[17] Sebagaimana kawasan dunia Islam lain, Indonesia juga mengalami berbagai problematika dalam penerapan demokrasi. Indonesia masih berada dalam masa transisi panjang demokrasi. Untuk membantu keluar dari masalah tersebut diperlukan pemahaman berbagai problem demokratisasi di Indonesia secara holistik.

Banyak pihak yakin Indonesia memiliki kesempatan lebih terbuka untuk menjadi negara demokratis setelah terlepas dari dua era hegemonik di bawah kepemimpinan kharismati, Soekarno dan Soeharto. Bukan berarti Indonesia telah menemukan jalan lapang

---

[16] I. Wibowo "Transisi ke Demokrasi (1)" dalam ***Basis***, Nomor 01-02, tahun ke-48 Januari-Februari 1999, p. 55. Bennedict R.O.G. Anderson, ***Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia***, terj. Revianto Budi Santosa, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), p. 60.

[17] Di samping itu, sebenarnya kronika Islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal sejarah Islam di kawasan Hijaz. Taufik Abdullah, eds.., ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam***, Jilid 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), p. 6-9.

untuk mewujudkan sistem sosial dan politik yang demokratis, sebab problem-problem baru yang dihadapi setelah era kepemimpinan keduanya tidak kalah pelik. Tipologi keislaman Indonesia yang lebih apresiatif dibanding kawasan lain dunia Islam menjadikan Indonesia memiliki potensi lebih terbuka untuk berkembang menjadi negara demokrasi besar. Ini tentu saja baru akan terwujud bila penerapan demokrasi ditunjang dengan bekal pemahaman problem-problem demokrasi secara memadai.[18]

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji perjalanan kesejarahan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga akhir pemerintahan Orde Baru. Penelusuran tersebut didasarkan atas latar sejarah dan interelasinya dengan situasi nasional dan global yang melingkupinya. Masa Soekarno dan Soeharto merupakan momentum kegagalan demokrasi di Indonesia. Apresiasi yang besar terhadap demokrasi pada masyarakat bangsa ini era Soekarno hanya berbuah instabilitas sosial dan politik. Penerapan demokrasi membuka ruang bagi pergulatan ideologis, intrik politik, ancaman disitegrasi, kemerosotan ekonomi dan hilangnya kepercayaan pada demokrasi. Badan konstituante 1955 yang dalam catatan sejarah terbentuk melalui proses pemilihan umum yang demokratis, hanya menghasilkan kebuntuan (*deadlock*) dan konflik politik yang tidak berkesudahan.

Kekecewaan Soekarno dan Soeharto pada demokrasi bahkan mengantarkan keduanya pada kesimpulan bahwa demokrasi dalam pengertiannya yang liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mereka berupaya membangun model demokrasi yang

---

[18] Pandangan ini secara normatif didasarkan atas beberapa konsepsi Islam yang dinilai sebagai pondasi bagi prinsip-prinsip demokrasi, seperti *syura*, *ijma'* (konsensus), *ijtihad* (kemerdekaan berfikir), *tasamuh* (toleransi) dan *tanawwu'* (pluralitas). Di samping itu, relalitas politik umat Islam Indonesia dipenuhi tokoh-tokoh yang *apreciate* terhadap demokrasi. Hisanori Kato "The Reality and Posibility of Democracy in Islam" dalam ***Profetika, Jurnal Studi Islam***, Vol 2 No 1, Januari 2000, p. 3-17.

diklaim sejalan dengan kondisi Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, tetapi justeru melahirkan totalitarianisme panjang dengan mengatasnamakan demokrasi. Rejim Orde Baru yang semula menempatkan diri sebagai penyempuran model Demokrasi Terpimpin, dengan melakukan deideologisasinya (*zonder ideology*), depolitisasi, penerapan azas tunggal serta kepemimpinan represif, beberapa waktu memang berhasil mewujudkan pemerintahan yang stabil, tetapi justeru jatuh oleh gerakan demokratisasi.[19]

Demokrasi euforistik era B. J. Habibie bahkan nyaris membawa negeri ini pada titik balik disintegrasi. Lembaga legislatif dan pemerintahan Abdurrahman Wahid, hasil pemilihan umum 1999 yang dinilai sebagai produk demokrasi berkualitas setara pemilu 1955, juga tidak serta-merta berhasil membuat kondisi sosial dan politik nasional menjadi lebih baik. Kesemrawutan tatanan sosial politik, kesewenang-wenangan dan berbagai bentuk penyelewengan berlangsung tanpa kontrol. Lembaga legislatif dan partai politik sebagai pilar utama demokrasi tidak menunjukkan representasinya atas kepentingan rakyat selain sekedar wahana kepentingan kelompok tertentu. [20]

---

[19] Meski mengusung nama demokrasi, namun praktik demokrasi di Indonesia selama dua periode kepemimpinan, Soekarno dan Soeharto, belum mencerminkan diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya, yang seharusnya bercirikan liberal. Syamsuddin Haris, ***Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman,*** (Jakarta: LP3ES, 1994), p. 187-8. Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto banyak dipengaruhi karakteristik kepemimpinan Jawa di samping sisa-sisa sistem kolonial Belanda. Basuki Ismael "Demokrasi di Indonesia" dalam ***Basis***, edisi Juni 1992, p. 202-9. Simak pula Dadang Juliantara, ***Negara Demokrasi untuk Indonesia***, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), p. 60-3, dan 72-6.

[20] Situasi ini seolah membenarkan keraguan atas demokrasi, di mana demokrasi hanya mewakili kelompok kepentingan yang terlalu kecil di banding anggota komunitas bangsa. Saiful Arif, ***Ilusi Demokrasi***, (Jakarta: Desantara Utama, 2003), p. 176-7. Di tempat lain, Treanor mengajukan data-data yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak memberikan jaminan perbaikan tatanan dan kesejahteraan sosial.Paul Treanor, ***Kebohongan Demokrasi***, terj. Imron Rosyadi dan Muhammad Nastain, (Yogyakarta: Institut Tafsir Wacana, 2001), p. 8-10.

Partai politik dan lembaga legislatif yang menjadi tumpuan perbaikan tatanan sosial politik dan kesejahteraan, justeru menjadi masalah dan beban baru bangsa. Dengan *buged* pembiayaan yang fantastis, lembaga legislatif tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan kondisi negara. Dari seluruh partai politik yang ada, nyaris tidak ditemukan perbedaan visi dan misi pembelaan, kecuali berbeda nama tetapi satu orientasi, yaitu kekuasaan. Fungsi legislasi dan kontrol bergeser menjadi alat kepentingan. Lebih parah lagi, lembaga legislatif menjadi lembaga yang sangat memerlukan kontrol dibanding sebaliknya. Tidak tampak adanya korelasi antara partai politik dengan keterwakilan kepentingan rakyat. Sebagai penyangga demokrasi, partai politik belum berhasil memainkan fungsi idealnya, selain hanya sebagai wahana meraih kekuasaan.

Selain itu, problem-problem negara yang semula terpusat di puncak kekuasaan meluas ke berbagai penjuru daerah yang tentunya semakin tidak mudah diatasi. Otonomi daerah yang ditujukan untuk mendorong kemandirian dan pemerataan sekaligus membuka peluang timbulnya berbagai penyelewengan yang merata ke berbagai daerah tanpa kontrol memadai. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan menonjolnya pergulatan kepentingan kelompok serta menurunnya kepercayaan masyarakat pada negara.[21]

Demokrasi seolah tidak sejalan dengan kultur sosial dan politik masyarakat Indonesia, meski masyarakat bangsa ini menginginkannya. Bagai buah simalakama, tuntutan untuk menerapkan demokrasi sejati tak dapat dihentikan, tetapi

[21] Puthut Eko Haryanto "Ilusi Demokrasi Semu" dalam ***Basis***, Nomor 05-06 Tahun ke-48, Mei-Juni 1999, p. 24-6. Demokrasi bahkan masih dalam keadaan krisis, rapuh dan terancam. Ancaman tersisa dari demokrasi di antaranya nasionalisme fanatik dan fundamentalisme agama. Di sisi lain negara demokrasi baru, atau yang sedang mengalami transisi demokrasi, seperti Rusia, dan mungkin juga Indonesia, menghadapi keraguan dari warga negaranya sendiri. Masih menjadi tanda tanya besar, apakah pemerintahan yang terbentuk melalui proses yang demokratis mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan, kriminalitas serta berbagai bentuk krisis dan penyelewengan. Dahl, ***Perihal Demokrasi***, p. 2.

menerapkannya hanya mengantarkan pada beragam permasalahan, mulai dari konflik, perpecahan dan kegagalan mewujudkan kesejahteraan.

Pendekatan dan Isi Buku Ini

Pemahaman praktik demokrasi dikaitkan dengan kondisi sosio-kultural dan politik pada masing-masing masa, diharapkan dapat membantu rekonstruksi paradigma dan memahami problematika demokratisasi yang dihadapi. Pengkhususan Indonesia sebagai studi kasus juga dilakukan dengan memperhitungkan perbedaan dan keragaman kondisi sosial, ekonomi, intelektual dan kultural negara-negara di dunia Islam yang tidak mudah digeneralisasikan. Mengingat keragaman tersebut, maka kesimpulan yang dapat dicapai melalui penelitian dengan kasus Indonesia belum tentu mewakili kondisi kawasan dunia Islam secara keseluruhan. Meski demikian, berbagai temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti dalam memahami problematika yang sama di kawasan lain.

Signifikansi utama kajian ini adalah dalam rangka memahami persoalan yang menyebabkan penyimpangan hasil penerapan demokrasi di Indonesia, dari yang seharusnya. Mengingat Islam merupakan agama mayoritas di negeri ini, maka penelitian dalam buku ini diarahkan untuk memahami pengaruh Islam dalam pembentukan kultur sosial politik masyarakat Indonesia.

Buku ini merupakan hasil kajian sejarah yang menelaah perjalanan suatu bangsa Indonesia sampai era Orde Baru. Sumber data utama kajian ini adalah buku-buku yang mengupas sejarah Indonesia yang sudah cukup banyak ditulis sejarawan, seperti karya Poespoprodjo dan Notosusanto, Kahin, Feith, Liddle, Anderson, Hefner, Daniel S. Lev, Kartodirdjo, Alfian, Afan Gaffar dan Mohtar Mas'oed. Di samping itu, penulis tidak mengabaikan perkembangan mutakhir Indonesia yang mungkin belum terbukukan dalam tulisan ilmiah, yang masih mungkin diperoleh melalui berbagai media massa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yang ditujukan untuk menelusuri sejarah penerapan demokrasi di Indonesia secara *annual*. Pendekatan historis juga ditujukan untuk memahami dimensi historisitas yang melingkupi pelaku sejarah yang mempengaruhi terbentuknya pandangan hidup dan pilihan sikap dan tindakan sesuai realitas kesejarahan yang dihadapi. Setiap kurun diasumsikan memberikan kontribusi bagi terjadinya perbedaan atmosfir sosial politik yang mempengaruhi pandangan hidup, cara pandang, sikap dan tindak pelaku terhadap realitas sosial politik.

Data-data dan informasi yang masuk ditelaah secara strukturatif,[22] yang ditujukan untuk membangun pemahaman konteks secara menyeluruh dan utuh, termasuk variabel agama dan pemahamannya, serta tidak terkecuali, atmosfir sosial politik regional dan internasional yang melingkupinya. Peneliti berusaha memahami konteks kesejarahan secara utuh dan menghindari terjadinya berbagai distorsi. Keutuhan pemahaman atas konteks tersebut, dalam beberapa bagian, dibandingkan dengan konteks yang melingkupi terbentuknya demokrasi di negara lain, terutama Barat dan beberapa kawasan dunia lainnya. Dari sana diharapkan dapat ditemukan sisi-sisi kontekstual yang melahirkan perbedaan hasil penerapan demokrasi di Indonesia dengan yang seharusnya.

Analisis data penelitian ini tidak menekankan aspek pelaku sebagaimana umumnya kajian politik, tetapi sekaligus mempertimbangkan struktur yang melingkupi, baik dalam arti struktur yang dihadapi pelaku, maupun yang melingkupi keberadaannya. Karena itu, penelaahan atas realitas kesejarahan demokrasi di Indonesia akan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu

---

[22] Teori strukturasi dibangun berdasarkan prinsip dualitas antara struktur dan pelaku, di mana dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses di mana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Struktur sejajar dengan *lague* (yang mengatasi ruang dan waktu) sedangkan praktik sosial sebagai *parole* (dalam ruang dan waktu). B. Henry Priyono, ***Anthony Giddens: Suatu Pengantar***, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), p. 19.

konteks kesejarahan, pelaku, dan realitas politik lokal. Atmosfir kesejarahan yang melingkupi dikaji baik dalam hal perkembangan wacana, imperasi sosio kultural dan intelektual maupun peran kekuatan dominan dunia dalam menyebarkan paham demokrasi. Pelaku sejarah dipahami sebagai tokoh yang menentukan sejarah yang dikaitkan dengan realitas politik dalam negeri. Ketiganya dipahami sebagai sebuah keterkaitan yang saling mempengaruhi.

Isi buku ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama menyajikan problematika akademik dan urgensi penelitian, sasaran yang akan dicapai dan pilihan metode penelitian yang digunakan. Bagian berikutnya menyajikan hasil penelusuran kultur sosial politik asli nusantara hingga memasuki masa kemerdekaan dan saat mengapresiasi demokrasi. Untuk itu, bagian ini akan berusaha menyajikan penelusuran tentang jati diri masyarakat bangsa Indonesia, situasi yang mengiringi dan penerimaan mereka terhadap paham dan sistem demokrasi.

Bagian berikutnya menyajikan pemahaman mengenai problem-problem yang muncul dalam penerapan demokrasi di Indonesia masa Soekarno dan Suharto. Kondisi dalam negeri, situasi internasional maupun respon para pemegang kebijakan yang diperkirakan mempengaruhi terbangunnya paradigma demokrasi pada kurun tersebut ditelaah secara menyeluruh. Dari sana diharapkan dapat dipahami paradigma demokrasi yang terbentuk sesuai kultur dan kesejarahan pada masanya.

Bagian berikutnya menyajikan ulasan menyeluruh terhadap problem-problem implementasi demokrasi dari setiap masa pemerintahan sesuai batasan penelitian, sebagai upaya membantu memahami benang merah persoalan demokrasi di Indonesia. Bagian ini disusul bagian penutup yang merupakan pensarian hasil bahasan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut menjadi pijakan dalam pengajuan berbagai rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian.

DEMOKRASI DALAM WACANA POLITIK ISLAM

A. Demokrasi: Filosofi dan Kesejarahannya

Istilah, *demokrasi* terbentuk dari paduan kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratien* yang berarti memerintah. Makna etimologis demokrasi sering dinyatakan dengan "*government or rule by the people*", "pemerintahan oleh rakyat", "rakyat berkuasa" atau "rakyat memerintah". Untuk maksud yang sama, bangsa Romawi menggunakan istilah republik, yang berarti kembali ke rakyat. Meski Madisson membedakan istilah demokrasi dan republik, tapi Dahl melihat tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya mengingat argumen Madisson kurang didukung informasi kesejarahan memadai. Dahl melihat perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut tidak tampak selain dari segi asal-usul kedua istilah.[1]

Demokrasi didefinisikan secara berbeda-beda, tapi ada beberapa pengertian mendasar yang disepakati bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan, di mana setiap anggota masyarakat memperoleh hak yang sama, sebagai pemegang kekuasaan, pembuat,

---

[1] Miriam Budiarjo, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 50. Simak juga Dahl, p. 22-3.

penentu serta pengontrol pelaksanaan kebijakan tertinggi. Keterlibatan tersebut dirupakan melalui keikutsertaan dalam pembentukan, pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Suara mayoritas diposisikan sebagai manifestasi kehendak kebanyakan warga negara.[2]

Demokrasi dapat dinyatakan sebagai kebalikan sistem monarkhi absolut, oligarki, aristokrasi atau otokrasi, yang menempatkan hak menentukan tata nilai terletak pada tangan satu atau beberapa orang. Karenanya, demokrasi secara sederhana juga sering diungkapkan dengan pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), oleh rakyat (*government by the people*) dan untuk rakyat (*government for the people*).[3]

Demokrasi muncul karena adanya kebutuhan dan hak setiap individu untuk turut serta membentuk tata nilai yang mengatur diri mereka sendiri. Demokrasi adalah perwujudkan kesadaran humanistik yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta intelektual. Demokrasi menggugat hak-hak eksklusif kelompok-kelompok tertentu sebagai pemegang otoritas dalam menentukan berbagai kebijakan dan tata aturan yang diwariskan secara turun-temurun, meski mengatasnamakan Tuhan.[4]

Pemikiran ini disinyalir merupakan kelanjutan tradisi berfikir Yunani kuno yang mengedepankan otoritas rasio dan mengesampingkan mitos ataupun tradisi. Meski secara diskursif para filosof, seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles memandang demokrasi berpotensi menimbulkan anarkhisme, namun tradisi Yunani kala itu

[2] Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, ***Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani***, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), p. 161-2.

[3] ***Ibid.***, p. 163-6.

[4] John Markoff, ***Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik***, terj. Ari Setyaningrum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 73-4.

sudah terbiasa dengan pola pikir rasional dan pragmatis. Manusia merumuskan sendiri tata nilai melalui *power sharing* di lembaga perwakilan rakyat (*ecclesia*). Hukum dan tata nilai yang dibuat manusia selanjutnya memiliki kekuasaan di atas manusia. Ini memungkinkan ketaatan hukum tumbuh bukan karena keterpaksaan, rasa takut atau kepasrahan, melainkan kesadaran swadisiplin.[5]

Pemikiran dan tradisi ini sempat mengalami kemandegan ketika kebebasan berfikir didominasi oleh Gereja selama abad pertengahan. Gerakan *renaissance* dan *Aufklaerung* di Eropa membangkitkan kembali tradisi humanisme Yunani, di mana pemikiran murni menjangkau keluasan ruang dan kedalaman waktu. Humanisme menekankan pada kebutuhan manusia akan kesejahteraan yang bersifat kekinian, di dunia. Penghargaan terhadap rasionalitias juga berarti penghargaan terhadap hak-hak individu. Dalam diskursus filsafat, humanisme memandang individu rasional sebagai nilai tertinggi dan menentukan dalam membangun kreativitas dan nilai-nilai moralnya secara rasional, bahkan tanpa merujuk pada pandangan-pandangan adikodrati.

Seiring melemahnya kesakralan raja, revolusi politik Eropa khususnya Perancis dan Inggris yang berpadu dengan tuntutan akan revolusi sosial dan ekonomi, merebak dengan mengetengahkan jargon *liberté*, *egalité* dan *fraternité*. Kaum penentang raja atau *monarchomacha* mempertegas konsep kedaulatan rakyat dengan argumen-argumen

---

[5] Yunani memulai perkembangan yang sangat menakjubkan, yang sering disebut dengan keajaiban Yunani (*Greek Miracle*), ditandai dengan lahirnya para filosof besar. Masyarakat Yunani sudah mapan dalam penataan sistem politik yang ditandai dengan beberapa ciri: otonomi, swasembada dan kemerdekaan. Kees Bertens, ***Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles***, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), p. 14-21. Pola kebudayaan semacam itu kemudian dilanjutkan bangsa Romawi yang menguasai hampir seluruh Eropa, Asia Minor, Babilonia, Mesir, bahkan daratan Indus sekitar satu milenial. Jan M. Romein, ***Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum***, (Bandung- Djakarta -Amsterdan: Ganaco NV, 1956), p. 27-8.

duniawi, dan mengesampingkan dogma agama. Dampak lanjutnya, rakyat lebih membutuhkan parlemen sebagai agen rakyat dari pada raja yang mengklaim dirinya sebagai agen Tuhan. Tuntutan tersebut diejawantahkan dengan sekularisasi yang mengakhiri kekuasaan gereja atas negara dengan adagium "berikan kepada kaisar hak kaisar, dan berikan kepada Tuhan hak Tuhan".[6]

Kesadaran ini pada tataran komunal melahirkan keinginan berbagai bangsa untuk membangun komunitas negara dan melahirkan republik-republik kecil di Eropa. Kesadaran komunal tersebut mengalami pengentalan atas dasar ikatan kepentingan yang kemudian melahirkan paham nasionalisme. Paham ini meruntuhkan dominasi feodalisme yang kokoh di Eropa sejak abad ke-8 dan menumbuhkan tatanan baru yang memungkinkan aktualisasi hak-hak individu. Tatanan baru tersebut dikenal dengan istilah demokrasi, yang pada awalnya masih bersifat elitis, ajang kelompok elite sosial dan ekonomi yang memiliki nilai tawar tinggi di hadapan penguasa feodal.[7]

Demokrasi sebagai konsep terus berkembang seiring perjalanan kesejarahan manusia. Perang dunia yang berlanjut dengan perang dingin dengan berbagai fragmentasi pertarungan ideologis dan kepentingan politiknya menyuguhkan perubahan baru dalam hal konsep demokrasi. Runtuhnya komunisme yang sering dinilai sebagai kemenangan

---

[6] Arief Budiman, ***Ilmu Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi***, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 25-9. Simak pula Markoff, ***Gelombang Demokrasi Dunia...***, p. 82-4. Meski sekulerisasi berarti pemisahan antara urusan dunia dan keakheratan, namun dalam kebijakan Barat, terutama ketika berhadapan dengan bangsa lain, motivasi keagamaan belum dapat dihilangkan hingga menjelang abad 21 sekalipun. Sentimen antar sekte Nasrani sendiri bahkan sempat berujung pada pertikaian dan perang antar sekte semasa *religious war*. Donald Kagan, Steven Ozment dan Frank M. Turner, ***The Western Heritage***, Volume I, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), p. 405-429. Simak pula ulasan Hoodbhoy, ***Ikhtiar...***, p. 41-2.

[7] John P. McKay, Benneth D. Hill dan John Buckler, eds., ***A History of World Societies***, (Boston, et.all.: Houghton Mifflin Company, t.t.), p. 87-8.

demokrasi liberal tidak serta-merta menjadi penghujung akhir kesejarahan (*the end of history*) demokrasi seperti tesiss Fukuyama, sebab munculnya berbagai sintesa dan antitesa baru senantiasa terbuka.

B. Tipologi Demokrasi

Memasuki era modern, demokrasi memasuki fase perkembangan konsep secara ambigu, dalam arti terbuka pada munculnya berbagai interpretasi. Kemenangan atas rejim-rejim fasis pada masa perang dunia II membuka kesempatan bagi kedua pemenang, rejim liberal dan rejim komunis, untuk menterjemahkan demokrasi menurut versi masing-masing, hingga melahirkan dua aliran besar demokrasi. Keduanya adalah demokrasi liberal atau konstitusional (*constitutional democracy*) dan yang lain dikenal dengan sebutan demokrasi saja.[8]

Kedua model demokrasi pada dasarnya merupakan demokrasi konstitusional, tapi perbedaan pola penerapan dan ekses yang ditimbulkan menjadikan keduanya sebagai istilah dibedakan satu sama lain. Demokrasi konstitusional identik dengan sistem sosial politik negara-negara sekutu Amerika Serikat yang bercorak liberal-kapitalis. Sementara itu, sebutan demokrasi saja identik dengan sistem sosial politik negara-negara blok komunis yang berpijak pada pandangan Marxis-Leninis. Dari sini konsep demokrasi masih berkembang lagi kepada interpretasi yang lebih luas sesuai kondisi negara dan pemerintahan, hingga muncul istilah-istilah demokrasi lain, seperti demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Sovyet dan sebagainya.[9]

Demokrasi konstitusional yang didasarkan pada nilai-nilai liberal-kapitalis menawarkan tatanan sosial politik yang berdasarkan hukum (*rule of law*) dan dibangun berdasarkan pemilihan umum yang

---

[8] Budiarjo, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, p. 50.

[9] ***Ibid.***, p. 51.

bebas. Demokrasi konstitusional menuntut beberapa prinsip dasar, berupa konstitusionalisme, asas mayoritas, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggung jawab, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan jaminan kwajiban sipil. Demokrasi berkembang lagi menjadi sebuah sistem politik dan ketatanegaraan yang menjanjikan akses yang sama pada setiap individu untuk menyatakan pendapat dan mengakses kekuasaan. Demokrasi diselenggarakan dengan sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui wakil-wakil masyarakat yang dipilih secara berkala, bebas dan melalui persaingan terbuka untuk meraih kekuasaan politik.[10]

Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan tidak dibenarkan berbuat sewenang-wenang pada warga negara. Batas-batas kekuasaan tersebut tercantum dalam konstitusi. Kekuasaan masih dibagi-bagi lagi kepada beberapa badan-badan independen, yang ditujukan untuk memperkecil kemungkinan disalahgunakan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini di Eropa kontinental dikenal dengan istilah negara hukum (*Rechsstaaat*) dan di Anglo Saxon dikenal dengan istilah *Rule of law*.[11]

Seiring perjalanan kesejarahan, secara evolutif konsep *rule of law* juga mengalami perubahan, terutama didorong oleh perkembangan sosial ekonomi dan politik di berbagai negara. Ekses-ekses kapitalisme dengan kuatnya industrialisasi serta kemenangan kelompok-kelompok sosialis di beberapa negara Eropa, mengubah pandangan bahwa larangan campur tangan pemerintah dalam urusan warga negara berubah menjadi kebutuhan akan keharusan pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negara. Konsep negara yang semula hanya sebagai penjaga malam (*Nachtwächtersstaat*) atas warga negaranya berubah menjadi negara

[10] B.N. Marbun, ***Kamus Politik***, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), p. 134-5.

[11] Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, ***Pendidikan...***, p. 173.

kesejahteraan (*Welfare State*) atau negara pelayan masyarakat (*Social Service State*). Demokrasi tidak lagi hanya berhenti pada persoalan politik melainkan meluas pada berbagai aspek, terutama distribusi kesejahteraan ekonomi.[12]

Dalam perkembangannya, *International Commission of Justice* menetapkan beberapa kriteria atau prasyarat agar sebuah pemerintahan dapat dikategorikan demokratis. Pertama, negara demokratis berarti harus mampu memberikan perlindungan konstitusional. Selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin. Kedua, negara memiliki badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*). Seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, demokrasi membutuhkan terselenggaranya pemilihan umum yang bebas. Keempat, demokrasi menuntut jaminan kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Kelima, demokrasi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi dan beroposisi; dan keenam, adalah perlunya pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) untuk menjamin terbentuknya masyarakat yang beradab (*civilized*).[13]

Sementara itu, negara-negara Blok komunis memiliki konsepsi demokrasi dengan karakteristik yang berbeda dengan berpijak pada pemikiran Marxisme dan Leninisme. Pemikiran Marx dapat dinyatakan sebagai antitesa atas sistem kapitalis yang dianggap menindas dan merendahkan martabat manusia. Kaum proletar harus

---

[12]Budiarjo, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, p. 59.

[13]Sebelumnya konsepsi *Rechsstaat* menuntut adanya jaminan (1) Hak-hak asasi manusia, (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Trias Politika, (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan dan (4) peradilan administratif dalam mengatasi perselisihan. Sedangkan *Rule of Law* menuntut dipenuhinya jaminan (1) Supremasi hukum (2) kesetaraan di hadapan hukum dan (3) hak-hak asasi manusia. Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, ***Pendidikan...***, p. 174-5.

merebut kekuasaan negara agar dapat membangun diktatur proletariat. Perjuangan kaum proletar merebut kekuasaan melalui revolusi disebut sebagai perjuangan demokrasi (*the battle of democracy*). Dalam hal ini, demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kelas proletar berkuasa menjalankan kekuasaan atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Diktatur proletar sendiri oleh Marx ditempatkan sebagai fase pendahuluan sebelum tercapainya penghapusan negara (*whithering away the state*) dan masyarakat tanpa kelas (*classless society*) dalam jangka panjang.[14]

Setelah faksi yang berpijak pada pemikiran Marx mampu merebut kekuasaan, Lenin memperkenalkan konsep *vanguard*. Kesadaran revolusioner atau kesadaran kelas menuntut adanya kelompok elit proletar yang berperan sebagai penggerak, yang dikenal dengan politbiro. Kelompok inilah penguasa dominan dalam demokrasi Marxis-Leninis. Konsentrasi kekuasaan pada politbiro dalam perkembangannya melahirkan despotisme, sebab pembentukan dan pengawasan politbiro tidak didasarkan atas kehendak rakyat, melainkan oleh pihak yang merasa lebih tahu mengelola negara. Ini adalah titik balik yang menjadikan demokrasi Marxis-Leninis kehilangan watak demokratisnya. Demokrasi Marxis-Leninis berubah elitis, bahkan menyamai model aristokrasi dalam bentuk dan nama berbeda. Kehadiran elit proletar menjadikan partisipasi warga negara hilang, sebab pemerintah diposisikan sebagai pihak yang paling tahu yang terbaik bagi warga negaranya.[15]

Meski demikian, pemikiran Marxis-Leninis secara dialektis mempengaruhi perkembangan demokrasi yang bersifat liberal-kapitalis dengan lahirnya *welfare state* sebagai sintesis. Kegagalan demokrasi sosial (*social democracy*) lama dengan wajah komunisme,

---

[14]Ahmad Suhelmi, ***Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan***, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), p. 309-10.

[15]***Ibid.***, p. 311-4.

kembali bangkit dalam bentuk baru yang bercirikan anti kekerasan tetapi tetap menawarkan pandangan-pandangan sosialis. Demokrasi sosial berusaha meluruskan kembali pemikiran sosialisme yang pernah dipergunakan untuk kepentingan diktatur-despotik pada pemerintahan komunis. Di Inggris dan kawasan Eropa kontinental, demokrasi sosial menampilkan diri dengan wajah kiri tengah (*center-left*). [16]

Seperti halnya demokrasi liberal-kapitalis, demokrasi sosial juga berangkat dari akumulasi pandangan hidup dan kesejarahan Barat. Menutut Lichtheim, sebagaimana dikutip Wright dan Eatwall, demokrasi sosial berangkat dari perpaduan trinitas: revolusi politik Perancis, revolusi industri Inggris dan filsafat Hegelian Jerman yang menjadi asal-usul sosialisme. Konsep sosial dan politik ini semula ditujukan untuk membangun sebuah tatanan politik dan sosial yang menjanjikan kebebasan di berbagai bidang kehidupan melalui solidaritas dan pengorganisasian masyarakat, tapi kemudian direduksi kepada komunisme yang justeru menghasilkan situasi yang jauh dari nilai-nilai dasar demokrasi. [17]

Kompatabilitas[18] demokrasi di Indonesia tentu saja didasarkan atas konsep demokrasi konstitusional Barat yang bercorak liberal, yang telah mengapresiasi pandangan sosialisme tersebut. Hal ini

---

[16] Thomas Meyer, ***Sosial Demokrasi dalamTeori dan Praktik, Pengalaman Kaum Sosial Demokrat Jerman***, terjemahan Imam Yudotomo, (Yogyakarta: Central For Social Democratic Studies, 2003), p. 217-219. Giddens, ***The Thrith Way...***, p. 1-2.

[17] Roger Eatwall dan Anthony Wright (eds.), ***Ideologi Politik Kontemporer***, terj. R. M. Ali, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), p. 108-13.

[18] Istilah *kompatabilitas* merupakan bentuk pengindonesiaan dari bahasa Inggris *compatability*. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *compati*, penggabungan dari *com* yang berarti dengan, dan *pati* yang berarti menanggung, menderita. Dalam kamus filsafat, istilah ini bermakna mampu hidup bersama secara harmonis. Di samping itu istilah kompatabilitas juga dimaknai dengan pernyataan (makna, ide) yang mampu dihubungkan secara logis dan/atau konseptual secara konsisten. Tim Penulis Rosda, ***Kamus Filsafat*** (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), p. 54.

didasarkan atas kenyataan bahwa demokrasi liberal Barat dapat dikatakan sebagai *prototype* paling berhasil, paling tidak lebih bertahan dibanding *rival* ideologisnya, demokrasi Marxis-Lininis. Kritik dan sorotan atas praktik demokrasi di berbagai belahan dunia juga banyak didasarkan atas penilaian dan parameter demokrasi versi liberal Barat. Di sisi lain, kecenderungan mutakhir di Indonesia dan negara-negara berkembang tampaknya lebih mengarah pada demokrasi konstitusional yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan dan cara hidup Barat, berupa individualisme, kapitalisme dan liberalisme.[19]

C. Demokrasi dalam Wacana Keislaman

Meski Islam dari segi ajaran paling dekat dengan demokrasi dibanding dua agama monoteis lain, Yahudi dan Kristen, tapi respon dunia Islam terhadap demokrasi relatif beragam. Sebagian menerima demokrasi secara penuh. Islam dalam dirinya sudah demokratis, karenanya tidak ada yang perlu dipertentangkan dengan demokrasi. Sebagian lagi dengan berbagai dalih menolak demokrasi, dengan pandangan pesimistik maupun dibumbui justifikasi keagamaan. Sebagian lagi menerima demokrasi secara bersyarat, di mana diakui bahwa dalam hal-hal tertentu demokrasi selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi tidak dalam segala hal.[20]

Ini dapat dipahami dikarenakan demokrasi memang berkembang lepas dari pengalaman kesejarahan Islam. Demokrasi

---

[19]Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, ***Pendidikan...***, p. 192. Liberalisme dan demokrasi memiliki kaitan erat, meski keduanya merupakan konsep yang terpisah. Lord Bryce sebagaimana dikutip Fukuyama membatasi definisi demokrasi ke dalam tiga aspek hak-hak sipil , yaitu: pembebasan dari kontrol negara, hak beragama dan hak politik. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 73-4.

[20]Riza Sihbudi", Demokrasi dalam Pandangan Komunitas Islam: Kasus Timur Tengah" dalam ***Jurnal Ilmu Politik***, no. 12, 1993, p. 36-9.

merupakan produk pemikiran Barat, sebuah impian sebuah komunitas bangsa untuk berusaha keluar dari penderitaan panjang yang menyejarah. Hal yang sama kurang dirasakan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama di Asia, meski sama-sama pernah mengalami era pemerintahan monarkhi dan struktur sosial herarkhis. Ekspedisi-ekspedisi bangsa Eropa ke kawasan Asia dan Amerika mencatat bahwa bentuk-bentuk represi dan despotisme yang dilakukan raja dan kalangan aristokrat sebagaimana dialami bangsa Eropa lebih terasa menyakitkan dibanding bangsa-bangsa di kawasan lain, termasuk dunia Islam.[21]

Banyak negara di kawasan dunia Islam yang pada era pasca kolonialisme memilih sistem republik menerima demokrasi, meski sebagian disertai beberapa persyaratan ataupun penyesuaian tertentu. Khusus pada kasus Indonesia, hampir tidak ditemukan respon pemikiran yang nyata-nyata menolak demokrasi secara konseptual. Banyak pemikir muslim, bahkan dengan bersemangat mencoba meyakinkan bahwa demokrasi kampatabel dengan Islam melalui berbagai upaya memahami kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan yang ada dalam ajaran Islam.

Kompatabilitas Islam dengan demokrasi diberikan justifikasi *'aqliyah* dan *naqliyah*, serta merujuk pada sejarah Islam periode awal, nabi dan sahabat. Para pemikir muslim mengidentifikasi adanya prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam khazanah pemikiran Islam, terutama al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, musyawarah (*syūrā*), *ijtihād*, konsensus atau kemufakatan (*ijma'*), persamaan (*al-musāwah*) dan keadilan (*al-'adl*). Menurut Artani Hasbi kedua prinsip

---

[21] William Brandon, ***New Worlds for Old: Reports from New World and Their Effect on The Development of Social Thought in Europe 1500-1800***, (Athens: Ohio State University Press, 1986), p. 13-4.

terakhir merupakan bagian dari prinsip dasar *syūrā*, yang meliputi prinsip persamaan, keadilan dan kebebasan.[22]

Sedemikian besarnya apresiasi terhadap demokrasi, sampai-sampai menjadikan prinsip persamaan dalam Islam yang sebenarnya terbatasi ruang ideologis keislaman digeralisir ke dalam egalitarianisme universal. Posisi dan status politik kelompok-kelompok non-muslim sebagai warga negara kelas dua (*dzimmi*) tenggelam dalam semangat menyepadankan Islam dengan pemikiran humanisme kontemporer. Demikian halnya dengan prinsip-prinsip lain yang terbatasi oleh ketentuan normatif keagamaan, ketentuan baku yang tidak dapat diubah meski mengatasnamakan demokrasi, mengingat pengubahan akan dapat berarti mengubah ketentuan Tuhan.[23]

Memadankan prinsip keagamaan dengan demokrasi akan berarti harus mengesampingkan keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dengan konteks tertentu, serta mengabaikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Islam yang tidak mungkin diubah. Bagaimanapun tradisi politik dan teori-teori yurisprudensi Islam sebenarnya tidak ditujukan secara spesifik untuk mengagas suatu bentuk pemerintahan.[24] Kesadaran akan perbedaan konteks tersebut menjadikan sebagian penerimaan demokrasi disertai syarat-syarat tertentu melalui penyesuaian demokrasi Barat dengan visi keislaman.

---

[22]Artani Hasbi, ***Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Politik Islam***, (Jakarta: Gema Media Pratama, 2001), p. 35-50.

[23]Dapat diandaikan bagaimana bila atas nama demokrasi suatu negara di dunia Islam melegalkan prostitusi sebagai pekerjaan, perjudian dan minuman keras sebagai perbuatan sah menurut undang-undang negara? Simak A.A. Wiranatakusumah, ***Demokrasi dalam Islam, Teori dan Praktik***, terj. Muhammad Tahrir Ibrahim, (Bandung: NV Masa Baru, t..t.), p. 33.

[24]Mahmood Moshipouri, "Islamism, Civil Society and Democracy Cunundrum" dalam ***The Muslim World***, Vol. LXXXVII, No. 1, Januari 1997, p. 62-6. Fauzi M. Najjar, "Democracy in Islamic Political Philosophy" dalam ***Stvdia Islamica***, Vol. MCMLXXX, 1980, p. 120-2.

Demokrasi tidak ditempatkan sebagai *the leading paradigm*, tetapi dibatasi oleh otoritas keagamaan, di mana hukum Tuhan dan *privillage* umat Islam ditempatkan di atas yang lain. Di antara gagasan dan praktik yang telah berkembang adalah sebagaimana teodemokrasi al-Maududi dan praktik demokrasi di Republik Islam Iran.[25]

Dasar kesejarahan demokrasi dalam Islam dijustifikasi dengan praktik pemerintahan masa nabi Muhammad saw dan Khulafa'ur Rasyidin. Pemerintahan nabi dan khalifah yang empat diidealkan sebagai bentuk pemerintahan demokratis khas Islam, yang perlu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan era modern. Masa pemerintahan Islam periode awal tersebut diidentifikasikan sebagai sebuah negara yang mapan. Keberadaan *dār an-Nadwah* dan *ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam praktik pemerintahan tersebut dipandang sebagai embrio demokrasi Islam yang lebih maju dibanding demokrasi era Yunani kuno. Kelebihan tersebut terletak pada adanya konsep *ulil amri* yang dimaknai sebagai azas parlementarisme atau perwakilan, di samping azas musyawarah.[26]

---

[25]Bagi al-Maududi, dalam negara sekaligus terdapat kedaulatan Tuhan dan manusia. Abdillah, ***Demokrasi di Persimpangan Makna...***, p. xiii. Iran menerapkan pemilihan umum yang *fair*, namun demikian memberikan *privillage* pada kelompok tertentu, pemimpin keagamaan (*Mullah*) dan tidak memberikan kebebasan penuh pada warganya. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 75.

[26] Dengan mengutip Amin Said, Ahmad menyatakan bahwa pemerintahan Nabi di Madinah telah memenuhi syarat rukun sebagai negara, yang berupa: adanya peraturan dan hukum terutama dari al-Qur'an; pemerintahan yang teratur, aparat pemerintahan yang ditaati rakyat, serta adanya hubungan dengan negara lain; kekuatan bersenjata yang melindungi pelaksanaan perundang-undangan; sumber keuangan negara yang menjamin kelangsungan pemerintahan; rakyat yang mentaati pemerintahan; serta wilayah territorial. Kalimat *Ulū* sendiri merupakan bentuk jamak dari *waliy* yang berarti wakil. Lebih dari itu, Zainal Abidin Ahmad mengidentifikasikan pemerintahan khulafa'ur rasyidin sebagai pemerintahan demokrasi parlementer. Zainal Abidin Ahmad, ***Membangun Negara Islam***, (Jakarta: Iqra', 2001) p. 4 dan 216-8.

Rujukan pada sejarah nabi dan periode sahabat belum memadai untuk dijadikan legitimasi kesejalanan demokrasi dengan Islam, sebab faktanya hal itu tidak dijadikan rujukan penguasa muslim masa sesudahnya. Tradisi pemerintahan nabi dan para sahabat sebenarnya masih dapat dipilahkan kembali, antara sebuah tuntutan normatif yang didasarkan atas dogma-dogma keagamaan dengan pengaruh tradisi Arab dalam praktik kemasyarakatan masa nabi dan sahabat.

Beberapa aspek ajaran Islam sangat boleh jadi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tapi yang jelas dunia Islam miskin pengalaman dalam penerapannya. Sistem demokrasi yang diterima dan diterapkan di dunia Islam adalah pengaruh Barat, bukan hasil rujukan konseptual atau berkedudukan sebagai sunnah nabi dan sahabat, ataupun hasil penelaahan (*istimbath*) atas dalil al-Qur'an dan al-Hadits. [27]

Penolakan sebagian kelompok Islam terhadap sistem demokrasi bukanlah murni karena faktor agama, melainkan akumulasi multi faktor, terutama politik. Hal ini dapat dilihat pada penolakan demokrasi oleh kelompok-kelompok *status quo* yang selama ini diuntungkan struktur sosial politik feodal. Alasan keagamaan mengemuka lebih dikarenakan ketidaksiapan menerima demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan, yang dilegitimasi dengan argumen bahwa demokrasi bukan ajaran Islam. Demokrasi dipandang sebagai bagian penting dari budaya yang berkembang di tengah kalangan non-Islam yang selama ini berseberangan dengan ajaran dan kepentingan umat Islam. [28]

---

[27] Pengalaman kesejarahan Islam menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan tidak secara spesifik diatur dan mengacu pada al-Qur'an, melainkan karena pengaruh konteks kesejarahan. Nasution, p. 222. Munawir Syadzali, ***Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,*** (Jakarta: UI-Press, 1990), p. 233.

[28] Melalui statemen diplomatis sebagaimana biasa dikeluarkan penolak demokrasi, raja Fahd menyatakan bahwa demokrasi tidak sesuai untuk rakyat Saudi Arabia. Masykuri Abdillah, "Syura dan Demokrasi", pengantar dalam Hasbi, ***Musyawarah dan Demokrasi...***, p. xviii.

Justifikasi keagamaan semacam itu dapat dipahami mengingat pihak-pihak tertentu potensial kehilangan *privillage* yang mereka nikmati bilamana sistem demokrasi diterapkan. Dikotomi Islam dan non-Islam juga tampak ambigu bilamana dibandingkan dengan praktik sosial politik pemerintahannya yang secara pragmatis lebih memilih bekerja sama dan mendukung berbagai negara-negara Barat yang nyata-nyata merugikan kepentingan dunia Islam.[29]

Penolakan demokrasi oleh para penyokong gerakan kebangkitan Islam yang menekankan ortodoksi agama, pada dasarnya juga tidak sepenuhnya berpijak pada alasan normatif keagamaan. Penolakan tersebut lebih bermakna protes dan perlawanan atas hegemoni serta ketidakadilan akibat kebijakan Barat di berbagai wilayah dunia Islam. Keterpurukan Islam dalam sejarah dipandang sebagai akibat konspirasi kekuatan Barat, sebagai kelanjutan Perang Salib. Segala pemikiran dan tatanan sosial politik yang ditawarkan Barat dipahami tidak lebih dari wahana menindas kekuatan Islam. Sebagai solusi, mereka mengajak umat kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, dan menolak segala yang mereka nilai berbau Barat, baik sains, rasionalisme maupun demokrasi. [30]

Demokrasi memang masih menjadi perdebatan dalam wacana keislaman. Selain kelompok yang apresiatif, ada pula kelompok yang menolak demokrasi. Selain penguasa-penguasa monarkhi yang masih banyak di dunia Islam, beberapa pemikir muslim memberikan dukungan konseptual untuk memastikan bahwa demokrasi tidak sejalan dengan Islam. Menurut Fatima Mernissi, hal ini dikarenakan

---

[29] Fatima Mernissi, ***Islam dan Demokrasi, Antologi Ketakutan***, terj. Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 2001, p. 132-4.

[30]Pervez Hoodbhoy, ***Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas, antara Sains dan Ortodoksi Islam***, terj. Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu, (Bandung: Mizan, 1996), p. 225-6.

adanya ketakutan-ketakutan di kalangan Islamis yang takut akan ditinggalkan umat, pemimpin takut akan kehilangan kekuasaannya.[31]

Abu Nashr Muhammad al-Imam bahkan memandang Pemilu menghadapi tiga puluh empat dosa dan lima belas kerancuan. Pandangan yang menyatakan bahwa demokrasi sejalan dengan Islam lebih banyak muncul sebagai hasil penafsiran arbitrer, di mana keinginan kuat untuk menyatakan bahwa Islam kompatable dengan demokrasi lebih besar dibanding dukungan informasi *nash* dan kesejarahannya.[32]

Demokrasi memang bukan konsep yang didasarkan atas dogma keagamaan. Sekalipun dapat dijustifikasi dengan konsep-konsep keagamaan, tetapi harus diakui bahwa kemunculannya berangkat dari pemikiran humanistik murni, lepas dari konsep-konsep adikodrati. Kristen, Yahudi ataupun Konfusianisme juga dapat mengklaim hal yang sama bilamana aspek-aspek tertentu dalam ajaran agamanya diekaplorasi untuk memunculkan hal-hal yang sejalan dengan demokrasi.[33] Wacana demokrasi yang ditelaah dengan sudut pandang keagamaan, dalam hal ini Islam, menimbulkan banyak persoalan, sebab keduanya berangkat dari *platform* berfikir berbeda. Demokrasi berangkat dari pemikiran humanis dan agama berangkat dari pandangan-pandangan adikodrati yang tidak selalu selaras dengan ide humanitis.[34]

---

[31] Mernissi, ***Islam dan Demokrasi...,*** p. 54-62.

[32]Abu Nashr Muhammad al-Imam, ***Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam***, terj. Muhammad Azhar, (Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004), p. 181-233.

[33] Penjelasan Markoff tentang dukungan agama Kristen terhadap perkembangan kiranya cukup berlebihan, sekalipun pembaharuan Luther atas agama ini sangat radikal. Dapat dicermati Markoff, ***Gelombang Demokrasi Dunia...***, p. 82-5 dan Madjid p. 470.

[34]The Islamic state is different from a secular democracy as it diametrically opposed to the concept of the sovereignty of the people. Allah is the Supreme Law-Giver and *shari'ā*, new problems are faced and their solutions worked out. This

Para pemikir muslim semisal Nasr, Hassan Hanafi, Mahmud Muhammad Thaha, Ali Asghar dan sebagainya, telah berupaya keras untuk mereaktualisasikan pemikiran-pemikiran keagamaan Islam dengan mengetengahkan berbagai paradigma dan metodologi berfikir baru. Sebaik apapun gagasan mereka, hasilnya tetap saja bersifat *ikhtilafi* (*debatable*), dan produk pemikiran yang dihasilkan tidak dapat diklaim sebagai ajaran agama yang mengikat (*qath'y*). Jangankan isu demokrasi yang *nota bene* berangkat dari tradisi Barat non Islam, konsep-konsep politik pokok dalam tradisi dan pernah diterapkan sebagai institusi politik Islam periode awal semisal *khilafah*, *Imamah* dan *syūrā* juga masih penuh kontroversi.[35]

D. Problem Implementasi Demokrasi di Dunia Islam

Demokrasi di Eropa berkembang sebagai kebutuhan sejarah dan muncul tidak dalam sekejap, melainkan melalui proses panjang sejalan dengan dinamika kultural, sosial, politik dan intelektual. Itupun tidak selalu berujung dengan buah "manis", berupa kebebasan dan kesejahteraan. Kondisi yang dicapai Eropa saat ini diperoleh melalui proses sejarah panjang dan berat oleh persaingan kepentingan, ideologi politik, egosentrisme fasis dan ultranasionalis,

represent of cardinal difference between the two. As far as the priciples of rule of law, protection of fundamental rights, independence of judiciary, the right of minorities and choice of policies and rulers in accord with the wishes of the people concerned, Islam ensure them within its own frame work.... But because the basic differences as the source of natural of law, the two systems are distinct and unique. Khurshid Ahmad, "Islam and Democracy: Some Conceptual and Contemporary Dimentions" dalam ***The Muslim World***, Vol. 90, No. 1 &2, Spring 2000, p. 14.

[35] M. Imam Aziz, "Islam dan Demokrasi Meretas Problem Metodologis" dalam ***Bangkit***, No. 2, Januari-Februari 1993, p. 56-8. Simak juga Obaidullah Fahad, "Some Reflection on Islamic Political Theory" dalam ***Hamdard Islamicus***, Vo. XXII, No. 2, p. 7.

yang sebagian berujung pada otoritarisme dan bahkan tragedi kemanusiaan, dan berpuncak dengan meletusnya perang dunia.[36]

Sejak berakhirnya era kolonial, paradoks yang terjadi antara demokrasi dan Islam sudah disadari sejak awal oleh banyak intelektual dan pelaku politik dunia Islam.[37] Uni Sovyet dan sekutu-sekutunya di Eropa Timur yang sebenarnya masih bagian dari kultur Barat, karena perbedaan *mainstream* sosial, kultural, politik dan iklim ideologi yang dimiliki mengakibatkan penerapan demokrasi di kawasan tersebut jatuh pada komunisme despotik. Karenanya bukan mustahil bila hal yang sama atau bahkan lebih tragis terjadi ketika sistem tersebut diterapkan di kawasan lain dengan kondisi kultural, intelektual, politik dan pengalaman kesejarahan yang berbeda dari Barat.

Sekalipun demokrasi dapat dikonseptualisasikan dari perspektif Islam, tapi penerapan secara konkrit sama halnya dengan menanamkan budaya Barat pada masyarakat dengan budaya yang berbeda. Demokrasi adalah sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia (*worldview*) setara dengan kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme dan sebagainya yang tidak seluruhnya memberikan hasil yang sama ketika diterapkan di luar tempat lahirnya.[38] Berbagai ketimpangan kultural selalu mungkin terjadi, mengingat latar ideologis dan kultural yang menyelubunginya berbeda.

---

[36] Perang dunia I dan II juga bisa dihubungkan dengan tahap demokrasi yang tidak sempurna di Jerman dan Jepang. Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 18-21.

[37] Pemikir yang menolak demokrasi di antaranya Syaikh Fadlallah Nuri, Sayyid Qutb, Syaikh Muhammad Mutawali al-Sha'rawi, Ali Benhadj dari Fron Penyelamat Islam (FIS). Enayat menyatakan bahwa upaya mensintesakan demokrasi dengan Islam selalu berbenturan dengan batu karang berupa kumpulan doktrin keagamaan yang tidak mungkin diubah. Sihbudi, "Demokrasi dalam pandangan ..." p. 36-7.

[38] Meski sangat menyanjung demokasi, Fukuyama mengakui bahwa dalam kasus di Amerika Latin tahun 1980-an demokratisasi di kawasan tersebut berujung pada instabilitas dan krisis ekonomi yang parah. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 36-7.

Kemajuan sains dan teknologi terutma di bidang transportasi dan informasi telah meniupkan arus global yang memungkinkan ide-ide politik dan ekonomi rasionalis (sekulerisme-nasionalisme-demokrasi) menyebar ke seluruh penjuru dunia. Demokrasi yang semula merupakan impian Barat, masuk ke dunia Islam terutama pada periode akhir imperialisme dan kolonialisme Eropa. Penjajahan Eropa atas dunia Islam mengawali tersekatnya dunia Islam ke dalam negara bangsa (*nation state*). Eropa menciptakan peta baru dunia Islam yang terpilah menjadi negara-negara bangsa baru. Apalagi sejak kekhilafahan Turki berakahir, kelompok-kelompok bangsa tersebut terlepas dari ikatan spiritual Islam dan berdiri sebagai bangsa mandiri. Sedemikian mandirinya, hingga dalam kurun perkembangan berikutnya, sebagian saling bermusuhan tanpa ujung penyelesaian.[39]

Setelah berdiri sebagai negara berdaulat, sebagian negara di dunia Islam mengadopsi paham demokrasi, dan sebagian lagi melanjutkan sistem monarkhi. Pada kurun awal kemerdekaanya, negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi diwarnai persaingan, gejolak dan pertikaian antar kelompok berkenaan dengan pola pengelolaan negara di masa depan. Bagi negara-negara yang baru merdeka, persoalan ideologi negara menjadi persoalan pertama karena menyangkut *frame* penataan sistem kenegaraan secara luas, sehingga masa ini sarat persaingan ideologis. Kelompok terdidik berusaha mengapresiasi ideologi-ideologi yang berkembang di Barat, seperti sosialisme, nasionalisme dan komunisme, sementara yang lain mengajukan Islam sebagai ideologi alternatif.[40]

Tajamnya persaingan ideologis melahirkan sikap saling curiga, ketidakpercayaan bahkan permusuhan antar kelompok. Kelompok penguasa berupaya keras menekan kelompok yang berseberangan,

---

[39] Mohammad Noer, "Islam dan Nasionalisme Arab" dalam ***Jurnal Ilmu Politik***, No. 12, 1993, p. 93-4.

[40] Pasca kemerdekaan, pergulatan ideologi negara tersebut berlangsung sejak dihasilkannya Piagam Jakarta dan berpuncak pada kebuntuan dewan konstituante 1955. Abdillah, ***Demokrasi di Persimpangan Makna...***, p. 32 - 8.

dan kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan tak henti berupaya mengambilalih kekuasaan dengan segala cara. Ketidakpuasan menyebar ke berbagai penjuru negeri terutama dari pihak-pihak yang kalah atau merasa dikalahkan, yang diungkapkan dalam bentuk pemikiran maupun aksi. Aksi-aksi massa sangat marak dan relatif tidak sulit digalang, karena tingkat rasionalitas masyarakat masih rendah dan tergantung pada kharisma tokoh-tokoh tertentu sebagai pengendali opini (*opinion leader*).[41] Di sisi lain, kesulitan ekonomi membuka harapan-harapan penyelesaian melalui perjuangan ideologi yang semuanya menjanjikan kesejahteraan sosial.

Ketidaksiapan bangsa-bangsa di dunia Islam dalam persaingan ideologi dan kekuasaan tersebut berujung pada munculnya rejim-rejim represi. Banyak penguasa kesulitan menerapkan ideologi politiknya tanpa represi, bahkan untuk sekedar mempertahankan kekuasaan. Praktik demokrasi negara-negara baru di dunia Islam akhirnya melahirkan otoritarime. Para penguasa berusaha keras melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli apakah sejalan dengan prinsip demokrasi atau tidak.[42] Ketidakmatangan dan pluralitas di dunia ketiga menimbulkan hambatan bagi berlangsungnya demokrasi dengan tipologi klasik seperti Eropa dan Amerika. Terlalu besar taruhan politik, sosial dan integritas nasional yang harus dibayarkan bagi suatu negara untuk sekedar menjadi negara demokratis.[43]

Pada dasarnya penerimaan demokrasi di dunia Islam, khususnya Indonesia, terjadi tanpa perdebatan. Tidak pernah muncul sikap, pemikiran maupun gerakan yang mempersoalkan demokrasi diterima

---

[41] Di Indonesia, Soekarno sendiri dikenal sebagai pembela ideologi yang mengambil posisi anti liberalisme, anti Barat. Soekarno, ***Di Bawah Bendera Revolusi***, Djilid II, cetakan II, (Djakarta: Panitiya Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1965), p. 289-91.

[42] Charles F. Andrain, ***Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial***, terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992), p. 366.

[43]Perpecahan-perpecahan primordial sering mempersulit demokratisasi di dunia ketiga. ***Ibid.***, p. 263. Simak juga Setiawan "Demokrasi Konsosiasional...", p. 61.

atau ditolak.[44] Hanya saja, penerimaan demokrasi sebagai dampak dari kolonialisme Barat telah mendekonstruksi struktur sosial politik dunia Islam. Dunia Islam berada di tengah ambiguitas, di mana pada satu sisi sistem monarkhi sudah tidak *upto date* lagi, di sisi lain demokrasi masih merupakan impian baru yang kurang memiliki pijakan konseptual maupun referensi kesejarahan memadai. Demokrasi pada dasarnya telah diterima sebagai sebuah aturan permainan, tapi kesenjangan tata nilai dan kultural di dunia Islam menjadikannya belum dapat diterapkan secara *fair* dan sportif.[45]

Demokrasi hadir sebagai sebuah penetrasi budaya, di mana dunia Islam tidak memperoleh kesempatan mengkaji lebih jauh kesesuaian demokrasi dengan konteks pandangan hidup mereka, ataupun mencari konsep tatanan alternatif. Umat Islam dipaksa melakukan lompatan paradigma, dengan melepaskan nilai-nilai yang sudah mengakar dengan nilai baru yang lepas dari pengalaman kesejarahannya. Sebagai sebuah konsep yang mengajarkan kejujuran (*fairness*), demokrasi tampak hanya mengarahkan kritiknya pada otoritarianisme, feodalisme dan fasisme, hingga suara-suara kritis terhadap demokrasi sendiri kehilangan ruang gerak dan tak terdengar gaungnya. Bila demikian halnya, bukan tidak mungkin demokrasi

---

[44] Perkembangan kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa pada PEMILU 1999 partai-partai Islam yang senantiasa membawa isu keagamaan Islam tidak memperoleh dukungan suara mayorits. M. Atha Mudzhar, "Islam in Indonesia, The Political Recycling and the Collapse of a Paradigm" dalam ***Al-Jāmi'ah***, No. 64, Vol. XII, 1999, p. 12-5.

[45]Praktik sosial politik Barat dinyatakan sebagai ...largely a product of particular historic evolution in the Western social theory, politics and statecraft. This institutions not only have historical reasons behind their particular manifestation, they also have a certain philosophical, ethical and ideological *geist*. While there is an adoption ...... in most cases there is either conscious ignorance, or a conscious rejection, of the underlying *geist* which is quickly replaced by Islam or Islamic ideology. Charles Amjad-Ali, "Democracy and Islam" dalam ***Al-Mushir***, Vol. 34, No. 1, 1992, p. 6-7.

secara konseptual mengemuka sebagai bentuk otoritarianisme baru, yang dipaksakan dengan berbagai embargo bahkan senjata.[46]

Secara eksternal, Barat juga memiliki andil atas ketidaksiapan demokrasi di dunia Islam, di mana kecurigaan terhadap Islam membuat mereka berupaya membantu para penguasa dalam menghalangi kelompok-kelompok Islam untuk meraih kekuasaan. Islam seolah disejajarkan dengan komunisme dan fasisme yang tidak menghargai kebebasan. Sikap Barat terhadap kasus penganuliran kemenangan Ikhwanul Muslimin Mesir, dan FIS di Aljazair serta partai Revah Turki, menunjukkan bahwa Barat sendiri tidak siap dengan demokrasi bilamana memberikan kemenangan bagi kelompok politik Islam. Seolah-olah demokrasi hanya boleh berjalan manakala dimenangkan oleh komunitas sosial politik yang tidak anti atau bahkan pro-Barat.[47]

[46] Arif, ***Ilusi Demokrasi...***, p. 173-4.

[47] Abdillah, ***Demokrasi di Persimpangan Makna...***, p. 6-7. Sejak kecolongan dengan Revolusi Islam Iran, Barat banyak mempropagandakan persepsi negatif tentang Islam. Simak Amjad-Ali "Democracy and Islam" p. 2-3. Simak pula Saiful Muzani, "Benturan Islam-Barat, Suatu Proyek Zaman Pasca-Modern" dalam ***Jurnal Ulumul Qur'an***, No. 5, Vol. IV, 1993, p. 3-5.

KULTUR SOSIAL DAN POLITIK NUSANTARA SEBELUM ERA KOLONIAL

A. Kultur Asli Indonesia Pra-Kolonial

Sebelum kehadiran bangsa Eropa, sebagian wilayah nusantara yang pada kurun modern berdiri menjadi negara Indonesia, terdiri dari kelompok-kelompok suku bangsa yang masing-masing menunjukkan suatu kekhususan dalam suatu kontinum perkembangan yang khusus pula. Setiap kelompok suku bangsa mencerminkan kesatuan sosio kultural, yaitu kesatuan segmen-segmen dan institusi-institusi sosial yang secara erat saling berhubungan dan secara fungsional saling ketergantungan. Kelompok tersebut terdiri atas sistem-sistem lokal yang sederhana dan tersebar pada wilayah yang sangat luas, yang membentuk sistem sosio kultural yang kompleks.[1]

---

[1]Sartono Kartodirdjo, "*Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX-XX*" dalam ***Lembaran Sedjarah***, (Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, No. 1, Desember 1967), p. 3-4.

Mereka dikenal sebagai masyarakat pedesaan yang masing-masing berdiri sendiri, tanpa keterkaitan satu dengan yang lain, tetapi memiliki kedekatan sosio-kultural, terutama karena kesamaan ras, sosial budaya dan bahasa. Komunitas yang kompleks dan berada pada teritorial yang luas tersebut dalam sejarah nusantara, bahkan sampai kurun Indonesia modern tetap dapat dikenali sebagai kelompok suku bangsa Dayak, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Aceh dan sebagainya. Setiap kelompok suku bangsa tersebut memiliki kekhasan budaya dan terutama bahasa yang mendekatkan mereka ke dalam satu ikatan etnisitas.

Sebagian komunitas berkembang menjadi kerajaan-kerajaan yang mapan dan sebagian lagi bertahan sebagaimana sebelumnya. Munculnya berbagai institusi kerajaan lambat laun menjadikan komunitas sosio kultural yang merdeka, pada derajat berbeda, terikat di bawah pengaruh kerajaan sebagai pusat politik dan budaya. Integrasi kelompok-kelompok sosio kultural kecil yang merdeka ke dalam kelompok kerajaan yang merupakan kelompok besar melahirkan stratifikasi sosial berikut sistem statusnya. Meski demikian, integrasi suku-suku bangsa tertentu di bawah penguasaan suku bangsa lain tidak serta-merta menghapuskan identitas lokal, di mana setiap suku bangsa bertahan dengan kekhasan tradisi dan budayanya.[2]

Kerajaan-kerajaan di kawasan nusantara pada awalnya mencerminkan satu bentuk integrasi kesukuan dengan berbagai kekhasan tradisi, sistem sosial dan kebahasaannya. Kesamaan etnisitas dan budaya yang dipandang sebagai milik bersama inilah yang melahirkan suku bangsa, yang ketika terakomodasi dalam negara melahirkan suatu bentuk nasionalitas. Perbedaan dinamika setiap masyarakat suku bangsa di nusantara, dalam perkembangannya, menjadikan sebagian berdiri independen dan sebagian lagi berada di bawah penguasaan, atau minimal pengaruh

[2]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia II***, edisi 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p. 21.

yang lain. Beberapa kerajaan, seperti Sriwijaya, Majapahit dan Mataram merupakan sedikit di antara kerajaan-kerajaan nusantara yang menguasai, atau paling tidak, memiliki pengaruh besar pada wilayah di luar kelompok suku bangsanya.[3]

Berbagai catatan dan bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa nusantara telah terbiasa berhubungan dengan bangsa-bangsa di kawasan lain, mulai dari pantai Timur Afrika, Semenanjung Arab, Asia Selatan hingga Cina. Kekayaan budaya dan peradaban nusantara berkembang sebagai hasil interaksi secara dinamis dengan bangsa-bangsa lain tersebut. Apresiasi dan akulturasi budaya luar secara signifikan telah turut memperkaya khazanah kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa nusantara. Paduan antara nilai-nilai lokal dengan unsur luar yang telah diterima sebagai bagian dari kebudayaan setempat membentuk nilai-nilai kultural yang mewarnai pola perilaku dan sistem sosial politik bangsa-bangsa di nusantara.[4]

Persentuhan bangsa nusantara dengan bangsa lain mengakibatkan perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan. Dampak dari hubungan dengan bangsa India, Cina dan Arab tampak pada perubahan sistem pemerintahan, birokrasi, tata susunan kemasyarakatan serta kepercayaan agama. Diterimanya tradisi luar terutama agama Hindu, Budha dan kemudian Islam, tidak secara radikal menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan berpadu

---

[3]Majapahit termasuk sedikit di antara kerajaan nusantara yang mampu membangun imperium terluas di Asia Tenggara. John Miksic, eds., ***Indonesian Heritage: Ancient History***, (Jakarta: Buku Antar Bangsa for Grolier International Inc., 1996), p. 113. Sekalipun tidak dalam konteks penguasaan sebagaimana daerah-daerah di pulau Jawa, pengaruh Mataram cukup kuat terhadap daerah seberang dari Sumatera hingga Sulawesi dan Maluku. Simak H.J. De Graff, ***Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung***, Edisi Revisi, editor Eko Endarmoko dan Jaap Erkelen, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002), p. 329-339.

[4]Masyarakat nusantara mengalami evolusi sosial seiring masuknya peradaban luar, yang diikuti perkembangan organisasi pemerintahan yang mulai meningkat dengan sistem birokrasi yang lebih kompleks. Miksic, eds., ***Indonesia Heritage: Ancient...***, p. 49.

dan melahirkan sintesa budaya khas nusantara. Kerajaan-kerajaan nusantara dapat dihindukan, dibudhakan dan kemudian diislamkan tanpa banyak mengubah pola hidup dan kebudayaan setempat. Masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Bali dan berbagai suku tetap dengan kekhasan tradisi dan kulturalnya semula, meski telah menerima kebudayaan luar sebagai bagian dari tradisi dan budaya mereka.[5]

Pengaruh budaya luar lebih menonjol pada aspek diterimanya agama sebagai bagian dari identitas sosial budaya setempat, sekalipun cenderung mengambil bentuk sinkretis. Perpaduan agama Hindu dan Budha melahirkan sinkrestisme berupa ajaran Siwa-Budha, juga terakomodasikannya khazanah kebudayaan lokal dalam perbendaharaan keagamaan, khususnya Hindu. Islam yang berkembang pada kurun berikutnya juga tidak lepas dari pola-pola keagamaan sinkretik, perpaduan khas antara ajaran dan nilai-nilai agama dengan tradisi masyarakat lokal maupun tradisi keagamaan sebelumnya. Hal ini dikarenakan nusantara memang tidak kering dari tradisi dan budaya yang berkembang baik sebagai apresiasi terhadap budaya luar yang terjadi sebelumnya maupun sebagai hasil dinamika di dalam negeri sendiri.[6]

---

[5]Secara eksplisit hal ini tampak pada arsitektur candi yang ternyata tidak ditemukan kemiripan tipologinya dengan yang ada di India, atau sistem kasta yang dalam praktiknya tidak sama dengan yang berlaku dalam kultur masyarakat India. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia II***, p. 8 dan p. 22-7. Perkembangan mutakhir Indonesia juga memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa nasionalnya merupakan paduan antara bahasa Melayu sebagai unsur pokoknya ditambah bahasa Sansekerta, Arab, Cina, Belanda dan Inggris, di samping bahasa daerah. John McGlynn, eds., ***Indonesia Heritage: Language and Literatur***, (Singapore: Archipelago Press, 1998), p. 74-5.

[6] Kehadiran agama memang potensial membentuk kultur, tetapi tidak secara keseluruhan, karena masyarakat nusantara sendiri sudah terbiasa hidup dengan sistem keyakinan yang mendarah-daging baik dalam rupa animisme, dinamisme maupun hasil perpaduan dengan nilai-nilai dan tradisi luar. Masuknya sebuah agama, termasuk Islam, tidak pernah menjadi satu-satunya pembentuk kultur, karena bangsa nusantara juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, termasuk Eropa. Irwan Abdullah dan Azyumardi Azra "Islam dan Akomodasi Kultural" dalam

Apresiasi terhadap budaya luar tak membuat masyarakat nusantara kehilangan identitsnya. Unsur-unsur budaya asli tetap dominan dalam tradisi dan perikehidupan sosial budaya. Meski menerima ajaran Hindu dengan stratifikasi sosialnya (*kasta*), tapi penerapannya di nusantara berbeda dari praktik serupa di daratan India. Pengaruh agama tersebut hanya tampak pada pemapanan sistem keyakinan agama dan kepercayaan dari animisme ke agama formal, sementara praktiknya berjalan dengan corak budaya asli nusantara. Kehadiran agama-agama dari luar berikut kebudayaan negeri asalnya yang secara kultural berangkat dari pola tradisi dan kebudayaan yang hampir sama, yang pada perkembangan awalnya hanya menjadi tambahan legitimasi dan pengokohan bagi struktur sosial politik dan kebudayaan nusantara.[7]

Hingga memasuki masa kolonial sistem sosial politik nusantara masih murni tradisional dengan ciri-ciri kultural sebagaimana umumnya masyarakat praindustri. Hanya beberapa kerajaan nusantara secara bertahap mengalami perkembangan kebudayaan dan peradaban dari negara agraris ke maritim. Setelah berinteraksi semakin intensif dengan budaya luar, dinamika sosial politik, kebudayaan, peradaban masyarakat dan negara semakin meningkat, yang ditandai dengan makin kuatnya daya tahan kerajaan-kerajaan di

---

Taufik Abdullah, eds., ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara***, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2002), p. 29.

[7]Intensitas keterpaduan agama dan khazanah budaya lokal sangat beragam. Paduan antara Hindu dan Budha pada kerajaan Majapahit melahirkan ajaran Siwa-Budha yang berpadu dengan paham kosmogoni di mana raja diposisikan sebagai Buddhisatva, yaitu manusia tercerahkan dengan berkah ketuhanan yang bertugas membimbing rakyatnya. Sedangkan masuknya Islam membawa perubahan pada perkembangan monarkhi absolut sebagaimana berkembang di Timur Tengah sejak era Umayyah (661 M). Azyumardi Azra "Tradisi Politik" dalam Abdullah, eds., ***Ensiklopedi Tematis Dunia...***, p. 79.

kawasan ini, dengan pemerintahan yang lebih stabil, cakupan wilayah dan relasi perekonomian yang semakin luas.[8]

Berbeda halnya ketika pada kurun yang lebih awal, potensi agraris menjadi tumpuan utama, negara hanya mampu memfokuskan diri pada aspek keamanan dalam negeri, yang karenanya daya tahan kerajaan tidak cukup kuat. Ini dapat dicermati pada bagaimana daya tahan kerajaan-kerajaan nusantara kuno, seperti Mulawarman, Tarumanegara, Kalingga, Tumapel dan Kediri misalnya, bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang muncul lebih kemudian seperti Majapahit dan Mataram Islam.

Kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian, terutama di Jawa, berkembang relatif stabil dengan sistem birokrasi pemerintahan yang ditunjang berbagai sumber pendapatan negara baik dari potensi agraris maupun perdagangan. Relasi dengan bangsa luar yang semakin intensif, paling tidak telah mendorong berkembangnya kerajaan-kerajaan maritim di nusantara yang lebih maju dengan akses hubungan luar negeri yang lebih luas. Sriwijaya, Majapahit dan Mataram Islam merupakan sebagian di antara perkembangan setingkat lebih maju sebagai negara maritim yang ditunjang berbagai aturan birokrasi untuk menjamin stabilitas dalam negeri, meski tidak mengabaikan potensi agrarisnya.[9]

Ketika bangsa Eropa pertama-tama mencapai daratan nusantara, status dan kedudukan bangsa nusantara dengan bangsa

---

[8]Perkembangan perekonomian maritim sekaligus agraris meningkatkan kebutuhan akan penataan sistem birokrasi dan administrasi yang lebih kompleks. Perkembangan kerajaan Jawa pada abad 17 memperlihatkan perkembangan sistem birokrasi yang melahirkan stratifikasi sosial dengan cakupan bidang tugas yang lebih luas. Kartodirdjo "Kolonialisme dan Nasionalisme…", p. 11-6 dan 44-5.

[9]Antony Reid sebagaimana diulas Bambang Purwanto menyebut memuncaknya dinamika perdagangan antar pulau dan benua menjadikan abad 16-17 sering disebut sebagai abad perdagangan nusantara. Bambang Purwanto "Ekonomi Masa Kesultanan" dalam Taufik Abdullah, eds., ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara***, p. 273. Simak pula Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia II***, p. 72-3.

lain berada pada posisi setara. Bangsa nusantara juga tidak terkesan lebih kecil dan terbelakang dibanding bangsa Eropa. Bangsa Eropa bahkan merasa memasuki daerah yang lebih kaya, atau paling tidak berhadapan dengan bangsa yang setaraf dengan mereka. Sebaliknya, bangsa nusantara juga tidak menilai bangsa Eropa sebagai bangsa yang istimewa. Bangsa yang dipandang besar, kuat dan disegani saat itu, termasuk oleh bangsa Eropa, adalah imperium Islam Turki, bukan Eropa.[10]

Meski belum mengarah pada perkembangan seperti yang terjadi di Eropa pada kurun yang sama, setidaknya kebudayaan dan peradaban nusantara memperlihatkan kecenderungan berkembang secara dinamis. Barangkali bila tidak terlanjur didahului penjajahan, atau minimal, bilamana interaksi budaya nusantara dengan budaya luar, khususnya Eropa, dapat berlangsung sebagaimana relasi dengan bangsa Arab, Cina dan India, bangsa nusantara dapat mengikuti modernitas Barat sebagaimana Jepang. Persoalannya, sejak kehadiran bangsa Eropa, potensi ke arah dinamika tersebut tidak berkembang karena kecenderungan eksploitatif yang sedemikiran besar di kalangan pendatang dari Eropa, yang mengakibatkan dinamika tersebut terhenti, bahkan mengalami kemunduran.[11]

Tidak sebagaimana budaya India, Cina dan Arab yang mampu berakulturasi dengan relatif tanpa konflik, budaya Eropa, terutama di bidang tatanan sosial politik, militer, pemerintahan dan teknologi tidak mengalami akulturasi secara memadai. Ketamakan pendatang Eropa yang terlalu menonjol pretensi eksploitatifnya, di samping pola

---

[10]Meski sering kali dikesankan sebagai warisan kolonial, sebenarnya komoditas komersial hasil perkebunan sudah menjadi bagian dari perikehidupan sosial ekonomi masyarakat nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Onghokham, "Reaksi terhadap Kekalahan", dalam ***Prisma***, no. 11, 1984, p. 45.

[11]Kemerosotan nusantara dimulai dari jatuhnya kepulauan di wilayah timur Indonesia ke dalam penguasaan Eropa, yang lambat laun mengurangi intensitas pelayaran bangsa nusantara ke luar wilayahnya. Peran mereka dalam jalur distribusi barang ke luar dan masuk wilayah nusantara praktis diambilalih bangsa-bangsa Eropa. Lapian, "Perebutan Samudera", dalam ***Ibid.***, p. 38-9.

pikir masyarakat yang belum mampu mengimbanginya, menyebabkan budaya dan peradaban Eropa disikapi secara antipati dan perlawanan.[12]

Masyarakat nusantara relatif kurang mengapresiasi kemajuan Eropa secara akulturatif yang memperkembangkan peradabannya seperti proses akulturasi dengan peradaban Cina, Arab dan India. Saat Eropa mencapai taraf kemajuan yang pesat dalam sistem ketatanegaraan, administrasi dan teknologi, kerajaan-kerajaan nusantara masih lekat dengan otokrasi tradisional yang mendasarkan pada keturunan dengan serangkaian mitos-mitos irasionalnya. Di pihak lain, setara dengan Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Islam nusantara telah disibukkan dengan tradisi keagamaan eskapis dan kurang respek pada tradisi intelektual dan perkembangan tuntutan kehidupan *profan* yang kian progresif.[13]

B. Tradisi Sosial Politik Nusantara Pra-Kolonial

Sebelum kehadiran bangsa Eropa, masyarakat nusantara masih menganut monarkhi, di mana raja merupakan penentu kelangsungan negara satu-satunya. Bangsa-bangsa di nusantara, seperti halnya masyarakat tradisional di manapun, merupakan penganut otokrasi kerajaan secara turun-temurun. Legitimasi kekuasaan raja disandarkan pada pembenaran-pembenaran spiritual ataupun

---

[12]Sekalipun Islam menjadi agama dominan, bangsa ini terlanjur begitu lekat dengan kebudayaan Hindu yang sarat spiritualisme dan kebudayaan yang dipenuhi mitos-mitos. Akibatnya budaya *renaissance* tidak berkembang di negeri ini sekalipun ratusan tahun berinteraksi dengan bangsa Eropa. Sutan Takdir Alisjahbana, "Terlalu Halus, Itulah Kelemahan Kita" dalam ***Ibid.***, p. 53-4.

[13] Keprihatinan kebanyakan pemikir pembaharu muslim mulai dari al-Afghani hingga Hassan Hanafi tertuju pada perkembangan tradisi dan pemikiran masyarakat dunia Islam yang pada umumnya didominasi kecenderungan asketik. Simak Harun Nasution, ***Pembaharuan dalam Pemikiran Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p. 51-194.

eskatologis sesuai kepercayaan setempat.[14] Sistem tersebut tidak pernah mengalami perubahan, bahkan tidak pernah dipertanyakan.

Tradisi *sharing* kekuatan sosial politik tidak ditemukan pada kerajaan-kerajaan besar, khususnya di pulau Jawa. Justeru semakin besar sebuah kerajaan, hegemoni raja semakin besar dalam menentukan jalannya pemerintahan. Bahkan seluruh kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya dan keagamaan masyarakat, pada dasarnya dipresentasikan untuk memfasilitasi kehidupan raja, keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kehendak raja direpresentasikan sebagai kehendak negara. Raja memiliki kedudukan tinggi dengan legitimasi ketuhanan, yang titahnya tidak mungkin salah.[15]

Di nusantara juga terdapat tradisi yang identik dengan praktik demokrasi era Viking yang diklaim Dahl sebagai bibit demokrasi di Eropa. Pemerintahan memiliki struktur yang relatif kompleks juga pernah berkembang pada sebagian kerajaan-kerajaan nusantara.

---

[14]Mataram sebagai kerajaan menonjol yang eksis hingga kurun akhir penjajahan, tidak banyak berubah dari periode kerajaan sebelumnya, terutama Majapahit. Jawa sebagai kerajaan yang paling dominan di wilayah ini memperkokoh legitimasi kekuasaan rajanya dengan kepercayaan-kepercayaan magis. Perbendaharaan kebudayaan Jawa seperti *pulung ratu*, *ndaru* atau *cahaya nurbuat* (wahyu raja) hampir selalu menjadi legitimasi eskatologis atas hak seseorang untuk memperoleh kedudukan sebagai raja. Di wilayah lain, kekuasaan raja dilegitimasi dengan agama ataupun adat. Sejak masuknya agama Islam, beberapa penguasa dinisbatkan sebagai keturunan nabi atau sebagai pemimpin keagamaan berikut gelar-gelar keagamaannya. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia III***, edisi ke-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p. 304-6.

[15] Hal ini dapat dicermati pada pola kekuasaan dalam kerajaan Majapahit yang dalam jangka panjang mempengaruhi pola kemasyarakatan dalam kerajaan-kerajaan berikutnya. Majapahit mengembangkan sentralisasi dengan sistem birokrasi yang rumit didasarkan pada kepercayaan kosmogoni. Majapahit dianggap sebagai pusat kosmos, di mana raja sebagai dewa tertingginya. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia II***, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), p. 275. Simak pula Kartodirdjo, "Kolonialisme dan Nasionalisme...", p. 7-16.

Fenomena tersebut dapat dicermati tradisi politik di kerajaan-kerajaan Gowa, Tallo, Bone dan Wajo di Sulawesi yang tidak menerapkan sistem keturunan melainkan dipilih oleh para *karaeng* atau *arung*. Praktik pemerintahan ditunjang oleh *pangreh praja* yang terdiri dari pedukung panji (*Pa' Bate Lompo*), raja hakim (*arung ma'bicara*) dan duta yang terdiri dari 40 orang. Keputusan-keputusan pemerintahan tidak dapat diambil tanpa persetujuan mereka semua. Praktik ini berlangsung di tengah sistem kerajaan yang terbentuk akibat federasi beberapa penguasa lokal.[16]

Meski praktik politik pemerintahan tersebut menyerupai demokrasi Eropa era Viking atau Yunani, tapi tidak mengalami perkembangan ke arah demokrasi modern, mengingat selain hanya didorong oleh tuntutan kondisi lokal, juga tidak ada dialektika konseptual maupun dukungan perkembangan sosial politik lebih lanjut. Demokrasi tersebut tidak berkembang ke arah tuntutan akan persamaan hak dan kwajiban setiap individu. Praktiknya masih berlangsung elitis, sebagai bentuk *sharing* antar unsur kekuatan dalam suatu komunitas yang memiliki status sosial sepadan. Tidak ada fenomena penyimpangan sejarah yang menonjol sebagaimana Eropa yang memungkinkan bangsa-bangsa di nusantara keluar dari lingkaran pengulangan tradisi dan budaya sebelumnya.

Struktur pemerintahan tradisional di nusantara, menurut Hatta, tidak membuat rakyat merasa tertindas oleh kekuasaan raja. Rakyat jelata masih dapat menyampaikan aspirasinya yang seringkali hanya disampaikan melalui pesan simbolis dan selalu direspon penguasa. Bilamana rakyat keberatan dengan aturan penyerahan upeti atau kebijakan tertentu dari penguasa, mereka berkumpul di depan istana

[16] Pada kerajaan yang belum berkembang melampaui batas kesukuannya, raja berkedudukan sebagai ketua adat dibanding seorang raja, meski juga menyandang gelar sebagaimana raja. Hal ini dikarenakan keberadaan sebagai federasi sebuah *klan* yang sudah terpecah ke dalam beberapa kelompok keturunan, marga, namun tetap terikat kokoh oleh sebuah struktur pemerintahan. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia III***, p. 295-9.

dalam posisi diam sampai raja atau penguasa menanyakannya. Upaya ini lebih menyentuh dan menyelesaikan masalah dibanding pernyataan terang-terangan ataupun sikap konfrontatif. Bila penguasa tetap kukuh pada pendiriannya, sekelompok masyarakat dapat saja memilih meninggalkan tempat tinggal mereka dan pindah, atau membuka daerah baru di luar jangkauan aparat kerajaan.[17]

Lekatnya otokrasi pada kerajaan-kerajaan nusantara menjadikannya rentan terhadap persaingan yang berujung konflik internal maupun eksternal. Situasi sosial politik terlalu tergantung pada kehendak raja secara perorangan, tanpa dukungan sistem sosial politik yang mapan secara sistemik. Kerajaan-kerajaan nusantara dihadapkan pada problem yang hampir serupa dan terus terulang, di antaranya:

1. Persaingan antar keturunan (*wangsa/marga*) untuk menjadi penguasa.

Kasus paling menonjol dapat dicermati berdasarkan dinamika kerajaan-kerajaan di pulau Jawa yang sarat pertikaian antar keturunan yang diikuti dengan perpindahan pusat kekuasaan. Tidak ada mekanisme penyelesaian konflik internal yang mampu menghindarkan dari resiko runtuhnya tatanan dan keutuhan negara. Perpindahan pusat-pusat kerajaan dari Singosari, Kediri, Majapahit, Demak, Pajang dan terakhir di Mataram Yogyakarta banyak diwarnai konflik berdarah dalam rangka perebutan kekuasaan antar keturunan

[17] Hal ini juga tidak lepas dari perbedaan sistem penguasaan tanah di Eropa dan nusantara, yang secara terminologis merupakan persoalan mendasar tegaknya sebuah kultur feodal. Kekuatan birokrasi di Eropa melahirkan pola penguasaan tanah oleh sebagian kecil orang, sementara yang lain hanya menjadi budak atau pekerja. Tradisi protes sosial yang berkembang dalam masyarakat nusantara juga mengedepankan pendekatan moral daripada konfrontasi. Simak Mohammad Hatta, ***Demokrasi Kita***, (Djakarta: Pandji Majarakat, t.t.), p. 24-8.

raja (*trah*). Karena itu, kebanyakan kerajaan di nusantara, bahkan yang terhitung kerajaan besar, tidak mampu bertahan cukup lama. [18]

2. Persaingan dan peperangan antar kerajaan

Persaingan dan perang sering terjadi antar kerajaan nusantara karena kepentingan ekonomi, stabilitas keamanan, perebutan pengaruh maupun sekedar memperjuangkan hargai diri raja dan keluarganya. Situasi semacam ini masih terjadi hingga mulai berkuasanya bangsa Eropa di nusantara, baik dalam bentuk persaingan terbuka, maupun persaingan diam-diam (*silent rivality*). Di kemudian hari, situasi ini bahkan memberi jalan bagi Belanda dalam menaklukkan seluruh kerajaan nusantara.

3. Rapuhnya daya tahan kerajaan dan hubungan antar kerajaan

Ketergantungan pada kehendak individual menjadikan daya tahan kerajaan kurang begitu kuat. Kerajaan tidak ubahnya sebuah keluarga besar yang memiliki kekuatan berlebih, hingga mampu mengendalikan komunitas yang lebih luas di sekitarnya. Sejalan dengan pola pikir pada masanya, penaklukan dengan kekuatan bersenjata masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam tradisi rivalitas antar kerajaan. [19]

---

[18] Kronik sejarah kerajaan-kerajaan nusantara, khususnya di pulau Jawa memperlihatkan konflik antar keturunan selalu mewarnai perjalanan politik kerajaan. Kasus menonjol yang sempat terekam catatan sejarah dapat dicermati pada perjalanan kerajaan Singosari hingga runtuhnya Majapahit. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia II***, p. 397-451.

[19] Riwayat Sriwijaya bahkan sempat tidak dikenal generasi sesudahnya kecuali dari informasi petualang Cina. Setelah masa kejayaannya Majapahit jatuh dalam perang saudara dan dengan mudah dikalahkan Demak. Era Sultan Agung yang merupakan masa kejayaan Mataram sebenarnya juga bukan masa pemerintahan dengan stabilitas politik dalam negeri yang mantap. Rivalitas dengan negeri-negeri tetangga dan peperangan dengan pemberontakan dalam negeri banyak mewarnai

Keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh pendatang Eropa, dengan mendukung salah satu di antara kelompok yang bertikai. Para pendatang Eropa dapat membangun pengaruh, dan memperoleh konsesi-konsesi perekonomian, bahkan politik. Lemahnya kerajaan-kerajaan nusantara di samping situasi rivalistik dan konfliktif antara kerajaan menjadikannya tidak berdaya ketika berhadapan dengan negara lain yang memiliki struktur organisasi, sistem sosial politik lebih mapan dan persenjataan yang lebih baik dari kalangan pendatang Eropa. Mereka dimanfaatkan sebagai sarana memperlemah kekuatan kerajaan tertentu dengan cara mendukung kerajaan yang lain.[20]

Hingga menjelang penjajahan Belanda, relasi antar kerajaan sarat persaingan untuk dominasi dan penguasaan, bahkan ketika Islam sudah menyatukan mereka. Berbeda dari agama Nasrani yang berhasil mempersatukan Eropa meski disertai hegemoni politik yang despotik, Islam hanya mewarnai tradisi pemerintahan, tanpa menimbulkan hegemoni politik yang mengatasnamakan agama.

Setelah hampir seluruh kerajaan nusantara menerima Islam sebagai agama kerajaan, tidak berarti ada sejarah yang menyatukan antar bangsa yang melahirkan dendam bersama seperti yang dirasakan oleh kerajaan-kerajaan Eropa akibat perang Salib. Nusantara juga tidak mengenal antipati pada institusi keagamaan sebagaimana Eropa sejak lepas dari kungkungan gereja di era kegelapan. Saat Eropa mengalami penyimpangan sejarah, menurut istilah Hans Romain. Islam bahkan baru memulai awal perkembangan dan penyebarannya di nusantara.[21]

---

masa pemerintahannya yang terkategori cukup lama. Bahkan tegaknya kerajaan dimulai dari pertempuran demi pertempuran. De Graff, ***Puncak Kekuasaan Mataram***, p. 32-58

[20] George McTurnan Kahin, ***Nationalism and Revolution in Indonesia***, (Ithaca-New York: Cornell University Press, 1959), p. 3-4.

[21] Kerajaan Islam tertua di Indonesia diyakini muncul sekitar abad ke 13, sementara kurun yang sama merupakan masa kejatuhan pusat Islam dari puncak

Pola hubungan antara raja dengan bawahan dan rakyatnya adalah *patriarchalism*, yang menempatkan kedudukan atasan dan bawahan pada pola hubungan tuan-hamba. Ini terjadi bahkan ketika menyentuh aspek-aspek yang semestinya menuntut profesionalisme. Dapat dicermati sistem rekrutmen tentara pada kerajaan mutakhir nusantara, Mataram, yang dilakukan dengan pengalokasian kerja untuk diri sendiri atau keluarga dan pengabdian pada raja. Rakyat rela terbatasi kesempatannya dalam memanfaatkan sumber daya alam, karena keharusan menyisihkan sebagian waktu, tenaga bahkan kekayaannya untuk kepentingan kerajaan.

Rakyat hanya memiliki kesempatan bercocok tanam sekali sampai dua kali dalam satu tahun, sebab selebihnya dialokasikan untuk mengabdi pada raja. Secara umum, tingkatan pertama terdiri dari raja dan keluarganya; disusul golongan elit dari kalangan bangsawan kerajaan; kemudian golongan non-elit; dan terakhir golongan budak. Setelah sebelumnya sistem monarkhi menciptakan stratifikasi sosial, kurun penjajahan menyebabkan penggolongan masyarakat tersebut kian menajam ke beberapa tingkatan yang rumit.[22]

Ketundukan mutlak bawahan pada raja merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar, sebab sebagaimana dibahas pada bagian terdahulu, kedudukan raja dengan aparat di bawahnya dan rakyat jelata adalah dalam konteks hubungan tuan-hamba. Raja tidak memiliki banyak kwajiban terhadap bawahan ataupun rakyatnya, tapi sebaliknya bawahan dan rakyat jelata mempunyai kwajiban mengabdikan diri dan hidupnya secara penuh pada raja. Kedekatan jarak pengabdian seseorang dengan raja lebih menentukan tingkatan status sosialnya, di mana semakin dekat jarak pengabdian seseorang

---

kejayaannya, Abbassiyah 1258. Johan Hendrik Meulemann "Dunia Islam Abad 20" dalam Taufik Abdullah, eds., ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini***, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2002), p. 7.

[22] Djoko Suryo "Feodalisme: Timur dan Barat" dalam ***Prisma***, No. 8, Agustus 1991, p. 51-3. Simak pula De Graff, ***Puncak Kekuasaan Mataram***, p. 152-4.

dengan raja, maka semakin tinggi derajatnya di tengah masyarakat. Pola relasi antara rakyat dan penguasa semacam ini hampir merata di hampir seluruh wilayah nusantara. Pejabat-pejabat kerajaan, termasuk tentara merupakan status pengabdian hamba pada raja, padahal pada kurun yang sama di Eropa, kedudukan raja telah bergeser menjadi simbul negara.[23]

Meski demikian, keadaan ini diterima oleh rakyat nusantara bukan sebagai bentuk penindasan. Bila pada kurun yang sama masyarakat Eropa merasakan penderitaan yang sangat akibat otokrasi dan berusaha mengubah keadaan, bangsa nusantara tidak banyak merasakannya sebagai penderitaan meski menghadapi sistem yang sama. Pada masyarakat Barat, justifikasi ketuhanan atas status raja mulai dipertanyakan, terlebih bilamana kebijakan kerajaan dengan intensitas kerja birokrasinya dirasa memberatkan masyarakat. Perkembangan intelektual juga mendorong pikiran-pikiran rasional mengemuka mempertanyakan kembali konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang sebelumnya dianut.

Sementara pada kawasan di luar Eropa, kemapanan birokrasi pemerintahan yang pada umumnya masih lemah tidak cukup menimbulkan perasaan tereksploitasi berlebihan pada masyarakat. Pajak dan *upeti* yang biasa diserahkan rakyat pada penguasa tidak menimbulkan pergolakan yang berarti, karena jaringan birokrasi pemerintah belum mampu mengeksploitasi pajak secara sistemik, di samping secara antropologis kondisi masyarakat juga masih benar-benar lemah untuk memberikan respon rasional.[24]

---

[23] Kartodirdjo "Kolonialisme dan Nasionalisme…", p. 26-0. Perubahan sistem pemerintahan Belanda menjadi Republik Sosialis mendudukkan raja sebagai personifikasi negara. Simak P.P. Paulus, ***Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda***, (Jakarta: Alumni, 1979), p. 34.

[24] Kekuasaan dalam otokrasi tradisional umumnya bersifat sangat personal. Sekalipun kekuasaan sangat absolut, namun dalam praktiknya sangat terbatas, di mana kemampuan untuk mentrasformasikan masyarakat lemah. Andrain,

Perbedaan kemajuan sistem birokrasi menimbulkan perbedaan intensitas perasaan tertindas, kesengsaraan maupun respon terhadap sistem otokrasi. Dalam banyak kasus di nusantara, justeru dampak dari kebijakan negara, terutama beban pungutan oleh negara seperti pajak dan *upeti* lebih banyak ditanggung penguasa lokal, yang secara langsung berhadapan dengan penguasa yang lebih tinggi, dibanding rakyat jelata.

Beban pajak dan upeti baru benar-benar terasa justeru ketika penjajah menghegemoni kerajaan-kerajaan nusantara. Dengan tuntutan jenis, besaran dan masa penyerahan yang sistematis, banyak anggota masyarakat yang merasakan beratnya pajak dan upeti sebagai bentuk eksploitasi yang berlebihan. Penerapan Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) yang di antaranya memunculkan insiden terbunuhnya seorang tokoh di Banten merupakan satu bukti bahwa pungutan yang dilakukan penguasa yang lebih mapan secara birokratis lebih terasa menindas dibanding hal yang sama dilakukan penguasa tradisional sebagaimana masa-masa sebelumnya.[25]

Pemberontakan-pemberontakan akibat beban rakyat pada penguasa tidak muncul sebelum adanya sistematisasi kerja birokrasi penjajah yang hegemonik. Kalaupun sering terjadi pada masyarakat tradisional di Indonesia sebelum penjajahan, pada umumnya hal itu memang merupakan satu bentuk pembangkangan, perlawanan penguasa lokal atas penguasa di pusat kerajaan, terutama karena didorong oleh keinginan memisahkan diri. Berbeda halnya ketika birokrasi kolonial yang mapan memanfaatkan pemimpin-pemimpin lokal sebagai aparat-aparat birokrasi. Aparat yang direkrut dan bekerja dalam sistem birokrasi menjadi kurang peka terhadap realitas

Perubahan Sosial dan..., p. 322. Simak pula Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 6-8.

[25] Salah satu kasus menonjol dalam hal ini dapat dicermati pada peristiwa terbunuhnya Haji Abdurrahim. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia IV***, edisi ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p. 288-290.

sosio kultural masyarakatnya sendiri. Struktur birokrasi yang mestinya berperan sebagai perangkat organisasi negara justeru dirasakan masyarakat bawah sebagai instrumen penindas.[26]

Tidak bergeraknya pola pehidupan sosial ekonomi masyarakat, bahkan harus mundur kembali pada pola tradisional agraris pada era kolonial, menjadikan struktur sosial politik tersebut tidak mengalami perubahan hingga mulai berkuasanya bangsa Eropa, khususnya Belanda di nusantara. Sampai menjelang masa kemerdekaan tidak ada tuntutan dari rakyat jelata untuk mengubah status sosial menjadi setara. Bangsa-bangsa di nusantara belum mengalami perubahan dari pola hidup masyarakat pra-industri. Tidak ada imperasi sosial, ekonomi, kultural maupun intelektual yang secara sigifikan memungkinkan perkembangan ke arah perubahan sebagaimana pengalaman Barat era *renaissnace*, selain gelombang nasionalisme dan tuntutan kemerdekaan seiring gelombang perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. [27]

C. Tipologi Islam Nusantara

Seperti banyak diungkap dalam sejarah nasional, sejak sebelum masuknya Islam, bangsa-bangsa di kawasan nusantara telah terbiasa berhubungan dengan bangsa India, Cina, Afrika Timur dan Arab. Hubungan dengan bangsa-bangsa di kawasan tersebut memungkinkan terjadinya interaksi budaya dan peradaban antar bangsa, yang di antara indikatornya tampak pada masuknya agama

---

[26] Dalam struktur masyarakat tradisional, para pemimpin terikat oleh perasaan komunitas yang sekaligus menjadi legitimasi kekuasaan seseorang, sementara dalam struktur birokrasi modern kedudukan seseorang menjadi impersonal dan memiliki kekuatan memaksa yang lebih sistematis. Andrain, ***Kehidupan Politik dan...***, p. 332-3.

[27] Masyarakat bahkan masih menerima pola pembagian status sosial, di mana kepemilikan kekayaan tidak menjadi jaminan status sosial politik dan kultural. Sartono Kartodirdjo “Stratifikasi Sosial pada Masa Kolonial” dalam ***Lembaran Sedjarah***, p.43-5.

Hindu, Budha dan Islam. Dari sana terdapat beberapa versi sejarah masuknya Islam ke nusantara. Sebagian besar sejarawan meyakini Islam dibawa pedagang dari Gujarat, India selatan, sementara pendapat lain yang kurang populer menunjukkan bahwa Islam masuk dari daratan Cina. Keduanya memiliki bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Islam di nusantara memang dibawa masuk oleh para pedagang dan da'i dari kedua kawasan, sekalipun intensitas upaya kajian yang dilakukan terhadap versi kedua jarang dilakukan.

Kajian sejarah nasional memang jarang mengungkap pengaruh Cina dalam penyebaran Islam, meski kemungkinan tersebut tak dapat diabaikan. Di antara bukti historisnya adalah kehadiran armada laut Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Pengaruh Cina juga tampak pada berbagai pola dan cara hidup masyarakat nusantara. Bangsa Cina memperkenalkan bangsa nusantara dengan berbagai pola hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pakaian yang dijahit, cara bercocok tanam, penanaman dan konsumsi beberapa komoditas seperti tebu, terong dan kacang hijau, pengolahan bahan pangan, pembuatan makanan tertentu dari kedelai dan kacang hijau, sistem pengolahan gula dan sebagainya lebih mirip dengan tradisi Cina dibanding India.[28]

Interaksi selama berabad-abad menyebabkan keberadaan etnis Cina telah diterima luas oleh banyak pemerintahan nusantara. Pada kurun yang lebih kemudian tercatat beberapa jabatan penting di kerajaan Islam nusantara diduduki etnis Cina, terutama setelah diterimanya Islam sebagai agama resmi. Hal ini tentu tidak terjadi

[28] Penumpasan Dinasti T'ang terhadap pemberontakan di bagian selatan wilayah Kanton yang sebagian melibatkan kaum muslim didukung orang Persi dan Arab yang menyebabkan muslim Cina mencari perlindungan ke Kedah dan Palembang, yang melahirkan perkampungan Cina muslim yang turut mempengarui penyebaran Islam sejak abad 7 Masehi. Syed Naqquip al-Attas, ***Preliminary Statement on General Theory of Islamisation of The Malay-Indonesia Archipelago***, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1969), p. 11. Simak pula Uka Tjandrasasmita "Penyebaran Islam" dalam Taufik Abdullah, eds., ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara***, p. 10.

manakala pejabat dari etnis Cina tersebut belum beragama Islam. Etnis Cina bahkan merupakan tokoh-tokoh penting di balik tegaknya beberapa dinasti Islam nusantara, termasuk sebuah dinasti Islam dominan seperti kerajaan Islam di Demak.[29]

Terlepas dari versi sejarah mana yang lebih dapat dipercaya, pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa berbeda dari masuknya Islam ke kawasan lain, semisal Timur Tengah, Afrika, Eropa dan India, Islam masuk ke kawasan nusantara dengan relatif tanpa gejolak. Pada kawasan lain, sejarah mencatat hampir selalu terdapat ekspedisi ataupun pengerahan pasukan bersenjata yang menandai awal masuknya Islam ke suatu kawasan. Meski banyak sejarawan Islam menolak adagium yang menyatakan bahwa Islam disebarluaskan dengan pedang, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa senantiasa ada ekspedisi militer dan disusul hegemoni politik menandai masuknya Islam ke suatu kawasan. Sementara di wilayah nusantara, tidak ada cukup bukti sejarah yang menunjukkan adanya ekspedisi pasukan bersenjata dari kawasan pemerintahan Islam tertentu yang datang ke nusantara dalam rangka penaklukan (*futuhat*) ataupun misi lain.[30]

Islam sendiri terkategori relatif terlambat masuk dan berkembang di kawasan nusantara dibanding kawasan lain, semisal India, Timur Tengah bahkan Eropa. Kondisi ini tampaknya berdampak signifikan terhadap intensitas dan karakteristik

---

[29] Tjandrasasmita "Penyebaran Islam", p. 14. Kesaksian Ma Huan, sebagaimana dikutip De Graff, menyatakan bahwa agama Islam yang pertama di Jawa sebagian tersebar di kalangan pendatang dari Cina, terutama di daerah pesisir Gresik, Tuban dan Surabaya. Pemberontakan Pangeran Pekik di Surabaya juga tercatat melibatkan penembak jitu dari Cina yang dipimpin oleh Endrasena. Simak pula De Graaf, ***Puncak Kekuasaan Mataram...***,p. 259-260.

[30] Masuknya Islam ke Mesir, Persia, India atau Spanyol dapat dibandingkan dengan masuknya Islam di Asia Tenggara. Berbeda dari kawasan lain, seperti Timur Tengah, Afrika, India dan Eropa, Islam menyebar di nusantara tanpa melalui perang, bahkan dalam proses panjang. Perkembangan komunitas Islam berlangsung sejak abad ke 7 sampai 11 Masehi, tetapi baru muncul kerajaan Islam abad ke 13 dan 14. Simak Tjandrasasmita, "Penyebaran Islam" p. 11-14.

keislaman nusantara, setidaknya pada kurun awal perkembangannya. Perkembangan Islam di Mesir, Turki, ataupun Spanyol umumnya dimulai dari ekspedisi militer dan hegemoni politik, sementara pola perkembangan Islam di nusantara dimulai dari terbentuknya komunitas masyarakat Islam, baru secara bertahap mempengaruhi penguasa setempat. Barang kali karena itu intesitas kepekaan sentimen keagamaan mereka terhadap bangsa Eropa-Kristen kurang begitu menonjol. Di samping karena proses masuknya yang relatif damai dan berlangsung secara akulturatif, kebaruan waktu penyebaran serta tipologi keislamannya mempengaruhi sikap umat Islam terhadap kehadiran bangsa Eropa-Kristen.

Tentu saja hal ini belum termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh polarisasi perkembangan intelektual, budaya dan politik Islam sebagai akibat akulturasi dan berkembangnya paradigma keislaman tertentu di nusantara. Sekalipun Islam di India dimulai dengan ekspedisi militer dan penaklukan kerajaan-kerajaan Hindu, namun interaksi Islam dengan paham-paham lokal melahirkan intensitas sentimen yang berbeda. Corak keislaman *asketik* menjadikan intensitas kepekaan sentimen terhadap Barat-Kristen tidak lebih tajam dibanding pengalaman Islam di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah pada umumnya. Diterimanya Islam di hampir seluruh kawasan nusantara baru menimbulkan sekat ideologis setelah pendatang dari Eropa sering secara ofensif berupaya menebarkan ajaran agamanya, Kristen, menyaingi agama setempat. [31]

Di kawasan Timur Tengah sendiri, Islam pada kurun yang sama juga bergeser seiring melemahnya kekuatan sosial politik, intelektual maupun militer. Islam bergeser dari corak keagamaan heroik yang mampu mendorong penaklukan-penaklukan, kemudian menjadi progresif akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

---

[31] Sentimen keagamaan baru muncul setelah secara ofensif pendatang dari Eropa-Kristen secara nyata mengintervensi kehidupan sosial keagamaan dan menindas perekonomian umat Islam. Abdullah dan Azra "Islam dan Akomodasi...", p.37.

masa kejayaannya, dan terakhir asketik dengan merebaknya pemahaman sufistik. Pada kurun terakhir, sekalipun pada sebagian dunia Islam kepekaan sentimen anti Barat-Kristen masih cukup besar, namun mereka tidak cukup berdaya menghadapi invasi Barat atas wilayah-wilayahnya. Sentimen anti Barat-Kristen yang tersisa juga tidak melahirkan solidaritas untuk menghadapi musuh yang sama.[32]

Kebaruan kedatangan Islam di nusantara menjadikan perkembangannya baru berada pada taraf periferal, bahkan di lingkungan kerajaan Islam sendiri. Islam baru hidup dan berkembang sebagai simbul negara dengan serangkaian tradisi sosial keagamaannya. Islam belum menjadi paradigma sosial budaya yang disertai kedalaman sentimen keagamaan yang mampu menempatkan ajaran agama sebagai satu-satunya referensi kebenaran sebagaimana pengalaman Barat era *Dark Age* dan sesudahnya. Sentimen keagamaan lebih menonjol pada persoalan perbedaan internal Islam, sebagaimana skisma antar *madzhab* serta penghakiman terhadap tokoh-tokoh *wihdatul wujud*, seperti al-Hallaj atau Siti Jenar. Di Jawa, penghakiman atas Siti Jenar tidak diekspose sebagai satu bentuk perang terhadap pembuat *bid'ah*. Peristiwa tersebut masih dibungkus dengan berbagai mitos dan legenda hingga tidak mengesankan sebagai sebuah sadisme yang mengatasnamakan agama.[33]

---

[32] Livingstone M. Huff "The Crusades and Colonial Imperialism: Some Historical Considerations Concerning Christian-Muslim Interaction and Dialogue" dalam ***Missiology: En International Review***, Vol. XXXII, No. 2, April 2004, p. 145-7.

[33] Dalam sejarah pernah tercatat ada seorang tokoh bernama Syeh Siti Jenar yang mengembangkan paham teosofi yang tidak sejalan dengan *mainstream* ulama Jawa sehingga membuatnya dihukum, yang itupun masih dibungkus dengan berbagai mitologi. Pada kurun modern, skisma Islam yang sempat muncul antara kaum tradisionalis dan modernis, yang pada dasarnya masih perlu dipilahkan antara persoalan teologis dan politis, sebab skisma antara NU dan Muhammadiyyah misalnya yang pada dasarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan fundamental, di mana keduanya sama-sama berpaham *sunni* dalam fiqih maupun teologi. Nurcholish Madjid "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ari sebagai Doktrin dan 'Aqidah

Kerajaan Islam nusantara tidak pernah benar-benar menjadi negara agama yang menempatkan hukum dan kebenaran agama mengatasi setiap keputusan sosial politik maupun intelektual. Penumpasan berbagai pemberontakan di kerajaan Demak, Pajang dan Mataram hampir seluruhnya didorong oleh motif politik. Hanya pada peristiwa perang Paderi, yang berakhir dengan kekalahan upaya penegakan ajaran agama dilakukan, yang itupun masih perlu dikaji lagi eksistensinya apakah sebagai upaya penegakan hukum agama atau persaingan kultural antara yang bertradisi Islam dengan mereka yang masih kukuh dengan tradisi lokal.[34]

Proses Islamisasi nusantara yang berlangsung secara natural dan damai, di samping corak keislaman yang menyertai, memiliki dampak yang relatif berbeda pada terbentuknya karakter keislaman masyarakat nusantara. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan Islam berkembang sedemikian pesat, hampir-hampir secara total menggantikan peran agama Hindu dan Budha yang dalam sejarah diakui pernah diapresiasi masyarakat nusantara secara hampir merata. Kerajaan-kerajaan Hindu di pulau Jawa yang sedemikian besar dan luas pengaruhnya seolah tidak tersisa, sekalipun jejak-jejak sejarahnya masih sangat nampak baik dalam budaya maupun situs-situs kesejarahannya.[35]

Islamiah" dalam Nurcholish Madjid, ***Islam: Doktrin dan Peradaban***, (Jakarta: Yayasan Paramadina, cet. 2, 1992), p. 269-270. Sima pula Tjandrasasmita "Penyebaran Islam", p. 21.

[34] Kasus Perang Paderi memperlihatkan pertentangan agama akibat upaya purifikasi agama yang sebelumnya sudah diterima secara sinkretik. Akibat pengaruh paham Wahabi sepulang dari Makkah, kaum Paderi berusaha menghapuskan hal-hal yang dinilai *bid'ah* dengan sikap keras. Mohammad Hatta, ***Memoir***, (Jakarta: Tintamas, 1979), p. 1-2.

[35] Bagi pengamat Barat, fenomena ini sangat mengherankan, mengingat Islamisasi Jawa berlangsung sedemikian sempurna dari segi kuantitas, di mana dominasi agama Hindu praktis tergantikan oleh Islam. Simak Marshal Hodgson, ***The Venture of Islam***, jilid 2, (Cichago: The University of Chichago Press, 1974), p. 55.

Sebagaimana agama-agama sebelumnya yang masuk ke kawasan ini, masuknya Islam diikuti dengan terjadinya proses perpaduan dengan budaya nusantara. Hasil keterpaduan Islam nusantara dengan budaya lokal lebih tampak sebagai restorasi kultur dan tradisi dibanding internalisasi dogma keagamaan. Budaya sosial politik bahkan keagamaan lebih didominasi unsur budaya lokal, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu. Pada kurun sebelumnya, pola penyebaran agama agama Hindu dan Budha kurang lebih juga berlangsung serupa. Agama Hindu dan Budha mengalami perpaduan dengan kultur lokal bahkan antar keduanya, yang di antaranya dapat dicermati pada corak keagamaan Hindu dan Budha yang berkembang di wilayah ini pada masa Majapahit.[36]

Perkembangan nusantara pasca kolonial menunjukkan sentimen keislaman tidak cukup menonjol selain sekedar munculnya kesadaran untuk merebut kembali kejayaan yang sempat terampas oleh peristiwa penjajahan. Kecuali di beberapa kerajaan kecil, seperti Aceh, Palembang dan Maluku, tidak ditemukan momentum dan upaya kesejarahan yang menjustifikasi perilaku sosial politik bahkan keilmuan berdasarkan ajaran Islam. Impian untuk menegakkan kembali kejayaan Islam seperti sebelum masa kolonial tidak cukup berkembang sebagaimana pengalaman di India misalnya, karena kerajaan Islam pra-kolonial tidak terlalu dipandang sebagai sebuah prestise budaya yang terlalu berarti. Selain di Aceh yang memang paling akhir ditaklukkan Belanda, masa lalu kerajaan sebelum kolonialisme berlangsung tidak terangkat sebagai *proto type* yang akan ditegakkan kembali.

Islam di dunia selama memasuki abad 14 dan 15 pada dasarnya sudah didominasi pola keislaman sufistik. Islam masuk ke nusantara setelah mengalami berbagai pergeseran paradigma hingga sampai

[36] Tokoh-tokoh seperti Sunan Kalijaga merepresentasikan bagaimana hazanah budaya asli nusantara yang sudah dipengaruhi Hindu-Budha Majapahit dihargai sebagaimana Islam. Simak Clifford Geertz, ***Islam Observed***, (Chicago: The University of Chicago Press, 1975), 25-9.

pada corak mutakhirnya, sufisme eskapistik. Islam bahkan telah mengalami fase kemunduran pada berbagai aspek kehidupan, baik intelektual, politik, militer dan berbagai aspek yang lebih luas. Tipologi Islam semacam itu memiliki kemiripan dengan tradisi dan budaya nusantara ketika itu yang juga sarat dengan mistisisme, dan menyebabkannya mudah diterima masyarakat nusantara yang memang pada kurun sebelumnya sarat dengan budaya mitis. Karena itu, Islam secara konseptual tidak cukup menyuntikkan progresifitas dinamika sosial maupun intelektual di kawasan nusantara. [37]

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam semakin intensif berkembang ke wilayah Asia Tenggara dan Timur jauh ketika pusat peradaan Islam mengalami tekanan dan kekalahan. Sejak runtuhnya dinasti Abbassiyah, pergerakan Islam tampak lebih intensif mengarah ke Asia Timur. Islam seolah sudah tidak dapat bergerak lagi melanjutkan ekspansinya ke Eropa, bahkan terpukul mundur dari Spanyol. Gerak penyebaran Islam ke wilayah Timur tidak disertai lagi dengan ekspedisi pasukan, karena kekuatan militer di pusat-pusat dunia Islam sudah terkonsentrasi untuk keperluan-keperluan domistik dan regional. Tidak ada pemerintahan yang memiliki kekuatan militer cukup besar dan kuat yang mampu melakukan ekspansi ke luar kawasan. Turki sebagai kerajaan terbesar hanya membangun pengaruh spiritualnya bagi dunia Islam, dan sudah tidak begitu ekstensif melakukan ekspansi teritorial di luar wilayah yang sebelumnya dikuasai. Apalagi dinasti-dinasti kecil yang mandiri,

---

[37] Sampai kurun modern, dari segi teologis, Islam yang masuk ke nusantara didominasi pola pikir Asy'ariyah dengan etika sufistik Ghazalian. Pemikiran Islam menggumpal dalam anyaman ortodoksi agama, yang pada gilirannya tidak mengenal perubahan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta perkembangan sains dan teknologi. Amin Abdullah "Pemikiran Islam dan Realitas Masyarakat "Mencermati Konsekwensi Pemikiran Islam a'la Mohammed Arkoun" dalam Amin Abdullah, ***Falsafah Kalam di Era Posmodernisme***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), p. 49.

mereka hanya mampu mempertahankan diri tanpa cukup keberanian ekspansi.[38]

Terlepas sebagai hasil kebijakan pemerintahan di pusat-pusat dunia Islam atau kehendak individual, da'i-da'i Islam bergerak secara hampir bersamaan dengan masuknya para pedagang dari Timur Tengah, India dan Cina. Bersama mereka ajaran Islam dapat terus menyebar ke berbagai kawasan, meski Islam yang di bawa da'i dan pedagang tersebut sudah bukan lagi Islam yang diliputi karakter pemikiran yang progresif. Bila di Eropa dan Timur Tengah khususnya Islam melahirkan lembaga-lembaga politik dan keilmuan, rupanya tidak demikian halnya dengan Islam yang berkembang di Timur. Lembaga-lembaga keagamaan yang berkembang di Timur lebih menonjol karakter etisnya dibanding intelektualitas rasional, apalagi politis.[39]

Pembinaan keislaman mengapresiasi lembaga-lembaga kultural setempat. *Pesantren* atau *Meunasah* merupakan lembaga keilmuan keagamaan murni yang mengajarkan Islam dengan menonjolkan dimensi etis dan normatif (*syari'ah*) yang menekankan aspek-aspek peribadatan, dengan tanpa menyentuh bidang-bidang keilmuan yang lain di luar disiplin keagaman. Para santri dididik disiplin keagamaan, dengan menjadikan kitab-kitab klasik sebagai acuan. Islam nusantara berkembang pada saat dunia pemikirannya mengalami stagnasi (*jumud*), di mana kitab-kitab klasik yang menjadi referensi diposisikan secara normatif dan bukan sebagai sesuatu yang harus dikritisi dan dikembangkan. Pada kurun kemudian, ketika muncul gerakan

---

[38] Konsolidasi dunia Islam memang sedang mengalami keruntuhan yang terpecah ke dalam dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing, mengalami kemunduran intelektual bahkan diikuti dengan pengusiran umat Islam dari daratan Siberia. Meulemann "Dunia Islam Abad 20" p. 7.

[39] Merek membentengi tradisi yang hidup di tengah masyarakat Islam ketika berlangsung gelombang reformasi Islam, yang dalam istilah Feillard, sebagai gelombang reformasi tahap kedua. Andrée Feillard, ***NU vis a vis Negara; Pencarian Bentuk dan Makna***, terjemahan Lesmana, (Yogyakarta: LKiS, 1999), p. 6.

modernisasi Islam, mereka dikenal sebagai cikal-bakal kelompok yang dikenal sebagai muslim tradisionalis.[40]

Madzhab fiqih yang berkembang di wilayah ini adalah *Sunni*, tapi tradisi spiritual keagamaan mereka lebih mirip dengan Syi'ah, hingga memunculkan asumsi dari para sejarawan bahwa Islam pertama kali masuk ke nusantara dibawa kaum Syi'ah. Namun demikian, kalau dicermati kultur spiritual masyarakat nusantara mungkin saja sebenarnya bukan karena adanya paham Syi'ah yang berkembang di nusantara, tapi karena adanya akulturasi Islam dengan kultur dan paham lokal yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan tradisi Syi'ah, dalam herarkhi spiritual dan tradisi keagamaan.[41]

Sampai saat kehadiran dan penguasaan bangsa Eropa, Islam di nusantara belum memiliki karakteristik keagamaan yang menciptakan sentimen anti penjajah yang cukup keras. Warisan situasi konfliktif Islam dengan Kristen Barat pada kurun sebelumnya cukup mempengaruhi sikap keagamaan bangsa Eropa, sekalipun tidak demikian halnya sikap keagamaan yang ditunjukkan umat Islam nusantara. Peristiwa Perang Salib yang begitu traumatik dan memberi inspirasi besar bagi bangsa Eropa untuk membalas kekalahan ternyata tidak cukup dipandang sebagai momen sejarah berarti bagi umat Islam. Perang Salib telah menjadi pertarungan harga diri bagi Eropa, tetapi tidak demikian bagi umat Islam baik di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan apalagi di Indonesia.

---

[40] Sebagai respon atas serangan-serangan kaum modernis, sekalipun bukan satu-satunya alasan, kelompok tradisionalis mengukuhkan diri ke dalam beberapa organisasi. Satu di antara yang paling menonjol adalah Nahdlatul Ulama (NU). ***Ibid.***, p. 8-15.

[41] Dalam tradisi keagamaan pesantren terdapat satu pola herarkhi sosial keagamaan, di mana ada sebagian tokoh keagamaan, kyai, yang tingkat kharisma spiritualnya lebih berpengaruh di atas yang lain. Zamakhsyari Dhofier, ***Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai***, (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 166. Simak juga Geertz, ***The Religion of Java***, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1960), p. 87-103.

Hanya pada beberapa kasus, seperti perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Aceh, Perang Diponegoro dan pemberontakan kaum Tariqah di Banten, Islam sempat diangkat sebagai penggelora semangat perjuangan, meski belum sampai pada upaya menegakkan hukum-hukumnya dengan menghakimi perilaku tertentu sebagai sesuatu yang menyimpang dan harus diberantas. Sementara pada kerajaan besar, Mataram, motif keislaman bahkan kurang tampak. Rivalitas antara Mataram dengan Cirebon dan serangan atas panembahan Gresik dan Belanda lebih tampak karena politik dibanding keagamaan.[42]

D. Tipologi Kerajaan Islam Nusantara

Kehadiran Islam di nusantara memberi identitas bagi penyokong pemerintahan Islam yang terbentuk, tetapi secara institusional Islam tidak menghegemoni pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan kerajaan Islam tidak terikat oleh kepemimpinan agama, sekalipun di dalamnya banyak didukung tokoh-tokoh agama yang menurut, Azyumardi Azra, saling terikat oleh adanya jaringan keilmuan. Hanya saja, jaringan tersebut bersifat kekerabatan keilmuan, yang lebih berpretensi membangun kesamaan madzhab dan selebihnya diorientasikan untuk kepentingan dakwah, penyebaran agama.[43]

Warna kultur sosial politik yang dipengaruhi oleh Islam di nusantara hanya tampak pada momentum-momentum tradisi. Islam

---

[42]Dalam situasi tertentu, agama (Islam) sering diangkat sebagai sumber pengorganisasian perjuangan. Meulemann "Dunia Islam...", p. 11. Giri yang dikenal sebagai pusat spiritual diserang Mataram yang salah satu alasannya adalah tempat tersebut merupakan tempat pelarian musuh-musuh kerajaan Mataram. Simak De Graff, ***Puncak Kejayaan...***, p. 248.

[43] Penyiar Islam di Indonesia umumnya memiliki keterkaitan keilmuan dengan mereka yang pernah belajar di *haramain*, yang umumnya dikenal dengan *ashab al-Jawiyyun*. Azyumardi Azra dan Oman Fathurrahman, "Jaringan Ulama" dalam Taufik Abdullah, eds, ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara***, p. 110.

hanya tampak pada upacara-upacara keagamaan yang ditangani kerajaan. Secara politis, apresiasi terhadap Islam hanya memberikan legitimasi bagi kharisma kepemimpinan yang semula disandarkan pada tokoh ataupun simbul-simbul mitis setempat menjadi kharisma keagamaan. Jejak-jejak kharisma tersebut tampak pada diagungkannya raja-raja tertentu, seperti Cirebon, Banten dan Gresik yang membuat iri panembahan Senopati Mataram.[44]

Apresiasi kerajaan-kerajaan, terutama yang besar atas Islam bahkan belum menyentuh aspek penerimaan hukum agama secara penuh. Meski sudah menerima Islam sebagai agama resmi, tapi tradisi setempat masih tetap berjalan tanpa banyak memperoleh kritik ataupun penerapan hukum berdasarkan agama. Islam berintegrasi dan mewarnai kultur setempat yang di satu sisi menjadikannya mudah diterima, tetapi di sisi lain, tidak mampu memberikan kritik yuridis secara signifikan. Barangkali paradigma Islam yang demikian, sufistik, cenderung menjadikannya tidak cukup *concern* terhadap pembenahan hukum, melainkan lebih menekankan persoalan spiritual. Rekonseptualisasi tatanan sosial politik juga kurang memungkinkan untuk terbangun di tengah perkembangan intelektual Islam yang berada pada fase kemunduran.

Seiring tertutupnya pintu *ijtihad*, nyaris tidak dijumpai pembaruan baik bidang hukum, theologi dan apalagi bidang sosial politik, karena pada bidang keagamaan sendiri diliputi kemandegan (*jumud*) berfikir. Wacana sosial politik Islam yang masuk ke nusantara Islam hanya memberikan imbuhan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan nusantara. Hukum Islam diterapkan secara terbatas di beberapa kerajaan. Islam hanya memberikan label dan legitimasi atas

[44]Menurut De Graff Gelar Sultan Agung bagi panembahan *Seda Ing Krapyak* merupakan gelar anumerta, di mana gelar keagamaan yang kharismatik tersebut tidak sempat diperoleh Panembahan Senopati secara resmi hingga wafatnya. Padahal gelar sultan sudah terlebih dahulu diterima raja Cirebon. De Graff, ***Puncak Kejayaan Mataram...***, p. 316-324.

kultur yang telah ada sebelumnya, tanpa memperbaharui sistem sosial politik. [45]

Dengan tipologi semacam ini, persoalan apakah Islam sudah menjadi dasar negara atau tidak, kurang menampakkan pengaruh. Ini dikarenakan pola perilaku menonjol masyarakat nusantara umumnya memang masih komunalistik. Kontrol sosial atas berbagai perilaku dan kasus moral masyarakat yang lekat dengan pandangan adikodrati merupakan warisan budaya khas yang ada sejak sebelum masuknya Islam. Kecuali pada kasus munculnya ketokohan ulama yang berupaya meluruskan kesadaran komunal yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai normatif keagamaan, Islam tidak banyak memberi kontribusi atas perubahan kultur dan sistem sosial politik yang progresif.[46]

Dari sini dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya Islam nusantara tidak mengenal pengalaman adanya negara agama, dalam arti negara dikuasai oleh doktrin-doktrin agama. Meski menjadikan Islam sebagai agama negara, tapi pola perilaku yang dijalankan memiliki kemiripan dengan sistem negara sekuler, di mana agama tidak menjadi pertimbangan yang cukup signifikan dalam menentukan jalannya sistem pemerintahan, penataan hukum yang terkait dengan perilaku sosial budaya maupun norma-norma intelektual. Sistem sosial politik kerajaan Islam nusantara, khususnya di Jawa, bahkan masih lebih didominasi oleh warisan sistem sosial

---

[45]Islam Indonesia dihadapkan pada dua persoalan pokok. Di satu sisi, penerimaan Islam masih periferal, dipermukaan saja. Di sisi lain, mereka yang tergolong islami, santri, dinilai kalangan pembaharu masih lekat dengan *taqlid* buta, *bid'ah* dan *khurafat*. Simak tipologi santri dalam Geertz, ***The Religion of Java***, p. 127.

[46] Ketokohan Islam semula lebih banyak tampak pada penyebar ajaran Islam, seperti *wali songo* di Jawa, atau pemantapan tradisi sufistik seperti Ar-Raniri atau Syeh Yusuf. Sementara gerakan puritan sebagai mana Paderi, Ahmad Chatib dan sebagainya muncul sebagai respon atas perkembangan di luar negeri, di mana pada kurun mereka muncul tokoh-tokoh seperti Wahabi di Hijaz dan Fulani di Nigeria. Meulemann, "Dunia Islam Abad 20", p. 8.

politik pra-Islam. Penerimaan atas sistem pemerintahan Islam baru tampak pada perubahan gelar raja dari *Prabu*, *Panembahan*, *Susuhunan* atau *Raja* menjadi *Sultan*. Selebihnya, menyangkut status dan kedudukan raja dengan bawahan dan rakyat jelata tetap berlangsung seperti semula. Kedudukan raja di hadapan rakyat dan sebaliknya pada kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Kondisi ini dimungkinkan oleh kemiripan pola pikir, tingkat perkembangan intelektual, sosial ekonomi dan budaya bangsa-bangsa di nusantara.[47]

Kondisi ini secara umum mirip tradisi politik Eropa sebelum *renaissance* dan revolusi industri. Hanya saja, pada kurun petualangan (*piracy*) dan kolonialisasi, perkembangan Eropa mulai mengarah kepada kapitalisme dan merkantilisme yang meningkatkan jumlah dan nilai tawar kuat bagi aristokrat serta pemilik modal di hadapan raja. Kondisi ini masih ditunjang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta dinamika perekonomian yang berkembang pesat. Interaksi Barat dengan dunia Timur meski melampaui diselingi perang Salib yang berlangsung sekitar 300 tahun, intesitas perdagangan, ekspansi ekonomi dan kapitalisme berkembang sedemikian cepat dan luas di berbagai kota di Eropa. Sementara nusantara, kondisi serupa tidak terwujud hingga kehadiran bangsa-bangsa penjajah. Nusantara hanya mengapresiasi dari dunia Islam sofistikasi etiket, penggunaan gelar dan simbul-simbul keagamaan.[48]

---

[47] Tradisi sosial politik di pusat-pusat Islam juga masih lekat dengan otokrasi bahkan setelah masuknya bangsa kolonial, sebagaimana menjadi keprihatinan Afghani, seorang tokoh pembaharu di Mesir. Simak Nasution, ***Pembaharuan dalam Islam...***, p. 56.

[48] Jelas ada ketimpangan arah peradaban, di mana nusantara semakin mundur akibat kehadiran bangsa Barat, di sisi lain Barat sedang mengalami tingkat perkembangan yang pesat di berbagai bidang, di mana peradaban *renaissance* membukakan jalan bagi berbagai perubahan sosial. Simak Suhelmi, ***Pemikiran Politik Barat...***, p. 130.

Gelar raja Islam, Sultan, menjadi kebutuhan akan legitimasi kekuasaan yang tampak ketika Panembahan Agung Mataram, yang setelah wafatnya dikenal sebagai sultan Agung berusaha memperoleh gelar Sultan dari para Ulama di Saudi Arabia. Perubahan gelar itu sendiri tidak cukup diikuti dengan perubahan sistem sosial politik kerajaan Islam. Kecuali di beberapa wilayah nusantara, khususnya luar Jawa, sistem dan tata negara pra-Islam masih lebih lebih kuat melekat berikut mitos-mitosnya. Di dunia Islam sendiri, yang kala itu berpusat di Turki sistem sosial politiknya juga masih lekat dengan sistem otokrasi tradisional, dengan legitimasi adikodrati.[49]

Pemikiran politik nusantara masih membenarkan sistem otokrasi, dan belum ada alternatif lain, termasuk demokrasi. Konseptualisasi Islam ke dalam demokrasi yang dipadankan dengan *syurâ* muncul jauh setelah bangsa-bangsa dunia Islam memasuki alam kemerdekaan. Itupun berlangsung setelah para pembaharu Islam menyatakan perlunya membuka kembali pintu *ijtihad* yang juga masih sebatas wacana yang penuh kontroversi. Hingga memasuki masa kolonial, otokrasi masih menjadi satu-satunya tatanan yang diterima dan tidak ada cukup keberatan dari pihak manapun atas diterapkannya sistem tersebut, bahkan selalu memperoleh pembenaran yang tidak jarang disandarkan atas alasan keagamaan.[50]

Konsep Islam tentang pemerintahan sendiri memang cenderung tidak baku. Pemerintahan Islam dalam tataran konseptual maupun

---

[49] Para pemimpin politik nusantara masih bersaing status dan simbul-simbul kekuasaan sebagaimana ambisi raja Jawa yang berupaya keras memperoleh gelar Sultan. Simak De Graff, ***Puncak Kejayaan Mataram...***, p. 316-320.

[50]Gagasan perlunya negara Islam merupakan wacana baru, terutama menjelang dan pasca kemerdekaan, yang pada masa itupun masih sebatas diskursus sejak merebaknya gelombang pembaharuan Islam. *Concern* para pembaharu seperti Afghani, Abduh dan Rosyid Ridla lebih terarah pada pembaharuan pola pikir, strategi pemberdayaan umat dan pembebasan dari hegemoni kolonial, sedangkan masalah ketatanegaraan masih dalam perdebatan. Simak Sjadzali, ***Islam dan Tata Negara...***, p. 121-136.

praktik tidak ditentukan secara normatif keagamaan. Dalam praktiknya Islam pada kawasan tertentu cenderung berinteraksi secara dialektis dengan kultur bahkan agama setempat. Bila pada masyarakat yang belum menganut agama formal saja keislaman masyarakat berpadu dengan unsur-unsur kepercayaan dan tradisi setempat, maka kurang lebih demikian halnya dalam sistem politik dan tata pemerintahan. Tradisi setempat bahkan cenderung memiliki pengaruh kuat dalam bangunan struktur sosial politik pemerintahan Islam.

Secara garis besar hal ini dapat dicermati dari fenomena kesejarahan Islam sejak masa nabi di Jazirah Arab hingga penyebaranannya di kawasan lain. Islam masa Nabi dan Sahabat yang berpusat di jazirah Arab dengan segala kekhasan kulturalnya mampu menghadirkan sistem sosial politik egaliter; Islam di India menunjukkan adanya pengaruh tradisi Hindu; dan ketika berada di wilayah Persia, kultur Persia juga kental dalam tradisi sosial politik dan pemerintahan hingga lahirnya monarkhi berdasarkan keturunan. Karena itu, Islam pada kawasan nusantara juga tak dapat menghindarkan dari kecenderungan serupa, di mana tradisi sosial politik dan pemerintahan Islam potensial menyesuaikan dengan situasi masyarakat setempat ataupun situasi kesejarahan pada masanya.[51]

[51]Telaah Sjadzali terhadap pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik memperlihatkan bahwa pemikiran tentang sistem ketatanegaraan mayoritas pemikir Islam klasik cenderung bertolak dari realitas sistem sosial politik yang berlaku pada masanya, yaitu monarkhi, yang tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Simak Sjadzali, ***Islam dan Tata Negara...***, p. 107-110.

KOLONIALISME DAN MASUKNYA SISTEM POLITIK MODERN DI INDONESIA

A. Penjajahan: Sebuah *Trend* Sejarah

Imperialisme dan kolonialisme, dua terminologi populer untuk penjajahan, dipahami secara berbeda-beda oleh banyak pihak. Apalagi setelah berkembang kepada beragam paradigma pemahaman baik liberalis, marxistik maupun beragam pola interpretasi lain, yang menjadikan pengertian keduanya cenderung polemistik dan dialektik. Scrutton dalam kamus pemikiran politiknya menyatakan imperialisme sebagai: *the extention of power through conquest or pursuit of empire i.e. of a global influence so dominant as to amount to virtual soverignty wherever it is successful*. Dalam hal ini imperialisme diterjemahkan sebagai perluasan kontrol politik atas daerah lain, yang sinonim dengan ekspansi kolonial.[1]

---

[1]Roger Scruton, ***A Dictionary of Political Thought***, (London: The Macmillan Press, 1983), p. 215-6. Simak juga, Sartono Kartodirdjo "Struktur Sosial dari Masjarakat Tradisionil dan Kolonial" dalam ***Lembaran Sejarah***, (Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, 1969), p. V.

Abdul Rahman memandang imperialisme sebagai paham yang mendorong suatu negara memperluas wilayah dengan cara menjajah negara lain, sedangkan kolonialisme merupakan tindakan menjajah negara lain secara teritorial. Kolonialisme dengan sendirinya sudah merupakan satu bentuk imperialisme yang diwujudkan dalam tindakan. Dengan demikian, secara teknis terdapat perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme ditempatkan sebagai pemikiran subyektif yang tidak selalu secara empiris tampak dalam kenyataan, sedangkan kolonialisme adalah perkembangan lebih konkrit dari imperialisme. Bila dalam perkembangannya muncul kasus-kasus imperialisme yang tidak disertai kolonialisme (*imperialism without colony*), maka pada dasarnya imperialisme dapat dipahami sebagai satu bentuk penguasaan satu bangsa atas bangsa lain, meski hanya dalam bentuk dominasi, hegemoni ataupun pengaruh sosial politik.[2]

Penjajahan, dalam terminologi imperialisme maupun kolonialisme merupakan fenomena kesejarahan manusia yang sudah dikenal sejak kurun awal peradaban manusia. Pada bangsa-bangsa nusantara sendiri, penjajahan bukan sesuatu yang asing, di mana setiap kerajaan senantiasa diliputi ambisi untuk menguasai wilayah lain di luar batas etnisitasnya sendiri. Hanya saja, intensitas, luas dan panjangnya dampak yang ditimbulkan menjadikan terminologi tersebut pada akhirnya lebih banyak ditujukan atas penjajahan bangsa Eropa sesudah *renaissance* dan *Aufklaeruung*. Penjajahan Barat sejak saat itu seolah mengulang sesuatu yang pernah dilakukan *Alexander The Great*, dengan jangkauan wilayah yang jauh lebih luas.[3]

---

[2]Abdul Rahman Haji Abdullah, ***Penjajahan Malaysia, Cabaran dan Warisannya***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 1.

[3]Makna original dari imperialisme bukan hanya penguasaan langsung ataupun tidak atas wilayah lain, melainkan "*personal soverignty of a powerful ruler over numerous territories, whether in Europe or overseas*". Wolfgang J. Mommsen, ***Theories of Imperialism***, terjemahan P.S. Falla dari bahasa Jerman (New York: Random House, 1977), p. 1.

Berbagai teori diajukan untuk menjelaskan penyebab munculnya penjajahan. Di antara teori yang paling mengemuka adalah teori ekonomi, dengan beragam penjelasannya. Teori ekonomi, sebagaimana diajukan J.H. Hobson dan V.I. Lenin menempatkan kapitalisme sebagai penyebab terjadinya penjajahan, baik dalam pengertian lama yang mengambil bentuk penguasaan teritotal maupun pengertian baru, yang mengambil bentuk pengaruh dan hegemoni. Teori-teori tersebut cenderung mengedepankan pemahaman fungsionalistik, di mana pelaku dipandang sebagai satu-satunya penyebab terjadinya peristiwa. Padahal faktor keterbelakangan bangsa terjajah juga merupakan variabel yang tak dapat diabaikan.[4]

Ada baiknya pemahaman atas terjadinya penjajahan dilengkapi dengan pemahaman strukturatif, di mana sebuah peristiwa tidak semata ditinjau dari segi pelakunya, melainkan juga karena terbukanya situasi lokal yang memungkinkan peristiwa tersebut terjadi. Kondisi kesejarahan umat manusia secara umum dan masyarakat lokal tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai faktor yang mendorong terjadinya suatu peristiwa. Paling tidak, pemahaman atas masalah ini kiranya dapat mengelaborasi penjelasan Alice Denny, sebagaimana diulas Abdul Rahman, dengan teori kolaborasinya, yang menyatakan adanya faktor-faktor lokal yang mendorong terjadinya penjajahan.[5]

Penjajahan adalah penguasaan kelompok kuat atas yang lemah. Kemampuan sebuah bangsa memperkembangkan kemampuan diri baik dalam wacana kebangsaan, intelektual, sosial, ekonomi, politik dan militer menentukan nasib sebuah bangsa dijajah bangsa lain atau malah sebaliknya. Dengan status dan nilai tawar berbeda, penjajahan Spanyol atas Belanda, atau Prancis atas negeri-negeri kecil sekitarnya,

---

[4] Selain teori marxis-Leninis, di kalangan Barat berkembang beragam pemahaman tentang bagimana menjelaskan imperialisme baik sebagai akibat memuncaknya nasionalisme maupun dampak sosio-ekonomi. ***Ibid.***, p. 70-90.

[5] Haji Abdullah, ***Penjajahan Malaysia***, p. 2.

misalnya, tidak bertahan lama karena resistensi bangsa terjajah cukup kuat secara intelektual, sosial, budaya, militer dan dukungan negara lain. Sementara penjajahan Eropa atas negara-negara lemah di Asia dan Afrika bertahan lebih lama akibat lemahnya negara dari berbagai aspek. Dengan demikian, penjajahan dapat disebut sebagai satu bentuk ekspresi atas berkembangnya semacam *hipernasionalisme*, di mana suatu negara memandang rendah negara lain dan karenanya layak dijajah.[6]

Perkembangan pola hubungan antar manusia juga tidak dapat diabaikan, di mana pada kurun kolonial Eropa konstelasi hubungan antar umat manusia terekspresikan ke dalam kotak-kotak rasial, kesukuan dan agama yang tertutup dan eksklusif. Kecenderungan dominasi satu kelompok atas kelompok lain menjadi fenomena umum, di mana kelompok kuat menguasai yang lemah, seakan berlaku adagium *survival of the fittest* Marx. Bangsa-bangsa Eropa mengalami perkembangan menjadi cukup kuat untuk menguasai bangsa-bangsa di kawasan lain. Perkembangan kemasyarakatan di Eropa tidak seimbang dengan perkembangan di kawasan-kawasan lain, yang memungkinkan penjajahan berlangsung sedemikian *massive* pada kawasan yang sangat luas.[7]

Berbeda halnya dengan kurun sesudahnya, pasca kolonial, di mana relasi antar umat manusia mengarah pada pola relasi terbuka dan pluralistik. Pola hubungan tertutup semakin mencair setelah pemahaman manusia bergerak dari pola hegemoni dan penguasaan teritorial ke arah pola relasi humanitarian, meski tidak dapat dipungkiri seringkali kompetisi yang tidak berimbang menciptakan situasi yang pada dasarnya juga imperialistik. Namun demikian, pada

[6] Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 13.

[7] Pada kasus Mesir, pembela imperialisme berapologi bahwa penjajahan Eropa diperlukan dalam rangka memberikan pemerintahan lebih baik dan memajukan perekonomian bangsa Arab. Simak J. Harris Proctor "David Robert and The Ideology of Imperialism" dalam ***The Muslim World***, Vol. LXXXVIII, No. 1., January 1998, p. 52.

dasarnya pola tersebut tidak berubah hingga memasuki kurun pasca kemerdekaan. Hampir tidak mungkin dihindarkan sama sekali terjadinya hegemoni atau dominasi kelompok kuat atas yang lemah, meski bukan dalam bentuk penguasaan teritorial.

Analisis Abdurrahman dengan teori konspirasinya memperlihatkan satu bentuk ekspresi yang cenderung emosional, sekalipun terkesan rasional. Dalam analisisnya, Abdul Rahman melihat penjajahan sebagai akibat konspirasi Yahudi (*Jewis conspiracy*) yang bergerak secara rahasia di dalam *Freemasonry* dan *Iluminati*.[8] Sentimen anti hegemoni Barat yang selalu melindungi Israel, mendorong lahirnya analisis yang berpretensi apologetik, sebuah pendekatan dan pemahaman yang berkecenderungan mencari pihak yang salah dan bukan letak masalah.

Trend pola pikir umat manusia juga tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai variabel pendorong terjadinya penjajahan. Pada kurun sejarah tersebut penjajahan teritorial suatu bangsa atas bangsa lain belum dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Tidak terbatas pada perilaku bangsa Eropa, bangsa-bangsa nusantara sendiri juga berkecenderungan sama. Dengan kekuatan militernya, kerajaan besar tak henti berupaya menaklukkan wilayah lain, minimal di bawah pengaruhnya.[9]

Di tengah-tengah sekat kebangsaan, kenegaraan dan keyakinan agama yang masih sedemikian tinggi hingga memasuki abad ke-19, fenomena relasi antar manusia yang diliputi kompetisi dan saling menghegemoni menjadi kecenderungan umum. Pola dan cara yang harus ditempuh menyesuaikan perbedaan pola relasi antar manusia pada setiap jaman. Ketika setiap bangsa, komunitas dan bahkan

[8] Haji Abdullah, ***Penjajahan Malaysia...***, hal. 5-6.

[9] Fenomena ini dapat dicermati pada setiap bangsa sejak era Asyur, Babilonia, Kaldea, Mongol, Cina, sampai kurun modern sekalipun. J. Verkuyl, ***Ketegangan antara Imperialisme dan Kolonialisme Barat dan Zending pada Masa Politik Kolonial Etis***, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1990), p. 12.

individu dipaksa sejarah untuk mampu bersaing menikmati sumber daya alam dan potensi sosial di dalamnya, tidak jarang cara-cara kekerasan harus dilalui meski mengabaikan hak bangsa lain.[10]

Pada kasus bangsa Eropa, misi penjajahan tidak lepas dari tiga kepentingan *God, Gold and Glory* dengan intensitas yang berbeda-beda. Motif keagamaan tak dapat diabaikan mengingat situasi kesejarahan Eropa ketika itu masih diliputi oleh situasi ultra-religius akibat kekuasaan agama (gereja) yang hegemonik atas hampir seluruh aspek kehidupan. Sekulerisasi tidak menjadi momentum penonjolan kepentingan sosial politik Eropa yang meningkatkan nasionalisme sempit, meski tidak menghilangkan sentimen keagamaan, karena pengalaman traumatis perang Salib masih sangat lekat sehingga motiv keagamaan berpadu dengan motiv ekonomi.[11]

Sejak Perang Salib, bangsa Eropa yang mengalami kesulitan akses ke kawasan Asia dengan masih kokohnya kekuatan Islam di selatan, berusaha mencari jalan baru ke dunia baru. Intensitas penjelajahan mengantarkan mereka pada penemuan daerah-daerah baru di luar kontrol kekuatan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang berujung penjajahan. Intensitas penjajahan meningkat seiring berkembangnya kemajuan industrialisasialisasi Eropa yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi transportasi, sistem sosial politik, kemasyarakatan serta kemajuan teknologi militernya.

---

[10] Fenomena globalisme dan pasar bebas pada kurun modern menyisakan pola yang lebih canggih, di mana sekalipun secara politik banyak negara menikmati kebebasannya, namun tidak demikian halnya secara ekonomi, karena yang berlaku adalah "darwinisme sosial". Simak Sindhunata "Dilema Globalisasi" dalam ***Basis***, No. 01-02 Tahun Ke-52, Januari-Februari 2003, p. 13-4.

[11] Penguasaan Islam atas tanah-tanah suci Kristen telah menorehkan dendam sejarah mendalam yang diekspresikan dalam berbagai perang pemikiran. Kebencian terhadap Islam yang dinilai sebagai *bid'ah* terbesar Kristen mendominasi alam pikiran Barat hingga menjelang berakhirnya masa kolonial. Simak perjalanan pandangan Barat atas Islam dalam Albert Hourani, ***Islam dalam Pandangan Eropa***, terjemahan Imam Baihaqi dan Ahmad Baidlowi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 11-37.

Peningkatan kebutuhan sumber-sumber daya alam dan pasar hasil produksi sering memaksakan keharusan akan kemampuan bersaing dan memperebutannya dengan berbagai cara, termasuk antara bangsa Eropa sendiri.

Misi kristenisasi mengemuka, setidaknya sebagai motiv spiritual yang di lapangan ditunjukkan dengan adanya impian untuk membalikkan kondisi penguasaan Arab (Islam) atas Eropa (Kristen), menjadi sebaliknya. Sentimen anti Arab (Islam) memang kuat mengemuka yang terbangun untuk mengalihkan krisis kepercayaan masyarakat Eropa pada Gereja, yang berubah menjadi anti Arab (Islam). Semangat ini senantiasa menyala dengan intensitas yang berbeda-beda pada setiap negara Eropa, yang nantinya berdampak pada perbedaan pola penjajahan dan intensitas kristenisasi di kawasan jajahan, meski kemudian motiv agama cenderung tersisih pada sebagian penjajah Eropa setelah intensitas kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.[12]

Penjajahan berlangsung ketika Eropa menikmati *euforia* kebebasan setelah keterpurukan selama beberapa abad selama era *Dark Age*. Mereka seolah hendak membangkitkan kembali romantika era *Alexander The Great* yang pernah menguasai Afrika dan Asia selama sekitar satu milenial. Jargon *God, Gold and Glory* efektif sebagai instrumen pelengkap yang menguatkan motivasi dan kepercayaan diri para pelakunya bergerak ke kawasan lain dan menjadi penguasa. Dalam catatan sejarah, Eropa masa itu memang tengah mengalami masa-masa kebangkitan dari keterpurukan, lepas dari penjajahan bangsa Arab dengan nestapa perang Salibnya ditambah pengalaman pahit penindasan lembaga gereja, di mana hal serupa tidak pernah terjadi pada kawasan lain. Lembaga gereja, sekalipun sebelumnya pernah dianggap menindas, telah memberikan identitas sosial bagi

[12] Verkuyl, ***Ketegangan antara Imperialisme...***, p. 16.

mereka, karena perkembangan Kristen telah menjadi bagian dari identitas Eropa.[13]

Independensi negara pasca sekulerisasi meningkatkan ketajaman rivalitas kebangsaan, khususnya antar negara Eropa sendiri. Pretensi membangun keagungan (*glory*) bangsa sendiri menonjol dalam konstelasi sosial politik Eropa. Perkembangan awal penjajahan tidak lepas dari merebaknya nasionalisme berlebihan, *hypernationalism* dalam istilah Snyder, yang menempatkan superioritas bangsa Eropa atas yang lain serta situasi rivalitas antar bangsa Eropa sendiri. Karena itu, kurun penjajahan dipenuhi ekspedisi-ekspedisi Eropa yang selalu disertai pasukan dengan pesenjataan lengkap, sebab di kalangan mereka sendiri sering diwarnai bentrok dan pertempuran bahkan upaya saling menguasai.[14]

Dari sini dapat dipahami bahwa penjajahan merupakan satu bentuk kesadaran primitif yang karena ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan eksploitasi dalam skala yang sangat besar dan luas. Penjajahan masih terbuka untuk dilakukan tanpa akibat-akibat moral maupun politis yang signifikan, karena dunia internasional saat itu masih memadang penaklukan dengan kekuatan senjata sebagai cara umum untuk mencapai tujuan dan penyelesaian masalah.

Penjajahan merupakan kebenaran umum dalam kurun sejarah masa itu, di mana penguasaan atas bangsa-bangsa yang lebih lemah masih dipandang sebagai suatu yang wajar, bahkan suatu kehormatan. Setelah kompetisi penguasaan telah mencakup hampir setiap jengkal daratan di bumi, wilayah-wilayah jajahan dengan leluasa dibagi-bagi atas nama beberapa bangsa penakluk dari Eropa dan menciptakan peta baru dunia berdasarkan teritori kolonial.

[13] Perluasan pengaruh Nasrani oleh herarkhi gereja memungkinkan agama tersebut tersebar di seluruh Eropa, bahkan kemudian kawasan lain. Romein, *Aera Eropa...*, p. 37-43.

[14] Mommsen, *Theories of Imperialism*, p. 7-8.

B. Penjajahan dan Kemunduran Nusantara

Kehadiran bangsa Belanda ke kawasan nusantara kurang lebih termotivasi oleh alasan yang sama sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, di mana kepentingan ekonomi, kejayaan negara dan agama merupakan motif pendorong dengan proporsi dan intensitas yang berbeda-beda antar tiap negara. Pada bangsa Belanda tampaknya misi keagamaan kurang menonjol dibanding bangsa Spanyol dan Portugis. Belanda yang hanya merupakan negeri kecil di Eropa kurang memiliki sumber daya alam memadai sebagai komoditas perdagangan internasional. Ini menyebabkan Belanda lebih berorientasi pada eksploitasi perekonomian dibandingkan keagamaan.[15]

Penjajahan Belanda atas nusantara dimulai dari ekspedisi petualangan (*pyracy*) yang kemudian meningkat menjadi kegiatan perdagangan. Di antara pelancong Eropa, Belanda termasuk terbelakang dalam melakukan ekspedisi antar benua yang harus menyeberangi lautan luas. Minimnya pengalaman pada ekspedisi pertama Cornellis De Houtman bahkan mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan harta benda. Namun demikian, ekspedisi tersebut memberi banyak pengalaman berharga bagi ekspedisi Belanda berikutnya. Belanda dapat melanjutkan ekspedisi-ekspedisi berikutnya secara lebih siap dan berhasil menjalin relasi perdagangan dengan berbagai wilayah di nusantara. Kedatangan mereka

---

[15] Di antara pendatang Eropa, misi keagamaan paling menonjol lebih tampak pada bangsa Portugis dan Spanyol, karena pada merekalah secara khusus tanggung jawab tersebut dibebankan. Paus Nicholaas V memberikan mandat tersebut pada Portugal dan Spanyol melalui perjanjian Trodesilhas tahun 1454, yang dikukuhkan Paus Alexander VI. Verkuyl, ***Ketegangan antara Imperialisme...***, p. 16. Pretensi keagamaan tampak pada kecenderungan sikap dan perilaku Portugis dan Spanyol yang tidak menghargai tata nilai yang dijunjung tinggi masyarakat setempat yang sudah menganut agama Islam. Karena itu pula, mereka cenderung kesulitan berinteraksi dengan masyarakat yang telah menganut Islam. Simak bagaimana respon penduduk pribumi atas perilaku pendatang dari Spanyol dan Portugis di kawasan Maluku dalam Paramita R. Abdurrahman "Angin Baru, Muka Baru, Penguasa Baru" dalam ***Prisma***, No. 11, 1984, p. 66-9.

diuntungkan oleh keberadaan Portugis dan Spanyol yang telah kehilangan simpati bahkan disikapi secara antipati oleh masyarakat nusantara, karena umumnya mereka kurang menghormati tradisi setempat dan secara provokatif terlalu mengekspresikan rasa superioritas keeropaannya.[16]

Dibanding bangsa-bangsa lain, khususnya Asia, yang sebelumnya aktif melakukan kontak dagang dengan bangsa nusantara, tipologi pedagang Eropa cenderung hegemonik. Kemajuan teknologi yang didukung sistem organisasi kerja yang mapan, organisasi militer yang solid, serta teknologi perkapalan dan persenjataan terkini kian melapangkan langkah-langkah eksploitatif mereka. Padahal kerajaan-kerajaan nusantara pada mulanya tidak banyak menaruh curiga terhadap kehadiran pendatang dari Eropa mengingat sebelumnya mereka sudah terbiasa berhubungan dunia luar, mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan maupun Cina. Hanya saja, pedagang Asia umumnya masih tradisional, sementara pola perdagangan bangsa Eropa sudah berkembang ke dalam bentuk persekutuan yang lebih terorganisir. Pedagang Eropa mampu melengkapi usaha mereka dengan mendirikan badan-badan usaha atau perusahaan-perusahaan dagang yang lebih menjamin kelangsungan dan akses usaha dan upaya eksploitasi mereka.[17]

Maksud kehadiran bangsa Eropa yang ternyata berbeda dari bangsa-bangsa pendatang lainnya menimbulkan dilema. Di satu sisi bangsa Eropa dengan kekuatan armada militernya yang lebih maju menjadi ancaman, tapi bagi kerajaan tertentu juga berarti peluang

---

[16]Namun sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, pada akhirnya Belanda menunjukkan ketamakan yang sama dengan bangsa Portugis dan Spanyol yang datang lebih dahulu. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia III***, p. 46-7.

[17]Pola relasi umum bangsa Eropa setelah *renaissance* diiringi dengan kemajuan beragam teknik dan pengorganisasian yang memungkinkan berbagai upaya dilakukan secara lebih sistematis, di antaranya tampak pada organisasi pemerintahan di Eropa dan kapitalisme yang berbasis industrialisasi. Simak Romein, ***Aera Eropa...***, p. 86-99.

memperoleh perlindungan dari ancaman kerajaan-kerajaan sekitarnya. Momentum ini dimanfaatkan Belanda untuk meningkatkan akses ekonomi politiknya di kawasan ini, di samping secara ofensif telah berhasil menguasai wilayah-wilayah tertentu. Belanda mampu membaca situasi sosial politik lokal dan memanfaatkannya untuk mendukung kepentingannya. Situasi politik dan keamanan yang dihadapi kerajaan nusantara, berupa pengalaman pahit saat menjalin kerja sama dengan Portugis dan Spanyol maupun kebutuhan akan perlindungan dari ancaman ekspansi kerajaan lain membuat sebagian bekerja sama dengan Belanda yang tentunya tidak lepas dari berbagai konsesi ekonomi dan politik.[18]

Dalam perekonomian, Belanda semula mencurahkan perhatiannya pada komoditas ekonomi yang laku keras di Eropa, khususnya rempah-rempah Maluku. Ketika masyarakat Maluku melakukan perlawanan akibat politik dagang yang merugikan, Belanda mengerahkan pasukan perang untuk memaksakan kehendak dan menguasai wilayah tersebut. Setelah secara berangsur-angsur kawasan timur nusantara jatuh di bawah penguasaannya, Belanda memapankan posisinya dengan mendirikan serikat dagang untuk

[18] Berdirinya VOC di Sunda Kelapa tidak lepas dari konsesi kerajaan Cirebon yang terancam oleh ekspansi Mataran Islam. Raja-raja nusantara dihadapkan pada ambiguitas dalam menyikapi kehadiran bangsa Eropa. Di satu sisi, kehadiran bangsa Eropa tidak saja mengancam kewibawaan di dalam negeri, melainkan juga akses ekonomi di luar wilayah kerajaannya. Namun di sisi lain, sebagian penguasa nusantara memandang Belanda sebagai pilihan mencari perlindungan dari ancaman Mataram. Barangkali di sinilah analisis Alice pada bagian terdahulu cukup relevan untuk menjelaskan bagaimana penjajah Eropa mampu menancapkan kekuasaannya di wilayah nusantara. Konteksnya sangat boleh jadi bukan seperti kasus Afrika sebagaimana dasar analisis Alice, di mana pragmatisme penguasa lokal secara oportunistik berusaha mengambil keuntungan ekonomi atas kehadiran bangsa Eropa, melainkan karena penguasa lokal dihadapkan pada pilihan sulit. Dapat diperhatikan bagaimana proses jatuhnya kerajaan-kerajaan nusantara, terutama Maluku dan Sulawesi di bawah Belanda. Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia III***, p. 59-86.

kawasan Hindia-Timur, sebutan untuk nusantara, dengan nama VOC (*Vereenigde oost-Indische Compaignie*) tahun 1602.

Keberadaan VOC lebih menyerupai negara dalam negara dengan segala kelengkapan dan hak-hak politik yang melekat di dalamnya. Hal ini memungkinkan eksploitasi secara maksimal atas berbagai potensi ekonomi di nusantara. Benturan-benturan kepentingan dengan *rival* Eropanya maupun perluasan akses ke wilayah yang masih dikuasai kerajaan pribumi, menyebabkan operasi militer senantiasa menyertai keberadaan misi dagang ini. Benteng-benteng pertahanan VOC juga menunjukkan efektifitasnya sebagai sarana dalam membendung serangan pasukan pribumi. Sekalipun demikian, kebutuhan akan perluasan wilayah menjadikan Belanda memerlukan biaya operasional perang yang sangat besar, khususnya ketika harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lokal yang cukup tangguh seperti Sultan Agung, Diponegoro dan terakhir Aceh.[19]

Fasilitas yang diberikan penguasa setempat sebagaimana umumnya diberikan pada pedagang asing dimanfaatkan secara korporatif oleh Belanda dengan mendirikan perusahaan dagang yang bersifat semi-politik, bahkan semi-negara. Keberadaan VOC memang merepresentasikan hadirnya negara dalam negara dikarenakan selalu ikut sertanya hak-hak melakukan perang dan membuat perjanjian. Kantor dagang VOC di Batavia tak ubahnya negara dalam negara lain dengan batas teritorial berikut pasukan perangnya. Dengan kantor dagang tersebut mereka mampu melakukan intensifikasi dan

[19]Perang Diponegoro dan Aceh merupakan sisa kekuatan terakhir nusantara yang membutuhkan waktu dan biaya besar untuk memenangkannya. Aceh menjadi sedemikian kuat karena di dalamnya terdapat prajurit Turki, Abessinia dan India yang turut membantu. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 98. Aceh pernah minta bantuan tentara dinasti Usmani untuk membendung kekuatan Portugis. Azra dan Fathurrahman, "Jaringan Ulama", p. 109.

perluasan usaha dalam bentuk monopoli, membatasi akses pesaing bahkan pemaksaan kehendak terhadap penguasa lokal.[20]

Kemajuan managemen dan organisasi pemerintahan, militer dan perdagangan mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut mampu secara hegemonik memaksakan suatu sistem yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Ketika kehendaknya ditolak penguasa setempat, serangan militer dijadikan pilihan untuk memaksa penguasa lokal yang secara politik dan militer kian lemah. Rendahnya sistem organisasi sosial politik dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi pada kerajaan-kerajaan nusantara membuat mereka mudah untuk ditaklukkan.[21]

Setelah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan dan mengisolasi jalur laut, Belanda kian siap bersaing dengan kerajaan-kerajaan nusantara yang masih eksis, bahkan tak henti melakukan upaya-upaya ofensif untuk memaksakan akses ekonomi maupun politiknya. Pesaing lokal terberat Belanda di nusantara hanya muncul dari kerajaan Jawa, Mataram. Padahal di pihak lain, kerajaan-kerajaan nusantara, khususnya di luar Jawa sangat mengharapkan bantuan Mataram sebagai kerajaan terkuat. Hanya saja harapan tersebut tidak banyak berarti, sebab Mataram sendiri tidak memiliki cukup daya untuk mengusir Belanda yang semakin mengancam dan membatasi ruang geraknya. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lain di pulau Jawa

---

[20]Rawannya situasi keamanan masa itu menyebabkan setiap ekspedisi senantiasa dituntut memperlengkapi diri dengan pasukan dan persenjataan. Kekuatan militer memperkokoh upayanya, baik karena selalu dihadapkan pada persaingan dengan sesama Eropa maupun untuk memaksakan kehendak pada penduduk pribumi. Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia III***, p. 42-5.

[21] Awal penguasaan Barat atas kerajaan-kerajaan nusantara banyak diwarnai perang melawan penguasa lokal, di samping memanfaatkan konflik dan persaingan antar penguasa lokal. Pada kasus Jambi, keunggulan organisasi dan teknologi menjadi mesin efektif Belanda dalam menghancurkan sendi-sendi pokok kerajaan. Taufik Abdullah "Reaksi Terhadap Perluasan Kekuasaan Kolonial: Jambi dalam Perbandingan" dalam ***Prisma***, No. 11, 1984, p. 16.

yang merasa terancam oleh ambisi Mataram untuk menguasai seluruh pulau Jawa memilih bekerjasama dengan Belanda.[22]

Dari sini tampak bahwa sebenarnya kolonialisasi bukan proses sekali jadi. Perubahan dari petualangan dan dagang menjadi kolonialisasi merupakan proses panjang. Sebelumnya penjajahan hanya berarti hegemoni ekonomi dan upaya ekspansi keagamaan, sedangkan dominasi politik dan militer hanya menjadi alat penunjang dalam membela diri dari *rival* Eropa dan ancaman perlawanan kaum pribumi. Nusantara sendiri secara politik baru benar-benar dikuasai Belanda setelah kekalahan Diponegoro, yang didahului penaklukan secara bertahap atas Maluku, disusul kegagalan Mataram Islam membendung ekspansi Belanda melalui benteng-bentengnya di Batavia. Lemahnya kekuatan Mataram secara otomatis melemahkan seluruh kerajaan nusantara yang sebelumnya banyak berharap perlindungan dari Mataram. Pasca perang Diponegoro, Belanda benar-benar mengukuhkan kekuasaannya secara politik atas Hindia-Belanda. Penguasaan Belanda atas nusantara kokoh tanpa satupun kekuatan perlawanan lokal yang tersisa. [23]

Setelah penaklukan wilayah-wilayah nusantara secara politik yang meliputi wilayah yang sangat luas dari Aceh sampai Papua, Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan kawasan ini secara hegemonik melalui berbagai kebijakan. Belanda memanfaatkan struktur sosial politik lokal untuk menunjang kepentingan politik dan ekonomi kolonialnya, yang melahirkan pola penjajahan tidak langsung. Penguasa lokal dipertahankan sebagai alat kekuasaan Belanda yang pada perkembangannya sering kali tidak kalah menindas dibanding Belanda sendiri. Pemerintah Belanda sendiri

---

[22]Beberapa ekspedisi perang kerajaan besar di Jawa gagal mengusir bangsa Eropa dari wilayah teritorial dan pengaruhnya, seperti Pati Unus masa demak dan kegagalan Sultan Agung menyerang Batavia. Armada dan pasukan Belanda terlalu kuat untuk kerajaan terkuat di Asia Tenggara tersebut. Simak De Graff, ***Pucak Kejayaan Mataram...***, p.228-232.

[23] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indinesia III***, 90-1.

dengan nyaman dapat melanjutkan politik VOC. Bahkan setelah pembaharuan politik kolonial Inggris selama menguasai wilayah jajahan Belanda, di bawah Deandels dan Raffles, Belanda memilih tetap mempertahankan politik konservatifnya. Pola-pola klasik tampak pada upaya-upaya penguasaan sumber-sumber daya ekonomi dengan mengedepankan hegemoni melalui politik monopoli. Ketika terjadi penolakan dan perlawanan dari masyarakat setempat, Belanda tidak segan-segan menggunakan kekuatan senjata.[24]

VOC yang menjadi benteng hegemoni politik ekonomi Belanda di nusantara pada akhirnya mengalami kebangkrutan yang berakibat pada pencabutan ijin usahanya pada tahun 1798. Selain akibat korupsi, kurang cakapnya pegawai, sistem monopoli dan tanam paksa yang melemahkan moril pengusaha dan penduduk, Belanda juga menderita banyak kerugian akibat menghadapi perlawanan masyarakat pribumi maupun *rival* Eropanya. Sejak saat itu, penguasaan wilayah nusantara beralih langsung ke tangan pemerintah Belanda sebagai titik permulaan penjajahan secara politis atas nusantara. Belanda dapat leluasa menerapkan politik penjajahan yang semakin keras.

Penderitaan akibat penjajahan mulai dirasakan rakyat ketika kontrol atas wilayah memanfatkan struktur pemerintahan lokal. Penguasa-penguasa lokal berubah menjadi agen kolonial yang menjamim efektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan kolonial. Sistem upeti yang longgar di bawah feodalisme tradisional digantikan dengan pajak, monopoli dan sistem sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) yang eksploitatif dan kian membebani rakyat. Kebijakan-kebijakan kolonial secara sistematis meningkatkan beban ekonomi dan memiskinkan rakyat. Beratnya penderitaan yang harus

[24]Awal masa penjajahan Belanda di Indonesia membuatnya sangat membutuhkan dana besar dalam membiayai pemerintahannya yang banyak berhadapan dengan banyak masalah, terutama perang melawan sesama bangsa Eropa maupun perlawanan dari masyarakat nusantara. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 3-4.

ditanggung rakyat terjajah, mengakibatkan politik kolonial klasik mendapatkan kritik keras, termasuk dari negeri Belanda sendiri.[25]

Penjajahan Belanda, menurut Kartodirdjo, terbagai ke dalam beberapa periode yang masing-masing menunjukkan kekhasan pola karena perbedaan *platform* kebijakan politiknya. Periode tersebut dibagi ke dalam fase kolonialisme klasik atau juga diistilahkan dengan politik penjajahan konservatif; periode kolonial liberal; dan periode politik etis.[26] Perubahan tersebut berdampak besar pada perubahan sikap dan perilaku bangsa terjajah, yang di satu sisi mengantarkan pada kemunduran peradaban, dan tumbuhnya nasionalisme di pihak lain.[27]

Politik penjajahan konservatif banyak dipengaruhi oleh motiv-motiv awal hadirnya bangsa Eropa. Penjajahan sejak awal berorientasi pada eksploitasi sumber daya ekonomi melalui pengumpulan pajak dan *privillage* perdagangan. Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, di mana penguasa pribumi mengurus masalah-masalah kependudukan, sebagai agen yang mengawasi dan melaksanakan berbagai kebijakannya. Belanda menciptakan pola penjajahan pribumi atas pribumi yang menjadikan perlawanan tidak langsung tertuju pada penjajah, tapi pada penguasa lokal. Meski kehilangan kekuasaannya, penguasa lokal menjadi kelompok yang paling diuntungkan. Mereka bahkan meraup lebih banyak

---

[25]Sistem Tanam Paksa telah mengakibatkan kelaparan hebat di kalangan pribumi, bahkan mengurangi populasi penduduk secara drastis dalam kurun waktu singkat. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 12-13.

[26] Kartodirdjo "Struktur Sosial dari...", p. IX.

[27]Menurut Gellner nasionalisme berarti keterikatan bangsa (*the nation*) pada suatu negara (*state*). Negara sebagai pelaksana kekuasaan yang berdaulat atas suatu wilayah dan bangsa, memerintah atas nama dan untuk bangsanya. Ernest Gellner, ***Nation and Nationalism***, (Ithaca: Cornell University Press, 1983), p. 1-7.

keuntungan saat rakyat kehilangan daya akibat penerapan *Cultuur Stelsel.*[28]

Pengambilalihan sektor ekonomi, terutama hegemoni pasar hasil bumi oleh bangsa Eropa, mengakibatkan masyarakat nusantara mengalami kemunduran dinamika sosial ekonomi. Sebelum penguasaan bangsa Eropa, bangsa-bangsa nusantara sudah terbiasa membangun relasi dagang dengan bangsa-bangsa lain di luar kawasan ini. Kerajaan-kerajaan nusantara juga terbiasa menerima bangsa-bangsa asing tinggal di wilayah ini untuk kepentingan yang sama. Pentingnya jalinan kerja sama tersebut menjadikan para pendatang memperoleh perlindungan hukum dan keamanan karena kehadirannya merupakan aset perekonomian, yang memberikan kontribusi penerimaan negara berupa pajak, cukai dan menjamin distribusi komoditas ekonomi ke luar dan ke dalam negeri.[29]

Kegiatan kolonialisme praktis menghentikan dinamika sosial ekonomi maritim bangsa-bangsa nusantara dengan daerah luar. Pedagang-pedagang nusantara yang selama berabad-abad sebelumnya melayari lautan Hindia dan Cina, kehilangan akses perdagangan dengan dunia luar. Bahkan akses terdekat dengan Malaka juga berakhir sejak kepulauan tersebut dikuasai oleh Portugis dan Inggris. Terhentinya interaksi dengan bangsa luar sekaligus menghentikan bahkan memundurkan perkembangan budaya, pola pikir, gaya hidup dan peradaban bangsa nusantara. Bangsa nusantara mengalami fase pembodohan di berbagai bidang setelah akses informasi maupun

---

[28]Aturan yang sebenarnya tidak terlalu membebani rakyat menjadi penindasan akibat tindakan penguasa lokal, terlebih dengan adanya bonus-bonus khusus berupa prosentase bagi hasil (*cultuurprocenten*) bagi mereka yang mampu memberikan keuntungan lebih pada pemerintah kolonial. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia IV***, p. 100-1.

[29] Onghokham "Bentuk Negara di Indonesia dan Aspek Internasionalisasi" dalam ***Prisma***, No. 8, 1984, p. 23.

perekonomian tertutup. Akibatnya mobilitas dan dinamika bangsa ini dalam menyerap pengaruh-pengaruh luar secara kultural terhenti.[30]

Padahal eksistensi kerajaan nusantara masa pra-kolonial tidak saja didukung oleh kesatuan politik dan teritorialnya sendiri, melainkan juga hubungan dan jalinan kerja sama dengan negara lain. Onghokham menyatakan bahwa pada kurun pra-kolonial sebenarnya kerajaan-kerajaan nusantara secara ekonomis, hukum dan politis sudah berada dalam orde *multi-states* yang bercorak internasional yang memungkinkan perkembangan masyarakat secara dinamis.[31]

Kolonialisme membuat perkembangan tersebut terhenti, setelah Belanda mengambil alih seluruh kegiatan perekonomian antar negara kaum pribumi. Jaringan perdagangan kaum pribumi mulai hancur. Aktivitas perekonomian mereka terdesak kembali pada sektor agraris. Perkenalan dengan teknik-teknik yang lebih baru tertutup, dan yang paling parah, bangsa nusantara secara lambat tapi pasti kehilangan kemampuan kewirausahaannya (*enterpreneurship*) yang selama beberapa abad sebelumnya terbina dalam perikehidupan perekonomian mereka. Ini merupakan dampak kolonialisasi yang paling *devastating* bagi peradaban nusantara. Masyarakat pribumi tidak saja tercerabut dari pasar dunia, melainkan kehilangan otoritas perdagangan dalam negeri yang beralih ke etnis Cina.[32]

[30] Lautan yang merupakan jembatan peradaban terputus total sejak diambilalih oleh bangsa Eropa. Angkatan laut Maratam yang sangat disegani tersisih, dan praktis menjadikannya bangsa daratan. Demikian halnya dengan kepulauan lain, dari Sumatera, Gowa dan Ternate. A.B. Lapian "Perebutan Samudera: Laut Sulawesi pada Abad XVI dan XVII" dalam ***Ibid.***, p. 38.

[31] Jaminan keamanan bagi pedagang-pedagang asing oleh penguasa lokal merupakan kunci yang mutlak diperlukan agar memungkinkan ramai tidaknya kegiatan perdagangan. Onghokham, "Bentuk Negara di...", p. 22-3.

[32] Situasi ini berdampak panjang dalam membentuk kerpibadian masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut tidak hilang hingga akhir kekuasaan Belanda 1942. Kahin, ***Nationalism and Revolution..***, p. 18-9. Simak pula The Kian-Wie, "Kolonialisme dan Ekonomi Indonesia" dalam ***Prisma***, no. 11, 1984, p. 49-0.

Hilangnya dinamika perekonomian membuat bangsa-bangsa di kawasan nusantara mengalami kemunduran cultural secara berangsur-angsur. Mereka terpinggirkan dari tradisi perekonomian yang kosmopolit, kehilangan karakter dagang yang dinamis dan harus mundur kembali pada perekonomian yang agraris semata. Kebudayaan nusantara juga kembali akrab dengan kesadaran kelas primitif (*primitive class consciousness*) di mana kepercayaan mitis dan menyeruaknya simbul-simbul kekalahan memenuhi tradisi dan kebudayaannya. Hal ini ditandai dengan keislaman yang sebelumnya bercorak sufistik asketik kian kokoh dalam keberagamaan umatnya, berpadu dengan mitos-mitos tradisional.[33]

Kegagalan penguasa memperlindungi warganya juga terekspresikan ke dalam sofistikasi tradisi kerajaan serta dalam ekspresi seni dan kebudayaan yang rumit. Kerajaan nusantara telah kehilangan lahan garapan utama sebuah negara, yaitu politik dan ekonomi. Hilangnya kekuasaan politik dan ekonomi tersublimasi ke dalam penajaman aspek-aspek etiket yang mestinya bukan hal yang terpenting sebuah pemerintahan. Kerajaan tinggal menjadi sebuah benteng tradisi yang kian mengokohkan feodalisme dalam rupa tata krama hubungan individual, menggantikan hiruk-pikuk politik dan ekonomi. Ekspresi kekalahan mengambil bentuk penajaman stratifikasi sosial, akibat kian meningkatnya sofistikasi adat istiadat dan nilai-nilai tradisi kerajaan, serta masih ditambah dengan kian irasionalnya kehidupan sosial rakyat.[34]

Politik kolonial sendiri menerapkan pola penguasaan secara tidak langsung, di mana elit-elit pribumi ditempatkan sebagai aparat

[33] Banyak mitos diangkat untuk membenarkan keadaan atau menjadi semacam pelipur lara, yang menjadi tumpuan harapan yang sangat jauh. Karena itu, banyak mitos diangkat baik dengan bersandar pada agama ataupun mitologi Jawa sendiri sebagai bentuk respon ataupun pelarian, seperti *Ratu Adil*, Baron Sakender, Ramalan Joyo Boyo dan Jihad Islam. Sartono Kartodirdjo "Respons-respons terhadap Penjajah Belanda di Jawa: Mitos dan Kenyataan" dalam ***Ibid.***, p.

[34] Onghokham, "Reaksi terhadap Kekalahan", dalam ***Ibid.***, p. 48-9.

kolonial. Kecuali untuk menangani kasus-kasus pemberontakan, pemerintah kolonial nyarsis tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan penduduk pribumi. Di sisi lain, aparat dari kalangan pribumi dapat lebih berkuasa dibanding masa-masa sebelumnya, dan memiliki pembenar untuk kian mengokohkan kedudukannya di hadapan rakyat yang kian tak berdaya. Tidak jarang mereka juga memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi, melalui berbagai bentuk korupsi di tingkat bawah. Mereka cenderung berupaya menunjukkan loyalitas dan terima kasihnya kepada pemerintah kolonial secara berlebihan dengan keberanian mengambil tindakan lebih keras terhadap rakyatnya sendiri dibanding pemerintah kolonial yang menjadi atasannya. [35]

Sejak peristiwa kemerdekaan Amerika dari Inggris, pada dasarnya sebagian penjajah Eropa menyadari irelevansi dan problematiknya penjajahan secara teritorial. Hanya saja, peristiwa tersebut tampaknya belum mempengaruhi bangsa-bangsa terjajah lain untuk menuntut hal yang sama, kecuali pada sebagian kecil bangsa Eropa sendiri. Dengan demikian, keterbelakangan mayoritas bangsa terjajah menjadikan penjajah masih bertahan hingga memasuki abad ke-20. Di sisi lain, penjajahan yang memang menjadi semacam kebanggaan eksistensi Eropa pada kurun tersebut sedang masuki fase puncak konsolidasinya.[36]

Kesadaran penjajah akan potensi *laten* tuntutan kemerdekaan mendorong sebagian mereka berupaya melakukan penataan ulang atas sistem pengelolaan daerah-daerah jajahan agar bertahan lebih lama. Namun demikian, lebih banyak daerah jajahan yang belum menyadari kemungkinan memerdekakan diri. Mereka bahkan sedang memasuki puncak keputusasaan terdalam menghadapi kemungkinan

[35] Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 16-7.

[36]Negara-negara Eropa sudah relatif tidak dalam situasi memperebutkan daerah jajahan, sebagaimana krisis-krisis sebelumnya yang sempat melibatkan *Tahta Suci* Vatikan yang melahirkan pembagian dunia secara kontroversial, hanya untuk Spanyol dan Portugis. Lapian "Perebutan Samudera...", p. 37.

bebas dari Barat. Kalaupun ada baru pada sekelompok komunitas kecil dan terbatas yang merasa benar-benar tidak mampu menahan penderitaan. Karena itu, pada kurun ketika Amerika berhasil memerdekaan diri, bangsa-bangsa nusantara justeru baru memasuki fase awal penjajahan politik, sebagaimana Indonesia.

Bangsa nusantara bahkan tidak mencium dan apalagi memanfaatkan kesempatan atas berbagai krisis dalam negeri Belanda selama kurun penjajahan. Belanda termasuk bangsa Eropa yang tertinggal dalam pengelolaan daerah jajahan. Dinamika politik kolonial Belanda bergerak lamban. Di antara bangsa Eropa lain Belanda termasuk negeri lemah yang karenanya banyak mengalami kekalahan dan harus kehilangan daerah-daerah jajahan. Mundur dan melemahnya dinamika sosial, budaya, politik dan ekonomi bangsa-bangsa nusantara memberi jaminan stabilitas kegiatan kolonialisme, bahkan ketika Belanda sempat dijajah bangsa lain.[37]

Hubungan kolonial menempatkan Belanda sebagai superstruktur atas bangsa asing dengan pola hubungan superordinasi dan subordinasi, di mana dikenal tiga kelompok status sosial Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Belanda membangun satu struktur pemerintahan tidak langsung, di mana hubungan kolonial didasarkan atas sistem kelas sesuai struktur sosial yang ada. Belanda menempatkan elit-elit tradisional dari kalangan keturunan raja-raja setempat pada posisi sebagai pejabat negara, yang mewakili aristokrasi penduduk asli. Posisi dan kedudukan mereka berubah menjadi dinas sipil yang seragam yang diangkat pemerintah kolonial, sementara penghargaan masyarakat lokal pada pejabat lokal masih

[37] Selama menjajah Indonesia, Belanda berturut-turut dijajah Spanyol, Perancis dan berada di bawah protektorat Inggris, Jerman bahkan dalam pelarian di London saat Perang Dunia kedua. Simak Verkuyl, ***Ketegangan antara Imperialisme...***, p. 30.

bertahan feodalistik bahkan dengan intensitas keotoriteran lebih besar dibanding sebelumnya.[38]

Penjajahan Belanda tidak hanya berpola hegemoni total, melainkan juga mengarah pada eksploitasi. Ketika Inggris sudah mulai mengubah pola pengelolaan daerah jajahannya, Belanda justeru baru memulai periode politik penjajahan konservatif. Apalagi sejak pengambilalihan VOC oleh pemerintah, kondisi perekonomian Belanda masih dalam situasi sulit. Industrialisasi Belanda berlangsung lamban, sehingga menjadikan daerah jajahan sebagai penghasil bahan baku. Belanda mengeksploitasi hasil bumi daerah jajahan sebagai komoditas perdagangan di pasaran Eropa, tanpa berusaha memberdayakan perekonomian lokal sebagai basis produksi, apalagi pasaran hasil produksi.[39]

Memasuki abad ke-18, di Eropa berkembang berbagai bentuk gerakan dan cita-cita liberal. Di Belanda muncul tokoh-tokoh semacam Dirk van Hogendrop yang melancarkan gagasan besar kolonialisme yang didasarkan atas kebebasan dan kesejahteraan umum bagi bangsa jajahan. Mereka mengusulkan pemerintahan langsung (demokratis) dan sistem pajak. Paham ini menimbulkan pertentangan antara kaum liberal dan konservatif yang mempertahankan sistem dagang dari politik VOC. Pertentangan tersebut dimenangkan kelompok liberal, meski membutuhkan waktu terlalu lama untuk membuktikan efektifitasnya. Belanda relatif

[38] Belanda memanfaatkan para bupati dan aparat di bawahnya untuk menunjang jalannya berbagai kebijakan secara lebih sistematis dan menindas, di mana kebijakan lunak pemerintah kolonial dan berkembang menjadi semakin menindas di tangan aparat pribumi. Simak deskripsi Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 14.

[39] Penjajahan Belanda dalam beberapa hal berbeda dari gaya Inggris. Inggris menjadikan daerah jajahan tidak semata sebagai tempat meraup komoditas perdagangan, melainkan juga pemasaran hasil produksi. Inggris juga menghidupkan sektor-sektor Industri dengan mendatangkan pekerja dari Cina. Inggris dengan kemajuan industrinya mampu mensuplai barang hasil produksi ke kawasan jajahan. Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari...", p. x-xi.

tertinggal mengimplementasikan perkembangan tersebut dalam pengelolaan daerah jajahan.[40]

Daendels (1808-1811) dan Raffles (1811-1816) adalah sedikit tokoh yang melakukan pembaharuan pengelolaan daerah jajahan, selama nusantara berada di bawah kendali Inggris. Mereka mengupayakan kebebasan individual, hak milik tanah, kebebasan bercocok tanam, berdagang, bekerja menggunakan hasil tanamnya, kepastian hukum dan peradilan yang baik. Deandels secara tegas memberantas sistem kerja paksa, sebuah kebiasaan Belanda melakukan pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran dengan cara tradisional, serta model penyerahan hasil bumi secara paksa. [41]

Daendels gagal melakukan dasar-dasar pemerintahan dengan sistem Barat karena ambisi Belanda mempertahankan pulau Jawa sedemikian Besar. Penerusnya, Thomas Stamford Raffles, yang melanjutkan kebijakan Daendels juga mengalami banyak kendala. Raffles berusaha menerapkan pola kolonialisme Inggris dengan menghapus model penghisapan cara Belanda, dan lebih berorientasi melindungi kepentingan perdagangannya di daerah-daerah jajahan. Mereka berusaha menerapkan sistem pajak atau sistem penghasilan. Daya beli rakyat diberdayakan agar putaran uang yang besar menjadi jaminan pendapatan. Dengan begitu, mereka dapat menjual hasil-hasil produksinya.[42]

Pengembalian Jawa dari Inggris1816, membuka kembali kesempatan Belanda menjadikan daerah jajahan sebagai tempat meraup keuntungan sebanyak mungkin. Belanda yang memegang teguh sistem sentralisasi yang kaku ditunjang kuatnya otokrasi. Dominasi pengawai pemerintah yang biasa lamban dan birokratis

---

[40] Pengerahan tenaga kerja sukarela dan penyerahan hasil bumi sebenarnya merupakan tradisi selama pemerintahan kerajaan nusantara, namun ketika dilakukan secara sistemik di bawah rejim kolonial, keduanya berubah menjadi model penghisapan ekonomi. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 4-8.

[41] Kartodirdjo, "Kolonialisme dan Nasionalisme...", p. 9.

[42] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 3-4.

lebih menonjol, menjadikan perubahan sistem liberal terhambat. Kesulitan-kesulitan penerapan sistem liberal menjadikan Belanda kembali pada sistem konservatif, kecuali untuk aspek-aspek yang kecil. Belanda yang berusaha memperbaiki kebijakan politik kolonial melanjutkan politik eksploitasi karena terdesak kebutuhan keuangan.[43]

Belanda mulai menempuh langkah-langkah sistemik untuk meningkatkan keuntungan dalam pengelolaan daerah jajahan. Penerapan kebijakan *politik pintu terbuka*, menjadi strategi ekspansi kolonialisme yang memungkinkan derasnya arus modal yang masuk ke daerah jajahan dan memungkinkan eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai sumber daya ekonomi di daerah jajahan. Perusahaan-perusahaan besar berskala multinasional seperti HVA, BPM dan KPM berdiri menggantikan perusahaan-perusahaan kecil dengan peningkatan hasil produksi yang lebih besar.

Besarnya investasi yang masuk ke daerah jajahan menghasilkan peningkatan produksi di berbagai sektor yang menghasilkan keuntungan besar. Pendirian perusahaan-perusahaan Belanda untuk kesekian kalinya merongrong perekonomian kaum pribumi secara sistemik, dalam bentuk penyerobotan hak milik penduduk, pemerasan hasil bumi, kerja paksa dan Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*). Pemerintah dan pengusaha Belanda berada pada posisi yang diuntungkan, sementara penduduk pribumi menjadi pihak yang harus menanggung kerugian.[44]

---

[43] Pendapat umum yang berkembang di negeri Belanda justeru menempatkan keharusan negara-negara jajahan memberi kontribusi bagi negara induk, bukan sebaliknya. Kartodirdjo "Struktur Sosial dari...", p. XV.

[44] Namun demikian, terdapat kecenderungan neo-merkantilisme di kalangan pengusaha Belanda yang mengarahkan kepemilikan perusahaan di tangan pengusaha Belanda sendiri. Pengusaha Belanda berupaya menghindarkan diri dari kapitalisme internasional yang potensial menggeser eksistensi mereka. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia IV...***, 5-11.

Pemerintah berusaha mempertinggi produksi melalui pemaksaan dengan mengerahkan tidak kurang dari empat juta orang tanpa imbalan yang sepadan. Tidak berhenti di situ, rakyat harus kehilangan properti berupa tanah maupun ternak untuk membantu pendirian pabrik-pabrik. Rakyat juga masih harus menanggung beban pajak atas tanah-tanah yang digunakan untuk untuk perusahaan. Lebih parah lagi, hasil produksi dan tenaga rakyat banyak yang tidak dibayar. Rentang pertengahan tahun 1800-1900 rakyat negeri ini sering dihadapkan pada berbagai bencana kelaparan dan mewabahnya berbagai macam penyakit. Ketika periode penjajahan klasik dan liberal mencapai puncaknya, masyarakat nusantara mencapai titik terendah perkembangan sejarahnya. Mereka mengalami kemiskinan dan penurunan kualitas hidup secara drastis.[45]

C. Politik Etis dan Transformasi Modernitas Barat

Menjelang 1900-an, politik kolonial Belanda masih terombang-ambing antara dua gagasan besar, sistem dagang dan sistem pajak. Penderitaan yang hebat pada penduduk pribumi akibat kebijakan kolonial konservatif melahirkan kritik keras dari dalam negeri Belanda sendiri, yang memunculkan upaya-upaya perbaikan politik kolonial, termasuk desentralisasi. Perkembangan di bidang ekonomi, sosial dan politik yang pesat sejak kurun 1890-an dan kritik atas penderitaan rakyat akibat kebijakan kolonialnya memaksa Belanda mengubah kebijakan dengan gerakan politik kemakmuran yang dikenal dengan istilah politik etis sejak 1901. Politik kolonial Belanda mulai mengarah kepada kebijakan baru yang ditandai dengan Orde Ekonomi Etis (*Ethiek, Economic en Orde*).[46]

---

[45] Kemerosotan paling tampak pada berkurangnya jumlah penduduk akibat kelaparan. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 15-6.

[46] Harry J. Benda, ***Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Masa pendudukan Jepang***, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1990), p. 55.

Belanda melakukan perubahan politik kolonial yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk daerah jajahan. Kebijakan ini disertai politik desentralisasi, di mana penentuan kebijakaan dalam pengelolaan daerah jajahan menjadi kewenangan pemerintah stempat. Pemerintah Belanda memberi otonomi pada pemerintah Hindia-Belanda berupa kewenangan lebih besar untuk mengelola berbagai sumber daya di wilayahnya, di antaranya dengan pemilahan anggaran belanja daerah jajahan dari negeri Belanda dan penyelenggaraan fasilitas sosial bagi penduduk, terutama pendidikan dan kesehatan. Sebagai elemen penunjang, dibentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) di daerah jajahan, yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah Belanda, Pribumi dan Timur Jauh.[47]

Volksraad berfungsi sebagai penasehat, dan kurang merepresentasikan keterwakilan rakyat di wilayah jajahan. Keanggotaannya juga didominasi unsur Eropa dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dibanding pribumi (*Inlanders*). Dari 39 orang, kemudian 49 anggota *Volksraad*, kaum pribumi hanya diberikan porsi sepertempatnya, di mana separuhnya merupakan hasil pilihan. Seiring pertumbuhan gerakan nasional, situasi ini akhirnya dirasakan tidak memuaskan, dan diikuti dengan perubahan *Grondwet* 1922, yang pada prinsipnya mengubah status Hindia-Belanda menjadi bagian dari kerajaan.[48]

---

[47] Politik etis tidak lepas dari meningkatkan kekuatan sosialis yang banyak mengajukan kritik atas politik kolonial terlalu eksploitatif yang dikuti perubahan berbagai aspek. Mereka memandang politik kolonian harusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi. Kartodirdjo "Struktur Sosial...", p. XXVI. Simak pula Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 34-5.

[48] Sebelumnya Hindia-Belanda dikategorikan sebagai daerah yang dikuasai Belanda, yang berubah menjadi semacam daerah istimewa, di mana perangkat pemerintahan Hindia Belanda menjadi terdiri dari Gubernur Jenderal yang berkedudukan sebagai wakil *Kroon* (mahkota), Raad van Indie sebagai penasehat

Berbagai kritik atas kebijakan pemerintah Belanda melahirkan perubahan sikap dan sistem pengelolaan jajahan, dengan kebijakan pengelolaan Hindia-Belanda secara lebih otonom. Dengan berbagai batasan akses maupun fasilitas, pemerintah Hindia-Belanda juga mulai memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan. Kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi diberikan pada kalangan terbatas, khususnya bangsawan dan golongan ekonomi kuat. Baru pada kurun belakangan masyarakat bawah dapat menikmati pendidikan, meski hanya tingkat rendahan. Demikian pula untuk layanan kesehatan, di mana pemerintah hanya melakukan untuk aspek-aspek layanan yang sangat terbatas, khususnya dalam penanganan wabah penyakit.[49]

Perubahan kebijakan tersebut secara ekonomi memberi banyak keuntungan bagi penjajah, tetapi tidak demikian halnya bagi kebanyakan penduduk rival. Penduduk rival bahkan semakin tergantung pada pemilik modal dan pengusaha yang menyewa tanah dan mempekerjakan mereka sebagai buruh, dan hanya memperlebar jarak antara pemilik modal dengan buruh. Meski demikian, imbas dari politik etis secara signifikan juga menyumbangkan perubahan-perubahan sosial.

Dampak paling menonjol adalah kesempatan pendidikan yang lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya, sekalipun hanya dinikmati sekelompok kecil golongan rival, terutama dari kalangan pegawai pemerintah. Selain itu, beberapa masalah kemasyarakatan mulai ditangani pemerintah, seperti soal pauperisasi, kesehatan rakyat, kerja rodi, eksploitasi rakyat di tanah-tanah partikelir dan

---

Gubernur, dan *Volksraad* atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Simak Paulus, ***Garis Besar...***, p. 18-23.

[49] Verkuyl, mengulas pendapat Panikkar, menunjukkan setidaknya ada enam sisi positif penjajahan, yang meliputi pondasi negara hukum, antisipasi despotisme penguasa lokal, pertumbuhan kota-kota besar, penyatuan etnis, pertukaran gagasan dengan Barat, dan terbukanya isolasi Asia. Verkuyl, ***Ketegangan antara Imperialisme...***, p. 27-8.

penyebaran agama Kristen. Periode etik juga membuka jalan bagi masuknya paham-paham dan pemikiran baru berkenaan politik dan ekonomi yang menggugah rasa nasionalisme.[50]

Bangsa bumiputera diberi batasan-batasan dalam jabatan atas dasar rasial, di mana unsur-unsur bumiputera berada pada posisi bawah dan kulit putih berada pada posisi penentu. Pembatasan juga berlaku dalam relasi sosial, terutama berkenaan dengan hubungan antar ras. Bangsa bumiputera dilarang memasuki fasilitas-fasilitas umum yang ditujukan bagi kaum penjajah, seperti lapangan olah raga, perkumpulan-perkumpulan, sekolah, tempat umum dan daerah kediaman bangsa Eropa. Ini tampak pada bekas-bekas tata kota kolonial, di mana pemerintah menyediakan satu kawasan yang dikhususkan untuk fasilitas tempat tinggal dan kegiatan bangsa Eropa. Di sisi lain, bangsa rival cenderung mengambil jarak, membangun komunitasnya dengan pandangan dan cara hidupnya sendiri. Kartodirdjo menyebut situasi ini bagaikan masyarakat berkasta yang berlaku menurut jalur keturunan. Semua bentuk pemisahan tersebut dilindungi dengan seperangkat perundangan dan peraturan untuk mencegah keakraban dan kontak sosial antar ras. Kontak antar ras hanya berlaku dalam konteks hubungan majikan dan hamba. Kalaupun ada hubungan formal tersebut hanya berlaku bagi kelas bangsawan tertinggi.[51]

Tidak hanya dalam fasilitasi kehidupan sosial, dalam dunia pekerjaan dan pendidikan bangsa Bumi Putera diberi porsi rendah untuk memperolehnya. Pekerjaan-pekerjaan *level* atas dipegang pejabat Belanda, dan baru sebagian besar pekerjaan rendahan diberikan pada kelompok Bumi Putera. Pendidikan pada mulanya hanya menjadi hak Bumi Putera secara terbatas. Siswa diseleksi

---

[50] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 59-68. Pemerintahan Hindia Belanda memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk dalam penetapan tarif bea masuk, keluar dan transito yang sebelumnya di tangan *Kroon*. Simak kembali Paulus, ***Garis Besar...***, p. 34-5.

[51] Kartodirdjo, "Kolonialisme dan Nasionalisme...", p. 43-50.

berdasarkan jabatan, asal-usul keturunan, kekayaan dan pendidikan keluarganya. Hanya sedikit anak-anak Bumi Putera yang menikmati pendidikan bergaya Eropa, karena faktor status sosial dan penghasilan menjadi pertimbangan determinan.[52]

Pendidikan lebih banyak ditujukan bagi penyiapan tenaga-tenaga kerja rendahan pada kantor pemerintah dan swasta, karena pesatnya perkembangan industri Belanda yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Pendidikan menjadi langkah pragmatis untuk mencetak tenaga kerja yang bersedia dibayar murah. Semakin banyak kaum Bumi Putara berhasil mengenyam pendidikan Barat dan bersentuhan dengan paham dan informasi luar, di kemudian hari membangkitkan semangat nasionalisme. Terutama dari mereka yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi muncul banyak kaum cendekia lahir dan tampil menjadi juru bicara anti-kolonialisme.[53]

Pengaruh dominan Barat tampak pada perkembangan ideologi politik meski hanya menjangkau kalangan terbatas, terutama kalangan yang berpengalaman pendidikan Barat, yang kemudian kemudian melahirkan kaum intelektual yang pada perkembangannya membidani lahirnya kelompok-kelompok pergerakan nasional. Mereka terbangun kesadarannya sebagai sebuah bangsa yang menuntut transformasi pemerintahan dari penjajah kepada kaum pribumi. Mereka terkonsentrasi dalam kelompok-kelompok ideologi,

---

[52] Syarat-syarat yang harus ditempuh untuk dapat mengenyam pendidikan didasarkan pada pertimbangan jabatan, asal-usul keturunan, kekayaan dan pendidikan orang tuanya. ***Ibid.***, p. 51-3. Simak juga Robert van Neil, ***Munculnya Elit Modern Indonesia***, terjemahan Zahara Deliar Noer, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), p. 44.

[53] Tentang pendidikan tinggi masa kolonial dapat disimak Harsja W. Bachtiar "Indonesia" dalam Donald K. Emmerson ed., ***Student and Politics in Developing Nations***, (London: Pallnall Press, 1968), p. 180-1. Simak juga Wilson "Kaum Pergerakan di Hindia Belanda 1930-an; Reaksi terhadap Fasisme" dalam ***Prisma***, No. 10, Oktober 1994. p. 39-40.

baik sebagai akibat pengaruh pendidikan Barat maupun rembesan pembaharuan Islam di Afrika Utara, Mesir.[54]

Dampak sampingan politik etis tampak pada perubahan konstelasi kekuatan politik tradisional yang kehilangan kekuatan politiknya, tergantikan tokoh-tokoh muda yang tidak lagi mengharapkan peran penguasa lokal. Penguasa-penguasa lokal tidak lagi memiliki kekuatan politik yang mampu menjangkau kawasan yang sedemikian luas. Kemerdekaan bukan menjadi kepentingan golongan kerajaan untuk memperjuangkannya.

Tidak ada satu kerajaan nusantara yang berani dan cukup kuat untuk mengambil inisiatif memerdekakan diri hingga menjelang kemerdekaan. Sebagian besar kerajaan sudah cukup puas atau tidak berdaya di bawah struktur pemerintahan kolonial. Hanya pada kalangan terpelajar yang telah ditunjang pemahaman baru mereka tentang organisasi dan ketatanegaraan, yang tergerak mempertanyakan kembali eksistensi diri dan kehadiran bangsa asing di tanah nenek moyangnya.[55]

Penjajahan Belanda tidak berpengaruh signifikan atas pola kehidupan sosial politik dan kebudayaan masyarakat negeri ini terutama bagi rakyat bawah kebanyakan. Hanya sedikit perubahan terjadi atas struktur sosial masyarakat lokal, terutama di pulau Jawa, yang dipangaruhi oleh struktur sosial Belanda. Status tradisional berikut herarkhinya tetap bertahan. Pemilahan masyarakat ke dalam kelas bangsawan dan rakyat jelata, pedagang dan sahaya bertahan seperti sebelumnya. Tidak ada transformasi nilai-nilai budaya yang cukup signifikan yang mempengaruhi perubahan kultur sosial, selain

---

[54] Dari pendidikan kaum muda memahami kelebihan bangsa Eropa yaitu ilmu pengetahuan dan organisasi. Simak ***Ibid.***, p. 40.

[55] M.C. Ricklefs, ***Sejarah Indonesia Modern***, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), p. 247.

sebagai efek samping dari berbagai kebijakan kolonial yang melahirkan gerakan-gerakan nasional.[56]

Berbeda dari budaya Hindia, Cina dan Arab mampu melakukan akulturasi yang relatif tanpa konflik, budaya Eropa tidak demikian. Ketamakan bangsa Eropa yang lebih berpretensi eksploitatif melahirkan antipati dan keterputusan kontak kultural. Masyarakat bahkan merespon kehadiran penjajah dengan senjata, dan keputusasaan atas kegagalan membendung kekuatan penjajah diekspresikan melalui pengharapan mitis, yang di antaranya ditandai dengan munculnya mitos-mitos *Ratu Adil*, *Baron Sakender* dan *Syeh Lemah Abang*, yang seluruhnya mengekspresikan pembenaran jalan nasib sebuah bangsa yang harus jatuh di bawah penguasaan bangsa Asing.[57]

Setelah nusantara merdeka, secara otomatis penguasa lokal kehilangan otoritas kekuasaannya. Struktur sosial politik lokal yang tersisa terlanjur menjadi alat kepentingan Belanda, kepanjangan tangan mereka atas penguasaan wilayah nusantara. Otoritas kekuasaan beralih pada tangan kaum pergerakan, bukan struktur sosial politik lokal sebelumnya, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada orang yang sebelumnya tidak mempunyai otoritas memerintah. Hal ini tampaknya membawa dampak besar terhadap situasi negara pasca kemerdekaan. Hengkangnya penjajah dari Indonesia mengubah struktur sosial politik dengann basis sosial

[56] Desentralisasi sejak 1903 hanya menghasilkan demokratisasi minimal, karena anggota dewan hanya ditunjuk dari kalangan penguasa lokal dan Belanda yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat bawah. Bahkan penggolongan dalam masyarakat menjadi semakin tegas akibat penerapan diskriminasi ras. Simak Kartodirdjo, "Struktur Sosial...", p. 8.

[57] Mitos-itos semacam itu mengekspresikan kekecewaan masyarakat terhadap kenyataan sejarah yang jauh dari harapan ideal dalam untaian penjelasan mitis. Simak Kartodiirdjo "Respons-respons...", p. 4-9.

baru pada teritori negara Indonesia yang luas dengan keragaman ras, suku bangsa dan bahasa.[58]

Penjajah yang berbeda membentuk perbedaan konstelasi politik pada negara-negara bekas jajahan. Sebagian bekas negara jajahan dapat berdiri dengan melanjutkan tradisi kepemimpinan sebelumnya, kerajaan, sementara sebagian lain berdiri dengan membangun struktur baru, terlepas dari kepemimpinan pra-kolonial. Di sebagian kawasan, berakhirnya rejim kolonial menjadikan kepemimpinan nasional kembali dipegang generasi kerajaan, sementara di Indonesia, generasi kerajaan umumnya kehilangan kesempatan melanjutkan kembali kepemimpinan politik yang pernah dinikmati pendahulunya.[59]

Mungkin tidak terlalu menjadi pertikaian yang berat bila saja kekuasaan jatuh pada penguasa lokal sebelumnya, dengan pemilahan wilayah yang tidak terlalu luas, meski hal itu belum menjadi jaminan berlangsungnya pemerintahan demokratis. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pengembalian kekuasaan pada struktur lokal memberikan jaminan stabilitas pasca kemerdekaan dibanding Indonesia. Meski demikian, harus disadari bahwa situasi mengiringi akhir masa penjajahan Belanda atas Indonesia berbeda dari Inggris atas Malaysia.

Penjajahan Belanda di Indonesia dilakukan dengan meruntuhkan struktur sosial politik lokal pra-kolonial. Penjajah

---

[58] Sebelumnya keadaan masyarakat Indonesia sulit dipersatukan, karena terdiri dari masyarakat kepulauan dan terdiri dari keragaman etnis. Ini juga yang memudahkan mereka dijajah, tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Simak Ihsan Adiwiguna, "Faktor-faktor Pemerhasil Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1985, p. 150.

[59] Barangkali karena itu, dampak penjajahan Belanda dan Inggris di nusantara tampak memiliki perbedaan. Bekas jajahan Belanda sarat konflik yang berujung instabilitas sementara bekas jajahan Inggris relatif tanpa konflik. Di Malaysia misalnya, sekalipun turut mempengaruhi dinamika pemerintahan lokal, Inggris membiarkan penguasa kerajaan menjalankan fungsi tradisionalnya, sekalipun sektor politik dan ekonomi praktis di bawah kendali Inggris. Simak Abdullah, ***Penjajahan Malaysia...***, p. 13.4.

mengakhiri kekuasaan politik pemerintahan-pemerintahan lokal nusantara yang mengakibatkan banyak kerajaan menghilang dari sejarah sejak tegaknya rejim kolonial. Kalaupun ada yang dipertahankan, mereka menjadi kepanjangan tangan kepentingan kolonial. Mereka berada dalam sub-ordinasi pemerintahan Belanda dan sama sekali kehilangan eksistensi politisnya. Arti pemerintahan lokal kian sirna setelah Belanda memadukan keragaman suku, ras, agama dan bahasa dalam satu teritori negara yang luas dan beragam.[60]

Dari sini dapat dinyatakan bahwa penjajahan Belanda tidak mengubah kultur sosial politik lokal. Kultur asli nusantara masih dominan dalam praktik pemerintahan patriarkhi dengan herarkhi feodalnya. Sistem pemerintahan dan birokrasi Indonesia masih tradisional sekalipun sudah berada di bawah penguasaan Belanda yang sudah menerapkan sistem parlemen. Belanda tidak melakukan *transfer* pengetahuan, kemampuan managemen dan administratif serta kebudayaan secara lebih luas. Kondisi Belanda yang tidak memungkinkan menempuh langkah-langkah strategis jangka panjang yang berakibat tertinggalnya sistem pengelolaan daerah jajahan. Pengaruh kultur pemerintahan modern dengan sistem birokrasi dan administrasi modern membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat mempengaruhi kultur pemerintahan lokal.[61]

---

[60] Upaya ini berlangsung tidak sekali jadi. Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris dan kemudian ke Belanda berlangsung dalam proses sejarah yang panjang yang mengaburkan struktur aslinya. Simak kembali Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 4-8.

[61] Putra Agung memperlihatkan fenomena tidak tertransformasikannya tradisi birokrasi modern Barat pada kasus Bali. Simak Anak Agung Gde Putra Agung, ***Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial***, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar,), p. 230.

D. Kaum Intelektual dan Pergerakan Kemerdekaan

Nusantara yang pada kurun pasca penjajahan menjadi Indonesia merupakan satu kumpulan suku bangsa dengan beragam kekhasan kultural bahkan secara politik terpisah. Alasan utama berdirinya sebuah bangsa (*reason d'etre*) yang mendasari nasionalisme Indonesia adalah pengalaman yang sama, berupa penderitaan akibat penjajahan Belanda. Karena itu, bagi bangsa Indonesia kehadiran bangsa Eropa sering dipandang sebagai berkah berganda (*mixed blessing*). Penjajahan di satu sisi berarti penindasan, pelecehan eksistensi dan penghisapan, tapi di sisi lain, penjajahan memberi alasan bersatunya bangsa-bangsa di kawasan nusantara yang masing-masing sebelumnya berdiri sendiri. Penjajah menjadi musuh bersama suku-suku bangsa yang bersatu dan mengabaikan eksistensi kesukuannya.[62]

Politik etis memberi kesempatan pada generasi muda negeri ini memperoleh pendidikan modern Barat. Meski dengan berbagai batasan dan keterbatasannya, pendidikan telah membuka kesadaran dan wawasan berfikir terhadap berbagai hal. Pola pikir modern khas Barat berikut paham-paham ideologi yang berkembang membuka wacana baru tentang perlunya bangsa nusantara berdiri sebagai bangsa berdaulat. Gambaran tentang masa depan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera, meski masih jauh dan dalam rupa utopia yang samar berkembang menjadi impian anak-anak muda negeri ini.[63]

Perkembangan intelektual Barat mutakhir yang mulai mempertanyakan eksistensi dan juga memberikan harapan tatanan baru dunia tampak pada lahirnya berbagai paham sosial politik. Meski sebagian besar masih berupa wacana pemikiran sosial politik, paling tidak, penyebarannya turut mewarnai alam pikiran sebagian

---

[62] Verkuyl, ***Ketegangan antara Imperialisme...***, p. 27-8.

[63] Kaum intelektual memperluas menyatukan segenap masyarakat dengan kesadaran nasionalisme warga Hindia-Belanda, yang di antaranya dengan terciptanya kelas menengah dari berbagai unsur masyarakat bangsa. Benda, ***Bulan Sabit...***, p. 12.

masyarakat negeri ini, terutama dalam membangkitkan rasa nasionalisme. Bergulirnya wacana-wacana modern, seperti nasionalisme, sosialisme, komunisme, fasisme dan juga islamisme, boleh jadi, tidak secara langsung menjadikan pembacanya menyetujuinya secara mutlak. Kesesuaian wacana dengan konteks yang mengiringi kesejarahan pembaca menjadikan wacana tersebut mengemuka sebagai pendorong munculnya inspirasi baru yang melahirkan harapan pada pembaca untuk berusaha keluar dari penerimaan nasib sebagai bangsa terjajah. Endapan gagasan demi gagasan berkembang dan terakumulasi menjadi satu bentuk kesadaran akan perlunya kebebasan.[64]

Di antara paham-paham sosial politik Barat, tampak bahwa paham pemikiran yang berbasis pemikiran sosialis, termasuk komunisme, mendapat apresiasi lebih besar pada kalangan intelektual dan kaum pergerakan daerah jajahan dikarenakan posisi bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah. Sosialisme, dan terlebih komunisme, memberikan harapan dan jalan keluar bagi pembebasan kaum tertindas. Komunisme bahkan memberikan suntikan etos revolusioner untuk keluar dari kolonialisme dengan cara apapun, dan bila perlu dengan pertumpahan darah. Kaum pergerakan juga menunjukkan sikap kritisnya terhadap paham-paham ideologi tertentu terutama fasis yang dinilai kontra-demokrasi.[65]

Ideologi politik modern menempat manusia sebagai pusat semesta intelektual dan membangun kesadaran akan eksistensinya sebagai makhluk yang merdeka dan memiliki hak yang sama atas kesejahteraan dalam kehidupan. Kehadiran ideologi modern memberikan inspirasi dan kesadaran berbagai bangsa untuk melepaskan diri dari penguasaan bangsa lain. Mereka menuntut hak

---

[64] Kian represifnya sikap pemerintah kolonial pada kurun pemerintahan De Jonge digantikan Tjarda van Starkenbong Stachouver tidak menyurutkan semangat kaum pergerakan. Onghokham, ***Runtuhnya Hindia-Belanda***, (Jakarta: Gramedia, 1987), p. 68.

[65] Wison, “Kaum Pergerakan ...” p. 52-3.

mereka sebagai manusia merdeka yang layak diperlakukan sebagaimana manusia yang lain. Puncak dari pengagungan ideologi tersebut terjadi ketika ideologi mengantarkan pada egosentrisme ideologis, di mana kehadiran ideologi seolah menjadi agama baru yang harus dibela antara hidup dan mati. Ideologi yang dianut sekelompok kaum pergerakan berkembang menjadi semacam identitas baru yang disertai militansi dan solidaritas berlebihan.[66]

Perkembangan media massa ketika itu memungkinkan akses informasi lebih banyak yang dapat memperkuat referensi akan harapan-harapan tersebut. Kaum intelektual semakin percaya diri bahwa setiap bangsa mempunyai kesempatan untuk merdeka dari penguasaan bangsa lain. Perkembangan di luar negeri, berupa kemerdekaan demi kemerdekaan yang dapat diraih berbagai negara menjadi kenyataan yang tak dapat ditolak, baik bagi penjajah sendiri, dan apalagi bagi bangsa terjajah. Keinginan kaum intelektual negeri ini untuk menjadikan bangsanya berdiri sebagai bangsa yang mandiri kian terbuka dan menjadi wacana yang tak mungkin lagi dibendung. Informasi media massa, apresiasi pemikiran maupun paham-paham sosial politik membukakan kesadaran akan eksistensi hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, yang pada akhirnya menyadarkan pada kebutuhan untuk memerdekakan diri dari penguasaan bangsa lain.[67]

Semakin globalnya dunia menjadi pisau bermata dua bagi bangsa penjajah. Modernitas menjadi jalan lapang bagi peningkatan dinamika sosial, politik dan perekonomian mereka. Namun demikian,

---

[66] Perbedaan-perbedaan ideologi memunculkan ketegangan bahkan kekerasan antar kelompok, namun nasionalisme masih menunjukkan fungsinya sebagai payung perbedaan. Simak Sartono Katodirdjo "The Role of Struggle Organization as Mass Movement in The Indonesian Revolution" dalam ***Masyarakat Indonesia***, Tahun Ke-VII, No. 1-2, 1980, p. 1.

[67] Pergerakan nasional semakin terkait dengan perubahan di di kawasan lain, khususnya karena gerakan rakyat di Cina, India dan Turki. Bipan Chandra, ***Nationalism and Colonialism in Modern India***, (New Delhi: Orient Longman Limited, 1990), p. 298.

modernitas yang mereka ciptakan menjadi ancaman bagi masa depan kolonialisme. Di satu sisi, mereka terikat kebutuhan untuk semakin terbuka dalam berbagai hal. Kebutuhan pengelolaan terhadap derasnya arus modal, barang dan jasa menuntut pula keterbukaan arus ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Sedangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mempengaruhi perkembangan intelektual, tidak hanya bagi mereka sendiri, melainkan juga pada masyarakat terjajah. [68]

Lamban dan pasti, tata kehidupan kemanusiaan menuntut keharusan untuk memperlakukan setiap manusia secara lebih manusiawi. Pola hubungan antar umat manusia bergulir dari penguasaan ke arah saling berbagi; dari pola hubungan superioritas-inferioritas ke arah kesetaraan. Kesempatan mengenyam pendidikan dan menikmati kesejahteraan hidup bukan lagi *privillage* sekelompok orang, melainkan harus dibuka pada setiap anak manusia. Sekalipun semula hanya terbatas pada kalangan elit, kesempatan pendidikan semakin meluas ke berbagai tingkatan.[69]

Pendidikan kolonial semula ditujukan untuk penyiapan tenaga profesional, yang akan membantu mengelola daerah jajahan, karena pesatnya perkembangan industrialisasi menuntut kebutuhan tenaga kerja yang kian banyak. Pendidikan kolonial tidak ditujukan untuk penyebaran rasa nasionalisme dan apalagi kemerdekaan. Meski demikian, Belanda dan juga bangsa penjajah lainnya tidak dapat membatasi fasilitas pendidikan hanya sebagai wahana penyiapan

[68] Kian luasnya akses pendidikan di luar negeri membukakan mata akan pesatnya perubahan politik internasional yang harus diikuti. Mavis Rose, ***Biografi Politik Mohammad Hatta***, terjemahan Hermawan Sulistyo, (Jakarta: Gramedia, 1991), p. 32. Karena itu, Kartodirdjo memandang pendidikan sebagai dinamit bagi pemerintah kolonial Sartono Kartodirdjo, ***Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional***, (Jakarta: Gramdia, 1990), p. 60.

[69] Van Neil, ***Munculnya Elit Modern Indonesia***, p. 12.

tenaga seiring perkembangan industri dan perekonomian di daerah jajahan. [70]

Pengaruh pendidikan terhadap meningkatkan pergerakan kemerdekaan pada dasarnya hanya dampak sampingan di luar tujuan kurikulum pendidikan yang tengah ditekuni pelajar pribumi. Dampak sampingan yang dimaksud dalam hal ini di antaranya merebaknya kesadaran nasionalisme dan keinginan kuat untuk merdeka. Berkumpulnya pemuda dari berbagai daerah di luar kegiatan belajar-mengajar potensial melahirkan diskusi, atau paling tidak, rasa solidaritas yang menjadi cikal bakal merebaknya kesadaran nasionalisme dan tumbuhnya gerakan-gerakan sosial politik menuntut kemerdekaan.[71]

Bahasa Melayu menjadi sangat penting sebagai perekat, sarana komunikasi yang memungkinkan berbagai kelompok suku bangsa berbicara dalam satu bahasa. Faktor bahasa diakui sebagai salah satu penopang kokohnya nasionalisme Indonesia di kemudian hari. Politik kultural kolonial yang berupaya menciptakan jarak dengan kaum pribumi telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Pemerintah kolonial berusaha mempertahankan superioritasnya dengan membatasi penggunaan bahasa Belanda pada masyarakat pribumi. Akibatnya, bahasa Melayu menjadi dominan dalam komunikasi, tidak saja dengan aparat pemerintahan Belanda, melainkan antar suku bangsa yang berbeda-beda. Bahasa Melayu pasaran tersebut bahkan berkembang menjadi senjata melawan Belanda, simbul nasional, bahasa nasional, yang umum dipakai untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi nasionalisme.[72]

[70] Wilson "Kaum Pergerakan...", p. 39.

[71] Pada banyak bangsa tampaknya keberadaan bahasa menjadi sangat persoalan tersendiri. Bahkan di Malaysia yang merupakan tempat asal bahasa Indonesia justeru hanya menjadi bahasa nomor dua. Simak Abdullah, ***Penjajahan Malaysia...***, p. 89-91.

[72] Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 51.

Situasi ini masih diikuti bermunculannya kelompok-kelompok gerakan dari kalangan terdidik di berbagai wilayah negeri ini dan di negeri Belanda. Munculnya gerakan nasional di negeri Belanda ditandai dengan didirikannya Perhimpunan Indonesia (PI) oleh kalangan pelajar, sebagai satu bentuk ekspresi bahwa mereka merupakan segolongan masyarakat dari satu bangsa, Indonesia. Di Indonesia sendiri sebelumnya sudah muncul banyak organisasi dan gerakan modern, baik yang ditujukan secara eksplisit sebagai gerakan kemerdekaan ataupun upaya tidak langsung menggalang semangat nasionalisme, seperti *Ting Hwa Hwee Koan* (1900), *Jamiatul Khoir* (1905), Budi Utomo (1908), Syarekat Dagang Islam/SDI (1909), *Indische Partij* (1912) dan diikuti banyak lagi organisasi dan gerakan yang muncul pada kurun berikutnya.[73]

Pada kurun berikutnya gerakan-gerakan sosial, politik bahkan perlawanan secara beruntun berkembang dengan mengangkat identitas Indonesia sebagai sebentuk kesadaran akan keberadaan mereka sebagai satu bangsa. Momentum gerakan nasional di tanah air paling populer ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Secara monumental Budi Utomo dipandang sebagai pelopor pergerakan kebangsaan, sekalipun pada perkembangannya hanya membatasi pada sekelompok orang Jawa. Beragamnya paham-paham baru membangkitkan munculnya identitas kelompok berdasarkan visi dan misi perjuangan, yang semakin mengkristal dengan berbagai afiliasi, karakter dan kekhasannya. Meski pada dasarnya berbeda-beda, bahkan dalam kurun berikutnya tidak jarang berhadap-hadapan satu sama lain, gerakan-gerakan tersebut pada prinsipnya baru memimpikan satu hal, Indonesia Merdeka.[74]

---

[73] Simak George D. Larson, ***Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942***, terjemahan A.B. Lapian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), p. 144. Simak juga Van Neil, ***Munculnya Elit...***, p. 82. Simak juga Ricklefs, ***Sejarah Indonesia Modern***, p. 253.

[74] Budi Utomo berkembang luas di berbagai kota, namun jatuh di bawah kendali pemerintah kolonialisme dan kehilangan watak proto-nasionalistiknya.

Berbeda dari sikap kalangan terdidik yang sedemikian prograsif, rata-rata elit tradisional yang mewarisi *privillage* kerajaan di nusantara tidak cukup tertarik untuk memberi kontribusi signifikan dalam membangkitkan kesadaran nasionalilsme. Mereka umumnya berada pada posisi *status quo*, karena sudah cukup merasa mapan dengan status ekonomi, sosial dan kultural, serta kurang membutuhkan perubahan. Mereka kehilangan etos nasionalisme yang mampu mendorong gerakan perjuangan demi tegaknya kembali eksistensi kerajaan. Kerajaan-kerajaan nusantara telah kehilangan inisiatif untuk kembali membangun negara berdulat. Tidak ada kelompok kerajaan yang cukup berdaya dengan nilai tawar memadai untuk memperjuangkan kembali eksistensi kerajaannya dengan jalinan *bergaining* baru dengan nilai tawar signifikan. Kedudukan aparat tradisional sudah jauh kehilangan legitimasi politiknya dan hanya tersisa sebagai birokrat di bawah sub-ordinasi pemerintah kolonial.[75]

Peran mereka digantikan golongan intelektual dan kaum muda yang mampu membangun kesadaran nasionalisme dan dengan cukup berani melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengarah pada tuntutan kemerdekaan. Sekalipun berada di luar struktur, secara dinamis sebagian gerakan bahkan dapat membangun *bergaining* dengan pemerintah kolonial, setidaknya untuk dapat diakomodir dalam Majlis Rakyat (*Volksraaad*), dan sebagian lagi memilih melakukan gerakan-gerakan bawah tanah. Pemerintah Hindia-Belanda tidak dapat menghindar dari keharusan merespon dan

---

Abdurrahman Surjomihardjo, ***Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi***, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), p. 48.

[75] Sebagai misal, karena kedudukannya sebagai Bupati Radjiman Widiodiningrat yang menjadi ketua Budi Utomo lebih loyal kepada pemerintah kolonial dan berusaha mengendalikan organisasinya sejalan dengan kebijakan pemerintah. Abdurrahman Surjomihardjo, ***Budi Utomo Cabang Betawi***, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), p. 70.

mengelola hadirnya gerakan-gerakan tersebut, baik dalam rangka membendung maupun mengendalikannya dari misi kemerdekaan.[76]

Tokoh-tokoh terdidik dan kaum pergerakan memang tidak memfokuskan diri pada demokratisasi, melainkan lebih tertuju pada upaya mencapai kemerdekaan. Demokrasi bukan tujuan pertama, meski tidak diragukan lagi bahwa pada dasarnya secara inheren demokrasi menjadi bagian dalam tujuan tersebut. Demokrasi secara par-excellen merupakan satu-satunya pilihan sistem pengelolaan negara yang mungkin diterapkan bagi masa depan Indonesia. Tegaknya kembali kerajaan ataupun harapan menghidupkan nilai-nilai otokrasi telah hilang dari wacana tentang masa depan Indonesia. Tidak ditemukan adanya tokoh gerakan kemerdekaan baik dari kalangan sekuler maupun agamis yang mengobsesikan hidupnya kembali sistem monarkhi atau yang lain, karena mereka sudah memasuki alam berfikir yang kosmopolit dan kritis terhadap perubahan internasional.[77]

E. Demokrasi dalam *Volksraad*

Sebagaimana bangsa Eropa Barat pada umumnya, selama kurun akhir masa kolonial Belanda telah memasuki perkembangan sistem sosial politik yang demokratis. Demokrasi telah menjadi bagian dari tradisi modern negara-negara Eropa yang diwujudkan dalam tatanan sosial politik, yang di antaranya dengan membentuk lembaga parlementariat untuk membatasi kekuasaan rasa. Kultur feodal yang

---

[76] Berbagai jalan ditempuh dalam mengantarkan pada tujuan nasionalisme, kemerdekaan, baik melalui organisasi, penerbitan surat kabar, sastra, kelompok studi, gerakan pemogokan, di samping partai politik. Simak Savitri Prastiti Scherer, ***Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran Priyayi-priyayi Nasional Jawa awal Abad 20***, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), p. 52.

[77] Mereka selalu sangat responsif terhadap ide-ide dan perubahan internasional, bahkan menjalin komunikasi dengan dunia luar secara intensif melalui berbagai forum pemuda dan pelajar dunia. Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 194-5.

patriarkhis sebenarnya juga masih sangat lekat dalam tradisi Eropa yang sebagian besar masih mempertahankan sistem kerajaan, namun kejelasan sistem ketatanegaraan menjadikan *partiarchalism* praktis tidak menghalangi proses pengambilan kebijakan secara demokratis.

Bertahannya kultur feodal bahkan boleh jadi turut menjadi penopang jalannya demokrasi dari segi terjaganya etika politik. Sekalipun kebanyakan rakyat masih belum cukup tinggi tingkat kesadaran politiknya untuk menilai kinerja dan tanggung jawab politik wakil-wakil mereka di parlemen, namun aktor-aktor politik parlemen masih harus menjaga sikap dan perilaku politik di hadapan tradisi kerajaan, karena betapapun berpengaruhnya seorang aktor politik, pada umumnya mereka tidak lebih berpengaruh dibanding raja, bahkan harus menjaga sikap terhadap raja. [78]

Semula demokrasi sendiri merupakan salah satu upaya penyelesaian politik di Eropa yang di antaranya mengandung pretensi penyelamatan bagi posisi kerajaan. Parlemen hanyalah elemen sosial politik yang akan lebih banyak membantu raja dalam mengambil keputusan yang semakin dibatasi pada hal-hal prinsipil. Di sisi lain, suara-suara di parlemen akan lebih mampu menampung aspirasi masyarakat luas, yang pada akhirnya akan memperkaya khazanah pertimbangan dalam penetapan sebuah keputusan. Raja tidak akan kehilangan popularitasnya bilamana kinerja pemerintahan tidak seperti harapan, sebab parlemen sendiri akan menaggung akibat dari setiap keputusan politik dan jalannya pemerintahan. [79]

Penerapan sistem parlementer berarti pula penyelamatan kekuasaan raja atau ratu dari dinamika konflik antar golongan dan

---

[78] Raja merupakan simbul negara, setara dengan bendera nasional dan lambang-lambang negara lainnya. Di banyak negara Eropa, kerajaan melambangkan simbul-simbul personal dari kebijakan-kebijakan dan tradisi-tradisi nasional, serta tokoh pemersatu ketika terjadi kekerasan nasional. Simak Andrain, ***Kehidupan Politik...***, p. 85.

[79] Kesantunan (*civility*), hal-hal pribadi (*privacy*) dan keumuman (*publicity*) tetap terjaga oleh tata nilai yang dianut bersama. Andrain, ***Kehidupan Politik...***, p. 86-8.

kepentingan yang menyertainya. Aktor-aktor politik boleh jadi dapat memainkan permainan demokrasi yang sangat bebas, tetapi tetap berada di bawah kendali raja, karena pada kurun tersebut umumnya pengaruh raja atau ratu masih lebih dominan dibanding parlemen yang diangkat melalui pemilihan umum. Berbeda halnya ketika kekuatan politik sudah mampu membangun kekuatan yang lebih besar, yang memungkinkan terjadinya momentum politik yang revolusioner, sebagaimana Prancis atau Jerman di kemudian hari.[80]

Terhadap daerah jajahan, keberadaan parlemen ini pula di antaranya yang di kemudian hari mendorong perbaikan politik penjajahan. Hanya saja, kesamaan kepentingan dan motivasi nasional menjadikan pertimbangan-pertimbangan parlemen cenderung mengarah pada upaya memperkuat integritas dan komitmen nasional dalam pengelolaan daerah jajahan. Betapapun vokalnya anggota parlemen Belanda, tidak seorangpun di antara mereka yang pernah mengarah kepada upaya mengakhiri penjajahan di tanah bangsa lain. Kalaupun pada akhirnya harus diakhiri, suara parlemen akan melahirkan keputusan yang sekecil mungkin merugikan kepentingan dalam negeri Belanda.[81]

Sebagai bagian dari upaya perbaikan politik penjajahan melalui politik etis, pemerintah Belanda membentuk Dewan Rakyat (*Volksraad*) Hindia-Belanda tahun 1917. Lembaga ini berdiri sebagai tindak lanjut dari tuntutan desentralisasi dan otonomi pengelolaan daerah jajahan. Kebijakan ini direspon beragam oleh kaum pergerakan

---

[80] Di Perancis (1793), nasionalisme berubah dari kesetiaan pada raja menjadi nasionalisme republik, dari semangat perdamaian abad pertengahan menjadi dinamika agresif nasionalisme modern. Badri Yatim, ***Soekarno, Islam dan Nasionalisme***, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 67.

[81] Pola penjajahan di Indonesia banyak mendapat kritik dari kelompok sosialis di parlemen. Tokoh-tokoh sosialis Belanda seperti Van Kol, Van Deventer dan Brooschooft merupakan beberapa di antara tokoh sosialis yang menyuarakan perlunya mengakhiri politik *batig slot* dengan perbaikan politik kolonial. Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 34-5.

di Indonesia, di mana sebagian berusaha masuk di dalamnya, dan sebagian lagi menolak. Sementara di luar lembaga tersebut, di Indonesia tumbuh gerakan-gerakan sosial politik yang semakin pesat, yang mana sebagian organisasi sosial berubah menjadi organisasi politik.[82]

Tidak sebagaimana posisi parlemen di negeri Belanda sendiri, *Volksraad* pada dasarnya belum layak disebut sebagai lembaga demokrasi. Posisinya dalam pengelolaan negara masih setaraf badan penasehat yang berfungsi menampung masukan-masukan dari masyarakat daerah jajahan. Hal ini dikarenakan di atas lembaga *Volksraad* masih terdapat kekuasaan gubernur jenderal dan pemerintah Belanda yang lebih menentukan dibanding *Volksraad* sendiri. Namun demikian, keberadaan *Volksraad* telah memungkinkan pertimbangan konteks lokal dan aspirasi-aspirasi kaum pribumi diartikulasikan dan didengar pemerintah kolonial. [83]

Komposisi keanggotaan dan aturan institusi politik tersebut juga tidak memadai untuk disebut lembaga demokrasi. Kaum pribumi dilibatkan dalam lembaga ini bersama bangsa Timur Jauh dan wakil pemerintah Belanda dengan perimbangan jumlah anggota yang tidak memperhatikan komposisi konstituen yang diwakili. Apalagi rekrutmen anggota bukan dilakukan melalui pemilihan umum ataupun mengangkat perwakilan lokal yang mengakar di tengah masyarakat. Keberadaan kaum pribumi di lembaga tersebut juga lebih merepresentasikan wakil partai politiknya. Kesediaan

---

[82] Tokoh-tokoh organisasi Budi Utomo yang terdiri dari kalangan priyayi Jawa menyambut baik berdirinya *Volksraad*, bahkan ketika masih dalam pembahasan DPR Belanda. ***Ibid.***, p. 180.

[83] Paling tidak kebijakan yang menindas dan merugikan rakyyat sebagaimana sebelumnya dapat lebih dieliminir, atau sekedar diartikulasikan, akibat kepekaan yang lebih baik dari wakil-wakil pribumi, seperti respon dr. Sutomo menyikapi pengurangan anggaran pendidikan oleh Gubernur Jenderal De Fock. ***Ibid.***, p. 181. Satu tahun sejak berdirinya *Volksraad*, SI sudah melancarkan kritik-kritik keras pada pemerintah kolonial. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p.73.

memerjuanganka kepentingan kaum pribumi muncul sebagai bentuk kepedulian sosial mereka atas situasi yang dihadapi bangsanya. *Volksraad* bagi kaum pergerakan merupakan alternatif perjuangan secara kooperatif. Sementara sebagian anggota masyarakat lainnya belum tertarik ikut serta dan masih lebih memilih gerakan bawah tanah atau konfrontasi budaya.[84]

Anggota *Volksraad* direkrut berdasarkan pertimbangan organisasi, yang keberadaannya juga masih mempersyaratkan pengakuan dari pemerintah. Sebuah komunitas, betapapun besarnya jumlah anggota tidak akan dapat memperoleh kursi di *Volksraad* bilamana tidak memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Pengangkatan anggota *Volksraad* juga tidak menimbulkan protes atau keberatan dari masyarakat bawah, karena lembaga itu belum dianggap berarti, bahkan sangat mungkin pada masa itu lebih banyak rakyat negeri ini yang tidak tahu bahwa lembaga itu ada. Suara anggota dewan ini tidak lebih dari sekedar pendapat pengamat atas kepentingan bangsanya sendiri. Masalah-masalah yang diangkat dalam sidang *Volksraad* juga terfokus pada persoalan partikular, sementara masalah kemerdekaan masih tabu dibicarakan. [85]

Pemerintah kolonial menarik-ulur peran kaum pribumi dalam penentuan kebijakan. Apalagi sejak PKI melakukan gerakan anarkhis pada peristiwa 1926-1927, yang berakibat pembatasan terhadap gerakan-gerakan sosial politik. Pemerintah kolonial juga memperketat peran kaum pergerakan dalam *Volksraad*. Beberapa anggotanya, terutama dari kalangan PKI, PNI dan PNI Baru, dengan

[84] Ketidakdemokratisan *Voklsraad* terutama tampak pada otoritas *veto* gubernur jenderal dalam pengambilan keputusan. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 39.

[85] *Volksraad* bukanlah lembaga yang didisain untuk membangun kontak antara kaum nasionalis dengan massa. Pemilihan umum terbatas yang dilakukan juga banyak diwarnai intimidasi oleh aparat pemerintah kolonial, termasuk polisi. ***Ibid.***, p. 40.

mudah memperoleh tuduhan makar atau minimal penghasutan, yang menyebabkan banyak di antara mereka diadili, bahkan diasingkan ke daerah pembuangan.[86]

Meski demikian, keberadaan *Volksraad* membuka jalan bagi pergerakan nasional upaya-upaya politis bagi kemerdekaan. Hal ini tampak dalam tuntutan paling monumental, petisi Soetardjo dan Wiwoho. Soetardjo mengajukan peningkatan status Indonesia sebagai bagian dari pemerintah kolonial yang berpemerintahan sendiri. Konsekwensinya, *Volksraad* harus lebih demokratis yang mencerminkan akomodasi kekuatan sosial politik lokal. Hanya saja petisi Soetardjo yang sedemikian lunak tidak hanya ditolak pemerintah Belanda, melainkan juga ditentang kaum revolusioner yang mengambisikan kemerdekaan penuh atas seluruh bekas wilayah jajahan Belanda. Mereka mengharapkan kemerdekaan, dan bukan sekedar pemerintahan sendiri. Kemerdekaan menjadi satu-satunya harapan kalangan nasionalis revolusioner, terutama pada mereka yang kelak menjadi pendiri bangsa (*the founding fathers*). [87]

Sekalipun direspon beragam oleh kaum pergerakan, kegagalan petisi Sutarjo mendorong berkembangnya aliansi kekuatan politik yang tergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Selain belajar dari kegagalan petisi Sutarjo, aliansi ini juga terbentuk akibat perkembangan internasional yang tak menguntungkan, berupa kemenangan fasis yang disertai aneksasi Jerman atas Belanda. Rendahnya perhatian pemerintah kolonial terhadap kepentingan bangsa Indonesia juga turut mendorong menguatnya aliansi tersebut. Setelah petisi Sutarjo banyak dikecam oleh kaum pergerakan, tetapi GAPI mengajukan tuntutan yang lebih realistis dengan jargon *Indonesia Berparlemen*. Tuntutan tersebut didasarkan atas dasar hak

[86] Banyak tokoh ditangkap dan dibuang di Boven Digul. Bersama mereka dibuang juga 13.000 orang lainnya dari berbagai daerah. ***Ibid.***, p. 86. Simak juga Larson, ***Masa Menjelang Revolusi...***, p. 276.

[87] Pospoprodjo, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 221-230

menentukan nasib sendiri; persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial; serta persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia, tapi usaha tersebut tidak direspon oleh pemerintah, bahkan hanya ditanggapi dengan kebijakan wajib bela (*inheemse militie*) negara.[88]

Sebagai lembaga politik, *Volksraad* memang lebih merepresentasikan akses politik kalangan elit dan terdidik dibanding rakyat pada umumnya, sedangkan rakyat bawah sendiri masih sangat asing dengan lembaga semacam itu. Di samping masih asing dengan tradisi perwakilan, pandangan masyarakat masih dikuasai oleh visi kepenguasaan bukan perwakilan. Bagi kebanyakan masyarakat di daerah jajahan hanya dipahami adanya pihak penguasa dan yang dikuasai. Kontrak sosial belum berlaku dalam konteks penataan kehidupan sosial politik kolonial masa politik etis. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam *Volksraad* tidak ada keterwakilan rakyat, selain sekedar simbulisasi wakil rakyat dalam badan penasehat pemerintah.[89]

F. Penjajahan Jepang dan Momentum Kemerdekaan

Perkembangan ekonomi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi mendorong Jepang berupaya membangun imperium di Asia. Jepang membuat kejutan besar, di mana secara tak terduga mampu mengalahkan Uni Sovyet dan menantang Amerika Serikat dengan membombardir pangkalan angkatan lautnya, Pearl Harbour. Jepang juga merebut dan menguasai wilayah-wilayah terdekatnya di Asia,

[88] ***Ibid.***, p. 230-5. Sekalipun tidak cukup solid dan efektif, namun terbentuknya GAPI menandai bersatunya kekuatan-kekuatan nasionalis ke dalam satu front yang cukup berpengaruh. Adiwiguna, “Faktor-faktor Pemerhasil…”, p. 151.

[89] *Volksraad* tidak dapat disamakan dengan parlemen karena hanya berstatus sebagai badan penasehat, yang tidak dapat mengubah pemerintahan, karena tidak ada menteri yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya. Simak Kartodirdjo, “Struktur Sosial…”, p. 9.

China, dan terus bergerak menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tengara, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai bangsa-bangsa Eropa.

Jepang telah menjadi kekuatan yang mematahkan kontinuitas sejarah penjajahan Eropa, khususnya di Asia Pasifik, setelah hampir tiga abad tidak pernah ada satupun kekuatan Asia yang mampu menandinginya. Dengan gerakan cepat, Jepang secara berturut-turut merebut kawasan-kawasan strategis di Indonesia yang dimulai dari Tarakan, Balik Papan Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Jawa Barat, Tengah dan Timur. Penguasaan Pulau Jawa 7 Maret 1942, oleh Jepang mengakhiri kekuasaan Belanda secara politik maupun militer atas wilayah nusantara selama beberapa dekade.[90]

Kemenangan Jepang atas Rusia dan direbutnya Hindia-Belanda dari Belanda menyuntikkan semangat dan harapan baru, di mana kemenangan Jepang sering dipandang sebagai simbul kemenangan bangsa Asia atas Eropa. Tokoh-tokoh pemuda Indonesia sebelumnya sudah menunjukkan simpatinya pada Jepang, terutama setelah kunjungan Gatot Mangkupraja dan Hatta ke Jepang 1933. Mereka berkeyakinan bahwa Jepang dengan Pan-Asianya mendukung Pergerakan Nasional Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan.[91]

---

[90] Bantuan padukan Inggris dan Amerika tidak mampu membendung kekuatan Jepang ke Indonesia. Nugroho Notosusanto, ***The PETA Army During Japanese Occupation of Indonesia, 1943-1945***, (Djakarta: Department of Defence and Scurity, Centre for Armed Forces History, 1974), p. 1-5. Namun demikian Kahin menilai, kekalahan Belanda dari Jepang dikarenakan Belanda tidak sungguh-sungguh mempertahankan Indonesia. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolutin...***, p. 101.

[91] Hatta yang anti-fasis semula menolak bekerja sama. Tetapi setelah Jepang meyakinkan niatnya untuk memberikan sesuatu yang paling berharga, kemerdekaan, Hatta setuju dengan syarat hanya menjadi penasehat. L.D. Jong dan Arifin Bey, eds., ***Pendudukan Jepang, Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda***, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1987), p. 18-20. Simak juga Notosusanto, ***The PETA Army...***, p. 15.

Sekalipun dikenal anti-fasism, Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang, sebab Jepang secara politis membutuhkan dukungan rakyat Indonesia. Notosusanto menduga hal ini dikarenakan propaganda Jepang sebelumnya yang menjanjikan kemerdekaan, atau minimal pemerintahan sendiri. Tokoh-tokoh lain, termasuk Soekarno, juga memandang Jepang dalam posisi sangat kuat pada masa itu. Kekuatan tersebut dibutuhkan Indonesia. Kekecewaan terhadap pemerintah Belanda, di mana harapan kemerdekaan bahkan sekedar memiliki parlemen sendiri semakin pupus dengan ditolaknya petisi Sutarjo maupun GAPI yang menuntut Indonesia Berparlemen.[92]

Banyaknya tekanan terhadap kaum nasionalis pada masa kolonial Belanda diimbangi pemerintahan pendudukan Jepang dengan menunjukkan itikad baik, di antaranya Jepang tidak menyelenggarakan perayaan kemenangan perang. Berulang kali Jepang menegaskan bahwa kehadiran mereka di Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan membebaskan dari dominasi penjajah Eropa. Mereka bahkan melibatkan banyak kaum nasionalis dalam pemerintahan, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama penjajahan Belanda. Pembebasan kaum nasionalis dari kamp-kamp tahanan juga merupakan hal lain yang memberikan banyak harapan, sehingga selama tiga bulan pertama kehadirannya Jepang mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. [93]

---

[92] Kaum pergerakan benar-benar dikecewakan pemerintah Belanda, karena di saat-saat kritis mereka tetap tidak melunakkan kebijakannya atas wilayah Indonesia. Tampaknya Jepang membaca keinginan kaum nasionalis, hingga memberi kesempatan membicarakan masalah politik dan ekonomi, 12 September 1940. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 311.

[93] Dalam pidato hari pertamanya pimpinan pasukan Jepang, Jenderal Imamura menyatakan lima butir ketetapan yang menjadi semacam undang-undang. Poin utama dari pernyataan tersebut adalah bahwa kehadiran tentara Dai Nippon adalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat India-Timur dan seluruh penduduk harus mentaati militer Jepang sebagai pemerintahan. Jenderal Imamura sendiri secara individual tidak bersedia menempati istana negara, karena dianggapnya terlalu besar. Jong dan Bey, eds., ***Pendudukan Jepang...***, p. 7-11.

Sebagian tokoh pergerakan bersedia bekerjasama dengan pemerintahan Jepang, setelah sebelumnya bersikap ambigu antara bekerja sama dan konfrontasi. Mereka mengerahkan segala kemampuan untuk mendukung, dan menggerakkan massa untuk berjuang bersama Jepang. Sebagai bagian dari propaganda riilnya Jepang mulai melibatkan rakyat banyak dalam berbagai kegiatan. Jepang melibatkan kaum pergerakan untuk mengisi kekurangan pegawai-pegawai pemerintah (*Gunsei*). Hanya sebagian kaum nasionalis seperti seperti Sutan Sjahrir dan Tjipto Mangunkusumo tetap menolak bekerja sama dan memilih melakukan gerakan bawah tanah secara konsisten.[94]

Beberapa gerakan konsolidasi yang melibatkan rakyat dibentuk, yang pertama adalah gerakan "tiga A", dengan jargon Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia dan Nippon pemimpin Asia. Maksud slogan tersebut adalah dalam rangka upaya memobilisasi dukungan rakyat dalam perang dan menciptakan situasi kondusif bagi penguasaannya atas Asia Tenggara. Tokoh Parindra, Mr. Samsuddin ditunjuk sebagai ketua bagian propaganda (*Sendenbu*) gerakan. Meski ditunjang dengan pembentukan komite-komite di tingkat daerah, pada akhirnya gerakan tersebut hanya berumur beberapa bulan dan tidak efektif.[95]

Desember 1942 Jepang kembali membentuk organisasi rakyat, Poesat Tenaga Rakjat (Poetera) yang dipimpin Soekarno, dengan wilayah Jawa dan Madura. Sebagaimana organisasi sebelumnya, organisasi ini intinya ditujukan dalam rangka propaganda, agar rakyat bersedia membantu usaha perang Jepang. Di antara tugas organisasi ini adalah menghapus pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda dari

---

[94] Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 105. Penolakan Tjipto Mangunkusumo bukan karena alasan politik semata, melainkan juga karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Sutan Sjahrir, ***Out of Exile***, (New York: The John Day Coy., 1949), p. 241.

[95] Cindy Adams, ***Bung Karno, Penjambung Lidah Rakjat***, (Djakarta: Gunung Agung, 1966), p. 103.

perasaan dan tanggung jawab masyarakat Indonesia, dan mendorong agar rakyat bersedia mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat persaudaraan Indonesia-Jepang, serta pengajaran intensif bahasa Jepang. Poetera juga mengemban tugas di bidang sosial-ekonomi yang semuanya ditujukan untuk mendukung kepentingan Jepang. Meski mendapatkan respon besar, organisasi ini juga tidak berkembang, terutama karena lemahnya dukungan pemerintah. Tuntutan iuran anggota dan pungutan keuntungan dari lembaga perdagangan yang didirikan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang tak menentu menjadikan organisasi ini kehilangan peminat. Meski demikian, organisasi ini telah membantu penggalangan rakyat secara nasional, yang tak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.[96]

Sebagai bagian dari konsolidasi dan penggalangan massa maupun dukungan, Jepang mendirikan *Jawa Hōkōkai*, yang pengelolaannya langsung di bawah pemerintah Jepang (*Gunseikan*). Organisasi ini mencakup berbagai bidang profesi; guru (*Kyoiku Hōkōkai*), dokter (*Izi Hōkōkai*), kewanitaan (*Fujinkai*), pusat kebudayaan (*Keimin Bunka Shidōshō*) serta tata usaha pembantu prajurit, PETA dan *Heiho* (*Bōei Engokai*). Mobilisasi potensi masyarakat dikerahkan melalui *Jawa Hōkōkai* dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Barisan milisi semi-militer dibentuk seperti barisan Pelopor (*Shuishintai*) 1 November 1944, barisan Berani Mati (*Jibakutai*) 8 Desember 1944, Hizbullah (*Kaikyo Seinen Teishintai*) 15 Desember 1944 serta Korps Pelajar (*Gakutotai*).Karena dinilai masih terdiri dari banyak suku bangsa dan adat istiadat yang tidak terlalu membahayakan, organisasi serupa tidak dibentuk di luar Jawa, dan baru setelah Maret 1945 diberikan konsesi dengan dibentuknya *Cūō Sangi In*. Pada masa-masa inilah kaum nasionalis memperoleh kesempatan untuk melebarkan dan

---

[96] Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 106-7.

memperkuat pengaruh, serta menyuntikkan kesadaran nasionalisme dan semangat juang.[97]

Meski sama-sama anti-Barat, pada masa pendudukan Jepang golongan nasionalis Islam memperoleh perhatian khusus karena dinilai lebih dapat diandalkan dibanding nasionalis "sekuler". Kolonel Horie sebagai pejabat yang menangani masalah keagamaan berusaha melakukan pendekatan dengan para tokoh agama, kyai. Ia dibantu dua pembantunya, serdadu jepang yang beragama Islam, mengunjungi masjid-masjid dan memberikan ceramah. Para kyai juga diberi penataran secara sistematis, sampai diyakini tidak membahayakan lagi. Jepang bersikap lebih berhati-hati terhadap kalangan Islam setelah sebelumnya meminta maaf akibat penangkapan tokoh agama.[98]

Dalam rangka memberikan kelonggaran golongan Islam di pulau Jawa, Jepang tetap mengijinkan berdirinya Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang berdiri di Surabaya 1937. Hanya saja mereka dilarang melakukan aktifitas politik dan harus mengubah anggaran dasar (azas dan tujuan) dengan menambahkan kalimat turut bekerja dengan sekuat tenaganya dalam pekerjaan membangunkan masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia raya di bawah pimpinan *Dai Nippon*. Oktober 1943, secara resmi MIAI dibubarkan diganti dengan Majlis Sjoero Muslimin Indonesia (Masjoemi). Pada tahun yang sama Muhammadiyah dan NU diijinkan kembali melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. Meski kegiatan diberikan kelonggaran bukan berarti kalangan Islam selalu mengekor kebijakan Jepang. Bilamana bertentangan dengan hal-hal yang dianggap prinsip, umat Islam tidak segan-segan

---

[97] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 18-23.

[98] Hasyim Asy'ari yang ditangkap karena menolak menghormat bendera Jepang. ***Ibid.***, p. 25. Hasyim Asy'ari dipenjara Oktober 1942 dan kemudian dibebaskan dengan disertai permintaan maaf pada masyarakat muslim. Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 28-9.

melakukan pemberontakan, seperti peristiwa Singaparna, Indramayu dan Aceh.[99]

Propaganda Jepang terutama ditujukan pada kalangan pemuda dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua, yang memberikan dampak psikis yang luas. Berbeda dari masa Belanda, di mana batas-batas status dan hubungan dengan bangsa Eropa maupun bangsa asing lainnya dibuat tegas, pada masa ini masyarakat tidak merasakan perbedaan antara orang Jepang atau Indonesia. Semboyan tersebut seakan menghapus sekat dan kesenjangan kelas sosial sebagaimana yang dialami bangsa ini era penjajahan Belanda. Di sisi lain, masyarakat pribumi sedikit memiliki kendala psikologis dengan Jepang yang dari segi rasial tidak terlampau berbeda. Jepang sendiri tidak membedakan kelas sosial hingga lebih mudah diakses setiap orang dan terutama kaum pergerakan. Kehadiran Jepang menjadikan diskriminasi rasial selama penjajahan Belanda menjadi terlalu buruk untuk dikenang, sekalipun secara ideologis Jepang dikenal sebagai fasis.[100]

Jepang terus melakukan propaganda melalui berbagai tindakan proaktif, termasuk dengan memberikan berbagai latihan ketrampilan seperti memasak, berkebun, kebersihan lingkungan dan bahasa Jepang. Masa pendudukan Jepang merupakan masa-masa perang, di mana upaya mewujudkan stabilitas, dan apalagi pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang mustahil. Pemerintah militer Jepang sendiri membutuhkan banyak sumber daya, dana dan tenaga untuk mendukungnya. Jepang perlu menutupi penghisapan ekonomi,

---

[99] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 24-6.

[100] Sekalipun dikenal berpaham fasis, kaum pejuang mudah mengakses berbagai fasilitas tanpa pembedaan kelas yang tajam sebagaimana masa Belanda. Pendidikan dan Pelatihan dapat diperoleh masyarakat berbagai tingkatan. Di samping itu, sikap tegas terhadap orang-orang Belanda turut menambah simpati rakyat. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 102.

perampasan hasil bumi rakyat, bahkan eksploitasi tenaga manusia (*romusha*) dengan upaya-upaya yang terkesan menjanjikan.[101]

Masa pendudukan Jepang sekaligus menjadi momentum perkembangan sosial politik yang lebih menonjolkan kekuatan fisik dan semangat heroik, sementara wacana yang lebih rasional tersingkir secara perlahan. Hal ini dikarenakan upaya-upaya Jepang lebih tertuju pada pengerahan tenaga dari pada kesadaran politik yang rasional. Jepang sendiri membatasi gerakan politik kaum terpelajar dan cenderung menekan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dengan berbagai aturan yang memungkinkan masyarakat terasing dari wacana politik yang rasional. Pemerintah Jepang tidak segan-segan memecat mahasiswa yang membangun kegiatan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pendudukan.[102]

G. Tempaan Heroisme Bersenjata pada Kurun Akhir Era Kolonial

Jepang mulai bersikap defensif sejak kalah dari Amerika dan sekutunya dalam pertempuran Laut Karang Mei 1942 dan Guadalcanal Agustus 1942. Luasnya daerah pendudukan mengharuskan Jepang melakukan rekrutmen tenaga perang dari penduduk lokal secara besar-besaran. Jepang mulai melakukan rekrutmen tenaga perang secara besar-besaran di setiap daerah. Mulai 29 April 1943, Jepang mengumumkan pembentukan *seinendan* dan *keibodan*. Jepang juga merekrut pembantu prajurit (*Heiho*), kemudian

---

[101] Masa penjajahan Jepang yang hanya tiga setengah tahun melahirkan penderitaan luar biasa pada rakyat Indonesia, sebab demi kepentingan perang banyak rakyat harus dikorbankan, baik berupa kemiskinan akibat penjarahan hasil bumi maupun kerja paksa. Kahin, ***Nationalism and Revolution***, p. 108. Pospoprodjo dan Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 38-9.

[102] Gerakan mahasiswa pada kurun pendudukan Jepang relatif terbatas yang dapat diidentifikasi. Namun demikian, beberapa catatan menunjukkan bahwa sebagian di antara mereka dipecat dari perguruan tinggi karena melakukan kegiatan politik di luar kampus. Simak Abu Bakar Loebis, ***Kilas Balik Revolusi: Kenangan Saksi dan Pelaku*** (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), p. 43-5.

disusul pasukan Pembela Tanah Air (PETA), yang di kemudian hari merupakan organisasi militer penting dalam sejarah awal Indonesia.[103]

Meski ditujukan sebagai pasukan cadangan, tetapi organisasi ini dipropagandakan sebagai usaha untuk melatih pemuda Indonesia mempertahankan daerahnya dengan kekuatan sendiri. Propaganda Jepang membawa hasil berupa besarnya sambutan dari pemuda negeri ini, hingga mencapai jumlah tidak kurang dari 500.000 pemuda. *Seinendan* dipersiapkan menjadi tentara, sehingga diberi latihan-latihan kemiliteran untuk pertahanan maupun penyerangan. Mereka dipersiapkan sebagai barisan pasukan cadangan yang berperan mengamankan garis pertahanan belakang. Pelatihan tidak terbatas pada markas-markas latihan, tapi juga di institusi-institusi sosial ekonomi, seperti sekolah, pabrik dan perkampungan. [104]

Keibodan dipersiapkan sebagai pembantu polisi dalam tugas-tugas sipil. Jumlah *keibodan* lebih banyak dibanding *seinendan*. Tidak kurang dari satu juta orang terekrut melalui keibodan ini. Sukabumi merupakan tempat pelatihan khusus bagi para kader *keibodan*. Namun demikian, pembentukan *keibodan* ini diusahakan Jepang agar tidak dipengaruhi kaum nasionalis. Karena itu, konsentrasi pelatihan ini berada di desa-desa di mana kaum nasionalis kurang banyak berpengaruh. Sementara *seinendan*, mengingat terkonsentrasi di perkotaan maka tidak terhindarkan masuknya pengaruh kaum nasionalis di dalamnya. Dengan nama berbeda, hal serupa dibentuk di luar pulau Jawa. Di sumatera, *keibodan* diselenggarakan dengan nama *bōgōdan* dan di Kalimantan diberi nama *Borneo Konan Hōkōkudan*. Tidak hanya itu, pelatihan kemiliteran sejenis tidak hanya ditujukan pada kaum pria, melainkan juga diberikan kepada wanita dengan nama *fujinkai* (himpunan wanita).[105]

---

[103] Kahin, ***Nationalism and Revolution***, p. 109.
[104] Pospoprodjo, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 33.
[105] ***Ibid.***, p. 23.

Heiho adalah prajurit Indonesia yang ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Laut. Sampai akhir pendudukan Jepang tercatat tidak kurang dari 42.000 anggota Heiho direkrut, yang dilatih menggunakan beragam senjata militer sungguhan, mulai dari senapan, tank, artileri medan, senjata anti pesawat udara, sopir dan sebagainya. Dengan demikian, pasukan ini sebenarnya lebih terlatih dibanding PETA yang dibentuk kemudian. Hanya saja, berbeda dari PETA, seluruh anggota pasukan tidak ada yang berpangkat perwira. Meski tidak menunjukkan kepangkatan, namun PETA memiliki komandan sendiri mulai dari komandan bataliyon hingga prajurit sukarela.[106]

PETA dibentuk lebih provokatif, karena dikesankan seolah-olah atas inisiatif Indonesia. Pimpinan nasionalis diminta membuat surat permohonan pembentukan pasukan bernuansa nasionalis. Pada dasarnya pasukan ini tidak lebih terlatih dibanding Heiho karena pemilihan komandan lebih didasarkan atas status sosial seseorang di masyarakat. Meski demikian, gemblengan selama mengikuti PETA telah menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang kuat pada pemuda-pemuda negeri ini untuk bangkit melawan penjajah. Perbedaan perlakuan antara PETA yang berbeda dari tentara Jepang, di samping kekecewaan melihat situasi masyarakat menyebabkan separo anggota PETA memberontak.[107]

Memasuki 1944, Jepang mulai terdesak. Satu demi satu daerah jatuh ke tangan sekutu dan bahkan mengarah ke Jepang sendiri. Upaya-upaya Jepang tidak lagi mampu menunjang kepentingan perangnya. Perdana Menteri Koiso dalam sidang Parlemen menyatakan bahwa Indonesia (Hindia-Timur) kelak di kemudian hari diperkenankan merdeka. Langkah lebih nyata ini diambil menyusul kekalahan yang sudah sangat dekat, terutama sejak jatuhnya

[106] ***Ibid.***, p. 33.

[107] Kahin menduga pemberontakan PETA 1944 sebagai akibat infiltrasi kelompok Sjarifuddin dan Sjahrir, yang terus mengobarkan anti kolonialisme di bawah tanah. Kahin, ***Nationalism and Revolution***, p. 114.

kepulauan Saipan dan menimbulkan keguncangan dalam negeri. Janji Jepang memungkinkan terjadinya perang lanjutan antara Sekutu dengan negara merdeka bekas jajahannya, dan benar-benar terjadi saat Jepang benar-benar kalah sebelum mewujudkan janjinya.

Kolonialisme Jepang merupakan kolonialisme krisis, di mana penjajah sendiri belum menikmati hasil penjajahannya, bahkan Jepang baru dapat membentuk pemerintahan militer yang bersifat sementara. Jepang belum berhasil membangun struktur pemerintahan yang kokoh untuk melanggengkan penguasaannya atas wilayah nusantara. Masa penjajahan Jepang merupakan penjajahan yang penuh kepanikan dalam situasi perang, sehingga banyak diwarnai propaganda, yang karenanya pula eksploitasi penjajah Jepang lebih banyak ditujukan untuk membiayai kegiatan perangnya.[108]

Biaya perang yang tinggi menyebabkan penghisapan sumber penghidupan rakyat terutama hasil bumi serta tenaga kerja paksa (*romusha*) secara besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan luar biasa, yang mendorong keinginan merdeka semakin tak tertahankan. Frustasi masyarakat yang memuncak akibat pendudukan Jepang juga kian menyuburkan antipati pada penjajah manapun. Di sisi lain, pelatihan-pelatihan militer atau semi-militer Jepang telah menyuntikkan keberanian, disiplin dan kemampuan melakukan perlawanan bersenjata secara meluas pada masyarakat Indonesia di kemudian hari.[109]

Mobilisasi massa yang sedemikian *massive* merupakan hal baru yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Meski sebelumnya

---

[108] Bila penjajahan Belanda sudah terbentuk pemerintahan sipil, selama penguasaan Jepang hanya berdiri pemerintahan militer: Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh Lima) untuk Sumatera; Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara keenambelas) untuk Jawa-Madura; dan Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Pospoprodjo dan Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 5

[109] O.D.P. Sihombing, ***Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang***, (Djakarta: Sinar Djaya, 1962), p. 93.

Heiho, *Seinendan*, *Keibodan* dan PETA disiapkan untuk membantu Jepang dalam perang, tapi dalam perkembangannya justeru menjadi titip awal perlawanan bersenjata menolak kehadiran kembali penjajahan Belanda, termasuk menghadapi Jepang sendiri. Demikian halnya dengan gerakan-gerakan propaganda yang pernah dimotori Jepang tampak lebih bermakna sebagai pelatihan dan konsolidasi gerakan nasionalis dari pada membangun ketaatan pada Jepang.

Di luar sikap keras dan himpitan perekonomian akibat penghisapan ekonomi yang luar biasa, maupun eksploitasi manusia melalui kerja paksa (*romusa*), penjajahan Jepang memberikan banyak perubahan karakter masyarakat bangsa secara drastis. Pelatihan-pelatihan kemiliteran yang diberikan Jepang bagaimanapun banyak menyuntikkan semangat juang (*seishin bushido*), yaitu jiwa kesatria yang menekankan kepercayaan diri, disiplin, kerja keras, kesetiaan dan ketaatan pada pemimpin. Di samping itu, Jepang juga mengajarkan organisasi sosial yang lebih sistematis yang memungkinkan kekuatan massa dikelola secara solid dengan disiplin dan semangat juang tinggi, semangat yang kemudian membekali keberanian luar biasa pada masyarakat bangsa ini di kemudian hari ketika harus berhadapan kembali dengan ancaman kehadiran Belanda.[110]

Realitas politik yang dihadapi Jepang ketika menguasai Indonesia memang cukup berat. Di satu sisi, Jepang berhadapan dengan pasukan sekutu dan masyarakat Indonesia di sisi lain yang dipenuhi pergolakan menuntut kemerdekaan. Karena itu Jepang perlu mengobral janji-janji guna menjamin stabilitas penguasaan wilayah ini. Jepang bahkan menghadapi situasi yang semakin kritis, di mana

---

[110] Pelatihan-pelatiahn semi militer berikut pengorganisasian dan cara menggerakkan massa yang diajarkan, di samping semangat nasionalisme dan persaudaraan yang dikobarkan merupakan pembentukan karakter penting ketika memasuki masa revolusi. Simak Benedict R.'OG. Anderson, ***Some Aspect of Indonesian Politics under Japanese, 1944-1945***, (Ithaca: Cornell University Press, 1961), p. 30.

kekalahan demi kekalahan terjadi di berbagai front, di mana satu persatu wilayah kekuasaan Jepang direbut pasukan sekutu. Ketika kekalahan di pasifik dan Indonesia bagian Timur telah di ambang mata, Jepang perlu melakukan langkah-langkah konkrit yang dapat meyakinkan kaum nasionalis dengan mengumumkan pembentukan Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dōkuritsu Jumbi Cōsakai*) atau BPUPKI 28 Mei 1945, yang ditujukan untuk mempelajari berbagai hal yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. [111]

Di luar lembaga bentukan Jepang tersebut, situasi yang berkembang kian mengarah pada revolusi kemerdekaan. Antipati masyarakat terhadap kolonialisme sudah mencapai puncaknya, terlebih dengan momentum kekalahan Jepang dan bayang-bayang kembalinya Belanda. Kaum revolusioner pada umumnya kurang peduli akan seperti apa bentuk negara, karena satu-satunya target yang dituju hanyalah kemerdekaan. Pemikiran tentang hal lain, termasuk demokrasi bahkan wacana ideologi yang sempat menajam pada kurun akhir pemerintahan Belanda masih tenggelam dalam situasi perang dan upaya meraih kemerdekaan. Bibit-bibit nasionalisme jaman pergerakan berpadu dengan tempaan semasa pendudukan Jepang memuncakkan semangat juang hanya untuk satu di antara dua pilihan, merdeka atau mati.[112]

---

[111] Pospoprodjo, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 67.

[112] Kahin menduga hal ini merupakan upaya kelompok Sjahrir yang sejak semula antipati terhadap penjajah berusaha dengan berbagai cara agar momentum kekalahan Jepang dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 134-5.

WACANA ISLAM DAN DEMOKRASI DI PENGHUJUNG ERA KOLONIAL

A. Demokrasi dalam Pandangan Para Founding Fathers

Jepang sendiri tampak antisipatif terhadap segala kemungkinan, termasuk bilamana kalah perang. Ketika menghadapi tekanan demi tekanan akibat kekalahan di berbagai medan pertempuran, pembentukan BPUPKI menjadi pilihan strategis paling ekstrim dalam rangka meraih dukungan rakyat pribumi. Dibanding dengan gerakan dan organisasi yang diciptakan pada awal penguasaan wilayah ini, Jepang tampak lebih serius dalam membidani munculnya badan yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan, termasuk dalam penyelenggaraan sidang-sidang BPUPKI.[1]

Dalam waktu relatif singkat, anggota badan tersebut segera dapat melakukan tugasnya dengan terselenggaranya sidang-sidang BPUPKI. Sidang tahap pertama ditujukan untuk mendengarkan pandangan umum mengenai rumusan Undang-undang Dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Situasi sidang tidak

[1] Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, p. 69-74.

menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan. Gagasan Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno tentang azas negara kebangsaan Republik Indonesia menunjukkan kesamaan substansi, walaupun dengan rumusan kebahasaan yang berbeda. Keistimewaan Soekarno terletak pada usulannya dalam sidang BPUPKI 1 Juli 1945 mengenai istilah *Pancasila*. Sementara sidang itu sendiri berakhir dengan belum adanya kesimpulan perumusan tentang dasar negara yang baku.[2]

Sebelum memasuki masa reses selama satu bulan, badan tersebut membentuk panitia kecil yang menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka,10 Juli 1945. Rumusan tersebut diterima dengan suara bulat yang disahkan sehari kemudian dan dikenal dengan istilah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). BPUPKI kemudian digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dōkuritsu Jumbi Iinkai*), disingkat PPKI, 7 Agustus 1945, dengan keanggotaan terdiri dari wakil-wakil Indonesia saja. Berbeda dari BPUPKI, PPKI merupakan lembaga yang kewenangannya di tangan rakyat Indonesia sendiri, sementara yang sebelumnya di bawah Jepang. Secara lebih eksplisit Jepang memberi hak penuh untuk mengelola PPKI sebagai jalan mempersiapkan kemerdekaan. Karenanya pengurus badan ini diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia.[3]

---

[2] Soekarno sebenarnya bukan satu-satunya tokoh yang mencetuskan Pancasila, melainkan melibatkan beberapa tokoh seperti Muh. Yamin dan Supomo. Simak A.G. Pringgodigdo, ***Sekitar Pantjasila***, (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1978), p. 4. Simak pula Nugroho Notosusanto, ***Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara***, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), p. 26.

[3] Namun Jepang mempersyaratkan kesediaan mendukung, mengerahkan tenaga besar-besaran menyelesaikan perang, karena negara Indonesia yang terbentuk akan menjadi anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, di mana cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat *Hakkō-Iciu*. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 77.

Bila melihat suasana sidang BPUPKI maupun PPKI, tampaknya visi para *founding fathers* tentang sistem pemerintahan tidak menunjukkan perbedaan, meski pada kalangan Islam terdapat keinginan membangun sebuah pemerintahan Islam ataupun penerapan *syari'ah*. Sebagaimana merebaknya semangat nasionalisme yang berkembang sebagai kesadaran umum, yang berangkat dari basis kesadaran dan pemikiran yang berbeda-beda, tampaknya demikian halnya dengan visi demokrasi. Kesadaran akan keragaman visi dan basis pemikiran dengan sendirinya menjadikan demokrasi tumbuh sebagai keharusan dalam setiap upaya membangun *sharing* antar kekuatan sosial politik. Karena itu, sekalipun dengan praktik yang belum benar-benar sempurna, demokrasi telah diapresiasi oleh organisasi dan gerakan sosial politik dalam pengelolaan mekanisme keorganisasian, dan baru secara implisit ditempatkan sebagai salah satu bagian dalam tujuan pembentukan negara Indonesia.

Meski bukan agenda mencolok, berdirinya pemerintahan republik yang berarti menganut demokrasi jelas-jelas telah menjadi impian, dan tidak dijumpai satupun gerakan, gagasan ataupun upaya yang jelas-jelas menyatakan menolaknya. Harapan akan tegaknya sistem lain, terutama kembalinya sistem monarkhi tradisional telah hilang dari gambaran tentang masa depan Indonesia, karena monarkhi-monarkhi yang ada, kecuali Mataram Yogyakarta, praktis telah menjadi subordinasi dari sistem birokrasi pemerintah kolonial dan tidak menjadi pertimbangan dalam menyusun tata pemerintahan Indonesia merdeka. Masa lalu monarkhi di nusantara yang tidak pernah mengenal Indonesia sebagai bangsa tidak memungkinkannya memperoleh *privillage* sebagai model pemerintahan ataupun posisi kekuasaan di kemudian hari.[4]

[4] Dalam sistem politik patrimonial kolonial, penguasa lokal tertinggi hanya setingkat bupati, yang berkedudukan sebagai *manisteriales* atau birokrat yang berstatus pegawai raja. Sekalipun banyak di antara mereka mewarisi jabatan secara turun temurun, namun dapat saja kehilangan hak bilamana raja menghendaki. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 162. Simak juga Sartono

Di samping itu, pergerakan kemerdekaan didominasi tokoh-tokoh yang secara institusional lepas dari struktur monarkhi tradisional yang ada. Kerajaan yang masih bertahan tidak cukup banyak turut andil dalam kurun akhir perjuangan kemerdekaan. Kalaupun ada, keterlibatan mereka lebih menampakkan peran individual dibanding institusional. Selain beban politis, kebanyakan penguasa kerajaan nusantara termasuk kelompok yang kurang dapat merasakan penderitaan akibat penjajahan terutama pada kurun akhir kolonialisme Belanda. Tradisionalitas yang terlalu kental pada kerajaan-kerajaan nusantara juga masih jauh dari sofistikasi penerapan sistem pemerintahan modern. Di samping itu, bertahannya beberapa kerajaan nusantara umumnya hanya akibat pola birokrasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka membangun model penjajahan tidak langsung. Hal ini menjadikan visi pemerintahan pasca kemerdekaan tampak sama sekali mengabaikan harapan untuk kembali pada pengokohan monarkhi tradisional.[5]

Para *founding fathers* umumnya memiliki kesamaan pandangan dalam hal kesadaran nasionalisme untuk membangun negara nasional berbentuk republik di wilayah bekas jajahan Belanda. Konsekwensinya jelas harus menerapkan sistem demokrasi. Perbedaan ideologi yang dianut menyebabkan corak pemerintahan demokrasi yang akan mereka bangun berbeda-beda. Bagi kalangan Islam, negara yang diharapkan harus tunduk pada hukum Allah. Kalangan komunis menentang kecenderungan kuam Islamis, terutama dalam masalah keagamaan. Mereka menginginkan pemerintahan yang disebutnya sebagai demokrasi rakyat yang biasa

---

Kartodirdjo, ***Modern Indonesia: Tradition and Transformation***, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1984), p. 120. Simak Juga Onghokham "Revolusi Indonesia: Mitos atau Realitas" dalam ***Prisma***, No, 8, 1985, p. 4..

[5] Seluruh kerajaan sudah dalam posisi takluk di bawah pemerintah kolonial, ditandai dengan menyerahnya kekuatan perlawanan terakhir Aceh di bawah panglima Polim, 1903; Si Singamangaraja 1907, Pospoprodjo dan Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia IV***, p. 260 dan 270.

disebut dengan diktatur proletariat, sebuah masyarakat tanpa kelas meski diperjuangkan dengan prinsip kelas.[6]

Sementara itu, kelompok yang menyebut dirinya nasionalis, yang dimotori PI yang kemudian berdiri menjadi PNI, menginginkan suatu ideologi nasional yang bebas dari pembatasan Islam maupun Komunisme. Sekalipun Hatta didukung mereka yang berorientasi sosialis, tetapi tidak tertarik pada analisis kelas sebagaimana dianut kalangan komunis. Mereka lebih menginginkan persatuan nasional dalam arti mengatasi setiap perbedaan. Kelompok ini berambisi menyadarkan dua kelompok lain dalam rangka membangun persatuan kaum nasional dengan mengarahkan mereka pada analisis ras, penjajah dan yang dijajah. Namun demikian, upayanya diikuti dengan munculnya kelompok baru, yang berbeda dari dua kelompok sebelumnya dengan lahirnya PNI.[7]

Hampir sama dengan Hatta, konflik dan perpecahan partai politik pada kurun akhir pemerintahan Belanda sempat membuat Soekarno mempersoalkan sistem demokrasi liberal ala Barat. Soekarno menangkap adanya kecenderungan konflik ideologis di antara kekuatan masyarakat bangsanya ke dalam tiga aliran; Islam, nasionalis dan komunis. Padahal Soekarno sangat mendambakan persatuan yang kuat antar seluruh kekuatan sosial politik di tanah air. Itu sebabnya Soekarno mencanangkan suatu federasi longgar antara kekuatan-kekuatan sosial politik, sebuah federasi yang mampu mengikat ketiga aliran berbeda ke dalam Nasionalis-Islam-Marxisme. Dalam hal ini, Soekarno tampak sangat konsisten dengan ide

---

[6] Perbedaan tersebut ditandai dengan perpecahan SI yang kemudian melahirkan PKI. John Ingleson, ***Jalan ke Pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934***, (Jakarta: LP3ES, 1983), p. 7.

[7] H.O.S. Tjokroaminoto "Sifat Kerajaan (Staat) dan Pemerintahan; Tafsir Program dan Asas Tandhum Partij Sarekat Islam Indonesia Tahun 1931" dalam P. Suharto dan S. Zainul Ihsan, ed., ***Aku Pemuda di Hari Esok***, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), p. 313. Simak pula Ingleson, ***Jalan ke Pengasingan...***, p. 3-4.

persatuan yang digagasnya sejak masa pergerakan hingga akhir hayatnya.[8]

Demokrasi sendiri kurang menjadi bahan perdebatan, kecuali sedikit antara Soekarno dan Hatta. Hatta memandang masyarakat Indonesia terbagi ke dalam tiga kelas, di mana kelas atas terdiri dari kapitalis kulit putih, pengusaha Cina dan Arab sebagai kelas menengah, dan kaum marhaen sebagai kelas bawah. Sekalipun lebih dekat pada paham sosialis, Hatta lebih menyukai sistem multi partai dan bukan partai tunggal sebagaimana kecenderungan penerjemah sosialis paling radikal, komunis. Melihat kecenderungan perpecahan antar aliran politk, Soekarno melihat komunikasi politik sulit dibangun secara konstruktif. Karena itu, Soekarno lebih mengharap persatuan kaum nasionalis ke dalam satu partai, di mana di dalamnya mereka dapat berbeda pendapat sekaligus membangun mufakat.[9]

Sementara itu, perbedaan di antara kebanyakan kaum pergerakan lebih tampak terbatas pada perspektif ideologis yang dianut, sedangkan demokrasinya sendiri kurang dipersoalkan. *Platform* demokrasi belum menjadi bahasan yang memadai untuk dipersoalkan, meski sejak suksesnya revolusi Bohlsevik dan revolusi rakyat Cina, wacana sosial politik telah mengantarkan pada setidaknya dua pilihan model demokrasi, liberal dan komunis, yang masing-masing memiliki pijakan paradigma maupun konsekwensi yang berbeda. Di tengah pengentalan ideologi sosial politik, paradigma dan konsekwensi-konsekwensi penerapan demokrasi relatif belum menjadi pertimbangan, di samping praktik demokrasi

---

[8] Sekalipun lebih mirip Marxis-Leninis, namun konteks pemahaman Soekarno sebenarnya dalam rangka perlawanan antara "sini" (persatuan nasionalis) dan "sana" (kapitalis-imperialis). Dengan kata lain Soekarno dapat menjadi komunis tanpa harus menjadi atheis. Rosihan Anwar "Perbedaan analisa Politik antara Soekarno dan Hatta" dalam William H. Frederick dan Soekri Soeroto, eds., ***Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi***, (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 443.

[9] Soekarno, ***Di bawah Bendera Revolusi***, p. 1. Ingleson, ***Jalan ke Pengasingan....***, p. 51.

belum pernah dilakukan sebelumnya. Keanekaragaman visi pemerintahan demokrasi di kalangan *founding fathers* untuk sementara waktu tereliminasi oleh kepentingan yang lebih besar, mewujudkan kemerdekaan.[10]

Dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI tidak tampak pernah dipersoalkan masalah model demokrasi yang akan diterapkan di Indonesia. Namun demikian, sekalipun dalam gambaran yang belum jelas benar, demokrasi telah menjadi prinsip dasar yang akan dipakai sebagai sistem pemerintahan. Dasar negara yang dituangkan dalam Piagam Jakarta maupun Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan gambaran tersebut, meski masih merupakan konsep umum yang memungkinkan penafsiran ke dalam beragam pemahaman.[11]

Para *Founding Fathers* hanya sama-sama menginginkan negara berbentuk republik dengan detail konsep yang belum benar-benar matang konseptualisasi maupun kontekstualisasinya dengan kondisi sosial politik yang mungkin akan dihadapi. Hanya Soekarno yang pernah mempersoalkan model demokrasi Barat maupun komunis, yang dinilai memiliki banyak kekurangan dan tidak sejalan dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Sekalipun belum jelas benar bentuknya, Soekarno menginginkan model demokrasi lain yang sesuai dengan situasi dan kepribadian bangsa Indonesia, sebuah demokrasi

[10] Setelah perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Indonesia bukan berarti semua menjadi final. Indonesia harus memfokuskan perhatian untuk menegakkan kemerdekaan, dan aturan apapun menjadi rentan diubah, sebagaimana perjalanan sejarah Indonesia pasca proklamasi. Realitas politik yang multi partai dan menonjolnya peran kaum nasionalis dan Islam dalam perumusan dasar negara dalam BPUPKI tidak memungkinkan model komunis menjadi pilihan dalam konstitusi. Dapat disimak pandangan-pandangan tokoh perumus dasar negara dalam Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 67-74.

[11] Dasar kerakyatan dan mufakat menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. C.S.T. Kansil, ***Pantjasila dan Undang-undang Dasar Falsafah Negara***, (Djakarta: Pradnja Paramita, 1971), p. 44.

ekonomi dan bukan demokrasi politik, bukan demokrasi yang didasarkan atas individualisme melainkan kegotong-royongan.[12]

Konsepsi-konsepsi Soekarno tentang demokrasi tidak tampak direspon secara signifikan dari kaum revolusioner atas. Sangat boleh jadi ini dikarenakan persoalan paling krusial negara terletak pada bagaimana merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan belum menyentuh masalah bentuk pemerintahan. Mungkin pula para tokoh kemerdekaan memang belum mempunyai visi yang jelas mengenai format ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang diidealkan pasca kolonial, atau pandangan-pandangan Soekarno hanya dipahami sebagai pengobar semangat anti kolonialisme dan imperialisme. Hatta sendiri yang dari awal menampakkan perbedaan pendapat tidak banyak meladeni perdebatan gagasan dengan Soekarno.[13]

Praktik pemerintahan pasca kemerdekaan menampakkan pandangan Hatta yang lebih menonjol dibanding Soekarno dengan diterapkannya sistem parlementer yang multi partai. Hal ini juga dimungkinkan karena demokrasi masih dipahami sebagai sebuah konsep umum. Masih belum cukup disadari kerumitan-kerumitan yang harus dihadapi dalam implementasi praktisnya yang sebenarnya memerlukan penataan berbagai aspek secara lebih teknis serta penyesuaian dengan sebuah paradigma filosofis maupun situasi ideologis yang tengah dihadapi. Munculnya kelompok-kelompok kekuatan sosial politik sejak masa pergerakan menjadikan sistem pemerintahan berlangsung sebagai pilihan sejarah yang harus dihadapi tanpa sempat dikonsepsikan lebih dulu, termasuk

[12] Simak konsepsi Soekarno dalam perumusan dasar negara seperti dikutip Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 125-6.

[13] Tampaknya Hatta sangat memahami kepribadian Soekarno yang terlalu obsesif dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang selekas-lekasnya dalam sebuah masyarakat yang *bersate*, dan bukan bersatu . Simak deskripsi Hatta tentang Soekarno dalam Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 19.

mempertimbangkan konsekwensi-konsekwensi yang mungkin harus dihadapi.[14]

Dengan demikian, konsentrasi para pelaku politik masih terpaku pada pergulatan ideologis dibanding semata masalah demokrasi. Pengelompokan sosial yang terjadi pada masa sebelumnya menjadikan demokrasi dengan corak liberal menjadi pilihan yang paling mungkin. Demokrasi liberal menjadi satu-satunya solusi yang paling dapat diterima semua kelompok sosial politik. Alternatif lain masih terabaikan oleh ralitas politik yang dipenuhi pluralitas aliran ideologi sosial politik. Bahkan sebagai diskursus sosial politik, perdebatan antara demokrasi liberal dan komunis ataupun yang lainnya masih kalah kuat dibanding perdebatan antara aliran Islam tradisional dan modern, antara negara Islam dan sekuler atau antar ideologi sosial politik pada umumnya.[15]

B. Pancasila dan Demokrasi

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai umum yang dianut para pendiri dan mayoritas masyarakat republik ini. Pancasila memuat nilai-nilai yang secara keseluruhan merupakan nilai-nilai umum yang disepakati dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagian ataupun secara keseluruhan memperlihatkan adanya dimensi universalitas. Substansi Pancasila sebagian mengekspresikan nilai-nilai khas keindonesiaan yang sarat dengan religiusitas; sebagian lagi merupakan nilai-nilai kemanusiaan Indonesia yang berdimensi universal dan dianut oleh

[14] Konsepsi Soekarno tidak logis untuk situasi yang tengah berlangsung, sebab bagi Hatta, konsep Soekarno juga mengingkari heterogenitas dan hanya akan mengantarkan pada kediktatoran. ***Ibid.***, p. 18.

[15] Perdebatan tersebut terus berlanjut sejak sebelum kemerdekaan hingga dua dekade pasca kemerdekaan. Simak Perdebatan Soekarno dengan muslim tradisional. Feillard, ***NU vis a vis Negara***, p. 20-7. Perdebatan dengan tokoh modernis, Natsir, simak Deliar Noer, ***Ideologi, Politik dan Pembangunan***, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983).

bangsa manapun di dunia; dan sebagian lagi sebagai hasil apresiasi terhadap perkembangan modern.[16]

Sila pertama memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa religius yang mengagungkan masalah adikodrati, sekalipun sebagian di antaranya masih mengambil bentuk kepercayaan animisme dan dinamisme. Tidak dijumpai satupun komunitas bangsa ini yang tidak percaya pada eksistensi Tuhan baik dalam konteks agama formal maupun kepercayaan-kepercayaan tradisional. Nilai ketuhanan dapat dikategorikan sebagai nilai khas yang diapresiasi dari kebudayaan Indonesia, meski tata nilai yang sama juga masih hidup dalam tradisi bangsa-bangsa lain.[17]

Apresiasi terhadap masalah ketuhanan tampaknya menjadi pembeda dari penerapan demokrasi di negeri Barat yang menempatkan sekulerisme sebagai salah satu pilar filosofisnya. Setiap keputusan manusia diambil terlepas dari pertimbangan dogma-dogma keagamaan maupun campur tangan Tuhan ataupun pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan Tuhan. Sebaliknya, negara juga tidak mencampuri urusan-urusan keagamaan. Mereka menempatkan agama dan kepercayaan sebagai kebutuhan individu lepas dari campur tangan tangan negara.[18]

---

[16] Nurcholish Madjid "Mengenai Nilai-nilai Keindonesiaan Umum, Suatu Antisipasi Terhadap Kecenderungan Konvergensi Nasional" dalam Nurcholish Madjid, ***Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan***, cetakan kelima, (Bandung: Mizan, 1993), p. 44.

[17] Paling tidak nilai ini mengabaikan perkembangan pemikiran atau ideologi modern yang mulai mempertanyakan kebenaran-kebenaran adikodrati, sebagaimana Soekarno sendiri yang semula menempatkan ketuhanan sebagai sila yang terakhir. Simak Pospoprodjo dan Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 70.

[18] Eatwall menggambarkan sekulerisme sebagai kemenangan nalar dan penerapan pendekatan ilmiah terhadap organisasi politik, ekonomi dan pertumbuhan budaya. Karena itu, negara menetapkan batas-batas teritorial antara wilayah negara dan wilayah agama. Eatwall, ***Ideologi Politik Kontemporer***, p. 355.

Bila demokrasi mempersyaratkan sekulerisasi seperti pengalaman Barat, maka akan menghadapi persoalan tersendiri, karena perbedaan pengalaman kesejarahan antara Barat dan Indonesia dan dunia di luar Barat pada umumnya. Sekulerisme dan negara agama Eropa memang tidak dapat disepadankan dengan praktik sosial politik di Indonesia dan dunia Islam, bahkan sebelum terjadinya imperialisme dan kolonialisme Eropa. Sekulerisasi menjadi keharusan sejarah bagi Barat karena represi traumatik dari institusi agama terhadap negara dan masyarakat secara luas. Sekulerisasi dapat dilakukan secara jelas, karena persoalan awalnya bersifat institusional, yakni lepasnya institusi negara dan masyarakat dari kekuasaan institusi gereja. Sementara di dunia Islam, dan umumnya di luar Barat, agama hidup sebagai elemen kultural semata, tidak pernah berperan sebagai negara. Islam sendiri diakui Eatwall, sebagai egama yang unik karena mampu melakukan evolusi historis hingga menjadikannya sebagai agama yang paling mampu menyesuaikan diri dengan krisis modernitas.[19]

Sejak sekulerisasi, agama (Kristen) merupakan satu institusi di atas negara. Ketika negara dan institusi kemanusiaan lainnya membebaskan diri agama, peran pengelolaan agama dapat secara tegas dilakukan oleh institusi-institusi agama yang struktur maupun sistemnya masih kokoh seperti sebelumnya. Sementara di luar Eropa, dalam hal ini Islam, institusi agama yang mapan dan kuat layaknya negara tidak pernah dikenal. Keberadaan agama dalam negara lebih dikarenakan apresiasi penguasa atas suatu agama, atau lebih spesifik lagi, penerapan hukum agama sebagai hukum negara. Sementara hukum Islam sendiri dalam banyak aspek bukanlah norma yang baku melainkan senantiasa berubah.[20]

---

[19] ***Ibid.***, p. 356-7.

[20] Islam sebagai agama berkembang senantiasa diwarnai pergumulan antara normativitas wahyu dan historisitas pengalaman kesejarahan yang berubah-ubah. Simak Abudllah "Prospek Pemikiran Islam Perspektif Kultural dan Edukatif" dalam Amin Abudllah, ***Falsafah Kalam...***, p. 3

Dalam praktik, pada dasarnya Barat maupun Indonesia memberikan penghargaan yang sama terhadap keberadaan agama dan kepercayaan. Bedanya, di negeri-negeri Barat agama ditempatkan di luar konstitusi dan institusi negara. Sementara di Indonesia penghargaan terhadap agama dikukuhkan dalam konstitusi dan difasilitasi dengan institusi negara. Hal ini bukan berarti Indonesia berdiri sebagai negara agama sebagaimana Eropa masa *dark age*, melainkan bahwa nilai-nilai normatif dan moral agama harus dijunjung tinggi dalam perikehidupan sosial masyarakatnya. Bahkan negara yang menyatakan diri sebagai negara agama (Islam) sekalipun dalam praktiknya tidak pernah mengabaikan peran akal dalam pengambilan keputusan. Hanya saja standar hukum yang digunakan masih memperhatikan nilai-nilai agama, yang berarti dapat dipadankan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kultural yang bersifat lokal.[21]

Islam sebagai agama pada dasarnya hanya subordinasi negara yang tata nilainya diakui secara formal dan penganutnya dilindungi oleh undang-undang. Memasukkan sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia tidak mengubah struktur apapun dalam masyarakat Indonesia. Indonesia tidak menjadi negara agama, tetapi juga tidak dengan sendirinya mensekulerkan diri. Negara sudah dengan sendirinya sekuler, meski mungkin saja hukum agama dijadikan pilihan. Dengan demikian, sekulerisasi di Indonesia akan sama halnya dengan memisahkan sesuatu yang sudah dari awalnya tidak pernah menjadi satu ataupun saling membawahi.

Di samping itu, masyarakat maupun pemerintahan di luar Eropa tidak memiliki cukup alasan untuk memisahkan agama dan negara, karena tidak pernah mengalami penderitaan akibat represi institusi

[21] Di dunia Islam, perbedaan Negara Islam dan bukan hanya terletak pada penempatan hukum Islam dalam masalah perdata dan pidana. Sedangkan mekanisme, dan apalagi perilaku politik ataupunpengambilan keputusan lainnya tidak berbeda secara signifikan dari yang non Islam sekalipun. Simak Sjadzali, ***Islam dan Tata Negara...***, p. 221-232.

agama, sebagaimana Eropa era *Dark Age*. Mereka tidak harus keluar dari sesuatu yang tidak pernah dimasuki, kekuasaan agama. Sekalipun tanpa sekulerisasi, hubungan negara dan agama sudah berada pada relasi harmonis dan relatif tanpa momentum yang mengharuskan peninjauan kembali hubungan agama dan negara, sebagaimana urgensi awal sekulerisme di Eropa. Upaya-upaya sekulerisasi justeru merusak harmoni dan menimbulkan skisma antara mereka yang condong pada agama dan tidak.[22]

Meski terdengar klise, tapi pernyataan pemerintah Orde Baru bahwa Indonesia bukan negara agama sekaligus bukan negara sekuler bukanlah *statement* yang mengada-ada. Indonesia dengan Pancasila-nya pada dasarnya lebih dekat pada model negara sekuler dari pada agama. Sekalipun mengidealkan negara republik yang di Barat berarti menerapkan sistem demokrasi, tapi di Indonesia persoalan ketuhanan merupakan realitas yang harus disikapi secara berbeda. Sekulerisasi *ala* Barat yang dipaksakan dalam sturktur sosial masyarakat Islam justeru hanya akan mengentalkan identitas keagamaan, sebab Islam dan agama-agama lain yang berkembang di luar Eropa seolah harus ikut serta menanggung "dosa" sejarah agama Nasrani.[23]

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung nilai universal yang ada pada setiap bangsa. Bangsa Indonesia dibangun sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Sila ini sekaligus mempertegas bahwa dimensi kemanusiaan merupakan pertimbangan menonjol dalam perikehidupan bangsa ini.

---

[22] Ide dan gerakan sekulerisme justeru menimbulkan krisis dan ketegangan politik di dunia Islam karena banyak orang harus mengkonfrontasikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Di Indonesia, ketegangan antara kaum sekuler dan agamis menampilkan wajah ideologis yang mengakibatkan benturan keras dan kecenderungan saling tidak percaya. Simak perdebatan antara Natsir dan Soekarno dalam Deliar Noer, ***Ideologi, Politik dan Pembangunan***, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983).

[23] Di samping mengajukan konsep negara sekuler tokoh-tokoh gerakan *renaissance* juga menyerang kekuasaan politik gereja atas himbuan-himbauan emosionalnya. Simak Andrain, ***Kehidupan Politik...***, p. 104-9.

Para pendiri republik tidak mengimpikan tatanan yang diskriminatif ataupun berpretensi memberikan *privillage*, meski sejak dirumuskannya Pancasila dan UUD 1945, umat Islam merupakan penduduk mayoritas Indonesia. Nilai ini kiranya sepadan dengan egalitarianisme yang mendasari tegaknya demokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai keadilan dengan sendirinya menjadi jaminan kesamaan dan keadilan bagi semua yang didasarkan atas tata nilai moral dan etika manusia beradab. Dengan sila ini setiap warga negara juga diberikan jaminan akan kesetaraan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. [24]

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menunjukkan orientasi integritas kebangsaan yang tidak memprioritaskan masa depan negeri ini bagi sekelompok orang atau golongan. Sila ini mengekspresikan satu bentuk kesadaran nasionalisme sebagai sebuah negara nasional, bangsa Indonesia, dengan pluralitas suku, bangsa, ras maupun agama yang mendiami teritorial dari dari Sabang sampai Merauke. Dapat dikatakan bahwa sila ini merupakan ekspresi geografis dan demografis baru sebagai satu bangsa yang tercakup dalam teritorial yang luas dan realitas penduduk yang plural.[25]

Prinsip demokrasi dalam sila keempat "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" juga merupakan ekspresi khas masyarakat Indonesia dipadukan dengan nilai-nilai modern. Pada dasarnya masyarakat negeri ini, khususnya di pedesaan, sudah terbiasa dengan praktik-praktik musyawarah untuk menemukan mufakat. Tata cara yang merupakan rembesan modernitas Barat terletak pada digunakannya sistem perwakilan, yang di dalamnya mengandung konsekwensi akan keharusan diterapkannya mekanisme pemilihan umum ataupun

[24] Sila ini diangkat atas pertimbangan keragaman suku bangsa, budaya, agama bahkan aliran politik di Indonesia, yang masing-masing memerlukan jaminan kesamaan hak dan kwajiban. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolutin...***, p. 123.

[25] Mohammad Hatta "Pengertian Pancasila" dalam ***Mawas Diri***, November 1986. Simak juga Kahin, ***Nationalism and Revolutin...***, p. 124.

penyelenggraraan lembaga-lembaga terkait. Sila keempat menegaskan keharusan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menghargai setiap keputusan politik yang diambil berdasarkan kehendak bersama, bukan perorangan.[26]

Sila kelima mengekspresikan tujuan penyelenggaraan negara merdeka, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan prinsip mendasar yang menjadi jalan sekaligus tujuan penerapan demokrasi. Keadilan sosial mengandung pengertian bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap orang Indonesia tanpa terkecuali. Negara berkwajiban memfasilitasi rakyatnya untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata. Digunakannya ungkapan *bagi seluruh rakyat Indonesia* juga mengandung pengertian tidak adanya pengecualian ataupun *privillage* khusus pada kelompok-kelompok tertentu dalam menikmati kekayaan maupun kesempatan yang dapat diraih di muka bumi nusantara.[27]

Dengan demikian, dari kelima sila dalam Pancasila pada dasarnya tidak ada hal-hal yang secara signifikan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan istilah demokrasi dalam Pancasila, tapi prinsip-prinsip di dalamnya menunjukkan bahwa dari awal para pendiri republik memang bepretensi kuat membangun suatu negara dan pemerintahan yang tidak memberi tempat bagi diskriminasi ataupun *privillage* yang bertentangan dengan keadilan dan demokrasi. Sekalipun tidak seluruh umat Islam menyetujuinya Pancasila bahkan sering dipandang sebagian kaum Islamis sejalan dengan nilai Islam.[28]

---

[26] ***Ibid.***, Simak pula Kansil, ***Pantjasila...***, p, 44.

[27] Ungkapan ini menegaskan tujuan dan tuntutan keinsyafan sebagai suatu bangsa, persekutuan yang tersusun jadi satu atas dasar kesamaan nasib dan tujuan. Simak Mohammad Hatta dan Tim Lima, ***Uraian Pancasila***, (Jakarta: Mutiara, 1977), p. 39.

[28] Bandingkan dengan pendapat Kyai Masykur dalam Feillard, ***NU vis a vis Agama...***, p. 35.

Nilai-nilai keindonesiaan yang disarikan para *founding fathers* menjadi dasar negara dari segi prinsip-prinsip umumnya memperlihatkan kompatabilitas, atau lebih tepatnya, tidak mengandung pertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hasrat yang terlalu besar terhadap kemerdekaan memungkinkan visi dan kepentingan-kepentingan kelompok terabaikan dalam sidang badan yang menentukan masa depan Indonesia tersebut. Perubahan dari Piagam Jakarta ke UUD 1945 juga tidak secara signifikan menunjukkan perubahan konsep demokrasi. Visi para pendiri republik masih sejalan dengan tata nilai yang dianut dan diidealkan oleh mayoritas masyarakat negeri ini. Meski telah menerima paham-paham modern Barat, tampaknya nilai-nilai keindonesiaan masih lebih dominan dalam alam pikiran mereka. Pancasila yang dirumuskan mencerminkan nilai-nilai asasi yang mewakili tata nilai nusantara pada umumnya.[29]

Itu sebabnya sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI yang berlangsung relatif tanpa perdebatan berarti dalam membahas masalah-masalah substansial. Persoalan yang muncul kemudian terletak pada sila pertama Pancasila sebagaimana termaktub dalam Piagam Jakarta, pada kalimat yang menyatakan *dan kwajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya*. A.A. Maramis, penganut Kristen yang merupakan seorang anggota tim perancangnya semula juga tidak memandang hal tersebut sebagai masalah krusial dan harus dihindari. Keberatan-keberatan yang muncul kemudian saja yang menyebabkan klausul yang secara spesifik mengarah pada kepentingan umat Islam tersebut harus dihilangkan.[30]

---

[29] Persoalan yang muncul kemudian sangat ditentukan pada tataran implementasinya, sebab nilai-nilai yang demokratis tidak menjamin terwujudnya perilaku demokratis. Kemauan mewujudkan situasi yang demokratis lebih menentukan dibanding norma-norma tertulis. Hatta dan Tim Lima, ***Uraian Pancasila***, p. 56.

[30] Kansil, ***Pantjasila...***, p. 92.

Perubahan itupun ersebut tidak secara signifikan merubah substansi nilai Pancasila selain pada makna politisnya bagi umat Islam. Sedangkan dari sisi demokrasi justeru menjadi penegasan tidak adanya hak istimewa satu golongan untuk diakomodir secara istimewa dalam konstitusi. Lebih dari itu, rancangan dasar negara tersebut memperlihatkan bahwa para *founding fathers* mampu menunjukkan obyektifitas dalam menetapkan nilai-nilai ideal bagi masa depan Indonesia, meski nilai-nilai yang masih sangat umum tersebut rupanya masih terbuka pada berbagai penafsiran. Visi, konsistensi dan atmosfir sosial politik yang melingkupi akan menentukan sejauh mana para pengelola negara mampu mengimplementasikan demokrasi secara sehat berdasarkan Pancasila. [31]

C. Islam dan Demokrasi Hingga Menjelang Kemerdekaan

Selama masa kolonial koservatif, Islam bagi masyarakat Indonesia masih diterima sebagai pelengkap budaya. Islam belum berkembang menjadi sebuah kesadaran berikut keharusan-keharusan menjalankan aturan-aturan berdasarkan hukum agama. Kecuali di beberapa wilayah dan kelompok sosial terbatas, Islam nusantara masih sebagaimana kurun awal perkembangannya. Khususnya di Jawa, Islam baru menjadi sebuah identitas kultural, di mana komunitas *abangan* dan *priyayi* yang pemahaman dan komitmen keagamaannya masih formalistik sebagaimana dalam terminologi Geertz, merupakan kelompok mayoritas dan lebih dominan dibanding *santri*. Selebihnya, keislaman mayoritas masyarakat muslim Indonesia masih bersifat periferal, di mana penerimaan Islam lebih tampak sebagai identitas dan bukan sebagai penganut yang taat.

[31] Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dengan mengatasnamakan Pancasila dapat muncul demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensiil, parlementer serta otokrasi demokrasi terpimpin maupun Orde Baru. Bagi Hatta dan mereka yang pernah memimpin negara ada kecenderungan mengidealkan demokrasi di Indonesia bukan dalam wajah demokrasi liberal, tapi juga bukan totaliter seperti komunis. Hatta, "Pengertian Pancasila", p. 43.

Keberadaan Islam yang lebih menonjol sebagai identitas kultural memudahkan pemeluk-pemeluk Islam mengapresiasi paham-paham lain di luar Islam, bahkan pada saatnya menjadikan sebagian dari mereka kelompok yang anti-Islam.[32]

Apalagi masuknya Islam berlangsung melalui asimilasi kultural, sebuah proses sosialisasi yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai proses yang belum selesai. Para penyiar agama Islam telah berhasil mengislamkan masyarakat nusantara, hanya saja kualitas keislamannya baru sampai pada hasil senkretisasi ajaran Islam dengan pra-Islam. Umat Islam Indonesia masih lebih akrab dengan tradisi-tradisi pra-Islam yang sebagian diislamisasikan, dibanding aturan-aturan normatif keagamaan. Pengaruh Islam pada mayoritas masyarakat Indonesia paling nampak baru terlihat pada penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan, yang menyebabkan penganut Islam nominal lebih banyak jumlahnya.[33]

Sebagaimana problem Islam di berbagai kawasan dunia Islam pada umumnya, Islam Indonesia mengambil bentuk asketik yang

[32] Kurang pekanya mayoritas masyarakat Islam terhadap isu-isu sosial politik keagamaan bukan semata karena kebaruan Islam yang yang dakwahnya baru mencapai tingkatan periferal, keagamaan formal, melainkan juga karena karakter keislaman itu sendiri yang diliputi pemahaman yang bercorak tradisional. Sebagaimana Geertz, ortodoksi kaum *santri* yang sering digaungkan sebagai basis komunitas kaum Islamis, sebenarnya juga tidak dalam pengertian puritan sebagaimana dipahami dalam wacana pembaharuan pemikiran Islam. Hal ini dikarenakan dalam beberapa hal perilaku kaum *santri* pada dasarnya mirip dengan kaum *abangan*. Hanya dalam beberapa hal tertentu menyangkut ketaatan dalam peribadatan mereka lebih merepresentasikan ajaran Islam. Simak Geertz, ***The Religion of Java***, p. 103-27. Keraguan akan keislaman masyarakat nusantara juga sudah muncul sejak sidang BPUPKI ketika kalangan Islam mengharapkan dijadikannya Indonesia sebagai negara Islam. Kahin, ***Nationalism and Revolution***..., p. 157-9.

[33] Soekarno yang lahir dari kalangan *abangan*, mengaku baru dapat menghargai Islam setelah membaca buku-buku yang memuat pemikiran Islam modern dan ilmiah. Soekarno "Surat-surat Islam dari Endeh" dalam ***Di Bawah Bendera Revolusi***, (Djakarta: Gunung Agung, 1965), p. 337.

menonjolkan spiritualitas. Komunitas Islam jarang melakukan perlawanan bersenjata selama kebijakan kolonial tidak secara langsung menyentuh sentimen keagamaan atau benar-benar menekan kehidupan sosial ekonomi mereka. Kecuali Aceh, perang Paderi, Diponegoro dan pemberontakan Tarekat di Jawa Barat, Islam jarang mengemuka sebagai motif ideologis dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah.[34]

Politik Islam cenderung mengambil bentuk perlawanan kkultural, terutama di kalangan tradisional. Ketidakmampuan menghalau para penjajah diekspresikan dengan melakukan perlawanan cultural, membatasi diri dari berinteraksi dengan kaum kolonial. Mereka menjaga jarak kultural dengan bangsa kolonial. Mereka menarik garis pembeda dengan kaum kolonial dalam hal tata nilai, cara hidup maupun tata kehidupan sosial yang lebih luas. Antipati terhadap Belanda menciptakan jarak antara Islam dengan pemikiran maupun budaya Barat.[35]

Berbeda dari budaya Asia lainnya, seperti India, Arab dan Cina, budaya Barat relatif tidak berasimilasi dengan budaya lokal. Situasi ini semakin mempertegas sekat pembeda antara penjajah dengan bangsa terjajah. Interaksi kultural tidak cukup terjalin, khususnya antara umat Islam dengan bangsa Barat. Itu pula sebabnya tradisi dan pemikiran Barat tidak diapresiasi umat Islam nusantara. Perubahan permikiran Islam di Indonesia bukan muncul akibat apresiasi pemikiran Barat secara langsung, sehingga praktis tidak pernah muncul tokoh pembaharu seperti di Mesir, India atau Pakistan.

[34] Pemberontakan-pemberontakan terjadi di berbagai tempat, di antaranya *Imam Mahdi* dalam pemberontakan petani di Ciomas 1886 memperlihatkan ekspresi ketertekanan berlebihan akibat kebijakan-kebijakan kolonial yang kemudian diberikan legitimasi keagamaan. Simak bagaimana jalannya peristiwa tersebut dalam Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia IV***, p. 288-291.

[35] Perlawanan kultural disajikan dalam bentuk menolak menggunakan atribut yang biasa dipakai kaum penjajah, seperti dasi, pantalon, topi dan sepatu. Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 16.

Perkembangan kultur dan pemikiran keislaman secara menonjol baru tampak seiring masuknya ide-ide pembaharuan Islam dari kawasan lain.[36]

Seiring merebaknya gerakan kemerdekaan berbasis ideologi sekuler, di Indonesia juga muncul gerakan revolusioner yang mengedepankan Islam sebagai basis ideologi dan gerakan. Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berkembang menjadi Serikat Islam (SI) merupakan gerakan berbasis Islam periode awal yang mencurahkan perhatian pada pemberdayaan sosial. SDI mengapresiasi modernitas dalam pengorganisasian kekuatan sosial ekonomi umat Islam dalam rangka menaikkan kemampuan daya saing di hadapan pesaing utama kaum pribumi, etnis Cina dan pemerintah. [37]

SI yang semula merupakan gerakan sosial ekonomi berkembang menjadi gerakan politik yang tidak jarang memperhadapkannya dengan *rival-rival* politiknya, terutama komunis. SI bahkan sempat membangun basis sosial terluas dibanding gerakan-gerakan revolusioner yang lain. Lemahnya managemen organisasi ini menyebabkannya dengan mudah diinfiltrasi kaum komunis yang berujung pada munculnya dua kubu; SI merah (komunis) dan SI putih. Sedemikian mudahnya organisasi ini dimasuki orang-orang yang jelas-jelas berafiliasi dengan ideologi yang bertolak belakang, komunis, menunjukkan bahwa pada kurun tersebut, apresiasi

---

[36] Hingga masa kemerdekaan, ide-ide pembaharuan kebanyakan dipengaruhi ide pembaharuan dari Hijaz, Mesir, India, Turki ataupun Pakistan. Pembaharuan Islam di Indonesia kurang memiliki gaung di kancah internasional. Ihsan Ali-Fauzi "Pemikiran Islam Indonesia Dekade 1980-an" dalam ***Prisma***, No. 3, 1991, p. 33.

[37] Sebenarnya sebelum SI sudah muncul beberapa gerakan yang sifatnya keagamaan, seperti jami'at Khair (1905), al-Munir dan Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah dan Persyarikatan Ulama (1912) dan sebagainya, namun gerakan sosial politik yang berskala luas batu dimotori SI. Deliar Noer "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?" dalam ***Prisma***, No. 5, 1988, p. 4.

terhadap ideologi sosial politik Barat masih berada dalam kegamangan.[38]

Semula ideologisasi Islam pada masa pergerakan menunjukkan tidak adanya indikasi ke arah eksklusifitas ajaran, khususnya dalam kaitannya dengan penciptaan negara agama. Sebagaimana isu fundamental dalam ide-ide pembaharuan Islam, konsentrasi kaum islamis masih terbatas pada masalah pembaharuan internal keagamaan yang sering kali dianggap sebagai persoalan mendasar yang menjadi penyebab keterbelakangan umatnya. Kecenderungan Islam mengalami pergeseran terutama setelah terjadinya fragmentasi kalangan Islamis dengan sekuler semakin keras, terlebih setelah kehadiran PKI yang nyata-nyata memperlihatkan sebagai ancaman di tengah keterbelakangan dan rendahnya kesadaran keagamaan umat Islam yang menjadi bidang garap kalangan Islam.[39]

Paradigma Islam Indonesia yang semula relatif seragam terpecah setelah sebagian tokohnya mengapresiasi pembaharuan Islam di kawasan Timur Tengah, yang di antaranya ditandai dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah. Skisma dalam Islam mulai tumbuh ketika kalangan Islam tradisional, Nahdlatul Ulama (NU), tergerak untuk mereaksi gerakan pembaharuan kaum modernis, Muhammadiyah. Pembaharuan Muhammadiyah dipandang sebagai ancaman kelestarian tradisi keagamaan yang sudah ada. Karena itu, tokoh-tokoh keagamaan tradisional berupaya memberikan perlindungan ideologis dan organisatoris terhadap kelestarian tradisi dengan mendirikan organisasi pula, NU.

---

[38] Keadaan ini dalam perkembangannya mengurangi jumlah keanggotaan SI di kemudian hari. ***Ibid.***, p. 6-7. Simak juga M. Rusli Karim, ***Perjalanan Partai-partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut***, (Jakarta: Rajawali, 1983), p. 20.

[39] Di kalangan pendukung negara Islam, pemerintahan Hindu-Budha dan kerajaan Islam pra-kolonial sering diklaim sebagai negara agama di Indonesia. Simak klaim Deliar Noer, ***The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1945***, (London et.al.: Oxford University Press, 1973), p. 19.

Sejak saat itu, Islam memasuki fase perdebatan antara yang berusaha mempertahankan tradisi dan yang memodernisasi Islam. Perbedaan dalam beberapa masalah keagamaan melahirkan friksi keagamaan yang semakin menajam di antara para pengikutnya hingga jauh setelah masa kemerdekaan. Meski demikian, tetap saja wacana demokrasi tidak termasuk dalam perdebatan tersebut. Respon terhadap modernitas sendiri lebih menonjol dalam masalah sosial ekonomi dan pendidikan, dan belum menyentuh diskursus politik.[40]

Afiliasi terhadap ideologi tertentu masih merupakan proses pencarian identitas dengan cara mengidentifikasikan diri pada suatu paham sosial politik. Sebuah ideologi diterima atau ditolak bukan semata-mata karena daya tarik dan kesesuaian substansi ideologi itu sendiri dengan latar belakang dan kepentingan pengikut, tapi lebih ditentukan oleh kemampuan pembawa ideologi mempengaruhi orang lain. Serikat Dagang Islam (SDI) pada awalnya kurang terlibat pada isu-isu politik praktis, meski keberadaannya memiliki nilai politis. SDI baru memasuki perkembangan membangkitkan umat untuk melakukan perbaikan aspek sosial, ekonomi dan pendidikan, terutama dengan membangun kesadaran akan perlunya apresiasi terhadap modernitas di kalangan umat Islam. Keterpurukan bangsa ini di bawah rejim kolonial maupun hegemoni perekonomian oleh pendatang dari Asia Timur, Cina, berarti keterpurukan umat Islam. Ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. [41]

Secara berangsur Islam mengapresiasi modernitas Barat secara konseptual, ideologis maupun sistem pengelolaan kegiatan pengembangan infrastruktur sosial, ekonomi dan pendidikan. Seiring merebaknya gerakan ideologi politik yang berangat dari *mainstream*

---

[40] Pembaharuan Islam sejak Syeh Ahmad Chatib Minangkabau sampai Haji Rasul sebenarnya lebih memperlihatkan konsentrasinya pada persoalan purifikasi keagamaan, dan sedikit pada isu negara Islam. Simak ***Ibid.***, p. 31-81.

[41] SDI berkembang dari pengusaha Batik Surakarta yang merasa dipenetrasi dan dikontrol pengusaha Cina dalam perdagangan, tapi lambat laun gerakan tersebut berkembang menjadi gerakan politik. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 28.

pemikiran Barat, Islam juga berdiri sebagai ideologi alternatif, tetapi bukan dalam posisi menjembatani. Ketika dipaksa situasi harus merespon ideologi-ideologi lain, Islam yang semula lebih *cocern* pada persoalan sosial dan keagamaan memasuki dialektika ideologi dan politik. Dengan demikian, konteks ideologisasi Islam di Indonesia muncul bukan karena pengaruh pendidikan Barat sebagaimana pendapat Gibb, melainkan sebagai respon terhadapnya. [42]

Persaingan yang sifatnya ideologis sebenarnya tidak hanya terjadi antara ideologi keagamaan dan sekuler, tapi juga antar umat Islam sendiri. Ini dikarenakan pada kurun tersebut setiap ide pembaharuan cenderung mengambil bentuk ideologi dengan sentimen-sentimen yang menyertai. Modernitas yang diimpor, terutama dari kalangan pembaharu (*mujaddid*) keagamaan Mesir dan Saudi Arabia juga menciptakan sentimen ideologis tersendiri di kalangan umat Islam, khususnya antara kaum modernis dan tradisionalis. Sekalipun tidak berkembang sebagaimana pengalaman reformasi keagamaan kaum Paderi, namun skisma Islam tampak tetap tak terhindarkan lagi. Sedangkan pembaharuan model politisi dan militer dari Mesir maupun Turki, menyatukan kedua kubu bersatu.[43]

Terideologikannya pandangan-pandangan tentang idealitas Islam menurut organisasi tertentu melahirkan sekat ideologis tersendiri di kalangan umat Islam. Skisma paling menonjol tampak pada perbedaan antara kaum modernis yang diwakili Muhammadiyah dengan kaum tradisionalis yang diwakili Nahdlatul Ulama (NU).

[42] Menurut Gibb, pendidikan Barat menambah kebencian sebagian umat Islam terhadap penyembahan barang-barang magis dan aliran kebatinan ataupun fufisme. H.A.R. Gibb, ***Aliran-aliran Modern dalam Islam***, (Jakarta: Tintamas, 1954), p. 46.

[43] Hal ini tampak pada respon kalangan Islam terhadap Soekarno yang melahirkan perdebatan baik dari kalangan tradisional maupun modernis, di antaranya ditandai dengan perdebatan antara Natsir merepresentasikan Islam, dengan Soekarno yang merepresentasikan sekuler Barat sebagaimana Musthafa Badri Yatim, ***Soekarno, Islam dan Nasionalisme***, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 156-7.

Trend perkembangan pemikiran sosial politik dan keagamaan memang mengarah pada ideologisasi, di mana kemunculan suatu paham cenderung menempatkan dirinya sebagai yang terbaik dan sebaliknya bagi yang lain. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah ditempatkan sebagai ancaman bagi muslim tradisional yang karenanya berdirinya NU sering dipahami sebagai benteng tradisi.[44]

Pembaharuan Islam di Indonesia sendiri tampak bukan berkembang sebagai akibat apresiasi pikiran Barat sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh pembaharu Mesir dan Turki. Gerakan pembaharuan di Indonesia lebih menampakkan pengaruh dan imitasi dari kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, khususnya Mesir dan Hijaz. Karena itu tema perhatian dalam pembaharuan Islam lebih *concern* bagaimana memperbaiki pola pikir dan pilihan hidup umat dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Fokus pembaharuan Islam tertuju pada upaya purifikasi Islam, menghilangkan tradisi *khurafat*, memodernisasi pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Perbedaan apresiasi tersebut melahirkan perbedaan-perbedaan format keislaman yang dibangun. Sebagian cenderung memandang masa lalu sebagai masa depan ideal bagi Islam, sementara mereka yang kurang *concern* terhadap Islam memilih mengidealkan Barat.[45]

Apresiasi Islam secara langsung atas kemajuan Barat yang melahirkan pembaharuan Islam lebih banyak muncul di Timur Tengah, India dan Turki, sementara di Indonesia hanya sebagai

---

[44] Sekalipun demikian, NU tidak semata berdiri sebagai reaksi atas gerakan pembaharuan kaum modernis, melainkan juga didorong oleh motif lain, seperti dalam rangka persiapan *Komite Hijaz*. Robert W. Hefner "Pengantar" dalam Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. xvi.

[45] Pada tahun 1920-an perdebartan antara kaum modernis dan tradisionalis semakin seru, baik dengan antara tradisionalis dengan al-Irsyad ataupun Muhammadiyyah. Kaum tradisionalis sebenarnya tidak mengingkari persetujuannya dalam hal modernisasi pendidikan, tetapi tidak dalam paham keagamaan. ***Ibid.***, p. 9.

pemakai. Para pemikir Islam di kawasan tersebut berupaya mengakomodir berbagai pemikiran dan kemajuan yang diperoleh Barat dalam rangka membangkitkan kembali kejayaan Islam. Di kawasan tersebut lahir tokoh-tokoh pembaharu yang orientasi ideologi dan politiknya sangat kental dari awal, sebagai hasil dialog antara pandangan-pandangan keislaman mereka dengan pandangan Barat, di samping realitas kebangsaan mereka sendiri. Sebagai misal di Mesir muncul tokoh-tokoh pemikir maupun gerakan seperti Abduh dan Afghani; di Turki Muncul Musthafa Kemal dan Zia Gokalb; dan di India muncul beberapa tokoh seperti al-Maududi dan Iqbal.[46]

Demokrasi dan sistem sosial politik belum menjadi perhatian dalam diskursus pemikiran dan gerakan kalangan Islam maupun kaum pergerakan sekuler. Diskursus yang berkembang bukan mengarah pada masalah sistem sosial politik melainkan pada ideologi, bukan masalah cara tetapi pada tujuan. Hingga berakhirnya perang dunia II, situasi sosial politik disibukkan oleh pergulatan ideologi dan praktis kurang mempersoalkan demokrasi, meski sebenarnya ideologi tertentu akan menentukan corak demokrasinya. Fokus utama perjuangan kalangan Islam lebih terkonsentrasi pada upaya menemukan cara memperbaiki kehidupan keagamaan dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana harapan kaum pergerakan, kemerdekaan merupakan cita-cita yang tidak dapat ditawar, tapi ada agenda ganda yang diusung kalangan Islam, yaitu berupa pembenahan keberagamaan dan mewujudkan kemerdekaan yang kadang hanya ditempatkan sebagai agenda implisit.[47]

---

[46] Abduh misalnya berupaya menggantikan paham-paham *jumud* yang menghinggapi umat Islam dengan paham dinamika, dalam bentuk kesediaan mempelajari ilmu pengetahuan modern. Simak Nasution, ***Pembaharuan dalam Islam...***, p. 66-7.

[47] Perlawanan terhadap penjajahan bagi sebagian kalangan Islam hanya dinyatakan sebagai tujuan yang dinyatkan secara implisit, sebagaimana terjadi pada komunitas NU. Choirul Anam, ***Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama***, (Surabaya: Jatayu, 1985), p. 32-3.

Sekalipun demokrasi kurang mendapatkan perhatian khusus dalam diskursus sosial, politik maupun keagamaan, tidak satupun gerakan Islam mempersoalkannya. Tidak ada kelompok yang memiliki harapan untuk menghidupkan monarkhisme atau sistem lain selain demokrasi. Demokrasi juga menjadi harapan bagi masa depan Indonesia meski tidak mendapat perhatian khusus di kalangan kaum Islamis. Diskursus Islam di Indonesia tidak memasuki wilayah demokrasi, termasuk nasionalisme, tapi jelas tidak ada wacana keislaman yang mempertanyakannya. Seluruh *rival* ideologis Islam, nasionalis dan sosialis, juga tidak memasuki diskursus tersebut. Masing-masing lebih *concern* pada upaya mengokohkan ideologinya, meski kadang harus dengan menempuh cara-cara yang tidak demokratis.[48]

Demokrasi sebagaimana nasionalisme lebih merupakan konsep praktis dari pada menuntut sofistikasi teoretik. Dengan sendirinya demokrasi menjadi bagian dari visi perjuangan kalangan pergerakan nasional untuk mewujudkan masa depan Indonesia merdeka. Situasi akhir masa kolonial Belanda yang diliputi berkembangny kelompok-kelompok pergerakan dengan sendirinya meluaskan paham demokrasi dan nasionalisme tanpa harus melalui satu konseptualisasi secara khusus. Barangkali ini pula yang dalam jangka panjang menjadikan demokrasi dan nasionalisme berlangsung relatif kurang konstruktif.[49]

---

[48] Setiap organisasi setidaknya memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART serta mekanisme keorganisasian yang penyusunannya tidak lepas dari proses-proses *sharing* ide dan pemikiran, sekalipun akhirnya tidak lepas dari intervensi pemerintah kolonial.

[49] Nasionalisme menunjukkan dirinya sebagai prinsip nyata dan terbangun dengan sendrinya. Simak Eatwall dan Wright, eds., ***Ideologi Politik Kontemporer***, p. 209-0.

SITUASI INTERNASIONAL DAN PERGULATAN POLITIK MASA REVOLUSI

A. Gelombang Nasionalisme dan Kemerdekaan

Memasuki abad ke-20, isu-isu sosial politik Barat mulai merembes ke berbagai belahan dunia, termasuk daerah-daerah jajahan. Bangsa-bangsa jajahan yang semula menerima dan mengikuti alur penjajahan dan hampir-hampir tidak melakukan perlawanan, mulai tersadarkan akan hak-hak hidupnya yang terampas. Meski semula merupakan daerah yang seakan tak bertuan, pengalaman sebagai bangsa di daerah jajahan telah membangkitkan kesadaran dan keinginan berdiri sebagai bangsa merdeka, bangsa baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam peta sejarah. Kesamaan pengalaman tersebut yang mendasari alasan bangsa nusantara berdiri sebagai bangsa mandiri.[1]

[1] Kahin dalam pernyataan pembuka babnya, menyatakan bahwa *Dutch administration welded together people of various tongues and cultures into one political unit and in so doing tended to develop in them a "consciousness of kind"*. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 37.

Hal ini juga tidak terlepas dari situasi kesejarahan selama kurun akhir masa kolonial Belanda yang diramaikan oleh kecaman atas pola eksploitatif dan desakan perubahan politik kolonial konservatif ke arah politik etis. Sekalipun dampak langsung dari politik etis hanya dinikmati kalangan terbatas, namun keberadaannya secara tidak langsung mampu membangunkan kesadaran nasional sebagai bangsa, terutama dari mereka yang mengalami pendidikan Barat. Kesadaran kebangsaan yang semula hanya berkutat pada pembelaan kepentingan komunitas kesukuan dan wilayah terbatas, melebar menjadi kesadaran pembelaan atas dasar kesamaan pengalaman seluruh masyarakat bekas jajahan Belanda.

Wawasan tokoh-tokoh terdidik atas perkembangan situasi di berbagai kawasan dunia, membukakan kepercayaan diri dan menyulut keberanian untuk menuntut kemerdekaan. Di antara yang paling monumental adalah kemenangan Jepang atas Rusia dan rejim-rejim fasis di Eropa, yang menginspirasikan kepercayaan diri dan harapan untuk berdiri sebagai bangsa yang mandiri. Dengan demikian, secara langsung ataupun tidak, kemerdekaan Indonesia merupakan dampak jangka panjang dari perubahan politik yang terjadi di kancah internasional.[2]

Situasi global menempatkan setiap serkembangan di suatu kawasan akan turut mempengaruhi alam pikiran manusia di kawasan lain. Perkembangan pemikiran umat manusia yang memuncak pada kesadaran humanis disertai kian luasnya wawasan akan peristiwa-peristiwa kesejarahan di kawasan lain turut menyemaikan embrio kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara hampir serempak, respon serupa muncul pula pada berbagai bangsa di kawasan lain. Melepaskan diri dari penguasaan bangsa lain menjadi *trend* berfikir

[2] Perkembangan media masa kala itu, yang menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai behan dunia memungkinkan kaum perjuangan terpengaruh dan membaca terbukanya peluang kemerdekaan. Wilson, “Kaum Pergerakan di Hindia Belanda 1930-an; Reaksi Terhadap Fasisme” dalam ***Prisma***, No. 10 Oktober 1994, p. 37-8.

dan perubahan sosial politik pada berbagai bangsa yang selama kurun itu masih berada di bawah penguasaan asing.[3]

Meluasnya paham kebangsaan atau nasionalisme menyuntikkan kekuatan yang mampu mengubah suatu bangsa yang semula menerima nasib, berusaha bangkit untuk mengubah keadaan. Keberhasilan komunisme di Rusia memberikan gambaran kuat, di mana rakyat telah mampu mengalahkan kekuatan penindas. Bangkitnya kesadaran tersebut pada berbagai bangsa secara hampir bersamaan menjadikan legitimasi penjajahan semakin berkurang drastis sejak awal abad kedua puluh. Kemerdekaan demi kemerdekaan dicapai oleh berbagai bangsa dengan berbagai cara dan pola sesuai pengalaman masing-masing. Tidak terkecuali pada kawasan yang sebenarnya menjadi bagian tak terpisahkan dari penjajah sendiri, di mana mayoritas penduduk lokal sudah didominasi masyarakat dari ras penjajah itu sendiri berupaya memisahkan diri dari negeri induknya di Eropa.[4]

Beberapa negara dapat dilepaskan penjajah dengan sedikit kehilangan muka, sebagian lain sebaliknya. Berbagai konsesi tetap dapat dijaga melalui kerelaan bangsa penjajah yang bersedia menyerahkan wilayah yang dikuasai pada penduduk lokal secara damai. Inggris merupakan sedikit di antara penjajah Eropa dengan daerah jajahan terluas yang memilih melepaskan banyak daerah jajahannya secara damai. Barangkali pengalaman kemerdekaan Amerika sudah cukup banyak memberikan pelajaran berharga akan mahalnya harga yang harus dibayar bila tanah jajahan dipertahankan

[3] Wujud nasionalisme sendiri lebih memperlihatkan dirinya sebagai prinsip yang nyata dan terbukti dengan sendirinya, namun ketidaktahuan manusia menjadikannya seolah sesuatu yang asing. Simak Gellner, ***Nation and Nationalism,*** p. 125.

[4] Fenomen perang dunia I dan II menjadi momentum penting bagi memuncaknya kesadaran nasionalisme di berbagai belahan dunia. Indonesia bukan satu-satunya yang diliputi semangat revolusi, melainkan juga bangsa-bangsa dari Afrika, Asia, termasuk Indochina dan Amerika Latin. Simak Onghokham "Revolusi Indonesia: Mitos atau Realitas" dalam ***Prisma***, No. 8, 1983, p. 3-4.

dengan kekuatan senjata, sekalipun pada kawasan-kawasan tertentu, semisal India, tetap saja harus lepas dengan melalui pergolakan berdarah dan mempermalukannya.[5]

Kekalahan Jerman dan Jepang yang sekaligus sebagai pertanda selesainya perang dunia kedua menjadi momentum besar hilangnya pembenaran penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain secara teritorial. Hampir seluruh daerah jajahan di seluruh dunia menemukan momentum besar untuk melepaskan diri, sebagaimana negara-negara Eropa yang menikmati kebebasan dari cengkeraman rejim-rejim fasis. Peta baru dunia tercipta akibat pemetakan wilayah selama masa kolonial menjadi batas teritorial bangsa-bangsa baru. Umat Islam sendiri memasuki fase perkembangan sebagai negara bangsa (*nation state*), di mana batas teritorial suatu negara tidak ditentukan oleh dominasi rasial, etnisitas, ataupun keagamaan, melainkan oleh teritori politik ciptaan penjajah. Tahun-tahun tersebut banyak diwarnai kemerdekaan negara-negara jajahan dan lahirnya negara-negara baru. Negara-negara yang pernah ada sebelum masa penjajahan sebagian hilang dari peta, dan sebaliknya negara-negara baru yang sebelumnya tak pernah dikenal dalam peta sejarah bermunculan.[6]

Berbeda dari negara-negara di kawasan Eropa yang pada umumnya memiliki homogenitas rasial, atau setidaknya berangkat dari ras yang homogen, negara-negara baru bekas jajahan banyak yang harus menerima kenyataan pluralitas rasial. Sangat jarang dijumpai negara yang berpenduduk homogen, terutama negara bekas jajahan. Kalimantan yang umumnya berpenduduk Melanesia terbelah menjadi

---

[5] ***Ibid.***

[6] Kolonialisme menjadi lapuk oleh melebarnya nasionalisme sebagai ideologi induk dari berbagai varian ideologi yang mengiringinya. Kemerdekaan sekaligus melahirkan tokoh-tokoh nasionalis, di antaranya Gandhi di India, Soekarno di Indonesia, Balewa di Afrika, Kubitchek di Amerika Latin dan Castro di Amerika Tengah. Simak Abdurrahman Wahid "Reideologisasi dan Retradisionalisasi dalam Politik" dalam ***Prisma***, No. 6, 1985, p. 3-4.

tiga negara berdaulat. Belum lagi keragaman etnisitas yang diakibatkan oleh kebijakan penjajah dalam mengelola wilayah jajahannya. Komposisi penduduk pribumi dan pendatang berubah drastis dari proporsi yang sebelumnya ada. Malaysia yang mestinya berpenduduk Melayu harus bersaing dengan pendatang, etnis China, dengan proporsi perbandingan hampir separoh jumlah penduduk pribumi. Di Asia Tenggara, Singapura merupakan salah satu kawasan yang secara drastis mengalami perubahan demografis, di mana etnis pendatang jauh melampaui jumlah etnis pribumi.[7]

Namun demikian, bangsa-bangsa baru tersebut bertahan dan berkembang dengan semangat nasionalisme dan heroisme yang luar biasa atas dasar kesadaran sebagai bangsa baru. Banyak tokoh baru bermunculan menyemarakkan ramainya kesadaran sebagai bangsa baru. Banyak sejarah disusun ulang untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan harga diri sebagai bangsa. Masing-masing berupaya menunjukkan eksistensi dan harga diri bangsanya dengan mengusung jargon-jargon tertentu sebagai identitas nasional. Fidel Castro merupakan sedikit di antara tokoh yang masih mampu bertahan sampai saat ini dengan mensakralkan berbagai slogan dan jargon heroik demi menunjukkan eksistensi bangsanya. Nasionalisme meluncur bagai air bah yang belum disadari potensinya, di mana selain dapat memberikan identitas nasional dan rasa harga diri sebagai bangsa, nasionalisme juga potensial melahirkan otoritarianisme di dalam negeri.[8]

---

[7] Pasca kolonialisme, hanya 10 % negara di dunia yang relatif homogen. Selebihnya adalah negara-negara yang multi etnis, terutama negara-negara bekas jajahan. Cliffort Geertz "Primordial Sentiments and Civil Politics in The New States" dalam Cliffort Geertz, ed., ***Old Societies and New States***, (New York: Free Press of Glencoe, 1963), p. 123.

[8] Kemungkinan nasionalisme sebagai gerakan memang bisa mengarah pada emasipatori rakyat yang bebas atau mengarah pada otoritarian, sehingga sering disebut ambivalensinya sebagai berkepala dua. Simak Anthony Giddens, ***A Contemporary Critique of Historical Materialism***, (London: Macmillan, 1981), p. 192.

Berbagai persoalan dan sengketa tak terhindarkan akibat beragam persepsi ataupun kepentingan yang berbeda. Berbagai konfrontasi dan perang antar negara baru merebak baik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin tidak terlalu lama setelah masing-masing mencapai kemerdekaan. Barangkali hal ini dapat dipahami sebagai bentuk *euforia* post-kolonial, di mana kebanggaan berlebih pada bangsa-bangsa baru menciptakan egoisme yang mengarah pada upaya menunjukkan keunggulan masing-masing, yang sebagian meningkat pada kompetisi kekuatan bersenjata.[9]

Di pihak lain, Barat sendiri sedang berupaya melakukan konsolidasi untuk menata berbagai hal, khususnya untuk menangani berbagai dampak perang. Bagi Barat, perang dunia benar-benar menjadi peristiwa paling menyedihkan yang pernah tercatat sejak perang Salib. Kecuali keterlibatan Jepang, perang dunia sebenarnya merupakan perang antar bangsa Eropa sendiri, dengan kerugian moril dan materiil tak terkirakan nilainya. Hal ini belum termasuk lepasnya wilayah-wilayah jajahan yang merupakan aset tak ternilai yang sebelumnya dapat dieksploitasi dengan leluasa. Perang ini menjadi mendunia karena zona pertempuran berikut dampak yang ditimbulkan sedemikiran luas, dan masih ditambah lagi dengan satu kenyataan bahwa hampir keseluruhan negara peserta perang merupakan penjajah wilayah lain.[10]

[9] Abdurrahman Wahid menyebut fenomena ini sebagai upaya membangun keagungan yang disertai simbulisasi semangat nasionalisme. Secara bijak Ghandi membangun Satya Graha dan Swadesi, tapi pada negara lain diekspresikan dengan menyerang negara lain. Abdurrahman Wahid "Reideologisasi dan Retradisionalisasi", p. 4

[10] Pasca perang Belanda sendiri sedang berada pada kondisi krisis yang parah hingga harus mengajukan pinjaman *Marshall Plan* ke Amerika Serikat. Karena itu, pada dasarnya Belanda tidak siap untuk kembali menjajah Indonesia. Simak Ihsan Adiwiguna "Faktor-ffaktor Pemerhasil Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1985, p. 155.

Kerusakan akibat perang dunia menjadikan banyak pihak mulai menyadari semakin besar dan destruktifnya dampak perang dari masa ke masa, akibat perkembangan teknologi perang yang memiliki daya rusak semakin besar. Ketakutan akan terjadinya perang besar dan lebih merusak benar-benar menghantui masyarakat internasional. Karena itu, gerakan-gerakan anti perang bermunculan baik menyikapi masa lalu maupun terhadap peperangan yang masih tersisa. [11]

Kelebihan dalam pengalaman dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menjadikan Barat baik yang menang maupun kalah perang dapat segera bangkit kembali dalam menata perekonomian dalam negeri, politik, ekonomi maupun dalam hubungannya dengan bangsa lain. Karena itu, tidak lama berselang dari berakhirnya perang dunia kedua, negeri-negeri Barat peserta perang sudah berhasil bangkit bahkan terlibat kembali dalam perang berikutnya, perang dingin. Di pihak lain, berbagai kurangnya pengalaman sebagai bangsa merdeka, keterbelakangan, krisis dan kerumitan masalah dalam negeri negara-negara baru menyita perhatian pemerintah dalam negeri yang akhirnya memposisikan mereka rata-rata tetap tertinggal jauh dari negara-negara bekas penjajah.[12]

Pahitnya pengalaman pengalaman masa perang dan perubahan konstelasi politik internasional disikapi banyak negara, khususnya pemenang perang dan kuat persenjataannya dengan mempelopori berdirinya badan dunia yang memungkinkan perdamaian lebih terjamin. Upaya tersebut dimulai dengan mengokohkan pengakuan

---

[11] Dalam deskripsi sederhana Carr mengungkapkan: Gunpower was followed by dynamite, nitroglycerin, and TNT. Each new explosive was able to couse more damage than older one. The most terrible destructive force yet made was first used by the United States Army in August, 1945, in the war against Japan ... If more wars occur, still more fierce and deadly weapons will certainly be made and used. William G. Carr, ***One World in The Making; The United Nations***, Second Edition, (Boston, et.al.,: Ginn and Company, t.t.), p. 3-4.

[12] Negeri-negeri bekas jajahan rata-rata jatuh dalam konflik politik dalam negeri yang akut, bahkan perang saudara. Simak Abdurrahman Wahid "Reideologisasi dan Retradisionalisasi", p. 5.

akan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar jaminan. Kesadaran akan kesamaan hak-hak dasar setiap individu dijamin dengan satu deklarasi HAM (*Declaration of Human Right*) yang ditandatangani 50 negara 10 Desember 1948.[13]

Pada kurun yang sama, dunia Islam belum banyak memberi pengaruh, kecuali dalam penyebaran kesadaran untuk merdeka yang disertai dengan kian meluasnya jargon-jargon keagamaan, serta harapan menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif. Sejak abad 19, wacana politik Islam juga masih terbelah antara mendirikan negara Islam yang disertai penerapan syari'ah dan membangun pemerintahan nasional sekuler. Kagi pula ide-ide politik Islam menampakkan kecenderungan korektif dan buah keprihatinan yang mendalam atas kondisi umat Islam yang tertinggal jauh dari Barat. Dibanding masalah sistem sosial politik, sasaran paling umum dalam otokritik yang dibangun untuk membangkitkan kesadaran umat Isllam untuk maju dan bersaing dengan Barat tertuju pada kurang progresifnya pola pikir dan tradisi kemasyarakatan Islam.[14]

Rekonseptualisasi ide-ide politik Islam belum berhasil menandingi kemapanan ideologi-ideologi modern, terutama dalam menawarkan sistem pemerintahan dan tatanan sosial politik alternatif. Islam baru mampu berdiri sebagai kesadaran kelompok yang mengedepankan agama sebagai identitas, di mana penerapan hukum Islam menjadi fokus harapan dalam tatanan hukum negara. Sementara itu, ideologi-ideologi sosial politik modern secara jelas telah menfokuskan perhatiannya pada persoalan sosial politik dan

[13] Carr, ***One World in The Making***, p. 6-7.

[14] Pembaharuan di Turki misalnya, menfragmentasikan perbedaan antara pembaharu sekuler yang mengarahkan kritik pada hal-hal yang dianggap sebagai simbul keterbelakangan dalam tradisi yang terkait dengan agama. Simak N. Berkes, ***The Development of Seculerism in Turkey***, (Montreal: McGill University Press, 1964), p. 385-0.

ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan ataupun kesejahteraan sosial ekonomi dari pada sekedar masalah hukum.[15]

Kelompok politik Islam sendiri belum mampu menjadi kekuatan dominan di banyak megara pasca kemerdekaan, meski mayoritas berpenduduk muslim. Negara-negara di dunia Islam yang memilih bentuk republik pada umumnya didominasi tokoh-tokoh didikan Barat yang bervisi sekuler dan kebanyakan beraliran sosialis. Pada kurun sesudah perang dunia, Islam jarang sekali memperoleh posisi dominan pada struktur sosial politik suatu negara, dan sebaliknya, tokoh-tokoh sekuler justeru memperoleh dukungan luas sebagai pengelola negara. Kaum nasionalis sekuler cenderung lebih populer dalam kepeloporan mereka pada berbagai momentum kenegaraan. Di pihak lain, kaum Islamis cenderung kurang mampu melakukan *bergaining* dan apalagi membangun pengaruh yang berskala nasional. Mereka hanya memperoleh dukungan dari pengikut lokal atau kelompok keagamannya sendiri sebagai basis sosial politiknya.[16]

B. Rivalitas Adi-Daya

Kekalahan rejim-rejim fasis; Jerman, Jepang dan Italia, serta bebasnya negara-negara Eropa dari ancaman dan cengkeraman pasukan Nazi dalam perang dunia kedua, memunculkan dua kekuatan adi-daya (*super-power*) pasca perang, Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Keduanya menjadi penanam jasa terbesar dalam pembebasan Eropa khususnya, serta kawasan lain dari cengkeraman

[15] Tidak ada yang spsesifik dari format ketatanegaraan pada negara-negara Islam pada umumnya, yang ternyata tidak jauh berbeda dari praktiknya di negara di dunia Islam yang tidak mengklaim sebagai negara Islam, seperti Turki dan Indonesia. Simak Munawir Sjadzali, ***Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran***, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), 221-232.

[16] Mayoritas dunia Islam yang memilih sistem republik umumnya didominasi kaum sekuler, yang berupaya membatasi gerak Islam, termasuk yang modernis, hanya pada persoalan pribadi. Ibrahim Abu Bakar "Islamic Modernis: an Outline" dalam ***Hamdard Islamicus***, Vol. XVIII, No. 4 , p. 74.

fasis. Keunggulan militer dan persenjatan menempatkan keduanya sebagai *kiblat* negara-negara lain di dunia. Berbagai konflik dan pergolakan dalam negeri di berbagai negara pasca perang banyak melibatkan intervensi, pengaruh, atau paling tidak, menjadi ajang uji keunggulan senjata produksi keduanya.[17]

Keduanya mewakili pioner ideologi politik dominan yang mempengaruhi dunia masa itu, liberalisme-kapitalisme dan sosialisme-komunisme. Perang dunia kedua seolah memberikan legitimasi kemenangan kedua ideologi tersebut, menggantikan kolonialisme dan imperialisme teritorial. Perluasan pengaruh baik dalam apresiasi ideologi maupun kepemihakan (*alligned*) memicu persaingan dengan mengambil bentuk perang secara tak langsung yang dikenal dengan perang dingin (*cold-war*). Uni Sovyet sebagai kampium komunisme berambisi memperluas ideologinya ke berbagai belahan dunia, di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memandang komunisme sebagai ancaman, mengingat ideologi sosialis-Marxis merupakan basis politik yang berkecenderungan intoleran.[18]

Sejak konferensi Yalta, Februari 1945, serta wafatnya presiden Amerika Serikat, Rossevelt yang kemudian digantikan Truman, konflik kepentingan keduanya kian akut. Keberhasilan Amerika Serikat dalam uji coba senjata terbaru yang diledakkan 16 Juli 1945, meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Uni Sovyet di bawah Stalin mengkonsolidasi kontrol komunis atas beberapa negara, khususnya di kawasan Eropa Timur dan Afrika menyusul kegagalan konferensi Postdam, Juli-Agustus 1945. Sebagai penunjang kekuatan konfrontasi tersebut, Blok-Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat membangun aliansi kekuatan militer untuk beberapa kawasan seperti NATO, CENTO dan SEATO. Sedang Blok-Timur memperkokoh

---

[17] Thomas G. Peterson, ***The Origin of The Cold War***, Second Edition, (Lexington et.all.: D.C. Heath and Company, 1974), p. xii.

[18] ***Ibid.***, p. xi.

aliansi kekuatan militernya dalam Pakta Warsawa. Beberapa kali keduanya terlibat dalam unjuk kekuatan secara provokatif. Di antara yang paling memanas adalah krisis persenjataan antar benua yang melibatkan Kuba. [19]

Dalam kurun yang tidak terlalu lama, pengaruh Uni Sovyet melebar dan mampu merebut dominasi pemerintahan di beberapa negara Eropa Timur dan Tengah, seperti Hungaria, Polandia, Bulgaria dan Czekoslovakia. Hanya Yugoslavia yang relatif bertahan dan membangun paradigma sosial politik seperti halnya Indonesia, Non-Blok. Secara ofensif, komunisme terus melakukan perluasan pengaruh ke berbagai kawasan meski tidak seluruhnya berhasil segemilang pengalaman mereka di sejumlah negara tersebut, termasuk ketika kekuatan komunis berusaha mengambil alih pemerintahan Yunani. Ekspansi komunisme yang *masive* menyebabkan hampir setiap negara mengalami masalah dalam negeri. Bahkan di Eropa sendiri, persaingan tersebut berpuncak pada terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur.[20]

Di kawasan Asia Timur dan Tenggara, keberhasilan kaum komunis dalam revolusi kebudayaan Cina juga tampak terus melebar ke negara-negara terdekatnya. Laos, Kamboja, Vietnam dan Korea merupakan sasaran yang relatif berhasil dikuasai dan jatuh dalam pergolakan dalam negeri karena besarnya pengaruh gerakan komunis. Konfrontasi perang dingin memang sering kali tidak memperhadapkan kekuatan kedua adi-daya pada garis depan, namun pengaruh keduanya sangat kentara dan tidak dapat diabaikan, dengan ekses yang terus terasa dalam jangka panjang. Tragedi kemanusiaan di Laos dan Kamboja merupakan sedikit di antara dampak langsung dari

---

[19] Uni Sovyet memang terkesan sangat kuat, hingga tidak ada yang lebih penting dari pada kompetisi strategis global dengan Amerika Serikat. Seperti sebuah virus, negara besar seolah bisa membuat replika dirinya di negara lain, meski harus merusak kultur setempat. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 52.

[20] Geoffrey Barraclough, eds., ***The Times Atlas of World History***, Revised Edition, (London, Times Book Limited, 1984), p. 292.

perseteruan dua kekuatan besar di balik layar yang kebetulan dimenangkan kelompok komunis. Kasus Vietnam dan Korea dengan perang yang heroik, menjadi saksi sejarah bagaimana konfrontasi kekuatan besar kedua adi-daya ketika itu telah mengakibatkan bangsa merdeka harus jatuh bangun dalam pergolakan dalam negeri yang sangat tragis. [21]

Sekalipun keduanya berupaya melakukan ekspansi pengaruh, namun komunisme tampak relatif lebih ofensif dalam memperluas paham sosial politiknya dibanding liberalisme. Fenomena yang paling menarik adalah bahwa pada negara-negara baru bekas jajahan, dan tidak terkecuali yang berpenduduk mayoritas muslim, umumnya lebih apresiatif terhadap paham-paham sosialis dan komunis, sementara paham liberal praktis tidak terapresiasi sebagaimana keduanya. Barangkali krisis ekonomi yang melanda dunia kala itu membuka lahan potensial yang mampu menyuburkan perkembangan paham komunis yang jargonnya mengedepankan pembelaan pada kaum miskin. Karena itu, di setiap negara baru sosialisme dan komunisme senantiasa mendapatkan pengikut dalam jumlah besar.[22]

Di Indonesia, kecondongan pada keduanya menjadi dilema. Kaum nasionalis pada umumnya sangat apresiatif terhadap sosialisme yang diantaranya menjelma menjadi komunisme. Di pihak lain, kapitalisme Barat mempunyai catatan kelam dalam sejarah negara-negara bekas jajahan. Kapitalisme sering diidentifikasikan sebagai faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Sosialisme yang pada kurun tersebut menjelma dengan

---

[21] Menjelang perang Vietnam, Johnson, presiden Amerika serikat, sebagaimana diulas Iljas, secara terang-terangan menyatakan bahwa upaya-upayanya dilakukan dalam rangka membendung ancaman komunisme Vietnam Utara. Bachtiar Iljas, ***Perang Vietnam dan Netralisasi Asia Tenggara***, (Djakarta: Delegasi, 1964), p. 79.

[22] Antikapitalisme Marxisme-Leninisme merupakan ideologi yang memiliki daya tarik tinggi di kalangan kaum pergerakan. Mohammad Hatta "A Retrospective Account of Second Congress of The League against Imperialism and for Nationalism Hel in Frankfurt" dalam Mohammad Hatta, ***Potrait of a Patriot: Selected Writtings by Mohammad Hatta***, (The Hague: Mouton, 1972), p. 202.

wajah komunisme memberi harapan kebangkitan bangsa-bangsa terjajah yang umumnya tengah berada dalam kondisi ekonomi, sosial dan budaya terpuruk. Kemenangan Revolusi Bolshevik dan penampilan Uni Sovyet yang perkasa banyak dijadikan model negara masa depan bagi para tokoh negara-negara baru.[23]

Hanya saja, di negara yang mayoritas berpenduduk muslim komunisme mendapatkan tantangan hebat. Doktrin atheisme yang seringkali menjadi bagian dari kampanye komunisme menghantui umat Islam yang pada masa itu tengah mengalami perkembangan kebangkitan kesadaran untuk menegakkan kembali kejayaan ajaran agamanya. Kritik atheisme yang semula tertuju pada agama Katolik diarahkan sama pada setiap agama. Doktrin komunisme yang memandang agama sebagai racun masyarakat mempertajam sentimen bahkan antipati kelompok Islam terhadapnya, sebagaimana sebaliknya ditunjukkan oleh kalangan komunis.[24]

Ambisi besar kaum komunis untuk merebut kekuasaan dengan segala cara tidak jarang menjadi ancaman bagi beberapa kekuatan sosial politik lain di dalam negeri. Di berbagai negara, kader-kader komunis dikenal memiliki militansi luar biasa. Perang Vietnam

---

[23] Di Indonesia, komunisme melalui Marxismenya maupun revolusi Rusia tidak saja berpengaruh terhadap berdirinya PKI, melainkan juga menjadi pendorong merebaknya gerakan nasional. Bagi para tokoh-tokoh pergerakan nasional, keberhasilan kaum komunis dalam revolusi Rusia sering kali dianggap sebagai simbul kemenangan terhadap penindasan. J. Soedjati Djiwandono "Perubahan Persepsi tentang Uni Sovyet dan Implikasinya bagi Hubungan Indonesia-Soviet" dalam ***Jurnal Ilmu Politik***, No. 3, 1987, p. 58. Tokoh-tokoh revolusi kemerdekaan mengakui besarnya pengaruh revolusi Uni Sovyet terhadap gerakan revolusi kemerdekaan. Kemenangan revolusi komunis Uni Sovyet banyak memberi inspirasi tokoh-tokoh perjuangan akan dekatnya kemerdekaan Indonesia, terutama dalam kedudukannya sebagai simbul kemenangan kaum terindas dengan jargon-jargon anti imperialisnya. Hatta, ***Memoir***, p. 430.

[24] Marxisme-Leninisme telah menjadi eksperimen serius yang diapresiasi banyak bangsa untuk menghapuskan agama, melepaskan manusia dari agama. Nurcholish Madjid "Umat Islam Indonesia Memasuki Zaman Modern" dalam Nurcholish Madjid, ***Islam, Doktrin dan...***, p. xx.

menunjukkan betapa kekuatan senjata modern tidak cukup memadai untuk menghadapi militansi masyarakat di bawah penguasaan dan pengaruh komunis. Militansi tersebut ditunjukkan dalam aksi-aksi perebutan kekuasaan oleh kaum komunis. Dibanding liberalisme ataupun sosialisme, komunisme merupakan satu ideologi sosial politik yang sudah dilengkapi dengan model sistem ketatanegaraan yang pasti berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Dibanding ideologi-ideologi lain, komunisme hadir dengan jargon ataupun janji-janji ideologi yang lebih konkrit dan dekat dengan impian masyarakat kebanyakan.[25]

Negara-negara yang tidak berhasil dikuasai oleh rejim komunis bukan berarti tidak mengalami ancaman tersebut. Meski tidak sebesar Vietnam dan Korea, negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Indonesia dan Filipina tidak lepas dari derasnya pengaruh tersebut yang sedikit banyak telah menyumbangkan beban persoalan negara yang tidak dapat diabaikan. Berbagai intrik, pemberontakan hingga upaya kudeta mewarnai percaturan negara-negara tersebut, yang menempatkan status komunisme sebagai momok tersendiri.[26]

Di sisi lain, pengalaman imperialisme dan kolonialisme memberikan beban psikologis tersendiri yang menghambat afiliasi bangsa-bangsa yang baru merdeka pada blok-liberal, Barat. Ini bukan berarti masyarakat bekas jajahan anti terhadap paham liberal. Tokoh-tokoh nasional Indonesia sejak awal bahkan sangat apresiatif untuk membangun sistem demokrasi yang sebenarnya secara sistemik lebih dekat pada model liberal Barat, karena kelebihannya dalam memberikan jaminan partisipasi dan distribusi hak asasi warga negara secara berkeadilan. Hanya saja, jarak psikologis mereka

[25] Bagi kebanyakan nasionalis non-komunis, daya pikat komunisme sebenarnya hanya terletak pada anti-kapitalismenya. Selebihnya, mereka lebih memilih independen, di luar pengaruh negara-negara komunis. Simak Mohammad Hatta "A Retrospective Account...", p. 202-3.

[26] Barraclough, eds., ***The Times Atlas...***, , p. 293.

dengan Barat menjadikan sikap politik mereka lebih cenderung memilih *abstain* dari konfrontasi keduanya.[27]

Soekarno sendiri dalam banyak penyataannya tampak lebih respek pada Uni Sovyet dan Cina dibanding Barat yang liberal. Kesuksesan revolusi dan reputasi negara-negara tersebut yang tidak mempunyai predikat penjajah mendapatkan respek tersendiri, di samping kesejalanan paham sosial politik yang dianut mayoritas kaum pergerakan. Idiom-idiom yang keluar dalam berbagai retorika Soekarno hampir selalu dipenuhi hujatan pada kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme sebagai penyebab keterpurukan berbagai bangsa dan senantiasa menebar ancaman akan terulangnya sejarah penjajahan dalam bentuk neo-kolonialisme dan imperialisme.[28]

Meski demikian, pada umumnya Barat yang liberal tidak henti berupaya membendung melebarnya pengaruh komunisme internasional melalui berbagai cara. Dari sekedar perang urat syaraf, kegiatan spionase, dukungan finansial sampai perang terbuka dilakukan untuk membendung derasnya pengaruh Uni Sovyet pada berbagai kawasan. Dampak perseteruan tersebut tampaknya memang hanya menempatkan negara-negara sasaran ekspansi pengaruh menjadi korban konfrontasi asing secara terselubung. Di Asia Tenggara, perang Vietnam dan Korea merupakan sebagian di antara bukti bagaimana Amerika Serikat dengan segala daya berupaya membendung melebarnya arus tersebut dengan mengerahkan

[27] Negara-negara baru yang masih diliputi antipati terhadap kolonialisme dan imperialisme dihadapkan pada berbagai manuver adi-daya, terutama dari blok-liberal yang ditangkap sebagai gejala ke arah imperialisme baru baik melalui kerja sama ekonomi, penanaman modal, tekanan militer, blokade ekonomi dan sebagainya. Simak, Soepeno Sumardjo, ***Non-Blok sebagai Wadah Perjuangan Dunia Ketiga***, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), p. 7.

[28] Kesuksesan revolusi Uni Sovyet menjadi ancaman Eropa Barat dan peradabannya yang menjadikan tekanan imperialisme menjadi mengendor. Djiwandono “Perubahan Persepsi tentang Uni Sovyet…”, p. 59.

kekuatan militer besar-besaran, yang mungkin tidak pernah dilakukan sejak berakhirnya perang dunia kedua.[29]

Meski tidak sehebat persaingan di kawasan Indocina, intervensi Uni Sovyet dan Amerika Serikat juga merambah ke Indonesia, khususnya ketika terjadi krisis pembebasan Irian Barat. Bantuan persenjataan Uni Sovyet pada militer Indonesia secara besar-besaran berpotensi melahirkan jasa baik yang membuka kesempatan komunisme tumbuh subur di republik ini. Simpati yang banyak ditunjukkan Moskow atas Indonesia memaksa Amerika Serikat tidak dapat menahan diri untuk turut campur dalam masalah ini. Amerika Serikat tidak mau kehilangan momentum untuk membendung pengaruh Uni Sovyet, yang karenanya beralih pihak dengan memberikan dukungan besar bagi Indonesia, sekalipun untuk itu harus memaksa sekutunya, Belanda, dengan mengancam akan mencabut *Marshal Plan*-nya pada Belanda. Pada akhirnya, Belanda, negara yang secara militer lebih kuat dibanding Indonesia memilih tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan bersedia tanpa syarat meninggalkan Irian Barat.[30]

Pada kurun yang jauh lebih kemudian, ketika sisa-sisa perang dingin masih hangat, intervensi Indonesia atas Timor Timur mendapatkan restu, atau setidaknya, tidak mendapatkan tentangan berarti dari Amerika Serikat. Bagi Amerika dan sekutunya masa itu, intervensi pada masalah dalam negeri merupakan masalah yang sangat sensitif yang dapat berdampak serius, sedangkan keberhasilan membendung komunisme sudah menjadi satu target paling realistis.

---

[29] Iljas, ***Perang Vietnam...***, p. 80-5.

[30] Berbeda dari Amerika Serikat, Uni Sovyet mempunyai reputasi tinggi dalam pembelaan kepentingan Indonesia sejak masa revolusi hingga dukungan untuk menjadi anggota PBB. Simak Alastair M. Taylor, ***Indonesian Independece and The United Nations***, (Ithaca-New York: Cornell University Press for Carnegie Endowment for International Peace, 1960), p. 389. Sementara Amerika memperlihatkan sikap dingin terhadap Indonesia, Gde Agung, ***Twenty Years Indonesian...***, p. 182.

Karena itu dapat dikatakan bahwa selama masih berkecamuknya perang dingin, persoalan hak asasi manusia, intervensi pada negara lain, dan tidak terkecuali isu demokrasi, belum menjadi isu penting yang dipersoalan di tingkat internasional. Ketika situasi dunia menghadapkan setiap bangsa pada dua pilihan antara Blok-Barat dan Timur, setiap negara memiliki kesempatan untuk memilih salah satu dari keduanya, atau tidak sama sekali, tanpa resiko internasional yang berarti.[31]

Pada dasarnya sejak merdeka secara politik, negara bekas jajahan umumnya tidak pernah benar-benar lepas dari kepentingan yang lebih besar dari luar negaranya, khususnya peran komunisme internasional di satu sisi dan Amerika Serikat pada sisi yang lain. Situasi internasional, paling tidak, suasana perang dingin menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mempengaruhi iklim sosial politik dalam negeri. Ketika situasi dunia menghadapkan setiap bangsa pada dua pilihan antara Blok-Barat dan Timur, setiap negara memiliki kesempatan memilih salah satu dari keduanya, atau tidak sama sekali, tanpa resiko internasional yang berarti. Akibatnya persoalan hak asasi manusia (HAM), demokrasi dan masalah-masalah humanistik lain belum menjadi isu penting yang dipersoalan di tingkat internasional.[32]

Negara-negara baru seperti halnya Indonesia diliputi atmosfir nasionalisme yang berkobar-kobar, di mana utopia membangun negara berdaulat dan sama sekali lepas dari pengaruh dan intervensi

---

[31] Sekalipun di tingkat Dewan Keamanan PBB dan beberapa tokoh Fretilin di luar dan dalam negeri masih dipersoalkan, namun intervensi Indonesia atas Timor Timur sedemikian mulus, sampai-sampai persoalan ini seolah dianggap masalah dalam negeri. Simak Malik, ***Sepuluh Tahun...***, p. 15-6. Simak Juga Benedict R.O'G. Anderson, ***Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia***, terjemahan Didin Sholahuddin, (Yogyakarta: Qalam, 2002), p. 236-8.

[32] Kasus pemberontakan G30S disinyalir tidak lepas dari intervensi adi-daya baik secara langsung ataupun tidak langsung karena kepentingan Amerika membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Simak Ismael "Demokrasi di Indonesia", p. 205.

asing sangat kuat. Solidaritas dengan negara-negara senasib menjadi harapan kebangkitan menuju kemakmuran, di samping karena adanya kekhawatiran atas ketegangan perang dingin yang tampak menjurus pada perang nuklir. Karena itu, Indonesia tampil menjadi pelopor penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang merupakan cikal bakal berdirinya organisasi negara-negara Non-Blok. Meski tidak benar-benar mampu membangun netralitas, namun Non-Blok berperan banyak dalam mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin yang masih dalam masa perjuangan untuk merdeka.[33]

Berakhirnya kolonialisme tidak berarti mengakhiri imperialisme, dalam arti perluasan pengaruh negara tertentu atas negara lain. Paling tidak, atmosfir sosial politik internasional tidak dapat diabaikan dalam mempengaruhi dinamika sosial politik serta kemampuan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam negeri. Karena itu, instabilitas politik, termasuk kegagalan demokrasi tidak cukup hanya disandarkan pada variabe pergulatan kepentingan dalam negeri, melainkan juga atmosfir internasional yang melingkupinya, atau bahkan intervensi langsung kekuatan lebih besar dari luar.[34]

C. Kegamangan Demokrasi dan Isu-isu Kemanusiaan

Demokrasi pada prinsipnya tidak pernah ditolak oleh para tokoh pendiri (*founding fathers*) Indonesia. Demokrasi merupakan sistem sosial politik yang tidak dapat ditolak dan secara eksplisit

[33] Sumardjo, ***Non-Blok sebagai Wadah...***, , p. 9.

[34] Negara-negara baru umumnya berada dalam posisi ketergantungan pada negara-negara yang lebih kuat secara politik, militer dan ekonomi. Paling tidak secara ekonomi, pasar internasional telah menjadi tumpuan kebergantungan, dan akan jatuh dalam stagnasi total jika *lingkage* dengan pasar internasional terganggu. Farchan Bulkin "Nasib Publik dalam Sebuah Republik" dalam ***Prisma***, No. 8, 1985, p. 14.

harapan membangun negara demokrasi telah ditetapkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahkan dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan negeri ini harus berhadapan dengan ancaman agresi Belanda, demokrasi parlementer yang berkarakter liberal dijadikan pilihan, menggantikan demokrasi presidensial.[35]

Pilihan atas sistem demokrasi liberal menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mengeksperimentasikan demokrasi pada negara baru dan miskin pengalaman dalam mengelola negara serta merebaknya antipati terhadap khazanah-khazanah tradisi dalam negeri. Sekalipun rata-rata anti kapitalisme, kemajuan Barat menjadi model ideal pembangunan negara-negara baru. Selain demokrasi, mereka mengapresiasi satu aspek fundamental lain yang menjadi bagian dari tata nilai Barat, sekulerisme yang dalam implementasinya di berbagai dunia Islam dihadapkan pada konsekwensi terjadinya benturan-benturan dengan kelompok pemegang tradisi, kalangan agama.[36]

Terlepas dari berbagai hal yang melatarbelakanginya, termasuk penyelamatan Dwi-Tunggal, Soekarno-Hatta, dari ekses-ekses politik parlementariat seperti dinyatakan Hatta, para pendiri republik menempatkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga parlemen sementara, yang dijalankan dengan mengikuti pola dan mekanisme demokrasi liberal. Konsekwensi jatuh bangunnya kabinet yang berpotensi memperkeruh situasi politik dalam negeri menghadapkan pada kenyataan bahwa menerapkan demokrasi memang tidak sesederhana konsep demokrasi itu sendiri; pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Berbagai

[35] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 123-4.

[36] Pada kasus Turki, penerapan hukum positif dan tradisi sosial ekonomi modern Barat yang turut menyertai apresiasi tersebut kadang mengharuskan norma-norma keagamaan menyesuaikan dengan norma-norma baru. Simak Berkes, ***The Development of Seculerism...***, 499-0.

persoalan muncul ketika demokrasi diterapkan. Di samping mengakibatkan pemerintahan tidak stabil, lemah dan tidak mampu memperbaiki kesejahteraan, demokrasi ternyata mempertajam fragmentasi sosial dari tingkatan elit sampai bawah. Demokrasi juga menjadi lahan persemaian yang subur bagi pengentalan ideologi sosial politik dengan tingkat dukungan rakyat yang mencapai derajat fanatik, di mana aliran ideologi menjadi batas perbedaan kelompok sosial politik.[37]

Persaingan Blok Barat dan Timur menciptakan iklim global yang menawarkan dua model demokrasi yang sama-sama dominan, meski saling bertolak-belakang. Masing-masing mengklaim sebagai yang paling demokratis. Berlangsungnya perang dingin pada kurun awal kemerdekaan menghadapkan bangsa-bangsa baru pada dua pilihan besar, demokrasi komunis atau liberal. Negara-negara penganut paham liberal memandang demokrasi berbasis liberalisme sebagai pilihan terbaik. Negara komunis tidak kalah dalam mengklaim diri sebagai model paling demokratis dengan sebutan demokrasi rakyat. Persoalannya terletak pada model mana yang harus dipilih suatu negara ketika pada tataran global tersedia dua pilihan yang relatif seimbang.[38]

Kenyataan ini tidak dapat diabaikan peranannya sebagai variabel yang turut mempengaruhi iklim sosial politik negara-negara baru. Bangunan iklim sosial politik global membentuk *trend* sikap dan perilaku, baik untuk memihak salah satu dari keduanya atau memilih

---

[37] Pertumbuhan paham kebangsaan tersebar di kalangan bangsawan, intelektual didikan Barat, tokoh agama dan usahawan (pedagang) pribumi masih sederhana dalam pengertian – meminjam istilah Soekarno – "sini" dan "sana". Simak Bennedict R.O'G. Anderson, ***Imagined Community: Reflections on The Origins and Growth of Nationalism***, p. 111.

[38] Perkembangan komunisme dengan tingkat kepercayaan diri yang besar menimbulkan banyak keraguan di kalangan pengamat Barat. Barat hampir-hampir memahami demokrasi otoriter-komunis memang seolah sudah menjadi takdir Uni Sovyet, sebagaimana halnya Cina dan Vientam. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 30.

menjaga jarak. Negara yang berafiliasi pada salah salah satu dari keduanya segera menemukan model pemerintahan yang mapan, sekalipun kadang tidak lepas dari pola-pola otoriter. Sedangkan negara yang independen pada terombang-ambing pada persoalan *national-building*.[39]

Sisa-sisa nasionalisme revolusioner membuat negara-negara baru sering kali dibayang-bayangi kekhawatiran akan jatuh kembali di bawah neo-kolonialisme dan neo-imperialime, di mana kedua adi-daya dan kekuatan-kekuatan asing lainnya sering ditempatkan sebagai ancaman. Kecurigaan berlebihan terhadap ancaman kekuatan luar, di samping atmosfir sosial politik yang diliputi kobaran nasionalisme, stabilitas politik di dalam negeri yang lemah, serta praktik penerapan demokrasi yang tidak memuaskan mendorong negara-negara baru berupaya membangun sistem sosial politik alternatif.[40]

Situasi ini menyebabkan, pada kurun awal kemerdekaan, demokrasi jatuh dalam ambiguitas besar, di mana meniru model yang ada dihadapkan pada resiko yang dilematis. Sementara itu eksperimentasi penerapan demokrasi liberal pada umumnya menghadapkan mereka pada berbagai paradoks, ketidakjelasan arah politik, buah penerapan demokrasi yang jauh dari yang diharapkan

---

[39] Sejak kemerdekaan, Indonesia sebagai negara bangsa secara *de facto* sebenarnya belum dapat dikatakan lahir. Kalaupun sudah lahir, kondisinya masih sangat lemah untuk disebut sebagai negara. Birokrasi sipil belum tegak, tentara masih terpecah-belah oleh konflik dan perpecahan, yang menjadikan sosok negara masih sangat kabur bahkan tenggelam dalam kegaduhan masyarakat. Simak Bulkin "Nasib Republik..." p. 28.

[40]Dalam banyak kesempatan tokoh-tokoh nasional, seperti Soekarno, Hatta, Soeharto dan tokoh-tokoh lain mengecam demokrasi liberal, komunis maupun model-model teokrasi. Sebagaimana Soekarno yang mengecam demokrasi liberal, Hatta juga menyatakan demokrasi ideal untuk Indonesia bukan liberal tetapi juga bukan otoriter, bukan feodalisme ataupun neo-feodalisme. Simak Hatta, "Pengertian Pancasila", p. 43. Simak pula Hatta dan Panitia Lima, ***Uraian Pancasila***, p. 56-7.

sebelumnya, atau mungkin juga tidak memuaskan kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini mendorong tokoh-tokoh negara baru berusaha melakukan reksperimen demokrasinya sendiri, yang pada dasarnya merupakan buah dari ketidakpuasan, keraguan dan mungkin juga ketidaksiapan menghadapi resiko penerapan salah satu dari model yang ada, demokrasi liberal ataupun komunis.[41]

Situasi internasional dan beragam persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa baru banyak menimbulkan keraguan pada model-model demokrasi yang telah berkembang masa itu. Banyak bangsa kecewa atas gagalnya demokrasi liberal Barat, dan di sisi lain, meragukan demokrasi komunis, yang membuat mereka berusaha membangun alternatif demokrasi ketiga, semisal Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Pancasila, demokrasi berbasis agama dan sebagainya. Sekalipun model-model tersebut merupakan pengembangan dari demokrasi sebagai gagasan dasar, namun keberadaannya sering kali ditempatkan seolah lepas dari model demokrasi yang lain dengan batas-batas ideologis dan beban sentimen tersendiri.[42]

Dunia Islam semula belum banyak menawarkan konsep demokrasi yang dapat disepadankan dengan kematangan demokrasi liberal maupun komunis. Di dunia Islam umumnya baru berkembang wacana mendirikan negara Islam, dalam arti menempatkan hukum Islam sebagai hukum nasional, sedangkan sistem pemerintahan Islam dalam konteks yang lebih teknis belum cukup terkonseptualisasikan. Menyikapi kontroversi dan kebingungan tersebut, wacana demokrasi

---

[41]Simak hujatan Soekarno atas demokrasi liberal dan komunis. Soekarno, ***Di Bawah Bendera Revolusi***, (Djakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963), p. 548, dan tentang kritiknya atas demokrasi komunis walaupun konsepsinya memiliki kemiripan dengan demokrasi Cina, India, Mesir, dan Turki. ***Ibid.***, p. 75.

[42] Konseptualisasi demokrasi mengandung sentimen nasionalisme tersendiri. Pendirian demokrasi alternatif seolah hendak dibangun sebagai isme baru bagi bangsanya. Simak gambaran nasionalisme yang ditawarkan di Indonesia dalam Soekarno "Indonesianisme dan Pan-Asiatisme" dalam ***Di Bawah Bendera Revolusi***, p. 74.

Islampun mengemuka di beberapa wilayah, sekalipun belum menyebar secara *massive* ke berbagai kawasan.[43]

Di tengah keraguan akan demokrasi Liberal Barat dan komunis serta munculnya berbagai tawaran demokrasi ketiga, kalangan Islam akhirnya dipaksa sejarah untuk mengajukan tawaran konsep demokrasi alternatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan. Di beberapa negara muncul tokoh-tokoh pencetus konsep demokrasi dengan corak keagamaan, yang sedikit banyak membukakan wacana alternatif lain. Lepasnya Pakistan dari India dan membentuk negara demokrasi Islam menginspirasi banyak tokoh Islam untuk membangun hal yang sama di negaranya.[44]

Di samping menentukan kebebasan setiap negara dalam menentukan corak demokrasi atau sistem pemerintahannya, kuatnya independensi setiap negara sejak kemerdekaan menjadikan substansi diskursus Hak Asasi Manusia (*Human Right*) praktis masih terbatas dalam pengertian hak setiap bangsa untuk merdeka secara politik dari penguasaan bangsa lain. Ratifikasi deklarasi PBB tentang HAM masih menempatkan isu HAM sebagai gagasan umum yang dapat diterjemahkan menurut garis ideologi politik masing-masing negara, dan belum banyak menyentuh ranah individual. Seiring menonjolnya isu kemerdekaan, konteks diskursus HAM juga masih berkisar pada hak menentukan nasib sendiri suatu komunitas bangsa, dan belum menyentuh pembelaan terhadap hak-hak individu.[45]

---

[43] Ketidakrelaan tokoh-tokoh Islam atas penempatan syari'ah di bawah hukum positif, akhirnya mengantarkan mereka pada demokrasi khas Islam. Hukum Tuhan ditempatkan di atas hukum negara, sekalipun dalam hal ini tidak membatasi hak-hak komunitas lain. Simak Aswab Bahasoan "Gerakan Pembaharuan Islam" dalam ***Prisma***, Ekstra 1984, p. 116-7.

[44] Kasus Indonesia, Wiranatakusumah cenderung menjadikan masa nabi dan empat khalifah Islam sebagai model demokrasi ideal yang perlu direaktualisasi. Simak Wiranatakusumah, ***Demokrasi Islam***, p. 20-1.

[45] Pada kurun pasca kemerdekaan, negara-negara yang masih baru sekalipun dapat dengan mudah mengambil sikap tidak bersahabat dengan PBB bilamana

D. Memuncaknya Semangat Revolusi di Indonesia

Berbeda dari beberapa negara tetangga, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, yang diperoleh melalui proses pengalihan kekuasaan yang relatif damai dari rejim kolonial ke nasional, kemerdekaan Indonesia mutlak merupakan hasil revolusi yang melibatkan rakyat dalam sekala *massive*. Jalannya revolusi berlangsung penuh liku dengan memakan korban dan kerugian yang tidak sedikit. Di samping itu, situasi yang sulit selama revolusi bersenjata dan upaya-upaya diplomasi selalu disertai ketidakpuasan yang mengakibatkan instabilitas politik. Kemerdekaan melalui jalan revolusi tampaknya juga hampir selalu diikuti gejolak sosial politik yang berlarut-larut, diiringi perkembangan paham-paham sosial politik dan fragmentasi sosial yang diliputi pengentalan, konsolidasi, penajaman militansi dan peningkatan heroisme dengan keberanian mengorbankan jiwa dan raga.[46]

Tampaknya tempaan keras selama kurun penjajahan Jepang yang militeristik telah meninggalkan heroisme yang eksplosif. Kurun akhir penjajahan Jepang memberi dampak luar biasa besar bagi terkonsolidasikannya semangat revolusioner secara hampir merata pada segenap warga negara. Mobilisasi rakyat melalui berbagai gerakan sosial dan pelatihan yang diberikan Jepang memperluas

keputusannya tidak menguntungkan. Di sisi lain, PBB juga tidak cukup mampu melakukan intervensi. Di tengah kecenderungan global yang saling mempengaruhi, aliansi negara-negara baru bahkan secara independen mampu membangun upaya yang diarahkan pada penekanan pembangunan stabilitas regional. Simak Malik, ***Sepuluh Tahun...***, p. 36-7.

[46] Sekalipun tidak hilang, selama pendudukan Jepang seluruh organisasi sosial politik di Indonesia menyesuaikan pandangannya dengan Jepang, yang menyebabkan tokoh-tokoh nasional di satu sisi bangga dengan semangat juang yang meluas di kalangan rakyat, namun juga dihantui rasa was-was karena berbarengan dengan tumbuhnya semangat primordial. Simak Onghokham "Revolusi Indonesia...", p. 5.

kesadaran dan keberanian masyarakat bangsa ini untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi dengan kekuatan bersenjata.[47]

Sekalipun berbagai janji, pelatihan dan fasilitasi persiapan kemerdekaan yang diberikan Jepang lebih banyak bermakna strategis, sebagai jalan meraih dukungan dari masyarakat setempat dalam perang Asia Timur Raya, namun masyarakat bangsa ini benar-benar memetik manfaat sebagai modal konsolidasi gerakan revolusioner. Organisasi-organisasi bentukan Jepang secara diam-diam berubah arah menjadi gerakan anti-Jepang, melengkapi sebagian lain yang dari awal telah menunjukkan antipatinya secara terang-terangan terhadap penjajah. Pendudukan Jepang menjadikan rakyat Indonesia benar-benar bangkit kesadaran nasionalismenya dengan keberanian melakukan perlawanan fisik secara luas, yang tak pernah terjadi hampir dua abad sebelumnya. Gejolak tersebut tidak mudah padam bahkan tidak berakhir saat revolusi bersenjata usai dengan pengakuan kedaulatan. Di satu sisi, heroisme yang terbangun selama masa pendudukan Jepang menjadi modal besar dalam perjuangan bersenjata selama revolusi, hanya saja kecenderungan revolusioner yang disertai berkobarnya semangat heroik tersebut juga senantiasa terbawa dalam dialektika sosial politik hingga kurun waktu yang panjang pasca kemerdekaan.[48]

Gerakan revolusi kemerdekaan sebenarnya telah dimulai sejak memasuki abad ke-20, baik melalui cara-cara kooperatif, non-kooperatif maupun bawah tanah. Hanya saja gerakan tersebut baru bersifat politis, terbatas pada kalangan terdidik dan hampir tidak pernah mengarah pada perlawanan bersenjata. Gerakan tersebut

[47] Situasi ini diiringi semangat radikal dengan luapan emosional, di mana sikap anti-asing yang melebar pada sikap anti-Cina, anto kolaborator asing, dan menulisi berbagai properti kolonial dengan plakat-plakat yang berbunyi "Milik Republik Indonesia". ***Ibid.***

[48] Jepang memiliki andil dalam membangun etos perjuangan dengan mengedepankan kekuatan fisik. Besarnya dampak penjajahan Jepang dapat dicermati dalam deskripsi Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 132-3.

menemukan momentum yang tepat ketika Jepang mulai mengalami kekalahan demi kekalahan di berbagai front pertempuran. Lemahnya posisi Jepang menjadikan kaum nasionalis revolusioner, terutama dari kalangan muda, berharap segera dilakukannya proklamasi kemerdekaan, tanpa menunggu kebaikan hati pemerintah Jepang. Mereka memilih kemerdekaan dengan kekuatan sendiri dibanding pelimpahan kekuasaan. Tingginya semangat nasionalisme meningkatkan rasa harga diri yang tinggi dan semangat juang sangat besar yang mendorong mereka berusaha mencapai kemerdekaan dengan merebutnya, dan menghindari pemberian. Hal ini tampak pada upaya keras mereka memaksa tokoh-tokoh nasional pada hari-hari terakhir menjelang diproklamasikannya kemerdekaan RI.[49]

Tiga bulan sebelum proklamasi kemerdekaan, 16 Mei 1945, dengan disposori disponsori *Angkatan Moeda Indonesia*, para aktivis pemuda mengadakan kongres di Bandung. Organisasi yang semula dibentuk atas inisiatif Jepang ini kemudian berkembang menjadi gerakan anti-Jepang. Dengan semangat nasionalisme militan, mereka menyerukan agar para pemuda mempersiapkan diri menyongsong proklamasi kemerdekaan dengan tanpa mengharapkan pemberian Jepang. Kongres tersebut mengeluarkan dua resolusi: *Pertama*, membulatkan tekad seluruh pemuda Indonesia dari semua golongan untuk tunduk di bawah satu pimpinan; *Kedua*, mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.[50]

Sebagian pemuda masih tidak puas dengan resolusi tersebut, dan berupaya mempersiapkan gerakan yang lebih radikal. Mereka menyelenggarakan pertemuan rahasia 3 Juni 1945 yang melahirkan gerakan *Gerakan Baroe Indonesia*. Tujuan gerakan tersebut: *Pertama*, mencapai satu persatuan yang kompak di antara seluruh golongan dalam masyarakat Indonesia; *Kedua*, menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran sebagai rakyat yang

[49] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 79-0.
[50] ***Ibid.***, p. 75-6.

berdaulat; *Ketiga*, membetuk negara kesatuan Republik Indonesia; dan *keempat*, mempersatukan Indonesia dan bahu-membahu dengan Jepang, tetapi jika perlu berusaha mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. [51]

Gerakan-gerakan pemuda tersebut semula memang muncul tidak lepas dari inisiatif Jepang. Tokoh-tokoh pemuda radikal seperti Chairul Saleh, Sukarni, B.M. Diah, Asmara hadi, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Sudiro, Supeno, Adam malik, S.K. Murti, Sutomo dan Pandu Kartawiguna memang telah diikutkan dalam *Gerakan Rakjat Baroe*, yang direstui oleh *Saikō Shikikan* baru di bawah pimpinan Letnan Jenderal Y. Nagayo. Gerakan ini dibentuk berdasarkan hasil sidang *Cūō Sangi In* ke-18, untuk mengobarkan semangat cinta tanah air dan semangat perang. Karena menyadari gerakan ini lebih menempatkan dominasi Jepang yang berpretensi mengendalikan gerak kaum nasionalis radikal, banyak di antara mereka yang menolak duduk di dalamnya. [52]

Berbeda dari kalangan muda, tokoh-tokoh tua memilih langkah-langkah kooperatif dengan pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh tua menginginkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah, dan memandang bekerja sama dengan Jepang merupakan jalan terbaik. Tanggung jawab moral dan perhitungan militer saat itu tidak memungkinkan rakyat Indonesia dapat memenangkan konfrontasi bersenjata melawan Jepang, dan apalagi Belanda bersama sekutu. Bahkan ketika Jepang menghadapi kekalahan demi kekalahan di berbagai medan pertempuran, di mana secara berturut-turut sekutu merebut pertahanan Jepang di bagian Timur dan Tengah kepulauan nusantara yang semakin memperjelas kekalahan Jepang, tokoh tua tetap memilih menunggu mekanisme yang dijanjikan Jepang. [53]

---

[51] ***Ibid.***

[52] ***Ibid.***, p. 80.

[53] Gerakan-gerakan formal waktu itu memang enggan, tidak percaya pada kekuatan sendiri. Karena itu, mereka menunggu ijin, persetujuan atau "lampu hijau"

Di saat kritis tersebut, Jepang berusaha mempertahankan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Tanpa menyebutkan waktu secara definitif, Koiso mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Jepang juga mengangkat wakil-wakil departemen (*sanyo*) dari bangsa Indonesia, memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan pengibaran bendera Merah-Putih. Ketika sudah benar-benar terdesak, Jepang baru berusaha mewujudkan janji lebih konkrit kepada tokoh-tokoh nasional dengan mengumumkan dibentuknya BPUPKI, yang kemudian diubah menjadi PPKI.[54]

Ketika kekalahan Jepang sudah sangat dekat, kalangan pemuda, yang dimotori Sjahrir, seorang nasionalis garis keras, menuntut proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan, sebab dari radio yang tidak disegel pemerintah mereka memperoleh informasi bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah dalam waktu dekat, dan Indonesia akan dikembalikan pada Belanda melalui Sekutu. Mereka lebih memilih proklamasi kemerdekaan lepas dari campur tangan Jepang, termasuk PPKI yang dianggap bentukan Jepang. Mereka antipati terhadap semua yang berbau kolonial, dan memandang janji penjajah hanya tipu muslihat. Kemerdekaan melalui rapat PPKI dianggap sama halnya dengan membenarkan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian Jepang. Sementara mereka lebih mengharapkan kemerdekaan diperoleh dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari jasa bangsa asing.[55]

---

dari Jepang. Adnan Buyung Nasution "Aspirasi Kemerdekaan: Semangat Republik" dalam ***Prisma***, No. 8, 1985, p. 38.

[54] Jepang memberikan banyak fasilitas dan kemudahan, di antaranya lagu kebangsaan boleh dinyanyikan, kampanye kemerdekaan bebas dilakukan, dan di setiap departemen menempatkan wakil (*sanyo*) dari orang Indonesia, hingga pembentukan BPUPKI. Panitia Lima, ***Uraian Pancasila***, (Jakarta: Mutiara, 1977), p. 29-30. Simak juga Hatta, ***Memoir***, p. 432.

[55] Nasution "Aspirasi Kemerdekaan...", p. 38.

Golongan tua yang memilih mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah lebih mempercayakan proklamasi kemerdekaan pada lembaga PPKI. Bahkan ketika kekalahan Jepang semakin nyata dengan dibomnya *Hisroshima* dan *Nagasaki*, serta pernyataan perang Uni Sovyet atas Jepang yang diikuti serangan atas pasukan Jepang di Mancuria, golongan tua tetap berharap proklamasi dapat dikumandangkan melalui rapat PPKI. Soekarno yang masih ragu-ragu untuk memproklamirkan kemerdekaan memilih menemui *Sōmubucō* Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajagi sikapnya mengenai rencana proklamasi kemerdekaan, tetapi tidak mencapai kata sepakat.[56]

Perkembangan tersebut memuncakkan ketegangan antar golongan tua dan muda, sampai-sampai kaum muda menyebut mereka sebagai kolaborator kolonial. Soekarno semula berniat memproklamasikan kemerdekaan melalui rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945, tetapi karena masih diliputi keraguan, akhirnya batal dilaksanakan. Kaum muda muda kehilangan kesabaran, dan memutuskan membawa paksa Soekarno dan Hatta ke luar kota, yang terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di tempat itu, naskah proklamasi dibuat dan dibacakan di Jakarta pagi harinya, Jum'at, 17 Agustus 1945.[57]

Akhirnya para pemimpin nasional menyadari bahwa kemerdekaan melalui jalan revolusi telah menjadi keharusan, meski kekhawatiran kaum revolusioner benar-benar menjadi kenyataan. Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Sebelum benar-benar memenuhi janjinya,

---

[56] Pespoprodjo, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 80-1.

[57] Soekarno dan Hatta sebenarnya lebih berharap dapat memetik kemerdekaan dengan menghindari pertumpahan darah. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 135. Simak juga Mohammad Hatta, ***Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945***, (Djakarta: Tintamas, 1970), p. 53-55. Simak juga Kahin "Sukarno's Proclamation of Indonesian Independence" dalam ***Indonesia, Cornell Southeast Asia Program***, No. 69, 2000, p. 1-3.

Jepang terlanjur kehilangan otoritas untuk menentukan nasib Indonesia sejak 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang memastikan Indonesia akan diambilalih oleh pasukan sekutu dan mengembalikannya kepada pemerintah Belanda.[58]

Lepas dari itu semua, berita proklamasi meluas ke berbagai pelosok tanah air melalui media massa radio, surat kabar, telegraf dan pos. Melalui radio *Domei* proklamasi disiarkan berulang-ulang sampai dengan pukul 16.00 saat siaran berhenti. Jepang melarang pemberitaan tersebut dan menyegel kantor *Domei*, serta menyortir telegraf dan pos untuk membendung tersebarnya berita kemerdekaan. Meskipun demikian, berita terlanjur tersebar luas dan tidak mungkin dihentikan. Hasilnya, dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan meluas ke berbagai daerah. Rakyat di berbagai penjuru nusantara memberikan sambutan penuh antusias, baik dengan cara damai maupun disertai kekerasan karena harus berhadapan dengan pasukan Jepang, Belanda dan Australia.[59]

Saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Jepang sudah pada posisi kalah perang dan belum mengakui kemerdekaan Indonesia yang menjadikan proklamasi kemerdekaan masih bersifat pengakuan sepihak. Dari segi hukum internasional Indonesia kembali berstatus milik (*bezittingen*) Belanda, karena kekalahan Jepang berarti kembalinya wilayah ini ke pangkuan Belanda. Karena itu, bagi bangsa Indonesia proklamasi baru menjadi momentum awal keharusan memperjuangkan kemerdekaan baik secara fisik maupun diplomasi. Jepang sendiri tampak tidak sungguh-sungguh berusaha memberikan kemerdekaan, sekalipun juga tidak tampak berusaha mati-matian mempertahankannya. Pemboman brutal Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki memberikan pukulan mental yang sangat berat bagi Jepang, yang membuat mereka kehilangan komitmen

---

[58] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 89.

[59] Ketika masih di Rengas Dengklok Hatta sudah berpesan agar para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita memperbanyak teks proklamasi, yang memungkinkannya tersebar ke seluruh dunia. Hatta, ***Sekitar Proklamasi...***, p. 53.

untuk secara sungguh-sungguh menjaga *status quo* atas wilayah Indonesia.[60]

Kondisi pasca proklamasi, di mana kehadiran kembali Belanda masih menghantui keberlanjutan republik baru ini, menempatkan kemerdekaan masih menjadi satu-satunya tujuan perjuangan. Hal-hal yang tidak kalah penting untuk ditata dan dipersiapkan kemudian untuk mengelola negara mandiri tidak cukup menjadi persoalan yang memperoleh kesempatan yang cukup untuk dipikirkan secara jernih oleh sebagian besar tokoh republik. Kekuatan-kekuatan nasional dipaksa kembali kepada titik nol untuk memulai pertarungan status dan pengaruh, yang menjadikan demokrasi baik sebagai wacana maupun praktik ketatanegaraan di Indonesia harus mundur paling tidak lima tahun dari yang seharusnya.[61]

Mengingat proklamasi baru pernyataan sepihak, maka untuk benar-benar tegak berdiri sebagai negara berdulat, Indonesia membutuhkan legitimasi, berupa pengakuan dan pengalihan kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sementara itu, Belanda ataupun sekutu tidak mungkin melakukannya begitu saja. Pertumpahan darah sebagaimana dikhawatirkan tokoh-tokoh nasional tak mungkin lagi dihindari. Namun demikian, proklamasi telah menjadi titik permulaan terkonsolidasikannya gerakan revolusi kemerdekaan secara nasional, jalan panjang perjuangan untuk benar-benar sampai pada kedaulatan penuh atas seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Naskah sederhana proklamasi dalam secarik kertas tersebut, telah

[60] Jepang sebenarnya sudah memutuskan menyerah sejak 10 Agustus 1945, namun sekutu masih berusaha meyakinkan dengan menguji senjata barunya untuk kedua dan tiga kalinya. Karena itu dapat dipahami bila sebagian perwira Jepang, seperti Maeda mendukung kemerdekaan Indonesia. Adiwiguna "Faktor-faktor...", p. 154.

[61] Seluruh konsentrasi harus ditumpahkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang terlanjur diproklamirkan, yang mengakibatkan bibit-bibit konflik tidak dapat diakomodir dalam satu komitmen nasional yang utuh. Simak kembali Onghokham, Revolusi Indonesia..., p. 5-6.

menyulut berkobarnya api revolusi yang tak mudah dipadamkan. Dengannya, perjuangan kemerdekaan menemukan momentum yang mengharuskan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam skala *massive* pada kawasan yang sangat luas untuk turut terlibat memperjuangkannya melalui berbagai cara. Konfrontasi bersenjata besar-besaran kembali terbuka setelah hampir tak pernah terjadi sejak perang Diponegoro.[62]

Dengan demikian, Indonesia benar-benar lahir sebagai sebuah bangsa baru, negara baru, yang tidak memiliki kontinuitas kekuasaan dari Belanda maupun Jepang. Indonesia harus mengawali sejarahnya sebagai sebuah negara dalam situasi yang tidak sesederhana kata merdeka, sebab kemerdekaan Indonesia relatif tidak cukup dipersiapkan. Pemanfaatan kekosongan kekuasaan (*vacum of power*) sejak kekalahan Jepang sebagai momentum kemerdekaan menjadikan pemerintahan Indonesia tidak memiliki kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Munculnya berbagai persoalan yang kurang terantisipasi terbuka lebar, karena negara ini terbentuk dengan tidak cukup dipersiapkan secara memadai. Kepemimpinan nasional di Indonesia bukan tumbuh dari struktur sosial politik yang mengakar dalam struktur tradisional yang ada sebelumnya, melainkan sebagai hasil dialektika pergerakan kemerdekaan.[63]

---

[62] Sekalipun birokrasi pemerintahan belum benar-benar efektif dan militer belum terbentuk secara solid, gelombang perlawanan atau sekedar dukungan rakyat secara meluas merebak di berbagai daerah untuk mengekspresikan kehendak yang sama, menegakkan kemerdekaan. Simak bagaimana heroiknya perlawanan kaum pejuang sebagaimana kutipan deskripsi Jean gelman Taylor " Images of Indonesian Revolution" dalam Jane Drakard and John Legge, ***Indonesian Independece Fifty Years On 1945-1995***, (Clayton: Monash Asia Institute, Annual Indonesia Lecture Series, No. 20 1996), p. 17.

[63] Janji Jepang yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan BPUPKI dan PPKI belum dapat sempat mengkonsolidasikan menuju penciptaan negara dalam ukuran normal, walaupun sepak terjangnya telah menimbulkan pengaruh yang sangat mendalam dalam masyarakat Indonesia selanjutnya. Bulkin "Nasib Republik...., p. 27. Akar sosial pimpinan republik terdiri dari kalangan pergerakan

E. Revolusi Bersenjata

Seperti disinggung pada bagian terdahulu, penjajahan telah menciptakan peta baru dunia, di mana status wilayah di hampir seluruh permukaan bumi telah terbagi-bagi ke dalam hak milik beberapa negara Eropa saja. Pasca perang dunia II, hampir tak sejengkal tanah di permukaan bumi ini terbuka tanpa pemilik. Status tersebut diakui dalam hukum internasional yang telah berkembang masa itu. Bangsa-bangsa yang selama berabad-abad mendiami wilayah tersebut telah kehilangan status sebagai pemilik yang berdaulat untuk mengelola wilayah yang ditempati nenek moyangnya. Secara internasional, Indonesia masih diakui sebagai milik sah (*bezittingen*) Belanda, setelah secara resmi diserahkan kembali kepada Sekutu oleh Hiro Hito, 15 Agustus 1945, meski Sekutu maupun Belanda sendiri sebenarnya belum cukup siap untuk mengambil alih wilayah ini dari tangan Jepang.[64]

Meski proklamasi kemerdekaan memiliki makna besar dalam menggalang kesadaran revolusioner di dalam negeri, tapi pemerintahan Indonesia masih harus menempuh perjuangan panjang dan keras untuk menuntaskan kemerdekaannya. Pemerintahan Indonesia sebagaimana ditetapkan 18 Agustus 1945 masih harus berjuang meraih pengakuan kedaulatan, baik dari Belanda maupun dari bangsa-bangsa lain di dunia. Pernyataan kemerdekaan tak

yang membangun akar sosialnya sendiri melalui organisasi pergerakan. Simak Onghokham "Revolusi Indonesia", p. 5.

[64] Kekuatan Belanda sudah sangat lemah untuk dapat mengontrol Indonesia, di samping krisis perekonomian yang harus dihadapi pasca pendudukan Jerman. Adiwiguna "Faktor-faktor...", p. 155. Namun demikian, pemanfaatan momentum *vacum of power* of power tidak mengurangi makna revolusi perjuangan Indonesia, karena revolusi memang sering terjadi di situasi kritis di maka kekuatan utama melemah. Simak Onghokham "Revolusi Indonesia", p. 6.

mungkin ditarik kembali dan hanya mungkin terus diperjuangkan baik melalui jalur diplomatik maupun perjuangan bersenjata.[65]

Dalam hal ini terjadi perbedaan kecenderungan sikap antara pemegang tampuk pemerintahan dengan masyarakat luas yang tengah diliputi heroisme revolusioner. Dalam situasi yang hanya mungkin dihadapi dengan kekuatan senjata, tokoh-tokoh nasional yang memegang kendali pemerintahan masih berharap dapat menghindari pertumpahan darah dengan jalan penyelesaian diplomatik. Tokoh-tokoh nasional masih ragu-ragu mengambil tindakan hingga menimbulkan ketegangan di kalangan mereka sendiri, termasuk dalam memenuhi kelengkapan aparatur negara seperti pembentukan angkatan perang dan menentukan tindakan terhadap keberadaan pasukan Jepang setelah menyerah pada sekutu.[66]

Sementara itu, di kalangan masyarakat meluas sikap antipati pada penjajah dan khawatir Jepang mengadakan kapitulasi dengan sekutu dalam pengambilalihan kekuasaan. Tidak ingin didahului pasukan sekutu, mereka mulai bertindak sendiri-sendiri melucuti pasukan Jepang. Pasukan Jepang potensial menjadi alat sekutu untuk menentang kemerdekaan Indonesia, dan itu berarti ancaman besar bagi kedaulatan republik baru ini. Sejak September 1945 sampai Februari 1946 di berbagai daerah masyarakat telah bertindak sendiri-sendiri melakukan perebutan kekuasaan maupun persenjataan Jepang baik dengan cara damai maupun kekerasan. Para pemuda berusaha merebut senjata dan menguasai gedung-gedung vital yang dikuasai

[65] Setiap revolusi memang mempunyai sifat dan coraknya sendiri-sendiri tergantung kekuatan yang berkembang. Di Indonesia revolusi bercorak kerakyatan, bergerak dengan dipelopori kaum muda, berbagai seluruh glolongan dan lapisan masyarakat. Imam Pratignjo "Pidato Pembukaan Seminar Pantjasila" dalam ***Prasaran-prasaran pada Seminar Pantjasila***, (Jakarta: Departemen Penerangan 1959), p. 19.

[66] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 101.

Jepang. Bentrokan-bentrokan tak terhindarkan dengan memakan banyak korban baik dari pihak Indonesia maupun Jepang. [67]

Aparatur negara yang belum dapat berperan maksimal menjadikan masyarakat dengan mudah bertindak sendiri-sendiri. Koordinasi keamanan yang belum terkonsolidasi menyebabkan kesalahpahaman dan tindakan di luar instruksi terjadi di mana-mana. Sejak Jepang mengumumkan pembubaran PETA dan Heiho dan semua organisasi bersenjata di Indonesia, bekas pasukan bentukan Jepang tersebut menolak mengembalikan senjata. Bahkan dengan senjata tersebut mereka berusaha melucuti tentara Jepang, terutama pada formasi-formasi di luar kota, sedangkan garnisun-garnisun besar di kota-kota besar masih tetap bertahan.[68]

Di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, pulau Sumatera, Sulawesi, Aceh, Maluku dan Sumbawa terjadi pertempuran sengit antara tentara Jepang dan kaum penjuang dalam rangka pengalihan kekuasaan, perebutan senjata, pengambilalihan fasilitas-fasilitas vital pemerintahan dan pabrik-pabrik. Hanya di Biak, Irian Jaya, pengambilalihan yang terjadi satu setengah tahu kemudian mengalami kegagalan, dan pelakunya dihukum Belanda. Di Balikpapan, sekitar 8000 orang mendemonstrasikan dukungan terhadap RI dengan tanpa perlawanan. Mereka berkumpul dengan membawa bendera merah-putih di depan kompleks NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), yang sebelumnya sudah diduduki pasukan Australia. Kenyataan ini, paling tidak menunjukkan betapa kuat dan luasnya dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan RI. [69]

Jepang sendiri tidak jelas dalam mensikapi situasi yang berkembang di Indonesia. Ketika dilangsungkan Rapat Raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945 Jepang yang semula bermaksud

---

[67] ***Ibid.***

[68] Kahin, ***Nasionalim and Revolution...***, p. 137.

[69] Bentrokan-bentrokan di berbagai daerah, simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 103-6.

menangkap Soekarno berubah pikiran, setelah menyaksikan luasnya dukungan rakyat terhadap Soekarno-Hatta. Tampaknya bom atom Amerika Serikat dan sekutunya terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki benar-benar membuat pasukan jepang terpukul dan patah semangat, yang membuat mereka tidak dapat menentukan sikap yang jelas selama menunggu kehadiran pasukan sekutu yang akan menggantikan kedudukannya di Indonesia. [70]

Beberapa saat setelah penyerahan Jepang, sebenarnya pasukan Inggris telah diterjunkan di Jakarta di bawah pimpinan Kolonel Greenhalgh dalam rangka persiapan pembentukan markas besar Sekutu di Jakarta, 14 September 1945. Dua minggu kemudian Skadron Penjelajah V Inggris diterjunkan di bawah pimpinan Laksamana Muda W.R. Petterson. Pada waktu yang hampir bersamaan, pasukan Inggris juga mendarat di wilayah Semarang dan Surabaya. Inggris hanya bertugas secara protokoler mengambilalih Indonesia untuk diserahkan kembali ke tangan Belanda. Atas nama sekutu mereka menerima penyerahan kekuasaan dari pasukan Jepang, membebaskan tawanan perang maupun sipil, melucuti dan memulangkan pasukan Jepang, serta menjamin keamanan hingga pemerintahan Belanda berfungsi kembali. Dalam hal ini mereka memandang pemerintahan Indonesia pada dasarnya belum ada, hingga dalam banyak hal tindakan-tindakan mereka berkecenderungan tidak menghargai pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah. [71]

Kahin menilai hal ini dikarenakan pasukan Inggris yang bertugas di Jawa dan Sumatera serta Australia di Sulawesi, menduga Indonesia masih berada di bawah kendali Jepang. Padahal kenyataan

---

[70] Pasukan Jepang tidak menentukan sikap yang jelas, sekalipun perintah pasukan sekutu jelas menyatakan mereka harus mengkontrol keamanan. Melihat reaksi yang luar biasa dari rakyat, terutama sejak rapat di Ikada, sikap Jepang semakin tidakn jelas terhadap gerakan kemerdekaan di Indonesia. Simak Kahin, ***Nasionalim and Revolution...***, p. 137.

[71] Di tengah pemerintahan republik Indonesia yang sudah berdiri, Laksamana Mountbatten mengumumkan bahwa hukum-hukum Belanda harus ditegakkan kembali. Simak ***Ibid.***, p. 142.

yang mereka hadapi di lapangan sama sekali berbeda. Kehadiran pasukan Inggris menjadikan Indonesia mengalami dualisme pemerintahan. Di satu sisi pemerintahan republik sudah berdiri, di sisi lain pasukan Inggris juga memposisikan diri sebagai pemerintahan militer sementara yang menjamin proses pemulihan pemerintahan Belanda.[72]

Sekalipun misi pasukan Inggris sangat jelas, pemerintah RI berhati-hati mensikapinya. Presiden menginstruksikan pasukan dan pejuang tidak berurusan dengan Inggris, karena Inggris hanya menjalankan tugas sementara. Bagaimanapun, suhu perlawanan dan sikap permusuhan semakin memanas yang disertai berbagai insiden. Masyarakat tidak dapat menafikan bahwa kehadiran mereka memang bermaksud memfasilitasi kepentingan pemerintah Belanda untuk menegakkan kembali kedaulatannya atas wilayah ini. Karena itu, kehadiran pasukan Inggris memperoleh sambutan tidak bersahabat dari kalangan pejuang, bahkan menjadi permulaan meletusnya perang terbuka antara pejuang-pejuang Indonesia melawan pasukan asing.[73]

Kekhawatiran akan kembalinya penjajahan terbayang jelas ketika pejabat dan pasukan Belanda mulai berdatangan ke wilayah ini, dan meningkatkan semangat reaksioner menolak kembalinya bangsa penjajah. Pasukan Belanda sebenarnya sudah mulai diterjunkan ke wilayah Indonesia, Monado, beberapa saat setelah menyerahnya Jepang ke tangan sekutu, tapi lima bulan kemudian pasukan tersebut diserbu para pejuang dan seluruh pasukan Belanda ditahan. Sejak masuknya pasukan Sekutu, posisi pasukan pejuang diambilalih dan pertahanan Belanda di berbagai daerah diperkuat kembali. Kekhawatiran pejuang menjadi kenyataan ketika di bawah perlindungan Inggris pasukan Belanda secara berangsur-angsur

---

[72] Kahin sebagaimana dicatat Mayor Crockett, seorang pengamat militer Amerika Serikat menyatakan, beberapa saat kemudian pasukan Belanda dan serdadu KNIL mulai menyisir jalan-jalan di Jakarta dan menembak apapun yang dianggap mencurigakan. ***Ibid.***, p. 143.

[73] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 109.

masuk ke Indonesia. Secara provokatif mereka mulai melakukan kontrol terhadap masyarakat dengan patroli-patroli dan penyisiran pejuang-pejuang republik di jalanan kota-kota besar.[74]

Sebenarnya Soekarno memerintahkan masyarakat agar menghindari pecahnya kerusuhan, meski kemungkinan penggulingan pemerintahan RI dalam jangka dekat sangat mungkin terjadi. Namun demikian, Indonesia menghadapi fase instabilitas keamanan akibat reaksi penolakan rakyat atas kehadiran pasukan Sekutu dan NICA. Para pemuda tidak dapat menahan diri untuk terus menunggu. Secara sporadis, perjuangan berani mati (*jibaku*) tak dapat ditahan lagi. Mereka menyerang patroli-patroli pasukan Belanda dan Inggris. Terlebih setelah di bawah komando Inggris, pasukan Jepang menyerang dan merebut kota-kota yang sudah diduduki pejuang Indonesia, seperti Bandung dan Surabaya. Meningkatnya semangat anti asing menjadikan sasaran penyerangan mereka tidak lagi terbatas pada pasukan bersenjata, melainkan juga warga sipil asing, termasuk wanita dan anak-anak.[75]

Insiden heroik paling monumental pertama kali terjadi di Surabaya, yang menandai dimulainya perang kemerdekaan. Dua minggu sejak kemerdekaan diproklamirkan, rakyat sudah beramai-ramai menyerbu markas-markas militer Jepan. Gudang mesiu, markas pertahanan Jawa Timur, pangkalan angkatan laut, serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota dijadikan sasaran penyerangan dan perebutan persenjataan. Dalam beberapa hari, fasilitas-fasilitas

---

[74] Melalui inteligen-inteligennya, Belanda berusaha mengorek informasi tentang kekuatan republik, yang disertai penangkapan, interogasi, penyiksaan dan bahkan pembunuhan. Robert Cribb "The Nationalist word of occupied Jakarta" dalam Susan Abeyasekere, ed., ***From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930's to 1980's***, (Clayton: Monash University, The Annual Indonesia Lecture Series, 1985), p. 99.

[75] Ketika revolusi dimulai, kekerasan meluas di jalanan ibu kota. Walaupun tidak sekeras daerah lain, terutama Surabaya dan Semarang, namun ulah para pemuda membuat frustasi pasukan Belanda yang ada di bawah perlindungan Inggris. ***Ibid.***, p. 92-3.

vital pemerintahan sudah berada di tangan pejuang republik. Saat semangat juang tengah memuncak, terjadi sebuah insiden heroik di hotel Yamato. Seorang mantan interniran Belanda yang dibebaskan pasukan sekutu mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel. Peristiwa tersebut kontan menyulut kemarahan pemuda, dan bentrokan berdarah tak terhindarkan setelah penghuni hotel menolak permintaan menurunkannya. Dalam insiden tersebut beberapa pemuda berhasil memanjat puncak hotel, merobek warna birunya dan mengibarkannya kembali sebagai merah putih.[76]

Markas *Kempetai* yang selama masa pendudukan memberikan pengalaman paling traumatis rakyat Surabaya tidak luput jadi sasaran penyerbuan, sebab bagi masyarakat Surabaya tempat tersebut merupakan lambang kekejaman tentara pendudukan Jepang. Banyak tokoh yang dianggap menentang Jepang disiksa dan menemui ajalnya secara tragis di tempat ini. Melalui pertempuran sengit dengan menelan banyak korban dari pihak pejuang, akhirnya markas tersebut dapat direbut kaum pejuang dan menjarah persenjataannya.[77]

Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby yang mendarat baru diperkenankan memasuki Surabaya setelah melalui perjanjian. Rupanya pasukan Mallaby terlalu memandang rendah kesepakatan tersebut, dan dalam perkembangan selanjutnya melakukan penyergapan ke instansi-instansi yang telah dikuasai pejuang Indonesia. Tidak hanya itu, Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Jawa Timur menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Di tengah masyarakat yang jiwa revolusinya sedang memuncak, tentu saja pamflet tersebut ditanggapi sebagai penghinaan.[78]

Keesokan harinya konfrontasi bersenjata berlangsung di berbagai sektor, di mana pasukan Inggris harus menyadari bahwa

---

[76] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 102.
[77] ***Ibid.***, p. 103.
[78] ***Ibid.***, p. 113-4.

semangat revolusi yang sebelumnya dipandang rendah telah mengantarkan mereka pada situasi kritis. Berkobarnya pertempuran tak dapat dihindari lagi. Peristiwa tersebut semakin memanas dengan terbunuhnya Bigjen A.W.S. Mallaby dalam sebuah insiden perundingan 31 Oktober 1945. Kemarahan Inggris ditunjukkan dengan mengeluarkan ultimatum agar seluruh pejuang, pemimpin Indonesia, pasukan pemuda, polisi dan kepala pemerintahan menyerah tanpa syarat pukul 06.00 tanggal 10 November. Pada hari itu juga akhirnya Inggris melakukan gempuran terhadap kota Surabaya, dan sekaligus menjadi awal perang kemerdekaan.[79]

Sepuluh hari sejak perang Surabaya, Inggris menyerang Ambarawa, dan hampir satu bulan berikutnya mereka dapat diusir ke wilayah Semarang. Peristiwa serupa terjadi di beberapa daerah, di antara yang paling populer adalah *Pertempuran Medan Area* di Sumatera Utara. Pertempuran demi pertempuran kemudian mejalar ke berbagai kota lain, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Umat Islam Indonesia bahu-membahu dengan kekuatan lain dengan membentuk beberapa milisi, dan muncul banyak tokoh Islam sebagai inspirator dan motivator perjuangan. Jargon-jargon Islam mengemuka menyemangati perjuangan, sebagaimana dikumandangkannya *takbir* dalam orasi bung Tomo melalui radio.[80]

Tahun-tahun berikutnya pertempuran sama sekali tidak berhenti, meski intensitasnya berkurang dibanding sepuluh minggu akhir 1945. Inggris dan Belanda berusaha menjaga *status quo*, dan membatasi operasinanya hanya pada wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Sementara konsolidasi pejuang di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya tidak semassive di Jawa, Sumatera dan Bali menjadikan Belanda dengan mudah meredamnya setelah melucuti pasukan Jepang. Meski demikian, di beberapa daerah seperti Minahasa dan Makassar, pertempuran tidak berhenti hingga

---

[79] ***Ibid.*** p. 114.
[80] ***Ibid.***, p. 116-121.

pertengahan 1948. Dalam peristiwa ini Belanda menugaskan kapten Westerling mengatasi keadaan di Minahasa. Untuk meredam perlawanan, pasukannya melakukan penangkapan dan membantai 30.000 orang warga sipil yang dituduh sebagai pejuang ataupun membantu pejuang.[81]

Selain melalui perundingan, Belanda mempersiapkan langkah-langkah militer untuk menyelesaikan masalah. Ketika pemimpin republik dan wakil pemerintah Belanda melakukan perundingan, Belanda menambah jumlah pasukannya. Terbukti setelah perjanjian Linggar Jati disepakati, Belanda justeru melakukan serangan militer besar-besaran yang memaksa pusat pemerintahan RI berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Satu setengah setahun kemudian Belanda mengulangi tindakannya dan berhasil menduduki kota Yogyakarta serta menangkap pemimpin pemerintahan RI. Posisi Belanda sendiri semakin sulit, di mana tindakan kerasnya justeru mendatangkan reaksi tajam internasional yang merugikan dirinya sendiri.[82]

Agresi Belanda yang berhasil menduduki pusat-pusat pemerintahan tidak dengan sendirinya mengakhiri riwayat republik ini. Republik Indonesia tidak dapat lagi dipandang sebagai kumpulan gerombolan bersenjata yang dapat diakhiri dengan menangkap tokoh-tokohnya, Soekarno-Hatta, karena Indonesia benar-benar telah berdiri menjadi sebuah negara dengan sebuah bangsa. Penangkapan para pemimpin republik tidak mengakhiri pemerintahan. Instrumen pemerintahan, khususnya tentara nasional tetap eksis, sekalipun hanya mampu melakukan perang gerilya. Perkembangan mutakhir Indonesia selama penjajahan Jepang dan sesudahnya benar-benar belum bisa diterima Belanda, bahwa bangsa di wilayah ini sudah benar-benar bangkit, tidak saja tokoh-tokoh pergerakannya,

[81] Dalam catatan Belanda hanya sejumlah sekitar 4000 orang dibunuh karena dituduh mendukung kaum pejuang. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 145.

[82] Di Jakarta sendiri, pasukan pejuang mulai dalam posisi sulit, sekalipun memperoleh dukungan dan solidaritas luas dari kalangan penduduk. Cribb "The Nationalist Word...", p. 101.

melainkan merata pada segenap rakyatnya. Sekalipun Belanda mungkin memenangkan perang, namun dalam jangka panjang dapat dipastikan tidak akan menjadi wilayah yang nyaman, dan apalagi menguntungkan untuk dikuasai. [83]

Sikap dan tindakan pasukan Inggris menunjukkan bahwa republik Indonesia mereka pandang belum ada. Mereka tidak merasa perlu menghormati kedaulatan dan komitmen-komitmen yang telah dibuat dengan pemerintahan setempat. Melalui jalan panjang akhirnya Belanda harus menerima realitas di Indonesia yang tidak memungkinkannya lagi menegakkan pemerintahan Belanda seperti masa sebelumnya. Kemerdekaan, yang sebelum penguasaan Jepang merupakan sesuatu yang mustahil dan hanya menjadi wacana sosial politik sekelompok kecil kaum intelektual, telah berkembang menjadi kesadaran rakyat secara luas dan tak mungkin dibendung. [84]

Sekalipun sebagai pemilik sah, kehadiran Belanda tidak lagi ditunjang oleh realitas politik bahwa rakyat negeri ini sudah tidak menghendaki kehadirannya lagi. Situasi yang berkembang setelah perang berubah jauh dibanding satu dekade sebelumnya saat Belanda masih berkuasa. Slogan *merdeka* atau *mati* menjadi ekspresi keberanian masyarakat di wilayah ini untuk melakukan perlawanan dengan segala cara. Meski dengan persenjataan yang lebih modern, Belanda tidak lebih mudah menakhlukkan perjuangan rakyat negeri ini sebagaimana pernah dilakukannya pada tiga abad sebelumnya.[85]

---

[83] Betapapun kuatnya persenjataan Inggris maupun Belanda, perang tersebut tetap merupakan kemenangan Indonesia, karena disertasi sebuah titik balik bagi bangsa Indonesia yang sudah berkembang jauh dari kurun terakhir penjajahan Belanda, di mana secara luas mereka diliputi kesediaan berkorban jiwa dan raga. Kahin, ***Nationalism and Revolution…***, p. 144.

[84] Bagi pengamat Belanda gerakan perjuangan kemerdekaan masih dianggap sebagai tindakan kelompok bandit atau perusuh, dan tidak dianggap sebagai gerakan kemerdekaan. Katodirdjo "The Role of Struggle …", p.3.

[85] The revolutionary movement included all walk life, various classes of society involving both elite and masses. It was a total movement … Katodirdjo "The Role of Struggle…", p.1.

F. Konsolidasi Negara

Keadaan di lapangan tersebut bertolakbelakang dengan kesiapan institusi politik dan pemerintahan. Konsolidasi negara di tengah situasi revolusioner mengakibatkan setiap keputusan selalu bernuansa darurat, sementara dan dengan mudah diubah. Negara belum mampu secara konsisten membangun sistem dan tatanan terpercaya. Sebagai tokoh sentral, Soekarno tampaknya dipenuhi keraguan dalam bertindak hingga menimbulkan ketidakpuasan mereka yang diliputi luapan semangat heroik. Soekarno sebenarnya berharap penyelesaian damai atas masalah kedaulatan negara dan menghindari konfrontasi bersenjata yang sebenarnya tidak mungkin dihindari. [86]

Sukarno lebih suka menempuh jalur-jalur konstitusional sekalipun sebagian kalangan lebih berharap mengabaikannya. Sukarno memilih melanjutkan sidang PPKI dalam penataan instrumen-instrumen negara baru ini. Melalui PPKI, pemerintah Indonesia dalam waktu singkat bekerja keras untuk melengkapi berbagai kelengkapan negara berupa aturan, struktur, sistem dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan sebuah negara berdaulat yang pada waktu itu belum ada. Sehari setelah kemerdekaan diproklamirkan, pemerintah mulai melengkapi struktur, sistem dan instrumen-instrumen pemerintahan. Struktur pemerintahan daerah sisa pemerintahan Belanda dan Jepang yang masih bertahan dan dapat digunakan untuk menghindari kekosongan kekuasaan di daerah.[87]

Golongan muda tampaknya sangat antipati terhadap segala yang berbau kolonial, sehingga menolak digunakannya PPKI sebagai wadah penyiapan instrumen kenegaraan. Meski begitu, Soekarno berusaha melibatkan mereka untuk menambah keanggotaan PPKI dengan 9 anggota baru, tetapi karena perbedaan tersebut mereka menolak. Mereka tetap kukuh menyatakan bahwa PPKI adalah aparat

---

[86] Simak kembali Nasution "Aspirasi Kemerdekaan...", p. 38-9.

[87] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 95-6.

Jepang. Rapat tetap berlangsung meski sebagian kalangan menolak dan menganggap lembaga ini sebagai produk pemerintahan Jepang.[88]

PPKI melanjutkan tugasnya dengan menyelenggarakan rapat-rapat membahas berbagai kelengkapan negara, terutama masalah perundang-undangan. Rapat diselenggarakan secara singkat dengan mengabaikan aspek-aspek yang sifatnya detail, meski sebenarnya mungkin sekali berpotensi menimbulkan perdebatan di kemudian hari. Berkaitan dengan penetapan dasar negara, sejak disahkannya dasar negara dan undang-undang dasar sudah muncul satu persoalan, berkaitan dengan sila *Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan Kwajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluknya*, yang dipertanyakan kalangan sekuler dan Kristen. Latuharhary dengan mengatasnamakan umat Kristen Protestan, dan bukan sekuler, khawatir masalah syari'at Islam akan menimbulkan masalah bagi umat Kristen dan adat-istiadat. Di samping itu, masalah ini memang menjadi ganjalan bagi kalangan sekuler yang mengkhawatirkan terjadinya gangguan terhadap persatuan nasioanal terutama dari daerah-daerah yang mayoritas berpenduduk selain Islam.[89]

Sebelumnya, malam 17 Agustus 1945, Hatta menerima informasi dari perwira angkatan laut Jepang yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia bagian timur keberatan dengan rumusan Piagam Jakarta, dan bila tidak diubah mereka memilih berdiri di luar Republik Indonesia. Keesokan harinya Hatta memanggil empat anggota panitia sembilan yang dinilai mewakili Islam. Setelah melalui perdebatan beberapa saat, akhirnya disepakati sila pertama diubah menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa* saja. Kehadiran Wahid Hasyim diragukan oleh salah seorang anggota Masyumi, Prawoto

[88] ***Ibid.***
[89] ***Ibid.*** Simak pula Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 2.

Mangkusasmito, meski Hatta meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar-benar hadir bahkan turut meyakinkan anggota yang lain.[90]

Dalam waktu sekitar dua jam, rapat dapat memutuskan rancangan Pembukaan dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, ditetapkan juga Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Di hari berikutnya diputuskan hal-hal yang berkenaan dengan pembagian wilayah, komite nasional, departemen-departemen dan badan keamanan rakyat. Naskah Undang-undang Dasar tersebut diselesaikan dengan diputuskan secara aklamasi, mengingat rapat tersebut hanya merupakan kelanjutan dari rapat BPUPKI dan PPKI sebelumnya. [91]

Rapat 19 Agustus 1945, membahas kelengkapan negara yang sebelumnya dipersiapkan 9 orang anggota panitia kecil, yang merancang hal-hal mendesak, berupa pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Hasilnya, secara aklamasi rapat menyetujui pembagian wilayah ke dalam 8 provinsi berikut calon gubernurnya; Komite Nasional; 13 kementerian; dan pembentukan tentara nasional yang kokoh, sedangkan pembahasan masalah departemen ditunda. Di samping itu, rapat juga menyepakati penekanan perlunya ketenteraman dan segera memulai perjuangan. [92]

Dalam rapat-rapat berikutnya disepakati pembentukan Komite Nasional, setelah sebelumnya dibahas dan ditentukan siapa yang akan duduk di dalamnya serta pembentukan Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Presiden dalam pidatonya menyatakan berdirinya tiga badan baru tersebut, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pasukan perang yang merupakan salah satu instrumen pokok belum

---

[90] Keraguan prawoto inilah yang kemudian terus dipersoalkan, yang melahirkan polemik semakin berkepanjangan. ***Ibid.***, 36-41.

[91] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 97-8.

[92] ***Ibid.***

dibentuk akibat kehati-hatian Soekarno yang menghindari keputusan yang terkesan provokatif.[93]

Kalangan muda kembali menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut, karena berharap Indonesia segera memiliki tentara nasional yang definitif. Namun demikian, para pemuda bekas anggota PETA, *Heiho* dan KNIL merespon keputusan tersebut dengan membentuk BKR di daerah masing-masing. Mereka yang tinggal di Jakarta membentuk BKR pusat di bawah pimpinan Mr. Kasman Singodimejo, bekas *daidanco* Jakarta, yang karena ditunjuk sebagai ketua KNIP digantikan Kaprawi. [94]

Tentara nasional yang definitif baru dibentuk jauh hari, setelah pasukan Belanda dan sekutu mulai melakukan tindakan-tindakan provokatif serta melihat kemungkinan konfrontasi bersenjata yang semakin terbuka. Pembentukan tentara nasional dipercayakan pada Mayor Oerip Soemohardjo, pensiunan KNIL. Hasilnya diumumkan dalam Maklumat Pemerintah, 5 Oktober 1945, yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang terbagi ke dalam 16 divisi untuk wilayah pulau Jawa dan Sumatera.[95]

Bersamaan dengan sidang PPKI, para pemuda mengadakan rapat sendiri dan mengundang Soekarno dan Hatta. Rapat yang dipimpin oleh Adam Malik bersama Mr. Kasman Singodimedjo dan Ki Hajar Dewantara mengharapkan agar pemerintahan melakukan perebutan kekuasaan secara cepat dan serentak. Presiden tidak menyetujui tindakan yang sedemikian radikal, karena khawatir akan muncul penilaian merugikan dari dunia internasional. Kemudian Adam Malik membacakan dekrit tentang berdirinya Tentara Republik Indonesia (TRI) dari bekas Heiho dan PETA. Isi dekrit

[93] ***Ibid.***, p. 99.
[94] ***Ibid.***, p. 100.
[95] ***Ibid.***, p. 109.

tersebut disetujui presiden, meski belum ditempatkan sebagai keputusan.[96]

Para pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR memilih membentuk barisan-barisan perjuangan yang sebagian berbentuk milisi bersenjata sesuai afiliasi organisasi masing-masing. Pasukan-pasukan milisi tersebut berperan dalam perjuangan melawan provokasi dan agresi Belanda pada kurun berikutnya. Di antara badan perjuangan yang muncul di awal revolusi adalah *Komite van Aksi* yang membawahi *Angkatan Pemoeda Indonesia (API)*, *Barisan Rakyat Indonesia (BARA)* dan *Barisan Boeroeh Indonesia (BBI)*. Di samping itu, muncul pula barisan-barisan milisi lain, seperti *Hizbullah*, *Sabilillah*, *Barisan Banteng*, *Pemuda Indonesia Maluku (PIM)*, *Tentara Pelajar (TP)* dan sebagainya, yang tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa melainkan juga di luar Jawa. [97]

Kurang dari dua minggu, departemen-departemen pemerintahan RI sudah berjalan kembali dengan memanfaatkan pegawai pemerintah sisa kolonial. Dekrit Soekarno sangat efektif dalam mengendalikan pegawai-pegawai pemerintah. Mereka dilarang mempedulikan perintah Jepang dan hanya patuh pada pemerintahan republik, di bawah kendali seorang menteri. Konsolidasi negara berhasil dalam melengkapi infrastruktur negara dan birokrasi pemerintahan dengan melanjutkan sisa-sisa pemerintahan Belanda dan Jepang. Praktis hingga kehadiran pasukan Inggris situasi pemerintahan republik ini telah berlangsung tertib seolah bukan negara baru. Dalam hal ini Kahin mendiskripsikan:

British and Australian forces landing in Indonesia in October 1945, encountered a situation for which they were totally unprepared. Throughout most

---

[96] ***Ibid.***

[97] ***Ibid.***, p. 108.

of area, in Java and Sumatera in particular, civil administration was operating at a level of efficiency that quite amazed the allied forces.[98]

Pada dasarnya status, sistem ketatanegaraan maupun efektifitas pemerintahan Indonesia masih terlalu lemah. Situasi yang kian tidak lebih mudah sejak proklamasi menyebabkan setiap elemen sosial politik penting artinya dalam menyokong tegaknya kemerdekaan meski seringkali berjalan di luar kontrol pemerintah. Pemerintahan baru ini belum cukup efektif mengendalikan gerakan rakyat untuk mengambilalih kekuasaan dan persenjataan secara sepihak di lapangan. Pemerintah Indonesia juga tidak mampu berbuat banyak ketika kemudian pasukan Inggris mendarat dan berusaha mengambilalih kendali keamanan, dengan misi yang jelas, yaitu menjaga keamanan dan menjamin pemerintahan Belanda tegak kembali. Pemerintah Indonesia hanya dapat membiarkan pasukan Inggris dengan leluasa menjelajahi wilayah kekuasaannya dan mengambil posisi sebagai penengah ketika terjadi bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dengan pejuang bersenjata.[99]

Satu-satunya eksistensi negara yang tersisa dan dapat dilanjutkan dari rejim kolonial hanya struktur pemerintahan berikut aparat birokrasinya, sementara kendali pemerintah atas berbagai hal, termasuk perekonomian masih terlalu lemah. Pemerintahan Indonesia berdiri di tengah blokade ekonomi yang tidak memungkinkan keluar-masuknya distribusi barang dan jasa secara wajar. Pemerintah bahkan tidak cukup berdaya ketika Inggris dengan leluasan mengeluarkan mata uangnya sendiri. Di samping ancaman dari luar negeri, pemerintahan baru ini masih harus berhadapan dengan berbagai persoalan dari dalam negeri. Keterlibatan rakyat secara *massive* dan hampir merata pada seluruh elemen sosial menciptakan kesempatan menanam jasa dan memupuk perasaan lebih tahu bagaimana

[98] Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 139-142.

[99] Pertempuran dalam rangka perebutan persenjataan Jepang berlangsung sebagai gerakan spontan masyarakat, lepas dari iinstruksi pemerintan. Simak kembali Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 101-119.

menentukan jalannya revolusi. Di dalam negeri, kelompok-kelompok tertentu di KNIP menuntut untuk turut serta duduk dalam pemerintahan, yang menyebabkan sistem pemerintahan presidensiil diubah menjadi parlementer.[100]

Perubahan itu memperlihatkan bahwa pertimbangan jangka pendek mewarnai perjalanan pengelolaan negara sejak awal berdirinya. Sistem pemerintahan merupakan persoalan krusial yang menentukan jalannya negara dalam jangka panjang, yang mana perubahan terhadapnya tidak dapat dilakukan secara gegabah. Dengan perubahan tersebut, status dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI, yang sebelumnya dibuat sedemikian susah payah dan penuh pengharapan sedemikian lemah dan belum dapat ditempatkan sebagai referensi yuridis. Keberadaan konstitusi tidak ubahnya sekedar persyaratan administratif berdirinya sebuah negara. Hal ini sekaligus menunjukkan rendahnya komitmen pengelola negara pada aturan tertulis, di mana kekuatan kehendak lebih dominan dalam menentukan setiap keputusan.[101]

Perubahan sistem ketatanegaraan atas pertimbangan dan keputusan sesaat mungkin dapat dipahami karena mendesaknya keadaan pada saat itu. Hanya saja, keputusan demikian dalam perjalanan sejarah Indonesia di kemudian hari bukan untuk sekali saja dilakukan. Hingga pengakuan kedaulatan 1949, eksistensi pemerintahan RI masih tidak ubahnya sebuah induk organisasi pergerakan kemerdekaan dibanding pemerintahan sebuah negara yang mempunyai kekuatan memaksa. Di dalamnya terdapat banyak faksi perjuangan dan kepentingan, yang mana militer termasuk di

[100] Sepak terjang tokoh seperti Tan Malaka yang menandai dimulainya kecenderungan konflik, simak dalam Onghokham "Revolusi Indonesia...", p. 7.

[101] Situsasi revolusioner memungkinkan tindakan-tindakan dilakukan atas pertimbangan kondisi darurat. Namun demikian, Buyung Nasution melihat fenomena tersebut sebagai bagian dari perjuangan ke luar mapun ke dalam, yakni dalam rangka pembentukan kedalatan rakyat. Simak Nasution "Aspirasi Kemerdekaan...", p. 39.

dalamnya. Situasi ini nantinya menyulitkan dibangunnya suatu konsensus yang cukup kuat dan efektif. Konflik akibat perbedaan kehendak ataupun sikap terhadap satu kebijakan akan dengan mudah berkembang secara tidak terkendali, karena setiap faksi merupakan kelompok-kelompok independen yang arahnya tidak terkoordinasi. [102]

G. Fragmentasi Politik Masa Revolusi

Selama dua bulan dua belas hari pertama, pemerintahan RI mengalami perubahan dari sistem presidensiil menjadi parlementer. Atas desakan berbagai pihak, badan pekerja KNIP mengusulkan agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, 16 Oktober 1945. Usulan tersebut diterima baik oleh pemerintah yang disusul dengan keluarnya maklumat 3 November 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik, dan berharap mereka dapat terbentuk sebelum penyusunan Badan Perwakilan Rakyat yang direncanakan dibentuk Januari 1946. KNIP juga mengusulkan agar diberikan hak legislatif sebelum Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbentuk.

Setelah melalui beberapa kali pembahasan oleh Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sjahrir, susunan pemerintahan parlementer ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan tersebut, menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab pada presiden tapi pada parlemen. Ini mengawali perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer. Perubahan tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga kewibawaan Dwi-Tunggal, Soekarno-Hatta sebagai tokoh pemersatu.[103]

---

[102] Berdirinya KNIP sebagai parlemen sementara menjadi momentum kekerasan politik pertama kali dan jangka panjang, yang ditandai dengan perbenturan birokrasi kekuasaan dengan gerakan Persatuan Perjuangan (PP) di bawah Tan Malaka. Simak kembali Nasution "Aspirasi Kemerdekaan...", p. 39.

[103] P.N.H. Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi***, (Jakarta: Djambatan, 2003), p. 19-22. Hatta

Badan Pekerja KNIP kemudian menunjuk Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin untuk membentuk kabinet dan disetujui oleh wakil presiden, di mana pada saat itu presiden sedang berada di luar kota. Sjahrir membentuk kabinet yang sebagian besar menteri-menterinya terdiri dari kalangan profesional pada jamannya di samping beberapa wakil partai. Setelah diresmikan 23 November 1945, kabinet Sjahrir mulai menjalankan tugas melaksanakan program-programnya, termasuk memulai kontak diplomatik dengan pemerintah Belanda dan Inggris. Hanya saja, selain diwarnai beberapa kali pergantian tiga pos kementrian dan penambahan kementrian agama sejak 5 Desember 1945 sampai 4 Januari 1946, kabinet Sjahrir juga berhadapan dengan kelompok oposisi yang menyebabkan kabinet ini hanya bertahan kurang dari tiga setengah bulan.[104]

Pemerintahan Sjahrir berlangsung di tengah pertempuran yang berkecamuk di berbagai tempat antara pejuang-pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris dan Belanda. Memburuknya kondisi keamanan bahkan memaksa presiden dan wakilnya harus pindah ke Yogyakarta. Di tengah serangkaian perundingan dengan Belanda dan Inggris yang berlangsung alot, serta diselingi pertempuran demi pertempuran, kondisi politik dalam negeri berkembang semakin memburuk oleh krisis politik. Beberapa kelompok tidak setuju atas penunjukan Sjahrir sebagai formatur kabinet. Kubu oposisi di bawah pimpinan Tan Malaka yang menamakan diri Persatuan Perjuangan (PP) yang sejak awal menginginkan posisi sebagai pemimpin pemerintahan, bahkan menggantikan kedudukan Soekarno sebagai

---

menjelaskan bahwa pada masa itu bangsa Indonesia dipandang masih membutuhkan Dwi-Tunggal sebagai tokoh yang kewibawaannya dapat menjadi pemersatu, dan bukan atas kehendak yang dibuat dalam rangka membangun *privillage* pribadi. Dwi-Tunggal merupakan sesuatu yang harus dilakukan semata karena pertimbangan keadaan. Perjuangan kemerdekaan yang belum terkonsolidasi menjadikan masyarakat membutuhkan ketokohan dwi-tunggal sebagai figur pemersatu. Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 8.

[104] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 25-6. Simak juga Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 127-8.

presiden, berusaha menghambat jalannya pemerintahan Sjahrir dengan berbagai cara.[105]

Di pihak lain, pasukan Inggris harus berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Mereka berhadapan dengan berbagai perlawanan keras dan menjadi target penyerangan pejuang-pejuang Indonesia, padahal pada dasarnya mereka tidak berkepentingan dengan Indonesia. Alasan kehadiran mereka sebenarnya hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sampai pada pulihnya kembali pemerintahan Belanda, sementara situasi di lapangan tidak sesuai harapan. Indonesia secara hukum memang masih milik Belanda, tetapi realitas empiriknya tidak demikian. Karenanya, mereka berharap dapat segera mengakhiri keterlibatannya dalam kasus Indonesia.[106]

Perkembangan mutakhir menjadikan Belanda tak mudah memulihkan pemerintahannya atas wilayah ini secara sendirian. Pasukan-pasukan Belanda berusaha melakukan memprovokasi agar kaum pejuang bereaksi yang pada akhirnya memancing terjadinya instabilitas, sehingga pasukan Inggris tidak dapat menghindar untuk terlibat. Ketika situasi semakin tidak menguntungkan, Inggris menugaskan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa di Indonesia guna memfasilitasi perundingan, bersama dengan Wakil Gubernur Hindia-Belanda, H.J. Van Mook, sebagai wakil pemerintah Belanda. Pada perundingan pertama 10 Februari 1946, H.J. Van Mook menyampaikan pandangan politik pemerintahan Belanda atas Indonesia. Van Mook menegaskan kembali statemen ratu Belanda pada 7 Desember 1942. Belanda menyatakan keinginannya menjadikan Indonesia sebagai wilayah persemakmuran dengan pemerintahan sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda, dengan pemerintahan peralihan 10 tahun. Indonesia dijanjikan otonomi luas untuk mengurus masalah dalam negeri dan akan dimasukkan menjadi

[105] Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p.
[106] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 124.

anggota PBB, sementara masalah luar negeri diurus pemerintah Belanda.[107]

Lemahnya posisi yuridis negara Indonesia di kancah internasional memaksa pemerintah RI menawarkan berbagai konsesi demi pengakuan kedaulatan atas seluruh wilayah bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara. Sebagai konsesi atas pengakuan kedaulatan, pemerintah RI menawarkan akan mengembalikan atau mengganti aset-aset asing yang berada di bawah penguasaan RI. Di pihak lain, Belanda berharap bukan sekedar melindungi aset-asetnya di Indonesia, melainkan benar-benar berambisi kuat untuk menguasai Indonesia kembali, meski dengan berbagai perubahan sistem pengelolaan negara. Mereka selalu mengulang tawarannya yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran berbentuk federasi dengan pemerintahan sendiri.[108]

Belum lagi jawaban atas enam pasal pernyataan politik pemerintah Belanda diberikan, kabinet Sjahrir sudah mendapat oposisi dari kelompok Tan Malaka yang mengatasnamakan Persatuan Perjuangan (PP). Mereka menyatakan tidak puas atas sikap kabinet Sjahrir, dan menolak perundingan yang dilakukan pemerintah karena tidak sesuai syarat yang diharapkan. Kelompok Tan Malaka lebih memilih konfrontasi total dengan Belanda. Mereka mempersyaratkan perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan kemerdekaan penuh atas Indonesia tanpa tawaran apapun. Tan Malaka bahkan menuntut syarat penyitaan perkebunan dan industri-industri milik Belanda sebagai minimum programnya, sesuatu yang

---

[107] ***Ibid.***

[108] Para politisi Belanda menyesali penolakan terhadap tuntutan moderat Soetardjo dan mosi Wiwoho dan GAPI, hingga mengakibatkan keterputusan hubungan Indonesia dari Belanda. Mereka merasa telah menyakiti niat baik kaum pergerakan nasional yang sebenarnya ingin menyelamatkan hubungan Hindia Belanda, bahkan menjelang perang dengan Jepang. Simak Verkuyl, ***Ketegangan...***, p. 57-62.

tak mungkin diterima Belanda dan dipastikan dapat memacetkan jalannya perundingan.[109]

Tan Malaka berhasil mempengaruhi 137 organisasi, semua partai politik bahkan militer. Kemerdekaan penuh dan harga mati tanpa tawar-menawar di tengah meluapnya semangat heroik memungkinkan visi yang ditawarkanny menarik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ketika itu. Tan Malaka berhasil membangun dukungan kuat bagi sikap oposisinya, tidak hanya di parlemen melainkan juga di masyarakat kuas. Kuatnya oposisi dari kelompok Tan Malaka menyebabkan Sjahrir terpaksa menyerahkan mandatnya pada presiden.[110]

Sebenarnya manuver Tan Malaka tersebut didasari oleh ambisinya untuk menggantikan posisi Sjahrir, namun demikian presiden tetap menunjuk kembali Sjahrir untuk membentuk kabinet kembali. Presiden dan wakilnya lebih mempercayai Sjahrir yang garis politik diplomasinya sejalan dengan Soekarno-Hatta. Setelah membentuk kabinetnya kembali 12 Maret 1946, Sjahrir memberikan jawaban yang mengakomodasi pendapat kelompok PP, namun tetap saja sikapnya tidak memuaskan kelompok Tan Malaka. Kelompok Tan Malaka tetap memandang program-program Sjahrir tidak memuaskan dan memilih meneruskan oposisinya pada pemerintah. Peristiwa tersebut menandai awal pecahnya krisis politik yang akut di dalam negeri untuk pertama kalinya. [111]

Kerasnya sikap kelompok PP bahkan meningkat ke arah munculnya oposisi tidak sehat dan loyal, yang berpotensi melemahkan pemerintahan. Krisis politik tersebut membawa situasi

---

[109] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 27.

[110] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 125.

[111] Tan Malaka memanfaatkan Sjahrir yang sebelumnya menganggap Soekarno sebagai kolaborator kolonial, untuk mendukungnya menggantikan posisi Soekarno, tetapi Sjahrir yang telah banyak belajar politik semasa pendudukan Jepang dan menyadari pengaruh Soekarno di mata masyarakat republik. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 148-9.

negara sempat dinyatakan dalam keadaan bahaya. Kelompok PP berusaha melakukan usaha kudeta dengan jalan menculik perdana menteri yang mengakibatkan pemerintahan lumpuh dan harus diambilalih presiden, yang secara otomatis pemerintahan kembali berlangsung dengan sistem presidensiil. Untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar, tokoh-tokoh PP yang terlibat dalam tindakan-tindakan anarkhis: Tan Malaka, Sukarno, Abikusno Tjokrosujoso, Chaerul Saleh, Muh. Yamin, Suprapto dan Wondoamiseno ditangkap yang berakibat pada lumpuhnya organisasi ini dan kemudian dibubarkan 4 Juni 1946. Mereka terbukti berambisi merebut kedudukan dalam pemerintahan, melemahkan serta memecah-belah persatuan. Peranannya kemudian digantikan *Konsentrasi Nasional* yang loyal pada pemerintah.[112]

Meski berada di penjara, kelompok-kelompok yang berhasil dipengaruhi oleh Tan Malaka terus berusaha memaksa presiden membubarkan kabinet Sjahrir dan mengajukan dewan presidium yang mereka susun sendiri. Mereka juga berusaha menculik menteri pertahanan Amir Sjarifuddin, bahkan menyingkirkan presiden Soekarno, tetapi berhasil digagalkan. Tindakan kelompok Tan Malaka sempat membawa negara dalam situasi yang hampir-hampir mengantarkan pada perang saudara. Upaya presiden yang dilakukan dalam rangka penyelamatan kondisi negara sekaligus menggantikan posisi kabinet Sjahrir yang bubar dengan sendirinya, tanpa mekanisme parlementariat sebagaimana mestinya.[113]

Belanda memanfaatkan situasi politik yang runyam tersebut dengan melakukan tekanan berbagai politik maupun militer. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino dan Pangkal Pinang yang ditujukan untuk mempersiapkan negara-negara boneka atas wilayah-wilayah yang telah diserahkan oleh pasukan

---

[112] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 124-5. Simak pula Onghokham "Revolusi Indonesia...", p. 7-8.

[113] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 36-9.

Inggris dan Australia. Negara-negara baru tersebut diproyeksikan mampu menjadi pengimbang RI dalam wadah negara federasi. Di samping itu, Belanda memanfaatkan alotnya perundingan untuk mengirimkan pasukan ke wilayah Indonesia. Belanda tetap pada pendiriannya, menginginkan Indonesia sebagai bagian dari wilayah kerajaan Belanda, dan tetap berharap Indonesia tidak benar-benar lepas dari ikatan dengan negeri Belanda, sekalipun hanya dalam ikatan federasi. Karena itu, usulan Sjahrir atas nama pemerintah RI, sesudah kembali membentuk kabinet, yang pada prinsipnya menuntut pengakuan kedaulatan penuh atas seluruh wilayah bekas jajahan Hindia-Belanda, mengakhiri perang, dengan konsesi berupa kesiapan RI menanggung hutang-hutang Belanda kembali ditolak, dan berakhir kebuntuan.[114]

Perundingan kembali dilaksanakan dengan difasilitasi Inggris, yang ditengahi oleh Lord Killearn dengan melibatkan Tentara Republik Indonesia (TRI) dalam rangka membicarakan gencatan senjata dengan pasukan Sekutu, tapi juga mengalami kegagalan. Setelah kembali membetuk cabinet, Sjahrir III, perundingan kembali dilangsungkan pada 7 Oktober 1946 di Jakarta. Meski belum membawa hasil, perundingan ini berlanjut dengan perundingan Linggar Jati. Pada perundingan lanjutan tersebut diperoleh titik temu untuk dilanjutkan pada perundingan berikutnya. Perundingan mencapai kemajuan dengan munculnya kesepakatan gencatan senjata dan ditandatanganinya persetujuan Linggar Jati 10 sampai dengan 15 November 1946. Berdasarkan perjanjian Linggar Jati, Indonesia berubah menjadi negara federasi menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk bersama-sama dengan Belanda.

Republik Indonesia menjadi semakin eksis meski dengan pengakuan *De Facto* atas wilayah Jawa dan Sumatera. Diplomasi Indonesia mencapai satu tingkat kemajuan setelah perjanjian Linggar Jati, 24 maret 1947, di mana perjuangan RI mulai mendapat

[114] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 124-5.

pengakuan *De Facto* dari pemerintah Belanda dan membuka selubung masalah Indonesia dari sekedar masalah dalam negeri Belanda menjadi masalah Internasional. Namun demikian, tampaknya pandangan Tan Malaka sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran mayoritas anggota parlemen, hingga untuk ketiga kalinya, hasil perundingan tidak dapat diterima oleh sebagian anggota KNIP, seperti Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Communis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Lasykar Rakyat Jawa Barat dan Partai Rakyat Jelata.[115]

Agar naskah perjanjian diratifikasi dan menghindari jatuhnya pemerintahan untuk ketiga kalinya, presiden turun tangan dengan mengubah sepihak keanggotaan KNIP. Melalui peraturan No. 6/1946 presiden menambah keanggotaan KNIP pusat, di mana pejabat negara yang masih aktif dibebaskan sebagai anggota, menyerukan partai-partai besar memilih calonnya dua kali lipat dari jumlah perwakilan mereka, serta penambahan wakil-wakil dari luar Jawa dan Madura, dengan alasan penambahan anggota akan menjadikan KNIP lebih sempurna dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sidang keputusan Badan Pekerja yang semula menentang tindakan presiden pada akhirnya dapat menerima keputusan presiden.[116]

Dengan langkah tersebut KNIP meratifikasi naskah persetujuan Linggar Jati. Rupanya pihak Belanda sendiri tidak konsisten dengan perjanjian tersebut dengan melakukan pelanggaran gencatan senjata, serta mengajukan nota yang isinya merugikan pihak RI. Namun demikian, pemerintah Sjahrir menyetujui beberapa poin perubahan meski beberapa di antaranya tidak sesuai dengan naskah persetujuan Linggar Jati. Melihat sikap Sjahrir yang dinilai terlalu lunak banyak partai politik menarik dukungan, termasuk partainya sendiri dan berakibat Sjahrir harus menyerahkan mandatnya pada presiden untuk

---

[115] ***Ibid.***, p. 126-7. Kelompok yang menolak penandatanganan perjanjian Linggar Jati menamakan diri Benteng Republik. Simak Deliar Noer, ***Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)***, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), p. 167.

[116] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 132-3.

ketiga kalinya. Sebagai pengganti, presiden menunjukkan Amir Sjarifuddin untuk membentuk kabinet, yang kemudian terlibat dalam perjanjian-perjanjian berikutnya. [117]

Penyelesaian melalui jalur perundingan memperlihatkan adanya perbedaan dua garis perjuangan di antara tokoh-tokoh politik di Indonesia. Kelompok pertama terdiri dari kalangan moderat yang berupaya menyelesaikan masalah dengan jalan perundingan dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Kelompok berikutnya terdiri dari kalangan reaksioner yang demi menolak kembalinya penjajahan dalam segala bentuk, mematok harga mati sebagai syarat perundingan. Padahal Pada umumnya perundingan menuntut adanya kompromi-kompromi bahkan konsesi-konsesi yang membutuhkan langkah berbelit-belit agar setiap pihak bersedia duduk bersama dalam satu meja. Padahal pemerintahan Sjahrir juga menempatkan pengakuan kedaulatan sebagai poin penuh yang hendak dicapai sebagai jalan menuju terbentuknya negara berdaulat. [118]

Perjanjian ini menjadi sangat penting artinya. Sekalipun pihak Indonesia dalam perjanjian Linggar Jati mengobral konsesi, tapi satu poin penting berupa pengakuan kedaulatan secara *De Facto* Belanda akan melindungi masyarakat bangsa ini dari tindakan yang lebih keras dari Belanda. Dengan adanya pengakuan *De Facto*, negara adi-daya dan badan dunia, PBB, mempunyai alasan untuk melibatkan diri bila terjadi konflik bersenjata, yang secara otomatis melahirkan perlindungan internasional. Hanya saja, konflik kepentingan politik praktis sudah menggejala di awal sejarah KNIP dengan mengeksploitasi perhitungan jangka pendek. Kewibawaan Soekarno-Hatta saja yang mampu meredam konflik-konflik kepentingan berkembang menjadi tindakan anarkhis. Dwi-Tunggal, Soekarno-Hatta, benar-benar menjadi simbul persatuan dan nasionalisme. KNIP tidak dapat menolak meratifikasi perjanjian Linggar Jati, sebab selain

[117] ***Ibid.***, p. 134.
[118] ***Ibid.***, p. 134-5.

melalui instrumen peraturan pemerintah yang mengubah susunan keanggotaan KNIP, pada bulan Februari 1947 Soekarno-Hatta, mengancam akan mengundurkan diri bila naskah perjanjian tidak diratifikasi.[119]

Dengan alasan perbedaan penafsiran, Belanda menarik diri dari perjanjian yang telah disepakati dan melakukan serangan militer besar-besaran ke pusat pemerintahan RI 21 Juli 1947 yang terpaksa ibukota dipindahkan ke Yogyakarta. Karena status merdeka secara *De facto*, aksi militer 21 Juli 1947 tidak lagi dipandang sebagai urusan dalam negeri Belanda, meski sebelumnya Belanda sudah manarik diri dari perjanjian. Setelah Belanda melakukan Agresi Militer, reaksi internasional semakin kuat, sehingga semakin meningkatkan reaksi internasional yang lebih besar di mana pemerintah India dan Australia secara resmi mengajukan agar masalah Indonesia dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB.[120]

Sejak Januari 1946, Uni Sovyet sebenarnya sudah mengusulkan agar PBB campur tangan dalam kasus Indonesia, tapi belum cukup didengar. Keterlibatan organisasi internasional yang kian intensif sejak agresi militer tersebut lebih banyak menguntungkan Indonesia dibanding Belanda. Masalah Indonesia tidak lagi dianggap sebagai masalah domestik, internal Belanda, melainkan masalah antar bangsa dengan munculnya resolusi PBB yang memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak. Di samping solidaritas negara-negara bekas jajahan, dukungan atas pengakuan kemerdekaan negeri ini menjadi agenda mendesak untuk diwujudkan.[121]

---

[119] Kahin, ***Nasionalism anda Revolution...***, 202-203.

[120] Tidak kurang Amerika Serikat dan Inggris yang semula berada di pihak Belanda sangat kecewa dengan keputusan Belanda. Simak ***Ibid.***, p. 213-4.

[121] Sejak 1946Uni sovyet merupakan negara asing pertama yang mengusulkan masalah Indonesia masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB, dan terus memberikan dukungan terbesar paling tidak hingga peristiwa Madiun. Simak J. soedjati Djiwandono "Perubahan Persepsi tentang Uni Sovyet..." dalam ***Jurnal Ilmu Politik***, 2, p. 60.

Upaya Belanda merebut kembali Indonesia melalui agresi militer telah mengakibatkan konflik Indonesia-Belanda masuk menjadi agenda Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Persoalannya beralih lagi dari sekedar masalah legalitas status Indonesia sebagai milik Belanda menjadi masalah internasional. Isu hak asasi manusia yang dicetuskan cikal bakal lembaga internasional, PBB, serta mulai menghangatnya situasi perang dingin telah menghilangkan momentum Belanda untuk menguasai wilayah ini, dan memaksanya duduk berhadapan dengan wakil-wakil Indonesia dari meja perundingan ke meja perundingan lain, di antaranya melalui Komisi Tiga Negara (KTN) dan perjanjian *Renville*.[122]

Fragmentasi politik dalam KNIP mengakibatkan kabinet Amir Sjarifuddin sempat melakukan *reshuffle* di tengah jalan saat perundingan sedang berlangsung dengan harapan akan terbentuk koalisi yang kuat. Setelah kabinet menyetujui hasil perjanjian *Renville*, Amir Sjarifuddin kembali mendapat mosi tidak percaya dari parlemen dan harus menyerahkan kembali mandatnya 23 januari 1948. Presiden kemudian menunjukkan Mohammad Hatta untuk menyusun Kabinet. Hatta berupaya menggalang persatuan nasional dengan mengikutsertakan semua partai dalam kabinet. Hatta menunjuk Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegasi RI dalam perundingan *Renville*, .[123]

Di tengah perundingan yang alot, terjadi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan tersebut tampaknya merupakan buntut penangkapan atas kelompok Tan Malaka terutama dari kalangan PKI, dan memperlihatkan puncak dari ambisinya yang terlalu besar pada kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Dijadikannya kesediaan pemerintah berunding dengan Belanda sebagai alasan untuk memberontakan merupakan hal yang mengada-ada, sebab situasi politik yang dihadapi memang mengharuskan demikian. Selain itu,

---

[122] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 139-144
[123] ***Ibid.***, p. 150-2.

hasil perundingan Renville yang ditentang PKI adalah hasil kepemimpinan tokohnya sendiri, Amir Sjarifuddin.[124]

Selain mengerahkan pasukan, untuk meredam meluasnya pemberontakan Soekarno melalui radio mengancam akan mengundurkan diri bila rakyat mendukung gerakan PKI di Madiun. Dengan ancaman tersebut, PKI yang memiliki basis dukungan luas di berbagai daerah harus berjalan sendiri, dan pasukan pemerintah dapat menumpas gerakan tersebut dalam waktu singkat. Di pihak lain, bekunya PKI turut meredakan potensi munculnya oposisi terhadap kabinet Hatta. Namun di sisi lain, hubungan Indonesia dengan Uni Sovyet mengalami kerenggangan karena berkembang opini bahwa Sovyet ada di balik peristiwa Madiun.[125]

Instabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia dinilai Belanda sebagai pertanda lemahnya pemerintahan RI, dan sebagai peluang untuk melakukan tindakan ofensif. Karena itu, perundingan-perundingan selanjutnya cenderung diarahkan pada jalan buntu. Pemerintah Belanda dengan berbagai dalih menafikan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Hal ini disadari pemerintah RI bahwa Belanda akan memilih melakukan penyerangan besar-besaran dalam jangka dekat. Dalam rangka menghadapi pertempuran dan mempertahankan pemerintahan, pemerintah memberikan mandat

[124] Onghokham "Pemberontakan Madiun 1948: Drama Manusia dalam Revolusi" dalam ***Prisma***, No. 7, Agustus 1978. Fron Demokrasi Rakyat mencela hasil perundingan Renville yang dirundingkan sendiri oleh Amir Sjarifuddin. Simak juga Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 67.

[125] Melihat luasnya dukungan rakyat terhadap PKI, Soekarno berpidato denga menawarkan opsi sederhana, memilih Soekarno atau Muso, dan mengakibatkan rakyat menarik dukungan mereka terhadap gerakan PKI. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 292-3. Peristiwa Madiun terjadi setelah satu bulan kepulangan Muso dari Uni Sovyet, yang karenanya muncul kecurigaan terhadap Moscow dalam peristiwa tersebut. Simak George McTurnan Kahin "Some Recollection and Reflection on The Indonesian Revolution" dalam ***Indonesia, Cornell Southeast Asia Program***, No. 60, 1995, p. 6.

pada Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).[126]

Belanda benar-benar melakukan tindakan militer besar-besaran beberapa hari kemudian, agresi kedua kalinya 19 Desember 1948. Presiden dan wakil presiden yang memilih tetap tinggal di kota akhirnya ditawan tentara Belanda. Tentara Nasional yang memang kalah dalam persenjataan memilih tidak melayani serangan Belanda dengan pertahanan *linier*. Di bawah pimpinan jenderal Soedirman, mereka membangun strategi perang gerilya yang mengakibatkan kekuasaan Belanda hanya terkonsentrasi di jalur-jalur utama dalam posisi defensif.[127]

Serangan Belanda tersebut memicu reaksi luar biasa dari masyarakat internasional. Sebulan kemudian PPB mengeluarkan resolusi yang disetujui semua anggota, yang menyatakan seruan penghentian permusuhan, pembebasan presiden dan pemimpin-pemimpin RI, serta KTN diperintahkan untuk memberikan laporan mengenai situasi di Indonesia sejak 19 desember 1945. Reaksi internasional semakin meningkat, khususnya atas dukungan negara-negara anggota Konferensi Asia yang dimotori India. Peserta konferemsi tersebut merupakan unsur yang cukup besar dalam keanggotaan PBB, yang memungkinkan Dewan Keamanan memberikan perhatian khusus atas tuntutan mereka. Tidak lama kemudian KTN kemudian diubah tidak sekedar lembaga mediator, melainkan misi khusus PBB dengan nama UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*).[128]

Dunia Islam sendiri banyak memberikan dukungan pada Indonesia, tetapi bukan dalam relasi keagamaan, Islam, melainkan karena kesamaan sejarah sebagai bekas negara jajahan. Afganistan, Mesir, Iran, Iraq, Pakistan, Saudi Arabia dan Suriah merupakan

---

126 Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 156-160.
127 ***Ibid.***, p. 160-1.
128 ***Ibid.***, p. 162-9.

beberapan negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang turut memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, paling tidak melalui wadah konferensi Asia, yang kemudian melahirkan resolusi PBB untuk Indonesia. Resolusi tersebut untuk pertama kalinya menentukan dengan jelas garis dan jangka waktu penyerahan kedaulatan.[129]

Pilihan para pemimpin RI untuk bertahan di kota saat agresi berlangsung menjadi kartu terakhir kemenangan revolusi sejak pengakuan *de facto*. Penguasaan ibu kota RI secara militer oleh Belanda justeru menjadi jalan kekalahannya, sebab justeru membuat belanda kehilangan muka di dunia internasional. Belanda banyak mendapat tekanan dunia, bahkan Amerika Serikat mengancam akan mencabut bantuannya, *Marshall Plan* bagi Belanda. Kekhawatiran akan jatuhnya Indonesia di bawah pengaruh Uni Sovyet membuat Amerika kian aktif mengambil inisiatif dalam memuluskan jalan bagi kemerdekaan RI.[130]

Setelah keterlibatan PBB semakin intensif, jalan lapang bagi pengakuan kemerdekaan semakin terbuka. Perundingan-perundingan selanjutnya berjalan jauh lebih mudah dibanding sebelumnya dan berpuncak dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), di mana syarat-syarat penyerahan kedaulatan yang seluruhnya dengan mudah diterima pemerintah RI disusun dan dipersiapkan. Negara Republik Indonesia yang berdaulat sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya telah berdiri secara legal, meski dengan status negara perserikatan, Republik Indonesia Serikat (RIS), dan masih menyisakan Irian Jaya sebagai daerah sengketa.[131]

[129] ***Ibid.***, p. 170-1.

[130] George McTurnan Kahin "Some Recollection and Reflection on The Indonesian Revolution" dalam ***Indonesia; Cornell Southeast Asia Program***, No. 60, October 1995, p. 6.

[131] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI.***, p. 172.

Kilasan sejarah di muka menunjukan bahwa usaha menegakkan kemerdekaan harus melalui jalan berliku. Di samping ancaman kembalinya kekuasaan Belanda, persepsi, pola pikir dan kepentingan politik masyarakat dalam negeri juga menjadi masalah yang menyulitkan soliditas kekuatan nasionalis. Di dalam negeri terdapat perbedaan pola pikir yang tajam di kalangan kaum revolusioner dalam hal pilihan strategi perjuangan. Soekarno dan mereka yang terlibat perundingan dihadapkan pada rumitnya konstelasi yang dihadapi, sementara mereka yang berada di lembaga politik dan lapangan pertempuran selalu berharap dapat membalikkan situasi sekali jadi. Karena itu, setiap hasil yang dicapai di meja perundingan yang tidak pernah sesempurna harapan cenderung melahirkan respon reaksioner. Di samping itu, meski belum benar-benar mampu menandingi kharisma Soekarno, banyak kelompok yang mulai menampakkan ambisi politik jangka pendek, dengan memanfaatkan situasi dan isu-isu politik.[132]

Militansi nasionalisme menyebabkan setiap kelompok merasa lebih mampu menyelesaikan masalah dibanding yang lain. Bagi kaum reaksioner, kekuatan senjata dipandang lebih menjamin penyelesaian dibanding cara-cara politis yang berbelit dan terkesan membuang waktu, sekalipun mereka yang berada di medan pertempuran hampir selalu dalam posisi terdesak. Kalangan reaksioner berharap memperoleh pengakuan kedaulatan secara mutlak dalam waktu singkat, tanpa membuka kesempatan tawar-menawar. Akibatnya setiap keputusan hanya disikapi dengan pilihan diterima atau ditolak. Meski dampak dari diplomasi tampak jelas dengan berkembangnya dukungan internasional dan PBB, tapi relatif kurang diapresiasi dalam sejarah nasional Indonesia. Dukungan internasional yang sedemikian

---

[132] Situas politik dan keamanan yang dipenuhi semnagat nasionalisme dan berakumulasi dengan munculnya kelompok kepentingan seperti kelompok Tan Malaka menyebabkan mekanisme konstitusional lumpuh, tidak berdaya dalam membangun konsensus nasional yang kuat secara sehat. Simak Nasution “Aspirasi kemerdekaan...”, p. 39-40.

besar tidak dipandang sebagai bukti keberhasilan diplomasi, bahkan dicatat sebagai diplomasi yang gagal. Para pejuang bersenjata sendiri tidak pernah merasa bahwa mereka hanya sekedar instrumen diplomasi itu sendiri.[133]

Keberhasilan diplomasi kurang dipandang berkontribusi bagi kemerdekaan RI, meskipun perjuangan bangsa ini banyak ditentukan oleh diplomasi. Akibatnya, jasa pejuang bersenjata lebih dihargai dibanding jasa para diplomat. Pengalaman militer di lapangan sering kali menafikan hasil-hasil yang dicapai oleh para diplomat dalam penyelesaian masalah Indonesia-Belanda di meja perundingan, karena pengalaman konfrontasi bersenjata dengan serangkaian gelora heroik, tragedi kekalahan dan kemenangan lebih menggema dibanding hasil yang diperoleh dari langkah-langkah strategis diplomasi. Ini juga memberikan gambaran bahwa pada dasarnya mayoritas masyarakat masih lebih menghargai kerja fisik dibanding kerja pikir sekalipun nilai yang dihasilkan lebih besar. Sebaliknya, sekecil apapun cita rasa kemenangan perang tampaknya lebih terasa gaungnya dibanding kemenangan diplomasi.[134]

Hingga pengakuan kedaulatan 1949 praktis politik di Indonesia tidak memiliki kesempatan memikirkan pembangunan tatanan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya secara jernih. Energi perhatian mereka tercurahkan habis untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara, di samping untuk berkonflik dengan sesama kaum nasionalis revolusioner. Kegagalan dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan strategi perjuangan menyebabkan

---

[133] Betatapun besar hasil yang diberikan, perspektif sejarawan militer menilai proses diplomasi yang dilakukan sejak Sjahrir sampai Hatta sebagai Strategi Diplomasi yang Gagal. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 139-0.

[134] Kehadiran kelompok-kelompok bersenjata di masa revolusi menciptakan rasa berjasa secara luas dan seolah lebih berarti dibanding yang lain. Simak David Bourchier "Dekade 1950-an dalam Ideologi dan Politik Orde Baru" dalam David Bourchier dan J. Legge, eds., ***Demokrasi di Indonesia Tahun 1950-an dan 1990-an***, terjemahan n.n. (Melbourne: Monash University Centre of Southeast Studies, t.t.), p. 5.

letupan nasionalisme tersebut juga mengarah pada terjadinya fragmentasi politik antar sesama kaum revolusioner. Di tengah situasi yang sangat genting, soliditas politik yang semestinya menjadi faktor pendorong ternyata justeru berada pada situasi sebaliknya. Hal ini dikarenakan sejak dari awalnya infrastruktur sosial politik yang dibentuk masih sangat lemah dan rawan perpecahan. Perbedaan tajam visi perjuangan dan pemahaman atas realitas politik menyebabkan anggota-anggota KNIP selalu bermusyawarah untuk tidak menemukan kata mufakat. Situasi ini diperburuk oleh kepentingan kelompok tertentu yang sangat berambisi mengambilalih kekuasaan.[135]

Diterapkannya demokrasi liberal menjadikan mekanisme parlementariat digunakan secara tidak proporsional oleh hampir seluruh pelaku di dalamnya. Setiap keputusan hanya bersifat pilihan antara keputusan satu kelompok atau kelompok lain, diterima atau ditolak, tanpa kemungkinan *sharing* pemikiran secara rasional. Siapapun yang duduk di pemerintahan akan menghadapi resiko pasti, penolakan dan mosi tidak percaya. Dengan pola komunikasi politik yang bersifat tertutup dan mengedepankan kepentingan semacam itu, kesepakatan bulat yang layak dijadikan keputusan yang dapat diatasnamakan seluruh elemen bangsa sulit dibangun.[136]

---

[135] Simak kembali Nasution "Aspirasi kemerdekaan...", p. 39-40.

[136] Keadaan ini nantinya memberi sumbangan keyakinan para pengelola republik ini bahwa demokrasi liberal dan liberalisme secara keseluruhan tidak cocok dengan kepribadian nasional. Simak kembali Bourchier dan Legge, "Dekade 1990-an...", p. 1.

Tabel 1

KRONIKA PERGANTIAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN SELAMA MASA REVOLUSI

Periode	Pemimpin Negara	Sistem Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
18 Agust. '45 s.d. 23 Nov. '45	Soekarno-Hatta	Presidensiil	Pergantian sistem Parlementer
23 Nov. '45 s.d. 28 Pebr. '46	Sjahrir I	Parlementer	Mundur akibat tekanan oposisi
28 Pebr. '46 s.d. 3 Maret '46	Sjahrir I Demisioner	Parlementer	-
3 Maret '46 s.d. 29 Juni '46	Sjahrir II	Parlementer	Penculikan kelompok Tan Malaka
29 Juni '46 s.d. 14 Agust. '46	Soekarno-Hatta	Presidensiil (darurat)	-
14 Agust. '46 s.d. 27 Juni '47	Sjarir III	Parlementer	Keberatan hasil perundingan
27 Juni '47 s.d. 3 Juli '47	Sjahrir I Demisioner	Parlementer	-
3 Juli '47 s.d. 3 11 Nov '47	Amir Sjarifuddin I	Parlementer	Reshuffle kabinet karena Masyumi tidak disertakan.
11 Nov. '47 s.d. 23 Jan. '48	Amir Sjarifuddin II	Parlementer	Keberatan hasil perundingan

23 Jan '48 s.d. 15 Sept, 1948	Kabinet Hatta	Parlementer	Keadaan Darurat/ Pemberontakan PKI
15 Sept '48 s.d. 15 Des, 1949	Soekarno-Hatta	Presidensiil	-
15 Des'48 s.d. 19 Des, 1948	Hatta I	Parlementer	Keadaan Darurat/ Agresi Militer Belanda
19 Des'48 s.d. 13 Juli, 1949	Sjarifuddin Prawiranegara (PDRI)	Pemerintah Darurat	-
13 Juli'48 s.d. 14 Des, 1949	Hatta I	Parlementer	Perubahan RI menjadi RIS

PERGULATAN POLITIK ERA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

A. Problem Pasca Pengakuan Kedaulatan

Pemerintah Belanda akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949, setelah dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 2 November 1949 disetujui berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang tergabung ke dalam *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), yaitu badan musyawarah negara-negara federal bikinan Belanda. Dalam konferensi tersebut untuk kedua kalinya struktur pemerintahan Indonesia berubah menjadi negara federasi yang terdiri dari 16 negara bagian, dengan menyisakan Papua Barat sebagai daerah sengketa. Sebagai calon tunggal, akhirnya Soekarno ditetapkan sebagai Presiden, yang kemudian melantik Hatta sebagai Perdana Menteri RIS. [1]

Para tokoh republik menyadari bahwa pembentukan negara serikat merupakan strategi Belanda mempertahankan sisa daerah jajahannya di Papua Barat. Keberadaan negara-negara baru yang

---

[1] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 173. Simak juga Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 93.

terdiri dari kepulauan yang luas dengan disparitas sosial ekonomi dan politik, serta pluralitas etnis di wilayah ini potensial menciptakan konflik disitegrasi. Perpecahan potensial terjadi di tubuh RIS dan memungkinkan wilayah Indonesia terbagi menjadi negara-negara kecil. Bila hal itu terjadi, maka negara bagian RI yang hanya meliputi sebagian pulau Jawa tidak memiliki kemampuan dan cukup legalitas untuk menuntut penyerahan kembali Papua Barat. Sedangkan pengakuan kemerdekaan penuh dari Belanda dan dunia internasional saja sudah merupakan awal baru yang tidak lebih mudah. Padahal selain harus menjaga keutuhan wilayah, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada kompleksitas problem sosial, ekonomi, politik bahkan ideologi yang dengan sendirinya akan menambah beban masalah bagi negara baru ini. [2]

Sebagai pilihan strategis, Hatta membentuk kabinet kerja, *Zaken Kabinet*, di mana anggota-anggotanya diangkat berdasarkan keahlian, dan bukan koalisi partai-partai politik. Selain dengan pertimbangan kebutuhan akan tenaga ahli untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks, *Zaken Kabinet* juga dimaksudkan sebagai upaya mempermudah proses unifikasi RIS. Hal ini terlihat dari formasi anggota kabinet yang mayoritas dipilih dari kalangan pendukung unitarisme. Hanya Sultan Hamid dan Anak Agung Gede Agung, dua orang pendukung federalisme yang diberikan tempat dalam kabinet.[3]

Banyak agenda besar yang menuntut segera diselesaikan oleh kabinet ini. Sebagian masalah dapat diselesaikan segera, sebagian yang lain tidak dapat dituntaskan dan sebagian lagi harus berhadapan dengan dilematisnya berbagai dampak dari setiap kebijakan. Meski dengan menyisakan banyak persoalan, kurang dari satu tahun negara

[2] Perluasan pemerintahan ke dalam RIS menyebabkan banyak pihak yang sebelumnya tidak ikut dalam perjuangan kemerdekaan, atau bahkan anti terhadap gerakan kemerdekaan menduduki posisi-posisi strategis. Simak Nasution "Aspirasi Kemerdekaan...", p. 41.

[3] Herbert Feith, ***The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia***, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1978), p. 47.

RIS dapat diubah menjadi negara kesatuan RI. Skenario Belanda menanamkan benih disintegrasi cukup berhasil dengan munculnya penolakan terhadap unifikasi yang disertai pemberontakan di beberapa daerah. Realisasi dari pembentukan negara kesatuan disusul oleh beberapa peristiwa pemberontakan. Isu-isu etnis dan primordial mengemuka, meski pada dasarnya pemberontakan terjadi akibat akumulasi berbagai persoalan yang saling terkait. [4]

Perang kemerdekaan mencetak penyumbang jasa yang secara terang-terangan ataupun tidak menuntut kesiapan negara untuk memberikan penghargaan, sementara kemampuan negara masih sangat terbatas. Blokade Belanda selama perang revolusi kemerdekaan meninggalkan dampak ekonomi jangka panjang, padahal pemerintah dituntut untuk meningkatkan kembali laju perekonomian di tengah infrastruktur yang porak-poranda akibat perang, mengatasi keterpurukan ekonomi, defisit anggaran dan inflasi yang meningkat tajam hingga mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan pemotongan uang.

Sebagai upaya mengurangi beban keuangan negara, pemerintah terpaksa melakukan rasionalisasi tentara, sebab dengan berakhirnya perang jumlah personil tentara yang terlalu banyak baik dari kalangan TNI ataupun pasukan-pasukan milisi yang direkrut pemerintah. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya rehabilitasi para mantan perjuang. Namun demikian, kebijakan ini tak dapat menghindarkan munculnya kekecewaan pada banyak orang, terutama yang merasa sudah cukup menyumbang jasa pada negara.[5]

Kemampuan Hatta dan anggota kabinet yang terdiri dari kalangan ahli dan administratur menjadikan masalah-masalah tersebut segera teratasi. Namun demikian, di tengah upaya rasionalisasi, pemerintah harus membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai bagian dari tindak lanjut

---

[4] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 206.

[5] ***Ibid.***, p. 207.

keputusan KMB, yang unsur-unsurnya terdiri dari gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bekas tentara Belanda dari kalangan pribumi (KNIL) yang jumlahnya sekitar 33.000 orang. Selain kian memberatkan keuangan negara, penggabungan tersebut juga menimbulkan problem psikologis tersendiri, yang mengakibatkan munculnya konflik internal dalam angkatan perang. [6]

Pihak TNI keberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, sementara pihak KNIL menghadapi beban moral berhadapan dengan TNI. Untuk menghindari beban tersebut, mantan pasukan KNIL berharap ditempatkan sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara federal, dan menuntut TNI tidak terlibat di negara bagian. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok reaksioner KNIL menjadi ganjalan dalam proses reunifikasi RIS ke dalam negara kesatuan. Keharusan penempatkan mereka bersama TNI, dan sangat mungkin di bawah kendalinya, menyebabkan mantan KNIL berdiri sebagai benteng penolakan terhadap unifikasi di beberapa daerah.[7]

Dengan mengangkat isu berbeda-beda, banyak bekas pasukan KNIL terlibat dalam memotori beberapa peristiwa pemberontakan. Di antara yang paling menonjol adalah gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Jawa Barat yang menuntut diakui sebagai pasukan negara Pasundan dan menolak pembubaran negara tersebut. Gerakan serupa muncul di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat di bawah pimpinan Sultan Hamid dan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan mantan pasukan KNIL terutama terjadi akibat gencarnya usaha pemerintah memerangi penyelundupan komoditas ekspor yang biasa dilakukan tentara di Sumatera dan Kalimantan Barat. Mantan pasukan KNIL juga memotori pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dengan mengangkat isu etnis.[8]

---

[6] ***Ibid.***

[7] ***Ibid.***, p. 108.

[8]***Ibid.*** Pemberontakan RMS selengkapnya dapat dibaca R.Z. Lairissa "Pemberontakan Republik Maluku Selatan" dalam ***Prisma***, No. 7, Agustus 1978.

Di Jawa Barat juga terjadi pemberontakan dengan mengangkat isu agama, yang melahirkan gerakan *Darul Islam* (DI) dengan tentaranya yang terkenal, Tentara Islam Indonesia (TII). Di kota Tasikmalaya, Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia dan berusaha menghalangi pasukan TNI kembali ke Jawa Barat. Mareka juga berusaha menarik anggota TNI untuk turut bergabung dengannya dan berhasil membangun pengaruh pada sebagian kalangan Islam. Gerakan ini dapat ditumpas meski memakan waktu lama. Di masa-masa sesudahnya, munculnya gerakan DI/TII yang menandai dimulainya kekhawatiran terhadap ancaman kelompok yang mendambakan berdirinya negara Islam di Indonesia.[9]

Praktis, setelah pengakuan kedaulatan situasi politik dan keamanan Indonesia berada pada posisi kritis dan sangat labil. Meski dalam skala yang tidak terlalu besar, perang saudara tak terhindarkan akibat maraknya pemberontakan di beberapa daerah. Masalah pembebasan Papua Barat dan penyelesaian politik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi agenda besar yang terkatung-katung penyelesaiannya. Selain merebaknya problem-problem disintegrasi, keterpurukan ekonomi serta labilnya politik dan pemerintahan yang menyeruak kembali di tubuh KNIP menyebabkan penyelesaian masalah Papua Barat dan Pemilu mengalami penundaan begitu lama.[10]

Setelah pergantian sistem pemerintahan ketiga kalinya, unitarisme RIS ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia juga diikuti dengan perubahan konstitusi untuk ketiga kalinya dengan dibarlakukannya Undang-undang Dasar Semestara (UUDS) 1950. Indonesia memasuki awal kehidupan sebuah negara normal, meski sebenarnya justeru memasuki fase perkembangan situasi yang lebih rumit. Situasi sosial politik semakin kompleks dengan tingkat ketajaman friksi sosial politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari proses kemerdekaan yang diperoleh melalui

[9] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 86.
[10] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 206.

revolusi panjang dan melibatkan berbagai kekuatan yang tak terkonsolidasi.[11]

B. Fragmentasi Politik Pasca Perang

Ketika Hatta menjadi perdana menteri RIS, Soesanto Tirtoprodjo menjabat sebagai perdana menteri Republik Indonesia (RI) sebagai pejabat sementara (*acting*) Perdana Menteri, sedangkan jabatan presiden ditunjuk pejabat sementara, Mr. Assaat. Setelah kabinet Soesanto mengakhiri masa tugasnya (demisioner) 16 Januari 1950, *acting* presiden Assaat menunjuk Natsir, Soesanto Tirtoprodjo dan Abdul Halim sebagai formatur kabinet. Karena persoalan pembagian kursi, kabinet Halim semula mengalami hambatan, tapi akhirnya terbentuk, dan berhasil membantu unifikasi RIS ke dalam negara kesatuan RI. Jabinet Halim demisioner sejak 15 Agustus 1950, bersamaan dengan bubarnya RIS. Halim mengembalikan mandatnya kepada *acting* presiden, dan disusul pengembalian mandat *acting* presiden Assaat kepada Presiden RI.[12]

RIS kembali menjadi negara kesatuan setelah unifikasi. Soekarno tetap menduduki jabatan Presiden, sementara Hatta baru menduduki jabatan wakil presiden kembali setelah melalui pemilihan 14 Oktober 1950. Setelah melakukan *hearing* dengan partai-partai politik, Soekarno menunjuk Natsir sebagai formatur kabinet sesaat setelah inagurasi unifikasi RIS, 17 Agustus 1950. Natsir berupaya membangun kabinet yang kuat dengan dukungan sebanyak mungkin partai politik agar mencerminkan persatuan nasional, serta

[11] Dalam hal ini Feith membandingkan dengan revolusi Perancis, Rusia dan China yang dilakukan kelompok kekuatan yang terkonsolidasi. Feith, ***The Dicline...***, p. 1. Simak kembali tipologi revolusi di Indonesia sebagaimana diulas Onghokham"Revolusi Indonesia...", p. 3-7, juga Nasution "Aspirasi Kemerdekaan...", p. 39-40.

[12] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 106-7.

memperoleh dukungan sebesar mungkin dari parlemen.[13] Situasi yang dihadapi tidak semudah yang dibayangkan, terutama karena buruknya hubungan Masyumi, partai pimpinan Natsir yang memiliki anggota terbesar dengan PNI yang memiliki anggota terbesar kedua. Negosiasi Masyumi dengan PNI mengalami hambatan, bahkan ketika Soekarno melakukan intervensi, hingga memaksa Natsir dua kali menyerahkan mandat formaturnya pada presiden.[14]

Soekarno sendiri tetap berupaya agar Natsir mencoba kembali, bahkan bila perlu dengan kembali menempuh model *zaken kabinet*. Ketika pendekatan dengan PNI sudah mulai mendekati kesepakatan, Angkatan Darat menyatakan keberatan atas kandidat pilihan Natsir, dan mengajukan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai menteri pertahanan. Kedekatan Natsir dengan militer memungkinkan usulan tersebut diperhatikan, tetapi di sisi lain menjadikan PNI kurang kooperatif. Natsir sempat memutuskan konfrontasi dengan PNI, dan membiarkannya bersama PKI dan partai Murba duduk di kursi oposisi.[15]

Pilihan terakhir inipun ditentang kalangan Masyumi sendiri, di mana Sukiman dan kalangan NU yang keberatan membiarkan PNI di bawah kendali komunis. PNI berada di atas angin setelah menyadari bahwa Masyumi tak akan berani membentuk kabinet tanpa keterlibatannya. Persoalan mendasar yang tampak terletak pada distribusi kementrian, yang mana PNI maupun Masyumi berupaya keras saling memperebutkan posisi-posisi yang dinilai prestisius dan strategis bagi partainya. Setelah negosiasi yang pelik dan tidak menemukan kesepakatan, pada akhirnya Natsir mengumumkan kabinetnya 6 September 1950, dengan tanpa menyertakan wakil PNI. Peran PNI digantikan oleh wakil partai-partai kecil dan perorangan yang rata-rata dekat dengan Hatta. Kecuali Wachid Hasyim, kabinet Natsir mendekati model *zaken kabinet*, di mana mayoritas terdiri dari

---

[13] Noer, ***Partai Islam di Pentas...***, p. 203.
[14] Feith, ***The Dicline...***, p. 148.
[15] ***Ibid.***, p. 149

kalangan administratur, yang karenanya Natsir menyatakan kabinetnya lebih merupakan sebuah kabinet profesional (*bussiness cabinet*) dibanding koalisi.[16]

Respon terhadap kabinet ini sangat beragam, tidak hanya dari kalangan oposisi, melainkan juga dari Masyumi sendiri. Tuduhan umum yang ditujukan di antaranya menyatakan bahwa kabinet ini merupakan hasil intervensi presiden, militer dan sebagainya. Kritik terhadap kabinet tidak hanya tertuju pada Natsir semata melainkan juga pada presiden. PNI sendiri sangat berambisi membentuk kabinet, hingga kurang dari dua bulan pengumuman kabinet Natsir mereka mengajukan tiga alternatif formatur baru. Sebagai jawaban, Natsir menyelenggarakan *votum* kepercayaan (*vote of confidence*) yang dimenangkannya dengan perbandingan suara 118 berbanding 73. Meski memenangkan *voting*, situasi ini akhirnya membawa dampak memburuknya hubungan kabinet dengan parlemen.[17]

Sebenarnya kabinet ini tergolong sukses mewujudkan target-target kebijakannya dalam kurun relatif singkat. Secara bertahap kabinet dapat meningkatkan stabilitas keamanan sosial, pengelolaan administrasi, peningkatan produksi dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Dalam perjalanan berikutnya, kabinet Natsir juga dapat bertahan menghadapi beberapa kali masalah internal kabinet dan upaya penjatuhan. Di antara upaya tersebut tampak sesaat setelah *vote of confidance*, di mana Harsono ditarik dari kabinet oleh PSII dengan alasan tidak setuju pada program kabinet, termasuk kelanjutan kabinet Natsir itu sendiri. Kelompok oposisi di parlemen yang kuat sangat bersemangat menyerang kabinet Natsir beberapa kali.[18]

---

[16] Di antara menterinya adalah Dr. Soemitro Djojohadikusumo, ekonom berusia 32 tahun lulusan Washington. ***Ibid.***, p. 150-1.

[17] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 112.

[18] Kabinet beberapa kali menghadapi pemberontakan lanjutan dari sisa-sisa RMS di Maluku dan DI/TII pimpinan Ibnu Hajar di Kalimantan, yang keduanya berhasil dipadamkan. RI juga mulai terlibat dalam kancah politik internasional

Di antara isu menonjol selama pemerintahan ini adalah upaya Natsir melakukan perundingan dengan Belanda dalam penyelesaian masalah Irian Jaya, yang dinilai sebagai sikap yang terlalu lemah. Setelah mengatasi isu ini, Natsir dijegal kembali oleh mosi hadikusumo yang mengangkat masalah komposisi legislatif dan eksekutif daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1950 yang dikeluarkan kabinet Halim. Proposal sederhana pemerintah dibesar-besarkan kaum oposisi karena dianggap lebih menguntungkan Masyumi. Pemungutan suara yang memenangkan mosi Hadikusumo kian melemahkan pemerintahan Natsir dengan pengunduran menteri dalam negeri, Assaat. Upaya Natsir melakukan perombakan kabinet mengalami kegagalan setelah oposisi memboikot sidang parlemen 20 Maret 1951, diikuti dengan pengunduran diri menteri-menteri PIR yang memaksa Natsir menyerahkan mandatnya pada presiden.[19]

Setelah jatuhnya Natsir, presiden menunjuk Mr. Sartono, salah seorang pimpinan PNI dan ketua parlemen ditunjuk sebagai formatur kabinet. Sepak terjang PNI selama pemerintahan Natsir menyebabkan upayanya membangun koalisi dengan Masyumi mengalami kegagalan. Jalan terjal menghadang ketika Masyumi mengambil sikap oposisi atas semua hal yang selama sebelumnya ditentang PNI. Berbagai upaya dilakukan, tetapi kurang dari satu bulan kemudian menemukan jalan buntu. Akhirnya Soekarno menunjuk dua nama, yaitu Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman Wirjosanjojo dari

dengan menjadi anggota PBB ke-60. Simak Sekretariat Negara Republik Indonesia, ***30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)***, (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1985), p. 38 dan 51-3.

[19] Noer, ***Partai Islam...***, p. 211. Kahin melihat jatuhnya kabinet Natsir pada dasarnya hanya diakibatkan oleh isu domestik yang diduga kuat akibat pengaruh Soekarno pada PNI. Simak George McTurnan Kahin "In Memorian: Mohammad Natsir (1907-1993)" dalam ***Indonesia, Cornell Southeast Asia Program***, p. 163.

Masyumi untuk membentuk kabinet koalisi nasional luas dalam lima hari, dan kemudian dengan tambahan tenggang waktu tiga hari.[20]

Dengan berbagai konsesi dan kesepakatan, akhirnya Sukiman berhasil membentuk kabinet dengan menyertakan pendukung Natsir pada pos-pos yang kurang penting. Akibatnya terjadi krisis internal Masyumi yang sebelumnya diawali dengan munculnya ketegangan antara kubu Natsir dan Sukiman. Karena itu pula, komposisi kabinet Sukiman menimbulkan respon kurang antusias, termasuk dari Masyumi sendiri. Beberapa pos dinilai terisi dengan cara politik dagang sapi. Tidak terkecuali, kubu Natsir sendiri memberikan kritik pedas terhadap kabinet Sukiman, sekalipun kemudian memberikan kesempatan pada kabinet untuk membuktikan program-programnya, di samping telah menyertakan wakil-wakilnya di kabinet.[21]

Akhirnya, meski dengan perjalanan awal yang tidak mengenakkan, kabinet dapat terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya. Dibanding kabinet sebelumnya, kabinet Sukiman lebih mencerminkan hasil koalisi partai-partai. Pergolakan politik hingga masa kabinet Sukiman tersebut belum memperlihatkan adanya motif-mootif ideologi yang menonjol antar partai politik. Konflik politik lebih merepresentasikan pertarungan kepentingan dalam memperebutkan posisi-poisisi strategis. Berbagai kebijakan juga merepresentasikan jati diri pejabat (menteri) dibanding kepentingan ideologi dan kepartaian. Karena itu, beberapa tokoh seperti Moh. Yamin harus meletakkan jabatan menteri kehakiman ketika kebijakannya melepaskan tahanan politik ditentang Perdana Menteri maupun kalangan militer.[22]

Kabinet Sukiman juga dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan oleh beberapa oknum tentara yang membelot ke *Darul Islam* (DI) dan berkembangnya kembali pemberontakan DI/TII

---

[20] Feith, ***The Dicline...***, p. 207-8.
[21] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 116-7.
[22] ***Ibid.***, p. 121-2.

di Jawa Tengah dan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Sekalipun segera dapat dipadamkan, tapi kabinet ini juga disibukkan oleh beberapa isu krusial, seperti Jawanisasi akibat menonjolnya pengaruh PNI dalam penetapan gubernur Jawa Barat dan Sulawesi, penangkapan tokoh-tokoh komunis; dan yang paling krusial adalah kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, *Mutual Scurity Act* (MSA). Kerjasama ini dinilai menyalahi garis politik luar negeri bebas aktif Indonesia, sebagaimana kasus penandatanganan perjanjian damai dengan Jepang, yang mengakibatkan kabinet kehilangan kepercayaan. Akhirnya Sukiman menyerahkan mandatnya kembali pada presiden, dengan harapan dapat diperbaikinya situasi politik yang timbul sebagai akibat MSA tersebut.[23]

Berbeda dari Natsir yang dekat dengan militer, reputasi Sukiman justeru tidak harmonis dengan militer. Padahal pasca pengakuan kedaulatan, militer secara ekstraparlementariat telah berkembang menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Pengalaman selama perang seakan kehilangan artinya ketika pemerintahan didominasi politisi sipil yang dinilai tidak lebih nasionalis. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para politisi seringkali mengabaikan rasa berjasa mereka selama perang. Itu sebabnya perilaku politik sipil tidak pernah memuaskan mereka yang merasa rela mengorbankan jiwa raga untuk menegakkan kemerdekaan. Militer kehilangan respektasinya untuk terus-menerus menjunjung tinggi supremasi sipil.[24]

---

[23] Menteri Luar Negari Ahmad Subardjo mengira penandatanganan *Mutual Scurity Act* (MSA) dengan Amerika Serikat masih dalam konteks politik bebas aktif. Sukiman mengira setelah peristiwa PKI Madiun 1948 Indonesia dapat berhubungan dengan Amerika Serikat. Tetapi situasi perang Korea mendesakkan kembali semangat anti imperialisme. Juwono Sudarsono "Bebas Aktif di Tengah Dunia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1985, p. 125.

[24] Ketegangan tersebut menggejala di antaranya akibat perang kemerdekaan yang banyak melibatkan militer sebagai salah satu penyumbang jasa terbesarnya. Simak Ma'arif "Islam dan Demokrasi...", p. 27.

Militer senantiasa mengklaim diri sebagai tentara rakyat, pembela negara dan rakyat, yang mengandung pengertian bahwa mereka juga harus menjaga negara dari sepak terjang politisi sipil. Meski bukan lembaga politik, militer selalu mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Mereka lebih dekat pada kelompok nasionalis, seperti Hatta, dan sering terlibat dalam pertemuan-pertemuan kabinet, dan mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan keputusan. Sebagian politisi sipil dekat dan respek terhadap militer, sebagaimana tokoh Hamengku Buwono.[25]

Periode kabinet Sukiman diwarnai terjadinya friksi antara kabinet dengan militer akibat penangkapan anggota-anggota Masyumi yang diduga terlibat dalam gerakan *Darul Islam*. Kasus MSA hanyalah salah satu masalah menonjol yang menyebabkan jatuhnya kabinet Sukiman. Konflik Masyumi-PNI merupakan persoalan yang secara laten rawan menimbulkan konflik yang mengakibatkan kabinet selalu mengalami tekanan demi tekanan sejak beberapa bulan sebelumnya. Krisis moral menggejala di tengah cepatnya perubahan politik dan sosial, di mana moral revolusioner kian kehilangan relevansinya.

Sukiman secara umum gagal akibat pahitnya pertarungan antar faksi dan didukung tenaga-tenaga yang kurang memiliki *prestise* dan kurang dapat terfokus pada tujuan. Turunnya Sukiman melahirkan harapan baru yang penuh antisipatif. Harapan membangun pemikiran yang lebih efektif dengan kekuatan yang lebih besar untuk mengatasi berbagai resistensi menjadi bahan pemikiran elit politik. Sebagian lebih percaya pemerintahan tersebut harus merupakan koalisi besar, sementara yang lain lebih berharap pada struktur kabinet yang didasarkan atas profesionalisme. Kriteria pemegang jabatan harus berkwalifikasi administratur sekaligus ahli membangun *bergaining* (*solidarity makers*).[26]

---

[25] Feith, ***The Decline...***, p. 209.
[26] ***Ibid.***, p. 210.

Semasa demisionernya kabinet Sukiman, Soekarno mengumumkan dua nama formatur kabinet, Sidik Djojosukarto dan Prawoto Mangkusasmito, namun keduanya mengalami kegagalan membentuk kabinet. Konflik kepentingan seputar distribusi pos kementrian kembali mengemuka yang mengakibatkan susunan kabinet tidak berhasil disepakati. Kegagalan tersebut, menurut Sidik, dikarenakan Prawoto hanya bersedia menunjuk calon menteri dari kubu Masyumi Natsir, sementara Sidik menghendaki melibatkan semua kelompok. Setelah kegagalan tersebut, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet sembilan belas hari kemudian. Wilopo berhasil mengatasi berbagai tekanan kepentingan dengan menyerahkan susunan kabinet barunya kepada presiden sebelas hari kemudian. Kabinet ini dengan mudah terbentuk setelah sebelumnya antara PNI dan Masyumi sebagai kelompok kunci telah berhasil menjalin kesepakatan. [27]

Kabinet wilopo berhasil menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi pemerintahan sebelumnya, terutama masalah MSA yang digantikan dengan bantuan teknis. Kabinet ini juga berhasil menyusun Rencana Anggara Belanja Negara (RAPBN) guna mengendalikan pengeluaran negara secara bijaksana. Sekalipun sebagian anggota parlemen menolak penyelenggaraan Pemilu, namun di antara prestasi paling menonjol kabinet ini tampak pada keberhasilannya menyusun Undang-undang Pemilu yang sebenarnya sudah diprogramkan dua pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, sebagaimana pendahulunya, kabinet ini menghadapi beberapa masalah yang melemahkan pemerintahan, terutama menyikapi kebijakan pemerintah terhadap militer dengan meletusnya peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer menggerakkan massa menuntut pembubaran parlemen di saat parlemen tengah memperdebatkan posisi dan kedudukan militer. [28]

[27] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 125.
[28] ***Ibid.***, p. 131-2.

Pada kasus tersebut militer keberatan dengan intervensi sipil yang akan menegaskan posisi militer dalam negara. Pemerintah berusaha mereorganisir militer yang ketika itu masih sangat heterogen yang mengakibatkan perdebatan yang keras di parlemen dan pertentangan tajam di tubuh Angkatan Darat. Kasus ini sempat menyebabkan munculnya beberapa mosi serta pengunduran diri beberapa menteri dari PSII karena pembatalan *votum*, tapi tanpa sempat menjatuhkan kabinet. Ketidakpuasan pada parlemen diekspresikan dengan menggalang demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan menuntut agar parlemen dibubarkan. Sebagai jawaban atas aksi demostrasi, Soekarno menyatakan tidak bisa membubarkan parlemen karena sebentar lagi akan diselenggaraikan pemilihan umum. Soekarno juga menolak ketika massa menuntutnya bertindak sebagai diktator.[29]

Masalah yang menyebabkan kabinet menyerahkan mandatnya terjadi karena kasus Morawa, di mana penggarap tanah perkebunan yang disewakan kepada Perkumpulan Perkebunan Deli (*Deli Planters Vereneging*) sejak sebelum Perang Dunia II. Karena selama pendudukan Jepang dan revolusi tidak terurus lahan tersebut dimanfaatkan masyarakat Cina dan pribumi. Ketika pemerintah berusaha mengembalikan hak pengelolaan pada perusahaan sebelumnya, terjadi kerusuhan yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. Setelah mendapat mosi untuk menghentikan kebijakan pertanahan dan melepaskan semua tahanan yang terkait kasus Morawa, kabinet sudah kehilangan dukungan dari partai utama, khususnya PNI. Wilopo kembali menyerahkan mandat kepada presiden sebelum dilakukan pemungutan suara atas mosi Kertapati.[30]

Melihat perkembangan politik yang sedemikian labil sebenarnya sudah muncul gagasan untuk melakukan perbaikan sistem politik. Dalam *hearing* antara presiden dan partai-partai politik,

---

[29] Feith, ***The Decline...***, p. 212.
[30] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 133.

Masyumi mengusulkan dibentuk kabinet presidensiil kembali di bawah pimpinan Hatta, tapi ditentang partai-partai lain. Usulan ini bahkan memicu ketegangan di kalangan politisi. Partai-partai lain rata-rata berusaha mempertahankan sistem parlementer namun dengan model *zaken kabinet*. Sementara itu PKI menghendaki *kabinet front persatuan* dan secara tegas menolak keterlibatan Masyumi dan PSII yang mengakibatkan ketegangan antara PKI dan Masyumi.[31]

Di tengah suasana yang memanas tersebut presiden menunjuk S. Mangunsarkoro dan Moh. Roem menjadi formatur kabinet dalam waktu satu minggu. Ketegangan kembali terjadi antara keduanya dalam menyikapi beberapa hal. PNI berusaha mengakomodir seluruh kekuatan, sementara Roem memilih membatasi koalisi hanya dengan partai-partai yang dari awal menyatakan sanggup masuk kabinet. Keduanya juga berbeda pandangan dalam menyikapi masalah-masalah seperti kasus tanah di Sumatera Utara, ratifikasi perjanjian San Fransisco, Pertambangan minyak di Sumatera Utara dan masalah pembukaan kedutaan besar Moscow di Jakarta, yang mengakibatkan mereka gagal menyusun kabinet.

Presiden kemudian menunjuk Mukarto Notowidigdo untuk menyusun kabinet dalam waktu yang sama, tetapi juga kembali gagal setelah Masyumi menolak rancangan programnya yang dinilai sama dengan usulan Mangunsarkoro. Kemudian presiden memberikan tugas untuk membetuk *zaken kabinet*, namun tetap gagal karena perbedaan pendapat tentang formasi personalia dengan Masyumi yang dianggap PNI sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus Morawa. Burhanuddin Harahap dari Masyumi yang kemudian ditunjuk presiden juga gagal menyusun kabinet setelah PNI menuntut pos Perdana Menteri.[32]

---

[31] ***Ibid.***, p. 134.

[32] Peristiwa Morawa sering dikaitkan dengan kebijakan kabinet sebelumnya (Wilopo) terurtama Menteri Dalam Negeri yang ketika itu dijabat Moh. Roem dari Masyumi. Simak Noer, ***Partai Islam...***, p. 231.

Setelah dua partai besar gagal membentuk kabinet, presiden menunjuk Wongsonegoro, tokoh PIR sebagai formatur kabinet. Tanpa diduga, ternyata Wongso mampu menggandeng partai-partai kecil dan besar untuk mendukungnya, sekalipun jabatan Perdana Menteri dipercayakan pada partai lain, Ali Sastroamidjojo dari PNI. Selain itu, Wongso menggandeng NU yang diberi jabatan Wakil Perdana Menteri II. Kabinet Ali-Wongso berhasil terbentuk dengan meninggalkan Masyumi untuk pertama kalinya. Posisi Masyumi digantikan oleh NU yang sebelumnya melepaskan diri dari Masyumi.[33]

Kabinet Ali-Wongso merupakan pemerintahan paling kuat selama sejarah demokrasi konstitusional, dalam arti dapat berkuasa paling lama dibanding sebelumnya. Banyak hal dapat diwujudkan oleh kabinet ini, terutama dalam hal politik luar negeri. Di antara keberhasilan tersebut tampak pada lepasnya Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda yang berarti penegasan kedaulatan penuh Indonesia. Kabinet ini juga sukses mempelopori Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang memberikan perhatian dan dukungan besar pada masalah-masalah kemerdekaan. Berbeda dari kabinet sebelumnya yang lebih berharap menyelesaikan masalah Irian Barat melalui upaya bilateral Indonesia-Belanda, kabinet ini mengangkat masalah Irian Barat melalui forum internasional. Pemerintah memanfaatkan forum Asia-Afrika untuk memberikan dukungan pada Indonesia, hingga berhasil memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda Sidang Umum PBB.[34]

Pemerintahan Ali-Wongso sebenarnya juga dihadapkan pada banyak persoalan pemberontakan, terutama dari sisa-sisa gerakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Daud Beureuh di Aceh yang semuanya berhasil diredam. Di kancah politik,

[33] Simak pula Noer “Islam dan Politik...”, p. 11-2. NU mengikuti jejak SI keluar dari Masyumi dalam kongres Palembang 1952. Simak Ma’arif “Islam dan Demokrasi...”, p. 29.

[34] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 142-3.

kabinet Ali-Wongso banyak menghadapi serangan kalangan oposisi, seperti dalam kebijakan ekonomi dan tuduhan penerimaan uang komisi untuk partai yang sempat menggoyahkan kabinet, sekalipun tidak berhasil menjatuhkannya. Kabinet Ali-Wongso sempat dituduh mengulur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) karena menyatakan bawah persiapan Pemilu membutuhkan waktu sekitar 16 bulan. Panjangnya alokasi waktu untuk persiapan Pemilu dinilai sebagai siasat PNI untuk memenangkan Pemilu. Tekanan tersebut berhasil ditangani dengan pembentukan Panitia Pemilihan Pusat yang mengumumkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan 15 Desember 1955.[35]

Di samping itu, kabinet juga mendapat banyak kritik dan tekanan atas kebijakan-kebijakan ekonomi, kepegawaian dan keamanan, serta menuntut perbaikan kabinet yang diwarnai penarikan menteri dari PIR. Pemerintah memberi perhatian dengan melakukan *reshuffle*. Sebulan kemudian Masyumi gagal mengajukan mosi tidak percaya atas kabinet secara keseluruhan. Kabinet Ali benar-benar menyerah setelah NU menyerukan agar Perdana Menteri menyerahkan mandatnya pada presiden akibat kasus Angkatan Darat.[36]

Selaku pejabat Presiden, karena Presiden menjalankan ibadah haji, Hatta melakukan *hearing* dengan partai-partai politik yang kemudian menunjuk Wilopo, Sukiman dan Assaat sebagai formatur kabinet dengan batas waktu satu minggu, tetapi ketiganya gagal menjalankan tugas. Kegagalan tersebut terjadi karena Masyumi dan PNI menuntut jabatan Perdana Menteri. Sebagai solusi, Assaat mengusulkan agar Hatta yang menjadi Perdana Menteri. Hatta bersedia menjadi Perdana Menteri asalkan disetujui parlemen. Karena Masyumi menilai PNI tidak sungguh-sungguh menyetujui usulan tersebut, maka permintaan persetujuan parlemen dibatalkan, dan

[35] ***Ibid.***, p. 144.
[36] Noer, ***Partai Islam...***, p. 327.

ketiganya mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden. Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap dari NU untuk membentuk kabinet, tapi untuk kesekian kalinya mengalami hambatan karena masalah pembagian kursi. Burhanuddin Harahap berhasil menyusun kabinet dengan meninggalkan PNI setelah diberi perpanjangan waktu 12 jam. [37]

Kabinet Harahap sejak awal mengemban tugas untuk mengembalikan kewibawaan moril pemerintah, termasuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat pada pemerintah dan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum yang sudah dipersiapkan sejak dua kabinet sebelumnya berhasil dilaksanakan, namun dalam bidang-bidang yang lain masih timbul persoalan. Penataan Angkatan Darat relatif berhasil menarik simpati dari Angkatan Darat maupun masyarakat luas dengan dilantiknya A.H. Nasution sebagai Kepala Staf, namun tidak demikian halnya dengan Angkatan Udara.[38]

Kabinet ini mengalami ujian terberat ketika menghadapi masalah pembatalan perjanjian KMB. Meski dengan persiapan yang teliti, tapi sebenarnya kabinet sudah kehilangan respek dari presiden sendiri yang sudah tidak terlalu berharap pada diplomasi. NU dan PSII meski dengan artikulasi yang agak berbeda kemudian juga menyatakan tidak akan ikut serta dalam perundingan yang diikuti dengan penarikan menteri dari kabinet. Kabinet Burhanuddin Harahap sendiri sebenarnya berusaha bertahan dengan melakukan *reshuffle*, namun tekanan demi tekanan yang datang bertubi-tubi memaksa Burhanuddin menyerahkan mandatnya pada presiden.[39]

Normalisasi kembali kehidupan parlementariat melalui KNIP mengulang kembali krisis politik oleh pemerintahan yang jatuh-

---

[37] Simanjutntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 149.

[38] Pada Angkatan Udara bahkan diwarnai insiden pemukulan dan perebutan pataka angkatan. Simak Delian Noer, ***Mohammad Hatta; Biografi Politik***, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 469.

[39] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 155-60.

bangun. Dalam lima tahun sejak pengakuan kedaulatan sampai dengan Pemilu 1955, di Indonesia terjadi lima kali pergantian kabinet. Krisis politik kembali menjadi-jadi dengan berbagai pergolakan politik yang mulai melibatkan kalangan militer. Berakhirnya perang menjadi momentum penting untuk mendudukkan militer sebagai penanaman jasa bagi negara. Bila sebelumnya krisis politik dan pemerintahan terarah pada isu-isu politik sesudah kabinet terbentuk, krisis politik di era demokrasi liberal sudah terjadi sejak sebelum kabinet dibentuk. Saratnya problem sosial politik dan ekonomi menjadikan fragmentasi politik tidak kehabisan isu yang dapat menghalangi terbentuk ataupun terjatuhkannya kabinet sewaktu-waktu. Di samping itu, berbagai kelompok politik diliputi oleh berbagai kepentingan politik praktis. Situasi ini bahkan menjadi awal pertarungan politik panjang yang membentang sejak 1949-1957, di mana pos kabinet yang lebih menjanjikan *privillage*, kelompok dan bahkan keuntungan bagi kerabat dekat semakin menarik untuk dijadikan ajang rebutan, sebagaimana gambaran Feith:

It was a feature of politic in the Indonesia of 1947-1957 that cabinet posts were most eagerly sought. The prestige of cabinet minister was extraordinarily high, despite the fact this tenure was normally expected to be short... Symbols of this kind had great importance in a society where prestige, respect, and deference were sought particularly eagerly, probably more so tha income or powe as such....

But ministerial posts brought more than prestige. They provide opportunities to help family members ....

Also provide important source of income, a car, a house, furniture, and purchasing facilities ...[40]

Pemerintahan tak hanya menghadapi problem instabilitas keamanan, tapi juga politik. Pemerintah tidak dapat mengambil

[40]Feith, ***The Dicline...***, p. 146.

keputusan yang kuat dan tanpa resiko bagi dirinya sendiri. Keputusan apapun beresiko sama, berpeliang ditolak parlemen dan mengakibatkan jatuhnya kabinet. Jatuh bangunnya kabinet selama periode 1950-1955 memperlihatkan betapa sentimen dan kepentingan golongan begitu tajam dan jauh menggantikan komitmen kebangsaan. Egoisme kelompok mendominasi alam pikir para pelaku sejarah, di mana kepentingan setiap kelompok jauh dikedepankan di atas kepentingan nasional. Dinamika politik seperti inilah yang membuat Soekarno dan militer yang tidak terlibat langsung dalam percaturan politik secara praktis diliputi prihatin. Perilaku para politisi yang saling kehilangan kepercayaan dan mengesampingkan rasa hormat satu sama lain, membuat militer dan Soekarno perlahan kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi liberal sebagai jalan penyelesaian masalah.[41]

Masalah keamanan akibat ancaman kembalinya Belanda dan labilnya pemerintahan akibat krisis politik yang tiada henti menjadikan Pemilu tidak dapat segera dilaksanakan. Pemilu tertunda beberapa kali akibat fokus perhatian pemerintah terserap pada upaya penyelesaian kepentingan yang lebih besar, seperti unifikasi kembali RIS dan berbagai masalah dalam negeri yang menyertainya, termasuk penanganan masalah-masalah disintegrasi. Pemilu yang sudah diagendakan kabinet-kabinet yang terbentuk sejak 1950 tidak pernah sempat dilakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya.[42]

Perubahan dari negara kesatuan menjadi perserikatan setelah pengakuan kedaulatan mengharuskan pemerintah menata ulang setiap agenda politik yang sebelumnya dipersiapkan. Setiap masalah senantiasa disusul oleh masalah lain yang harus diatasi oleh pemerintahan yang tidak memiliki cukup wibawa untuk mengambil tindakan. Setiap keputusan harus dijalankan pada situasi berbeda dari saat keputusan diambil. Akibatnya konsolidasi negara memakan

---

[41] Keadaan Indonesia pasca unifikasi lebih memperlihatkan sebagai federal dibanding unitarian. Simak Kahin "In Memorian: Mohammad Natsir ..." p. 162.

[42] ***Ibid.***, p. 2.

waktulama, bahkan terancam gagal. Jatuh bangunnya kabinet pasca unifikasi menyebabkan perhatian pemerintah lebih banyak ditujukan untuk mengatasi masalahnya sendiri, membentuk pemerintahan, dibanding menyelesaikan agenda-agenda perbaikan kondisi negara dan kesejahteraan rakyatnya. [43]

Tabel 2

KRONIKA PERGANTIAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN SELAMA MASA DEMOKRASI LIBERAL/KONSTITUSIONAL

Tahun	Pemimpin Negara	Sistem Pemerintahan	Akhir Pemerintahan
7 Sept. '50 s.d. 21 Maret. '51	Natsir	Parlementer	Pembentukan DPRD dan Dewan Pemerintahan/Pela ksanaan PP masa Kabinet Halim.
27 April '51 s.d. 23 Pebr.'52	Sukiman	Parlementer	Masalah MSA
3 April '52 s.d. 3 Juni '53	Wilopo	Parlementer	Kasus Tanjung Morawa
1 Agust '53 s.d. 24 Juli '55	Ali Sastro-amidjojo I	Parlementer	Konflik Angkatan Darat
12 Agust '55 s.d. 3 Maret'56	Burhanuddin Harahap	Parlementer	Kasus Angkatan Udara dan Kehilangan respek presiden dan Parlemen setelah hasil Pemilu diumumkan

[43] Ma'arif "Islam dan Demokrasi...", p. 30.

24 Maret '56 s.d. 14 Maret '57	Ali Sastro-amidjojo II	Parlementer	Ketidakpuasan daerah (dimotori militer/Angkatan Darat) dan menguatnya niatan presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.

C. Pemilu 1955 dan Dampak Sosial Politiknya

Pemilu Nasional 1955 sebenarnya bukan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Pemilu pernah dilaksanakan pada kurun akhir pemerintahan Belanda, meski hanya untuk daerah Yogyakarta. Sejak 5 Oktober 1945 sebenarnya Pemilu sudah diagendakan dan rencananya akan dilaksanakan tahun 1946 untuk kawasan terbatas, yakni pada karesidenan Kediri dan Surakarta. Pada tahun 1948, badan kerja KNIP telah menyetujui undang-undang yang mengatur sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional, di mana semua warga negara yang berusia di atas 18 tahun diberikan hak pilih. Secara terbatas, Pemilu dengan beberapa sistem berbeda pernah dilaksanakan tahun 1951 dan 1952 di beberapa daerah, seperti Sulawesi dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilu-pemilu tersebut memberikan banyak pengalaman pada pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu secara nasional.[44]

Pasca pengakuan kedaulatan sebenarnya Pemilu sudah diprogramkan kabinet Natsir, tapi selalu mengalami hambatan, akibat problem-problem politik, termasuk penolakan sejumlah partai dan anggota parlemen sementara, khususnya dari PSI dan PIR.

[44] Feith, ***The Decline...***, p. 271-2. Simak juga Herbert Feith, ***Pemilihan Umum 1955 di Indonesia***, terjemahan Nugroho Katjasungkana dkk., (Jakarta: Gramedia, 1999), p. 2.

Demonstrasi yang dimotori oleh Angkatan Darat, 17 Oktober 1952, yang sempat memunculkan tuntutan pembubaran parlemen untuk digantikan sistem diktatur mendorong kabinet berusaha mempersiapkan Pemilu secara serius. Kabinet Wilopo yang lemah akibat konflik dan kericuhan baik internal maupun luar parlemen berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang Pemilu yang disahkan empat bulan kemudian. Panitia Pemilihan Nasional untuk pemilihan parlemen dan konstituante menyusul dibentuk, Desember 1953.[45]

Masyarakat menyambut Pemilu dengan antusias, dan diharapkan dapat memberi solusi atas situasi politik yang mengecewakan sejak kemerdekaan yang dipenuhi krisis politik dan pemerintahan yang senantiasa berulang. Sejak disahkannya Undang-undang Pemilu perhatian partai-partai politik tidak lagi hanya tertuju pada pertarungan politik di parlemen, tapi juga pada upaya memperluas dukungan dan pengaruh di masyarakat. Meski pendaftaran Pemilu baru dimulai sejak Mei 1954, tapi kampanye praktis sudah mulai berlangsung sejak Pemilu masih direncanakan. Meski resminya kampanye baru dimulai 31 Mei 1954, yaitu ketika tanda gambar disahkan, partai-partai politik sudah berkampanye sejak Undang-undang Pemilu disusun.[46]

Partai-partai tertentu secara aktif melebarkan ataupun mempertajam kembali pengaruhnya pada basis-basis tradisional yang sebelumnya menjadi penopangnya. PKI, Masyumi dan NU merupakan

---

[45] Kegerahan Angkatan Darat terhadap sepak terjang para politisi sipil sempat melahirkan tuntutan agar Soekarno membangun pemerintahan diktatur, tapi ditolak oleh Soekarno. Soekarno masih berharap pemerintahan demokratis yang kuat dapat dibangun melalui Pemilu. Kinerja pemerintahan sendiri selalu potensial menjadi ajang korupsi dan nepotisme para politisi. Di samping itu, setiap kebijakan pemerintahan, bahkan keberadaannya, senantiasa direspon negatif oleh rival-rivalnya di parlemen maupun Angkatan Darat. Pemerintah praktis tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti sebagaimana harapan kemerdekaan. Feith, ***The Decline...***, p. 258-9.

[46] Feith, ***Pemilihan Umum...***, p. 7-8.

di antara partai politik yang getol memaksimalkan pengaruhnya di kalangan umat Islam. Organ-organ partai politik berperan penting dalam menopang perluasan pengaruh partai. Bila sebelumnya krisis politik hanya menjadi dominasi elit di ibu kota, sejak penyusunan Undang-undang Pemilu kegiatan partai politik semakin meluas ke pedesaan, berbagai tingkatan sosial dan sudut-sudut sosial kemasyarakatan. Konsentrasi partai politik yang semula terfokus pada pertarungan kepentingan elit semakin meluas ke tingkatan masyarakat yang sebelumnya sangat boleh jadi tidak tahu-menahu urusan politik.[47]

Kampanye Pemilu menjadi masa-masa penting bagi penguatan identitas sosial dan politik, di mana masyarakat dari kalangan tertentu identik dengan pendukung atau pengikut salah satu partai politik. Batas-batas sosial yang semula tidak begitu jelas dan minim sentimen berubah menjadi semakin tegas akibat perbedaan afiliasi politik. Sekalipun tidak mengabaikan peran yang mungkin lintas partai, tapi secara umum Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan PSI lekat dengan kalangan priyayi; PKI identik dengan masyarakat *abangan*; NU dan Perti identik dengan masyarakat Islam tradisional; Masyumi identik dengan muslim modernis; dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) tentu saja identik dengan masyarakat Kristen.[48]

Afiliasi pada Partai politik sekaligus menjadi gambaran sebaran subkultur masyarakat Indonesia dan keislamannya. Kedekatan kultur dengan ideologi politik menjadi faktor afiliasi pemilih di suatu daerah yang terlihat dari sebaran pemilih. Mayoritas pemilih Partai NU adalah masyarakat Jawa Timur, yang merupakan basis kultur Islam tradisional (NU). Jawa Tengah yang lekat dengan tradisi Jawa

---

[47] ***Ibid.***, p. 11-2.

[48] PNI juga mempunyai hubungan dengan masyarakat bawah, tetapi dalam konteks hubungan paternalistik. Golongan rendahan, *wong cilik*, juga merupakan pendukung NU, terutama di daerah pesisir utara Jawa. M. Dawam Rahardjo "Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru" dalam ***Prisma***, No. 3, Maret 1991, p. 4.

mendukung partai-partai yang berbasis politik sekuler, seperti PNI dan PKI. Demikian halnya dengan partai-partai lain, di mana sub kultur tertentu menentukan tingkat afiliasi masyarakat terhadap partai politik. Kecuali setelah dipertajam oleh sentimen ideologi dan partai politik, keragaman subkultur tersebut sebelumnya tidak pernahh mengarah pada identifikasi yang disertai fragmentasi sosial.[49]

Pelaksanakan Pemilu sendiri secara umum berlangsung tenang, tanpa gejolak berarti. Rakyat memberikan suaranya 29 September untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk konstituante. Hasil Pemilu menimbulkan banyak kejutan, di antaranya mengecilnya suara Masyumi dan kehadiran partai baru dengan suara signifikan seperti diperoleh Nahdlatul Ulama (NU). Perolehan kursi partai politik dalam pemilu 1955 adalah sebagai berikut:[50]

Tabel 3

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 1955

o	Partai Politik	DPR	Konstituante
	PNI	57 Kursi	119 Kursi
	Masyumi	57 Kursi	112 Kursi
	Nahdlatul Ulama	45 Kursi	91 Kursi

[49] Ketika dewan legislatif dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, sebenarnya partai-partai politik belum benar-benar aktif di daerah. Jabatan anggota dewan hanya memberikan kehormatan pada diri seseorang, sekalipun keuntungan materi belum seberapa. Rencana penyelenggaraan Pemilu menyebabkan cabang-cabang partai politik di daerah menjadi penting. Simak Feith, ***Pemilihan Umum...***, p. 12.

[50] Suprayitno, ***Pemilu Dari Masa Ke Masa***, (Jakarta: Teguh Pertiwi Mandiri, 1993), p. 137. Angka perolehan Pemilu selengkapnya simak Feith, ***Pemilihan Umum...***, p. 84-103.

	PKI	39 Kursi	80 Kursi
	PSII	8 Kursi	16 Kursi
	Parkindo	6 Kursi	16 Kursi
	Partai Katolik	5 Kursi	10 Kursi
	PSI	5 Kursi	10 Kursi
	Perti	4 Kursi	7 Kursi
	IPKI	4 Kursi	8 Kursi

Dampak sosial politik menonjol dari Pemilu 1955 adalah semakin kokohnya kedudukan partai politik di hadapan pemerintah dan massanya. Pemilu menjadikan partai politik memperoleh legitimasi kuat dengan basis dukungan jelas, meski itu juga berarti berkurangnya eksistensi partai tertentu, seperti PIR. Perolehan suara setiap partai politik memberikan kejelasan peta kekuatan politik. Hanya saja, legitimasi dan dukungan terhadap partai politik tersebut justeru mengawali fragmentasi sosial politik, tidak saja pada tingkatan elit politik, melainkan meluas pada segenap masyarakat bawah. Masyarakat terpecah-belah ke dalam kelompok-kelompok dengan tingkat sentimen sosial yang tajam. Padahal sebelumnya fragmentasi lebih banyak pada tataran elit politik di KNIP dan bersifat sementara seiring perbedaan pendapat parlementariat.[51]

Ini dikarenakan afiliasi terhadap partai politik bukan dalam konteks kontrak politik yang rasional. Masyarakat belum menempatkan Pemilu untuk membangun kelompok pembela kepentingan sosial ekonomi. Pemilu baru menjadi wahana kepentingan elit partai politik untuk memperluas dukungan sosial, di mana suara konstituen menjadi legitimasinya. Masa kampanye

[51] Feith menyatakan bahwa hampir tidak ada satu elemen sosial, terutama tokoh masyarakat, yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Karena keterlibatan menjadi pengurus partai akan berarti peningkatan status sosial. ***Ibid.***, p. 33.

menjadi masa-masa penajaman perbedaan ideologi politik yang menjangkau masyarakat luas. Bila sebelumnya apresiasi ideologi hanya pada kalangan terbatas, pasca Pemilu ideologi sebagai paham sosial politik maupun identifikasi diri meluas pada segenap anggota masyarakat. Hampir tidak ada lahan sosial yang tak tergarap untuk mendukung satu ideologi ataupun partai politik.[52]

Pemilu telah mempertajam perbedaan sosial berdasarkan afiliasi politik masyarakat. Perbedaan partai politik cenderung menempatkan kebenaran ideologi satu partai politik dengan menafikan yang lain. Afiliasi terhadap partai politik menjadi sekat ideologis yang mencerai-beraikan masyarakat kepada perbedaan-perbedaan. Pemilu bukan saja menciptakan sekat-sekat sosial melainkan juga pengentalan sentimen kelompok sosial di masyarakat serta mempertegas tersisihnya komitmen nasional, digantikan oleh kepentingan kelompok.

Pemilu juga meningkatkan intensitas sentimen ideologis di kalangan politik Islam. Sekalipun pernah masuk dalam piagam Jakarta, kalangan Islam tidak cukup menyuarakan isu negara Islam ataupun penerapan syari'ah Islam sebelum Pemilu 1955. Isu negara Islam hanya tampak pada isu politik yang diangkat dalam pemberontakan DI/TII. Harapan politik Islam tersebut baru menemukan sofistikasinya pada tataran konseptual dan wacana sosial politik menjelang dan pasca Pemilu. Luasnya dukungan atas penerapan *syari'ah* terjadi setelah proses Pemilu yang banyak melibatkan basis kekuatan kultural.[53]

---

[52] ***Ibid.***, p. 34.

[53] Sebelum Pemilu dicanangkan, kepentingan politik lebih mendominasi dialektika politik Islam. Hal ini dapat dicermati dari perjalanan parlementariat sejak 1950-an, yang lebih banyak didominasi persoalan bagaimana membangun dan mempertahankan kekuasaan dalam ulasan Deliar Noer tentang dinamika politik partai-partai Islam masa demokrasi parlementer. Simak Noer "Islam dan Politik...", p. 11-3.

Selain sebagai ajang perluasan dukungan, kampanye Pemilu membuka kesempatan mengemukanya isu-isu ideologis yang meningkatkan sentimen sosial. Pemilu menjadikan isu-isu ideologis mengalami pengentalan tidak saja di kalangan elit partai, melainkan juga pada masyarakat, yang di setidaknya memunculkan segi tiga pertarungan antara nasionalis, Islam dan komunis. Para pendukung partai politik menggunakan berbagai cara untuk membangun pengaruh, dengan mengabaikan dampak sosial berupa perpecahan di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi terkotak-kotak oleh batas-batas ideologis dan partai politik. Setiap kelompok menemukan momentum untuk mengekspose gagasan maupun sentimen ideologis seluas-luasnya, sekaligus menetapkan batas teritorial yang tegas dari kelompok lain. Karena itu, hujatan, caci-maki, bahkan ekspose masalah sentimen kesukuan menjadi hal yang umum dalam kampanye, yang dilakukan untuk menggelorakan dukungan pada partai dan antipati pada yang lain.[54]

Atmosfir heroistik sisa-sisa perang menjadi salah satu modalitas juru bicara partai melakukan indoktrinasi pada massa pendukungnya, di mana membangun dukungan terhadap partai politik hampir sama dengan mengobarkan semangat perang. Pengerahan massa dalam rangka dukungan terhadap partai politik tidak ubahnya dengan menggelar pasukan perang. Afiliasi pada partai politik senantiasa diliputi fanatisme dengan sentimen dan antipati terhadap kelompok lain, karena para pendukung partai dapat menggunakan isu apa saja, tanpa terikat aturan maupun tradisi yang mampu mengatur fokus dan batas-batas wacana yang sah dalam pertarungan politik.[55]

Setiap partai politik berusaha dengan segala cara untuk memenangkan Pemilu, di mana pada sebagian partai politik pendekatan kultural lebih dominan digunakan dibanding membangun wacana terbuka. Pendekatan intelektual lebih banyak

[54] Feith, ***Pemilihan Umum...***, p. 23.

[55] Kampanye pemilu menjadi ajang saling serang antar kelompok politik dengan berbagai isu. ***Ibid.***, p. 21.

ditempatkan sebagai wahana indoktrinasi, pemapanan doktrin ke dalam. Hal ini tampak pada upaya kalangan Islam yang mengangkat isu penerapan *syari'ah* yang efektif dalam membangun sentimen di kalangan umat Islam. Justifikasi keagamaan tidak terhindarkan dalam kampanye Pemilu, misalnya dengan munculnya beberapa pernyataan bahwa tidak mencoblos partai Islam berarti kafir dan masuk neraka. Namun demikian, sejak keluarnya NU dari Masyumi juga tidak terhindarkan saling serang terjadi antara umat Islam sendiri, khususnya antara kaum modernis Islam yang umumnya tergabung dalam Masyumi dan tradisionalis Islam yang berafiliasi pada NU dan Perti.[56]

Di antara batas ideologis paling tegas tampak antara Islam dan Komunis, karena di samping menempatkan tuntutan penerapan *syari'ah*, kalangan Islam juga menempatkan pemberantasan kemaksiatan dan gerakan anti komunis sebagai agenda. Namun demikian, kaum komunis tidak kurang isu dalam mendiskreditkan kalangan Islam, terutama akibat pemberontakan DI/TII. Kepada para pendukungnya yang rata-rata muslim *abangan* dan masyarakat pedesaan yang miskin, PKI menjanjikan pembagian tanah yang sempat menimbulkan ketegangan di beberapa daerah. Sementara itu kalangan nasionalis memanfaatkannya dengan membangun kesan sebagai kelompok moderat (*the golden mean*).[57]

Kampanye Pemilu menyebabkan masyarakat digiring oleh simbul-simbul partai yang disertai retorika-retorika heroik yang saling mendiskreditkan. Barangkali karena tingkat kesibukan masyarakat yang masih rendah dan keterbatasan pengetahuannya menjadikan mereka mudah dimobilisasi dan dipupuk loyalitasnya, karena di tengah situasi perubahan sosial tersebut identifikasi diri menjadi kebutuhan setiap orang. Karena itu, tidak jarang di antara

[56] Hanya di Jakarta berlaku moral politik, di mana kampanye lebih menekankan "ukhuwah islamiyah" dibanding kelompok. Sementara di daerah banyak kecaman ditujukan pada Masyumi beserta anak organisasinya. Simak ***Ibid.***, p. 23.

[57] ***Ibid.***, p. 21.

mereka yang mengikuti partai politik tanpa cukup memahami arah, *platform* dan kesesuaian sebuah partai politik dengan kondisi dirinya sendiri. Banyak kalangan agamawan yang salah memahami keberadaan partai politik tertentu, baik karena kurangnya pengetahuan ataupun akibat piawainya pengurus suatu partai politik meyakinkan mereka untuk memberikan dukungan terhadap partainya.[58]

Struktur sosial yang masih patriarkhis menyebabkan pola afiliasi politik masyarakat belum rasional, bahkan dipenuhi fanatisme. Masyarakat belum mampu mengambil keputusan secara otoritatif, lepas dari ketergantungan dan kendali tokoh sosial. Masyarakat yang masih terlalu kental komunalitasnya mudah digiring untuk secara fanatik mendukung partai politik secara tidak proporsional dan rasional. Fragmentasi yang terjadi sebenarnya lebih menampakkan dampak *euforia* identifikasi sosial. Masyarakat sendiri, bahkan tidak jarang mereka yang duduk sebagai pengurus partai politik sebenarnya tidak cukup memahami dimensi konseptual dari paham politik yang dianut. Ketidaktahuan dan rendahnya pemahaman akan dengan mudah menjadi bahan eksploitasi demi menggalang dukungan massa untuk meraih tujuannya sendiri. Kesediaan berkonflik antar massa pendukung menjadi bukti paling meyakinkan atas dukungan rakyat pada pemimpin-pemimpin partai politik.[59]

---

[58] Di Timor Barat misalnya, kepiawaian PKI menyebabkan kalangan agamawan mengira PKI sebagai partai nasionalis dan tidak menduga bahwa partai tersebut anti-agama. Steven Farran, "Revolution, Religious and Magic: The PKI in West Timor 1920-1966" dalam ***BIJDRAGEN Tot de – land – en Volkenkundo, Journal of the Humanities and Social Science of South East Asia and Oceanian***, 158.1., 2002, p. 21-23.

[59] Feith mencatat, "...Perpecahan desa seakan memperoleh pengakuan resmi. Konflik dan ketegangan yang terpendam, yang *laten* – apakah pengikut lurah lawan pengikut kiai, pendukung adat dan kebiasaan suku lawan golongan muslim militan, tuan tanah dan lintah darat lawan orang-orang yang bergantung pada mereka, satu marga dan keluarga besar lawan marga dan keluarga besar lain, suatu calon lurah

Rendahnya kepekaan kepekaan konseptual tampak pada rendahnya sikap kritis terhadap demokrasi. Partai-partai politik yang secara konseptual mestinya menolak liberalisme justeru dengan bersemangat ikut serta dalam sebuah sistem liberal. Demokrasi hanyalah sebuah aliran sejarah yang pelaku-pelakunya tak merasa perlu tahu akan ke mana akan menuju, dan apalagi mengubahnya. Karena itu, banyak di antara anggota masyarakat menjadi nasionalis, Islamis atau komunis tanpa memahami urgensi sesungguhnya dari paham sosial politik yang mereka anut. Pemilu belum dipahami sebagai jalan untuk memperoleh pembelaan atas distribusi kesejahteraan secara adil. Demokrasi masih ditempatkan sebagai medan pertempuran, dan kampanye adalah wahana mengumpulkan amunisi sosial.[60]

Minimnya media informasi dan tingkat *melek* huruf masyarakat yang masih sangat rendah menjadikan informasi dari mulut ke mulut masih sangat dominan dalam komunikasi sosial. Informasi lisan lebih mendalam pengaruhnya dibanding tulisan. Pembelokan informasi yang sangat potensial terjadi dalam sistem komunikasi lisan tidak mudah memperoleh kesempatan untuk dikritisi kembali. Informasi melalui media massa baru sampai pada khalayak sebagai informasi kedua melalui tokoh-tokoh partai. Kemampuan tokoh partai menyampaikan kembali pada khalayak lebih menentukan dibanding informasi itu sendiri. Lekatnya kepentingan membangun dukungan seluas-luasnya membuka kemungkinan pembelokan informasi, baik

---

melawan calon lurah lain –disalurkan secara politis, dan dalam bentuk politis itu terbuka terhadap segala kemungkinan. Simak Feith, ***Pemilihan Umum...***, p. 43.

[60] Analisis ini didasarkan atas teori Snyder yang menyatakan bahwa sentimen nasionalisme potensial terjadi setelah demokratisasi, terutama karena kepentingan elit. Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 91-2. Pada kenyataannya, pasca pemilu konflik politik yang terjadi kembali mengulang persoalan "kecemburuan" dalam masalah pembagian kursi parlemen. Simak fragmentasinya dalam Ma'arif "Islam dan Demokrasi...", p. 31.

dalam rangka keuntungan penyampai informasi maupun akibat pemahaman yang berbeda atas informasi yang dibaca. [61]

Banyak pengamat menyebut bahwa masa tersebut adalah masa di mana pers menikmati kebebasannya, di mana kebebasan pers sering kali ditempatkan sebagai jaminan demokrasi. Pada dasarnya kebebasan pers waktu itu bukan suatu keadaan yang dengan sengaja dibangun. Kebebasan pers berlangsung begitu saja tanpa upaya sistematis untuk menghambat ataupun dengan sengaja diatur. Apalagi kehadiran pers lebih banyak sebagai corong kelompok tertentu, yang artinya kebebasan pers tidak ditunjang oleh independensi dengan keharusan menjaga *image* dan penilaian pembaca. Pers masa itu belum cukup potensial mencerdaskan pembaca, karena kepentingannya terarah pada peningkatan dukungan dan militansi di saat pembaca belum cukup mampu menilai secara kritis pemberitaan ataupun opini media massa. Pers hanya menjadi wahana perang informasi yang berpretensi membenarkan diri dan mendiskreditkan, bahkan tidak jarang menyerang pihak lain.[62]

D. Parlemen Hasil Pemilu dan Kebuntuan Konstituante

Pemerintahan hasil Pemilu 1955 hanya berlangsung empat tahun dengan pergantian satu kabinet transisi dan satu kabinet hasil Pemilu. Krisis politik masa kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956) menemukan puncak konfliknya selama pemerintahan berikutnya. Situasi politik pasca pemilu tidak menampakkan perkembangan kondisi negara yang semakin membaik, tapi sebaliknya. Pemilu seharusnya melahirkan pemerintahan

[61] Selama masa kampanye Pemilu 1955 terjadi berbagai pembelokan informasi, yang menyebabkan isu-isu politik pusat berbeda dengan di tingkatan bawah. Simak kembali Feith, ***Pemilihan Umum...***, p. 22.

[62] Masa demokrasi liberal, setiap partai politik, terutama oposisi memiliki surat kabar sendiri untuk mengungkapkan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah. Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 300.

legitimated dan memungkinkan konsolidasi nasional. Sebaliknya, pemilu tidak menghasilkan pemerintahan yang lebih berwibawa dan mampu melakukan lebih banyak hal bagi kemajuan negara dibanding sebelumnya. Situasi politik pasca Pemilu justeru diwarnai meningkatnya ancaman disintegrasi, hilangnya kepercayaan pada politisi, bahkan menjadi puncak kekecewaan atas demokrasi.

Untuk kedua kalinya Ali Sastroamidjojo Sastroamidjojo, PNI, membentuk kabinet pertama hasil Pemilu melalui koalisi besar antara PNI, Masyumi, NU dan beberapa partai kecil. Kabinet Ali Sastroamidjojo Sastroamidjojo II berdiri dengan diawali krisis politik dan oposisi dari PSI dan PKI karena tidak diikutsertakannya wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Dukungan partai-partai besar pemenang Pemilu menjadikan kabinet ini memiliki harapan dapat berdiri cukup kuat. Untuk sementara waktu, kabinet ini berhasil meredam konflik antara PNI dan Masyumi serta menfokuskan diri pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama pemerintahan sebelumnya. Karena itu, koalisi dengan relatif mudah dibangun, dan dapat memenuhi tenggang waktu yang diberikan presiden.[63]

Susunan kabinet Ali Sastroamidjojo sendiri sempat ditolak presiden hingga satu minggu sesudahnya, dan tampaknya mengawali hilangnya respektasi Soekarno terhadap kabinet. Soekarno berharap agar seluruh partai besar, termasuk PKI diikutsertakan agar kabinet mencerminkan nasionalitas. Karena itu, Soekarno marah ketika komposisi kabinet yang diajukan Ali Sastroamidjojo meninggalkan PKI yang didukung sedemikian banyak suara pemilih. Dalam hal ini Ali Sastroamidjojo menuliskan dalam memoirnya:

...ketika melihat hasil pekerjaan saya itu, ialah kekecewaan disampaikan kepada saya dengan nada kemarahan. 'Saudara Formatir bersikap tidak adil terhadap P.K.I. Mengapakah suatu partai besar

---

[63] Simanjuntak, ***Kabinbet-kabinet...***, p. 161.

yang mendapat suara dari rakyat lebih dari 6 juta itu, tidak kau ikut sertakan dalam kabinet baru! Ini tidak adil!...[64]

Ali Sastroamidjojo menghadapi dilema untuk dapat menerima PKI dalam kabinetnya, karena Masyumi dan NU dari awal menyatakan tidak mungkin berkoalisi dengan PKI. Setelah melakukan pembicaraan dan berupaya mempengaruhi partai-partai yang ada, Soekarno tidak mempunyai pilihan selain menerima susunan kabinet. Meski dengan berat hati akhirnya Soekarno melantik kabinet Ali Sastroamidjojo, bahkan menyebut kabinet ini sebagai titik tolak dari pada periode *planning and investment*.[65]

Kabinet hasil pemilu dari awal memberi harapan besar bagi perbaikan situasi sosial politik. Di sisi lain, untuk pertama kalinya kabinet dapat menetapkan program yang lebih terinci dan sistematis yang disebut sebagai Rencana Lima Tahun. Program kabinet tersebut meliputi: Pembatalan KMB; Penyelesaian masalah Irian Barat; dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan dijalankannya keputusan-keputusan KAA. Selain itu juga disusun program-program dalam negeri yang meliputi beberapa masalah: Pemulihan keamanan dan penyempurnaan koordinasi alat-alat negara; Perekonomian dan keuangan yang di meliputi perekonomian umum, keuangan, perindustrian, peternakan, perikanan dan pertanian, otonomi dan organisasi negara, pertanahan dan sebagainya.[66]

Pemerintahan Ali Sastroamidjojo mulai melaksanakan beberapa programnya. Sebagai awal pertama pemerintahan Ali menyelesaikan Undang-undang Pembatalan KMB, sebuah langkah unilateral yang disahkan presiden. Undang-undang ini menandai bubarnya Uni Indonesia-Belanda, termasuk semua keputusan yang terkait dengan

---

[64] Ali Sastroamidjoyo, ***Tonggak-tonggak di Perjalananku***, (Jakarta: Kinta, 1974), p. 343. Kutipan yang hapir sama juga dalam Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 161. Kutipan lebih lengkap dapat disimak pula Ma'arif "Islam di Masa Demokrasi...", p. 33-4.

[65] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 223.

[66] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 167-9.

KMB. Sebagai langkah awal penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah membentuk pemerintahan provinsi Irian Barat dengan ibu kota Sao Siu. Untuk urusan dalam negeri dimulai dengan pembentukan provinsi-provinsi otonom, seperti Aceh dan membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi, disusul kemudian dengan penyelesaian Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta Undang-undang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. Indonesia juga mulai dapat berperan lebih aktif dalam kegiatan perdamaian dunia, melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB ke Timur Tengah (UNEF).[67]

Dalam rangka peralihan perekonomian kolonial ke nasional muncul usulan untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi ditolak parlemen. Di sisi lain, banyak perusahaan Belanda dijual ke pengusaha Cina, baik karena tuntutan tersebut maupun karena adanya pembatalan perjanjian KMB. Tuntutan nasionalisasi semakin keras ketika dalam Kongres Nasional Importir Indonesia Mr. Assaat, mantan *action* presiden RI ketika tergabung dalam RIS, menyerukan perlunya peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional, hingga memunculkan gerakan Assaat di berbagai daerah. Gerakan tersebut berakhir dengan terjadinya huru-hara anti-Cina yang dipicu oleh kasus pemukulan seorang dokter tentara oleh pengusaha Cina.[68]

Kabinet ini juga harus menghadapi kembali persoalan di tubuh tentara, sebagai buntut pengangkatan Nasution sebagai KSAD. Penggeseran tugas (*tour of duty*) oleh KSAD membuat beberapa perwira seperti Kolonel Kawilarang dan seorang wakil KSAD, Kolonel Zulkifli Lubis tidak puas. Mereka berusaha menangkap Ruslan Abdul Gani karena tuduhan korupsi, tetapi gagal akibat dilindungi Nasution. Lubis lalu menyebarluaskan berita bahwa pemerintahan Ali Sastroamidjojo melindungi koruptor. Ketika tuduhan tidak terbukti,

[67] ***Ibid.***, p. 169-0.

[68] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 224.

kolonel Lubis berusaha menjatuhkan KSAD dengan kekuatan militer, tetapi juga gagal. Akibatnya Lubis dipecat, dan melarikan diri ketika hendak ditangkap. Lubis berusaha membela diri selama pelariannya dengan menjelaskan berbagai alasan yang mendorongnya melakukan aksi tersebut melalui media massa.[69]

Tindakan Lubis tidak hanya melemahkan Angkatan Darat tapi juga menurunkan prestise kabinet Ali Sastroamidjojo II. Di tengah situasi yang pelik tersebut, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh mundurnya Hatta dari kursi wakil presiden. Meski Hatta secara tersurat memberikan alasan rasional dalam surat pengunduran dirinya, tapi munculnya berbagai penafsiran tak terhindarkan, terutama soal dugaan ketidakcocokan Hatta dengan Soekarno. Pengunduran tokoh *genius* yang sangat dihormati serta dikenal sebagai pribadi yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi tersebut menimbulkan perasaan kecewa pada banyak anggota masyarakat di negeri ini.[70]

Pengunduran diri Hatta diikuti dengan pudarnya wibawa kabinet Ali Sastroamidjojo II, dengan munculnya gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan terutama dirasakan para pimpinan Angkatan Darat dan sipil di luar Jawa yang dikuti dengan pengambilalihan pemerintahan daerah oleh kelompok yang menyatakan diri sebagai dewan daerah. Dimulai dari Padang, 20 Desember 1956, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein, bekas dividi Banteng di Padang mengambil alih kekuasaan gubernur setempat atas nama *Dewan Banteng*. Kolonel Simbolon mengikuti jejak Ahmad Husein dengan mendirikan *Dewan Gajah* di Sumatera Utara, yang kemudian secara berturut-turut muncul *Dewan Garuda* di

[69] Feith, ***The Decline...***, p. 505-7.

[70] Noer, ***Mohammad Hatta...***, p. 482-5.

Sumatera Selatan, *Dewan Lambung Mangkurat* di Kalimantan Selatan serta *Dewan Manguni* di Sulawesi Utara.[71]

Gerakan dewan daerah tersebut rata-rata mengangkat isu ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembagian pendapatan negara. Daerah-daerah penghasil devisa besar merasa tidak mendapatkan manfaat pembangunan di segala bidang. Aksi dewan-dewan daerah tersebut sebenarnya hanya tertuju pada kabinet Ali Sastroamidjojo II, karena mereka masih mengakui Soekarno sebagai presiden. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pemerintah pusat dan daerah tersebut gagal, dan mengakibatkan beberapa menteri dari IPKI menarik diri. Masyumi dalam kongresnya di Bandung (22-29 Desember 1956) menerima resolusi pembubaran kabinet dan menarik partainya 9 Januari 1956. Meski demikian, Ali Sastroamidjojo berusaha mempertahankan kabinetnya meski sudah ditinggalkan Masyumi, Perti dan IPKI. Ali bermaksud melakukan *reshuffle* kabinet, tetapi ditolak presiden.[72]

Sebagai pemerintahan hasil Pemilu, sebenarnya kabinet Ali Sastroamidjojo termasuk kuat, tapi seiring kompleksitas persoalan yang dihadapi, banyak masalah di luar parlemen yang turut menentukan jalannya pemerintahan. Hal ini tampak dari sikap Soekarno yang memang sudah kehilangan respektasinya pada parlemen dengan semakin ditegaskannya gagasan-gagasan Soekarno sendiri yang kian mengguncangkan kabinet. Dalam peringatan Sumpah Pemuda 1956 Sokarno menyatakan penyesalannya atas keputusan pemerintah November 1945 yang membuka jalan bagi terbentuknya partai-partai politik. Soekarno berharap para pemimpin

---

[71] Pengunduran diri Hatta kian memperjelas perbedaan mendasarnya dengan Soekarno dalam hal pendekatan politik. Simak Feith, ***The Decline...***, 524. Pemunculan dewan-dewan daerah simak Daniel S. Lev, ***The Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics, 1957-1959***, (Ithaca-New York: Cornell University Press, 1966), p. 11-7.

[72] Simak Amidjojo, ***Tonggak-tonggak...***, p. 361-8. Simak juga Noer, ***Partai Islam...***, p. 253.

partai berunding untuk "menguburkan partai-partai politik" saat itu juga. Pada kesempatan lain – saat pelantikan Konstituante – Soekarno menyatakan bahwa Indonesia memerlukan sistem politik baru sesuai dengan tradisi Indonesia sendiri.[73]

Sangat boleh jadi inilah yang menyebabkan Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan keputusan membuka kesempatan tumbuhnya partai-partai politik merupakan ide Hatta, yang karenanya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 ditandatangani oleh Hatta dan bukan Soekarno. Dengan demikian, penyesalan Soekarno atas keputusan tersebut sama halnya dengan menimpakan kesalahan, kalau dapat disebut kesalahan, pada Hatta. Sebagai pribadi yang teguh dengan penegakan prinsip-prinsip demokrasi Hatta tidak dapat turut bertanggung jawab atas sistem baru yang akan ditetapkan Soekarno dan memilih mengundurkan diri dari pentas politik nasional. Dalam sindiran halusnya Hatta menuliskan tentang pribadi Soekarno:

Bahwa Soekarno seorang patriot jang tjinta pada Tanah Airnya dan ingin melihat Indonesia jang adil dan makmur selekas-lekasnja, itu tidak dapat disangkal. Dan itulah barangkali motif jang terutama baginja untuk melakukan tindakan jang luar biasa itu, dengan tanggung djawab sepenuhnja pada dirinja. Tjuma berhubung dengan tabiatnja dan pembawaannja, dalam segala tjiptaannja ia memandang garis besarnja sadja. Hal jang mengenai detail, jang mungkin menjangkut dan menentukan dalam pelaksanaannja, tidak dihiraukannja. Sebab itu, ia sering mentjapai yang sebaliknja dari yang ditudjunja.

... Tujuannja selalu baik, tapi langkah-langkah jang diambilnja kerapkali mendjauhkan dari tudjuannja itu. Dan sistem diktatur yang diadakannja sekarang atas nama demokrasi terpimpin akan membawa ia kepada keadaan jang bertentangan dengan tjita-tjitanja selama ini.[74]

---

[73] Lev., *The Transition to Guided...*, p. 16.

[74] Hatta, *Demokrasi Kita*, p. 19-20.

Dalam rapat umum di Bandung 27 Januari 1957, Soekarno menyatakan niatnya mencampuri urusan pemerintahan sebagai masa peralihan, yaitu sebelum konstituante selesai menjalankan tugas dan hasil-hasilnya dapat direalisasikan. Untuk kesekian kalinya Soekarno menyesalkan keputusan (Hatta) yang membuka jalan bagi partai-partai politik, karena baginya partai politik merupakan sumber penyakit dan penyebab perpecahan. Ketika pemimpin partai diminta pendapatnya oleh presiden tentang konsepsinya, hanya ada enam partai yang menyetujuinya yaitu PKI, Partai Murba, PNI, PRN, Baperki dan Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian Negara. Sementara Masyumi, NU dan partai lainnya menolak, dan menuntut setiap perubahan sistem pemerintahan harus diambil melalui Konstituante. Namun karena kondisi kabinet semakin lemah dengan mundurnya PSII, sementara desakan pendukung Soekarno semakin kuat, Ali Santroamidjojo menyerahkan mandatnya pada presiden, dan saat itu juga Soekarno mengumumkan negara dalam keadaan bahaya.[75]

Dalam perjalanannya, tradisi tradisi politik dalam badan konstituante hasil Pemilu 1955 justeru kian mengukuhkan keyakinan Soekarno tentang tidak sesuainya demokrasi liberal di Indonesia. Ketika parlemen sudah mampu membangun pemerintahan yang lebih solid dan kuat, meski akhirnya gagal, anggota konstituante justeru jatuh pada perdebatan ideologis. Konstituante, termasuk dari kalangan Islam tidak mengalami hambatan berarti ketika membahas masalah bentuk negara, bahasa, bendera negara, hak asasi manusia serta isu konstitusi yang relevan. Pembahasan menjadi alot ketika menyangkut dasar negara, Pancasila, Islam atau sosialisme ekonomi.[76]

Tidak seperti dalam masalah politik parlemen yang terbiasa dengan "politik dagang sapi", yang menyebabkan politisi Islam terpecah-belah, dalam masalah konstitusi seluruh partai politik Islam bersatu padu, hingga sulit dibedakan suara mana yang paling keras di

---

[75] Sastroamidjojo, ***Tonggak-tonggak...***, p. 372-5.

[76] Ma'arif, ***Islam di Masa Demokrasi...***, p. 32.

antara mereka. Persoalan krusial yang menjadi pembahasan adalah masalah butir pertama Pancasila, di mana kalangan Islam menghendaki klausul yang berbunyi *dan Kwajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Para Pemeluknya* dikembalikan. Sementara kaum nasionalis sekuler, termasuk Soekarno dan militer menghendaki sebagaimana UUD 1945.[77]

Sidang pleno konstituante yang berlangsung tujuh kali sejak 10 November 1956 sampai dengan 2 Juni 1959 selalu diwarnai dialog yang berlangsung ideologis, di mana setiap partai memberikan argumen secara mutlak-mutlakan yang tidak memungkinkan dialog dan *sharing* gagasan berlangsung konstruktif. Masing-masing kelompok membangun antagonisme dan bukan saling mendekat. Kecenderungan saling menjauh di antara kelompok menjadikan kompromi-kompromi tidak dapat dibangun secara bijak. Akibatnya, sidang konstituante menemui jalan buntu (*deadlock*) dalam menetapkan konstitusi, bahkan ketika Soekarno meminta wakil-wakil partai melakukan lobi selama beberapa hari.[78]

Ada gejala-gejala egoisme yang berlebihan, di mana mereka hanya mengenal kata setuju atau menolak. Sangat dimungkinkan ada hal lain yang lebih diharapkan dari para politisi negeri ini ketika itu dari pada sekedar bermain dalam sistem demokrasi. Setiap kelompok seolah memiliki jalan dan tujuan sendiri-sendiri dan negara hanya dijadikan fasilitas legal untuk merebut kekuasaan. Setiap kelompok bersikap reaksioner dalam menyikapi posisi dan kebijakan yang lain, di mana kekuatan logika dibelakangkan, sementara logika kekuatan mengemuka. Akibatnya, masalah-masalah bangsa terabaikan karena pemerintah dan parlemen hanya disibukkan oleh pergulatan kepentingan politiknya sendiri. Secara umum sidang konstituante

[77] Adnan Buyung Nasution, ***Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstitusi 1956-1959***, (Jakarta: Grafiti, 1995) p. 40-41.

[78] ***Ibid.***, p. 44.

memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran arah perjuangan dari nasionalisme ke primordialisme ideologis. Integritas nasionalisme mereka runtuh oleh fragmentasi kepentingan politik golongan. Karena itu, setelah dinilai tidak mampu menyelesaikan tugasnya, akhirnya penyelesaian masalah konstitusi dilakukan di luar Konstituante. Dalam hal ini Soekarno mengeluarkan dekrit yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. [79]

[79] Perbedaan ideologi mengambil alih komitmen nasional, sebagaimana sinyalemen Feith yang menyatakan bahwa mereka sedikit sekali mempertahankan nasionalisme sebagai komitmen perjuangan. Herbert Feith, ***Soekarno – Militer dalam Demokrasi Terpimpin*** (***Dynamic of Guided Democracy***), terjemahan Pustaka Sinar Harapan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), p. 12. Simak kembali Ma'arif, ***Islam di Masa Demokrasi...***, p. 32.

DEKLINASI DEMOKRASI DI INDONESIA MASA SOEKARNO

A. Soekarno dan Demokrasi

Soekarno (1901-1970) merupakan tokoh sentral yang secara individual paling berpengaruh sejak era pergerakan nasional, masa revolusi kemerdekaan, hingga membekunya demokrasi di republik ini. Dilahirkan dari kalangan priyayi rendahan, dengan orang tua berbeda agama: ayah seorang muslim (abangan) dan ibu penganut Hindu Bali dari kasta Brahmana, Soekarno tumbuh lekat dengan tradisi budaya dan keagamaan Jawa yang sinkretik. Pendidikan modern khas Barat dan pengalamannya di berbagai daerah memperkaya khazanah pemikiran dan kepribadian Soekarno menjadi seorang tokoh utama pergerakan dan revolusi kemerdekaan.[1]

Soekarno merupakan sedikit di antara generasi negeri ini yang beruntung pada masa itu, yang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kecerdasan Soekarno terfasilitasi

[1] Orang tua Soekarno dikenal sebagai penganut Theosofi kejawen. Cindi Adams, ***Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia***, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), p. 27-9. Simak pula Onghokham "Soekarno, Mitos dan Realitas" dalam Taufiq Abdullah, ed., ***Manusia dalam Kemelut Sejarah***, (Jakarta: LP3ES, 1981), p. 21.

pendidikan sejak dari Sekolah Dasar desa di Tulungagung; Sekolah *Angka Loro* (Angka Dua) sidoarjo; Sekolah *Angka Siji* (Angka Satu) Mojokerto; *Europeese Lagere School* (ELS) Mojokerto; *Hogere Burger School* (HBS) Surabaya; dan Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hoge School/THS*) di Bandung. Di HBS, lembaga pendidikan yang tergolong sulit dimasuki oleh kaum bumi putera, Soekarno mulai bersentuhan dengan paham sosial politik Barat dan sekaligus pergerakan politik. Untuk pertama kalinya Soekarno berkenalan dengan teori-teori Maxisme dari salah seorang gurunya yang juga seorang penganut sosial demokrat, C. Hartogh. Soekarno tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto dan sekaligus merupakan tempat magang politiknya yang pertama, karena rumah itu merupakan pusat gerakan sosial politik terbesar di Indonesia ketika itu, Sarekat Islam (SI), di mana Tjokroaminoto merupakan pemimpinnya.[2]

Di tempat itu tokoh-tokoh politik dari berbagai daerah biasa berkumpul, berdiskusi dan menggalang kekuatan. Intensitas pengaruh pemikiran politik Soekarno kian terasah setelah menikahi puteri Tjokroaminoto, Oetari. Soekarno kian sering mendampingi Tjokroaminoto dalam berbagai pertemuan dan mengikuti berbagai pidatonya. Besarnya pengaruh Tjokroaminoto menyebabkan Soekarno menyatakan bahwa ia merupakan seorang yang mengubah hidupnya. Sejak saat itu, Soekarno aktif dalam berbagai pergerakan, mulai *Trikoro Darmo*, *Studieclub*, kepanduan hingga mengubah perkumpulan *Jong Java* menjadi *Jong Indonesia*. Seiring meluasnya kesadaran nasionalisme di Indonesia dan Asia pada umumnya, Soekarno semakin aktif dan intesif dalam menebarkan semangat untuk menuntut kemerdekaan. Terlebih ketika Budi Utomo yang sebelumnya dipandang sebagai pioner kebangkitan nasional menarik

[2] Sedemikian besarnya pengaruh SI menjadikan Tjokroaminoto sering disebut sebagai "raja yang tak dinobatkan". Simak Badri Yatim, ***Soekarno, Islam dan Nasionalisme***, (Jakarta: Logos, 1999), p. 8-9.

diri dari kecenderungan revolusioner dalam gerakan-gerakannya pada kurun yang lebih kemudian.[3]

Kian efektifnya politik etis menjadikan paham-paham sosial politik dan nasionalisme berkembang cepat dan luas di berbagai kalangan masyarakat bangsa ini. Politik etis yang semula ditujukan untuk menopang perkembangan situasi di daerah penjajahan memperluaskan kesadaran politik yang dalam perkembangannya melampaui kemampuan pemerintah kolonial untuk membendungnya. Upaya-upaya pemerintah melakukan berbagai pembatasan tidak menyurutkan semangat juang kaum terpelajar untuk membangun kesadaran kebangsaan. Gerakan-gerakan nasionalisme merebak tidak hanya di nusantara tapi juga berkembang pada pelajar Indonesia di negeri Belanda. [4]

Gerakan-gerakan yang semula bertujuan meningkatkan kesejahteraan, berkembang menjadi gerakan nasionalisme kedaerahan, yang ditandai munculnya kelompok pemuda nasionalis Jawa (*Jong Java*), Sumatera (*Jong Sumateranen Bond*), Ambon (*Jong Ambon*) dan sebagainya. Gerakan-gerakan nasionalis tersebut semula berupaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Meskipun demikian, semangat tersebut sudah mengambil bentuk nasionalisme dalam pengertian

---

[3] Setelah kepemimpinan Radjiman Widiodiningrat, seorang pejabat pemerintahan, bupati masa kolonial sifat reaksioner gerakan ini semakin mundur dari percaturan politik. Abdurrachman Surjomihardjo, ***Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi***, (Jakarta: Idaju, 1979), p. 40. Simak pula Abdurrachman Surjomihardjo, ***Budi Utomo Cabang Betawi***, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), p. 72.

[4] Dengan politik etis sejak 1901, Belanda mengharapkan terbangunnya suatu masa peralihan yang cepat di Indonesia, dari pola statis ke dinamis di bawah kendali Belanda. Benda, ***Bulan Sabit...***, p. 55-6. Pemerintah Belanda bahkan sempat mengeluarkan edaran sebagai upaya membatasi gerakan kaum terpelajar agar tidak terseret dalam gerakan kemerdekaan. Kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan politik atau serikat buruh diancam dengan pembatalan beasiswa dan menghimbau para orang tua untuk tidak mengirimkan biaya pendidikan. Simak Rose, ***Biografi Politik ...***, p. 43.

yang sebenarnya. Dari sanalah gerakan politik yang lebih jelas dengan tujuan kemerdekaan mulai ditandai dengan reorientasi SI, disusul kemudian *Indische Partij*, Perhimpunan Indonesia (*Indische Vereeniging*), Partai Nasionalis Indonesia, PKI dan sebagainya. Perbedaan corak perjuangan dan ideologi politik setiap partai bahkan mulai memunculkan konflik dan pertentangan internal maupun antar partai politik. [5]

Perjalanan hidup Soekarno yang semula seorang *Abangan* yang meski tidak terlalu *intens* terlibat dengan SI, serta interaksinya dengan kaum nasionalis sekuler membentuk visi pengelolaan negara yang berorientasi pada pengakomodasian terhadap perbedaan-perbedaan di antara kaum revolusioner yang merupakan pilar-pilar perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu tampak pada artikel monumentalnya yang ditulis dalam majalah *Indonesia Muda*, yang berjudul *Nasionalisme, Islam dan Marxisme*. Soekarno menyatakan bahwa ketiganya memiliki kepentingan dan makna yang sejalan dan harus diakomodir dalam melawan musuh utama, kapitalisme dan imparialisme.[6]

Pandangan ini tampaknya mendominasi pemikiran Soekarno sejak mulai benar-benar aktif dalam perjuangan hingga akhir hayatnya. Nilai menonjol dalam pemikiran dan sepak terjang politiknya banyak diorientasikan dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan untuk memajukan bangsa Indonesia selekas mungkin. Sejak awal Soekarno berambisi besar dalam mempersatukan parta-partai politik, yang dimulai dengan rencana

---

[5] *Indische Vereeniging* atau PI semula organisasi sosial dan kebudayaan sekaligus tempat bertukar pikiran dan informasi dari tanah air, tetapi berkembang menjadi gerakan politik yang menetapkan kemerdekaan sebagai tujuan. Simak Kartodirdjo, ***Pengantar Sejarah Indonesia Baru...***, p. xi. Simak juga Mohammad Hatta, ***Indonesia Merdeka; Pidato Pembelaan di Hadapan Pengadilan Den Haag***, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), p. 13.

[6] Soekanrno "Nasionalisme, Islam dan Marxisme" dalam Soekarno, ***Di Bawah Bendera Revolusi***, (Djakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963), p. 1.

pembentukan Perhimpunan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Sekalipun tidak cukup efektif karena kepentingan politik dan perbedaan jalan perjuangan antar partai, namun hal ini menunjukkan pola umum yang menjadi nilai lebih dan nantinya juga kekurangan Soekarno dalam membangun tatanan sosial politik Indonesia masa depan. Soekarno bahkan tidak mampu menghindarkan munculnya friksi internal partainya sendiri, PNI yang terbelah menjadi PNI dan Partai Indonesia (Partindo).[7]

Soekarno dengan Partindo dan Hatta bersama Sjahrir berbeda pendapat dalam menentukan masa depan Indonesia. Hatta dan Sjahrir yang lekat dengan pemikiran sosialismenya menolak segala bentuk kapitalisme baik oleh kalangan kolonial, Timur Asing maupun kaum Marhaen sebagai kelas bawah. Sementara itu, Soekarno lebih menonjol anti imperialismenya dibanding kapitalisme, karenanya meski menentang kapitalisme Barat namun Soekarno menyokong kapitalisme Indonesia. Di sinilah kekhasan pemikiran Soekarno yang diliputi besarnya semangat nasionalisme, yang dari perspektif tertentu melampaui batas-batas normatif ideologi.[8]

Soekarno berbeda dari kebanyakan tokoh nasional negeri ini yang secara konsisten berupaya menempatkan ideologi sebagai basis berfikir dan berpolitik. Sekalipun juga apresiatif terhadap ideologi Barat, namun Soekarno menempatkannya sebagai wacana politik yang harus disikapi secara kritis dengan kerangka pikir yang mengedepankan kepentingan nasional. Soekarno berusaha membangun ideologi khas yang dapat menjadi pijakan dalam membangun persatuan bangsa ini. Tingginya nasionalisme dan keinginan Soekarno menjadikan bangsa ini sebagai bangsa besar tidak jarang mengabaikan berbagai hal yang merugikan dirinya sendiri bahkan hal-hal yang dicita-citakannya. Nasionalitas Soekarno sering

[7] Simak Yatim, *Soekarno, Islam...*, p. 34-5.
[8] *Ibid.*

kali membuatnya tidak mampu melihat batas-batas kompromi yang mungkin dan tidak untuk dilakukan.[9]

Di kalangan kaum revolusioner yang pada umumnya lekat dengan semangat heroik dan pola pikir pragmatis, langkah-langkah politik Soekarno sering kurang memuaskan. Sekalipun memimpikan kemerdekaan sebagaimana umumnya kaum pergerakan, Soekarno tetap bertahan dengan garis politiknya, yang lebih menyukai cara-cara kooperatif dan menghindari terjadinya pertumpahan darah. Bahkan pada saat-saat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan, di mana jalan damai tidak mungkin dilakukan, Soekarno berusaha menempuh jalan perundingan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan.[10]

Soekarno merupakan tokoh yang paling populer dan paling dapat diterima semua kalangan. Kuatnya pengaruh Soekarno di masyarakat Indonesia menyebabkan usaha-usaha kelompok revolusioner radikal tidak mempunyai cukup peluang untuk mengambil alih kekuasaannya saat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Kharismanya sebagai pemimpin bahkan meningkat dan tak tertandingi tokoh manapun. Soekarno telah menjadi seorang tokoh nasional, tokoh bangsa dan bukan golongan dengan tingkat independensi tinggi. Dalam politik partisan, seseorang mungkin pengikut sebuah aliran paham ideologi yang merupakan *rival* bagi yang lain, tetapi tidak demikian halnya pada Soekarno.[11]

---

[9] Simak kritik Hatta pada Soekarno. Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 19-20.

[10] Oleh kaum revoluioner radikal Soekarno sempat dijuluki sebagai kolaborator kolonial karena kesediaannya bekerjasama dengan penjajah, dan berharap dapat menyelesaikan revolusi tanpa pertumpahan darah. Simak Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 135.

[11] Popularitas Soekarno tampak tak tertandingi yang dibuktikan ketika Tan Malaka berusaha mengambilalih kedudukan Soekarno, tetapi tidak didukung oleh siapapun. ***Ibid.***, p. 148-9. Soekarno tidak mempunyai pendukung dari partai politik ataupun pengikut pribadi yang terorganisir. Simak Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 32.

Di tengah kondisi negara yang belum stabil baik dari dalam maupun luar, ketokohannya bersama Hatta diperlukan sebagai simbul negara, figur pemersatu perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan. Berbagai krisis yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan berpotensi meruntuhkan ketokohan keduanya, terutama bilamana kebijakan pemerintah tidak dapat diterima masyarakat di dalam negeri. Lunturnya ketokohan keduanya dapat menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara di masa depan. Dalam kaitannya dengan penokohan Dwi-Tunggal, Hatta menuliskan:

Alasan jang dikemukakan ialah supaja Presiden dan Wakil Presiden tetap dan tidak terganggu gugat dalam memimpin nagara. Presiden dan Wakil Presiden diperlindungi oleh kabinet jang bertanggung djawab politik, jang setiap waktu dapat diganti kalau perlu. [12]

Dalam perkembangannya konsep Dwi-Tunggal tidak berjalan seperti harapan. Bukan kabinet dan parlemen yang melindungi Dwi-Tunggal, tetapi sebaliknya. Presiden dan wakilnya sering kali harus turun tangan melindungi parlemen dari gelombang ketidakpuasan masyarakat. [13]

Ketokohan Soekarno memiliki kemiripan dengan tokoh-tokoh yang dikaguminya, seperti Tito dan Castro. Perbedaannya, Soekarno bukan tokoh yang berusaha mempertahankan posisi secara sistematis dengan menggalang kekuatan militer untuk menopang pengaruh. Soekarno benar-benar sudah cukup sebagai kekuatan dominan. Hingga penghujung kepemimpinannya, setiap kelompok senantiasa berupaya mengidentifikasikan diri sebagai pendukung atau memperoleh legitimasi Soekarno untuk eksis dalam pemerintahan. Hanya sedikit kelompok sosial politik yang berani secara terang-

[12] Mohammad Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 9-10.

[13] ***Ibid.***, p. 10-1.

terangan mengkritik keras Soekarno, terutama dari kalangan Islam, Masyumi.[14]

Sejak mula Soekarno adalah tokoh yang berpandangan demokrat. Soekarno berada di antara dua mainstream demokrasi yang membelah dunia ketika itu, liberal dan komunis. Referensi utama kedua demokrasi, *Declaration of Independence* Jeferson maupun *Manifesto Komunis*, diberikan respek yang sama karena dalamnya dinilai sama-sama memiliki kebenaran. Namun demikian, visi sosialis yang mewarnai pemikiran Soekarno menjadiklannya lebih berharap konteks demokrasi yang berkembang disesuaikan dengan realitas keindonesiaan. Karena itu, Soekarno membedakan demokrasi bukan dalam dikotomi Liberal-Komunis, melainkan Barat dan Timur.[15]

Demokrasi Barat hanyalah demokrasi politik, yang atas dasar persamaan dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak-hak istimewa raja, namun pada kenyataannya digantikan dengan kekuasaan modal. Demokrasi liberal Barat hanya memberi perhatian pada masalah politik, yang kurang memberikan perhatian sama terhadap masa ekonomi, terutama pada rakyat miskin. Kebanyakan rakyat yang rata-rata miskin semakin tertinggal akibat lemahnya *bergaining* modal.[16]

Sekalipun berbeda pandangan dari Hatta, Soekarno membiarkan sistem politik liberal berlangsung sedemikian lama tanpa intervensi berarti. Padahal membiarkan demokrasi liberal berlangsung sama halnya dengan membiarkan kekhawatirannya, di mana krisis politik berjalan tanpa penyelesaian, menjadi kenyataan. Konstelasi politik parlemen tak mampu mengakhiri pertarungan

---

[14] Natsir sebagaimana disitir Ma'arif merupakan tokoh yang sangat konsisten dengan demokrasi yang bercirikan Islam merupakan sedikit di antara tokoh yang berani memberikan kritik keras, dengan menyatakan bahwa segalanya ada dalam demokrasi terpimpin, kecuali demokrasi. Simak Ma'arif "Islam di Masa Demokrasi…", p. 35.

[15] Yatim, ***Soekarno, Islam dan…***, p. 70-1.

[16] ***Ibid.***, p. 73-5.

politik yang sedemikian *vulgar*, mengusik rasa nasionalismenya hingga membuatnya berupaya melakukan tinjauan ulang atas sistem demokrasi liberal.[17]

Pemikiran Soekarno memperlihatkan kecenderungan pada nasionalisme utopis. Dia seorang sosialis-nasionalis yang memimpikan kemandirian bangsanya di atas kekuatan sendiri. Dia sangat anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya, seolah menutup mata bahwa konstelasi dunia mengharuskan setiap negara menjalin hubungan terutama dengan pemilik modal yang umumnya berada dalam kutub negara kapitalis dan mantan penjajah. Terlalu besarnya harapan Soekarno untuk mewujudkan cita-cita nasionalismenya sering membutakan dari langkah-langkah kerja pemerintahan tahap demi tahap, sebagaimana kritik Hatta pada bagian terdahulu.[18]

Soekarno sangat menyadari posisinya yang secara nasional dibutuhkan sebagai pemersatu, sebagai pemimpin besar yang paling didengar keputusannya. Tanpa Soekarno, konfrontasi terbuka sangat mungkin terjadi di kalangan kaum revolusioner. Posisi ini menjadikannya sebagai pemimpin yang merasa paling tahu yang terbaik bagi negerinya, meski tak pernah mudah mewujudkannya. Sebagai pemimpin besar, Soekarno hanya fokus pada isu-isu besar dan kurang mampu merumuskan gagasan secara lebih teknis, yang sebenarnya juga tidak lebih mudah dibanding menelorkan gagasan besar. Banyak gagasan dibangun soekarno yang sebenarnya masih terlalu konseptual dan tidak mampu menyentuh jabaran teknis yang

---

[17] Wahab Hasubullah sebagaimana dikutip Feillard, menyatakan Soekarno terlalu *gandrung* terhadap persatuan hingga termakan ambisi mempersatukan partai-partai politik yang sejak semula memiliki uunsur-unsur yang berbeda, yang meutahil bisa dipersatukan. Simak Feillard,***NU vis a vis Negara...***, p. 51. Soekarno menawarkan demokrasi yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong, tanpa anarkhi liberalisme tanpa otokrasi diktatur. Ma'arif "Islam di Masa Demokrasi...", p. 34.

[18] Simak kembali Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 19-20.

tak kalah rumit. Minimnya referensi historis serta kecenderungan berfikir pada masanya menyebabkan solusi-solusi dan langkah-langkah yang diambil berakibat sama sebagaimana hasil yang diraih bangsa-bangsa baru lainnya.[19]

Keraguan Soekarno terhadap demokrasi liberal Barat telah dimulai sejak masa pergerakan nasional, namun baru menemukan benar-benar momentum pembuktian empiris dalam pengalaman politik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan dan mencapai puncaknya setelah Pemilu 1955. Perilaku politik kalangan politisi sipil mengecewakan pihak-pihak yang merasa telah terlalu banyak mencurahkan jiwa dan raganya untuk menegakkan kemerdekaan. Kegagalan paling fatal terletak pada sedikitnya upaya politisi sipil berusaha mempertahankan nasionalisme sebagai dasar komitmen.[20]

Para politisi sipil hanya menghasilkan ritual politik pemerintahan yang mengecewakan yang tidak menunjukkan adanya jaminan berdirinya sebuah negara besar yang maju dan sejahtera seperti yang didambakan sebelumnya. Akibatnya, mereka mendapatkan perlawanan dari generasi revolusioner yang tercerabut dari akar sosialnya selama perang 1942-1949. Demokrasi ditempatkan sebagai suatu prinsip yang mendasari legalitas pemerintahan *vox populi*, *vox dei*, yang dalam jangka panjang sejalan dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pada kenyataannya, kabinet-kabinet yang terbentuk selalu gagal mempertahankan dukungan politik, bahkan intensitas oposisi justeru semakin meningkat.[21]

Mereka kehilangan *elan vital* kejuangan, yang disertai kemerosotan ekonomi. Dalam situasi tersebut kekuatan presiden Soekarno, kalangan revolusiooner radikal dan militer mengalami

[19] Pribadi Soekarno yang terlalu percaya diri menyebabkannya tidak dapat mentolerir – yang menurut istilah Hatta – *fair chance* untuk mengalami sendiri apakah sebuah sistem berhasil atau gagal. ***Ibid.***, p. 18.

[20] Feith., ***Soekarno-Militer...***, p. 12.

[21] ***Ibid.***, p. 13.

kebangkitan. Kelompok militer memperoleh kemenangan besar akibat peristiwa 17 Oktober 1952, ketika hampir berhasil mendesak Soekarno membubarkan parlemen dan mendirikan sistem pemerintahan diktatur, meski pada akhirnya mengalami kegagalan. Pemerintahan hasil Pemilu bahkan cenderung menggeser profesionalisme birokrasi ke arah politisasi, di mana pertimbangan teknis administratif dan managemen ekonomis dikesampingkan.[22]

Pemilu sendiri bahkan hanya memperluas fragmentasi sosial yang semula internal partai politik beralih menjadi antar partai politik, bahkan antar anggota masyarakat. Pemilu telah mempertajam perbedaan padangan mengenai dasar dan tujuan negara dengan adanya pertentangan mengenai dasar negara. Kampanye Pemilu juga mempertajam pembagian komunitas pedesaan yang sebelumnya damai terbelah ke dalam pendukung partai politik tertentu. Kekecewaan memuncak sejak tradisi parlementariat pasca pengakuan kedaulatan ditegakkan kembali. Perilaku politisi yang tidak mampu membangun konsolidasi antar kekuatan politik menyebabkan Soekarno dan terutama militer, kekuatan yang memiliki segalanya untuk memaksakan kehendak, turut mengintervensi percaturan politik nasional. Kegagalan politisi sipil menyebabkan militer yang lebih berjasa dalam perjuangan kemerdekaan tidak dapat mempertahankan dominasi sipil atas militer.[23]

Heroisme perang revolusi kemerdekaan menyebabkan munculnya militer sebagai kekuatan baru yang dominan, meski kurang tampak di pentas politik. Militer menjadi satu kekuatan yang merasa berhak dan lebih mampu menentukan jalannya pemerintahan. Bermula dari kekecewaan kalangan nasionalis bersenjata, militer,

---

[22] ***Ibid.***, p. 15.

[23] Intervensi militer terhadap politisi sipil sudah tampak pada kabinet-kabinet awal, Natisr, yang dikenal dekat dengan militer. Ketika komposisi kabinet tidak sesuai atau kebijakan kabinet menyentuh persoalan militer, mereka melakukan reaksi sebagai mana peristiwa 27 Oktober 1952. Peran militer tersebut dapat disimak kembali Feith, ***The Decline...***, p. 246-273.

kekecewaan pada parlemen meluas pada rakyat bawah. Parlemen kehilangan respek dari militer ditandai dengan demonstrasi besar-besaran hasil rekayasa militer yang menuntut pembubaran parlemen. Demonstran dan militer menuntut ditegakkannya diktatur, tapi Soekarno menolak termasuk untuk membubarkan parlemen. Soekarno menjanjikan akan menyelenggarakan Pemilu untuk memperbaiki keadaan.[24]

Fragmentasi parlemen dan sosial politik yang semakin menajam pasca Pemilu memuncakkan kekecewaan pada demokrasi. Bahkan ada keinginan untuk menunda kembali pelaksanaan Pemilu berikutnya. Sekalipun demikian, Soekarno menyatakan tidak tertarik membangun rejim diktatur. Sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, praktis konstituante dan parlemen telah berakhir. Tindakan ini mendapat dukungan terutama dari kalangan militer. Dalam situasi tersebut PKI memanfaatkan keadaan dengan berdiri sebagai pilar penyangga pemerintahan, sehingga terbangun aliansi Soekarno-Militer-PKI.[25]

B. Demokrasi Terpimpin; Akhir Demokrasi

Ide tentang perlunya Demokrasi Terpimpin sudah mulai mengemuka sejak 1956, ketika kenyataan politik yang dihadapi pasca Pemilu begitu mengecewakan. Ketidakpuasan paling jelas tampak pada Soekarno sendiri akibat tidak diikutsertakannya PKI dalam kabinet, yang berarti menyimpang dari idealismenya tentang persatuan. Tampaknya kedekatan Soekarno dengan negara-negara blok-Timur, di samping konsepsinya sejak masa pergerakan, turut

[24] Nasution, ***Aspirasi Pemerintahan...***, p. 44.

[25] Sementara dari kalangan Islam hanya NU yang secara moderat bersedia turut serta dalam pemerintahan. Sebagai kelompok yang secara politik moderat, NU cenderung menghindarkan sikap konfrontatif bahkan terhadap Belanda di masa kolonial. Dalam pernyataannya tokoh NU menyatakan tetap bertahan dalam pemerintahan sekalipun tidak setuju dengan tindakan Soekarno. Hal ini dilakukan demi menjaga dominasi PKI meluas, sementara kalangan Islam lain memilih meninggalkan Jakarta. Simak Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 52-3.

mempengaruhi sikapnya terhadap partai-partai politik. Sebagaimana penyesalannya atas keputusan Hatta November 1945, dalam berbagai kesempatan Soekarno sering mengungkit tidak diikutsertakannya PKI dalam kabinet sebagai ketidakadilan.[26]

Kecenderungan otoriter sudah benar-benar tampak pada pertengahan 1958, di mana partai politik kehilangan hak-hak politiknya. Demokrasi Terpimpin benar-benar menemukan momentum setelah kebijakan kabinet direspon negatif oleh masyarakat, terutama militer. Situasi tersebut menyebabkan partai-partai politik benar-benar kehilangan pertisenya dalam kancah perpolitikan nasional. Mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sejarahnya sebagai pemeran utama panggung politik Indonesia. Keadaan ini diperparah oleh kegagalan badan konstituante hasil pemilu membangun kompromi dalam penyelesaian masalah konstitusi.[27]

Demokrasi Terpimpin dikonsepsikan sebagai koreksi atas demokrasi liberal yang menurut Soekarno tidak sejalan dengan kepribadian bangsa. Menurut Soekarno, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945: *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat/Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan*. Soekarno memaknainya sebagai demokrasi yang mengedepankan sikap gotong-royong dan kekeluargaan, serta menghindarkan anarkhi liberalisme ataupun otokrasi diktatur. Demokrasi Terpimpin tidak ubahnya sebuah keluarga besar dengan seorang pemimpin yang bijak dan mengayomi seluruh anggota keluarganya. Di dalamnya seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama ikut

---

[26] Sebagaimana dikutip Simanjuntak, Soekarno senantiasa mendengung-dengungkan, "Kita tidak bisa terus-menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam Pemilihan Umum mempunyai suara enam juta manusia". Simak Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 179.

[27] Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 29.

serta dalam musyawarah untuk menemukan mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah.[28]

Para tokoh partai merespon Demokrasi Terpimpin secara beragam. Sebagian berkecenderungan mendukungnya sebagai bentuk pengharapan atas perubahan politik, tetapi sebagian besar partai maupun tokoh nasional menolaknya. Sementara kelompok lain mendukung dengan beragam pemaknaan maupun pertimbangan konsekwensi politiknya. Partai Murba mendukung Demokrasi Terpimpin dalam arti dibentuknya partai tunggal atau gerakan nasional; bagi PKI Demokrasi Terpimpin berarti keharusan mengikutsertakannya dalam pemerintahan; bagi militer berarti peningkatan peran militer; sementara PNI dan NU mengartikan demokrasi terpimpin sebagai upaya memperkecil unsur kepemimpinan dengan ungkapan *setuju demokrasi dengan kepemimpinan bukan tanpa demokrasi*. Sekalipun dibahas dalam Konstituante, tapi Soekarno mengambil prakarsa terbesar dalam konseptualisasi Demokrasi Terpimpin dalam bentuk yang jelas. Terlebih ketika pembahasan Demokrasi Terpimpin diambilalih melalui sidang-sidang tertutup Dewan Nasional, di mana Soekarno memainkan inisiatif terbesar di dalamnya.[29]

Soekarno adalah tokoh yang paling getol menyuarakan gagasan Demokrasi Terpimpin, tapi sebenarnya tegaknya pemerintahan ini

---

[28] Demokrasi parlementer dinilai tidak memberikan perbaikan signifikan di awal revolusi. Demokrasi Terpimpin hadir sebagai koreksi atas demokrasi liberal yang didasarkan atas gagasan Soekarno 1956. Department of Information Republic of Indonesia, ***The Indonesia Revolution, Basic Documents and The Idea of Guided Democracy***, (Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia, Desember 1964), p. 18. Simak pula Ma'arif "Islam di Masa Demokrasi...", p. 34-5.

[29] Sebelumnya Februari 1957, hanya enam partai politik yang menyetujui gagasan Soekarno, yaitu PKI, Murba, PRN, PNI, Baperki dan Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian Negara, sedangkan yang lain menolak. Simak kembali Sastroamidjojo, ***Tonggak-tonggak...***, p. 373. Sjahrir menyebut Demokrasi Terpimpin sebagai Fasisme Indonesia. Selengkapnya dapat disimak Sjahrir, ***Sosialisme Pembangunan***, (Jakarta: Lappenas, 1982). Simak juga Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 36 dan 71.

ditopang oleh dua pilar utama lainnya, yaitu Militer dan PKI, meski hubungan ketiganya berlangsung antara kebutuhan dan ketegangan. Sebenarnya ketegangan utama terjadi antara Soekarno dan militer, sementara posisi PKI hanya instrumen politik Soekarno dalam menjamin stabilitas politik pemerintahannya. Ini dikarenakan antara militer dan Soekarno terdapat perbedaan ideologis dan garis perjuangan yang tajam. Sejak revolusi, militer beberapa kali berhadap-hadapan dengan Soekarno, mulai dari penentangannya pada politik diplomasi dan sikap kooperatif Soekarno pada penjajah serta insiden 17 Oktober 1952 dan 27 Juni 1955 yang menandai titik-titik perbenturan antara Soekarno dan militer. Selain itu, Soekarno cenderung lebih respek pada kaum komunis, dan militer sebaliknya, anti-komunis. Soekarno kagum pada pemimpin Kuba, Fidel Castro, sementara militer lebih mengagumi Ayub Khan meski isu-isu yang diangkat tidak cukup revolusioner.[30]

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin praktis mulai berjalan sejak kabinet Juanda. Setelah demosionernya kabinet Alisastroamidjojo II, presiden menunjuk Soewirjo dari PNI untuk membentuk kabinet, tetapi mengalami kegagalan akibat penolakan kalangan Islam yang tidak bersedia bekerja sama dengan kaum komunis. Presiden kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet dan menunjuk sendiri orang-orang yang duduk di kabinet. Hasilnya, kabinet baru terbentuk di bawah Perdana Menteri Djuanda, tokoh non-partai. Sekalipun sebagian anggota kabinet dikenal sebagai tokoh partai, namun kalangan Islam, terutama Masyumi dan NU, tidak mengakui keterlibatan mereka sebagai wakil partainya. Kabinet Djuanda lebih merepresentasikan kehendak presiden sebagai bagian dari upaya memuluskan jalan dalam

[30] ***Ibid.***, p. 37. Kasus 17 Oktober 1952 demonstrasi yang digalang militer masa pemerintahan Wilopo. Sedangkan yang dimaksud kasus 27 Juni 1955 adalah pemboikotan dalam pelaktikan calon KSAD, Bambang Utoyo, bahkan pada saat yang sama menyatakan pada kabinet menolak kepemimpinannya. Simak Feith, ***The Decline...***, p. 399.

pembentukan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Berbagai protes yang ditujukan terhadap susunan kabinet tidak dihiraukan, karena Presiden mendasarkan tindakannya pada alasan darurat perang. Mahkamah Agung juga tidak mempunyai pilihan selain membenarkannya.[31]

Respon paling ekstrim terhadap kabinet baru ditunjukkan dengan menguatnya pemberontakan di berbagai daerah, yang dimulai dari Sumatera Barat. Dengan dimotori tokoh-tokoh yang pernah membidani berdirinya dewan-dewan daerah, gerakan-gerakan tersebut memberikan ultimatum pada pemerintah agar presiden kembali pada kedudukannya secara konstitusional, dan mengangkat Hatta dan Hamengkubuwono sebagai formatur kabinet. Gerakan mencapai titik kritis dengan dimaklumkannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Kolonel Ahmad Husein. Gerakan tersebut sebenarnya ditujukan untuk menghentikan ambisi Soekarno. Setelah penandatanganan *Piagam Perjuangan Semesta* (Permesta), Kolonel D.J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI. Usaha untuk menghindari pertumpahan darah mengalami kegagalan, bahkan setelah Hatta, tokoh-tokoh Masyumi dan partai-partai Kristen berusaha menengahi.[32]

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Angkatan Darat di bawah Nasution mengusulkan agar kembali pada UUD 1945. Nasution mengajukan beberapa alasan, *pertama*, di dalam UUD 1945

---

[31] Noer, ***Partai Islam...***, p. 363. Lev, ***The Transition...***, p. 20.

[32] Sebelum meletusnya pemberontakan, Soekarno bahkan sempat terancam oleh aksi pembunuhan dalam peritiwa Cikini. Sekretariat Negara Republik Indonesia, ***30 Tahun Indonesia...***, p. 119. Pemberontakan PRRI/Permesta dapat simak Usman Tampubolon "Pemberontakan PRRI/Permesta: Tahap Akhir Pemerintahan yang Labib" dalam ***Prisma***, No. 7, Agustus 1978. Simak juga Lev, ***The Transition...,*** p. 40. Karena pelaku dalam peristiwa Cikini adalah pengikut Masyumi dari sayap GPII, maka Natsir sebagai pimpinan partai dianggap bertanggungjawab atau setidaknya mengetahuinya. George McTurnan Kahin "In Memoriam: Mohammad Natsir (1907-1993)" dalam ***Indonesia***, ***Cornell Southeast Asia Project***, No. 56, 1993, p. 163.

terdapat pasal-pasal yang mengakomodir wakil-wakil golongan fungsional sebagaimana gagasan Soekarno; *kedua*, menghapuskan pertentangan ideologis di Konstituante; *ketiga*, pembukaan UUD 1945 mengandung Pancasila; *keempat*, banyak perwira pemberontak yang mendukung UUD 1945, yang dengan demikian akan mengakhiri pemberontakan.[33]

Di pihak lain, parlemen bentukan Soekarno menyetujui dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Setelah Konstituante tidak dapat mengambil keputusan, bahkan melalui *voting* sekalipun, Soekarno dengan didukung Angkatan Darat berketetapan hati untuk mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Bersamaan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kabinet Djuanda dengan sendirinya demisioner sebab UUD 1945 menganut sistem presidensiil.[34]

Sejak pemerintahan Djuanda, Pemilu ditempatkan sebagai sebuah trauma politik hingga memunculkan tuntutan agar tidak diselenggarakan lagi hingga enam tahun ke depan. Bulan September 1958, kabinet Juanda mengumumkan bahwa Pemilu yang mestinya diselenggarakan satu tahun lagi ditunda lima tahun ke depan, sekitar pertengahan 1960-an. Kelanjutan parlemen benar-benar dipertanyakan ketika usul dimasukkannya ide-ide Demokrasi Terpimpin ke dalam struktur institusi negara mulai dibahas sebagai agenda perubahan politik. Di antara usul tersebut ada yang menerima secara parsial, di mana ide Demokrasi Terpimpin hanya diakomodir dalam undang-undang Pemilu, namun ada juga yang secara radikal ingin mengarah pada penggantian parlemen hasil Pemilu dengan parlemen yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional[35].

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konsep Demokrasi Terpimpin mulai menunjukkan bentuk yang jelas. Dengan dekrit

---

[33] ***Ibid.***, p. 207-8 dan 242.
[34] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 198.
[35] Lev, ***Soekarno-Militer...***, p. 29.

tersebut kabinet Djuanda dibubarkan 9 Juli 1959, digantikan kabinet kerja. Dengan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk, yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat sendiri oleh presiden. Anggota MPRS terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan wakil golongan. Presiden juga membentuk badan lain, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diketuai presiden sendiri.[36]

Pilar-pilar ideologis yang mendasari penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin ditentukan sendiri oleh Presiden. Atas persetujuan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dipimpinnya sendiri, pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul *Penemuan kembali Revolusi Kita* disetujui sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan kemudian disebut sebagai Manifesto Politik (manipol) Republik Indonesia. Selanjutnya pidato presiden 17 Agustus 1960, berjudul *Jalan Revolusi Kita* dan pidato di depan Sidang Umum PBB 30 September 1960 yang berjudul *To Build The World Anew* ditetapkan pula sebagai pedoman pelaksanaan manipol. Pijakan ideologis dalam manifesto tersebut mengandung maksud bahwa revolusi Indonesia mengandung lima gagasan: *pertama*, Undang-undang dasar 1945; *kedua*, Sosialisme ala Indonesia; *ketiga*, Demokrasi Terpimpin; *keempat*, Ekonomi Terpimpin; dan *kelima*, Kepribadian Indonesia, yang kelimanya kemudian dikenal dengan akronim USDEK.[37]

DPR baru tersebut diberikan tugas untuk menjalankan manifesto Politik (Manipol), merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin dan membantu presiden dalam menjalankan segala ketetapan MPRS. DPR hasil Pemilu tetap menjalankan tugasnya dan dengan menyetujui segala perombakan yang dilakukan pemerintah sampai tersusun DPR yang

---

[36] Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 205. Simak juga Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 311-2.

[37] Amin, ***Indonesia di Bawah...***, p. 50.

baru sesuai konsep Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya, DPR hasil pemilu tersebut dibubarkan presiden ketika menolak APBN 1960 yang diajukan pemerintah. Selanjutnya Soekarno membentuk DPR baru, DPR Gotong-royong (DPR-GR), yang komposisi anggotanya menguntungkan kalangan nasionalis dan komunis.[38]

Dengan demikian, wujud nyata dari Demokrasi Terpimpin tampak pada kian terpusatnya otoritas kekuasaan hanya pada presiden. Presiden ditempatkan sebagai pihak yang paling tahu bagaimana menentukan jalannya negara dan pemerintahan. Lembaga-lembaga politik dan pemerintahan hanya menjadi legitimasi struktur politik dan pemerintahan yang ada, karena presiden merupakan segalanya. Konstitusi tidak ditempatkan sebagai pijakan *rule of law*, melainkan beralih pada tangan presiden secara individual. Semua ini dilakukan Soekarno dalam upaya mengakomodasi perbedaan paham sosial politik ke dalam satu ikatan sebagaimana pernah digagasnya sejak masa pergerakan, nasionalis-Islam dan komunis (NASAKOM).[39]

Reaksi paling keras tentu saja muncul dari partai-partai politik. NU dan PNI menyatakan keberatan atas diterapkannya Demokrasi Terpimpin, apalagi disertai dengan pembubaran DPR hasil Pemilu. Mereka mengancam akan menarik anggotanya dari DPR-GR, tetapi urung dilakukan karena konsesi penambahan kursi oleh presiden. NU bahkan pada dasarnya tidak mungkin duduk bersama dalam satu kabinet dengan PKI, yang berarti mengharuskannya bekerja sama dengan musuh ideologisnya yang paling keras. Namun demikian

[38] Perbandingan anggota DPR yang semula 65 : 115 : 42 berubah menjadi 44 : 43 : 30, untuk komposisi Nasionalis-Islam-Komunis. Department of Information Republic of Indonesia, ***The Indonesia Revolution***, p. 19.

[39] Lev menduga NASAKOM menjadi jalan bagi Soekarno untuk mengakomodir tokoh-tokoh PKI untuk duduk menjadi salah seorang menteri, yang mungkin juga dengan perhitungan mereka akan turut bertanggungjawab atas situasi sosial ekonomi yang merosot. Hal ini ditindaklanjuti dengan pengangkatan D.N. Aidit dan M.H. Lukman. Simak Lev, ***Soekarno-Militer...***, p. 45.

berbeda dari Masyumi, NU memilih tetap bekerja sama dengan pemerintah dengan alasan membatasi ruang gerak PKI, dan menyayangkan sikap keras Masyumi yang dinilai kontra poduktif.[40]

Pengurus PNI sendiri keberatan menerima perubahan politik tersebut dan menganggap anggota PNI yang duduk di DPR-GR bukan mewakili PNI lagi, karena tidak dibentuk melalui pemilihan umum. Reaksi yang sama diajukan kalangan Masyumi, dan yang paling serius muncul dari Partai Rakyat Indonesia, di mana bung Tomo mengadukan sempat kebijakan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Tokoh-tokoh partai yang menolak Demokrasi Terpimpin bergabung dan menamakan diri sebagai *Liga Demokrasi* untuk menentang keberadaan DPR-GR. Liga Demokrasi pimpinan Imron Rosyadi (NU) mengeluarkan pernyataan yang menuntut agar dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. *Liga Demokrasi* kemudian tidak berdaya oleh larangan Soekarno. Soekarno bahkan menggantinya dengan lembaga serupa, sebuah organisasi massa yang disebutnya ditujukan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945, *Front Nasional*.[41]

Demokrasi Terpimpin telah menempatkan Soekarno laksana raja yang berkuasa penuh. Soekarno mengangkat dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dengan dibantu Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi (MPPR). Lembaga-lembaga negara termasuk lembaga bentukan baru tersebut berada di bawah presiden, dan bertugas membantu presiden dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengambil keputusan. Demokrasi Terpimpin yang merupakan korporasi beberapa kekuatan menampilkan pemerintahan yang berwajah otoriter dan semakin restriktif, sebab

[40] NU menilai tindakan tokoh-tokoh Masyumi merupakan kerugian besar bagi umat Islam. Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 51-2.

[41] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 314 -315.

pada intinya sistem ini menciptakan model pemerintahan tanpa kritik dan ketaatan atas apapun kebijakan pemerintah.[42]

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kediktatoran yang mengatasnamakan demokrasi memulai fase pembentukannya. Ide Demokrasi Terpimpin bergulir kian tak terbendung dalam mempengaruhi apresiasi masyarakat. Presiden dapat membentuk kabinet tanpa intervensi siapapun, bahkan untuk mengubah susunannya setiap kali dihendaki. Selama tujuh tahun Demokrasi Terpimpin, setidaknya terjadi tujuh kali pergantian kabinet, dan bila ditambah dengan kabinet masa transisi sebelum dan sesudahnya, kabinet Djuanda dan Ampera, jumlahnya menjadi sembilan kali. Presiden bahkan membentuk kabinet dengan jumlah anggota yang tidak wajar, lebih dari seratus orang, hingga dijuluki sebagai Kabinet Seratus Menteri.[43]

Kekuatan politik militer, meski kurang disukai Soekarno, muncul ke permukaan sebagi kampium Demokrasi Terpimpin. Harapan perbaikan keadaan melalui ide Demokrasi Terpimpin di satu sisi meningkatkan pengaruh Soekarno, dan di sisi lain militer dapat memainkan peranan nyata dengan diberlakukannya Undang-undang Keadaan Darurat (SOB). Soekarno dan militer menjadi aktor utama yang secara kooperatif sedang menegakkan rejim otoriter yang dapat melakukan tindakan sewenang-wenang dan anti kritik.[44]

Sistem yang sedang terbangun sebenarnya tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai kediktatoran karena wewenang ada pada dua poros kekuasaan dan bukan dalam bentuk rejim yang monolitik. Ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan sikap dan kepentingan, berupa ketidaksenangannya dengan partai politik, liberalisme dan percekcokan antar kelompok. Semakin kuatnya posisi tentara menyebabkan periode ini banyak diwarnai peristiwa penangkapan,

---

[42] Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 86.

[43] Simak Simanjuntak, ***Kabinet-kabinet...***, p. 1881-297.

[44] Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 20-1.

pembredelan surat-surat kabar serta pengambilalihan usaha-usaha etnis China yang diduga sebagai simpatisan Taiwan. Negeri tersebut diduga kuat menyokong pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Kebebasan sipil semakin berkurang dengan jaminan kepastian hukum yang semakin diremehkan, terutama bagi mereka yang diduga terlibat dalam pemberontakaan PRRI/Permesta.[45]

Masyumi yang sebelumnya merupakan partai besar sama sekali kehilangan momentum untuk bangkit kembali setelah bubar, dan tokoh-tokohnya bergabung dalam pemberontakan PRRI/Permesta bersama PSI. PNI dan NU yang masih eksis sebagai pemain politik juga tidak mampu memainkan prakarsa politiknya, setelah kritik dan kecaman Soekarno tertuju pada berlangsungnya sistem kepartaian yang liberal dan praktik demokrasi gaya Barat yang dinilai gagal. Partai yang justeru mendapat angin segar adalah PKI dan Murba, yang selama delapan tahun sebelumnya tidak terlibat dalam pemerintahan.[46]

Soekarno dan militer mulai mengangkat jasa sebagai pemimpin perjuangan kemerdekaan sebagai legitimasi hak moral untuk memerintah. Secara tidak tertulis, keduanya memiliki pembagian hak yang secara *de facto* saling diakui. Soekarno mengendalikan artikulasi nilai-nilai, perumusan ideologi negara dan penanaman kesetiaan, penciptaan lambang-lambang dan pemeliharaan semangat perjuangan, prakarsa yang kuat dalam politik luar negeri dan hampir semua urusan politik umum. Sementara itu militer memiliki prakarsa menentukan pemerintahan daerah, penguasaan perusahaan-

[45] Ma'arif "Islam di Masa Demokrasi...", p. 35.

[46] Sejak penarikan menteri-menterinya Amidjojo sudah memperingatkan bahwa tindakan Masyumi merupakan kesalahan besar, karena sama halnya memuaskan keinginan PKI yang menginginkan rusaknya koalisi Masyumi-PNI dan sekaligus membuka peluang bagi PKI untuk mencapi tujuannya. Simak Sastroamidjojo, ***Tonggak-tonggak...***, p. 366-8. Simak pula Noer, ***Partai Islam...***, p. 253-5.

perusahaan asing yang dinasionalisasi dan menangani pemberontakan.[47]

Hubungan Soekarno dan militer bertahan sebab secara politis saling membutuhkan. Soekarno tidak mempunyai pendukung yang terorganisir, baik dari kalangan sipil maupun militer. Militer sendiri masih terpecah dalam berbagai faksi, terutama antara perwira yang condong terhadap Islam dan yang lebih dekat pada komunis. Sedangkan di tingkat bintara dan tamtama tidak banyak diketahui proporsi kepemihakannya, meski tak dapat dipungkiri, bahwa banyak pula di antara anggota militer yang condong pada komunis. Harapan untuk membentuk diktatur militer sebagaimana dilakukan beberapa negara baru lainnya sulit dilakukan karena realitas politik sipil sangat tidak memungkinkan ide tersebut memperoleh dukungan. Militer tidak mungkin menggeser Soekarno karena kapasitasnya sebagai proklamator merupakan legitimasi kekuasaan yang jauh lebih kuat dibanding siapapun. Bahkan legitimasi Soekarno dibutuhkan siapapun yang bermaksud ingin berkuasa.[48]

Ketidaksukaan militer pada PKI dengan sendirinya menjadi penopang stabilitas kedudukan Soekarno. Meski gagasan Sukarno dekat dengan ide-ide komunisme, tapi Soekarno bukan penganut komunis. Soekarno lebih tampak sebagai seorang Marxis tanpa harus menjadi komunis. Sekalipun banyak di antara perwira militer adalah nasionalis yang tidak cukup dekat dengan agama, khususnya mereka yang berasal dari Jawa, tapi mereka umumnya anti-komunis dibanding anti-Islam. Apalagi selama Demokrasi Terpimpin PKI menunjukkan ambisi besar terhadap kekuasaan. PKI semakin mampu mengambil inisiatif dalam berbagai kebijakan, termasuk pengangkatan kepala daerah yang sebelumnya didominasi militer.

---

[47] Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 31-2.
[48] ***Ibid.***, p. 34.

Dukungan Soekarno yang terlalu besar terhadap PKI menjadikan militer kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan.[49]

PKI semakin leluasa melakukan tindakan-tindakan anarkhi sepihak yang selalu dilindungi Presiden. Usaha militer menyingkirkan PKI selalu gagal karena intervensi presiden. Perseteruan PKI dan Angkatan Darat mencapai puncaknya ketika tuntutan mereka untuk membuat angkatan ke-V, di mana buruh dan tani dipersenjatai selalu mentah di tangan Angkatan Darat. Soekarno sendiri sempat menyetujui berdirinya angkatan ke-V, tapi para Panglima Angkatan Bersenjata selalu metolak, kecuali oleh Oemar Dani dari Angkatan Udara. Di sisi lain, PKI getol melakukan latihan-latihan militer secara diam-diam.[50]

Selain dukungan Angkatan Darat dan PKI, kokohnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin terjadi akibat terpusatnya ketokohan masyarakat negeri ini pada figur Soekarno. Mayoritas publik negeri ini tidak mampu memberikan kritik dan koreksi atas tindakan-tindakan Soekarno. Tokoh-tokoh politik dan kritis lain yang berusaha mempertahankan sistem konstitusional hanya kekuatan pinggiran yang kalah berpengaruh dibanding kharisma Soekarno. Semakin keras kritik ataupun perlawanan diberikan hanya akan mendiskreditkan diri sendiri dibanding sebaliknya.

---

[49] Tahun 1960-an seolah menjadi masa kejayaan PKI. Setelah rival terkuatnya, Masyumi dan PSII jatuh, PKI dengan leluasa mengembangkan sayap organisasinya dan mengklaim jumlah anggotanya meningkat luar biasa. PKI mulai mampu mendudukkan kader-kadernya sebagai bupati, walikota, gubernur, bahkan dalam DPA dan Dewan Perancang Nasional. ***Ibid.***, p. 46.

[50] Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 374-5. PKI menjadi kelompok andalan Soekarno yang karenanya selalu diberikan Perlindungan sekalipun nyata-nyata melakukan aksi-aksi anarkhis. Simak Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 44-5.

C. Kegagalan Negara

Kokohnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin diikuti kemerosotan di berbagai bidang, baik sosial politik, ekonomi maupun moralitas aparatur negara. Indonesia memulai fase pemujaan jargon-jargon nasionalisme dan indoktrinasi, di mana lambang-lambang negara dan kegiatan seremonial dalam bentuk upacara-upacara peringatan memperoleh perhatian lebih besar dibanding hal-hal teknis yang sebenarnya lebih krusial untuk ditangani. Kegiatan birokrasi dengan tugas-tugas administrasi dan perekonomian kurang mendapatkan perhatian. Keagungan negara lebih ditekankan pada pembuatan lencana dan prestise kekuasaan. Demokrasi Terpimpin seakan mewakili pribadi Soekarno yang lekat dengan simbul-simbul dan jargon-jargon nasionalisme yang heroik.[51]

Di tengah kian memburuknya perekonomian, kinerja pemerintahan Soekarno diarahkan pada upaya membangun citra kebesaran negara sebagai yang terdepan dalam aliansi Asia-Afrika, maupun dalam membidani jalinan kerja sama regional yang mulai dirintis, ASEAN. Kemampuan retorik Soekarno menempatkannya sebagai juru bicara bagi negara-negara bekas jajahan yang tergabung dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA). Soekarno sedemikian aktif melakukan lawatan, terutama ke berbagai negara blok-Timur yang lebih memberikan respek kepadanya dibanding Barat. Soekarno selalu memperkenalkan konsepsi Demokrasi Terpimpin dan menampilkan diri sebagai pemimpin tersukses dalam mempersatukan bangsanya serta membebaskan diri dari dominasi alam pikiran Barat.[52]

Di dalam negeri, proyek-proyek non-ekonomis menjadi fokus utama dan mengabaikan masalah-masalah domestik yang sebenarnya lebih membutuhkan perhatian. Berbagai upacara peringatan

[51] Soekarno mengaku sebagai seorang romantis, yang lebih suka merumuskan tujuan, mengartikulasikan nilai-nilai dari pada masalah-masalah khusus ekonomi atau administratif. Simak Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 35.

[52] ***Ibid.***, p. 101.

berkembang semakin banyak, hingga kalender Indonesia dipenuhi hari-hari istimewa mulai dari peringatan hari kebangkitan nasional hingga hari Listrik dan Gas. Momen-momen tersebut umumnya disertai pidato seputar manipol-USDEK dan kaitannya dengan lambang-lambang tertentu, seperti Sapta Dharma, Trikora dan sebagainya, yang kadang juga diikuti penyematan penghargaan tanda jasa. Perhatian pemerintah lebih terfokus pada penciptaan citra pemerintah sebagai pihak yang harus dijunjung tinggi karena kepeduliannya pada rakyat miskin, sekaligus menunjukkan bahwa revolusi belum selesai. Sedemikian saratnya jargon ideologis menjadikan intensitas upacara seremonial, peringatan dan menghormatan terhadap lambang-lambang meningkat, menggantikan perhatian pada masalah-masalah sosial, ekonomi maupun politik.[53]

Orientasi prestise juga diekspresikan pada prioritas pembangunan yang lebih menekankan proyek-proyek mercusuar yang dikenal dengan *Ganefo* (*Games of New Emerging Forces*) dan *Conefo* (*Conference of The New Emerging Forces*), seperti pembuatan stadion Senayan untuk penyelenggaraan Asian Games 1962, Monumen Nasional (Tugu Monas), reaktor nuklir Cilegon serta masjid Istiqlal yang diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Kurang dari sepuluh tahun sejak mandulnya pemerintahan hasil Pemilu 1955, kekuatan militer Indonesia mengalami peningkatan. Hingga tahun 1963 Indonesia telah layak menyatakan diri sebagai kekuatan militer kelas dua.[54]

Perkembangan situasi sosial politik di Indonesia di satu sisi menguntungkan, tapi lebih banyak merugikan dalam di dalam negeri. Nilai positif dari menguatnya kembali semangat revolusioner memberi dampak positif bagi upaya mengobarkan patriotisme untuk mendukung penyelesaian masalah Irian Barat. Indonesia mampu menunjukkan di hadapan dunia internasional sebagai negara yang

---

[53] ***Ibid.***, p. 100.
[54] ***Ibid.***, p. 99.

mandiri dan siap berkonfrontasi dengan negara manapun. Perjuangan melawan imperialisme masih mendapatkan legitimasi yang kuat karena Belanda masih belum melepaskan Irian Barat. Di tengah semangat revolusioner yang menggelayuti alam pikiran kebanyakan masyarakat negeri ini, ancaman Soekarno untuk mengerahkan kekuatan rakyat dalam penyelesaian masalah Irian Barat membangkitkan dukungan yang besar, yang bahkan diikuti infiltrasi pasukan RI ke Irian Jaya dan berhasil merebut beberap pos pertahanan Belanda.[55]

Situasi sosial politik yang diliputi suasana konfrontatif menimbulkan dilema tersendiri, terutama dalam meningkatkan laju perekonomian, terlebih ketika sistem pemerintahan tidak menunjang terciptanya *good governance*. Ini terutama terjadi ketika dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi yang didorong oleh semangat konfrontasi dengan Belanda dalam rangka penyelesaian masalah Irian Barat, justeru menurunkan produktifitas. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi bukan berkembang lebih baik di tangan anak negeri, karena pertimbangan profesionalisme diabaikan dalam distribusi jabatan pada perusahaan-perusahaan tersebut.[56]

Semangat revolusioner menyebabkan banyak perusahaan jatuh ke tangan politisi dan terutama militer yang tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan produksi. Mereka yang memiliki kecakapan teknis semakin tersingkir dari berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan negara. Kalangan profesional yang umumnya lebih dekat pada Hatta kurang dihargai dibanding kaum revolusioner. Mereka yang mengedepankan semangat produksi dan

---

[55] Soekarno mengeluarkan banyak jargon, di antara yang terkait dengan masalah Irian Jaya adalah dwikora yang berisi perintah: Gagalkan negara Papua dan Kibarkan Sang Merah Putih di Irian jaya. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 325 dan 334-5.

[56] Posisi-posisi yang mestinya menuntut profesionalitas didominasi kalangan militer, termasuk dalam jajaran menteri. Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 104.

memiliki kecermatan administrasi kalah banyak berbicara di depan publik dibanding kaum revolusioner, bahkan selalu dibayangi tuduhan miring, sebagai antek imperialis.[57]

Doktrin *revolusi belum selesai* memberi perlindungan kepentingan politik banyak pejabat untuk mempertahankan posisinya, dan berakibat maraknya berbagai penyelewengan. Ketika loyalitas pada doktrin menjadi standar perilaku, dan bukan hukum ataupun prestasi, menjadikan pengawasan hukum kian melemah digantikan dominasi kehendak pribadi pejabat. Runtuhnya demokrasi konstitusional diikuti lemahnya kontrol publik terhadap pemerintah, yang menyebabkan kemerosotan moral yang sangat akut pada birokrasi pemerintahan yang berbuah kemerosotan di berbagai bidang, terutama moralitas aparat dan perekonomian.[58]

Kemerosotan ekonomi membuat pegawai pemerintah melakukan penyimpangan. Pemerintahan yang sarat proyek-proyek non-ekonomis sementara tingkat produktifitas rendah ditambah lemahnya pengawasan hukum mengakibatkan defisit anggaran dan kehancuran lembaga-lembaga perekonomian. Indeks biaya hidup meningkat tajam dan tidak seimbang dengan peningkatan penghasilan aparat pemerintah. Kemerosotan nilai tukar menyebabkan nilai riil gaji pegawai mengalami penurunan drastis. Karena itu, mereka berusaha mencari penghasilan di luar jam kerja, di samping melakukan korupsi yang menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Berbagai penyelewengan dalam pembukuan

---

[57] Feith mengidentifikasi runtuhnya demokrasi konstitusional menjadi demokrasi terpimpin sebagai kekalahan kalangan pragmatis, adminsitratur atau pemecah masalah (*problem solver*) yang diidentifikasikan dengan tokoh-tokoh seperti Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo dan juga Sjahrir. Simak kembali Feith, ***The Decline of...***, p. 572-8, simak juga konstelasi segi tiga yang digambarkan dalam huruf T dalam Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 102-3. Kelompok profesional umumnya berafiliasi pada Hatta dan Sjahrir, sekalipun sama-sama penganut sosialis, namun berbeda pandangan dengan pengikut Soekarno tentang cara penerapannnya. Feith, ***Ibid.***, p. 103.

[58] ***Ibid.***, p. 102.

berlangsung terus tanpa banyak ditangani secara hukum. Mentalitas birokrasi merosot tajam, di mana upaya-upaya "*di balik pintu*" atau "*jalan pintas*" menjadi umum dalam wacana sosial ketika itu. Tarif-tarif informal menjadi biasa sebagai cara menyelesaikan setiap permasalahan secara cepat.[59]

Kalangan birokrat menciptakan peraturan yang berlebih-lebihan sebagai lahan meraup keuntungan pribadi. Keterlibatan militer di sektor perijinan menjadikan jalur perijinan menjadi semakin panjang yang sudah barang tentu meningkatkan biaya ekonomi. Pengaturan berbagai aspek oleh pemerintah semakin tidak realistis, yang tidak jarang melampaui batas keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat yang dirugikan umumnya memilih "jalan damai" dengan memberikan suap pada pejabat sekedar tidak menanggung kerugian yang lebih besar.[60]

Tidak banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan kemerosotan tersebut. Kuatnya doktrin bahwa revolusi belum selesai menyebabkan perhatian pemerintah tidak diarahkan pada pengelolaan hal-hal substansial, perekonomian dan administrasi, melainkan pada lambang-lambang ideologi dan memperkuat militer. Pemerintahan sedang mengalami suatu transformasi, di mana dominasi perekonomian sisa kolonial, etnis China dan penyokong Masyumi mengalami kehancuran digantikan dengan ketergantungan tinggi pada pemerintah. Kemerosotan

---

[59] Nasionalisasi aset-aset asing secara efektif berdampak pada meningkatnya inflasi. Herbert Feith "Demokrasi Konstitusional Indonesia 1950-an: Sejauh Mana Berfungsi?" dalam dalam Bourchier and Ledge, eds., ***Demokrasi di Indonesia...***, p. 6. Pengawasan hukum simak Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 109.

[60] Ilustrasi menarik dari Feith menyatakan, seorang yang ingin menggunakan lapangan tenis milik kota praja harus menandatangani formulir rangkap sembilan dan menyampaikannya pada dua belas instansi pemerintah. Dalam ilustrasi lain, Feith menyatakan: Ketika inflasi membumbung tinggi, pemerintah mengharuskan pedagang menjual barangnya dengan harga lebih murah dari pembeliannya. Pedagang memilih memberikan suap pada pejabat tertentu untuk sekdar tidak dinyatakan melanggar aturan tersebut. ***Ibid.***, p. 107-108.

ekonomi diikuti dengan semakin kuatnya birokrasi dan politik. Ketidakmenentuan kebijakan juga mengakibatkan larinya modal ke luar negeri bersamaan dengan hengkangnya pengusaha-pengusaha Belanda dan China.[61]

Dalam tataran politik, penyatuan perbedaan ideologi politik ke dalam ikatan NASAKOM juga tidak mengakhiri konflik. Intrik-intrik politik tetap berlangsung dalam berbagai bentuk dan semakin tidak sehat. Pertentangan antara PKI dengan militer dan Islam kian pelik. Setiap kelompok memanfaatkan kedekatan mereka dengan Soekarno dan berusaha mengambil muka di hadapan pesiden. Secara diam-diam, masing-masing berambisi merebut kekuasaan dalam jangka panjang.

Setelah pertentangan yang jelas antara kelompok Islam, terutama Masyumi, dengan Soekarno, PKI menjadi kelompok paling diuntungkan dengan menyisakan militer sebagai satu-satunya rival penting. Ajaran NASAKOM secara politis sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai unsur sah dalam pergerakan dan konstelasi politik nasional. PKI memanfaatkannya untuk mengambil muka di hadapan presiden dan masyarakat, dengan suatu pola yang dikenal dengan *offensif revolusioner*. PKI mengklaim sebagai pendukung garis depan kebijakan Soekarno dan membangun kesan sebagai kelompok yang paling *pancasialis*, *Soekarnois* ataupun *manipolis*.[62]

---

[61] Kebijakan pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertolakbelakang dengan pandangan Hatta. Hatta memang prihatin dengan kesenjangan perekonomian antara kaum pribumi dibanding Cina, tetapi penyelesaian yang ditempuh bukan dengan jalan mengambil alih begitu saja perusahaan-perusahaan mereka, melainkan membiarkan perekonomian Cina yang sudah terlanjur kuat terus berlangsung, sementara masyarakat pribumi didorong melalui pendidikan dan koperasi. Simak Mohammad Hatta, ***Pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai Kemakmuran Yang Merata***, (Jakarta: Idayu, 1972), p. 9.

[62] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 317-8.

Kemerosotan ekonomi sudah mulai dirasakan sejak 1955, di mana pemerintah selalu menghadapi defisit anggaran yang besar dan laju inflasi yang terus meningkat tajam. Indonesia semakin dihimpit kesulitan ekonomi, terlebih lagi sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang diikuti semakin derasnya aliran modal ke luar negeri. Hanya saja, jargon-jargon demokrasi terpimpin yang menggema semakin keras di dalam dan luar negeri, menjadikan persoalan tersebut seolah tenggelam di bawah heroisme revolusioner yang terbangkitkan kembali. Krisis sebenarnya yang melanda masyarakat negeri ini seolah tak terasakan, karena teralihkan pada simbul-simbul dan lambang-lambang kebesaran nasioanl, di samping kharisma Soekarno.[63]

Pemerintah memang dihadapkan pada keputusan yang senantiasa mengandung konsekwensi resiko sosial ekonomi yang berat. Nasionalisasi aset-aset Belanda di satu sisi menjjadi satu cara menekan Belanda untuk keluar dari Irian Barat, serta memompa semangat perlawanan dari dalam negeri. Di dalam negeri, pengambialihan aset-aset tersebut berdampak pada pengokohan kekuasaan akibat distribusi jabatan pada semakin banyak orang. Di sisi lain, pengambilalihan aset Belanda juga berarti kemunduran kinerja dan penurunan produksi, sebab perusahaan-perusahaan penting jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas untuk mengelolanya, sementara pengawasan hukum semakin kehilangan daya.[64]

Nasionalisasi terkesan menjadi langkah revolusioner yang kental dengan nuansa heroik, tapi pada dasarnya potensial menciptakan kemunduran. Perpindahan perekonomian kolonial ke nasional terjadi ketidaksinambungan dan diliputi anarkhi-anarkhi ideologi ekonomi. Maraknya gerakan buruh, perebutan dan perusakan aset-aset perusahaan yang mewarnai periode nasionalisasi

---

[63] Penderitaan rakyat teralihkan pada kebencian terhadap Barat atau hal-hal yang berbau Barat. Simak Feith., ***Soekarno-Militer ...***, p. 26.

[64] ***Ibid.***, p. 109.

dengan sendirinya sudah merupakan satu kerugian tersendiri. Situasi ini sudah tentu melengkapi kemerosotan akibat penurunan kinerja dan kapasitas produksi. [65]

Ketimpangan neraca perdagangan yang sangat drastis mengiringi gerakan nasionalisasi tersebut. Komoditas ekspor dan produksi industri-industri dalam negeri menurun drastis, dan berakibat neraca perdagangan antara ekspor dan impor semakin timpang. Pemerintah bahkan kesulitan mengimpor barang karena impor sebelumnya tidak mampu dibayar. Semakin rendahnya cadangan devisi menyulitkan impor berbagai barang kebutuhan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Akibatnya harga-harga barang kebutuhan melambung tinggi melampaui daya beli. Masyarakat juga harus berhadapan dengan merosotnya nilai tukar rupiah yang kian tidak berharga. [66]

Kondisi ini diperparah oleh mentalitas aparat pemerintah yang korup, kolutif dan nepotis. Lemahnya pengawasan hukum mengakibatkan berbagai penyelewengan tidak tersentuh hukum. Struktur kepegawaian negara kian tidak efisien karena terlalu banyak pos diciptakan sebagai konsesi politik atau atas dasar kedekatan kekerabatan. Berbagai kebijakan pemerintah juga tidak efektif karena cara-cara penyelesaian di luar ketentuan yang berlaku, kian mentradisi.

Konsentrasi pada proyek-proyek non-ekonomis semakin memperparah keuangan negara, hingga meningkatkan defisit anggaran dan laju inflasi. Tingginya tingkat inflasi sempat memaksa pemerintah melakukan pemotongan uang pada tahun 1959 sebagai jalan untuk membendungnya. Uang pecahan Rp. 500,- dan Rp. 1000 diturunkan nilainya menjadi Rp. 50,- dan Rp. 100,-. Mengingat laju inflasi tidak semata-mata dikarenakan penurunan nilai tukar rupiah, di mana variabel-variabel ekonomi lain tetap tidak berubah, maka

---

[65] ***Ibid.***, p. 106.
[66] ***Ibid.***, p.105.

inflasi terus melaju tanpa terbendung hingga mencapai level 650% pada tahun 1966.[67]

Politik konfrontasi dan anti Barat menyulitkan akses pembiayaan, yang pada gilirannya memaksa pemerintah jatuh pada *insolvensi* internasional. Indonesia nyaris terjerumus dalam perangkap politik negara-negara kampium komunis. Indonesia bahkan telah masuk perangkap politik luar negeri Blok-Timur. Meski belum mengarah pada afiliasi, tapi penandatanganan kerjasama bilateral RI-RRC atas dasar *Government to Government* (*G to G*) telah menempatkan Indonesia sebagai pemasok keuntungan bagi RRC, dengan kerugian yang harus ditanggung rakyatnya sendiri.[68]

Indonesia sangat bersemangat membangun rejim dengan sistem perekonomian sosialis, tetapi sosialisme sendiri tidak mampu menawarkan bentuk yang jelas. Ketidakjelasan tersebut membuka celah bagi pemegang kebijakan memilih model yang disebutnya sebagai *sosialisme ala Indonesia*. Ini dikarenakan tawaran yang ada tidak cukup memuaskan atau tidak mampu direspon secara kreatif dengan hasil nyata. Kecenderungan ini mengulang ketidakberdayaan para pemimpin mewujudkan konsep-konsep sosial, politik dan ekonomi Barat dengan cara menawarkan alternatif, meski miskin evidensi empirik[69].

D. G30S dan Akhir Pemerintahan Soekarno

Peristiwa G30S tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik selama kurun pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang diwarnai ketegangan antara militer, dalam hal ini Departemen Angkatan Darat (DEPAD/TNI-AD), dengan PKI di pihak lain. Keduanya merupakan

[67] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 322-4.

[68] ***Ibid.***, p. 328.

[69] Otoriterisme sering menjadi pilihan cara penyelesaian masalah ketika komunikasi politik mengarah pada kecenderungan konflik dan perpecahan, sebagaimana kasus Turki tahun 1980-an. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 35.

pemeran utama pentas politik nasional pasca demokrasi konstitusional, di samping Soekarno. Dengan berbagai dalih, TNI-AD beberapa kali berusaha mendepak PKI dari pentas perpolitikan nasional, tapi perlindungan Soekarno menggagalkannya. PKI secara provokatif tidak henti melakukan berbagai manuver untuk mendiskreditkan TNI-AD.[70]

Sejak runtuhnya dominasi partai-partai, militer dan PKI merupakan kekuatan yang tersisa yang mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan. PKI dikenal sebagai kelompok yang berambisi kuat mewujudkan ambisinya membentuk negara komunis dengan berbagai cara, termasuk merebut kekuasaan. Setelah pemberontakan di Madiun PKI masih berkesempatan hidup lagi di Indonesia karena agresi militer Belanda kedua menjadikan peristiwa tersebut tidak terlalu dijadikan momentum untuk membangun antipati terhadap komunisme, sekalipun tetap dijadikan kondite politik tersendiri, utamanya kalangan Islam. Di sisi lain, peran Uni Sovyet dalam membela kepentingan-kepentingan Indonesia menjadikan masa lalu kelam komunisme yang sebenarnya sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan masih memungkinkannya diberikan tempat.[71]

Di masa Demokrasi Terpimpin, militer semakin kokoh sebagai pihak yang mampu mengimbangi dominasi politik sipil dalam menentukan jalannya revolusi. Sejak 1952, militer sudah mulai

[70] Feith, ***Soekarno-Militer ...***, p. 42-8. Setidaknya terdapatt enam teori tentang peristiwa G30S. Sekalipun banyak dikontroversikan, baik sekedar sebagian tokohnya yang terlibat, atau rekayasa politik, namun jelas peristiwa tersebut memang tidak lepas dari keterlibatan PKI. Studi Arus Informasi, ***Bayang-bayang PKI***, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi , 1995), p. 37-9

[71] Pemberontakan tersebut menyisakan sentimen ant-komunis dan Uni Sovyet mengemuka dalam percaturan politik yang pada saatnya berpotensi menjatuhkan kabinet, hanya karena penolakan atas dibukanya jalinan diplomatik dengan Uni Sovyet. Simak Feith, ***The Decline of ...***, p. 291. Uni Sovyet sendiri cenderung kurang respek pada tokoh-tokoh nasional Indonesia karenanya, mereka tidak membekukannya. Simak Anak Agung Gde Agung, ***Twenty Years Indonesian Foreign Policy***, (The Hague: Mounton & co., 1973), p. 181.

mewacanakan harapan untuk membangun rejim diktatur, meski bukan diktatur militer. Intrik politik antara PKI dan militer telah berlangsung sejak awal pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Bersama-sama dengan kelompok Islam, militer termasuk pihak yang keberatan atas diberikannya tempat bagi PKI dalam pemerintahan. Reputasi politik PKI tidak cukup baik di mata kaum nasionalis revolusioner karena loyalitas PKI bukan pada gerakan nasionalisme melainkan pada komintern.[72]

Benturan pertama kalangan PKI dengan TNI-AD terjadi ketika presiden Soekarno melakukan usaha membentuk kabinet gotong-royong 1960. Kalangan TNI-AD dan Islam menentang kebijakan Soekarno yang memberikan kedudukan pada PKI dalam DPR-GR, DPA dan Front Nasional. Usaha tersebut gagal karena kehendak Soekarno lebih menentukan. TNI-AD juga berusaha berusaha menghalangi, dan kembali gagal ketika Soekarno mulai mengangkat kepala daerah dari unsur PKI. Bahkan ketika PKI melakukan kegiatan mengacau keamanan dalam peristiwa peristiwa PKI-Malam di Jawa Tengah dan tindakan-tindakan sepihak di beberapa daerah, TNI-AD juga gagal mengambil tindakan. Dengan dasar Undang-undang Keadaan Bahaya (SOB), TNI-AD membekukan PKI yang melakukan tindakan serupa di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. TNI-AD juga melarang terbit *Harian Rakjat* di Jakarta; serta perintah penangkatan D.N. Aidit, tapi dihentikan oleh presiden. TNI-AD justeru dipermalukan karena harus terpaksa mencabut kembali keputusannya.[73]

TNI-AD sempat menyelenggarakan sidang Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) dengan Penguasa Perang Daerah (Peperda) di istana Negara untuk konsolidasi menghadapi PKI. Muara kegiatan tersebut adalah mengingatkan presiden agar tidak terlalu percaya

[72] Tokohnya. Semaun, dimarahi Stalin karena bersedia menandatangani konvensi dengan Perhimpunan Indonesia yang berorientasi nasionalis. Mohammad Hatta, ***Permulaan Pergerakan Nasional***, (Jakarta: Idayu Press, 1977), p. 226-8.

[73] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 318-9.

pada PKI, baik karena pertimbangan ideologis maupun pengalaman buruk akibat gerakan PKI di masa lalu. Untuk kesekian kalinya presiden justeru menyalahkan sikap dan tindakan pimpinan TNI-AD, dan melarang tindakan politis apapun terhadap PKI. TNI-AD hanya berhasil menghalangi pembentukan Angkatan ke-V yang dicanangkan PKI, karena berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih besar.[74]

Hubungan presiden dan TNI-AD sendiri tidak lebih mesra dibanding dengan PKI. Soekarno yang praktis tanpa pendukung terorganisir tampak berharap memperoleh dukungan dari PKI. Bahkan ketika partai Murba menemukan dokumen perjuangan PKI yang berjudul *Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini*, yang di dalamnya jelas-jelas menyebutkan rencana perebutan kekuasaan, Soekarno masih melindunginya dengan berbagai dalih. Partai Murba bahkan harus menanggung akibat mengakhiri riwayat partai untuk selama-lamanya akibat dibekuan presiden.[75]

Dukungan presiden menyebabkan PKI berani mengambil sikap dan manuver-manuver provokatif. Sejak 1963, PKI secara sungguh-sungguh mulai berhasil duduk dalam kabinet. Mereka mendesak Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) diberlakukan, hingga salah satu organ organisasi satelitnya, Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan aksi-aksi sepihak di masyarakat. Di tingkat pedesaan organ-organ PKI berbenturan dengan TNI-AD yang melakukan pembinaan teritorial. PKI terus mengkampanyekan *retooling* pembantu-pembantu presiden dari kalangan lawan politiknya dengan alasan tidak revolusioner, serta mendesak pembentukan kabinet Gotong-royong berporoskan NASAKOM. [76]

---

[74] ***Ibid.***, p. 374-5.
[75] ***Ibid.***, p. 320.
[76] ***Ibid.***, p. 321.

Sebagaimana diketahui, di luar pengaruh Uni Sovyet, PKI merupaka partai komunis pertama di Asia. PKI semula merupakan organisasi yang berhaluan sosialis di Jawa pada tahun 1914. Setelah mengalami berbagai metamorfosis, pada tahun 1924 mereka berdiri menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI melakukan berbagai upaya untuk meraup pengaruh, di antaranya dengan berbaur dan mempengaruhi suatu komunitas organisasi, tradisi, agama maupun tradisi magis sekalipun. Mereka mampu mengubah wajah komunisme dengan cita rata lokal, hingga eksistensi aslinya tidak dirasakan oleh komunitas yang dimasuki. Di Timor Barat, PKI berhasil mempengaruhi berbagai kalangan; agamawan, politisi, birokrat, guru dan masyarakat luas dengan menampilkan diri sebagai partai berhaluan nasionalis.[77]

Demokrasi Terpimpin seolah menjadi masa keemasan PKI. Kalangan buruh dapat memperluas pengaruhnya hingga ke pelosok desa, dengan sasaran mereka yang kurang dekat pada komunitas santri. Dengan jargon "*mengganyang setan desa*" mereka melakukan tindakan anarkhis di pedesaan, terutama ditujukan pada kaum agamawan dan pemilik tanah. Dengan memanfaatkan organ-organ satelitnya, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, SOBSI dan Lekra, PKI melakukan perluasan pengaruh yang tidak jarang disertai tindakan-tindakan sepihak. PKI juga melakukan upaya penyusupan kepada ormas-ormas lain, semisal PNI dan PGRI hingga mengalami perpecahan, dan tidak terkecuali pada kalangan militer. Hal ini menjadikan PKI berkembang menjadi satu-satunya organisasi politik terkuat baik dari segi luasnya pengaruh maupun kelompok pendukungnya.[78]

Seolah sudah menjadi kultur politik khasnya, ketika merasa berada pada posisi cukup kuat, PKI cenderung bertindak ofensif untuk merebut kekuasaan sebagaimana peristiwa 1926-1927 dan 1948. Dengan berbagai isu yang yang diangkat ke permukaan, tokoh-tokoh

[77] Farran, "Revolution, Religious and Magic...", p. 21-23.
[78] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 367.

PKI melancarkan tindakan paling ofensif dalam sejarahnya dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa pimpinan TNI-AD yang selama ini menjadi *rival* terkuatnya, yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S).[79]

Tindakan PKI menandai momentum pergulatan politik paling kasar yang pernah terjadi di tanah air, di mana intrik politik mengarah pada penyingkiran *rival* politik dengan cara paling buruk sejak kemerdekaan. Setelah lebih dari sepuluh tahun tidak terlibat dalam percaturan politik parlementariat yang dipenuhi manuver saling menjatuhkan, PKI seolah hanya perlu menebusnya sekali saja dengan manuver paling radikal yang berujung pada berakhirnya sejarah komunisme di negeri ini. Peristiwa G30S yang menjadikan perwira-perwira tinggi sebagai sasaran pembunuhan merupakan manuver yang menohok wajah militer secara kasar, utamanya bagi Angkatan Darat.[80]

Tindakan PKI dengan sendirinya mengusik moral militer sebagai sebuah korps, dengan segudang jasa yang seharusnya dibalas dengan penghargaan tinggi. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi legitimasi bagi militer untuk mengambil tindakan apapun. Militer benar-benar menemukan momentum kuat untuk mengambil tindakan untuk menghabisi *rival* politiknya terlepas disetujui Presiden ataupun tidak. Militer memiliki alasan moral yang kuat untuk menentukan caranya sendiri. Apalagi Soekarno tetap menyikapi kasus ini sebagaimana kasus-kasus sebelumnya, yang mengakibatkan kekecewaan mendalam bagi kalangan militer. Sikap Soekarno bahkan seakan menjadi pengakuan tidak langsung sebagai pihak yang turut terlibat di balik peristiwa G30S, atau setidaknya mengetahui. [81]

---

[79] Beberapa tokoh seperti Soekarno menyebutnya dengan GESTOK (gerakan Satu Oktober) karena peristiwanya sudah masuk tanggal 1 Oktober, sedangkan tokoh-tokoh lain menyebutnya dengan Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Simak Tim Institut Studi Arus Informasi, ***Bayang-bayang PKI***, p. 5-6.

[80] Nasution, ***Aspirasi Pemerintahan Konstitusional...***, p. 429.

[81] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 411-5.

Momentum tersebut sekaligus menjadi jalan lapang bagi tampilnya tokoh baru, Soeharto, dalam kancah perpolitikan Indonesia. Soeharto yang sebelumnya kuranag dikenal, karena hanya menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) memainkan peranan sebagai pihak yang mengambil inisiatif untuk menguasai keadaan, hingga mengangkatnya menjadi tokoh paling pepuler pasca peristiwa G30S. Soeharto memutuskan sendiri melakukan penumpasan gerakan yang diidentifikasi sebagai pemberontakan, dan baru dua hari kemudian memperoleh mandat secara resmi sebagai pemegang Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). [82]

Hasil identifikasi yang secara jelas menunjuk pada PKI sebagai dalang dari peristiwa tersebut, menjadikan pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI dilakukan secara meluas di berbagai daerah. Kalangan Islam, khususnya NU, menyambut antusias gerakan penumpasan PKI di berbagai daerah. Dengan dukungan militer, kalangan NU terlibat dalam banyak peristiwa eksekusi terhadap anggota dan simpatisan PKI tanpa melalui proses peradilan. Hampir sama dengan TNI-AD, kalangan Islam merupakan kelompok yang paling ekstrem menentang PKI. Di samping penyiksaan dan pembunuhan tokoh-tokoh Islam pada peristiwa 1948, PKI dan simpatisannya telah menanamkan benih-benih kebencian dengan banyaknya tindakan kekerasan terhadap tokoh dan umat Islam, terutama di pedesaan.[83]

Terlepas dari adanya rekayasa ataupun tidak, secara bersamaan, gerakan massa meluas dengan tampilnya kelompok-kelompok kesatuan aksi dari kalangan pemuda dan mahasiswa, seperti KAMI, KAPPI, KAPI, KABI, KASI, KAWI dan sebagainya. Gerakan massa

[82] ***Ibid.***, p. 425-6.

[83] Aksi-aksi mengganyang setan desa telah menimbulkan trauma dan dendam mendalam kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, terhadap PKI, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan main hakim sendiri. ***Ibid.***, p. 365. Aksi-alsi provokatif PK di masyarakat simak Tim Cidesindo, ***Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan G 30 S/PKI***, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 199), p. 69-119.

dimarakkan dengan pembakaran kantor pusat PKI dan rumah para tokohnya. Memburuknya situasi politik yang disertai kemerosotan ekonomi mendorong gerakan massa mudah dimobilisasi untuk mengungkapkan ketidakpuasan pada pemerintah. Para pemuda dan mahasiswa turun ke jalan mengajukan tuntutan yang dikenal dengan *Tritura* (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi tuntutan: pembubaran PKI dan ormas-ormas pendukungnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI dan tuntutan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Meski akhir 1965 penumpasan PKI berhasil, presiden belum memberikan penyelesaian politik yang memuaskan atas peristiwa G30S. Presiden tetap tidak bersedia membubarkan PKI sebab tampaknya Soekarno berusaha mempertahankan doktrin Nasakom yang terlanjur disebarkan ke seluruh dunia. [84]

Sejak lumpuhnya PKI, militer menjadi satu-satunya kekuatan politik dominan di Indonesia. Setelah sidang kabinet yang tidak memuaskan, kalangan militer mendesak Soekarno untuk memberikan mandat kepada Soeharto yang pada intinya mengharap pengambilalihan kekuasaan secara resmi. Tuntutan dipenuhi oleh Soekarno dengan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Sekalipun masih dipenuhi kontroversi dan tidak secara jelas menyatakan penyerahan kekuasaan, tapi keberadaannya telah menjadi legitimasi Soeharto sebagaimana pewaris kekuasaan.

Sejak saat itu popularitas Soeharto mencapai puncaknya hingga melahirkan semacam dualisme kepemimpinan. Di sat pihak Soekarno masih berkuasa penuh, sementara Soeharto memperoleh hak yang sedemikian luas dalam penetaan kembali situasi di dalam negeri. Dengan dukungan banyak pihak, Soeharto berhasil membubarkan PKI beserta ormas-ormas satelitnya. Setelah pertanggungjawaban presiden dinilai tidak memuaskan sidang MPRS, Soekarno dipaksa meletakkan jabatan untuk selamanya.[85]

---

[84] Keterlibatan kaum muda sebagai motor perjuangan simak A.H. Nasution, ***Memenuhi Panggilan Tugas***, Jilid VII, (Jakarta: Masagung, 1988), p. 79. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 404-10.

[85] ***Ibid.***, p. 423-4.

ISLAM DAN DEMOKRASI DI TENGAH SITUASI GLOBAL MASA SUHARTO

A. Puncak Perang Dingin dan Trauma atas Komunisme

Ketika Soeharto menapaki tampuk pemerintahan, krisis perang dingin antara blok-Barat dan Timur masih sangat hangat, bahkan memasuki babakan puncak dengan eskalasi konflik yang semakin terkonsolidasi terutama sejak akhir 1949 dan selama 1950-an. Berbagai insiden dan manuver provokatif semakin sering ditunjukkan oleh keduanya dalam berbagai bentuk, dari sekedar perang urat syaraf (*psywar*), spionase, unjuk kemampuan teknologi, kekuatan militer dan persenjataan, hingga intervensi pada negara tertentu. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan berbagai insiden dan manuver tersebut menjadi tontonan dan mempengaruhi alam pikiran masyarakat di berbagai penjuru bumi. [1]

Sejak sukses kampanye presiden Kennedy, media massa mendapatkan perhatian penting sebagai wahana menebar pengaruh,

---

[1] Konsolidasi konflik tersebut ditandai dengan mulai dibentuknya pakta-pakta pertahanan, yang mulai memainkan peran dalam intervensi politik dan militer ke berbagai negara. Peterson, *The Origin...*, p. xi.

baik sebagai bagian dari perang urat syaraf maupun membangun opini publik. Luas dan *massive*nya penyebaran informasi lewat media massa menyebabkan atmosfir global dengan cepat diliputi nuansa persaingan yang seolah mengarah pada meletusnya perang dunia ketiga. Kemajuan teknologi dan khususnya persenjataan meningkatkan kekhawatiran, bahwa perang tersebut akan jauh lebih besar dan destruktif dibanding sebelumnya. Potensi digunakannya senjata nuklir dikhawatirkan akan memperluas dampak kehancuran yang akan turut dirasakan bangsa-bangsa yang tidak terlibat sekalipun. Krisis nuklir yang ditandai peningkatan volume produksi maupun penempatan rudal berhulu ledak nulir antar benua berikut manuver-manuver yang menyertainya menjadikan kekhawatiran tersebut semakin nyata terjadi. [2]

Krisis Berlin 1961, dan krisis peluru kendali Kuba 1962, adalah sedikit di antara peristiwa penting yang menandai memuncaknya krisis perang dingin yang paling krusial, seolah perang besar benar-benar semakin dekat. Kekhawatiran tersebut belum sirna dari wacana internasional, bahkan setelah Amerika Serikat dan Uni Sovyet menandatangani *détente*, 1972. Ini dikarenakan suasana politik internasional sering memanas oleh kasus-kasus spionase, intervensi ataupun dukungan atas melebarnya krisis politik pada negara-negara ketiga.[3]

---

[2] Sebenarnya juga sudah muncul sedikit keyakinan pada saat itu bahwa pada dasarnya kedua adi-daya tidak secara sungguh-sungguh menggunakan senjata nulirnya untuk kepentingan perang. Keberadaannya lebih banyak sebagai alat menekan dan memaksakan kehendak pada badan dunia dan negara-negara lain dalam situasi di luar perang. Adam Malik, ***Sepuluh Tahun Politik Luar negeri Orde Baru***, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), p. 6. Persetujuan SALT I dan II belum dianggap memberikan jaminan bahwa perang Nuklir tidak akan terjadi. Simak Sumardjo, ***Non-Blok...***, p. 8.

[3] Saat menjadi menteri luar negeri, 1970, Kissinger memperingatkan bahwa ancaman komunisme tidak akan pernah berakhir. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 27.

Intervensi kedua adi-daya ke negara-negara dunia ketiga, secara langsung ataupun tidak, telah memperluas dampak perang dingin tidak saja dalam membentuk atmosfer sosial politik internasional melainkan juga pada memburuknya situasi regional dan domestik. Berbagai krisis berkecamuk di berbagai kawasan yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ataupun intervensi kedua adi-daya. Berbagai konflik regional maupun domestik mulai dari Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Selatan, Semenanjung Arab, bahkan Eropa sendiri sering kali tidak dapat mengabaikan peran, pengaruh ataupun sekedar dukungan keduanya.

Di Asia Tenggara, dampak krisis perang dingin bahkan memasuki babakan paling kritis. Stabilitas regional dan situasi domestik mayoritas negara turut dipenuhi konflik. Beberapa negara Asia Tenggara bahkan memasuki fase sejarah paling mencekam oleh perang saudara. Kamboja, Laos, Vietnam dan Korea memasuki fase anarkhi sosial politik yang meningkat menjadi perang saudara. Di Asia tenggara, usaha-usaha kudeta dan perang sipil menjadi bagian sejarah menonjol pada kurun ini. Hanya Brunei Darussalam yang berpemerintahan sendiri dan merdeka penuh 1984 yang praktis tidak sempat mengalaminya. [4]

Situasi internasional yang lekat dengan nuansa perang dan ancaman intervensi melengkapi problem-problem sosial politik dan

---

[4] Setelah merdeka dari Inggris 1948, Burma jatuh ke dalam kudeta militer sampai saat ini. Lepas dari penjajahan Jepang 1945, jatuh dalam perang saudara 1950-1953dan terbagi menjadi Korea Utara dan Selatan 1948. Sejak merdeka 1946 Pilipina menghadapi pemberontakan komunis disusul otoriterisme Ferdinan Marcos. Setelah lepas dari protektorat Perancis, 1953, Laos jatuh dalam kudeta dan pemberontakan komunis yang menelan korban ratusan ribu orang. Setelah menjadi monarkhi konstitusional 1932, dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan Thailand menghadapi krisis politik berupa kudeta militer dan pemberontakan komunis. Lepas dari kekuasaan perancis 1954, Vietnam terpecah menjadi Vietnam Utara dan Selatan dan jatuh pada perang saudara yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Sovyet hingga 1975. Geoffrey Barraclough, eds., ***The Times Atlas of World History***, Revised Edition, (London, Times Book Limited, 1984), p. 279.

keamanan domestik ataupun regional. Kentalnya nuansa perang di tengah kurun sosial politik yang lekat dengan heroisme masa revolusi dan kesiapan konfrontasi menyebabkan suasana sosial politik senantiasa diliputi perasaan terancam. Hal ini mendorong dunia ketiga menjadikan peningkatan kekuatan militer dan persenjataan sebagai prioritas. Mereka berlomba modernisasi angkatan perang dan peningkatan persenjataan dengan menjadikan negara adi-daya sebagai standar ideal. Ini dapat dicermati dari peningkatan kemampuan angkatan perang dan persenjataan pada berbagai negara.[5]

Kondisi ini diikuti dengan menungkatnya kecenderungan kalangan militer mendominasi pemerintahan setelah konsolidasi negara melalui jalan demokrasi rata-rata mengalami kegagalan. Diktatur dan junta militer menjadi *trend* di banyak pemerintahan tanpa kritik berarti dari media internasional. Ini dikarenakan dinamika hubungan antar negara, termasuk dengan negara-negara adi-daya, berada pada posisi yang relatif seimbang. Suatu negara, betapapun miskinnya, dapat dengan mudah menjalin atau memutuskan hubungan dengan negara adi-daya tanpa dampak sosial politik maupun ekonomi berarti. Negara adi-daya tidak cukup alasan untuk menekan negara lain, sebab sedikit tekanan akan mendapatkan reaksi heroik yang hebat dari dalam negeri maupun Blok rivalnya. Amerika Serikat dan sekutunya belum cukup berdaya untuk memaksakan kehendak pada suatu negara seperti dua dasa warsa sesudahnya, sebab pemaksaan kehendak akan berarti mengalihkan simpati masyarakat suatu negara pada *rival* kuatnya, Uni Sovyet.[6]

---

[5] Negara-negara berkembang menjadikan angkatan perang negara maju sebagai referensi dalam peningkatan kemampuan militer di dalam negeri. Simak Lucian W. Pye, ***Aspect of Political Development***, (Massacuset: The Little Brown and Company, 1966), p. 176.

[6] Dukungan Amerika pada Belanda selama masa revolusi dan konflik Irian potensial menjadikan Indonesia lebih condong pada Uni Sovyet atau RRC. Simak Juwono Sudarsono "Bebas-Aktif di Tengah Dunia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1985, p. 127-8.

Kecondongan pada blok tertentu tak terhindarkan baik secara terang-terangan maupun terselubung. Eksistensi Blok-Timur menjadikan kelompok komunis di Indonesia mencapai puncak kepercayaan diri tertingginya. Bagaimanapun, eksistensi Blok militer besar tersebut menjadi referensi pembenar idealitas yang hendak dituju. Sementara keberpihakan pada Barat bagi kelompok nasionalis anti-komunis lebih menampakkan satu bentuk oportunisme, khususnya dalam rangka membendung komunisme, dan bukan sebagai bentuk simpati atas liberalisme. Karena itu, dinamika hubungan negara-negara baru dengan negara-negara adi-daya kadang diliputi pasang surut antara ketegangan dan kerjasama.[7]

Indonesia bahkan sempat memanfaatkan ketegangan kedua adi-daya dalam menuntaskan kemerdekaan dan kasus Irian Barat. Negeri ini pernah cukup dekat dengan Uni Sovyet, bukan saja sebagai inspirator gerakan kemerdekaan pada kurun akhir penjajahan Belanda, tapi juga karena dukungannya atas kemerdekaan RI sejak 1946 hingga pembebasan Irian. Ketika kebijakan Amerika Serikat lebih menguntungkan Belanda, kerja sama dengan Uni Sovyet dan kemudian Cina berlangsung intensif. Sebaliknya, meski bukan berarti berada pada blok-Barat, kerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya kian intensif ketika Orde Baru memandang dukungan Amerika lebih menguntungkan, terlebih setelah hubungan dengan Uni Sovyet dan Cina mengalami kebekuan sejak peristiwa G30S.[8]

---

[7] Terutama pada kasus-kasus pemberontakan komunis, munculnya tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Uni Sovyet atau Cina seringkali mendahului terjadinya peristiwa. Dijadikannya kapitalisme sebagai *platform* baru kebijakan ekonomi era Orde Baru tidak lepas dari kehadiran tokoh-tokoh didikan Barat. Pada kasus komunis, sikap kaum komunis dan simapatisannya semakin keras bersamaan dengan kembalinya pemimpin-pemimpin mereka dari konferensi-konferensi komunisme internasional. Simak Djiwandono "Perubahan Persepsi tentang Uni Sovyet...", p. 60.

[8] Uni Sovyet sangat kecewa dengan tuduhan Indonesia atas keterlibatannya dalam peritiwa Madiun. ***Ibid.***, p. 61.

Aliansi Non-Blok tidak membawa banyak arti dalam mencegah kecondongan suatu negara dan kelompok-kelompok dalam negeri pada salah satu dari keduanya. Indonesia mampu menjaga netralitasnya sekalipun era Soekarno lebih dekat pada Uni Sovyet dan Cina, dan masa Orde Baru lebih dekat pada Barat. Eksistensi Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung dan kerjasama regional ASEAN secara proaktif mampu meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota, terlebih setelah pemerintahan Orde Baru mampu menawarkan penyelesaian problem-problem demostik secara damai. Stabilitas dan netralitas Indonesia sejak Orde Baru bahkan telah meningkatkan kesadaran untuk menjaga kawasan Asia Tenggara dari intensitas konflik dengan penyelesaian-penyelesaian politik cara Asia.[9]

Berakhirnya perpecahan Jerman dan berakhirnya perang Korea belum menjadi akhir ataupun sekedar meredakan persaingan, sebab perang Vietnam masih baru memasuki babakan puncak. Pada kawasan tertentu dan sebagian dunia Islam konflik justeru memasuki fase yang semakin kritis. Dukungan secara nyata ataupun di balik layar negara adi-daya pada kasus Afganistan, Libia, Sudan dan Palestina yang baru memasuki babak awal dengan efek jangka panjang yang belum terbayangkan, terlalu jelas untuk dinafikan. Namun demikian, beberapa saat negara-negara baru pada umumnya masih dapat menikmati independensi dari intervensi berarti politik adi-daya manupun dunia internasional, termasuk PBB. [10]

---

[9] Malik, ***Sepuluh Tahun...***, p. 8-9.

[10] Dewan Keamanan mengakui belum dapat berfungsi sebagaimana butir piagam PBB, bukan karena lemahnya butir piagam, melainkan konstelasi politik global, di mana dua kekuatan besar adi-daya belum dapat membangun konsesus yang menunjang baik di dalam maupun di luar PBB. Barros, ***PBB...***, p. XIV.

B. Kegagalan Demokrasi Dunia Ketiga

Sesaat setelah kemerdekaan, negara-negara baru pada umumnya menghadapi persoalan politik dalam negeri yang sulit diurai. Konflik dan persaingan politik dan ideologi yang disertai kekerasan banyak mewarnai hampir setiap negara. Banyak negara larut dalam pertikaian dalam negeri, baik berupa persaingan ideologi politik, etnis maupun perebutan kekuasaan. Kekerasan politik maupun fisik menjadi warna dominan dalam perjalanan sejarah, khususnya negara-negara baru. Munculnya tragedi-tragedi nasional, baik dalam bentuk penangkapan-penangkapan rival politik, pelarangan gerakan-gerakan sosial politk, perang saudara, pembunuhan politisi dan pemimpin negara yang diikuti lahirnya rejim-rejim diktatur menjadi fenomena umum di berbagai negara. [11]

Setelah fase instabilitas dalam negeri akibat persoalan ideologi sosial politik, perebutan kekuasaan, konflik etnis ataupun primordial lain mencapai klimaksnya, banyak negara mulai mencapai konsolidasi, di mana stabilitas pemerintahan mulai dapat dibangun. Terlepas dari demokratis ataupun tidaknya sistem pemerintahan yang terbentuk sesudahnya, rata-rata negara telah menemukan kejelasan format sistem pemerintahan yang mampu meredam krisis dalam negeri, paling tidak untuk sementara waktu. Kediktaturan, terutama oleh kalangan militer seolah menjadi solusi paling populer sebagai cara penyelesaian masalah dalam negeri, yang biasanya disertai munculnya simbul-simbul baru sebagai legitimasi kekuasaan.[12]

[11] Pada kurun yang hampir bersamaan banyak bermunculan kudeta militer yang diikuti berdirinya rejim diktatur baik secara terang-terangan maupun tersamar seperti yang terjadi di Afrika (seperti Mesir, Libya, Sudan dan Muritania) antara tahun 1962-1978, Amerika latin (seperti Guatemala, Elsalvador, Argentina, Uruguay, Paraguay dan Brazil) antara tahun 1964-1983, serta di Asia (seperti Pakistan, Burma, Filipina, Thailan dan Indonesia sendiri) yang semuanya terjadi pada kurun hampir bersamaan. Simak Barraclough, eds., ***The Times Atlas...***, p. 282-7.

[12] Pada kasus Asia Tenggara, dan mungkin juga pada banyak negara, tentara yang merupakan tangan kanan terkuat negara dengan cepat menjadi dominan, dan

Kuatnya dominasi atau kemenangan salah satu kekuatan ideologi sosial politik, afiliasi ataupun perlindungan negara adi-daya, membuat negara baru memiliki kejelasan pilihan sistem sosial politik. Negara-negara yang karena afiliasi atau dukungan salah satu blok adi-daya pada umumnya mencapai tahap konsolidasi berupa stabilitas sosial politik dan pemerintahan, sekalipun sebagian berujung pada otoritarianisme. Blok adi-daya memberikan referensi sosial politik dan sekaligus perlindungan kelompok afiliasi tertentu yang menjadikannya memperoleh referensi yang jelas dalam menentukan tananan sosial politik. Sementara pada negara yang tidak memiliki kekuatan dominan, konsolidasi negara harus melalui proses dialektika yang dipenuhi konflik. Mereka harus terlebih dahulu terombang-ambing oleh beragam alternatif sistem sosial politik, yang masing-masing harus berkompetisi untuk menjadi dominator kekuasaan baik dengan jalan demokratis dan damai maupun konfrontasi dalam negeri. Solusi mutakhir yang ditempuh pada akhirnya hampir serupa, yaitu munculnya kekuatan dominan yang memaksakan satu sistem untuk diterima semua pihak. [13]

Labilnya pemerintahan dan jatuh-bangunnya demokrasi mewarnai perjalanan kesejarahan republik-republik baru. Kekerasan sering kali tak terhindarkan sebagai salah satu cara penyelesaian konflik dan membangun stabilitas sosial politik dalam negeri. Kekerasan bukan hanya dominasi pemerintahan otokratik, melainkan juga dalam membangun tegaknya rejim-rejim demokratis. Republik-republik baru di Asia Timur dan Tenggara yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan demokratis, pada umumnya mencapai konsolidasi dengan tanpa meninggalkan tindakan-tindakan

---

aturan – sebagamana dalam politik Thailand – sampai tahun 1970-an diwarnai kediktatoran militer sekalipun agak disamarkan. Simak Benedict R.O'G. Anderson, ***Hantu Komparasi...***, p. 474.

[13] Totaliarianisme yang disertai penghancuran masyarakat sipil adalah konsep yang berkembang di Barat seperti dicontohkan pada negara-negara baru oleh Uni Sovyet dan Jerman masa Nazi, sebagai upaya kontrol total terhadap warga negaranya. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 49-50.

kekerasan pada *rival-rival* politik dalam negeri. Korea Selatan, dan mungkin juga Jepang bila tidak didominasi Amerika serikat, sebagai pemerintahan paling demokratis di Asia Timur sejak 1950-an juga tidak lepas dari sejarah kekerasan terhadap kelompok tertentu dalam rangka menopang dominasi kelompok demokrat.[14]

Kecuali Jepang yang sudah berpengalaman sejak Restorasi Meiji, hanya sedikit negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara yang berhasil menerapkan demokrasi dengan sedikit konflik. Kalaupun ada hanya demokrasi terbatas semisal Singapura dan Malaysia yang karena adanya kepentingan dan dukungan Barat dapat menopang kekuatan dominan dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri, sekalipun kerusuhan berdarah tetap tak terhindarkan pasca Pemilu. Kekuatan dominan di Malaysia dan Singapura mampu menjaga stabilitas dengan membuka sedikit akses bagi kekuatan yang potensial menghambat stabilitas sosial politik dan pemerintahan.[15]

Kembalinya Malaysia dan Singapura dari pemerintahan kolonial ke nasional berlangsung melalui peralihan kekuasaan secara damai. Dampaknya, infrastruktur sosial politik, kultural dan perekonomian tidak mengalami perubahan berarti. Bekas pemerintah kolonial masih berperan dalam menjaga stabilitas sosial politik, ekonomi maupun keamanan sehingga situasi sosial politik, ekonomi dan pengelolaan aset-aset perekonomian terus berlanjut tanpa guncangan berarti. Pemerintah nasional dapat melanjutkan dan memodernisasi negara tanpa gejolak.

---

[14] Kekalahan Jepang dalam perang dunia hampir menjatuhkannya pada kediktatoran kaum komunis. Pengalaman demokrasi di Korea Selatan tidak lepas dari kekerasan rejim Pak Chung Hi dan Sygman Rhee yang memakan banyak korban masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan. Alfian, ***Militer dan Politik, Pengalaman Beberapa Negara***, (Djakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan, 1970), p. 29.

[15] Menurut Lijphart, seperti diulas Setiawan, demokrasi seperti diterapkan di Malaysia bercorak konsosiasional, yang terbukti "aman" untuk negara yang pluralistik. Simak Setiawan "Demokrasi Konsosiasional...", p. 61. Simak juga Snyder, ***Dari Pemungutan...***, p. 317.

Hal serupa terjadi pada Brunei yang merdeka tahun 1984, yang berlangsung tanpa gejolak. Peralihan kekuasaan dari Inggris ke kerajaan berlangsung damai. Kebutuhan untuk menjaga keberlajutan aset dan investasi di bekas daerah jajahan mengharuskan Inggris turut serta mengupayakan iklim sosial dan politik yang stabil sampai selesainya proses nasionalisasi. Inggris menopang tegaknya kekuatan dominan yang mampu menentukan jalannya negara dan pemerintahan tanpa hambatan berarti. Kekuatan tersebut memiliki otoritas kuat yang mampu meredam gejolak dan menghindari konflik.[16]

Dalam sejarah Asia Timur dan Tenggara, kekuatan dominan yang berhasil membangun demokrasi pada masa-masa sesudahnya adalah yang dilindungi oleh kekuatan-kekuatan luar. Korea Selatan sebagai satu-satunya negara demokrasi sejak 1950-an mungkin juga tidak akan eksis tanpa *back up* memadai dari Amerika Serikat. Pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat di wilayah ini menjadikan stabilitas politik terjaga, yang dengan demikian, pola peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke nasional juga turut menentukan situasi dan jalannya pemerintahan berikutnya. Negara-negara yang merdeka dengan jalan revolusi umumnya menghadapi persoalan dalam negeri yang rumit dan berkepanjangan. Mereka harus terombang-ambing dalam pergolakan dalam negeri dalam membangun pemerintahan secara mandiri.[17]

Keberhasilan menjadi negara demokrasi tampaknya tidak dimulai dari kemampuan kekuatan-kekuatan sosial politik di tingkat bawah berbagi basis membangun pemerintahan, tapi dari kesediaan

[16] Inggris bahkan turut serta meredam perlawanan terpanjang dalam sejarah penjajahannya di Malaysia yang dilakukan kaum komunis. Simak Anderson, ***Hantu Komparasi...***, p. 10. Paling tidak dukuungan Amerika Serikat terhadap hegemoni kaum anti-komunis menentukan stabilitas negara maupun kawasan. Simak ***Ibid.***, p. 11-2.

[17] Dapat dicermati pada kasus Thailand, sebuah negara yang relatif lepas dari penjajahan juga harus dihadapkan pada kerumitan situasi sosial politik yang dipenuhi persaingan ideologi dan problem-problem etnis. Simak Anderson, ***Ibid.***, p. 272-285. Simak pula dinamikanya dalam catatan kaki. ***Ibid.***, p. 289.

kekuatan dominan untuk berbagi tempat bagi akses pada yang mereka sebelumnya tidak atau kurang memperoleh akses. *Sharing* kekuasaan oleh kekuatan sosial politik tingkat bawah cenderung menghasilkan anarkhi, kecuali bila terdapat satu kekuatan yang mampu berperan sebagai kekuatan dominan. Sementara di tengah kerasnya militansi dan ambisi politik yang berkembang ketika itu, menjaga stabilitas kelompok dominan sekalipun bukanlah hal mudah.[18]

Stabilitas pemerintahan dan proses demokrsatisasi sangat ditentukan oleh ada tidaknya kekuatan dominan sebagai penentu dan pengendali, selain juga oleh proses peralihan kekuasaan dari rejim kolonial ke nasional. Demokrasi ataupun otoritarianisme tidak dapat tumbuh sendiri tanpa dukungan kekuatan dominan baik dari dalam maupun luar negeri untuk menjamin stabilitas nasional dan memaksakan suatu sistem sosial politik.

Tegaknya demokrasi sering kali membutuhkan kekuatan dominan yang solid dan mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil, untuk kemudian membuka akses bagi kekuatan-kekuatan lain. Demokrasi membutuhkan kekuatan dominan yang memiliki itikad baik untuk menumbuhkannya. Kekuatan dominan memungkinkan proses demokratisasi berlangsung terkendali dengan cara yang lebih rasional dan melalui proses sejarah secara dialektik. Hanya saja, tidak semua kekuatan dominan memiliki pretensi untuk berbaik hati membuka akses bagi yang lain. Kebanyakan kekuatan dominan cenderung memilih menghentikan proses perkembangan

---

[18] Proses revolusi yang berlangsung kurun modern yang melahirkan gerakan-gerakan yang relatif independen yang satu dengan lainnya tidak terikat oleh suatu koordinasi. Karena itu, problem pasca revolusi melahirkan ketajaman konflik antar golongan. Simak Onghokham"Revolusi Indonesia..." p. 6-7. Dengan membandingkan dengan revolusi Perancis, situasi ini mengakibatkan demokrasi di Indonesia memerlukan pemantapan lagi – dalam jangka panjang. Simak Sartono Kartodirdjo "Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia" dalam ***Archipel***, Vol. II, No. 57, 1999, p. 13.

demokrasi setelah stabilitas politik dan pemerintahan terwujud. Demokratisasi bukan berarti terhenti, sebab pada kurun mutakhir demokratisasi terjadi karena didorong oleh tuntutan situasi yang dapat ditolak, sebagaimana dialami Indonesia 1998. Dalam situasi seperti inilah gelombang balik demokrasi kedua, seperti terminologi Huntington, berlangsung.[19]

Kegagalan banyak negara yang terombang-ambing oleh krisis politik dalam negeri mengakibatkan mereka kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Selain Korea, Malaysia dan Singapura, negara-negara di kawasan Asia Tenggara jatuh ke bawah rejim komunis atau otoriter, seperti Thailand, Burma, Vietnam, Kamboja, Pilipina dan Indonesia. Ideologi menjadi penyumbang konflik paling dominan yang mempertajam friksi primordialisme, karena keberadaanya selalu disertai tingginya tingkat fanatisme. Ini terjadi karena ideologi-ideologi sosial politik modern berkembang melalui indoktrinasi, bukan wacana dialektik. Kedudukan ideologi maupun kesadaran-kesadaran primordial lainnya setara dengan agama, yaitu sebagai nilai yang harus diaktualisasikan bahkan diperjuangkan hidup atau mati. [20]

Tampaknya ini bukan hanya masalah tingkat pendidikan atau *mêlek huruf* masyarakatnya, sebab situasi yang sama terjadi pula di hampir seluruh negara. Dialektika sosial politik yang berkembang pada kurun itu cenderung berpola – meminjam istilah filsafat - pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) Kuhnian, di mana kebenaran merupakan pilihan-pilihan tertutup. Hanya ada kemungkinan

---

[19] Dengan mendasarkan pada pandangan Huntington, Suyatno menunjukkan bahwa – sekalipun tidak dalam periodisasi pasti - kurun 1956-1975 dikategorikan ke dalam gelombang balik demokrasi kedua, masa di mana otoriterisme berkembang kembali. Paling tidak 22 negara kembali ke otoriterisme setelah sebelumnya menempuh jalan demokrasi. Simak Suyatno, ***Menjelajah Demokrasi***, (Yogyakarta: Liebe Book Press, 2004), p. 90.

[20] Otoriterisme seolah menjadi bentuk lain dari metamorfosis nasionalisme, sebuah pencarian bentuk-bentuk baru, yang diakibatkan dialektika berbagai varian nasioanlisme yang berlangsung secara tidak konstruktif. Simak kembali Wahid “Reideologisasi…”, p. 5.

menerima salah satu dan menolak yang lain, sehingga tertutup peluang dialog untuk digunakan sebagai jalan penyelesaian. Membangun konsensus nasional yang solid terlalu mahal untuk diraih di tengah iklim ideologis yang diliputi fanatisme dan sarat kepentingan primordial.[21]

Di antara ideologi yang paling intoleran adalah komunis. Radikalitas kelompok komunis dengan sikap antipati berlebihan pada hal-hal yang berbau kolonialisme atau imperialisme senantiasa diikuti ketidakpercayaan pada sikap dan keputusan politik kelompok berkuasa. Gerakan tersebut lekat dengan sikap dan keputusan radikal yang tidak memungkinkan dilakukannya *sharing*. Gerakan komunisme tidak terbatas pada pengambilan keputusan politik tapi juga pada aksi-aksi anarkhis di lapangan. Heroisme yang berlebihan membuat dialog selalu berujung buntu, sebab ambisi mewujudkan republik komunis dengan segala cara bukan untuk didialogkkan.[22]

Pada dasarnya ketidakmampuan dialog juga terjadi pada seluruh kelompok sosial politik, termasuk Nasionalis-Sosialis, Nasionalis-Liberal maupun Islam, terutama ketika berada pada posisi berkuasa. Ideologi menjadi pilihan yang tidak membuka celah dialog. Hanya saja, umumnya mereka masih mentaati prosedur demokrasi politik dalam memperjuangkannya.

Politik Islam di Indonesia juga selalu menempuh jalan demokratis polirik. Desakan menjadikan Islam sebagai ideologi negara atau penerapan syari'ah dilakukan dengan menempuh jalur parlementariat. Kentalnya konflik ideologi dari kalangan Islam,

---

[21] Pada masyarakat yang sedang berkembang konsolidasi politik sipil secara cepat tidak mungkin dibangun. Simak Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 231.

[22] Di Asia Tenggara, telah menjadi fenomena umum di mana kekhawatiran dan trauma akibat gerakan komunisme menggejala hampir menyeluruh, sehingga pada kurun awalnya gerakan ASEAN kadang dimaknai sebagai gerakan anti-komunis, yang dalam perkembangannya karena keterlibatan Vietnam di Kamboja menjadi berkembang sebagai anti-Veitnam dibanding komunis. Simak Anderson, ***Hantu Komparasi...***, p.

pertama-tama justeru muncul sebagai respon atas sikap komunisme yang secara provokatif dan anarkis menentangnya, baru kemudian terarah pada kaum sekuler umumnya.[23]

Di dunia Islam memang muncul sebentuk paranoia terhadap Islam. Terdapat *trend* umum di kalangan sekuleris yang menempatkan Islam sebagai ancaman ideologis setara, dan tidak jarang dianggap lebih berbahaya, dibanding komunisme. Fenomena radikalisme Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara umumnya terjadi setelah penindasan kalangan sekuler yang tidak menginginkan Islam memenangkan percaturan ideologi politik. Kasus Ichwanul Muslimin Mesir atau FIS di Al-Jazair salah satu contoh, di mana pemerintahan sekuler dengan segala cara menganulir kemenangan kelompok Islam yang diperoleh melalui jalan demokratis.[24]

Lahirnya negara-negara baru hampir selalu disertai berkembangnya kekuatan sosial politik dengan derajad sosio kultural yang hampir sama. Tidak ada satu kekuatan yang memiliki wibawa sosial politik lebih di atas yang lain. Saat percaturan sosial politik menempuh jalan demokratis, tidak ada kekuatan dominan yang mampu membangun pemerintahan yang kuat tanpa koalisi. Sementara koalisi di tengah friksi yang terlalu tajam hanya akan melahirkan jalinan yang lemah. Konsentrasi pelaku sosial politik lebih banyak terpusat pada kompetisi memperebutkan pengaruh dan kekuasaan, yang berakibat semangat primordial ideologis dan kepartaian lebih menonjol dibanding semangat untuk bermain secara *fair*.

Sulitnya konsolidasi negara dengan cara demokratis mengakibatkan banyak negara kehilangan kepercayaan, atau bahkan

---

[23] Dalam hal inipun kalangan Islam masih harus bersaing dengan sesama muslim lain yang dalam konstelasi politik praktis tidak senantiasa sejalan. Simak A. Syafi'i Ma'arif "Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin" dalam ***Prisma***, No. 5, 1988, p. 26-8.

[24] Irfan Tamwifi "Menelusuri Problem Implementasi Demokrasi di Dunia Islam" dalam ***Menara Tebuireng***, Vol. 1, No. 2, 2005, p. 46.

frustasi, pada demokrasi. Ketidakmampuan menjalin komunikasi dan kesiapan menerima hasil dari proses yang demokratis menjadikan banyak kekuatan sosial politik berusaha menempuh jalan pintas untuk memenangkan persaingan. Di antara yang paling umum adalah dengan mengerahkan gerakan massa, memanfaatkan media massa ataupun menanfaatkan struktur pengadilan dan birokrasi.[25]

Di samping itu, iklim regional dan internasional yang sarat ancaman perang mendorong kekuatan militer turut serta bermain dalam kancah politik. Apalagi perilaku politisi sipil sering kali tidak memuaskan kelompok militer yang rata-rata lekat dengan semangat nasionalis yang heroik. Mereka merupakan kelompok dengan semangat nasionalisme paling heroik yang pengekspresiannya bersifat fisik. Langkah-langkah pragamatis lebih memuaskan dibanding dialektika demokrasi yang berbelit dan cenderung berujung pada kebuntuan. Di samping itu, banyak pemerintahan dihadapkan pada problem keamanan dalam negeri di mana semangat primordialisme sering mengarah pada disintegrasi.[26]

Karena itu, sejak 1950 sampai 1960-an banyak negara yang semula mengapresiasi demokrasi jatuh dalam otokrasi atau diktatur militer. Tokoh-tokoh dictator menyuarakan harga diri bangsanya secara ekspresif. Sekalipun umumnya tetap kesulitan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri serta penindasan di pihak lain, tapi kehadiran mereka meski hanya sesaat seolah menjadi pereda keputusasaan atas hiruk-pikuk demokrasi yang melelahkan.

Penyelesaian paling pragmatis atas berbagai kegaduhan politik dalam negeri mengambil bentuk penumpasan, atau paling tidak

---

[25] Simak Snyder, ***Dari Pemungutan....*** 53.

[26] Efek paling menakutkan demokrasi adalah kecenderungan disintegrasi kare geraknya yang berlangsung secara sentripetal. Transisi demokrasi cenderung tak terduga, seperti permainan catur yang potensial dipenuhi kecurangan yang keterlaluan. Simak dalam Guillermo O'Donnell dan Phillipe C. Scmitter, ***Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian***, (Jakarta: LP3ES, 1993), p. 107.

pemberangusan lawan politik dengan tindakan-tindakan represif. Penindasan kelompok satu atas yang lain menjadi hal biasa terjadi dan dilakukan oleh rejim-rejim otoriter di berbagai negara. Dalih umum yang diketengahkan pada umumnya adalah membela kepentingan Negara. Kegagalan demokrasi di dunia ketiga ke dalam kediktaturan politik menjadikan banyak pemerintahan diktatur memperoleh referensi pembenaran untuk menyelesaikan masalah dalam negeri. Pemerintahan diktatur memasuki masa keemasan dengan berbagai variasi, yang pada intinya sama, diktatur.[27]

Wacana menegakkan demokrasi bukan saja kian jauh, melainkan memasuki fase di mana kepercayaan terhadapnya semakin pudar. Jangankan membangun demokrasi, menjamin stabilitas negara dan pemerintahan saja tidak mudah dilakukan. Padahal terjadinya instabilitas negara dan pemerintahan akibat konflik politik cenderung menyakiti perasaan mereka yang merasa telah menebar jasa, mengorbankan jiwa dan raganya dalam merebut kemerdekaan.

Negara-negara Non-Blok yang diliputi oleh semangat pembebasan dari kolonialisme dan segala bentuk kekuasaan dari negara lain member legitimasi negara-negara anggotanya untuk menentukan nasib sendiri. Ini juga memungkinkan negara-negara dunia ketiga merumuskan sistem pemerintahan sendiri. Sebagaimana masa-masa sebelumnya di mana tidak satu negarapun yang dapat memaksakan demokrasi diterapkan pada suatu negara, bahkan ketika konsolidasi politik dalam negeri mengalami kegagalan dan berujung dengan otoritarianisme.[28]

---

[27] Hasil dari proses demokrasi kadang harus menyisakan kekecewaan dan frustasi para pelakunya. ***Ibid.***, p. 90.

[28] Bilamana benar tuduhan komunis Indocina bahwa ASEAN sebagai antek-antek Amerika, maka pada kurun yang sama, fokus perhatian negara besar (blok-Barat) memang masih terbatas pada kondisi sosial politik negara baru yang bebas dari pengaruh komunis, dan belum pada tuntutan demokratisasi. Simak Malik, ***Sepuluh Tahun...***, p. 10.

C. Kemiskinan dan Jeratan Ekonomi Global

Selain problem politik dan keamanan, negara-negara baru menghadapi problem krusial yang tak kalah pelik berupa beratnya upaya mewujudkan kesejahteraan di dalam negeri. Kembalinya kekuasaan politik ke tangan kaum pribumi tidak serta-merta memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan. Sebaliknya, kondisi perekonomian justeru mengarah pada kemerosotan. Apalagi perekonomian masyarakat pribumi pada era kolonial berada pada posisi terendah, dan belum lagi perkembangan situasi sosial politik domestik, regional dan internasional yang juga tak dapat diabaikan perannya dalam meningkatkan kemerosotan perekonomian negara.[29]

Kurun akhir kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang harus diakui telah mampu menyuntikkan perbaikan pendidikan, kesadaran politik dan semangat revolusioner. Namun demikian, kolonialisme di Indonesia praktis tidak memberikan bekas pada perkembangan *enterpreneurship* di kalangan masyarakat pribumi. Kaum pribumi bahkan jatuh semakin dalam pada etos kerja yang lemah. Kelas kapital yang sering dilawan oleh sebgaian besar kaum pergerakan sebenarnya tidak cukup signifikan untuk diarahkan pada kaum pribumi, sebab kaum kapital pribumi tidak tumbuh sebagaimana umumnya kalangan kapitalis.[30]

Dalam situasi demikian, masyarakat pribumi dihadapkan pada konstelasi perekonomia global yang berakibat semakin timpangnya jurang antara perekonomian pribumi dan Cina, antara negara baru dan negara maju. *Trend* perekonomian global memang berada pada menggejalanya kapitalisme di dalam negei maupun luar negeri yang

[29] Sebagai gambaran, taksiran distribusi pendapatan perkapita penduduk Jawa tahun 1927 adalah fl. 4.167 untuk orang Eropa, fl. 500 untuk orang Cina, dan hanya fl. 42 untuk orang pribumi. Sritua Arif "Perjalanan Nasionalisme Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis" dalam ***Prisma***, No. 2, 1992, p. 5.

[30] M. Dawam Raharjo "Peran Angkatan, Formasi Sosial dan Negara" dalam ***Prisma***, No. 8 1985, p. 59.

memaksakan persaingan yang semakin ketat. Situasi perekonomian setiap negara sudah harus berhadapan dengan konstelasi perekonomian global dengan tingkat persaingan yang tidak berimbang. Padahal kesiapan mental, keahlian dan permodalan masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat rendah, tidak sepadan dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Sedangkan impian untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diharapkan selama masa perjuangan kemerdekaan, juga masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Di samping dihadapkan pada konstelasi global dan memaksakan ketergantungan yang sangat besar pada negara kaya situasi sosial politik dalam negeri juga penuh konflik dan pertikaian.[31]

Padahal perekonomian merupakan faktor yang sangat rentan memicu timbulnya berbagai persoalan politik. Kegagalan ekonomi potensial memicu ketidakpuasan yang pada gilirannya akan melahirkan instabilitas politik dan pemerintahan. Negara selalu dihadapkan pada dilema yang senantiasa terulang. Di satu sisi, mekanisme politik yang konstruktif dibutuhkan dalam membangun institusi pemerintahan yang solid dan efektif, yang mampu menjalankan mekanisme kontrol serta mendorong peningkatan kesejahteraan.

Di sisi lain, infrastruktur perekonomian dan modalitas sosial yang rendah menjadi hambatan pembangunan institusi politik dan pemerintahan. Perkembangan atmosfir sosial politik global sering menyulitkan negara berkembang untuk memilik kapitalisme atau sosialisme. Jalan umum yang biasa ditempuh justeru ke arah korporatisme pemerintahan dunia yang lebih potensial dalam mengeliminasi guncangan politik yang selalu menjadi ritual rutin pemerintahan dalam negeri.[32]

---

[31] Simak Barraclough, eds., *The Times Atlas...*, p. 294-5.

[32] Sulitnya kondolisasi politik menjadikan nnegara sering diposisikan sebagai "kepala keluarga" yang berusaha mengatur harmoni kepentingan ekonomi dan profesi. Simak Farchan Bulkin "Negara, Masyarakat dan Ekonomi" dalam ***Prisma***, No. 8, 1984, p. 6.

Sementara itu, kemiskinan membuat masyarakat mudah dieksploitasi untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik tertentu. Janji-janji ideologi, kelompok atau partai politik tertentu, terutama yang secara spesifik menjanjikan masa depan lebih baik bagi masyarakat miskin mudah mendapatkan dukungan luas. Kesibukan hidup yang rendah pada rata-rata masyarakat miskin menimbulkan terlalu banyak waktu luang yang memungkinkan mereka dengan mudah dieksploitasi kelompok-kelompok kepentingan untuk mendukung misi politiknya. Mereka dengan mudah dipacu militansinya dengan slogan dan simbul-simbul, dan dilibatkan dalam gerakan-gerakan sosial politik tertentu. Padahal sering kali mereka tidak cukup memahami apa yang dilakukan, bahkan tak cukup jelas keuntungan bagi diri mereka sendiri.[33]

Kemiskinan juga senantiasa disertai rendahnya tingkat intelektualitas dan pengetahuan masyarakat. Perkembangan pendidikan sejak pasca kemerdekaan telah meningkatkan jumlah masyarakat *mêlék huruf*. Namun demikian, kemampuan tersebut belum cukup menyentuh kemampuan berfikir otoritatif dalam menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan rasionalnya sendiri. Rendahnya intelektualitas dan pengetahuan menjadikan opini mereka sangat tergantung pada pemimpin opini (*opinion leader*) yang dianut.[34]

Alam pikiran mereka dengan mudah dikendalikan *opinion leader* baik dari kalangan tokoh tradisional ataupun generasi terdidik atau mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih. Lebih banyak di antara mereka yang tidak cukup, atau hanya sedikit, memahami *frame* pemikiran dan kepentingan ideologi dan politik yang sedang dibela. Keterlibatan dan dukungannya pada kelompok

[33] Mobilisasi massa oleh tokoh-tokoh partai politik pada berbagai sektor sosial memunculkan gerakan-gerakan sosial dan politik dengan orientasi politik dan ideologi yang kuat. Simak kembali ***Ibid.***, p. 11.

[34] Situasi ini dimanfaatkan kalangan elit untuk memobilisasi massa untuk memenangkan persaingan. Snyder, ***Dari Pemungutan...***, p. 124.

tertentu lebih banyak bermakna identifikasi diri yang membedakan dirinya dari kelompok lain. Sedikit berbeda dari masa sesudah Orde Baru nantinya, mereka belum cukup pargmatis dan cukup puas dengan janji-janji jangka panjang ideologi. Kondisi ini sejalan dengan konstelasi sosial politik yang masih lekat dengan idealisme primordial ideologi politik dibanding pertimbangan politik praktis.[35]

Meski pada awal Orde Baru belum cukup diwacanakan, tapi konstelasi dunia sebenarnya sudah mengglobal, yang menunjukkan bahwa globalisasi merupakan internasionalisasi, liberalisasi dan universalisasi atau lebih tepatnya westernisasi. Globalitas tidak hanya terjadi pada aspek perekonomian, tapi juga merasuki berbagai aspek kehidupan. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, peningkatan produksi, dan kesejahteraan tidak lagi ditentukan variabel dalam negeri semata. Perubahan pada suatu kawasan ditentukan pola oleh perkembangan kawasan lain. Bahkan iklim sosial politik dan pemerintahan dalam negeri juga tidak pernah lepas dari perkembangan di luar negeri. Termasuk dalam hal ini adalah berdirinya Indonesia yang tidak lepas dari pengaruh perubahan global yang diwarnai berbagai gerakan kemerdekaan pada berbagai bangsa.[36]

Persaingan di tingkat global selalu menguntungkan negara-negara maju dan kaya. Terlepas ada tidaknya kesiapan sumberdaya manusia, infrastruktur dan permodalan, setiap negara dipaksa memasuki sistem yang diciptakan oleh negara kaya. Konsentrasi kekuatan modal pada negara-negara bekas penjajah dan kegagalan negara bekas jajahan dalam membangun perekonomian dalam waktu singkat membuat negara-negara baru mengalami ketergantungan

---

[35] Kemerdekaan melalui jalan revolusi sering dicapai dalam situasi negara yang tidak jelas formtanya, karena tenggelam dalam kegaduhan masyarakat yang baru saja mengalami revolusi, politisasi dan ideologisasi secara besar-besaran. ***Ibid.***, p. 13.

[36] Dalam perkembangan mutakhir, globalisasi mengarah pada de-teritorialisasi, trans-nasionalisme, multi-lokal dan trans-lokal. Sindhunata "Dilema Globalisasi" dalam ***Basis***, Nomoor 01-02, Tahun Ke-52, Januari – februari 2003, p. 5-8.

pada negara kaya. Keadaan ini kemudian diperalat oleh negara-negara maju untuk semakin menjerat negara-negara miskin hingga jatuh dalam lilitan hutang luar negeri. Rendahnya infrastruktur perekonomian, sumber daya manusia dan modal menjadikan kekayaan alam yang berlimpah tidak banyak berarti, kecuali negara maju bersedia mengulurkan bantuan untuk turut mengelolanya.[37]

Impian membangun negara mandiri, lepas dari bangsa lain jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Negara-negara baru yang rata-rata miskin dan lemah kehilangan nilai tawar di hadapan negara kaya yang mampu memaksakan sistem dan tata nilai untuk diikuti. Penyelesaian masalah-masalah dalam negeri, terutama perekonomian menuntut pilihan kerja sama dengan negara kaya, meski sering kali bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip nasionalismenya. Kerjasama dengan negara-negara senasib belum banyak membantu, karena masing-masing negara menghadapi problem domestik, regional dan global yang tidak jauh berbeda.[38]

Situasi internasional tak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai faktor yang turut menentukan dinamika sosial ekonomi dalam negeri. Pengelolaan masalah-masalah dalam negeri tidak dapat dilepaskan dari situasi dan perkembangan pada negara-negara lain, serta keharusan mengikuti norma dan aturan main yang ditetapkan negara maju. Iklim dunia menempatkan setiap negara saling kait-mengkait dengan kepentingan negara lain, dengan ketergantungan negara miskin pada negara maju dan kaya lebih dominan dibanding sebaliknya. Sekalipun masih menikmati hak politiknya, setidaknya untuk beberapa waktu, tidak ada lagi negara yang benar-benar independen.[39]

---

[37] Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia mencapai puncaknya ketika hubungan ekonomi nasional dengan pasar internasional praktis putus sama sekali. Simak Bulkin "Negara, Masyarakat..." p. 15.

[38] Martin Kor, ***Globalisasi dan Perangkap Negara-negara Selatan***, terjemahan A.B. Widyanta, (Jakarta: Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2001), 22-23.

[39] Sindhunata "Dilema Globalisasi..." p. 12-3.

Kebanyakan negara miskin dan berkembang tak mampu menahan arus global yang tidak tampak wujudnya tersebut. Suka tidak suka, negara-negara baru dipaksa untuk mampu ikut serta bermain dalam sistem global yang tidak berimbang. Dunia ketiga harus berhadapan dengan sistem produksi dan pasar dunia yang menuntut kemampuan daya saing yang sepadan, sekalipun infrastruktur sosial ekonomi yang dimiliki tidak cukup memadai untuk memasukinya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, dunia ketiga pada umumnya masih sangat tergantung pada pinjaman luar negeri. Lamban tapi pasti, banyak negara kehilangan independensinya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri di pentas global, setelah diambilalih lembaga-lembaga perekonomian dunia di bawah kendali negara-negara kaya.[40]

Di tengah pondasi ekonomi yang rapuh, dunia ketiga terombang-ambing oleh berbagai krisis dalam negeri di samping berhadapan dengan sistem perekonomian global yang tidak menguntungkan. Krisis politik dalam negeri yang berat, kegagalan produksi dan daya saing yang lemah mengantarkan negara-negara baru pada ketertinggalan yang semakin jauh dari negara maju. Hingga tiga dasa warsa sejak kurun kemerdekaan, distribusi kesejahteraan sosial ekonomi dunia memasuki fase penuh ketimpangan, yang diwarnai kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian dunia lebih banyak dinikmati 15 negara yang rata-rata bekas penjajah, sementara sekitar seratus negara lainnya tenggelam dalam kemiskinan dan jeratan hutang yang nyaris tak terbayar. [41]

Terminologi globalisasi seolah menjanjikan tatanan yang berkeadilan, padahal faktanya diliputi kesenjangan antara negara kaya dan miskin, bahkan menjadikannya lahan pembenar atas

---

[40] ***Ibid.***

[41] Salah satu keprihatinan para penyokong Orde Baru mengarah pada kepincangan tersebut. Simak Ali Murtopo, ***Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun***, (Jakarta: CSIS, 1972), p. 53-4.

penguasaan kembali negara kuat atas yang lemah. Negara-negara miskin telah kehilangan hak dan peluangnya di hadapan negara-negara kaya yang sudah sangat berpengalaman dalam memenangkan persaingan global. Dominasi ekonomi liberal dalam tata perekonomian global seolah menjadi pelembagaan dunia model Darwinian, *survival of the fittest*, yang hanya menempatkan yang kuat yang mampu bertahan.[42]

Realitas obyektif Indonesia tidak cukup siap mengapresiasi situasi global tanpa dapat menghindarkannya. Kolonialisme tidak meninggalkan infrastruktur sosial ekonomi memadai, terutama sumber daya manusia dan kemampuan berkompetisi dalam pasar yang sudah sedemikian mengglobal. Impian membangun negara mandiri, tanpa tergantung pada bangsa asing yang mendominasi alam pikiran masyarakat Indonesia tinggal utopia. Situasi sosial politik yang labil dan lemahnya infrastruktur perekonomian dalam negeri negara-negara baru menambah rumit lingkaran dilema sosial politik yang berdampak luas dalam lapangan ekonomi.[43]

Situasi ini diperparah kurang harmonisnya hubungan Indonesia dengan negara-negara maju. Padahal penyelamatan dari situasi tersebut banyak ditentukan oleh kebaikan hati mereka. Kepentingan politik dan revoluasi membawa akibat terjalinnya kerjasama yang buruk antara pemerintah dengan investor, serta kegagalan transformasi perekonomian kolonial kepada perekonomian nasional secara wajar. Jaminan terhadap modal asing yang rendah menurunkan kepercayaan internasional yang diikuti kemerosotan perekonomian secara drastis. Ini tampak pada fragmentasi politik dan penyelesaian sisa-sisa persoalan nasional pasca kemerdekaan yang mendorong upaya nasionalisasi aset-aset asingyang menyebabkan perusahaan-perusahaan peninggalan dalam negeri jatuh ke tangan orang-orang

[42] Pierre Bourdieu "Kritik terhadap Neoliberalisme; Utopia Eksploitasi Tanpa Batas Menjadi Kenyataan " dalam ***Basis***, No. 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember 2003, p. 27. Simak pula Sindhunata "Dilema Globalisasi...", p. 5.

[43] Simak Arif "Nasionalisme Ekonomi...", p. 7.

yang tidak cukup terampil untuk mengelolanya, yang berdampak pada penurunan kapasitas produksi.[44]

Malaysia, Singapura dan Korea merupakan contoh *bergaining* antara bekas pemerintah kolonial dengan nasional yang berhasil melakukan transformasi struktur perekonomian. Sementara pada kebanyakan negara *bergaining* semacam itu tidak mungkin berlangsung sehat karena tidak ditunjang situasi-situasi politik memadai, di mana perasaan bisa lebih dominan dibanding kenyataan yang sebenarnya. Negara-negara yang menikmati distribusi perbaikan perekonomian adalah mereka yang rela berada di bawah proteksi Barat. Di Asia Tenggara dapat dicermati dari bagaimana perkembangan Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan mungkin Brunei Darussalam. Sementara itu, negara-negara yang relatif independen sulit untuk bangkit dari ketertinggalan mereka.[45]

Banyak pejuang yang terlalu antipati terhadap penjajah, dan tidak menyadari bahwa konstelasi perekonomian dunia telah mengharuskan negara-negara baru membuka diri terhadap investasi asing yang sehat. Kuatnya sosialisme yang didukung komunisme pada kurun terakhir pemerintahan Soekarno turut memberi andil dalam memporak-porandakan infrastruktur perekonomian peninggalan kolonial yang dinilai sebagai benteng-benteng kapitalisme. Proyek komunis untuk mengawali negara dari titik nol, yang sebenarnya hanya janji semu yang tak pernah terwujud, lebih populer dibanding visi global yang seharusnya diantisipasi.[46]

---

[44] Dalam jangka pendek nasionalisasi mampu mendistribusikan kesempatan mengelola aset-aset ekonomi asing di bawah kendali anak negeri, namun dalam jangka panjang merugikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Simak Bulkin "Negara, Masyarakat...", p. 14.

[45] Di Malaysia, kaum pribumi yang lama terpinggirkan dalam percaturan politik dan ekonomi hanya menjadi bagian dari kelompok marginal secara ekonomi di tanahnya sendiri. Simak Abdullah, ***Penjajahan Malaysia...***, p. 95-100.

[46] Antipati pada pemodal asing seolah menutup mata terhadap kecenderungan umum di dunia yang semakin kapitalistik, di mana kegagalan kompetisi modal dan

Sebaliknya, Indonesia justeru mengarah pada arus berlawanan yang membawa konsekwensi hengkangnya kekuatan modal dari negeri ini. Hal ini tampak pada program sosialisme ala Indonesia sedianya akan menempuh dua fase; revolusi nasional-demokratis dan revolusi sosial-demokratis. Fase pertama diarahkan pada pengikisan habis kekuasaan ekonomi asing, yang pada fase berikutnya akan diikuti dengan retrukturisasi sosial dalam negeri yang akan menempatkan pribumi Indonesia mendominasi kekuatan sosial-ekonomi.[47]

Belajar dari kegagalan politik ekonomi luar negeri rejim Soekarno yang dihantui neo-kolonialisme dan imperialisme, pemerintahan sesudahnya memilih ikut serta dalam sistem ekonomi global yang kapitalistik, meski hanya mengantarkan Indonesia pada kemajuan semu, di mana pertumbuhan ekonomi tampak pesat secara periferal, meski sebenarnya hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat. Terbukanya jalinan kerjasama ekonomi yang luas dengan berbagai kredit luar negeri justeru menjerat Indonesia dengan beban hutang luar negeri. Integritas moral dan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri yang terlalu rendah menyebabkan memanfaatkan dana pinjaman belum mampu dilakukan secara profesional, bahkan karena lemahnya kontrol negara sebagian diselewengkan tanpa dapat ditarik kembali. Ini belum termasuk kerusakan ekologis yang harus ditanggung akibat eksploitasi atas nama kepentingan perekonomian.[48]

---

produksi akan menggusur suatu negara dari kompetisi pasar. Suhelmi, ***Pemikiran Politik Barat...***, p. 318.

[47] Sritua Arif "Perjalanan Nasionalisme Ekonomi Indonesia; Sebuah Tinjauan Kritis" dalam ***Prisma***, 2 Februari 1991, p. 10.

[48] Lemahnya modal sosial berakibat kontrol publik tidak berjalan akibat partisipasi dan akses kaum lemah terabaikan. Simak Agustinus Mintara " Modal Sosial dalam Arus Globalisasi" dalam ***Basis***, No. 01-02, tahun Ke-52, Januari-Februari 2003, p. 45. Simak pula I. Aria Dewanta "Upaya Merumuskan Etika Ekologi Global" dalam ***Basis***, No. 01-02, tahun Ke-52, Januari-Februari 2003, p. 23-4.

Indonesia sempat menikmati kebangkitan perekonomian sebagaimana negara-negara berkembang di beberapa kawasan Asia Timur dan Tenggara yang menjadi negara industri baru (*the new industrial countries*). Hanya saja, nilai tawar pemilik modal yang terlalu besar di hadapan debitur memungkinkan mereka melakukan berbagai upaya membentengi diri dengan berbagai sistem dan aturan, terutama ketika daya saing mereka menjadi ancaman bagi negara maju. Pondasi perekonomian yang lemah menjadikannya mudah dijegal oleh negara-negara industri maju, ketika daya saing mereka meningkat bersamaan dengan kejenuhan perekonomian negara maju, yang ditandai dengan fenomena *the decline of America*. Perwujudan kesepakatan GATT dan WTO serta pengelompokan regional NAFTA, AFTA dan APEC secara implisit menyiratkan upaya Amerika keluar dari krisis ekonomi internalnya.[49]

Negara maju leluasa menentukan prasyarat yang menghambat perkembangan perekonomian yang dinamis, bahkan tidak jarang melampaui batas-batas harga diri bangsa. Kekuatan modal menjadi alat pemaksa terbitnya keputusan-keputusan politik, seiring kokohnya badan-badan perekonomian dunia yang melakukan pengawasan ketat terhadap korporasi lintas negara. Situasi ini mempersulit alih teknologi, sementara dampak-dampak kerusakan ekologis yang parah ditanggung oleh dunia ketiga. Era baru imperialisme kembali memperoleh momentum untuk bangkit mengendalikan dinamika sosial politik bahkan aspek kebudayaan hampir seluruh negara di bawah sekelompok kecil negara kaya.[50]

---

[49] Isu globalisasi dengan pengukuhan liberalisasi perdagangan dunia memang masih sangat bias kepentingan hegemoni politik ekonomi negara industri maju di bawahh komando politik dan militer oleh Amerika. Didin S. Damanhuri "Perekonomian Indonesia dan Dunia Menghadapi Abad 21" dalam Yaya M. Abdul Azis, ***Visi Global; Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 144-5.

[50] Martin Kor, ***Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan***, terjemahan A.B. Widyanta, (Jakarta: Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2001), p. 41-5.

D. Wacana Demokrasi dan Isu-isu Internasional

Selama periode pemerintahan Orde Baru, wacana sosial politik dan kemanusiaan dunia mengalami beberapa pergeseran. Perang dingin dan maraknya konflik bersenjata merupakan di antara isu besar hingga paruh pertama masa pemerintahan Orde Baru. Hingga paruh pertama pemerintahan Orde Baru situasi internasional masih diliputi problem-problem keamanan dengan merebaknya konflik bersenjata di berbagai kawasan. Sebagian memasuki masa penyelesaian, sedang beberapa yang lain baru mulai. Situasi ini mendorong berkembangnya isu perdamaian dan gerakan anti perang merebak di berbagai belahan dunia. Kengerian akibat perang yang terekspose media massa meluaskan keprihatinan tersebut ke berbagai penjuru dunia.[51]

Lebih tragis dibanding Indonesia, banyak negara disibukkan pergolakan politik dan militer dalam negeri ataupun antar negara. Kasus-kasus pergolakan bersenjata menonjol terjadi di Timur Tengah dan Semenanjung Arab di antaranya ditandai dengan terjadinya perang Arab dengan Israel dan Perang Yaman Utara dengan Yaman Selatan; di Asia Tenggara terjadi krisis Korea dan perang Vietnam, tragedi Kamboja dan Laos; di Asia Timur diwarnai krisis akibat agresi China ke Tibet; krisis Angola di Afrika; pemberontakan Guevara dan perang Malvinas di Amerika Latin. Di beberapa negara Afrika konflik politik dan perang saudara berlanjut dan sebagian lain baru tahap permulaan.[52]

Perkembangan mutakhir Timur Tengah diwarnai meletusnya revolusi Iran yang diikuti perang Teluk selama delapan tahun, antara Iran dan Irak. Sementara perkembangan mutakhir di Asia Selatan

---

[51] Situasi keamanan di Asia Tenggara sendiri masih dipenuhi konflik-konflik dalam negeri yang dikhawatirkan merembet ke kawasan secara keseluruhan, terutama konflik Vietnam dan Kamboja serta kehadiran militer ado-daya yang bermaksud menempatkan diri sebagai *global power*. Simak Malik, ***Sepuluh Tahun...***, p. 12-3.

[52] Barraclough, eds., ***The Times Atlas...***, , p. 292-3.

diwarnai semakin meredanya perang saudara di Afganistan dengan mulai ditariknya pasukan Uni Sovyet dari wilayah tersebut. Di tengah konflik bersenjata di Afrika, kelaparan juga melanda sebagian wilayah tersebut menjadikan isu-isu kemanusiaan memperoleh perhatian serius dari dunia internasional.[53]

Kondisi ini menarik perhatian masyarakat internasional pada isu-isu kemanusiaan. Gerakan anti perang yang paling monumental terjadi di Amerika Serikat ketika negeri tersebut tengah disibukkan perang Vietnam. Keprihatinan menonjol tampak dalam berbagai ekspresi keprihatinan akibat perang. Agenda PBB banyak diwarnai upaya menengahi sengketa dan peperangan. Bentuk-bentuk keprihatinan diekspresikan dengan berbagai cara, mulai dari dari sekedar himbauan-himbauan, seni, hingga keterlibatan badan-badan dunia secara aktif. Situasi tersebut masih terus berlangsung dan mencapai babakan baru setelah runtuhnya Uni Sovyet dengan terjadinya horor akibat konflik di daratan Balkan. [54]

Awal pemerintahan Orde Baru merupakan masa keemasan independensi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Non-Blok memainkan peran penting dalam penyelesaian isu-isu internasional tersebut. Sebelum demokrasi menjadi wacana baru, ungkapan "menentukan nasib sendiri" dan "perdamaian" menjadi *icon* utama kurun tersebut. Belum cukup adanya intervensi atau gerakan dari suatu negara atas negara lain dalam rangka demokratisasi. Setiap negara relatif percaya diri dengan sistem yang sedang dipakai sebagai bentuk ekspresi menonjolnya jati diri sebuah bangsa merdeka. Namun demikian, pada prinsipnya demokrasi sendiri diterima hampir

[53] Gerakan nasionalisme Eritrea dari Ethiopia diikuti dengan kelaparan parah yang melanda kawasan itu beberapa saat kemudian. Simak Snyder, ***Dari Pemungutan...***, p. 315-6.

[54] Merebaknya isu tersebut disertai lahirnya lagu-lagu perdamaian dan anti perang oleh kelompok-kelompok musisi dunia seperti Deep Purple, The Queen, The Beatles, White Lion. Di Indonesia keprihatinan tersebut diekspresikan melalui lagu-lagu dari kosidah sampai pop.

seluruh negara yang kehilangan momentum untuk menegakkan sistem republik. Tidak ada satupun republik yang benar-benar tegas menolak demokrasi sekalipun menolak liberalisme dan kapitalismenya. Konflik dan permasalahan dalam negeri yang menyertainya menyebabkan setiap pemerintah berkuasa berusaha melakukan modifikasi demokrasi sekaligus berusaha menonjolkan identitas dan eksistensi dirinya.[55]

Sejak keberhasilan konsolidasi politik dan pemerintahan masa Orde Baru, Indonesia dapat berperan aktif ikut serta mengupayakan stabilitas kawasan Asia Tenggara maupun dunia lainnya. Di Asia Tenggara Indonesia ikut berperan serta dalam penyelesaian masalah Vietnam dan Kamboja, dan di kemudian hari juga terlibat dalam penyelesaian konflik di Philipina Selatan. Indonesia juga turut serta berperan aktif dalam upaya-upaya perdamaian di kawasan Afrika dan Eropa, seperti dalam penyelesaian konflik Kongo, Agola dan konflik Balkan.[56]

Setelah revolusi Islam Iran, pada pertengahan pemerintahan Orde Baru, di samping masih disibukkan oleh isu perang, dunia dikejutkan oleh keberhasilan revolusi Islam Iran yang berpengaruh luas ke berbagai penjuru dunia, hingga memunculkan kekhawatiran akan ekspansi revolusi Islam ke berbagai belahan dunia. Meski tidak selalu dalam bentuk upaya perebutan kekuasaan, dampak revolusi Islam Iran tampak jelas dalam peningkatan kesadaran keagamaan di lingkungan umat Islam di berbagai belahan dunia. Sekalipun direspon beragam oleh dunia Islam, revolusi Islam menyebabkan pembaharuan

[55] Demokrasi di Indonesia sendiri menurut Hatta – dan juga tokoh-tokoh lain, seperti Soekarno dan Soeharto – merupakan alternatif lain di luar liberalisme-kapitalisme dan otoriterisme-komunis. Simak Hatta dan Panitia Lima, ***Uraian Pancasila***, p. 56-7.

[56] Antipati Vietnam terhadap ASEAN yang dimotori Indonesia, berbuah terima kasih Phan Hien pada Indonesia atas kontribusinya dalam penyelesaian konflik di Vietnam. Simak Malik, Sepuluh Tahun..., p. 13. Pada kawasan lain, Soeharto bahkan menunjukkan simpatinya terhadap tragedi kemanusiaan di daratan Balkan, bahkan merupakan kepala negara pertama di dunia yang datang langsung ke daerah konflik.

Islam modern yang dirintis sejak al-Afgani dan Abduh menemukan *elan vital* baru untuk semakin meluas disertai konstruksi yang lebih mapan, di mana Islam tidak hanya berhenti semata sebagai wacana intelektual dan ideologis atau doktrinal sebagaimana sebelumnya, melainkan merambah pada kesadaran keagamaan yang lebih mendalam.[57]

Saat rejim Orde Baru mencapai satu tahap konsolidasi, di mana struktur pemerintahan berada di bawah dominasi militer dan Pancasila secara sistematis dicanangkan sebagai Azas Tunggal mulai disosialisasikan pada rakyat, dunia dikejutkan oleh fenomena revolusi Islam Iran. Fenomena ini menjadi kejutan luar biasa bagi Barat yang pada kurun-kurun berikutnya banyak menjadi alasan pengebirian gerakan-gerakan politik Islam di banyak negara. Kekhawatiran kemungkinan ekspor revolusi keagamaan dipandang sebagai ancaman baru bagi Barat. Stigmatisasi Barat-Komunis bergeser ke arah Islam-Barat. Kekhawatiran Barat atas komunisme tersisih digantikan oleh Islam. Di kalangan umat Islam sendiri mulai berkembang kesadaran bahwa Barat yang sebelumnya kurang dianggap sebagai ancaman dibanding komunisme telah memposisikan diri sebagai penekan dunia Islam. Setelah runtuhnya Uni Sovyet Barat menjadi satu-satunya kekuatan dunia yang berupaya memaksakan *platform* berfikir dan tradisi mutakhirnya ditelan mentah-mentah oleh masyarakat internasional. Islam telah ditempatkan sebagai ancaman baru, di bawah atmosfir dunia yang kian kokoh berada di bawah kendali Barat.[58]

---

[57] Iran tetap dipandang sebagai ancaman bagi Barat, sekalipun menerapkan demokrasi dengan proses pemilihan umum yang *fair*. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 75. Periode ini mulai muncul kritisisme yang kontruktif terhadap Barat. Bila sebelumnya modernisasi Islam sering kali menempatkan sebagai satu-satunya referensi atau dilawan secara frontal, kurun ini dialektika dengan Barat mulai berlangsung dalam dialektika yang lebih rasional. Simak , Taufiq Abdullah "Pemikiran Islam di Nusantara Perspektif Sejarah" dalam ***Prisma***, No. 3, 1991, p. 24.

[58] Ibrahim, "Benturan atau Pengkayaan Peradaban", p. 3-4.

Hingga pertengahan pemerintahan Orde Baru, demokrasi masih sebagai pilihan, antara liberal-kapitalis, komunis atau membuat model sendiri. Kegagalan demokrasi di banyak negara menyisakan rusaknya konsolidasi negara, di mana negara kehilangan pihak yang harus paling bertanggungjawab atas integritas nasional serta harga diri bangsanya. Demokrasi telah mengakibatkan negara kehilangan daya saing, sebab pemerintah disibukkan oleh problem-problem dalam negeri, yang memecah konsentrasi pemerintah antara mempertahankan pemerintahan dan membangun negara.

Pada kurun awal Orde Baru, membangun demokrasi sangat jauh dari agenda perbaikan politik di berbagai negara. Jangankan membangun demokrasi, membangun stabilitas politik dan keamanan dalam negeri saja merupakan prestasi luar biasa. Kediktatoran oleh suatu kekuatan politik menjadi pilihan penyelesaian jangka pendek atas konflik-konflik dalam negeri. Membangun stabilitas dan kemapanan ekonomi dilakukan melalui korporatisme politik dan seolah menjadi jalan tengah antara liberalisme dan otoritarianisme.[59]

Tertundanya demokrasi di banyak negara semula tak banyak dipersoalkan, terutama selama masa pengujian sejarah antara demokrasi liberal dan komunis. Masih kuatnya pengaruh Uni Sovyet dan kuatnya rejim-rejim otorkratik di banyak negara seolah menjadi referensi pembenaran tegaknya demokrasi semu di berbagai negara. Di tengah persaingan antara blok-Barat dan Timur, nasionalisme ditempatkan sebagai benteng dari infiltrasi budaya asing, terutama liberal. Baru setelah runtuhnya Uni Sovyet dan bubarnya Pakta Warsawa yang diiringi jatuhnya rejim-rejim otokratik secara beruntun, menjadikan liberalisme menemukan momentum ekspansi dalam konteks yang seluas-luasnya. Bubarnya Uni Sovyet diikuti merebaknya gerakan pro-demokrasi di berbagai negara, karena penerimaan demokrasi liberal menjadi keharusan. Berbagai prinsip sosial, politik, ekonomi, kultural bahkan gaya hidup yang bertipologi

[59] O'Donnell dan Scmitter, ***Transisi Menuju Demokrasi...***, p. 90.

liberal menjadi arus besar yang tak terbendung lagi, tanpa ada satupun kekuatan yang secara signifikan mampu membendungnya.[60]

Karena itu, globalisasi dapat dimaknai pengukuhan kembali kemenangan Barat atas hak hegemoni dunia untuk kedua kalinya sejak era kolonial berakhir. Amerika Serikat segera menyemarakkannya dengan proyek perluasan demokrasi (*enlargement of democracy*) yang dampaknya sangat dirasakan pemerintahan-pemerintahan otokratik. Demokrasi liberal hanya mengalami sedikit perkembangan dialektik, terutama sejak kemenangan rejim-rejim sosialis di Eropa pada kurun akhir 1990-an. Demokrasi bergeser ke arah kiri tengah (*centre left*) atau Jalan Ketiga (*The Thirth Way*) menurut istilah Giddens, meski secara pasti tetap berada dalam *madzhab* liberal.[61]

Dengan demikian, selama kurun dua pertiga masa rejim Orde Baru, demokrasi dan isu-isu kemanusiaan lainnya masih mengemuka sebagai wacana dunia yang belum mampu secara imperatif mempengaruhi perubahan politik dalam negeri. Baru setelah kegagalan gerakan pro demokrasi dalam peristiwa Tiananmen dan pengadilan lanjutan bagi kejahatan perang NAZI, isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin meluas ke berbagai penjuru dunia. Seiring maraknya proyek demokratisasi, gerakan HAM mendorong berkembangnya gerakan-gerakan yang mengangkat isu-isu kemanusiaan lebih luas yang menyentuh berbagai bidang, seperti anti kekerasan, gender, hak buruh, perlindungan anak dan sebagainya. Di Indonesia, sekalipun disinyalir sebagai akibat

---

[60] Dalam konteks ini, sampai-sampai Fukuyama menyebutnya sebagai akhir sejarah (*The End of History*). Simak Fukuyama, ***The End of History...***, p. 443-4.

[61] Giddens, ***The Third Way...***, p. 66. Simak pula Huntington, ***The Clash of...***, (New York: Simon and Schuster, 1996), p. 192. Mahathir Mohammad sebagaimana disitir Rumansara mengatakan bahwa *globalization is merely recolonialization by another name*. Agus Rumansara "Globalisasi dalam Konteks NGO" dalam USC Foundation dan SATUNAMA, ***Globalisasi dan NGO***, (Yogyakarta: USC Foundation dan SATUNAMA, 1997), p. 11-3.

fragmentasi politik antara Soeharto dan kelompok Murdani, serta belum dimaksudkan dalam konteks demokratisasi, tapi pada kurun hampir bersamaan pemerintah Orde Baru mulai mencanangkan keterbukaan politik.[62]

E. Wacana Baru Islam

Pasca kolonial, dunia Islam lebih tampak sebagai korban kolonialisme yang berjuang untuk merdeka dan mengejar ketertinggalannya dari Barat. Dunia Islam lebih banyak menjadi obyek kepentingan negara-negara maju dan kuat dibanding sebaliknya. Setelah sebelumnya kurang menonjol di percaturan internasional, kecuali Turki, dunia memasuki fase krisis dalam negeri dan antar negara, yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran peran maupun pengaruh negara-negara besar. Di antara krisis menonjol tampak pada merebaknya pergolakan dalam negeri di negara-negara semenanjung Arab, Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Penumpasan gerakan Islam serta kudeta berdarah mewarnai percaturan sosial politik dalam negeri. Perang Yaman Utara dan Selatan, krisis Palestina akibat pembentukan negara Israel yang berujung pada perang Arab-Israel serta infiltrasi Uni Sovyet di Afganistan merupakan beberapa di antara fenomena instabilitas sosial politik dunia Islam.[63]

Sebagaimana negara-negara baru lainnya, wajah politik dalam negeri dunia Islam - yang berbentuk republik - diwarnai ketegangan antar kelompok, khususnya aliran ideologi sosial politik, yang menjadi tema sentral pergolakan sosial politik pasca kemerdekaan.

---

[62] Pemerintah semakin melonggarkan kontrol terhadap media yang meningkatkan peluang protes dari kalangan kelas menengah pada tahun 1989. Pada kurun yang sama, disinyalir Soeharto mulai semakin dekat dengan Islam. Simak Douglas E. Ramage, ***Politics in Indonesia: Islam and the Ideologi of Tolerance***, (London-New York: Routlege, 1995), p. 150.

[63] Simak kembali Barraclough, eds., *The Times Atlas...*, , p. 292-3.

Fragmentasi sosial paling menyolok tampak dalam pemilahan masyarakat ke dalam beberapa kelompok, yang masing-masing dengan kekhasan ide dan karakter perjuangan, seperti kelompok Islamis, sosialis, militer bahkan komunis. Namun demikian, secara umum fragmentasi politik di dunia Islam didominasi pertentangan antara kelompok sekuler dan Islamis.[64]

Kemerdekaan menjadi momentum kebangkitan kekuatan Islam berjuang menjadikan norma-norma (*syari'ah*) Islam sebagai hukum negara. Namun demikian, sebagaimana disinggung pada bagian terdahulu, pasca kemerdekaan, pada umumnya kelompok sekuler lebih dominan, di mana tokoh-tokohnya memainkan peran besar dalam menentukan arah pemerintahan, sedang kelompok Islam lebih sering diposisikan sebagai musuh (ideologis), di samping komunisme dan imperialisme dengan kapitalismenya. Akibatnya, kelompok Islam pada kebanyakan dunia Islam justeru berada pada posisi *under pressure*, bahkan di bekas pusat-pusat peradabannya. Sebagaimana diwariskan kaum nasionalis-sosialis Turki dan Mesir, kekuatan Islam mengalami tekanan, penindasan dan sebagian berakhir dengan penumpasan.[65]

Sebelum revolusi Islam Iran, Islam nyaris tidak pernah berada dalam lingkaran penentu arah pemerintahan. Mereka dipaksa kembali ke barak tradisi sosial keagamaannya, meski memenangkan persaingan melalui mekanisme politik di dalam negeri. Akibatnya, pertentangan dan persaingan yang tidak sehat menjadikan sentimen kekuatan Islam semakin mengkristal, terutama ketika rejim-rejim sekuler melakukan penggagalan hasil pemilu. Semangat kontra-pluralisme menampakkan wujudnya, di mana intolerasi berkembang pesat ketika ambisi menjadikan negara nasional yang monolitik -

[64] Di Indonesia stigma Islam dan sekuler sudah muncul sejak masa pergerakan yang hingga pasca kemerdekaan tidak dapat dirujukkan. Simak Deliar Noer "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas" dalam ***Prisma***, No. 5, 1988, p. 8.

[65] Dapat dicermati bagaimana posisi Islam di berbagai negara republik, sepert Irak, Mesir, Libya, Turki dan Indonesia. Pada kasus Indonesia dapat dicermati posisi Islam pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Simak ***Ibid.***, p. 13-5.

semonolitik komando militer - dengan mono-ideologi banyak mewarnai visi para pelopor kemerdekaan.[66]

Kaum nasionalis bukan berarti anti agama, tapi hanya berpretensi menempatkan agama sebagai subordinasi negara. Mengangkat isu-isu yang dianggap primordial dipandang bertentangan dengan semangat nasionalisme yang pluralis. Sementara itu Islam diempatkan sebagai ideologi primordial yang harus dijinakkan dari percaturan sosial politik dan pemerintahan. Kaum nasionalis kurang menyadari, bahwa dengan demikian nasionalisme sendiri telah mengambil posisi sebagai sebentuk primordialisme lain yang mengatasnamakan kepentingan nasional. Selain hanya mempertajam fanatisme keagamaan, kegagalan demokrasi juga diakibatkan intoleransi kaum sekuler dengan nasionalismenya yang dipaksakan sebagai *the leading paradigm* dalam pengelolaan negara.[67]

Potensi konflik nasionalis tidak terbatas pada persoalan agama dan sekulerisme, tapi karena setiap perbedaan cenderung mengambil wajah ideologis dan sekaligus politis. Hal ini dapat dicermati pada ralitas politik di Asia Selatan, khususnya kasus Pakistan dan Bangladeh. Dominasi kalangan Islam, di samping Islam menjadi alasan berdirinya Pakistan dan Bangladeh, tampak tidak dapat menghindarkan terjadinya konflik antar aliran dalam Islam sendiri

---

[66] Simak ***Ibid.***, p. 15-16.

[67] Paradigma Barat yang memilahkan sekuler-agama sebenarnya tidak dapat diberlakukan dalam mencermati fenomena Islam. Islam tidak dapat dipilahkan ke dalam kriteria Eropa Islam-sekuler, karena bagi umat Islam realitas semacam itu merupakan secara keadaan yang alamiah yang tidak dipaksakan. Pemilahan tersebut bahkan sangat mencerminkan pengaruh Barat dibanding realitas perkembangan Islam sendiri. Simak Alija Ali Izebegovic, ***Membangun Jalan Tengah, Islam antara Timur dan Barat***, terjemahan Nurul Agustina dkk., (Bandung: Mizan, 1992), p. 280. Kenyataan ini memperlihatkan kecenderungan baik kalangan sekuler maupun Islam telah mengambil bentuk terdistorsi sebagaimana ideologi-ideologi Barat yang hanya mengenal sesuatu dari satu sisi dan eksklusif dan kehilangan kemampuan membangun kompromi-kompromi. Hal ini tentunya juga berlaku dalam bermadzhab. ***Ibid.***, p. 223.

maupun persaingan tidak sehat antar kepentingan. Keberhasilan Pakistan dan Bangladeh memisahkan diri dari India dan mewujudkan negara Islam justeru berujung pada friksi sektarian yang tajam serta dijadikannya lembaga politik sebagai ajang balas dendam.[68]

Perlakuan tidak adil pada kelompok Islam menimbulkan gelombang ketidakpuasan dan menyuburkan radikalisme agama. Hal ini masih ditambah dengan kekalahan dalam perang Arab yang kian mempertajam perasaan kalah (*defeatism*) kalangan Islamis serta rusaknya konsolidasi dunia Islam. Dukungan Barat atas pendirian negara Israel yang menganeksasi Palestina meningkatkan akumulasi ketidakpuasan hingga ke titik tertinggi, tidak saja ditujukan pada rejim-rejim sekuler melainkan juga pada Barat yang dinilai turut mendukung di belakangnya. Wacana pemikiran keislaman yang apologetik berkembang pesat menopang kekecewaan demi kekecewaan dengan dalil-dalil keagamaan.[69]

Karena itu, revolusi Islam sering menjadi *proto type* negara impian dunia Islam, tertama Timur Tengah. Keberhasilan revolusi Islam Iran menjadi momentum yang sangat berarti yang menginspirasikan perlunya konsolidasi kekuatan-kekuatan Islam di berbagai belahan dunia. Perluasan pengaruh revolusi Islam Iran meningkatkan wacana pemikiran maupun gerakan Islam di berbagai belahan dunia, di mana kebangkitan kembali Islam dirasakan semakin dekat oleh kalangan pendukungnya. Namun demikian, mengingat *mainstream* Islam di kebanyakan negara lebih didominasi *Sunni*, maka semangat revolusi Islam Iran mengalami transformasi dan polarisasi ke dalam berbagai manifestasi. Di kalangan umat Islam berkembang kesadaran baru yang lebih konkrit dan konstruktif tentang masa

---

[68] Simak kembali Mashad "Antara Demokrasi dan otoritarianisme...", p. 199-112.

[69] Kecurigaan terhadap Barat menjadi fenomena umum dalam pemikiran sebagian umat Islam, terlebih dalam menyikapi berbagai fenomena politik dunia Islam, mulai dari FIS di Aljazair, kasus Refah di Turki, di samping masalah Palestina Dapat dicermati artikel Wahyu Utomo "Konspirasi yang Sudah Lama Terjalin" dalam ***Forum Keadilan***, No. 29, 3 November 2003, p. 21-2

depan Islam, meski masing-masing dengan ragam pemahaman konseptual yang berbeda-beda, sekalipun jarang dinyatakan adanya pengaruh revolusi Islam Iran.[70]

Revolusi Islam Iran menyebabkan stigma ideologis dunia ditambah Islam sebagai kutub ketiga, dari yang semula hanya antara liberal-kapitalis dan komunis. Ketika kekuatan komunis kian melemah, Islam seolah menggantikan posisi komunisme di mata Barat. Karena itu, setelah runtuhnya Uni Sovyet Islam dipandang sebagai rival baru Barat yang diprediksi Huntington akan melahirkan benturan peradaban. Islamophobia merebak di kalangan Barat, di mana menguatnya akar kultural dan eskalasi semangat keagamaan meningkatkan kekhawatiran berlebihan. Di dalam negeri, penyebab ketidakadilan terhadap kelompok Islam meningkat pada kausalitas yang lebih tinggi, Barat, di mana rejim-rejim sekuler yang cenderung anti-Islam seringkali dipandang sebagai kepanjangan tangan Barat. Dukungan Barat atas Israel serta kooptasinya atas negara-negara kaya minyak semakin menusuk sentimen umat Islam, hingga melahirkan anggapan atas adanya pretensi penindasan Barat atas Islam, Islam adalah sasaran tembak Barat berikutnya.[71]

Pada tahun 1980-an Islam ditempatkan sebagai ancaman, menggantikan kecurigaan terhadap komunisme. Sebagaimana halnya komunisme Islam dipandang sebagai ideologi intoleran dan mengancam perkembangan demokrasi. Padahal secara historis

[70] Pada kurun sesudah 1979, di mana Revolusi Islam Iran mencatatkan kesuksesannya, pentas politik di Indonesia juga muncul fenomena yang dalam istilah Hefner,"the greening" atau penghijauan yang berarti menguatnya peran Islam. Simak Robert W. Hefner "Islam, State and Civil Society: ICMI and The Struggle for Indonesian Middle Class" dalam ***Indonesia, Cornell Southeast Asia Program***, No. 56, 1993, p. 11.

[71] Isu-isu internasional kontemporer, terutama masalah terorisme internasional bagi kalangan Islamis tertentu dipandang sebagai dampak kepentingan Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat. Simak wawancara dengan Umar Husein, salah seorang tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dalam ***Forum Keadilan***, No. 29, 3 November 2003, p. 20.

munculnya gerakan ini lebih sebagai reaksi dibanding satu hasil konseptualisasi ideologi dari awalnya. Penindasan gerakan-gerakan Islam oleh rejim-rejim sekuler otokratik dukungan Barat meningkatkan sikap antipati terhadap hal-hal yang berbau Barat. Tuntutan kalangan Islam yang semula terfokus pada persoalan penerapan *syari'ah* kadang meningkat pada mempertanyakan isu-isu humanistik Barat yang semula diterima, seperti demokrasi yang mulai dipertanyakan dalam diskursus keagamaan. Lebih dari itu, gerakan-gerakan radikal bermunculan dan kadang mengambil bentuk-bentuk teror dan kekerasan, sesuatu yang tak pernah dikenal dalam tradisi sosial politik Islam sebelumnya.[72]

Kemajuan Barat, terlebih setelah kegagalan komunisme menjadikan dunia berada di bawah kendali Barat. Isu-isu global menyeruak di mana-mana yang dimulai Barat. Karenanya Barat dengan penuh percaya diri mencanangkan proyek globalisme melalui Tata Dunia Baru (*The New World Order*). Isu-isu sentral yang semula hanya *trend* Barat dikampanyekan dan mengalir deras ke berbagai belahan dunia. Proyek-proyek global Barat seolah menjadi tata nilai baru, parameter derajat kemanusiaan, yang dengan sendirinya kembali mengukuhkan Barat sebagai kiblat tradisi, budaya, peradaban, bahkan mungkin juga kebenaran. Perlawanan kalangan Islam tertentu, betapapun menimbulkan teror dan ketakutan, masih terlalu kecil dibanding kemampuan Barat mengendalikan gerak sejarah.[73]

Pada kasus Indonesia, Islam juga menjadi pesaing kaum nasionalis yang tersisa setelah berakhirnya komunisme di era Orde Baru. Radikalitas gerakan Islam mengalami beberapa sublimasi dan metamorfosis seiring perkembangan wacana dan keberhasilan proyek deideologi dan depolitisasi dari gerakan yang semula mengambil

---

[72] Barat dengan tangannya sendiri ataupun memanfaatkan rejim-rejim sekuler dalam negeri diduga berkepentingan dalam membendung gerak politik Islam. Cermati artikel Wahyu Utomo "Konspirasi yang Sudah Lama ...", p. 21-2.

[73] Simak kembali. ***Giddens***, ***The Third Way...***, p. 130.

bentuk aktivitas politik praktis, dan sebagian berkembang dalam bentuk pemberontakan, mulai dari DI/TII sampai PRRI/Permesta. Setelah keberhasilan konsolidasi selama Orde Baru radikalisme Islam hanya mengambil bentuk wacana dan gerakan sosial keagamaan. Islam politik berhasil di kembalikan pada barak tradisionalnya, sebagai gerakan kultural yang apolitis, dengan resiko tersingkirnya Islam dari percaturan sosial politik meski untuk sementara waktu.[74]

Di luar arena politik, kaum intelektual Islam membangun basis pemikiran baru dengan mengapresiasi pemikiran kaum modernis didikan Barat seperti Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, Ali Asghar, Abu Zaid, Ali Syariati dan sebagainya, yang melahirkan tokoh-tokoh pembaharu seperti Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, Jalaluddin Rachmad, Abdurrahman Wachid dan sebagainya. Di samping itu, perlahan tapi pasti, kaum intelektual Islam lain berhasil masuk dalam lingkaran kekuasaan dan membangun cara baru *bergaining* Islam dengan negara. Upaya mereka sedikit banyak mengikis sentimen internal umat Islam dan menjembatani kesenjangan antara kaum modernis dan tradisionalis di satu sisi. Di sisi lain mereka mampu mewarnai arah perpolitikan, ditandai dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin B.J. Habibie dan diresmikan presiden Soeharto sendiri, sesuatu yang mustahil pada dua dasawarsa sebelumnya.[75]

Lebih dari itu, wacana Islam Indonesia berkembang ke arah yang lebih kosmopolit, di mana cara-cara konfrontatif dan ideologis era Natsir dapat dieliminir. Isu-isu humanistik, seperti *Civil Society*, gender, rekonstruksi hukum Islam, dan demokrasi sendiri

[74] Di kalangan umat Islam sempat berkembang trauma “negara Islam” dan mitos “Pembangkangan Kaum Santri” atau “ekstrem kanan”, yang membuat mereka memilih kooperatif dengan program dan kebijakan pemerintah, bahkan mengikuti alur politik ketika memasuki lembaga-lembaga pemerintahan. Simak M. Dawam Rahardjo “Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia sejak Orde Baru” dalam ***Prisma***, No. 3, 1991, p. 11.

[75] Hefner “Islam, State and Civil Society...”, p. 4-8.

memperoleh kesempatan untuk diwacanakan secara lebih terbuka. Perkembangan wacana serupa di dunia internasional juga dapat diapresiasi secara kritis oleh segenap masyarakat secara lebih luas. Sekalipun pada tataran tertentu pemikiran maupun kecenderungan radikal masih tetap berkembang pada sebagaian masyarakat Islam, namun wacana demokrasi dan hubungan Islam dan negara memperoleh pijakan konseptual yang lebih konstruktif. Perluasan akses hubungan keilmuan dan pemberdayaan sosial memungkinkan mereka membangun kritik konstruktif yang mengarah pada perlunya perbaikan sistem politik dan masalah-masalah terkait HAM.[76]

Politik Islam di Indonesia bergeser dari politik jalur politik formal ke politik tingkat tinggi (*high politic*), dalam istilah Amin Rais. Ketidakmampuan menghadapi keperkasaan pemerintah mengalihkan strategi perjuangan mereka ke arah pembinaan umat dan menginfiltrasi pemerintahan dari dalam. Sekalipun sikap-sikap keras sebagian kelompok terhadap pemerintah belum berubah, tapi kelompok besar Islam, NU dan Muhammadiyyah, mulai mengarahkan perjuangan dengan membangun *bergaining* dengan pemerintah, dengan tanpa mengurangi sikap kritisnya. Tampilnya tokoh-tokoh cendekiawan muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wachid dan Kutowidjojo, menandai rehabilitasi hubungan Islam dan negara yang memungkinkan penyadaran Islam secara lebih luas. Dengan begitu, Islam dapat memperluas pengaruh serta memainkan peran di berbagai sektor, politik maupun sosial lainnya.[77]

---

[76] Sekalipun kadang disertai ketegangan, sebagaimana insiden 2 Mei 1992, namun kritik konstruktif mulai dapat dibangun dari kalangan Islam, tanpa ekses sosial yang luas sebagaimana dua dasa warsa sebelumnya. Simak ***Ibid.***, p. 29-30.

[77] Natsir Tamara menyebutnya sebagai jalan baru di luar Politik. Simak Natsir Tamara "Sejarah Politik Islam Orde Baru" dalam ***Prisma***, No. 5, 1988, p. 53-5. simak juga Ihsan Ali-Fauzi "Pemikiran Islam Indonesia Dekade 1980-an" dalam ***Prisma***, No. 3, 1991, p. 41-2.

DEMOKRASI DI INDONESIA MASA SOEHARTO

A. Orde Baru: Harapan Perubahan

Setelah sebelumnya mengutuk demokrasi liberal yang dianggap sebagai cara nekolim, biang masalah dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, perkembangan mutakhir rejim Soekarno memperlihatkan sikap serupa ditujukan masyarakat kepadanya. Kampanyenya menebar semangat revolusioner yang begitu heroik hanya berbuah buruknya kinerja pemerintahan dan ekonomi yang merosot. Terlepas oleh ada tidaknya dukungan pihak-pihak yang turut berkepentingan di belakangnya, keadaan tersebut menggerakkan kalangan muda untuk menggugat penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana prediksi Hatta enam tahun sebelumnya, ruh demokrasi berusaha bangkit kembali meski saat itu tinggal nama dan slogan.[1]

Kuatnya dominasi PKI selama Demokrasi Terpimpin, menyebabkan sorotan lebih tertuju kepadanya. Soekarno dan PKI

---

[1] Dalam kritiknya Hatta menyatakan: ... bahwa demokrasi tidak akan lenjap dari Indonesia. Mungkin ia tersingkir untuk sementara, seperti kelihatan sekarang ini, tetapi ia akan kembali dengan tegapnja.... bahwa ia akan muntjul kembali, itu tak dapat dibantah. Hatta, *Demokrasi Kita*, p. 20.

dipandang telah mempetieskan demokrasi, digantikan tindakan sekehendak hati. Segelintir manusia yang kebetulan memegang tampuk kekuasaan telah lupa daratan, melupakan tanggung jawab untuk memperbaki nasib rakyat. Mereka dinilai terlalu asyik memperkaya diri seraya menonjolkan kekayaan, kemewahan dan pesta pora. Meski retorika-retorikanya dipenuhi kata-kata gerakan hidup baru, masyarakat adil dan makmur, tetapi korupsi sedemikian marak, dan bukan rahasia lagi.[2]

Kontras dengan kehidupan Soekarno dan pendukungnya yang diliputi setumpuk gelar, upacara dan seremoni kebesaran, kehidupan rakyat berada dalam kondisi mengenaskan. Di samping monumen-monumen kebesaran berdiri gubug-gubug kumuh dengan jaminan kesehatan rendah, akses pendidikan terbatas. Mereka dihadapkan pada kemerosotan perekonomian, ditandai dengan inflasi yang jauh dari kewajaran, penurunan nilai mata uang secara drastis dan kenaikan harga barang yang tidak terjangkau pendapatan, di samping semakin langka dari pasaran. Peristiwa G30S telah menunjukkan betapa parah krisis politik di negeri ini yang tidak segan mempertontonkan kekejaman di hadapan bangsanya sendiri. Demokrasi Terpimpin yang revolusioner dan penuh kebanggaan telah memperlihatkan kegagalannya jauh lebih cepat dan destruktif dibanding musuh yang telah dihancurkannya, Demokrasi Liberal.[3]

Kondisi ini membangkitkan kalangan muda untuk meluruskan kembali jalannya sejarah republik, yang melahirkan gerakan pembaharuan di berbagai aspek kehidupan yang kemudian melahirkan Tritura, tiga tuntutan rakyat, yang substansinya meliputi tuntutan pembubaran PKI; pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur PKI; serta penurunan harga. Sepak terjang politik PKI yang

---

[2] Yozal Anwar, ***Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa***, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), p. xi-xii.

[3] ***Ibid.***, p. xii-xiii. Simak juga Chistianto Wibisono, ***Aksi-aksi Tritura: Kisah Sebuah Partnership 10 Januari – 11 Maret 1966***, (Jakarta: Departemen Pertahanan – Keamanan, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1970), p. 20-2.

dipenuhi teror melahirkan ketakutan dan antipati pada masyarakat yang tidak sepaham dengan jalan ideologisnya. Reaksi sosial ditunjukkan melalui berbagai bentuk demonstrasi. Demonstrasi pertama ditunjukkan ribuan pemuda yang merupakan gabungan antara Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyyah, GMKI, GAMKI, Pemudan marhaenis, HMI, GSNI, Pemuda Katolik dan sebagainya yang menuntut pencabutan peraturan pemerintah tentang pemotongan uang, yang mengakibatkan kenaikan harga.[4]

Menonjolnya peran PKI dalam pemerintahan serta dukungannya atas apapun kebijakan Soekarno menjadikannya sebagai sasaran kritik, terlebih dengan tindakannya yang tidak simpatik pada kasus G30S. Kian menjadi keyakinan umum kalangan pemuda bahwa PKI merupakan biang masalah, di samping kecakapan aparat pemerintah pada umumnya yang dinilai tidak mampu mengelola negara dengan baik. Keadaan ini disambut oleh kalangan militer, yang karenanya demonstrasi tidak menunjukkan perlawanannya terhadap militer. Militer bahkan menjadi satu-satunya elemen pemerintahan yang mampu secara simpatik berkomunikasi dengan para demonstran. Barangkali inilah di antara aspek yang menjadikan bahan tuduhan balik para penggugat kasus G30S di kemudian hari, yang menduga demonstrasi tersebut merupakan hasil rekayasa kalangan militer yang didukung CIA.[5]

Sekalipun sudah menjadi wacana umum, mungkin saja poin pertama dan kedua dalam Tritura merupakan hasil pengaruh, atau setidaknya semakin mantap oleh dukungan militer, namun poin ketiga tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai tuntutan yang

---

[4] Pada tahun 1965, kenaikan harga mencapai titik tertinggi, yaitu sebesar 200 sampai 300 persen dibanding tahun sebelumnya. Simka Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 325. Keterlibatan HMI dalam gerakan pemuda tersebut dapat disimak Victor Tanya, ***HMI: Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia***, (Jakarta: PSH, 1982).

[5] Simak hasil wawancana TIM ISAI dengan Manai Sophian dalam TIM ISAI, ***Bayang-bayang PKI***, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1995), p. 85.

mewakili suara mayoritas warga negara. Memburuknya kondisi perekonomian yang ditandai dengan tingginya inflasi benar-benar kian menyulitkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi sementara nilai tukar mata uang menurun hingga sepersepuluh dibanding nilai sebelumnya. Di samping itu, kesulitan impor akibat menipisnya devisa menyebabkan stok barang dengan sendirinya turut menipis, yang karenanya di berbagai tempat banyak diwarnai antrian panjang untuk dapat memperoleh bahan-bahan kebutuhan.[6]

PKI yang diidentifikasi sebagai pelaku semakin disikapi secara antipati oleh khalayak luas, terutama di perkotaan. Masyarakat pedesaan yang sebelumnya banyak memperlihatkan ketidaksenangannya atas tindakan-tindakan PKI di daerah sudah cukup mengambil tindakan-tindakan sendiri. Pembunuhan pimpinan Angkatan Darat yang diekspose media massa sedikit banyak tentunya meningkatkan kengerian masyarakat menyaksikan konflik politik yang menjurus pada kekerasan. Tindakan yang sudah biasa dilakukan PKI pada masyarakat bawah menjadi berbeda maknanya ketika menimpa tokoh-tokoh publik. Namun demikian, tiga bulan sejak dibekukan pemerintah secara *de facto*, PKI belum secara resmi membubarkan. Soekarno sangat alot mempertahankan PKI karena terlalu yakin pada konsepsinya, NASAKOM, yang sudah terlanjur dipamerkan ke berbagai negara.[7]

---

[6] Pemerintah terpaksa harus melakukan import dengan mengkredit (*deferred payment*), karena persediaan devisa yang tidak memadai. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 329. Simak juga Cosmas Batubara "Kilas Balik Kelahiran Orde Baru dan Peranan Para Mahasiswa" dalam Haris Munandar, ***Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), p. 149-59.

[7] Dalam berbagai pertemuan dengan para pimpinan Angkatan Darat, Soekarno menyatakan tidak mungkin membubarkan PKI yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 411.

Demonstrasi mahasiswa tampaknya bukan untuk menurunkan Soekarno, meski dalam beberapa aksi muncul pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk yang mencercanya. Tampaknya perubahan politik bukan selalu berarti mengganti kepemimpinan nasional. Bobot politik demonstrasi kalangan pemuda dan mahasiswa tahun 1966 hanya tampak pada tuntutan perbaikan keadaan yang terarah pada penentuan masa depan politik sebuah kelompok, PKI. Tuntutan ke arah demokratisasi dalam arti liberalisasi sistem pemerintahan kurang menonjol sekalipun tidak dapat diabaikan. Tuntutan umum kalangan pemudan dan mahasiswa lebih lebih mengekspresikan gerakan moral berupa tuntutan perubahan politik dalam arti pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan.[8]

Mahasiswa menilai Soekarno, yang diidentifikasikan dengan Orde Lama, telah gagal dan menyimpang dari Pancasila dan Undang-undang 1945. Pemerintahan Soekarno sarat korupsi, rusaknya moral serta memburuknya perekonomian. Demokrasi Terpimpin hanya bungkus dari kediktatoran yang membuka jalan bagi PKI yang anti agama untuk mendominasi kekuasaan. Dominasi PKI bertentangan dengan realitas bahkan menjadi ancamam umat beragama. Pemerintaham soekarno telah gagal mewujudkan janji-janji revolusioner yang muluk-muluk untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan bangsa dan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia.[9]

---

[8] Arief Budiman "Mahasiswa sebagai Inteligensia" dalam Aswab Mahasin dan Ismet Natsir, eds., ***Cendekiawan dan Politik***, (Jakarta: LP3ES, 1988), p. 159. Tuntutan paling umum dalam demonstrasi umumnya mengarah pada perbaikan ekonomi dan penghapusan PKI saja, dan bukan restrukturisasi politik secara fundamental. Karena itu, slogan-slogan demonstrasi berbunyi "turunkan harga", "turunkan harga beras", "turunkan harga bensin", "singkirkan menteri yang tidak becus", "ganyang PKI", "ganyang Subandrio", "stop bini muda", dan sejenisnya. Simak Anwar, ***Angkatan 66...***, p. 7-15.

[9] Nasir Tamara "Sejarah Politik Islam Orde Baru" dalam ***Prisma***, No. 5, 1988, p. 39.

Rendahnya tuntutan demokrasi dalam wacana perubahan politik tersebut sangat dimungkinkan karena wacana demokrasi di tingkat global memang masih menjadi wacana yang mengambang. Demokrasi masih dalam pengertian yang sangat umum yang konotasinya tidak selalu sama dengan demokrasi liberal. Terminologi liberal sendiri masih disikapi secara antipati, sementara demokrasi komunis jelas-jelas pilihan yang tidak mungkin. Jangankan penggunaan terminologi liberal, sedangkan penumpukan modal asing saja masih disikapi secara antipati. Hal ini tampak pada beberapa tahun kemudian ketika modal Jepang banyak mendominasi perekonomian dalam negeri, sebagaimana yang kemudian hari memicu terjadinya peristiwa Malari. Di tengah tuntutan perubahan politik, kalangan pemuda masih dihantui kekhawatiran atas proyek Nekolim Barat di Malaysia. Artinya, demokratisasi yang menjadi tuntutan pemuda dan mahasiswa pada masa itu kurang lebih tidak berbeda jauh konsepsinya dari yang dirancang oleh para arsitek Orde Baru.[10]

Demonstrasi pemuda dan mahasiswa membuka peluang bagi para arsitek Orde Baru untuk mengambil posisi dengan tawaran demokrasinya sendiri, Demokrasi Pancasila. Para pemuda dan mahasiswa sendiri tidak menunjukkan respon berarti ketika Demokrasi Pancasila diajukan sebagai tawaran. Orde Baru bahkan disikapi dengan penuh pengharapan, bahwa penyelesaian masalah serta bangunan masa depan Indonesia idealnya tidak selalu diselesaikan semata-mata dengan cara politik, yang sebenarnya juga menjadi harapan Soekarno. Kehadiran Orde Baru memang memberikan harapan akan jalan kehidupan yang serba baru bagi masyarakat di republik ini, sebuah pengelolaan politik dan pemerintahan yang serba modern. Tawaran Orde Baru akan tatanan

---

[10] Mahasiswa umumnya sepakat ketika di tengah-tengah proses demonstrasi Sarwo Edi menyatakan bahwa berbagai penyelewengan dan keterpurukan terjadi akibat mengingkari falsafah negara, Pancasila. Simak dialog Sarwo Edi dan Demonstran dalam Anwar, ***Angkatan 66...***, p. 6.

pemerintahan yang memprioritaskan masalah sandang dan pangan, pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi perekonomian, sejalan dengan tuntutan utama kalangan demonstran.[11]

Sekalipun Orde Baru menjadi orde yang dinantikan dengan penuh pengharapan, tapi kaum pergerakan, atau tepatnya sebagian, tetap berupaya menjaga sikap kritisnya pada pemerintah. Mereka bahkan mempertanyakan upaya pemerintah yang masih sangat awal menuntut kenaikan harga untuk menutup defisit anggaran rutin yang terlalu besar. Mereka juga mengkhawatirkan terulangnya pungutan liar dan aturan birokrasi yang tidak efisien seperti sebelumnya, di mana masyarakat harus menanggung beban akibat keharusan adanya komisi dalam impor beras, permainan dalam penyaluran pupuk yang menjadikannya semakin mahal dari yang seharusnya, serta berbelitnya birokrasi dan kekacauan administrasi akibat setiap departemen ikut serta mengatur, dan sebagainya.[12]

Seiring stabilitas politik di awal pemerintahan Orde Baru, dalam perkembangannya gerakan-gerakan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI surut tanpa jejak, sekalipun semangatnya masih tetap beberapa tahun kemudian sampai dibekukan satu dekade kemudian. Letupan semangat tersebut mengemuka kembali dalam bentuk kritik keras mahasiswa yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan sosial, 15 Januari 1974, atau yang dikenal dengan peristiwa Malari. Minimnya kontrol atas berbagai kebijakan pemerintahan menyebabkan ketidakpuasan kaum muda atas langkah-langkah politik ekonomi pemerintah yang dinilai lemah dan merugikan kepentingan nasional.[13]

---

[11] Yozar Anwar, ***Protes Kaum Muda: Kisah Bubarnya PKI, Jatuhnya Soekarno; Tenggelamnya KAMI***, (Jakarta: Variasi Jaya/Kartini Group, 1980), p. 197.

[12] ***Ibid.***, p. 200.

[13] Kronologi peristiwa Malari dapat disimak dalam Hariman Siregar, ***Hati Nurani Seorang Demonstran***, (Jakarta: Mantika Media Utama, 1994), p. 9-18.

B. Momentum Politik Militer dan Masa Depan Demokrasi

Pembubaran PKI dan berakhirnya kekuasaan Soekarno menyisakan militer sebagai satu-satunya kekuatan tanpa pengimbang berarti. Harapan mewujudkan pemerintahan yang kuat dan stabil sebagaimana visi militer sejak awal memperoleh legitimasi dari sejarah intoleransi dan pertikaian partai-partai politik. Tindakan PKI dalam peristiwa G30S tidak hanya menjadi momentum *legitimated* untuk mengakhiri gerakan politik radikal komunis, namun juga gerakan-gerakan lain yang dinilai potensial menimbulkan perbedaan dan friksi sosial politik. Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan negara, menjadikan ambisi politik militer yang semula hanya berharap diikutsertakan dalam pemerintahan, menemukan momentum yang jauh melampaui harapannya semula.[14]

Peristiwa G30S menjadi momentum reorganisasi dan konsolidasi internal militer. Militer berhasil keluar problem-problem internalnya yang kompleks dan penuh gejolak terutama sejak pengakuan kedaulatan. Bagi kalangan militer, pengalaman politik selama pemerintahan sipil diangkat sebagai sebuah trauma sejarahnya, karena kecenderungan sipil, khususnya Soekarno membiarkan militer terpecah-belah. Intervensi sipil selama Demokrasi Liberal selalu diikuti dengan berbagai gejolak dan ketegangan antara militer dengan pemerintah. Bahkan internal militer sendiri penuh dengan berbagai divergensi, rivalitas dan kontroversi yang tajam antar angkatan maupun internal angkatan sendiri.

---

[14] Sejak masa revolusi di kalangan perwira berkembang satu anggapan bahwa perwira militer harus berpolitik. Bila tidak, maka sama halnya dengan *kip zonder kop*, ayam tanpa kepala. Soeharto, ***Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi Seperti Dipaparkan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.***, (Jakarta: PT Lamtoro Gung Persada, 1989), p. 87. Sekalipun tidak secara eksplisit, bahkan jarang menjelaskan tuntutannya di depan umum, namun sikap dan tindakan militer sejak awal memperlihatkan ada tuntutan yang jelas, yaitu kekuasaan yang lebih besar bagi tentara. Bahkan sejak 1957, militer merupakan satu-satunya kelompok yang mampu menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 19.

Akibatnya, berbagai gejolak, gelombang protes, bahkan pemberontakan pada masa revolusi, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, termasuk G30S sendiri sering kali melibatkan sebagian kalangan militer.[15]

Militer berhasil melakukan konsolidasi internal, hingga menjadi sebuah organisasi kerja paling solid dengan jangkauan wilayah yang luas dan merata di seluruh penjuru negeri. Militer berhasil berdiri sebagai sebuah kekuatan paling mapan dan efektif dengan ketaatan pada satu kepemimpinan yang tiada mungkin ditandingi kekuatan manapun. Militer berkesempatan memainkan peran dominan, di mana politisi sipil praktis berada di bawah kendalinya. Kuatnya posisi militer memungkinkan konsolidasi dan pengendalian situasi secara merata pada berbagai tingkatan lebih mudah dilakukan. Dibanding organisasi maupun militer lebih mampu mengkosolidasikan ide, berbagai kepentingan dan tindakan-tindakan dengan sesedikit mungkin menimbulkan perbedaan internal.[16]

Angkatan Darat dapat mengambil prakarsa dominan dalam menentukan masa depan militer dan posisi politiknya karena Angkatan Udara dan Laut telah kehilangan prestisenya akibat keterlibatan para pimpinan mereka dalam G30S ataupun karena masih lebih setia pada pemimpin lama, Soekarno. Seiring dengan menguatnya posisi secara politik, militer mulai melakukan konsolidasi menyeluruh, baik mental, doktrin maupun organisasi. Organisasi militer diarahkan pada penyatuan seluruh angkatan, termasuk Angkatan Kepolisian ke bawah satu komando untuk memperkecil kemungkinan perbedaan sikap dan tindakan

---

[15] Sejarawan militer menyebut kebijakan Soekarno sebagai bentuk *devide et impera* yang ditujukan agar militer tidak menjadi kekuatan yang kompak. Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 456.

[16] Liddle menyebut militer sebagai *primus inter pares* dalam birokrasi Orde Baru. R. William Liddle "Suharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions" dalam R. William Liddle, ***Leadership and Culture in Indonesian Politics***, (Sydney: Allen & Unwin, 1996), p. 18.

sebagaimana pernah, dan hampir selalu terjadi pada kurun sebelumnya. Penyatuan organisasi dengan sendirinya juga diikuti dengan penyatuan mental dan doktrin, yang memungkinkan militer, dalam hal ini ABRI, tumbuh menjadi satu-satunya kekuatan paling terorganisir dan kompak.[17]

Dengan jaringan organisasi yang merata di berbagai daerah, serta ditunjang disiplin herarkhis yang kuat menjadikan militer mampu memerankan diri sebagai mesin politik yang efektif bagi pemerintahan Orde Baru. Dibanding organisasi sosial politik sipil, jaringan organisasi militer memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang jauh lebih tinggi dalam membangun pengaruh dari pusat sampai pelosok daerah. Di samping itu, organisasi militer masih ditunjang personel dan persenjataan, serta status formal sebagai kelengkapan pemerintahan, yang memungkinkannya mengambil tindakan-tindakan tegas dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Bahkan sebelum benar-benar berkuasa di era Orde Baru, militer sudah terbiasa mengambil tindakan-tindakan tegas kepada politisi, masyarakat luas maupun kalangan militer sendiri dengan mengatasnamakan kepentingan negara. [18]

Militer Indonesia juga berusaha merekonstruksi sejarah dalam rangka menjustifikasi komitmen nasionalisme berikut patriotisme militer dalam penegakan negara kesatuan Republik Indonesia. Militer menempatkan masa lalu politik nasional sebagai suatu momentum traumatik yang tidak boleh terulang. Demokrasi konstitusional bukan

---

[17] Tahap-tahap pengorganisasian militer, penyatuan doktrin dan mental dalam penyatuan pendidikan (AKABRI), termasuk program-program ABRI, sebagaimana dipaparkan Poesponegoro dalam ***Ibid.***, p. 457-473.

[18] Pasca pengakuan kedaulatan, militer terbiasa melakukan tindakan-tindakan polisional, baik terhadap mereka yang menuntut pemisahan kekuasaan, otonomi daerah, parlementarisme, perluasan hak politik maupun pembredelan pers. David Bourchier "Dekade 1950-an dalam Ideologi dan Politik Orde Baru" dalam David Bourchier and John Ledge, eds., ***Demokrasi di Indonesia Tahun 1950-an dan 1990-an***, terjemahan n.n., (Melbourne: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1994), p. 2.

kenangan masa lalu yang membanggakan, melainkan sebaliknya. Demokrasi Liberal bahkan menjadi sebuah terminologi yang selalu dikonotasikan negatif. Sementara itu, militer merupakan kelompok yang sejak berdirinya republik merupakan penyumbang jasa terbesar bagi tegaknya negara dan pemegang komitmen nasionalisme terkuat dalam menjaga kelangsungan negara. Militer menggambarkan dirinya sebagai kelompok penyumbang jasa besar dalam sejarah penegakan republik ini, dengan integritas dan tanggung jawab moral lebih baik dibanding yang lain. Rekontruksi sejarah sejak masa revolusi kemerdekaan diarahkan untuk menyakinkan bahwa di antara seluruh kekuatan sosial politik tentara merupakan kelompok yang paling layak dan memiliki integritas terbaik sebagai pemegang kendali pemerintahan.[19]

Keberadaan militer di bawah kendali sipil selama kepemimpinan Soekarno digambarkan kalangan militer sebagai masa lalu yang penuh ironi, di mana mereka selalu menjadi bulan-bulanan dan politik pecah-belah politisi sipil. Orde Baru menggambarkan pengalaman militer selama pemerintahan Soekarno sebagai masa di mana militer kurang diberikan penghargaan yang setimpal dengan pengorbanannya selama revolusi kemerdekaan. Kebijakan Soekarno sendiri memang menempatkan militer sebagai kekuatan yang kurang solid dan sarat persaingan. Peristiwa G30S merupakan puncak ironi perpecahan dalam tubuh militer, ketika peristiwa penculikan dan pembunuhan para pimpinan Angkatan Darat ternyata melibatkan

[19] Nuansa sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah selama masa Orde Baru, dan masuk dalam kategori pelajaran wajib, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), menekankan peran kekuatan bersenjata dalam menegakkan kemerdekaan. Militer di bawah Orde Baru merekonstruksi sejarah yang menempatkannya sebagai pihak yang paling mempunyai komitmen terhadap perbaikan negeri ini. ***Ibid.***, p.3-4. Bagi militer, peran tentara yang menolak kendali Belanda atas wilayah ini dalam masa revolusi amat menentukan percepatan penyerahan keaulatan, di samping juga karena tekanan internasional. Simak Bilveer Singh, ***Dwi Fungsi ABRI: Asal-usul, Aktualiasai dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), p. 37.

kalangan militer sendiri, khususnya dari sebagian pasukan Cakrabirawa, Angkatan Laut dan Udara.[20]

Selama kekuasaan Soekarno, militer tak henti berupaya diakomodir sebagai pengambil keputusan. Harapan militer untuk dapat memainkan peranan politik dan lepas dari kendali politisi sipil menemukan jalan lapang ketika Soeharto menjadikannya pilar utama Orde Baru. Dalam rangka membangun soliditas sosial politik, Orde Baru juga mengarahkan kebijakannya pada upaya pengintegrasian militer ke bawah satu komando. Orde Baru berusaha menghilangkan divergensi dan rivalitas antar angkatan dengan menyatukan organisasi militer, termasuk angkatan kepolisian, di bawah satu komando.[21]

Kemerdekaan yang dengan susah payah ditegakkan para pendiri republik digambarkan lebih banyak sebagai hasil perjuangan militer dibanding para politisi. Semangat kejuangan '45 mempunyai konotasi perjuangan melawan penjajah dengan bersenjata bambu runcing atau senjata rampasan, dan sedikit sekali dikesankan sebagai hasil perjuangan diplomasi yang cerdas. Keberhasilan mengusir penjajah seolah semata ditentukan oleh kekuatan bersenjata dibanding diplomasi. Kronika perjuangan militer yang lebih banyak terdesak oleh kekuatan Sekutu dan Belanda pada masa agresi militer seolah terhapus oleh begitu saja oleh Serangan Umum 1 Maret yang hanya enam jam. Sementara itu, diplomasi yang memberi hasil gemilang, sekalipun tidak secara langsung, hanya dicatat sebagai perjuangan yang gagal.[22]

---

[20] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 456.

[21] Integrasi ABRI sendiri berlangsung melalui tiga tahap: tahap integrasi parsial I (1967-1968); tahap integrasi parsial II (1968-1971); dan tahap integrasi Total. ***Ibid.***, p. 458.

[22] Perjanjian Linggar Jati dan *Renville* yang memberikan status *de facto* dan melahirkan simpati dan perhatian internasional terhadap masalah Indonesia dipandang sebagai tindakan yang naif dalam sejarah republik. Dalam bukunya Poesponegoro menyebut diplomasi sebagai kegagalan, dengan sub judul "Strategi

Dengan mengabaikan peran tokoh-tokoh militer dalam pemberontakan di berbagai daerah, militer merekonstruksi masa lalunya sebagai kekuatan nasionalis yang memiliki integritas tinggi dalam menegakkan kedaulatan republik ini. Operasi-operasi gabungan dalam berbagai tindakan militer terhadap gangguan keamanan memperlihatkan integritas militer yang harus dihargai. Dengan merekonstruksi sejarah berdiri dan perkembangannya, militer selalu berusaha menempatkan dirinya bukan hanya sebagai alat negara atau pemerintah, melainkan alat rakyat, alat revolusi dan alat bangsa Indonesia.[23]

Kesejarahan militer yang senantiasa diklaim sebagai tentara rakyat tersebut menjadi legitimasi diterapkannya dwi-fungsi ABRI. Militer menempatkan dirinya sebagai kelompok yang paling mampu menengahi setiap perbedaan yang potensial terjadi di kalangan politisi sipil. Militer keberatan bilamana hanya ditempatkan sekedar alat negara sebagaimana konsep negara demokrasi pada umumnya. Militer senantiasa menuntut diberikan tempat dalam kancah politik sebagai salah satu peran kekaryaannya. Berakhirnya kekuasaan Soekarno membuka jalan bagi militer untuk merumuskan kembali kedudukannya dalam politik dan pemerintahan, yang diantara poin pentingnya menempatkan konsep kemanunggalan ABRI dengan rakyat, meski bukan berarti menerima disebut sebagai militerisme.[24]

Sikap militer pada kurun akhir pemerintahan Soekarno kian mempertegas komitmen pada pembelaan kecenderungan mayoritas masyarakat bangsa ini yang rata-rata anti-komunis. Intoleransi kaum

---

Diplomasi Yang Gagal", Simak ***Ibid.***, p. 6 dan 139. Simak juga Harold Crouch "Pasca Angkatan 45: Militer dan Politik di Indonesia" dalam ***Prisma***, 8, 1986, p. 13-9.

[23] Nugroho Notosusanto, ***The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966***, (Djakarta: Department of Defence and Security, Centre for Armed Forces History, 1970), p. 6.

[24] Department of Information Republic Indonesia, ***ORBA, A Guided to The New Order Government Policy***, (Jakarta: Department of Information Republic Indonesia, 1967), p. 20.

komunis menyebabkan pembekuan komunis memperoleh sambutan luar biasa dari kalangan Islam. Terlebih ketika tindakan main hakim sendiri oleh khususnya masyarakat Islam terhadap pengikut PKI dan anak-anak organisasinya tidak dipandang pemerintah sebagai preseden berarti. Dengan kata lain, pembantaian anggota komunis secara implisit disetujui oleh pemerintahan Orde Baru, sekalipun menegaskan bahwa sikapnya pada komunisme bukan dalam rangka penghilangan nyawa orang, sebagaimana *release* pemerintah:

Meanwhile, a conceptional method of solving the great number of detained followers of Sept. 30 Movement/PKI, has been worked out. It is not the intention of government to destroy every person involved in Sept. 30 Movement/OKI coup, but more important is to wipe out every manace they could create if continue to adhere to communism which evidently can not go hand in hand, or is not in line with the principles of the Pantja Sila Philosophy. If they really prove convincingly that they have broken with communism and accepted Pantja Sila and the 1945 Constitution faithfully, then they can be channeled to productive activities gradually.[25]

Kian kokohnya posisi militer sebagai pilar Orde Baru dengan seperangkat sofistikasi konseptualnya memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang benar-benar stabil untuk kurun waktu yang cukup lama. Berbeda dari pengalaman politik sipil selama demokrasi liberal sebelumnya yang menampakkan kecenderungan koordinasi yang tidak maksimal dan rawan terjadinya perpecahan bahkan di kalangan kelompoknya sendiri. Politisi sipil yang sudah benar-benar kehilangan respektasinya sebagai pengelola negara sejak dicanangkannya Demokrasi Terpimpin semakin tidak mempunyai celah untuk bangkit kembali setelah kekuatan militer yang solid militer mengambil kendali utama perpolitikan nasional. Meski tidak

[25] Department of Information RI, ***ORBA, A Guided...***, p. 18. Seputar masalah pembunuhan kaum komunis dapat disimak dalam Robert Cribb, ed., ***The Indonesian Killings 1965-1966***, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990).

jarang mengedepankan pendekatan keamanan, militer mampu memaksakan ketertiban dan stabilitas pemerintahan secara lebih terkoordinasi.[26]

Berdirinya rejim Orde Baru menempatkan demokrasi pada puncak anomali. Pada dasarnya demokrasi tetap dipandang sebagai suatu keharusan dan tidak ada tempat untuk membangun diktatur. Namun demikian, para pengelola pemerintahan juga tidak siap menghadapi kembali konsekwensi politik yang diliputi instabilitas. Pemerintah Orde Baru khawatir akan kembalinya bangsa ini pada kerumitan politik yang tidak dapat memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan kesejahteraan akibat rutinitas konflik tanpa ujung penyelesaian. G30S menjadi momentum puncak krisis politik dan keamanan dalam negeri yang menjadi pijakan Orde Baru dalam penataan sistem sosial politik dan ketatanegaraan yang mampu mengeliminasi munculnya friksi, konflik sosial politik maupun keamanan.[27]

Dengan mengembangkan doktrin Dwi-Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menempatkan militer sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan, militer memperoleh posisi sebagai pengendali semua sektor secara total, baik dalam pemerintahan, sebagai angkatan perang, aktor utama politik, birokrasi pemerintahan, ekonomi maupun peran-peran kekaryaan

---

[26] Pemerintahan militer mampu bertindak represif untuk meredam berbagai sikap kritis dan gejolak sosial, sekalipun sering kali tetap saja terjadi. Hegemoni pemerintah atas informasi dan media massa memungkinkan setiap gejolak dapat dilokalisir meski untuk sementara waktu. Kebijakan apapun, bahkan yang sudah dapat diidentifikasi sebagai penyelewengan dapat berlangsung terus tanpa kontrol berarti. Simak pengalaman dan catatan Mochtar Lubis "Ditinggalkan Sejarah" pengantar dalam Siregar, ***Hati Nurani...***, p. x-xiii.

[27] Bagi kalangan militer, para politisi sipil mempunyai tiga kesalahan utama, yaitu terlalu menekankan kepentingan ideologis, hanya mementingkan kepentingan kelompok dan kurang bertanggung jawab pada pendukungnya. Simak Mochtar Mas'oed, ***Negara, Kapital dan Demokrasi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), p. 77-8.

lainnya. Dengan dimasukkannya Angkatan Kepolisian di bawah struktur ABRI serta melekatnya tugas-tugas pembinaan teritorial ABRI baik dalam bentuk Pembinaan Masyarakat (Binmas), ekstensifikasi kegiatan inteligen maupun kontrol masyarakat melalui berbagai lapisan birokrasi menjadikan militer benar-benar mampu memainkan peran paling hegemonik sepanjang sejarah republik ini.[28]

Implementasi lebih konkrit atas peran militer sebenarnya juga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan militer sendiri. Sebagian perwira menghendaki peran tersebut tidak menghambat pengembangan politik demokrasi. Tokoh-tokoh militer, seperti Nasution, mengharapkan Dwi-Fungsi hanya menjadi kebijakan sementara, meski peran sertanya diletakkan dalam kerangka pembinaan teritorial yang lebih luas disertai penciptaan rantai komando yang sejajar dengan herarkhi administrasi sipil. Militer yang dilibatkan dalam DPR dan MPR ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan tidak diperkenankan terbawa arus fragmentasi politik jangka pendek. Karena itu, mereka yang menginginkan posisi politik dengan sendirinya harus meletakkan jabatan dan hak-haknya sebagai militer.[29]

Namun pandangan kelompok reformis diabaikan dalam memperkembangkan peran kekaryaan militer di kemudian hari. Dengan berbagai dalih, terutama bahwa hanya militer yang memiliki kelayakan dan kesiapan dalam mengelola berbagai sektor pemerintahan, pada akhirnya peran Dwi-Fungsi tersebut mengarah pada militerisasi total atas seluruh sektor, politik, pemerintahan, birokrasi sipil maupun perekonomian. Orde Baru benar-benar tidak mau mengambil resiko kegagalan dengan mempercayakan sektor-sektor tertentu ke tangan sipil. Karena itu, tahun-tahun awal Orde Baru memperlihatkan kecenderungan yang jelas untuk tidak membuka celah bagi pengembangan proses demokratisasi dengan

---

[28] Salim Said "Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Dulu, Sekarang dan Pada Masa Mendatang" dalam ***Prisma***, No. 9, 1979, p. 08-11.

[29] Fragentasinya dalam Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 79-81.

mengatasnamakan pemeliharaan stabilitas politik. Indonesia benar-benar memasuki sebuah fase totaliarianisme politik di bawah militer, meski tetap mengusung nama demokrasi, demokrasi Pancasila. Pemerintah yang didominasi militer menjadi satu-satunya penentu arah pemerintahan, irama konstelasi politik, bahkan mendiktekan lembaga parlementariat, DPR dan MPR.[30]

Pemerintah tidak saja selektif terhadap kalangan militer yang akan menduduki posisi di lembaga legislatif, melainkan juga dalam struktur kemiliteran sendiri. Anggota-anggota militer yang tidak sepaham dengan pemerintah Orde Baru harus siap menghadapi *recalling* dari lembaga legislatif atau kehilangan jabatan kemiliteran. Pendekatan kemiliteran yang lekat dalam berbagai sektor menjadikan disiplin militer dengan ketaatan mutlak pada satu komando benar-benar berfungsi dalam struktur politik, ekonomi maupun birokrasi pemerintahan.[31]

[30] Seluruh elemen politik dan pemerintahan diposisikan sebagai penyangga struktur birokrasi Orde Baru yang memuluskan jalan bagi hegemoni total. Situasi ini menyerupai model negara pegawai (*Beamtenstaat*) era akhir kolonial Belanda. McVey memandang pola yang ditempuh Orde Baru memiliki kemiripan dengan masa kolonial Belanda, di mana perilaku masyarakat hanya diarahkan pada persoalan yang sifatnya non-politis. Ruth McVey "The Beamtenstaat in Indonesia" dalam Bennedict R.'OG. Anderson dan Audrey Kahin, eds., ***Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to Debate***, (Ithaca-New York: Cornell Univerity Press for Cornell Modern Indonesia Project, 1982), p. 85-9.

[31] Gerakan untuk menciptakan politik yang lebih partisipatoris mengalami kemacetan sejak 1968. Sebagian besar intelektual radikal yang ingin menjadikan Orde Baru sebuah demokrasi kehilangan pengaruh, bahkan disingkirkan dari jabatan maupun DPR. Simak Mas'ud, ***Negara, Kapital...***, p. 83. Kecenderungan umum di dunia kedua maupun ketiga hampir selalu diwarnai politisasi kaum militer. Louis Irving Horowitz, ***Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan***, terjemahan Sahat Simamora, (Jakarta: Bina Karya, 1985), p. 9.

C. Bayang-bayang Komunisme dan Marginalisasi Politik Sipil

Sejak terpinggirkan dalam pemerintahan Demokrasi terpimpin, peran pilitisi sipil berada pada posisi sebagai subordinasi atau sekedar kelengkapan pemerintahan yang tidak memiliki kemampuan *bergaining* berarti. Mereka sama sekali telah kehilangan prakarsa untuk dapat menentukan arah politik dan pemerintahan. Partai-partai politik yang telah tereliminasi dari pentas politik nasional hanya dapat memainkan peran sebagai lawan politik ataupun sekedar sebagai kritisi dari luar arena. Terlebih ketika prakarsa pembaharuan politik pasca G30S seluruhnya berada di tangan militer, khususnya Angkatan Darat, peran politik sipil dalam menentukan arah politik pemerintahan benar-benar tumpul.[32]

Kaum komunis merupakan kelompok yang paling tidak beruntung karena tindakan beberapa tokohnya menyebabkan partai tersebut berakhir riwayatnya. Komunisme ditempatkan sebagai musuh nasional yang dapat mempersatukan visi sosial politik kalangan pemerintah dan mereka yang anti-komunis. Di samping akibat konflik Militer-PKI selama kurun pemerintahan Demokrasi Terpimpin, antipati yang dibangun oleh Orde Baru terhadap komunisme sejalan dengan kepentingan kalangan Islam dan agama pada umumnya menyangkut eksistensi dan masa depan Islam. Sejarah intoleransi komunis dalam percaturan sosial politik negeri ini banyak melukai perasaan komunitas lain, teruatam umat beragama. Di samping unsur Atheisme yang menyertai komunisme, para penganut komunis senantiasa menampilkan sepak terjang yang tidak simpatik dengan melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap masyarakat pendukung *rival* ideologisnya, terutama Islam.[33]

---

[32] Pada awal Orde Baru, kalangan Islam keberatan dengan penyederhanaan partai politik oleh pemerintah, tetapi tidak mampu keluar dari tekanan pemerintah yang cenderung membatasi perkembangan kekuatan politik secara independen. Simak Hefner "Islam State and Civil Society..., No. 58, October 1993, p. 4.

[33] Sekalipun sebagian berada dalam pemerintahan Soekarno, namun begitu momentum gerakan anti PKI mengemuka, kalangan Islam segera mengambil bagian

Antipati terhadap komunisme menciptakan dualisme sikap kalangan Islam terhadap pemerintah, antara simpati dan antipati. Anti-komunisme menciptakan musuh bersama antara pemerintah dan kalangan Islam, akibat paranoia sosial politik yang diakibatkan oleh sepak terjang kaum komunis. Intoleransi dan kecenderungan provokatif gerakan tersebut menyisakan trauma atas potensi terciptanya instabilitas sosial politik dan ketidaktenteraman. Kaum komunis selalu memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan tindakan-tindakan radikal dan anarkhis. Akibatnya komunisme tidak ditolerir keberadaannya oleh mayoritas kekuatan dominan dalam negeri yang rata-rata pernah menjadi *rival* sosial politik yang dirugikan. [34]

Dukungan kelompok Islam dalam penumpasan aktifis dan anggota PKI tidak lepas dari konflik-konflik sosial antara kelompok Islam dan komunis sebelumnya yang diliputi oleh ketegangan dan teror. Sebelum meletusnya peristiwa G30S, tindakan-tindakan arogan, teror, penjarahan, penculikan dan pembunuhan biasa dilakukan PKI terhadap aktifis dan pengikut organisasi sosial politik lain. Meski kelompok Islam juga mengalami friksi dengan partai sekuler lain, utamanya PNI atau antara NU dan Masyumi, tapi intensitas kekerasan sosial yang ditimbulkan tidak seprovokatif ketika berhadapan dengan kader-kader PKI. Kesaksian para pelaku sejarah di Solo, Klaten, Malang, Kediri dan Banyuwangi menunjukkan luasnya sekala kekerasan yang pernah dilakukan PKI, meski tak

di dalamnya. Simak Noer, "Islam dan Politik...", p. 14. Kekerasan antara pengikut PKI dengan kalangan Islam, khususnya NU, yang dibalas dengan tindakan serupa dapat dicermati dalam Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 71-7.

[34] Sejak sebelum kemerdekaan kaum komunis telah terbiasa melakukan berbagai manuver yang mengarah pada pemecah-belahan partai ataupun pembubaran partai Politik. Pada masa demokrasi terpimpin tercatat dua partai menghadapi masalah seperti PNI dan Partai Murba.

cukup terekam oleh pengkaji peristiwa tersebut terutama dari luar negeri.[35]

Terlepas dari kontroversi yang kemudian muncul perihal peristiwa G30S, namun satu kenyataan yang tidak mungkin diingkari adalah bahwa PKI merupakan salah satu aktor utama di dalamnya, dan periwa-periwa tinggi Angkatan Darat merupakan korban. Analisis yang berlebihan akan semakin mengaburkan informasi yang menyulitkan untuk membedakan fakta sejarah dan opini untuk mendukung sebuah kepentingan politik. Luasnya dampak sosial politik yang ditimbulkan dan yang harus ditanggung orang-orang yang tidak bersalah merupakan masalah berbeda dari peristiwa G30S itu sendiri.[36]

Komunisme merupakan sebuah ideologi yang monolitik, yang tidak mungkin berdampingan dengan yang lain. Berbagai taktik biasa digunakan dalam menjaring pengikut dan mempengaruhi masyarakat luas untuk terlibat di dalamnya. Komunisme telah menjadi musuh kemanusiaan, di mana malapetaka dan tragedi lebih banyak diciptakan dari pada sebaliknya. Pengalaman negara-negara komunis cukup menjadi bukti betapa ideologi ini berkecenderungan destruktif bagi kemanusiaan. Bilamana komunisme di Indonesia berhasil memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan, maka tragedi kemanusiaan di Rusia, Cina, Laos, Kamboja, Vietnam ataupun Korea bukan mustahil akan terjadi juga di negeri ini.[37]

---

[35] Kasus-kasus anarkhi kaum komunis menjelang meletusnya G30S dapat dicermati dalam Cidesindo, ***Membuka Lipatan Sejarah***..., p. 69-119.

[36] Kasus G30S sedikitnya telah melahirkan 5 (lima) versi: Buku putih pemerintah Orde Baru; Cornell Paper dan pendukungnya seperti Weitheim, Peter Dale Scott dan Geofrey Robinson, Greg Poulgrain dan kawan-kawan, Antonie Dake dan John Hughes; serta Nawaksara yang didukung kelompok Manai Sophiaan, Oei Tjoe Tat dan kawan-kawannya. Simka Tim ISAI, ***Bayang-bayang Komunis***, p. 37-8.

[37] Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Watak Komunis Indonesia Membonceng" dalam ***Ibid.***, p. 35.

Situasi internasional yang masih diliputi oleh suasan Perang Dingin selama kurun akhir pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto memang menempatkan ancaman bangkitnya kembali komunisme tidak dapat dipandang sebagai ilusi. Ancaman komunisme pada masa itu benar-benar nyata, bukan sekedar alibi untuk menutupi ambisi kekuasaan kelompok pendukung Orde Baru. Hal ini dikarenakan perkembangan internasional masa itu selalu memberikan kepercayaan diri yang besar bagi kelompok komunis. Usaha kudeta kaum komunis dalam peristiwa G30S hanyalah sedikit di antara ancaman komunisme di Indonesia, setelah sebelumnya melakukan pemberontakan tahun 1926-1927, pemberontakan masa revolusi 1948 dan 1956.[38]

Soekarno sendiri cenderung lebih dekat pada blok-Timur, terutama Peking, dari pada Blok Barat. Selama lawatannya ke berbagai negara, penghormatan terhadap Soekarno dari negara-negara Blok-Timur jauh lebih istimewa dari pada Blok-Barat. Perlakuan istimewa Soekarno terhadap PKI menyebabkan versi Orde Baru perihal pemberontakan G30S menempatkannya sarat dengan kesan bahwa dia merupakan salah seorang tokoh yang diduga kuat terlibat di dalamnya. Dugaan keterlibatan agen-agen Amerika dalam penggulingan Soekarno menjadi cukup masuk akal, karena Amerika mempunyai kepentingan besar dalam membendung melebarnya pengaruh komunis di Asia Tenggara.[39]

---

[38] Kecenderungan komunis memang selalu gegabah dalam bertindak bila merasa kuat. Kalangan sejarawan Indonesia menganggap pemberontakan PKI 1926-1927 sebagai sesuatu yang tidak dapat dibanggakan karena dampaknya pada pembatasan terhadap kaum pergerakan. Simak Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 208. Dalam Pemberontakan Madiun, PKI memperoleh perlindungan Uni Sovyet yang menyebabkannya masih tetap bertahan. Simak Djiwandono "Perubahan Persepsi...", p. 61.

[39] Dugaan keterlibatan Soekarno dapat disimak Batubara, ***Sejarah Lahirnya Orde Baru...***, p. 41. Pada kurun yang sama kemampuan negara-negara kuat, terutama Amerika dan Uni Sovyet memungkinkan agenda-agenda internasionalnya mempengaruhi situasi dalam negeri negara-negara lain. Simak ***Ibid.***, p. 67.

Keberhasilan penumpasan PKI sendiri belum dipandang sebagai akhir riwayat komunisme. Doktin komintern yang berpretensi kuat melebarkan pengaruh ke berbagai negara tetap menempatkan gerakan komunisme sebagai ancaman *laten* yang dapat muncul sewaktu-waktu. Bangkitnya komunisme atas dukungan komintern maupun gerakan dalam negeri merupakan kekhawatiran umum yang tidak dibuat-buat. Eksistensi Uni Sovyet sebagai salah satu adi-daya menjadikan komunisme tetap dipandang sebagai kekuatan dominan di kancah global. Kokohnya blok-Timur juga menjadi referensi ideologis dan politis yang mampu menyuntikkan kepercayaan diri gerakan komunis dalam negeri untuk melakukan aksi dan rekrutmen anggota baru kembali. Karena itu, penumpasan secara sistematis menjadi pilihan paling realistis untuk mengakhirinya.[40]

Di sisi lain, kaum komunis memiliki reputasi sebagai pejuang ideologi yang tangguh dan tidak akan mudah dipatahkan. Bilamana komunisme berhasil bangkit kembali bukan mustahil akan menimbulkan aksi belas dendam yang tak terbayangkan, tidak saja bagi kalangan militer dan pemerintah, tapi juga pada masyarakat Islam secara luas, akibat penumpasan berdarah atas pengurus, anggota dan simpatisan PKI yang menorehkan sejarah kelam bangsa ini sejak kemerdekaan. Setelah penumpasan PKI, pemerintah Orde Baru secara lunak tapi pasti, berupaya keras membendung pengaruh

---

Kecenderungan intervensi negara adi-daya simak Fukuyama, ***The End of History...***, p. 52.

[40] PKI berjaringan internasional yang saat peristiwa G30S paling tidak sudah berkembang wacana tentang poros Jakarta – Hanoi – Pyongyang – Peking. Simak Batubara, ***Sejarah Lahirnya Orde Baru...***, p. 21. Sampai tahun 1986, komunisme masih dipandang sebagai hantu ideologi politik, bukan sekedar pernyataan kosong tanpa makna, mengingat diyakini adanya strategi ganda tipikal komunis "united from below" dan "united from above" yang diyakini tetap dianut PKI atau eks-PKI. Simak M. Amin Rais "Kata Pengantar" dalam M. Amin Rais, ***Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri***, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), p. xii.

komunisme, yang mengakibatkan hubungan Indonesia dengan Uni Sovyet dan RRC mengalami kebekuan lebih dari satu dasa warsa.[41]

Karena itu, Orde Baru berusaha memilahkan ideologi-ideologi yang ditolerir dan tidak dalam membangun tatanan baru. Pragmatisme Orde Baru menempatkan komunisme sebagai ancaman *laten* dengan penuh antipati. Antipasti atas komunisme bahkan menempatkan ideologi ini dan tokoh-tokohnya tidak pernah diberi tempat istimewa dalam catatan sejarah pergerakan maupun revolusi kemerdekaan Indonesia. Politik luar negeri Orde Baru yang menegaskan ketidakberpihakannya pada salah satu blok adi-daya, mengambil posisi netral dan lebih *concern* pada upaya-upaya damai, tetap saja dengan disertai satu ketegasan, bahwa tidak ada tempat bagi komunisme.[42]

Krisis politik di akhir masa Soekarno menyisakan militer sebagai satu-satunya kekuatan dan mulai termarginalisasikannya politik sipil. Partai-partai politik yang menyemarakkan arena politik nasional sebelumnya, telah terlebih dahulu kehilangan momentum untuk turut serta menentukan jalannya pemerintahan baru. Sekalipun mereka sudah tidak berdaya selama Demokrasi Terpimpin Soekarno, namun wacana utama yang berkembang tetap menempatkan mereka pada posisi sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas terciptanya situasi sosial politik dan kinerja pemerintahan yang mengecewakan. Mereka dianggap gagal memanfaatkan kepercayaan

[41] Djiwandono "Perubahan Persepsi...", p. 66.

[42] Orde Baru diklaim sebagai jalan yang lebih mendekatkan pada cita-cita revolusi, sementara Orde Lama penuh penyimpangan terhadap demokrasi dan UUD 1945 yang mencapai puncaknya dengan G30S. Karena itu PKI dan musuh-musuh revolusi lain merupakan musuh utama Orde Baru. Singh, ***Dwi Fungsi ABRI...***, 106. Sikap anti terhadap komunisme dikukuhkan dalam TAP. MPR Nomor IX/MPR/1966. Batubara, ***Sejarah Lahirnya Orde Baru...***, p. 27.

rakyat dalam mengelola lembaga-lembaga negara, menyelesaikan berbagai masalah serta meningkatkan laju perekonomian.[43]

Gerakan pemuda dan mahasiswa sendiri tidak memperlihatkan dukungan yang tegas bagi dikembalikannya sistem demokrasi yang terarah pada pembukaan kebebasan politik yang memungkinkan partai politik memainkan peran dalam menentukan arah politik dan pemerintahan. Meski tidak secara keseluruhan, tapi partai politik bahkan dinilai tidak tegas mendukung gerakan perubahan.[44] Pesan-pesan moral gerakan pemuda dan mahasiswa sendiri sangat diwarnai oleh gagasan restrukturisasi politik Orde Baru, yang mengindikasikan bahwa gerakan tersebut sedikit banyak menjadi alat politik militer. Dalam wacana gerakan perubahan politik, jargon kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 dan menerapkannya secara murni dan konsekwen seolah sudah cukup diterima sebagai jalan penyelesaian masalah perbaikan tatanan sosial politik.[45]

Ketika kebijakan Orde Baru semakin mengarah pada pengebirian peran dan perkembangan partai politik, para politisi sipil hanya dapat memberikan perlawanan yang tidak berarti. Keberadaan

---

[43] Masa demokrasi liberal dinilai tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti dalam perbaikan perkonomian akibat krisis pemerintahan yang berganti-ganti, terutama yang mulai meletus sejak kabinet Wilopo 1952. Simak ***Ibid.***, p. 7.

[44] Sesuai perintah presiden, 10 Maret 1966 partai-partai politik diundang ke istana negara untuk menandatangani pernyataan bahwa aksi-aksi mahasiswa adalah kontra revolusi dan ditunggangi kepentingan NEKOLIM serta CIA. Sebenarnya hanya Ali Sastroamidjojo dan Surachman dari PNI dan Partindo yang bersedia menandatangani, sementara kalangan Islam menolak bahkan menentang keras, namun mahasiswa menilai partai politik sebagai kelompok yang *plin-plan*. S.J. Imawan, ***KAMI: Kebangkitan Angkatan 66***, (Padang: Srana Dwipa, 1966), p. 41.,

[45] Tuntutan Angkatan 66 tidak secara spesifik terarah pada perombakan sistem pemerintahan yang memberikan jaminan demokrasi yang benar-benar jelas, melainkan demokrasi yang masih terbungkus indah dalam Pancasila. Simak respon mahasiswa terhadap hasil Seminar Angkatan Darat dalam Harian Mahasiswa edisi 6 September 1966 dalam Anwar, ***Protes Kaum Muda***, p.202-3. Cosmas Batubara sendiri mengakui bahwa kegiatannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan ABRI. Simak TIM ISAI, ***Bayang-bayang PKI***, p. 42.

militer sebagai tulang punggung tegaknya Orde Baru terlalu kuat untuk dapat memaksakan sistem sosial politik menurut versi dan kepentingannya sendiri. Hal ini tampak pada politisi Islam yang semula berharap pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuka kesempatan hidupnya kembali demokrasi. Dukungan penuh kalangan Islam atas penumpasan PKI seakan menjadi modal *bergaining* dengan pemerintahan baru. Terlebih lawan politik utamanya, PKI, telah sama sekali kehilangan momentum untuk bangkit kembali. Namun harapan tersebut pupus ketika politisi sipil harus menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan momentum untuk kembali memainkan peranan dalam pentas politik nasional.[46]

Sekalipun Islam memberikan dukungan besar dalam penumpasan PKI, tapi keberadaannya sebagai sebuah ideologi tidak mungkin diakomodir Orde Baru. Orde Baru benar-benar patah arang terhadap pergulatan ideologis dan kepentingan politik lainnya. Orde Baru lebih mengharapkan stabilitas dan mengembalikan bangsa Indonesia kepada nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai alamiah bangsa ini, Pancasila. Karena itu, kalangan politisi Islam menuai kekecewaan karena rupanya padangan pemerintah Orde Baru tidak berbeda dari Soekarno. Sebagai ideologi maupun basis politik, pemerintah Orde Baru juga memandang Islam sebagai sebentuk ideologi primordial yang potensial menciptakan instabilitas. Sebagaimana kasus-kasus Timur Tengah, fragmentasi politik antara pemerintah dan Islam berkembang ke arah fragmentasi Islam dan sekuler. Politik Islam semakin tidak berdaya karena Orde Baru secara sistematis melakukan deideologi, depolitisasi dan menata institusi politik dan pemerintahan yang tidak memungkinkan kelompok-kelompok kepentingan lain memiliki nilai tawar yang cukup kuat di hadapan pemerintah.[47]

[46] Kesan yang terbangun terhadap partai politik bahkan cenderung negatif dari pada sebaliknya. Simak Batubara, ***Sejarah Lahirnya Orde Baru...***, p. 31.

[47] Politisi sipil partai politik, kecuali PKI, tertidur lelap dalam kehidupan politik dan tatkala Orde Baru berdiri mereka tidak mampu membangun bergaining dalam

Tekanan kalangan Islam pada pemerintah menyebabkan sejarah awal pemerintahan Orde Baru diwarnai oleh hubungan yang tidak harmonis antara Islam dan negara. Para aktivis partai Islam keberatan dengan kontrol pemerintah yang ekstensif dan berpretensi membatasi gerak politik yang independen. Perasaan tertekan kalangan Islam bahkan sampai pada kesimpulan adanya skenario anti-Islam oleh peran menonjol Ali Murtopo. Murtopo merupakan salah seorang jenderal beragama Katolik dari etnis Tionghoa, salah seorang kepercayaan Soeharto. Suharto memegang posisi utama sebagai *mastermind* dalam berbagai kebijakan strategis sejak pemilu 1971, pembentukan GOLKAR, pengebirian partai Islam dan partai-partai politik lainnya.[48]

Perkembangan selanjutnya diwarnai oleh menguatnya ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kelompok Islam. Kelompok Islam menjadi satu-satunya lawan tersisa dari pemerintah. Meski dengan suara yang nyaris tidak terdengar, kalangan Islam mulai mempertanyakan kedemokratisan sistem pemerintahan Orde Baru, yang segera dibungkan dengan tindakan represif berupa penangkapan-penangkapan. Soliditas pemerintahan, militer dan dinas-dinas rahasianya, menjadikan konflik-konflik politik dan keamanan hanya berada di luar kekuasaan dan mudah dikendalikan.

---

membangun ketentuan tentang Pemilu. Afan Gaffar, ***Javanese Voters: A Case study of Election under a Hegemony Party System***, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), p. 63-6. Kalangan Islam seolah tidak membaca arah politik Orde Baru yang berusaha mengkooptasi partai politik untuk digantikan dengan koalisi baru sebagai penopang utama pemerintahannya. Simka Mas'ud, ***Negara, Kapital...***, p. 79.

[48] Pada awal pemerintahan Orde Baru, NU menjadi oposan utama pemerintah setelah semua golongan sekuler tunduk pada pemerintah. Simak M. Bambang Pranowo "Which Islam and Which Pancasila?" dalam Arief Budiman ed., ***State and Civil Society in Indonesia***, (Clayton: centre of Southeast Studies Monash University, 1992), p. 491-6. Ali Murtopo dengan kelompok studinya, CSIS (*Center of Strategic ad International Studies*), serta penasehat-penasehatnya memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan politik Orde Baru periode awal. Simak kembali Hefner "Islam State and Civil Society..., p. 3-4.

Peristiwa bangkitnya gerakan Islam ataupun politik lainnya, seperti peristiwa Malari dan Tanjung Priok dengan mudah diselesaikan meski dengan berdarah-darah.[49]

Pemerintahan Orde Baru mengakui keanekaragaman (*kebhinnekaan*) suku, ras, tradisi dan agama, tetapi tidak demikian halnya dengan ideologi. Keragaman ideologi telah sejak semula dipandang sebagai sumber persoalan yang dapat mempertajam fragmentasi masyarakat bangsa secara tidak proporsional. Ideologi hanya mengantarkan pada konflik, friksi sosial dan jalan buntu dalam komunikasi politik. Sementara itu Islam merupakan satu-satu ideologi yang tersisa sejak Orde baru berrdiri. Bahkan sejak hilangnya respektasi terhadap politisi sipil sejak kurun akhir pemerintahan Soekarno, pada dasarnya telah melunturkan pamor ideologi sosial politik, kecuali Islam dan komunis. Selain keduanya masyarakat kebanyakan sudah tidak terlalu bergairah membela ideologi. Di samping itu, ideologi sosialis-nasionalis umumnya tidak memperlihatkan kecenderungan konfliktif dibanding Islam dan komunis, terlebih dengan dukungan mereka atas diterimanya Pascasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara.[50]

Dalam konteks penataan konstitusi, komunisme juga tidak menunjukkan ofensifitas ideologis, terutama karena strategi politik komunis memungkinkannya melakukan kamuflase dan upaya-upaya ekstraparlementariat. Hanya Islam yang mempunyai reputasi sebagai variabel yang menyebabkan timbulnya *deadlock* saat pengesahan UUD 1945 karena tuntutan dimasukkannya kembali piagam Jakarta. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran utama deideologisasi

---

[49] Kekerasan menjadi cara umum dalam rejim otokratik Orde Baru yang mengedepankan stabilitas. Simak juga Daniel S. Lev "Belajar dari Demokrasi Parlementer" dalam ***Basis***, Nomor 01-04, Tahun Ke-50, Maret-April 2001, p. 10.

[50] Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan sendirinya sudah kemenangan kaum nasionalis sekuler atas kalangan Islam, terlebih ketika dikukuhkan menjadi sesuatu yang diagungkan masa Orde Baru. Simak kutipan pendapat Kamal Hasan dalam catatan kaki nomor 6 dalam Hefner "Islam, State and Civil Society", p. 3.

sebenarnya adalah Islam yang dinilai sebagai satu-satunya ideologi yang dipandang masih memendam pretensi primordial dan pemecah-belah persatuan.[51]

Kelompok-kelompok lain yang semula menempatkan diri sebagai pendukung Soekarno juga semakin kehilangan isu sentral, terlebih dengan dijauhkannya Soekarno dari publik. Pamor politik Soekarno semakin jauh dari massa, sehingga bekas-bekas pendukung utamanya kehilangan pedoman. Janji-janji kelompok tersebut tinggal diterima sebagai utopia yang jauh dari kemungkinan diwujudkan. Di sisi lain, kepercayaan terhadap militer justeru meningkat atas reputasi-reputasinya dalam menyelesaikan berbagai problem di bawah tanggungjawabnya. Terbunuhnya beberapa pimpinan Angkatan Darat menambah simpati publik terhadap militer. Pada kurun terakhir, militer sukses menjamin stabilitas sosial politik terutama pasca pemberontakan G30S.[52]

---

[51] Dalam analisis Emmerson, Orde Baru menunjukkan persangan kekuatan kultural antara *Abangan-Santri*, di mana pemerintah dipandang merepresentasikan kultur *Abangan*. Pemerintah tidak berusaha mengintegrasikan kaum santri, tetapi berusaha membendung oposisi dengan cara depolitisasi Donald K. Emmerson, ***Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*** (Ithaca: Cornell University Press, 1976), p. 247. Pemerintah membatasi gerak partai-partai Islam dengan memberikan dukungan pada parta-partai non-Islam yang diarahkan pada penyederhanaan partai politik. Ulf Sunhaussen "Indonesia: Past and Present Encounters with Democracy" dalam L. Diamond, J.J. Linz dan S.M. Lipset, eds., ***Democracy in Developing Countries***, vol. III, (Boulder: Lynne Rienner, 1989), p. 440. Dari berbagai segi, politik Islam sering diposisikan dan dicurigai sebagai anti ideologi negara, Pancasila. Bahtiar Efendy "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 5, 1995, p. 4.

[52] Gerakan tandingan Soekarno, Barisan Soekarno, justeru semakin kehilangan simpati dari rekan mereka sendiri dari kalangan muda dan mahasiswa, sangat respek pada kesediaan ABRI yang bahu-membahu melakukan penangkapan dan penumpasan PKI, serta senantiasa memberi dukungan bagi gerakan mereka. Simak deskripsi Imawan, ***KAMI: Kebangkitan...***, p. 12-21.

D. Soeharto: Tokoh Sentral Orde Baru

Soeharto dilahirkan 8 Juni 1921, oleh keluarga pedesaan yang sederhana, tepatnya desa Kemusuk, Argomulyo Godean Yogyakarta dari seorang ibu yang bernama Sukirah dan ayah Kartosudiro atau Kartorejo, seorang perangkat desa dengan jabatan *Ulu-ulu*, *Uceng*, atau *Jogotirto*, petugas pengatur air di desa. Soeharto adalah anak ketiga Kartorejo dari istri kedua, setelah dari istri pertama memperoleh dua orang anak. Setelah pasangan tersebut memperoleh seorang anak, Soeharto, keduanya bercerai dan kemudian Soeharto diasuh kakeknya Kromodipuro sejak belum berumur 40 hari. Di samping itu, ibu Soeharto tidak bisa menyusui anaknya karena menderita sakit. Kedua orang tua Soeharto menikah dengan orang lain, dan masing-masing memperoleh beberapa orang anak lagi. Sebagai anak desa di Jawa pada masa itu, Soeharto menjalani kehidupan sebagaimana umumnya anak-anak pedesaan, yang biasa bermain di sawah, memelihara ternah dan bahkan belum berpakaian layak hingga masuk ke bangku sekolah.[53]

Orang tua Soeharto tampaknya termasuk kelompok masyarakat yang sudah cukup peduli pada pedidikan. Menginjak usia sekolah, Soeharto didorong untuk menempuh pendidikan. Hanya saja, karena kondisi keluarga, Soeharto harus berpindah-pindah sekolah. Dimulai dari sekolah di desa Puluhan, Soeharto pindah sekolah ke desa Pedes mengikuti orang tuanya. Saat remaja, orang tua Soeharto menitipkannya pada pamannya dan kemudian pada keluarga kakaknya di Wuryantoro untuk menempuh pendidikan pada sekolah lanjutan rendahan (*schakel School*) Muhammadiyyah di Wuryantoro.

[53] Soeharto, ***Pikiran, Ucapan...***, p. 6-9. Simak juga O.G. Roeder, ***Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto***, edisi revisi, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), p. 130-6. Karena masalah silsilah, sempat mucul gosip bahwa Soeharto adalah anak keluarga kerajaan Yogyakarta yang tidak dikehendaki. Namun demikian gosip tersebut dibantah dan akhirnya Soeharto mengudang wartawan ke rumahnya untuk menjelaskan siapa dirinya, yang kemudian diikuti dengan munculnya berbgai versi otobiografinya. ***Ibid.***, p. 138-143.

Mata pelajaran yang paling disukai adalah berhitung, dan dia tergolong anak yang baik, sehingga disukai gurunya.[54]

Keluarga Soeharto terhitung penganut Islam yang taat, meski seperti masyarakat desa yang umumnya terbelit kesulitan biaya hidup, Soeharto baru menjalani *khitan* pada usia 14 tahun. Soeharto menjalani masa kecil di lingkungan cukup dekat dengan pola kehidupan umat Islam pada umumnya, yaitu belajar mengaji pada sore hari dan menghabiskan waktu semalaman di *Langgar* (Musholla). Soeharto juga aktif dalam *Hisbul Wathan*, yaitu kegiatan kepanduan (Pramuka) yang diselenggarakan oleh Muhammadiyyah. Karena itu, Soeharto sering mengaku sebagai warga Muhammadiyyah, meski praktik keagamaan yang dianut keluarganya sebagaimana penganut Islam tradisional.[55]

Kepribadian Soeharto banyak dipengaruhi oleh tata nilai Jawa di samping rasa keislaman meski tidak mencapai derajad fanatik. Interaksi yang sehat dengan lingkungan keluarga dan masyarakat yang hidup konstruktif dalam struktur tradisional muslim Jawa menjadikannya mampu mengenal dan menyerap nilai-nilai budi pekerti dan filosofi hidup muslim Jawa, bukan *kejawen*. Hal ini karena masa mudanya banyak bergaul dengan kalangan agamawan dan masyarakat yang lekat dengan tuntutan *tata krama*, yang ketika nilai-nilai tersebut tertrasformasikan dalam kultur Jawa berbunyi *hormat kalawan Gusti, guru, ratu lan wong atuwa karo* (hormat pada Tuhan, guru, pemerintah dan kedua orang tua.[56]

---

[54] Soeharto, ***Pikiran, Ucapan...***, p. 11-12.

[55] ***Ibid.***, p. 13-14. Ayahnya sangat ingin Soeharto belajar lebih baik, yang karenanya dititipkan pada bibinya yang masih tergolong *priyayi* rendaha di Wuryantoro. Karena khawatir dilarang ibunya, Soeharto hanya bisa berpamitan dengan dua orang, nenek dan gurunya, orang yang merawat dan mengasihinya sejak kecil. O.G. Roeder, ***Anak Desa...***, p. 138.

[56] Soeharto, ***Pikiran, Ucapan...***, p. 14-16.

Selesai pendidikan menengah rendah Soeharto bekerja sebagai pembantu *klerk* Bank Desa (*Volks-Bank*) yang bertugas melayani kredit keliling dari desa ke desa, yang di sana Soeharto sempat belajar pembukuan. Karena suatu insiden kecelakaan yang menyebabkan pakaian pinjaman yang dikenakannya sobek, Soeharto terpaksa keluar dan mencari pekerjaan lain. Kemudian Soeharto mencoba masuk Korvertband, semacam sekolah tentara Belanda dan berhasil lulus terbaik, dan mengawali kariernya di bidang militer sebagai wakil komandan regu di Batalyon XIII KNIL di Rampal, dekat kota Malang Jawa Timur, dengan pangkat sersan. Ketika melanjutkan pendidikan sekolah kader di Bandung, meletus perang Belanda-Jepang dan berakhir dengan kekalahan Belanda.[57]

Karena tidak ingin ditawan Jepang, Soeharto kembali ke Yogyakarta dan menjadi rakyat biasa. Semula Suharto memilih kursus mengetik, tetapi kemudian mendaftar menjadi *Keibuho*, polisi Jepang di Yogyakarta. Pengalaman dalam KNIL membuat Suharto mudah diterima tanpa dicurigai sebagai mantan tentara. Atas anjuran tentara Jepang, Soeharto mendaftarkan diri menjadi pasukan PETA dan mendapat jabatan *Shodancho* (komandan peleton). Sejak pemberontakan PETA di Blitar Selatan, banyak komandan PETA ditangkap, tetapi kemampuan komunikasinya yang baik, menjadikannya hanya di pindah ke daerah pinggiran di kawasan Madiun dan Nganjuk dengan tugas melatih calon-calon tentara di daerah.[58]

Minimnya informasi membuat Soeharto tidak tahu saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Setelah tahu adanya gerakan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Soeharto mengumpulkan koleganya mantan tentara PETA untuk membentuk BKR di Yogyakarta. Soeharto sendiri diangkat menjadi komandan dengan pangkat Mayor. Di daerah inilah Soeharto mengawali karier

[57] ***Ibid.***, p. 19-20.
[58] ***Ibid.***, p. 23-4.

militernya dalam negara RI dan menjadi tokoh dibalik perang gerilya di kawasan Yogyakarta, terutama saat pendudukan Yogyakarta akibat Agresi Militer II hingga penarikan pasukan Belanda dari Yogyakarta.[59]

Soeharto mulai membuat sejarah, setelah memimpin Serangan Umum 1 Maret dalam perebutan kota Yogyakarta selama enam jam. Reputasi Soeharto meningkat sebagai akibat dari komandonya yang sukses dalam serangan militer tersebut, yang memiliki makna strategis dalam diplomasi internasional. Serangan tersebut memiliki makna strategis untuk menunjukkan bahwa militer Indonesia masih cukup kuat, tidak sebagaimana diberitakan di media Internasional bahwa Indonesia sudah menyerah. Atas keberhasilan tersebut Soeharto memperoleh penghargaan khusus dari Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sejarah hidup Soeharto pada masa-masa sesudahnya banyak diwarnai dengan kegiatan kemiliteran terutama dalam penumpasan pemberontakan-pemberontakan di daerah.[60]

Soeharto merupakan tokoh yang lahir sebagai pejuang di lapangan militer yang turut berjuang pada masa revolusi fisik yang dikenal dengan Angkatan '45. Karenanya pandangan-pandangan Soeharto tidak jauh berbeda dari umumnya kalangan militer pada masanya. Menjadi tentara bagi kalangan militer yang turut terlibat aktif dalam perang revolusi tidak sekedar bermakna pengembangan karier dan profesi, melainkan juga tanggung jawab moral untuk menegakkan kemerdekaan. Pengalaman masa revolusi menyebabkan rasa tanggung jawab mereka terhadap negara tidak dapat dibatasi pada tugas-tugas teknis kemiliteran saja. Mereka juga merasa bertanggungjawab atas berbagai aspek kehidupan kenegaraan, terlebih ketika menyaksikan berbagai kondisi yang tidak sejalan dengan rasa memilikinya atas negara. Mereka sangat prihatin dan

[59] ***Ibid.***

[60] Roeder, ***Anak Desa...***, p. 207.

harus berbuat sesuatu ketika memasuki masa kemerdekaan negara dipenuhi intrik-intrik politik para politisi sipil.[61]

Soeharto termasuk tokoh yang dari muda cukup cerdas dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Soeharto termasuk tokoh yang dipengaruhi pola pikir atau filosofi Jawa dalam hal nilai-nilai kesabaran dan ketelitian, di antaranya tentang pedoman hidup berupa *tiga ojo* (tiga larangan, jangan), yaitu jangan mudah heran (*ojo gumunan*), jangan mudah panik (*ojo gupuhan*) dan jangan menyepelekan (*Ojo dumeh*). Nilai-nilai ini merupakan filosofi umum masyarakat, sebuah pedoman bagaimana mengelola kehidupan pribadi dalam percaturan sosial, yang tidak dapat disamakan dengan ajaran *teosofi kejawen*. Dengan berpegang pada cara berfikir ini, Soeharto tidak mudah terlibat dalam berbagai kasus-kasus politik kekerasan yang melibatkan militer pada masanya, seperti penculikan Sjahrir ataupun peristiwa 17 Oktober 1952. Soeharto bahkan menyatakan termasuk yang tidak faham kenapa terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.[62]

Peristiwa G30S/PKI merupakan peristiwa monumental dalam sejarah hidupnya. Soeharto memperoleh kesempatan memainkan peran dominan dalam kancah politik sekaligus militer, yang menaikkan popularitasnya yang mungkin jauh melampaui yang pernah dibayangkan. Sebagai salah seorang pimpinan Angkatan Darat, Soeharto secara implisit menyiratkan ketidakpuasannya atas sikap Soekarno yang tidak berbuat sesuatu terhadap PKI yang telah mencoreng wajah korpsnya, yang menyebabkan ketidakpuasan atas

---

[61] Di samping keahlian teknik berperang, para pemimpin militer juga memiliki keahlian politik terutama karena berada dalam situasi Perang Gerilya, di mana mereka juga dituntut mampu meraup dukungan masyarakat sekitarnya. Harold Crouch "Pasca Angkatan 1945: Militer dan Politik di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1986, p. 13.

[62] Pada masanya, banyak kalangan militer di daerah mengira peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan pertempuran antar tentara di Jakarta. Soeharto, ***Pikiran, Ucapan...***, p. 87-8.

seluruh kinerja yang telah ditunjukkan Soekarno bersama pembantu-pembantunya dalam mengelola negara dan pemerintahan.

Pengalaman sebagai militer dengan serangkaian visi politik militer pada masanya, menyebabkan pola piker Soeharto lebih mencerminkan sebuah pragmatisme militer. Sebagaimana manusia pada masanya, Soeharto tidak dapat mengingkari demokrasi sebagai sistem sosial politik yang harus diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan, namun dengan konseptualisasi sebagaimana tuntutan historis yang dihadapi. Dalam hal strategi perjuangan, kalangan militer umumnya lebih menyukai cara-cara revolusioner Tan Malaka atau Sjahrir, namun idealisme dan konsep demokrasi yang dianut Soeharto tidak jauh berbeda dengan Soekarno, Nasution, tetapi sekaligus mencerminkan pola pikir kelompok Hatta dalam hal visi masa depan Indonesia, di samping secara teknis dan mekanistik juga dipengaruhi orang-orang kepercayaan yang turut menyokong pemerintahannya. Mereka berambisi menonjolkan kepribadian bangsanya dalam kehidupan politik, meski cara berfikir Barat sudah diapresiasi.[63]

E. Demokrasi Pancasila dalam Praktik Pemerintahan

Para pengkaji sejarah politik di Indonesia memandang bahwa Orde Baru memiliki kaitan erat dengan kelompok pemikir liberal yang selama pemerintahan Soekarno tersisih dari percaturan politik, dan tidak jarang diidentifikasikan sebagai agen-agen imparialis Barat. Mereka merupakan komunitas kecil nasionalis sekuler anti-komunis yang berusaha mempertahankan demokrasi sebagai asas pengelolaan negara, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Mereka merupakan kelompok yang secara realistik memimpikan Indonesia

[63] Seperti kalangan pemuda dan kelompok revolusioner, kalangan militer lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan Belanda dengan cara militer dari pada diplomasi. Simak Singh, *Dwi Fungsi ABRI...*, p. 76.

masa depan sebagai sebuah negara demokratis dengan perekonomian industrial.[64]

Kalangan intelektual yang membangun pijakan konsep restrukturisasi politik Orde Baru percaya bahwa masa depan Indonesia harus bebas dari dari politik yang berdasarkan ideologi. Konflik dan instabilitas sosial politik yang tidak pernah berujung pada masa pemerintahan Soekarno dipandang sebagai akibat konflik ideologis. Dalam pandangan para penyokong Orde Baru, pencapaian masyarakat adil dan makmur memerlukan sebuah partai politik yang kuat, yang terdiri dari kader-kader sosialis, anti-komunis, anti-totalitarianisme dan anti-feudalisme yang mampu menciptakan iklim ketertiban dan mampu secara efisien dan pragmatis membangun perencanaan ekonomi secara rasional. Pragmatisme tokoh sosialis seperti Sjahrir, bahkan menempatkan dukungan negara industrial Barat sebagai pilihan yang tidak dapat dihindari, mesti semula dianggap lawan ideologisnya,.[65]

Gagasan ini mendapat dukungan kuat oleh para alumni perguruan tinggi Amerika Serikat yang kembali ke Indonesia. Mereka merupakan tokoh-tokoh anti-komunis yang membawa referensi pemikiran baru di luar ideologi politik. Menurut Mas'oed setidaknya terdapat tiga teori sosial yang mempengaruhi intelektual liberal tersebut yang di kemudian hari menopang kebijakan Orde Baru dalam deideologisasi dan depolitisasi: Pertama, Hipotesis Lipset tentang pengaruh ekonomi dalam demokratisasi politik, di mana berdasarkan pengalaman Barat, demokrasi liberal yang stabil baru tercapai setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi berhasil diciptakan. *Kedua*, teori akhir ideologi (*the end of ideology*) Daniel Bell yang menyatakan bahwa dalam pengalaman Barat politik berbasis ideologi sebagaimana persoalan umum masa revolusi industri menjadi usang akibat

[64] Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 69.

[65] R. William Liddle "Modernizing Indonesian Politics" dalam R. William Liddle, ed., ***Political Partisipation in Modern Indonesia***, (New Haven: Yale University Southeast Asian Studies, 1973), p. 179.

peningkatan perekonomian. Kompleksitas persoalan pembangunan kontemporer tidak akan memadai untuk diatasi dengan mengedepankan ideologi semata-mata. Keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan teknologi diperlukan dalam pengelolaan negara disamping politisi. *Ketiga*, teori Huntington tentang kecenderungan negatif atas mobilisasi sosial tak terkendali pada masyarakat sedang berkembang. Masyarakat berkembang cenderung tidak terkendali bilamana dibiarkan terlibat dalam sistem liberal. Karena itu, negara perlu memberikan wadah bagi pelembagaan politik untuk menjamin ketertiban sipil, agar partisipasi rakyat dapat disalurkan secara tertib dan terkendali. [66]

Teori-teori tersebut mungkin saja secara konseptual mendasari pengelolaan pemerintahan Orde Baru, namun boleh jadi keinginan membangun pemerintahan yang bebas dari konflik ideologi didasarkan atas pertimbangan pragmatis yang tidak mengacu pada diskursus keilmuan sosial. Kalaupun pemikiran-pemikiran tersebut memang berkembang pada masanya dan mempengaruhi alam pikiran para penyokong Orde Baru, dapat dimungkinkan karena situasi yang berkembang di dalam negeri memberi pembenaran empiris yang mengakibatkan teori-teori tersebut diapresiasi. Soeharto sendiri sebagai tokoh utama Orde Baru dikenal tidak banyak berteori sebagaimana pendahulunya, Soekarno. [67]

---

[66] Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 70-3.

[67] Pandangan dan pemikiran Soeharto memperlihatkan melekatnya nilai-nilai tradisi dan budaya Jawa dalam pribadi Soeharto. Hal ini tampak pada senantiasa munculnya ungkapan-ungkapan tertentu yang secara antropologis memiliki makna yang dalam sebagai pembentuk pandangan hidup dan perilaku, seperti *sadumuk bathuk senyari bumi*, *ngamandito*, *lengser keprabon* dan sebagainya dalam berbagai ungkapannya. Tokoh-tokoh yang menelaah perkembangan politik di Indonesia, seperti Emerson memandangnya sebagai persoalan determinan dalam memahami kegagalan demokrasi di Indonesia, dengan tesisnya yang menyatakan bahwa kegagalan demokrasi sebagai akibat Orde Baru yang tidak mampu mengelola persaingan antara kekuatan kultur *abangan* dengan *santri*. Ricard Robinson, ***Sejarah***

Harapan membangun pemerintahan yang stabil pada dasarnya juga bukan hal baru, karena Soekarno dengan cara berbeda sudah melakukannya. Bahkan konsepsi Demokrasi Terpimpin sendiri berakar pada gagasan yang diajukan kalangan militer, Nasution. Sistem tersebut diterapkan sebagai upaya memfasilitasi tentara yang sangat berambisi pada kekuasaan, yang karenanya Soekarno tak henti berusaha membatasi peran mereka. Orde Baru menjadikan buruknya kinerja politik dan pemerintahan yang diikuti kemerosotan ekonomi sebagai pembenaran historis atas konsepsinya. Idiom "stabilitas dan Pembangunan atau Pertumbuhan Ekonomi" menduduki posisi sentral dalam restrukturisasi politik. Pemerintah Orde Baru berupaya melakukan berbagai upaya yang mampu menyediakan situasi kondusif yang memungkinkan pembangunan dapat diprioritaskan tanpa terganggu oleh kericuhan politik. [68]

Pemerintah mengindentifikasikan bahwa penyebab instabilitas politik paling utama terletak pada perbedaan ideologi politik yang saling berseberangan. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupayakan terbangunnya iklim politik yang bebas dari konflik ideologis dan menggantikannya dengan komitmen politik yang dibangun berdasarkan konsensus. Konsensus adalah kesepakatan akhir yang ditetapkan antar kelompok yang sebenarnya juga merupakan tujuan dari demokrasi politik. Hanya saja, karena konsensus melalui forum demokrasi politik nyaris tidak pernah mampu dibangun, bahkan cenderung *deadlock*, maka Orde Baru mengkonotasikan konsensus sebagai keputusan yang diambil dengan

Politik Orde Baru, terjemahan Aboeprijadi dkk., (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984), p. 8.

[68] Orba ingin membangun harmoni masyarakat yang mampu berkomunikasi secara kekeluargaan. Simak A.H. Nasution, ***Demokrasi Pantjasila di Masa Sekarang dan Masa Mendatang***, (Malang: Laboratorium Pantjasila IKIP Malang, 1971), p. 7. Simak pula Lev "Belajar dari Remokrasi...", p. 7-8.

jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semaksimal mungkin menghindarkkan mekanisme demokrasi politik.[69]

Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan politik yang ternyata mengeleminasi peran politik kepartaian berbasis ideologi, yang ditandai dengan penyederhanaan partai politik melalui fusi berdasarkan garis ideologi. Sembilan partai partai politik yang bertahan hingga awal Orde Baru digabung hingga tinggal dua partai saja: partai yang berbasis Islam yang berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai berbasis nasional yang berdiri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sebagai pengimbang, pemerintah membangun kelompok yang berdiri sebagai partai semu, Golongan karya. Kedudukan ketiganya kemudian diikat oleh Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.[70]

Secara sistematis pemerintah Orde Baru melemahkan peran partai politik dengan merekayasa komposisi keanggotaan legislatif (DPR/MPR) sedemikian rupa hingga menguntungkan posisi politik pemerintahan. Keanggotaan legislatif ditata dengan komposisi yang terdir dari Partai Politik, ABRI, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Golongan Karya sebagai partai pemerintah, di mana selain partai politik dan Golkar, keanggotaan legislatif praktis ditentukan oleh pemerintah sendiri. Tidak hanya itu, Golkar yang menjadi partai pemerintah memperoleh *privillage* yang memungkinkannya selalu memenangkan pemilu bahkan bila perlu tanpa kampanye sekalipun. Hal ini dikarenakan pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan-

---

[69] Simak Emmerson, ***Indonesia's Elite...***, p, 250, juga Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 66.

[70] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 520. Pembaharuan struktur politik sendiri diarahkan pada pembaharuan semangat dan jiwa dari struktur politik yang berarti pembaharuan pola, orientasi kepada pola dan orientasi Pancasila; mendudukkan komponen-komponen struktur politik pada tempat yang semestinya menurut ketentuan Pancasila dan UUD 1945; serta penyederhanaan partai politik. Simak Batubara, ***Sejarah Lahirnya...***, p. 36.

perusahaan negara dan keluarga ABRI sudah secara otomatis menjadi konstituennya.[71]

Disadari atau tidak oleh para pengurusnya, fusi antar partai politik dengan sendirinya meningkatkan konflik internal partai yang menjadikan partai politik kian kehilangan soliditas dan simpati pendukungnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga senantiasa mengkondisikan agar partai politik berkecenderungan tunduk pada setiap kebijakan pemerintah, dengan memasukkan tokoh-tokoh pro-pemerintah atau setidaknya yang relatif kurang radikal ke dalam jajaran pengurus partai. Akibatnya, hampir seluruh kekuatan politik di legislatif menjadi kekuatan yang nyaris kompak dengan kehendak politik pemerintah.[72]

Pemerintah juga berusaha menjauhkan partai politik dari basis pendukungnya dengan memberlakukan kebijakan masa mengambang (*floating mass*). Partai-partai politik mengalami kelumpuhan setelah gerakan-gerakan politiknya dibatasi lima tahun sekali pada saat Pemilu. Rakyat bawah tidak lagi dapat dijadikan alat politik yang efektif setelah mereka dijauhkan dari kepentingan politik ideologis dengan cara membatasi gerak partai politik di wilayah pedesaan. Di pihak lain, partai pemerintah semakin leluasa memperluas dukungan dengan berbagai intimidasi aparat pemerintah sendiri melalui

---

[71] Sekalipun ditentang kalangan Islam, pemerintah menetapkan model partai mayoritas yang diatasnamakan golongan fungsional, sekalipun pada kenyataannya menjadi jalur lain kekaryaan militer. Hal ini tampak pada dominasi militer dalam golongan Karya. Sundhaussen "Refleksi terhadap Parpol...", p. 11. Simak juga Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 103.

[72] Dalam rangka menjamin dukungan kalangan legislatif yang kompak dengan kemauan pemerintah diberlakukan mekanisme *recall*, yang memungkinkan suara-suara kritis dieliminir dari parlemen, dan sudah mulai berlaku sejak 1967-1968. ***Ibid.***, p. 102.

berbagai cara, terutama memanfaatkan birokrasi sipil maupun militer.[73]

Upaya ini semula mendapat tantangan terutama dari kalangan politisi partai, namun mereka tidak cukup berdaya menentang dan hanya berharap dapat semaksimal mungkin memenangkan Pemilu. Padahal di pihak lain, pemerintah masih menyiapkan strategi tersendiri agar pemilihan umum selalu dimenangkan Golkar sebagai salah satu organ politiknya. *Privillage* yang diberikan kepada Golkar, di mana setiap pegawai negeri dan aparat pemerintah wajib mendukungnya, memungkinkannya selalu menjadi pemenang Pemilu secara *fair* atupun tidak. Perlindungan pemerintah terhadap aparat dan pendukung Golkar memungkinkan partai ini secara leluasa dipaksakan sebagai pilihan mayoritas rakyat.[74]

Pola-pola kebijakan monolitik merupakan kekhasan paradigma yang dibangun pemerintahan Orde Baru. Partisipasi politik pluralistik yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan cenderung dibatasi. Sekitar satu dasa warsa sejak berdirinya Orde Baru, konsensus nasional menghasilkan satu konsepsi di mana Pancasila ditempatkan sebagai *Asas Tunggal*. Konsensus tersebut merupakan upaya jangka panjang yang ditujukan untuk mengeliminasi perbedaan ideologi dengan cara menyatukannya ke dalam satu asas. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional termasuk sebagai asas partai politik. Bukan berarti pemerintah melarang asas lain, terkecuali komunisme. Asas lain diperkenankan digunakan tapi dalam posisi sebagai subordinasi Pancasila. Orde Baru mengarah pada satu tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan hingga pendidikan yang monolitik dan

[73] Dalam setiap kali Pemilihan Umum, Pegawai Negeri Sipil selalu diarahkan untuk mendukung Golkar. Paling tidak dari Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya saja, Golkar akan meraup setidaknya 20 kursi di parlemen. Afan Gaffar "Pegawai Negeri dan Partai Politik" dalam Afan Gafar, ***Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 236.

[74] A. Sonny Keraf "Membedah Politik Perizinan: Sikap Netral dan Campur Tangan" dalam ***Prisma***, No. 3, Maret 1996, p. 31-2.

integralistik. Seiring perubahan paradigma politik mayoritas umat Islam yang sebelumnya keberatan, Pancasila akhirnya diterima sebagai asas tunggal.[75]

Segala daya upaya dan potensi di dalam negeri ditujukan untuk menyokong kebijakan politik yang tidak mentolerir ideologi lain. Pemerintah mengarahkan semua elemen sosial menyesuaikan dengan ideologi monolitiknya, mulai dari dunia kesenian, penerbitan buku-buku hingga pemberitaan media. Pembatasan pers yang telah kehilangan kebebasannya selama Demokrasi Terpimpin harus diperpanjang dengan keharusan menyesuaikan diri dengan mengusung ideologi Pancasila, sehingga dikenal dengan istilah Pers Pancasila. Rakyat digiring untuk hanya melaksanakan program pembangunan yang telah digariskan oleh elit, hanya mengerjakan tugas kesehariannya, tanpa perlu mempertanyakan, apalagi mengawasi pemerintah.[76]

[75] Sekalipun agak lama sejak berdirinya Orde Baru, sejak 1980-an partai polirik dan Golongan Karya (Golkar) diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi dan kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, yang artinya setiap organisasi apapun pada dasarnya tidak berbeda, sama. PPP bahkan dilarang menggunakan lambang Ka'bah dan kemudian diganti dengan lambang bintang. Simak M. Ridla Taqwa "Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992" dalam ***Prisma***, No. 3, 1996, p. 36. Kemonolitikan kebijakan pemerintah Orde Baru bahkan menyangkut asimilasi etnis Tionghoa di Indonesia, di mana mereka harus melakukan pengindonesiaan nama diri, toko dan usaha-usaha mereka hingga terkesan Indonesia. Karena itu, periode awal pemerintahan Orde Baru banyak diwarnai perubahan nama-nama etnis Tionghoa menjadi keindonesia-indonesiaan untuk mengurangi potensi terjadinya perpecahan dan konflik Suku, Ras dan Agama (SARA). Penulis.

[76] Sebenarnya sebelum peristiwa Malari kebebasan pers masih tidak dianggap sedemikian mengganggu pemerintahan. Media massa dapat membangun kritik dan opini yang kritis terhadap penguasa, sekalipun sama sekali tidak mampu mempengaruhi perubahan kebijakan penguasa. Namun setelah peristiwa Malari, nasib pers menjadi sama sekali sebaliknya dibanding sebelumnya. Akhmmad Zaini Abar "Kebebasan Pers, Kekecewaan Masyarakat dan Keperkasaan negara: Studi Sejarah Awal Orde Baru, 1966-1972" dalam ***Prisma***, No. 4, 1994, p. 23-4.

Pers disadari sebagai elemen sosial yang potensial melahirkan kritik dan mempengaruhi opini berbeda dari yang diharapkan pemerintah. Kontrol ketat terhadap pers dilakukan dengan berbagai norma yuridis. Organisasi pers mengikuti sejawatnya, seperti organisasi buruh, pengusaha dan organsisasi profesi lain yang diarahkan menjadi satu organisasi korporasi pendukung pemerintah. Pemerintah tidak membiarkan tradisi konflik, sekedar kritik, apalagi mengungkapkan fakta-fakta yang dapat merusak citra pemerintah. Ancaman pembredelan selalu terbuka bagi kalangan pers yang dinilai terlalu berani melanggar batas profesi yang ditetapkan.[77]

Pengawasan yang ketat oleh birokrasi sipil dan militer menyebabkan kebebasan masyarakat politik hilang, apalagi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan diawasi secara ketat. Berbagai perijinan dengan serangkaian persyarakatan dan rumitnya birokrasi diterapkan dalam rangka kontrol sosial agar tidak menyimpang dari batas yang diijinkan. Demikian halnya dengan kegiatan pendidikan, di mana selain dijejali dengan materi-materi Pancasila (PMP) dan sejarah perjuangan (PSPB) yang menjadi matapelajaran yang menentukan kenaikan dan kelulusan (*compulsory subject*), mereka juga dibatasi dari kegiatan-kegiatan sosial politik melalui penerapan NKK/BKK. Di samping itu, mereka terlebih dahulu harus mengikuti penataran P4 berpuluh-puluh jam sebagai ritual kesetiaan. Bukan hanya pelajar, seluruh elemen kemasyarakatan kemudian diwajibkan mengikuti penataran Pancasila hasil rumusan tim perumus (BP7).[78]

---

[77] Tidak hanya pembredelan, pada kurun awal pengetatan pers, dampak yang harus dihadapi masyarakat pers juga penangkapan bahkan pemenjaraan wartawan maupun redaktur. ***Ibid.***, p. 40

[78] Kebijakan NKK BKK efektif menciptakan kehidupan akademik yang apatis. Kegiatan mahasiswa lebih banyak bersifat akademik dan rekreatif. Tidak ada lagi kelompok yang dapat memperoleh peluang untuk memobilisasi kesadaran mereka untuk melakukan kritik terhadap pemerintah ataupun kebijakan kampus sendiri yang merugikan mereka. Bonar Tigor Naipospos "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik: Ke Arah Gerakan Rakyat?" dalam ***Prisma***, No. 7, 1996, p. 29.

Ideologi politik Orde Baru pada dasarnya merupakan kelanjutan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, di mana dalam konseptualisasinya Angkatan Darat memiliki kontribusi pada sebagian atau seluruhnya. Soekarno yang terlalu mendambakan persatuan berupaya mempersatukan komunitas bangsa ini ke dalam satu ikatan, NASAKOM, sementara Orde Baru memilih upaya peleburan ideologi-ideologi lain untuk digantikan dengan Pancasila. Soekarno berusaha mengakomodir perbedaan dalam satu ikatan, sementara Orde Baru menghilangkan perbedaan dan mengalihkan masyarakat pada satu komitmen. Persamaan keduanya tampak pada kecenderungan untuk tidak mentolerir kritik dan perbedaan pendapat. Soekarno dan Soeharto tidak menemukan jalan lain untuk mengakomodasi puralitas dan carut-marutnya kekuatan-kekuatan sosial politik pada masanya, selain dengan mengikatnya ke dalam satu ikatan.[79]

Agenda politik Orde Baru pertama-tama ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional dalam pengertian deideologisasi, membangun integritas nasional dan menciptakan kondisi dasar yang diperlukan suatu negara, yaitu keamanan dan ketertiban. Orde Baru mengkoreksi pemerintahan sebelumnya yang tidak benar-benar percaya pada sistem dan tatanan yang dibuat oleh para pendiri bangsa, Pancasila. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, jargon Orde Baru, yakni melaksanakan Pascasila dan Undang-undang 1945 secara murni dan konsekwen memberi dasar keyakinan dalam perjuangan menegakkan proklamasi kemerdekaan. Berbeda dari Soekarno, Soeharto mendapatkan momentum kuat untuk merubah keadaan sejak kesempatan mengakhiri potensi anarkhis kaum komunis berhasil dituntaskan.[80]

---

[79] Orde Baru hanya mengkonsolidasikan sistem Demokrasi Terpimpin dengan kekuatan militer sebagai satu-satunya landasan. Simak Lev “Belajar dari...”, p. 7.

[80] Deideologisasi sebenarnya bukan berarti Indonesia lepas sama sekali dari ideologi sebagaimana disinyalir para pengkaji masalah Indonesia. Simak Liddle “Modernizing Indonesian Politics”, p. 177. Ideologi sebagai keyakinan tetap dianut

Hal ini dikarenakan pemerintah Orde Baru berharap dapat berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi. Rekonstruksi terhadap problem-problem negara dan hal-hal yang berkaitan dilakukan dalam rangka menjamin stabilitas sosial politik dan keamanan, termasuk cara memperbaiki hubungan internasional yang sebelumnya sempat memburuk oleh konfrontasi dengan negara yang dianggap sebagai agen imperialisme. Karena itu, pemerintah Orde Baru berusaha menarik kembali keterlibatan masyarakat dari kancah pertarungan politik yang terlalu luas. Politik hanya dibatasi pada parlemen sebagai infrastruktur politik formal. Rakyat yang telah terpolitisasi oleh ideologi dan kelompok sosial politik didepolitisasikan, karena politik hanya menjadikan rakyat dipolitisasi di luar proporsinya.[81]

Dalam praktiknya, penyelelenggaraan pemerintahan Orde Baru pada dasarnya menggunakan berbagai instrumen berikut mekanisme demokrasi, tetapi keberadaannya sekedar simbul-simbul politik yang menggambarkan idealitas sistem maupun proses demokrasi. Proses demokrasi hanya berlangsung sebagai seremonial politik, yang mana mulai dari Pemilu, pengelolaan komposisi parlemen maupun proses politiknya dipenuhi rekayasa. Termasuk dalam hal ini adalah keberadaan kelompok gerakan sosial (*civil society*) yang lebih menampilkan wajah korporatis dibanding kebutuhan pembelaan sosial. Pemerintah sendiri memfasilitasi bahkan tidak jarang

dan tidak lepas dari ideologi. Penguasa Orde baru memilih Pancasila sebagai ideologi atau diideologikan. Sementara ideologi Barat dengan segala perbedaan dan pengaruh negatifnya dinafikan. The implementation of Patja Sila is purified by eliminating all the negative influences of other ideologies, particularly of communism. Department of Information RI, ***ORBA, A Guided ...***, p. 10.

[81] Agar rakyat tidak menjadi korban kepentingan politik dan ideologis partai-partai, mereka harus dijauhkan dari politik kepartaian. Karena itu, partai-partai politik dijauhkan dari pedesaan kecuali pada masa kampanye Pemilu. Simak Mas'oud, ***Negara, Kapital...***, p. 89.

mempelopori terbentuknya organisasi-organisasi korporatis, mulai dari kalangan pemuda, profesi hingga keagamaan.[82]

Bangunan pemerintahan Orde Baru merepresentasikan hegemoni politik militer, tapi instrumen-instrumen demokrasi politik tetap dipertahankan. Hampir tidak ada satu elemen demokrasi yang tidak diwujudkan. Setiap lima tahun sekali selalu diselenggarakan Pemilu dengan kampanye politiknya untuk membentuk lembaga perwakilan, DPR dan MPR; Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas yudikatif juga eksis; eksekutif dengan seperangkat birokrasinya; media massa; bahkan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang biasa menjadi pilar demokrasi semua ada. Hanya saja, semua instrumen demokrasi tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya. Seluruh instrumen tersebut berjalan berdasarkan satu kendali, menurut irama yang ditentukan pusat kekuasaan. Demikian halnya dengan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara beserta mekanisme pembentukannya, semua mengikuti alur yang seolah-olah demokratis.[83]

Untuk menjaga agar kebijakan dijalankan dengan penuh ketaatan, pemerintah menempatkan perwira-perwira militer pada jabatan-jabatan pemerintahan sipil. Seperti halnya kebijakan pemerintahan sebelumnya, di mana birokrasi sipil tidak lagi harus berada pada tangan kaum profesional, dilanjutkan dengan mengisi formasi-formasi birokrasi dari kalangan militer. Seolah mengulang pengalaman kurun akhir pemerintahan Soekarno, birokrasi kehilangan profesionalismenya. Birokrasi menjadi instrumen utama

[82] Pemilu di Indonesia tidak lebih dari sekedar hiasan, yang tidak mempunyai makna politik. Gaffar, ***Javanese Voters...***, p. 36-7. Sundhaussen menyebut praktik demokrasi selama Orde Baru yang mana Pemilu disebut sebagai sebuah "pesta demokrasi" yang berlangsung laksana karnaval saja. Pemilu dibangun sebagai dekorasi yang memberikan legitimasi bahwa sebuah rejim berdiri secara demokratis, tanpa memberikan sedikitpun memberi makna. Simak Ulf Sundhaussen "Refleksi terhadap Parpol dan pemilu di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1996, p. 12-3.

[83] Sundhaussen "Refleksi terhadap Parpol...", p. 13.

membangun pemerintahan integralistik khas militer. Birokrasi yang seharusnya berperan administratif berubah menjadi instrumen kekuasaan yang mengendalikan kemungkinan munculnya gerakan-gerakan anti-pemerintah. Aturan-aturan birokrasi yang sebelumnya berkembang tidak realistis dipertahankan dengan beberapa penyederhanaan. Meski tetap dengan kerumitan yang tidak jauh berbeda, tapi sentralisasi dan efisiensi prosedur birokrasi sudah jauh lebih sistematis dengan target-target penyaringan informasi secara ketat.[84]

Sebagai penunjang pembangunan stabilitas, militer diberi tugas melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kerja inteligen baik secara formal maupun informal. Dalam rangka pembinaan teritorial, militer mengembangkan birokrasinya sampai ke desa-desa. Dengan cara demikian, sekecil apapun gejolak yang mungkin berkembang di tengah masyarakat pedesaan yang terpencil sekalipun senantiasa dapat dipantau dan ditindaklanjuti dengan segera. Karena itu, sepanjang periode pemerintahan Orde Baru banyak diwarnai penangkapan-penangkapan semena-mena bahkan penghilangan paksa masyarakat sipil oleh militer, bukan melalui prosedur hukum yang semestinya. Kebebasan sipil hampir-hampir hilang. Gerakan-gerakan sosial hampir selalu dipandang dengan penuh kecurigaan, apalagi bila diindikasikan mendukung gerakan politik atau ideologis tertentu di luar *mainstream* yang ditetapkan negara.[85]

---

[84] Di antara birokratisasi yang menonjol ditujukan dalam rangka melakukan *screening* warga negara yang tersangkut PKI dan tidak. Kuatnya birokrasi menempatkan pola pengendalian birokrasi pemerintah mencerminkan sebuah sistem birokrasi otoriter (*bureaucratic authoritarianism system*). M.M. Billah "Good Governance dan Kontrol Sosial" dalam ***Prisma***, No. 8, 1996, p. 45.

[85] Pemerintah memberlakukan tindakan keamanan yang ketat dan tekanan politik yang keras. Simak Ulf Sundhaussen "Sebuah Agenda bagi Demokratisasi di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 3, 1996, p. 4. Simak juga Keraf "membedah Politik Perizinan…", p, 31.

Sebagaimana Soekarno, Soeharto dan para penyokong utama Orde Baru tidak setuju adanya pemisahan kekuasaan. Trias Politika dipahami dan diterapkan dalam konteks pembagian kekuasaan, dan bukan pemisahan kekuasaan karena dengan cara ini berbagai elemen kekuasaan, legislatif dan yudikatif dapat dikendalikan. Pola-pola menonjol yang dilakukan dalam pengendalian iklim politik dan pemerintahan tampak pada pemusatan kebijakan pada tangan presiden, dan sekelompok elit yang berada di sekelilingnya. Mereka terdiri dari kalangan elit militer dan kaum intelektual yang mampu menyesuaikan idealismenya dengan mayoritas penentu kebijakan, sebagai kelompok pemikir utama (*think thank*) dalam menentukan berbagai pola kebijakan yang harus dijalankan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya.[86]

Sebagaimana Soekarno, rejim Orde Baru berupaya membangun paradigma demokrasi yang dinilai selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi dimaksud adalah demokrasi atas dasar pola hubungan kekeluargaan dan gotong-royong yang semaksimal mungkin menghindari konflik. Harapan tersebut kurang lebih selaras dengan pola Demokrasi Terpimpin, karena pada dasarnya pola pemerintahan Orde Baru merupakan kelanjutannya. Perbedaan keduanya terletak pada terpusatnya kekuasaan di tangan beberapa kekuatan utama: Soekarno, militer dan PKI, yang sarat ketegangan. Sementara Orde Baru ditunjang oleh struktur militer dan beberapa organ politik yang dibangun secara korporatis hingga mampu berkerja sistematis dan efektif. Soekarno berusaha mengakomodir perbedaan dalam satu ikatan, NASAKOM dengan doktrin manipol-USDEK, sementara Orde Baru memilih melemahkan

[86] Nasution, ***Demokrasi Pantjasila...***, p. 14. Pemerintahan Orde Baru yang didirikan tokoh-tokoh militer angkatan '45 atau golongan muda seluruh pemikiran politiknya tercurahkan untuk memberikan basis ideologi bagi Orde Baru, yang secarra terbuka menolak sistem pluralistik dan trias politika, dan mengarahkan pada sistem integralistik. Dewi Fortuna Anwar "The Transition to Democracy in Indonesia: A Historical perspective" dalam R. William Liddle, ***Crafting Indonesia Democracy***, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), p. 83.

perbedaan dan mengalihkan masyarakat pada satu ideologi sebagai dasar komitmen, Pancasila.[87]

Persamaan paling jelas antara keduanya terletak pada kecenderungan untuk tidak mentolerir kritik dan perbedaan pendapat. Orde Baru menyempurnakan sistem Demokrasi Terpimpin yang menekankan stabilitas dengan monoloyalitas sebagai prasyarat. Sebagaimana pandangan Soekarno, Soeharto juga menilai liberalisme politik, ideologi maupun ekonomi sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, masyarakat bangsa ini memerlukan suatu tatanan sosial politik yang sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia. Orde Baru melakukan purifikasi kebangsaan dengan membangun sebuah negara tanpa (*zonder*) ideologi. Orde Baru mewarisi semangat Soekarno yang berusaha keluar dari wacana ideologis Barat dan membangun kembali kekhasan kultur keindonesiaan. Perbedaannya, khazanah pemikiran Soekarno didominasi oleh pengaruh ideologi Barat yang menjadikannya tetap mengakomodir pemikiran Barat, khususnya Marxisme, sementara Soeharto dan pendukungnya yang tidak terlalu akrab dengan wacana ideologis dan lekat dengan tradisinya sendiri banyak mengabaikan wacana pemikiran Barat. Dengan gagasan sederhana, Soeharto mensakralkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, pandangan hidup yang harus dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat bangsa ini.[88]

Restrukturisasi politik oleh Orde Baru ditujukan sebagai jalan yang dapat mengantarkan pada keberhasilan ekonomi. Wacana yang

---

[87] Sekalipun berbeda secara artikulatif, namun Soekarno maupun Soeharto sama-sama menekankan perlunya sebuah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Simak kembali Department of Information RI, ***The Indonesia Revolution...***, p. 18, juga Department of Information RI, ***ORBA, A Guided...***, p. 20.

[88] Soeharto bahkan tidak dapat mentolerir perbedaan pendapat dari sebagian pendukungnya sendiri, Militer. Simak Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 79-81. Demikian halnya dengan Soekarno. Simak Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 86.

mengemuka pada kurun tersebut menempatkan negara pada posisi kuat bahkan sangat perkasa di hadapan masyarakat. Dielaktika hubungan antara negara dan masyarakat bergeser dari penjaga malam (*Nachtwächtersstaat*) atau kotak hitam (*blackbox*) yang sekedar perekam peristiwa ditarik kembali pada posisinya semula. Negara dituntut mengambil posisi sebagai variabel utama yang secara otonom menentukan perubahan pada masyarakatnya. Orde Baru membangun mekanisme politik yang semaksimal mungkin meminimalisir konflik, menjamin ketertiban sosial dan ketaatan publik pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan cara demikian, negara dapat menjamin pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan secara cepat, efektif dan efisien yang menjamin produktivitas perekonomian, tanpa banyak hambatan. Reorganisasi politik, pemerintahan dan kemasyarakatan dibutuhkan untuk membatasi desakan ataupun intervensi aktor-aktor politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.[89]

F. Profil Stabilitas dan Pertumbuhan

Posisi militer yang hegemonik benar-benar memberikan hasil efektif dalam memaksakan stabilitas sosial politik baik melalui deideologisasi, depolitisasi maupun tindakan-tindakan represif aparat pemerintah. Sukses besar Orde Baru tampak pada kemampuannya membangun struktur birokrasi dengan herarkhi yang kuat dari tingkat RT/RW sampai presiden. Orde Baru berhasil membangun struktur sosial yang setara dengan struktur organisasi tentara dengan

[89] Mohtar Mas'oed ", Dilema-dilema Pembangunan Politik Indonesia: Sebuah Survey Persoalan" dalam ***Bangkit***, p. 128. Indonesia masa Orde Baru menampakkan kecenderungan ke arah negara komunitarian, di mana negara kehilangan netralitasnya. Sebaliknya, negara harus melakukan campur tangan dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai bersama atau yang dianggap perlu dianut seluruh warga negara. Karena itu, negara berperan besar dalam pengadaan dan pemeliharaan berbagai kebutuhan materi maupun nilai-nilai bersama (*share values* ataupun *common good*). Keraf "Membedah Politik Perizinan...", p. 27.

herarkhi dan organisasionalnya. Otokrasi Orde Baru memperoleh bentuk dengan terbangunnya sebuah struktur kekuasaan yang benar-benar monolitik dan terkontrol. Sekalipun tidak serancu masa Demokrasi Terpimpin, tapi kualitas hegemoni pemerintah melalui jaringan birokrasinya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Ini dikarenakan struktur birokrasi sipil melibatkan kontrol lembaga-lembaga sipil dan sekaligus jaringan militer. Terlebih lagi, pada kurun yang sama kepolisian yang idealnya menjadi institusi sipil disatukan ke dalam institusi militer.[90]

Kuatnya kontrol birokrasi menjangkau berbagai sektor sosial kemasyarakatan, budaya bahkan pendidikan. Prioritas pada masalah stabilitas pertama-tama harus mengorbankan demokrasi itu sendiri, yang harus mengalami penundaan sampai batas yang tidak ditentukan. Penundaan demokrasi dengan sendirinya membatasi partisipasi rakyat melalui partai politik dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik partai praktis mengalami kemandulan. Mereka harus berjuang pertama-tama bukan untuk konstituen atau kepentingan ideologi politiknya, melainkan untuk tetap diakui pemerintah sebagai organisasi politik legal. Partai politik benar-benar kehilangan nilai tawarnya di hadapan pemerintah. Karenanya partai politik pada kurun ini praktis tidak mampu menjadi wadah penyaluran aspirasi yang berakibat semakin ditinggalkan konstituennya.[91]

---

[90] Orde Baru membangun model negara pegawai (*Beamtenstaat*) di mana seluruh elemen politik dan pemerintahan diposisikan penyangga struktur birokrasi pemerintahan yang memungkinkan hegemoni total. Simak kembali McVey “The Beamtenstaat in Indonesia”, p. 85-9.

[91] Peran parpol mengulang periode Demokrasi Terpimpin. Mereka hanya berperan sebagai tukang stempel atas berbagai kehendak dan kebijakan pemerintah. Terlebih setelah mereka tenggelam di bawah mayoritas Besar partai pemerintah. simak kembali Sundhaussen “Refleksi terhadap Parpol...” p. 9-10. Orde Baru juga tidak membukakan saluran politik bagi kelompok ekstra parlemen yang mengarah pada upaya mempengaruhi pembentukan kebijakan. Emmerson, ***Indonesia’s Elite...***, p. 250-1.

Media massa kehilangan kebebasan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik maupun penyebaran informasi secara utuh. Pemerintah secara efektif melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak berkumpul dan mengemukakan pendapat melalui mekanisme perijinan yang berbelit-belit. Sedikit gerakan saja akan segera diendus aparat keamanan untuk dibubarkan, dan bila perlu disertai penangkapan. Perbedaan pendapat yang nyaris tidak terjadi melalui saluran politik di lembaga-lembaga politik, menyebabkan terjadinya kekerasan pemerintah terhadap warganya. Karena itu, masa ini banyak diwarnai kekerasan negara terhadap warganya sendiri, bahkan penghilangan nyawa tanpa melalui proses peradilan dalam penyelesaian berbagai kasus.[92]

Tidak terkecuali kebebasan akademik yang mengalami pemasungan beberapa lama mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Atmosfir akademik selama masa Orde Baru dikondisikan sedemikian rupa untuk selalu menyesuaikan dengan setiap kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diolah melalui lembaga-lembaga perguruan tinggi hanya menghasilkan sedikit kritik, atau sekedar disempurnakan. Orde Baru bahkan mempercayakan pengembangan ideologi nasional yang pada pemerintahan sebelumnya ditangani kalangan ideolog melalui lembaga-lembaga politik, dialihkan pada lembaga pendidikan Tinggi. Sementara gerakan mahasiswa yang tetap berkesadaran politik memilih kegiatan yang lebih halus meski tetap sarat gerakan moral dan mengihindarkan citra politik.[93]

Jargon stabilitas efektif dalam membangun ketertiban dan kesetiaan masyarakat senantiasa menunggu kebaikan hati pemerintah dan menghindari konflik dan perbedaan. Masyarakat dikondisikan takut pada aparat pemerintah dengan pola hubungan penguasa dan yang dikuasai. Aparat pemerintah bukan menempatkan diri sebagai pelayan melainkan sebaliknya. Tuduhan sebagai penganut cara-cara

[92] Lev "Belajar dari Demokrasi...", p. 9.
[93] Naipospos "Mahasiswa Indonesia...", p. 27.

PKI menjadi hal yang umum harus dihadapi bilamana seseorang ataupun sekelompok orang berani melakukan pembangkangan. Karena itu, perilaku aparat birokrasi pemerintah kembali sebagaimana masa-masa sebelumnya, yang memanfaatkan jabatan untuk menangguk keuntungan pribadi. [94]

Kesuksesan dalam membangun ketertiban dan ketaatan sipil menjadikan pemerintah leluasa melakukan segalanya, baik atau buruk, salah atau benar, tanpa satupun kekuatan yang mampu memberikan kontrol ataupun penyeimbang. Karena itu banyak kebijakan yang dengan mudah diselewengkan aparat pemerintahan. Birokrasi menjadi semacam mafia proyek pemerintahan yang secara struktural saling mengawasi, namun dalam praktiknya saling berbagi. Dalam jangka panjang korupsi dan kolusi di kalangan pejabat menjadi tradisi yang semakin sedikit kekuatan sosial mampu mengungkapnya. Sedemikian mudahnya praktik-praktik nepotis dilakukan menyebabkan pengisian formasi jabatan dalam pemerintahan dapat didominasi kalangan kerabat pejabat sendiri. [95]

Partisipasi politik masyarakat, bahkan kebanyakan politisi sipil benar-benar dijauhkan dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah, hingga secara maksimal mampu mengeliminir kritik. Secara sistematis pemerintah mengarahkan pada sentralisasi dan pengelolaan ketatanegaraan yang integralistik. Akibatnya peran dan tanggung jawab elemen birokrasi dan termasuk pula pemerintah daerah semakin kecil karena mereka pada posisi dilayani dan bukan sebaliknya. Tidak hanya itu, pemerintahan daerah

---

[94] Afan Gaffar "Demokrasi Indonesia: Masa Lampau, Sekarang dan Masa Mendatang" dalam Afan Gaffar, ***Politik Indonesia...***, p. 39-40.

[95] Kritik dan keprihatinan masyarakat atas maraknya korupsi sudah mulai disuarakan sejak, 1967, saat pemerintahan Orde Baru baru mulai. Sejak tahun 1970-an kecenderungan pembelaan diri yang dibangun pemerintah dan para pengeritiknya, di mana pemerintah memandang korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan akibat dari minimnya penghasilan para pegawai negara sehingga tidak merasa perlu segera diatasi karena akan hilang seiring peningkatan penghasilan mereka. Simak Abar "Kebebasan Pers...", p. 31-2.

juga semakin kehilangan peran dan tanggung jawabnya, karena ketergantungan pada pemerintah pusat semakin tinggi. [96]

Tumpang tindih jabatan selama pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang selalu diprihatinkan para penggagas Orde Baru dikokohkan kembali. Di antara yang yang dapat dicermati adalah keberadaan sebagian menteri kabinet yang sekaligus merupakan anggota DPR/MPR. Eksekutif yang seharusnya diawasi legislatif tidak jarang berada pada posisi keduanya. Selama di bawah kendali militer, pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang paling tahu dan terpercaya dalam mengelola berbagai urusan negara, baik politik, ekonomi maupun sosial. Berbagai pendekatan dalam pengendalian alur sosial, ekonomi dan politik dilakukan dengan pola-pola kemiliteran, di mana sekelompok elit mendominasi pola pengambilan keputusan yang harus diikuti seluruh masyarakat. [97]

Dengan dukungan situasi politik yang tertib, pemerintah mengupayakan pembangunan perekonomian yang berorientasi keluar, sebab selama menjelang dan periode awal kekuasaan Orde Baru dihadapkan pada kemerosotan ekonomi yang sudah berlangsung sejak kurun akhir pemerintahan Demokrasi Liberal. Kemerosotan ekonomi sudah mulai dirasakan sejak 1955, di mana pemerintah selalu menghadapi defisit anggaran yang besar dan laju inflasi yang terus meningkat tajam. Indonesia semakin dihimpit kesulitan ekonomi, terlebih lagi sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang diikuti semakin derasnya aliran modal ke luar negeri. Di sisi lain, perkembangan situasi regional memang menghadapkan Indonesia

[96] Kebijakan pemerintah diarahkan pada pemindahan kendali pejabat eselon atas dalam herarkhi birokrasi, membangun birokrasi yang tanggap pada kehendak pemerintah pusat dan upaya pengendalian daerah-daerah. Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 93.

[97] ***Ibid.***, p. 99-104.

pada situasi yang tidak menguntungkan akibat konflik regional yang luas, terutama perang Korea.[98]

Salah satu legitimasi Orde Baru didasarkan pada realitas kemerosotan ekonomi, yang dinilai sebagai akibat pemerintah yang tidak serius dalam menanganinya. Perhatian pemerintah terkuras habis pada ideologi dan mengabaikan perekonomian. Orde Baru mempertegas perbedaan dari rejim sebelumnya yang berkutat pada masalah jargon-jargon revolusioner. Berbeda dari rejim sebelumnya, muara dari semua upaya Orde Baru semata ditujukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan menurutnya persoalan krusial yang dihadapi bangsa ini sejak kemerdekaan adalah kurangnya perhatian pemerintah pada persoalan kesejahteraan yang merupakan janji utama kemerdekaan. Besarnya laju inflasi yang mencapai level 650% yang menjadi keprihatinannya, menjadikan pemerintahan Orde Baru disambut masyarakat dengan penuh harapan.[99]

Keprihatinan utama kalangan militer sejak kemerdekaan terarah pada perkembangan situasi negara yang tidak semakin baik. Kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan harta dan jiwa telah dikhianati politisi sipil dengan berbagai konflik politik, instabilitas keamanan, serta perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin jauh dari harapan. Ketidakmapuan politisi sipil mengakibatkan praktik politik dan pemerintahan yang dinilai mengkhianati pengorbanan para pahlawan, sebab mereka menjadikan pentas institusi politik sebagai wahana perebutan kekuasaan. Sementara Orde baru

---

[98] Komoditas ekspor Indonesia mengalami kemerosotan pasca perang Korea (*Korea Boom*) 1952-1953, dan di sisi lain mengalami pertumbuhan nasionalisme radikal ala Soekarno yang semakin menyisihkan kemapanan managerial dan administratif tokoh-tokoh seperti Hatta. Simak Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 12-3.

[99] Munculnya pemerintahan Orde Baru akan merintis jalan yang serba baru, terutama dalam gaya politik modern. Rencana pokok yang dilemparkan pada rakyat adalah prioritas masalah sandang dan pangan, infrastruktur dan rehabilitasi. Anwar, ***Protes Kaum Muda...***, p. 197.

menempatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai *icon* utamanya. Pembangunan menjadi nilai terpenting tidak saja karena kesesuaiannya dengan kebutuhan saat itu, tapi juga karena keberadaannya terkait erat dengan kepentingan yang kompleks. Pemerintah mengklaim komitmennya pada pembangunan ekonomi didasarkan pada *Tritura* yang melahirkan Orde Baru yang mana butir ketiganya menyebutkan tuntutan perbaikan ekonomi.[100]

Indonesia bersemangat membangun rejim dengan sistem perekonomian sosialis, tetapi sosialisme sendiri tidak mampu menawarkan bentuk yang jelas. Ketidakjelasan itu membuka celah bagi pemegang kebijakan senantiasa memilih model yang disebutnya sebagai sosialisme ala Indonesia. Hal ini dikarenakan tawaran yang ada tidak cukup memuaskan atau tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan. Ketidakberdayaan para pemimpin dalam mengimplementasikan konsep-konsep sosial, politik dan ekonomi Barat diekpresikan dengan menawarkan pola tersendiri, meski miskin evidensi empirik[101].

Keterputusan hubungan Indonesia dengan pusat-pusat komunisme membuka celah hubungan lebih intensif dengan Barat. Hubungan kurang harmonis antara militer dengan komunis membawa konsekwensi minimnya jaringan mereka dengan Blok-Timur, meski mereka pernah sangat berjasa selama proses pembebasan Irian Barat. Barat dan dunia internasional juga tidak memberikan respon berarti dari atas cara-cara penyelesaian yang ditempuh pemerintah Orde Baru dalam masalah komunisme meski dipenuhi pertumpahan darah. Barat tampaknya menyambut baik berakhirnya komunisme di Indonesia, yang diikuti jalinan kerja sama lebih *intens* dengan Barat. Seakan mengulang periode kabinet Natsir,

---

[100] Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 86-7.

[101] Otoriterisme sering menjadi pilihan cara penyelesaian masalah ketika komunikasi politik mengarah pada kecenderungan konflik dan perpecahan, sebagaimana kasus Turki tahun 1980-an. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 35.

para ekonom alumnus Barat kembali mendapatkan tempat penting dalam menentukan jalannya perekonomian di Indonesia.[102]

Orde Baru menempatkan perekonomian sebagai prioritas utama. Sementara pengelolaan politik dan ideologi hanya ditempatkan sebagai infrastruktur penunjang, yang diarahkan sebagai perangkat untuk mempermudah jalannya perbaikan ekonomi. Orde Baru benar-benar memperhitungkan konstelasi global sebagai realitas yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan perekonomian. Kerjasama dengan kreditor luar negeri menjadi pilihan, dan politik konfrontasi dengan asing atau hal-hal yang dianggap terkait dengan imperialisme dipandang tidak memberi manfaat bagi perbaikan ekonomi. Orde Baru kembali melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan kembali masuk anggota PBB, meski tidak demikian halnya dengan Uni Sovyet dan RRC.[103]

Pembangunan kembali ekonomi dibutuhkan penanganan segera dan mengedepan langkah-langkah pragmatis dibanding idealistik. Meski masyarakat masih mengagungkan ideologi, tapi pemerintah menekankan betapa berfikir ideologis hanya memberi kepuasan semu yang tidak memberi arti apapun berarti bilamana terpuruk secara ekonomi. Pragmatisme pemerintahan memandang bahwa perbaikan perekonomian tidak mungkin dilakukan dalam situasi konfliktif, dan pemerintahan yang kuat harus ditunjang kemapanan ekonomi nasional. Karena itu, Orde Baru berupaya keras membangun pemerintahan yang solid, kuat dan efektif, yang mampu membuat pilihan-pilihannya sendiri. [104]

---

[102] Pasca penumpasan PKI hubungan Indonesia dengan Cina dan Uni Sovyet mengalami kebekuan, bahkan diikuti dengan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang menandai perubahan orientasi kebijakan luar Negeri. Jiwandono "Perubahan Persepsi...", p. 66.

[103] Sekalipun demikian, nubungan Indonesia dengan negara-negara besar dengan serangkaian ideologi yang ada di belakangnya cenderung dihadapkan pada ambivalensi. ***Ibid.***, p. 67.

[104] Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 84.

Era Orde Baru menghadapkan pada situasi dilematis. Di satu sisi mayoritas pemimpin di Indonesia menolak liberalisme dengan kapitalismenya. Di sisi lain, alternatif yang lebih konkrit dari sistem sosialis tidak pernah ada. Harapan mewujudkan idealisme kaum sosialis tidak memiliki cukup fasilitas yang memadai. Globalitas perekonomian dunia dan lemahnya infrastruktur perekonomian nasional selama dua dasa warsa sejak kemerdekaan mengharuskan Orde Baru mendorong pertimbangan pragmatis, di antara yang tak mungkin dihindari adalah bekerjasama dengan pusat-pusat kapitalisme global. Orde Baru sukses besar dalam menciptakan stabilitas politik sekalipun bukan berarti konflik nasional sama sekali sirna. Stabilitas sendiri merupakan persoalan krusial yang dihadapi negara-negara dunia ketiga, yang karena kemiskinan dan berbagai keterbelakangan yang menyelubunginya menyebabkan beragam konflik menghinggapi perjalanan negara dan pemerintahan. Sebagaimana pengalaman pemerintahan sebelumnya, dan juga negara-negara ketiga lainnya, negara tidak hanya dihadapkan pada kegoncangan politik, tingginya protes sosial, konflik antara pusat dan daerah, konflik agama, di samping ideologis, SARA dan sebagainya. Meski banyak dikritik oleh kalangan *indonesianist* ataupun ilmuwan politik, stabilitas merupakan prestasi tersendiri bagi Orde Baru.[105]

Berbeda dari pemerintahan sebelumnya, Orde Baru memberi tekanan lebih pada persoalan ekonomi, sebagai realitas yang tak terhindarkan mengingat tuntutan yang sangat mendesak dan darurat. Krisis ekonomi yang akut selama pemerintahan Soekarno menuntut para perancang Orde Baru melakukan reorientasi politik dengan sangat drastis. Dengan nada sinis, sebagian pengamat politik Indonesia menyebut ideologi Orde Baru sebagai *pembangunanisme*, di mana seluruh upaya dan pengorbanan yang diberikan ditujukan untuk satu kepentingan, pembangunan. Dengan mengideologikan

---

[105] Afan Gafar "Demokrasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru" Pengantar dalam Elza Peldi Taher, ***Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru***, (Jakarta: Paramadina, 1994), p. xxiv.

pembangunan peluang ke arah kehidupan yang lebih baik lebih memungkinkan untuk diwujudkan. Orientasi penuh pada pembangunan ditempatkan sebagai pilihan terbaik untuk mewujudkan salah satu tujuan utama kemerdekaan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.[106]

Bagi Orde Baru pembangunan juga sangat esensial dari sisi kepentingan menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan. Ini dikarenakan kemiskinan merupakan bahaya *laten* yang potensial menciptakaan gangguan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hubungan antar negara, dunia dihadapkan pada persoalan kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh antara negara kaya dan miskin. Pemerintah Orde Baru memandang ketimpangan negara kaya dan miskin tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga potensial menimbulkan ketegangan yang dapat mengancam keamanan dunia dan regional. Dalam pembangunan yang menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama, menjadikan ketiadaan demokrasi politik pantas dijadikan satu pengorbanan yang harus dibayarkan terutama dalam menciptakan stabilitas politik demi memuluskan jalannya pembangunan.[107]

Karena itu, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi selalu didengung-dengungkan sebagai dua tujuan terpenting yang harus diraih pemerintahnya. Sedemikian kuatnya harapan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjadikan stabilitas dan ketertiban dijadikan kebutuhan sekaligus tujuan pemerintahan. Schiller, seperti diulas Mas'oed, memberikan komentar bahwa bagi pemerintah Orde Baru pembangunan jauh diprioritaskan sebagai tujuan, meski harus mengorbankan hal lain yang juga menjadi tujuan kemerdekaan, yaitu keadilan. Masalah-masalah sosial politik

---

[106] Nurcholish Madjid "Pembangunan Nasional: Dilema Antara Pertumbuhan dan Keadilan Sosial" dalam ***Ibid.***, p. 5-6.

[107] Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 82-3.

dan kemanusiaan menjadi sebegitu mudah diabaikan dalam pengelolaan negara.[108]

Dalam pengembangan perekonomian, pemerintah Orde Baru berupaya mengadopsi kebijakan ekonomi yang bisa menunjang pertumbuhan cepat dan memanfaatkan sumber daya ekonomi dari luar negeri. Lepasnya Indonesia dari kooptasi negara-negara komunis memungkinkan pemerintah membangun jalinan kerja sama dengan negara-negara kapitalis, Barat. Situasi yang semakin kondusif memungkinkan pemerintahan Orde Baru dapat lebih intensif dalam peningkatan program-program pembangunan secara lebih terencana.

Dengan jalinan kerja sama luar negeri yang kian luas, Orde Baru dapat memulai berbagai program rehabilitasi ekonomi, khususnya untuk mengatasi inflasi, defisit anggaran negara, pengamanan kebutuhan pokok, rehabilitasi sarana-prasarana, ekspor dan peralatan produksi. Stabilitas politik dan pemerintahan serta iklim sosial politik yang kooperatif dengan bangsa-bangsa lain, terutama pemilik modal memungkinkan pemerintah Orde Baru membangun berbagai *bergaining* baru, baik dalam rangka *recheduling* dan keringanan pembayaran hutang luar negeri maupun dalam penyusunan paket-paket pinjaman baru.[109]

Meski dengan berbagai dinamika dan kesulitan yang dihadapi, pertumbuhan perekonomian yang berhasil diwujudkan pemerintah meningkatkan kepercayaan internasional yang memungkinkan dimulainya paket-paket bantuan (pinjaman) ekonomi baru yang lebih besar, mulai dari *Tokyo Club* dan *Paris Club* yang melahirkan *Inter-Governmental Group for Indonesia* (*IGGI*) dan kemudian menjadi CGI. Pemerintah Indonesia juga berkesempatan menjadi anggota badan-badan ekonomi dunia seperti *International Bank of Reconstruction and*

[108] ***Ibid.***, p. 84-5.
[109] Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia VI***, p. 438.

Development (IBRD), World Bank, International Monetery Fund (IMF), Asia Development Bank (ADB) dan sebagainya.[110]

Pada tingkatan mikro ekonomi, pemerintah mencatat kemajuan sekalipun tidak secara signifikan mempengaruhi perkembangan makro ekonomi. Pemerintah leluasa membangun paket-paket program dalam negeri yang ditujukan untuk menunjang pembangunan perekonomian secara cepat. Berbagai program penunjang pengembangan perekonomian dibuat baik yang secara langsung terkait ataupun tidak, di antaranya transmigrasi, Keluarga Berencana (KB), penyelenggaraan Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Bank Desa dan berbagai penyuluhan terhadap petani dan nelayan. Selain untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata dan potensi disintegrasi, transmigrasi cukup efektif sebagai cara mengatasi persoalan lapangan kerja. Perluasan lahan pertanian akibat transmigrasi juga memberikan andil besar dalam meningkatkan produksi pangan di dalam negeri. Produksi hasil-hasil perkebunan juga meningkat signifikan dari Pelita (*Pembangunan Lima Tahun*) ke Pelita berikutnya, yang pada perkembangannya mempengaruhi pula peningkatan komoditas ekspor di luar minyak dan gas. Dalam dalam kurun kurang dari dua puluh tahun Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang sudah mampu melakukan swasembada pangan.[111]

Paket-paket program pemerintah dalam bentuk instruksi presiden (inpres) banyak menyertai berbagai kebijakan percepatan pembangunan, di antara yang paling tampak adalah dalam peningkatan pendidikan dengan didirikannya sekolah-sekolah inpres di berbagai desa di tanah air dan sekolah lanjutan di tingkat kecamatan. Dalam bidang kesehatan, pemerintah membangun pusat-pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang pelayanannya dapat menjangkau ke daerah-daerah terpencil. Di samping itu, infrastruktur perekonomian,

---

[110] ***Ibid.***, p. 439.
[111] ***Ibid.***, p. 446-7.

seperti jalan raya, lapangan terbang dan sarana transportasi laut juga mengalami perkembangan pesat yang memungkinkan mobilitas masyarakat dan perekonomian semakin dinamis. [112]

Pada tingkatan makro ekonomi, strategi pembangunan yang terfokus pada upaya pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang setinggi mungkin menimbulkan ketimpangan dan pondasi ekonomi yang rapuh. Komponen-komponen utama yang menjadi perangkat kebijakan ekonomi, yang meliputi kebijakan moneter, fiskal dan luar negeri diformulasikan sedemikian rupa agar mendorong dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi baik sektor swasta maupun pemerintah. Berbeda dari Sukarno, kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru memperlihatkan kepemihakan yang rendah terhadap kepentingan bangsa. Kebijakan ekonomi Orde Baru tidak diarahkan pada restrukturisasi penguasaan sumber-sumber perekonomian di sektor swasta, sehingga kaum pribumi tetap tidak dapat mendominasi posisi perekonomian dalam seluruh kegiatan ekonomi swasta.[113]

Di awal kekuasaan Orde Baru, 75% sektor ekonomi dikuasai oleh kalangan non-pribumi, disertai dengan hancurnya banyak kegiatan perekonomian pribumi, terutama dalam bidang industri tekstil, batik dan makanan. Persekongkolan antara golongan non-pribumi dan asing dilindungi oleh pemerintah. Kecenderungan persekongkolan atau kolusi antara pejabat dengan pengusaha non-pribumi menimbulkan kecaman sejak kurun awal pemerintahan Orde Baru Penguasaan mayoritas alokasi kredit oleh masyarakat non-pribumi dinilai sebagai satu bentuk pengkhianatan atas kepentingan bangsa, dan berpuncak dengan terjadinya kerusuhan anti-Cina di Bandung awal tahun 1970-an dan anti Asing dengan peristiwa Malari 1974. Pemerintah mengeluarkan serangkaian aturan sebagai respon atas keprihatinan tersebut, dan mulai mengarahkan pada keharusan penyertaan mitra

[112] ***Ibid.***, p. 448.
[113] Arief "Nasionalisme Ekonomi...", p. 10.

usaha dari kalangan pribumi, dan dalam waktu 10 tahun kepemilikan saham oleh kaum pribumi harus mencapai 51 %.[114]

Sebelumnya pemerintah cukup responsif terhadap berbagai masalah yang menjadi sorotan media massa dan berhasil memaksa penguasa untuk mengubah ataupun sekedar mengoreksi berbagai kebijakannya. Merebaknya korupsi pada masa Orde Baru yang melibatkan para perwira militer yang dekat dengan Soeharto, seperti Ibnu Sutowo, Surjo, Sujono Hamardhani, Achmad Tirtosudiro, Alamsjah dan Suhardiman, direspon positif oleh presiden dengan mencopot mereka dari jabatan, meski tidak berarti diajukan ke meja pengadilan. Pemerintah juga membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Hanya saja, dalam praktiknya kerja tim tersebut hanya menghasilkan pengadilan terhadap koruptor-koruptor kecil, sedangkan mereka yang berada di jajaran elit tetap aman.[115]

Setelah semakin tajamnya kritik dan sorotan publik melalui pers dan media massa, maka pemerintah berupaya memperketat pengawasan pada masyarakat yang kritis terhadap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Dengan demikian, pemerintah semakin leluasa menjalankan kebijakan sesuai kehendak sekelompok orang di tingkatan elit. Setelah sebelumnya pengawasan legislatif diperlemah, secara sistematis pemerintah juga memandulkan peran publik dalam mengawasi kebijakan maupun tindakan-tindakannya. Pers dan perguruan tinggi berada diawasi ketat yang secara berangsur dilengkapi dengan seperangkat instrumen kebijakan yang efektif untuk mengendalikan gerak mereka. Demonstrasi mahasiswa yang berkembang menjadi malapetaka dalam peristiwa Malari seolah

---

[114] ***Ibid.***, p. 11-2.

[115] Korupsi sejak awal telah melibatkan orang-orang dekat yang menjadi kepercayaan Soeharto. Harold Crouch, ***Militer dan Politik di Indonesia***, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), p. 329. Sorotan media massa dan mahasiswa bahkan kian mengarah pada kebijakan keluarga Soeharto sendiri, terutama ketika rencana pembuatan Taman Mini Indonesia (TMI) dimulai. Abar "Kebebasan Pers...", p. 26-7.

menjadi puncak pengawasan publik dari kalangan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil pemerintahan.[116]

Termasuk penerapan aturan tentang pembatasan ruang gerak modal golongan non-pribumi, dalam praktiknya masih tetap berlangsung sebagaimana sebelumnya, bahkan kedudukan non-pribumi dan asing semakin kuat dibanding sebelumnya. Perkembangan yang dicatat oleh Pusat Data Bisnis Indonesia satu dasa warsa sesudahnya justeru menunjukkan bahwa penguasaan modal dalam rangka penanaman modal asing memperlihatkan bahwa kaum pribumi menguasai 14,1 %, sementara kalangan non-pribumi dan asing menguasai 85,9 %. Kalaupun kalangan pribumi ada yang menikmati kebijakan tersebut lebih banyak dinikmati kalangan pejabat, kerabat pejabat atau mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan. Sementara modal dalam negeri kalangan pribumi menikmati 27,2 % sementara non-pribumi 72,8%.[117]

Akibat lebih jauh kebijakan ekonomi adalah terjadinya kegagalan dalam menciptakan kelas menengah. Perkembangan perekonomian Indonesia selama satu setengah dasa warsa tidak berhasil menciptakan kelas menengah yang secara signifikan mampu mendorong ke arah demokratisasi. Indonesia termasuk negara yang paling lemban merespon perkembangan internasional ketika gelombang demokrasi ketiga melanda dunia tahun 1980-an. Ketika banyak negara sudah mengalami proses demokratisasi akibat yang dimotori kelas menengah,

---

[116] Pemerintah membalas aksi mahasiswa dengan peraturan Surat Keputusan nomor 028/1974 yang melarang kegiatan politik di perguruan tinggi. Pemerintah menetapkan pimpinan perguruan tinggi sebagai instrumen mengendalikan visi, informasi dan kegiatan kemahasiswaan, sehingga kegiatan mereka hanya terbatas di dalam kampus. Naipospos "Mahasiswa Indonesia ..." dalam ***Prisma***, No. 7 1996, p. 26-7.

[117] Seiring perkembangan perbankan di Indonesia, bank milik pribumi hanya 10 %, demikian halnya dalam pasar modal, penyebaran usaha di berbagai kota di Indonesia. Sritua Arief, ***Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik***, (Jakarta: UI Press, 1990), p. 184.

di Indonesia justeru memasuki situasi sebaliknya, di mana otokrasi semakin kokoh dengan ditetapkannya Asas Tunggal pada kurun yang sama.[118]

Di pihak lain, minimnya kontrol publik atas kebijakan-kebijakan ekonomi terutama dalam hal distribusi modal, menyebabkan perekonomian Indonesia secara pasti dan tidak terkendali berkembang ke arah konglomerasi. Konsentrasi modal dan usaha hanya berada pada sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Seolah mengikuti apa yang diprihatinkan para penyokong Orde Baru atas terkonsentrasinya distribusi kesejahteraan ekonomi dunia pada dua puluh persen negara, hal yang sama terjadi di dalam negeri Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian besar dan mengagetkan negara-negara lain, ternyata hanya pertumbuhan semu, di mana konsentrasi kesejahteraan hanya tertumpuk pada sekelompok orang, yang dikenal sebagai kroni-kroni pemerintah.[119]

Peluang Indonesia saat terjadinya *booming* harga minyak tahun 1970-an menjadi momentum yang terlewatkan oleh lemahnya kontrol publik atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalaupun kontrol publik muncul, pemerintah sangat mampu meredamnya dengan berbagai cara, termasuk memasung media massa dan menutup perhatian masyarakat perguruan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintahan

---

[118] Miriam Budiardjo, ***Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), p. 233-4. Harold Crouch "Pasca Angkatan 1945: Militer dan Politik di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1986, p. 18-9. Kesenjangan ekonomi juga tampak pada kenyataan bahwa 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi menikmati sekitar 41,97 % pendapatan nasional yang hingga 1993 tetap bertahan tanpa perubahan berarti. Afan Gaffar "Civil Society dan Prospeknya di Indonesia" dalam Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 108.

[119] Kebijakan yang memungkinkan etnis Cina dan sekelompok keluarga pejabat menjadi pengusaha besar tersebut melahirkan satu istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Simak Afan Gaffar "Politik Masa Transisi: Menuju Demokratisasi Politik Indonesia" dalam Afan Gaffar, ***Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 306-12.

Orde Baru juga tak dapat menghindarkan adanya korban di kalangan rakyat, baik harta maupun nyawanya. Rendahnya transparansi dan buruknya birokrasi pemerintahan mengakibatkan rakyat harus menjadi korban penggusuran maupun perampasan tanah dalam rangka berdirinya proyek-proyek besar. [120]

Rendahnya kadar komitmen para birokrat atas perlunya restrukturisasi politik dan penguasaan sumber-sumebr ekonomi dalam ekonomi swasta menunjukan kesan kuat bahwa pada dasarnya mereka telah jauh kehilangan kepedulian pada nasib dan masa depan mayoritas masyarakat bangsanya sendiri. Di tengah perkembangan kehidupan sosial yang semakin hedonistik, negara seolah hanya menjadi aset sebagai kecil masyarakat bangsa, termasuk keluarga dan kerabatnya, yang secara kebetulan memegang kedudukan dalam pemerintahan. Tidak ada kemauan yang signifikan untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai fundamen kelembagaan masyarakat ataupun mekanisme interaksi di antara aktor-aktor ekonomi, terutama antara yang kuat dan lemah. Karena itu, banyak pengamat yang menilai dialektika perekonomian di Indonesia mengulang kembali struktur perekonomian masa kolonial Belanda.[121]

[120] Crouch "Pasca Angkatan 45...", 17.

[121] Nasib masyarakat pribumi selah kembali memperoleh julukan *de natie van coolies*, yang ironisnya terjajah oleh bangsa sendiri. Arief "Nasionalisme Ekonomi...", p. 14-5.

PERKEMBANGAN GLOBAL DAN JATUHNYA ORDE BARU

A. Runtuhnya Komunisme dan Ekspansi Liberal

Selama kurun pemerintahan Orde Baru di Indonesia, dunia mengalami beberapa fase perkembangan penting yang tidak dapat diabaikan peran dan pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan domestik. Setelah revolusi Islam yang mengejutkan dunia pada pertengahan masa pemerintahan Orde Baru, pada dasa warsa terakhir pentas politik internasional dikejutkan kembali oleh jatuhnya rejim-rejim otokratik, khususnya yang berhaluan komunis. Peristiwa paling monumental adalah bubarnya kampium komunisme, Uni Sovyet dan pakta pertahanannya, Pakta Warsawa. Bubarnya Uni Sovyet menandai suatu fase perubahan besar dalam konstelasi global, di mana krisis perang dingin yang telah mulai mereda beberapa tahun sebelumnya dan ancaman ekspansi komunisme yang pernah sangat menghantui masyarakat internasional, benar-benar hilang dari kekhawatiran banyak negara.[1]

---

[1] Satu dasa warsa sebelumnya, runtuhnya Uni Sovyet tidak pernah terbayangkan akan menjadi kenyataan. Karena itu, fenomena bubarnya Uni Sovyet dan Pakta

Bubarnya Uni Sovyet dan pakta pertahanannya secara langsung ataupun tidak merupakan kemenangan Blok-Barat dalam persaingan ideologi dan aliansi kekuatan militer dengan ancaman perang nuklirnya yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat dunia. Amerika menyadari benar bahwa kurun sejarah pasca runtuhnya Uni Sovyet menjadi kesempatan baginya untuk benar-benar mendominasi percaturan politik internasional, karena telah menempatkannya sebagai satu-satunya adi-daya yang tersisa. Karena itu, Reagan dengan penuh harapan memproklamirkan keharusan adanya satu tata dunia baru (*the new world order*). Sejak saat itu, wacana globalisme mengemuka meski dengan intensitas repon dan visi pemahaman yang masih berbeda-beda antar setiap komunitas bangsa.[2]

Globalisme mengemuka sebagai pandangan dan cara hidup yang menempatkan keterbukaan konstelasi hubungan kemanusiaan yang menyingkirkan batas teritorial negara. Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi memudahkan setiap manusia terhubung dengan manusia lain secara cepat. Arus barang, jasa dan informasi secara bebas dapat keluar dan masuk antar negara secara lebih dinamis. Globalisme jarang ditempatkan dalam konteks pemahaman sebagaimana Fukuyama, yaitu kemenangan Barat. Negara-negara maju memiliki peran besar dalam meniupkan paham tersebut, karena kemajuan yang dicapai telah memungkinkannya menikmati perluasan akses untuk mendominasi perekonomian pada negara-negara yang sebelumnya relatif tertutup dari akses luar. Isu-isu yang muncul efektif sebagai instrumen pemaksa untuk membuka akses politik ekonomi pada negara-negara ketiga.[3]

Warsawa benar-benar peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Fukuyama, ***The End of History...***, p. 28.

[2] Berakhirnya perang dingin berdampak positif terhadap semaraknya gagasan dan gerakan demokratisasi di berbagai negara. Suhelmi, ***Pemikiran Politik Barat***, p. 295.

[3] Parsudi Suparlan "Globalisasi, Hak Asasi dan Demokrasi Indonesia" dalam ***Analisis CSIS***, No. 3, 1996, p. 236.

Runtuhnya komunisme yang ditandai dengan bubarnya Uni Sovyet dan Pakta Warsawa menjadi momentum perubahan besar iklim sosial politik global yang secara simultan juga berdampak besar pada perubahan atmosfir sosial politik internasional dan domestik. Banyak rejim otokratik kehilangan legitimasi wacana ideologis dan dukungan sosial politik dari dalam negeri maupun masyarakat internasional. Amerika Serikat dan Barat menjadi kekuatan tunggal yang memiliki otoritas memaksakan model peradaban liberalnya sebagai satu-satunya yang harus diterima. Atmosfir post-ideologis yang diprediksi Bell akan berlangsung tahun 1950-1960-an tampaknya baru mulai menampakkan bentuknya yang semakin jelas sekitar empat dasa warsa sesudahnya dengan menempatkan kapitalisme dan liberalisme sebagai ideologi dominan.[4]

Runtuhnya komunisme internasional sekaligus menandai kemenangan liberalisme Barat. Barat menjadi satu-satunya penguasa dunia yang dapat menentukan arah sejarah tanpa satu kekuatan berarti yang mampu memberikan *counter opinion*. Imperasi nilai-nilai global dan tekanan Barat semakin tampak dalam berbagai bidang, sosial, politik, ideologi dan bahkan keamanan. Tata nilai Barat harus diterima setiap negara dan menempatkannya sebagai tata nilai universal. Dalam kurun waktu kurang dari dua dasa warsa isu-isu nasionalisme berikut heroisme revolusioner yang menyertainya nyaris sirna tanpa bekas, digantikan isu-isu kemanusiaan baru. Sejak keruntuhan Uni Sovyet, Barat kembali tampil sebagai pemuka peradaban dengan wajah paling manusiawi, sebagai pelopor pembelaan masalah-masalah kemanusiaan. Untuk kesekian kalinya Barat mampu membalikkan posisinya kembali sebagai panutan seluruh bangsa di dunia. Dosa-dosa kebengisan Barat selama masa kolonial yang terukir ratusan tahun seolah terhapus bersih dari catatan sejarah, digantikan lembaran-lembaran dosa kaum nasionalis revolusioner yang gagal mensejahterakan negerinya sendiri. Kecuali gerakan Islam yang mulai bangkit di berbagai negara, sekalipun

[4] Fukuyama, ***The End of History...***, p. 443-4.

dengan beragam alasan, nyaris tidak satupun kekuatan muncul sekedar mengajukan wacana alternatif.[5]

Secara menglobal Barat berkesempatan membangun satu model peradaban yang monolitik dengan menempatkan liberalisme sebagai pilarnya, terutama setelah Amerika Serikat mencanangkan proyek perluasan demokrasi (*enlargement of democracy*). Berbagai kampanye dan dukungan terhadap kegiatan yang mendorong, terutama demokratisasi dan penegakan HAM melalui tangan-tangan mereka dalam bentuk penerbitan ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat dilakukan. Data-data statistik dan kriteria normatif tingkat kedemokratisan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap negara diindekskan dan dirilis sebagai bentuk penilaian tingkat kemanusiawian suatu negara. Demokrasi dan HAM secara langsung ataupun tidak telah menjadi norma kemanusiaan baru yang cepat atau lambat harus dipatuhi setiap masyarakat bangsa.[6]

Perkembangan mutakhir negara maju memuncul berbagai isu kemanusiaan baru dengan berbagai jargon dan idiom-idiomnya. Wacana baru tersebut menggeser wacana nasionalisme dan kemerdekaan. Wacana tersebut menghapus isu-isu ancaman neo-kolonialisme dan imperialisme yang banyak digemakan berbagai negara baru pasca perang, sekalipun dalam bentuk lain dan lebih hegemonik telah di depan mata. Di tengah kesulitan ekonomi yang sebagian berdampak pula pada merebaknya krisis politik, negara-negara berkembang harus merespon isu-isu humanitas baru yang

---

[5] Setiap tahun Fee House (FH) menggunakan sebagian unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukur tingkat kedemokratisan negara-negara di dunia. Variabel kebebasan sipil dan pertimbangan akan hak-hak politik digunakan untuk mengukur derajad kebebasan yang merupakan elemen dasar demokrasi. Suyatno, ***Menjelajahi Demokrasi***, p. 49.

[6] Demokrasi diakui sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan pemuasan kebutuhan imateriil. Suhelmi, ***Pemikiran Politik Barat...***, p. 296.

untuk kesekian kalinya lahir dan berkembang dari Barat, seperti globalisme, anti perang, Hak Asasi Manusia, emansipasi wanita, perlindungan anak, perlindungan buruh, teknologisasi dan lingkungan hidup.[7]

Negara-negara maju dengan kekuatan perekonomiannya secara korporatif mampu membangun jaringan kerjasama permodalan berskala internasional yang menjadi tumpuan negara-negara berkembang dalam permodalan. Mereka tidak jarang dijadikan bantuan-bantuan ekonomi yang sebenarnya berupa hutang sebagai instrumen penekan negara-negara berkembang untuk semakin mengikuti berbagai perkembangan tradisi sosial politik dan kemanusiaan mereka yang semakin terbuka. Bantuan-bantuan ekonomi seringkali dikaitkan dengan tuntutan demokratisasi, peningkatan penghargaan pada HAM, perhatian kesejahteraan buruh dan berbagai tuntutan moral lainnya. Sekalipun dengan berbagai celah dan ketimpangan yang dihadapi, banyak negara tak dapat menghindarkan diri dari keharusan mengikuti tuntutan negara maju yang diatasnamakan tuntutan kemanusiaan global. [8]

Sebenarnya sejak dasa warsa 1970-an ekonomi-politik global mengalami perubahan besar, terutama oleh perubahan pengorganisasian produksi dunia. Sebagai akibat perubahan lingkup kegiatan perusahaan multinasional, di mana produksi di luar negara perusahaan-perusahaan multinasional lebih besar dari total nilai barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara, dengan mengecualikan blok-sosialis. Kemampuan perusahaan multinasional

---

[7] Perhatian dunia dialihkan dari militerisme, perang konvensional, persaingan senjata dan oertarungan ideologis kepada persoalan demokratisasi dan HAM, sebagaimana kasus Tiananmen dan Dili 1991. Suhelmi, ***Pemikiran Politik Barat***, p. 295.

[8] Dalam masa tenang, negara-negara Asia mempunyai kekuatan politik, tetapi begitu krisis menimpa mereka harus menyerah pada keputusan-keputusan korporasi pemodal dari negara maju dengan berbagai persyaratan yang terkait ataupun tidak dengan kepentingan modal itu sendiri. Sindhunata "Dilema Globalisasi", p. 12.

melakukan globalisasi produksi tersebut dimungkinkan oleh perubahan dalam sektor finansial dunia. Di samping itu, juga terjadi perubahan dan pembesaran finansial dunia, di mana terjadi perpindahan surplus finansial yang sangat besar ke tangan negara Arab, khususnya, sesudah negara-negara penghasil minyak menaikkan harga pada tahun 1970-an. Mereka memperoleh penghasilan jauh melampaui kebutuhan pembiayaan pembangunan dalam negeri. Cadangan finansial yang merupakan cadangan finansial terbesar dunia, sebagian terserap oleh pasar modal internasional, sehingga melahirkan fenomena petro-dollar.[9]

Petro-dollar menyebabkan sebagian negara, termasuk Indonesia memperoleh manfaat langsung dari *booming* harga minyak tersebut, sementara yang lain hanya memperoleh manfaat secara tidak langsung, yaitu negara-negara yang dikenal dengan negara industri baru (*New Industrial Country*). Potensi ekonomi yang meyakinkan dan mampu memanfaatkan kredit dengan bunga besar menyebabkan negara-negara industri baru banyak memperoleh pembiayaan investasi dalam negeri dari pasar uang petro-dollar. Dunia ketiga yang mampu memanfaatkan kenaikan harga minyak mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara yang terlalu miskin dan tidak mampu meminjam semakin sengsara. Pendapatan perkapita di negara-negara pengekspor minyak bahkan cenderung lebih tinggi dibanding negara industri maju. Sebagian negara industri baru bahkan memiliki struktur produksi yang mengungguli negara maju, sekalipun sebagian besar tetap jatuh pada kemiskinan. Pertumbuhan yang cepat pada negara industri baru menjadikannya semakin iintensif terlibat dalam proses produksi dunia yang mendorong semakin intensifnya keterlibatan modal internasional yang dikendalikan perusahaan multinasional di negara dunia ketiga.[10]

---

[9] Mohtar Mas'oed "Globalisasi dan Pengembangan Kekuatan Ketiga" dalam ***Bangkit***, No, 4, 1993, p. 36.

[10] ***Ibid.***, p. 38.

Ketika terjadi resesi dunia yang parah tahun 1980-an, banyak negara dunia ketiga yang sebelumnya memperoleh manfaat dari penghasilan minyak mengalami kesulitan besar, bahkan sebagian menderita krisis fiskal. Berbagai strategi dilakukan untuk memperkuat peranan negara dalam menghadapi percaturan global, tetapi pada umumnya mengalami kegagalan karena tidak adanya dukungan komunitas bisnis dan birokrat internasional. Komunitas bisnis dan birokrat internasional secara mondial menganut ideologi-politik neo-konservatisme, yang menuntut pengurangan peran negara dalam alokasi sumber daya, proses produksi dan distribusi, pro-moneterisme, integrasi dalam kapitalisme global secara intensif dan menggalakkan aktor swasta dengan diversifikasi tingkat tinggi.[11]

Akibatnya, secara hampir bersamaan mayoritas dunia ketiga menghadapi kesulitan ekonomi, termasuk juga Indonesia yang pernah turut menikmati *booming* harga minyak tahun 1970-an. Setelah komoditas andalan dalam negeri tidak lagi menjadi jaminan, mereka sulit bangkit dari keterpurukan dan jatuh pada jeratan hutang. Dalam berbagai hal negara-negara berkembang gagal mengejar ketertinggalannya dari negara maju, khsusunya dalam perekonomian bahkan cenderung berlomba meraih belas kasihan negara maju dalam rangka meningkatkan jumlah pinjaman yang kian menjerat perkembangan negaranya. Untuk itu mereka tidak mempunyai pilihan selain tunduk dan patuh pada segala persyaratan yang diajukan koprporasi negara-negara donor. Semangat dependensi negara atau otonomi nasional telah berubah menjadi ketergantungan pada negara-negara maju yang umumnya bekas penjajah, yang berpretensi kuat menegakkan kembali neo-imperialisme global.[12]

[11] ***Ibid.***, p. 39.

[12] Bila ukuran kebebasan nasional adalah kemampuan membuat keputusan sendiri bebas dari pengaruh asing, maka semakin nampak bahwa pemerintah menghadapi kesulitan besar untuk bersikap otonom. Mohtar Mas'oed "Dilema-dilema Pembangunan Politik Indonesia" dalam ***Prospektif***, No. 5, 1993, p. 134.

Konsentrasi peran sosial, politik dan perekonomian yang terpusat pada para pengelola negara menjadikan mereka gagal dalam mengembangkan kekuatan rakyat sebagaimana yang umumnya menjadi prasyarat untuk bertahan dalam pertarungan global. Ancaman imperialisme negara maju, khususnya Eropa, menjadikan negara terlalu lemah oleh minimnya dukungan kemampuan rakyat setelah seluruh potensi dan kemampuan negara melemah untuk secara sendirian menghadapinya. Bahkan banyak pemerintahan tidak berdaya mempertahankan dirinya sendiri di hadapan ketidakpuasan rakyat di dalam negeri.[13]

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang menopang kekuasaan lebih besar pada media massa membuka rembesan visi global yang menuntut kebebasan di berbagai bidang tak mungkin dibendung oleh negara manapun. Arus informasi yang nyaris tak terbendung membuat negara manapun tidak lagi mampu membentengi masyarakatnya dari pengaruh luar. Dilema antara merespon tuntutan global yang menuntut liberalisasi di satu sisi dan lemahnya infrastruktur dalam negeri yang berhasil dibangun, termasuk kemampuan mengurangi tekanan masyarakatnya sendiri, di sisi lain, menyebabkan setiap negara menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri sekaligus. Hanya intensitas tekanan dan daya tahan sebuah rejim yang menentukan berapa lama pemerintahan otoriter bertahan.[14]

Pemerintah kehilangan otoritas untuk menentukan jalanya negara lepas dari intervensi asing. Negara-negara maju, di bawah komando Amerika Serikat, menjadi kian leluasa memaksakan ideologi liberalnya pada berbagai negara melalui institusi-institusi

---

[13] Dua ratus konglomerat yang menikmati 58 % GDP, 24 % di tangan pemerintah, Sementara rakyat hanya menikmati 8 %. Daniel Dhakidae "The Long and Winding Road: Constraints to Democracy in Indonesian Politics" dalam Liddle, ed., ***Crafting Indonesian Democracy***, p. 70-1.

[14] Berbagai faktor yang kompleks mempengaruhi turunnya Soeharto 21 Mei 1998. Simak Dhakidae "The Long Winding...", p. 71-2.

internasional, jalinan hubungan-hubungan bilateral dan multilateral. Badan-badan dunia, termasuk PBB bahkan sangat ditentukan oleh kepentingan Barat. Badan-badan dunia bahkan berkembang menjadi seakan mengatasi negara manapun, di bawah kendali dan kepentingan Barat. Negara-negara berkembang tidak mempunyai pilihan selain meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang politik, ekonomi maupun militer maupun terbentuknya badan-badan dunia yang pada dasarnya sudah melampaui batas nasionalismenya.[15]

Meski tidak bersamaan dan belum seluruhnya, tapi dalam kurun sekitar satu dasa warsa sejak tahun 1990-an tercatat banyak rejim otokratik berupaya mengapresiasi demokrasi baik dengan cara damai maupun melalui proses kejatuhan. Situasi-situasi pasca kediktatoran telah mereduksi ketajaman friksi yang ditimbulkan oleh politik aliran berbasis ideologis. Tumpulnya konflik ideologis dan keterbukaan informasi memungkinkan pelaku-pelaku politik, terutama pada tingkatan akar rumput, menyikapi partai politik, ideologi dan konstelasi politik dengan komunikasi rasional. Peningkatan perhatian pada pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi yang kian rumit, serta pertimbangan realistis atas pengalaman konflik berkepanjangan menjadikan tumpuan pada suatu partai politik tertentu, semakin berkurang. Masyarakat terseret pada pola hidup yang semakin hedonis, di mana perbaikan tatanan sosial politik lebih diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dibanding pertimbangan-pertimbangan primordial.[16]

---

[15] Diplomasi *low profile* Indonesia menyebabkan masalah Timor-Timur tidak pernah dicoret dari daftar *nonself-governing territories* PBB. Mas'oed "Dilema-dilema Pembangunan...", p. 135.

[16] Sekalipun mencerminkan pola umum, perkembangan ke arah demokratisasi selalu saja memunculkan fenomena sebaliknya. Kasus naiknya Musharraf di Pakistan, juga hal yang hampir sama di Suriname, Sudan dan Nigeria memperlihatkan fenomena sebaliknya. Suyatno, ***Menjelajahi Demokrasi***, p. 92-3.

B. LSM dan Tekanan Internasional

Dua dasa warsa sejak tegaknya Orde Baru, Indonesia dimarakkan oleh perkembangan LSM. Sejak pengebirian hampir semua organisasi politik, banyak aktivis menggunakan LSM untuk membina basis kelembagaan dan perjuangan. Mekanisme kegiatan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari kajian, penelitian, bantuan hukum, gender, pendidikan, kesehatan dan pembangunan masyarakat. Lemahnya kinerja lembaga-lembaga politik formal, partai dan legislatif, mendorong berkembangnya organisasi-organisasi non-pemerintah yang dikenal dengan NGO (*Non-Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Mereka mengisi ruang publik, mengambil peran berbagai lembaga politik formal dan mempengaruhi proses pembentukan kebijakan. Perkembangan politik kemasyarakat ini kemudian memunculkan istilah revolusi partisipasi.[17]

LSM pada umumnya bersifat homogen yang terbentuk sebagai wujud komitmen sejumlah warga negara yang peduli terhadap berbagai bidang persoalan, baik sosial, politik maupun ekonomi. LSM berperan penting bagi beragam komunitas yang memerlukan mediasi ataupun advokasi atas berbagai masalah yang tengah dihadapi berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah atau realitas sosial politik dan kemasyarakatan yang memerlukan pemberdayaan. Di sisi lain, tidak jarang mereka berperan politis sebagai kelompok penekan (*pressure group*) atas nama tuntutan moral dan pembelaan pelbagai

[17] Bambang Cipto mencatat bahwa pada tahun-tahun akhir pemerintahan Orde Baru muncul fenomena di mana organisasi masyarakat jauh lebih aktif melibatkan diri dalam arena politik nasional. Dengan gaya masing-masing mereka mampu menyaingi partai politik. Bambang Cipto "*Revolusi Partisipasi* dan Masa Depan Partai Politik di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 8, 1996, p. 17.

kepentingan masyarakat. Karena itu, peran LSM seringkali dipilahkan menjadi dua, yaitu di bidang politik dan non-politik.[18]

Kebutuhan akan kehadiran LSM diimbangi pemerintah dengan menyeponsori berdirinya lembaga-lembaga sejenis, melengkapi keberadaan lembaga korporatis yang telah dibangun untuk menopang tegaknya rejim Orde Baru. Berdirinya LSM *plat merah* dikendalikan melalui berbagai wadah organisasi induk, di antaranya tampak pada penyatuan berbagai organisasi kepemudaan melalui KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Hanya saja, sama halnya dengan partai-partai dan organisasi korporatis lainnya, organisasi semacam itu sering kali tidak memuaskan banyak kalangan, dikarenakan sepak terjangnya yang cenderung membenarkan alur kebijakan pemerintah sendiri dan bukan memihak kepentingan anggota ataupun masyarakat. Akibatnya, konsentrasi pengurus lebih menonjol dalam pergulatan memperebutkan posisi strategis dalam organisasi, yang memungkinkan seseorang memperoleh akses jabatan atau fasilitas-fasilitas khusus.[19]

Peran LSM yang lebih independen ditunjukkan oleh organisasi sosial keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyyah. Sejak awal keduanya memfokuskan pada urusan keagamaan tetapi turut mempengaruhi pengambilan berbagai kebijakan pemerintah. Sebagaimana LSM umumnya, Muhammadiyyah dan NU tidak dapat diabaikan perannya dalam pemberdayaan sosial. Bahkan LSM pada umumnya tidak lebih berpengaruh dibanding kedua organisasi tersebut. Organisasi-organisasi keagamaan tersebut banyak memainkan peran sebagai sebentuk *civil society*, yang secara dinamis

[18] Afan Gaffar "NGO/LSM,Ruang Publik dan Civil Society" dalam Afan Gaffar, ***Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi***, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2004), p. 202-3.

[19] NGO yang lebih mencerminkan kecenderungan korporatis sering kali disebut sebagai NGO *Plat Merat*, di mana tokoh-tokohnya sering memperoleh *privillage* dalam pemerintahan, baik sekedar anggota parlemen atau bahkan dalam jajaran birokrasi. ***Ibid.***, p. 206.

diwarnai oleh hubungan yang harmonis, dan tidak jarang ketegangan, dengan pemerintah. Kedudukannya sebagai organisasi non-politis menuntut keharusan menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi dengan mengedepankan hubungan baik. Karena itu, sebagai pendorong akivitas-aktivitas politik LSM keagamaan cenderung tidak begitu spesifik dan menonjol.[20]

Keberadaan NGO atau LSM di Indonesia sering disebut sebagai pilar penting dalam penegakkan *civil society*, karena biasanya ditunjang oleh organisasi yang efisien, kreatif, inovatif serta lebih mampu menyesuaikan dengan perubahan. Mereka juga terampil dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada tataran *grassroot*. Hanya saja berbeda dengan organisasi sosial keagamaan, LSM konvesional lebih cenderung berskala kecil dan daya tahan gagasan-gagasan maupun program-programnya sebagian tidak diorientasikan untuk proyek jangka panjang. Hal ini dikarenakan watak umum dari LSM memang tidak ditunjang oleh dukungan basis tradisional. Karena itu, sangat boleh jadi LSM hanya kumpulan beberapa orang saja, yang mungkin hanya akan bertahan untuk kepentingan dalam beberapa waktu, namun peran dan dampaknya

[20] NGOs in General are not developed on a good and solid mechanism. They are not very strong in coordinating and controlling the programs that had been promoted continously over periods of time. Muhammadiyyah and Nahdlatul Ulama, which have massive members and have central board of organization, to some extent, can avoid thesi difficulties. Amin Abdullah "Muhammadiyyah's Experience in Promoting A Civil Society in The Eve of The 21st Century" dalam ***Profetika, Jurnal Studi Islam***, Vol 2 No 1, Januari 2000, p. 29. Secara unik, NU turut andil membumbungkan karier politik Soeharto, tetapi sesudahnya sering kali diwarnai dikap perlawanan terhadap berbagai kebijakan Orde Baru. Simak Juga Feillard, ***NU vis a vis Negara...***, p. 105-7. Amin Rais menciptakan suatu istilah *High Politics* dalam konteks hubungan organisasi massa dengan pemerintah, sebagai kebalikan *Low Politics*, yaitu bilamana kecenderungan Ormas hanya berorientasi pada jatah kursi DPR. Simak M. Amin Rais, ***Moralitas Politik Muhammadiyah***, (Yogyakarta: Dinamika, 1995), p. 43-4.

seringkali tidak dapat diabaikan dalam menentukan perubahan berbagai kebijakan publik bahkan eksistensi sebuah pemerintahan.[21]

Menurut Corrothers dan Suryatna, sebagaimana dikutip Gaffar, setidaknya LSM dapat memainkan empat peran penting dalam sebuah negara. *Pertama*, sebagai katalisator perubahan sistem yang dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat dan mendorong inisiatif masyarakat. *Kedua*, melakukan monitoring pelaksanaan sistem dan implementasi pola penyelenggaraan negara, yang bila perlu dengan melakukan protes. *Ketiga*, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan, karena warga negara tidak jarang menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. *Keempat*, memberikan layanan langsung kepada masyarakat bilamana lapangan tugasnya memang menuntut demikian.[22]

Melalui LSM dan kegiatan-kegiatan di luar institusi pemerintahan lainnya, nilai-nilai dan perkembangan global dapat merembes dan mempengaruhi alam pikiran masyarakat dalam negeri. Perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan jaringan pendidikan yang semakin terbuka memudahkan masyarakat mengakses informasi bahkan jaringan kerja dengan dunia luar tanpa terlalu banyak kontrol dari aparat pemerintah yang rata-rata lamban mengapresiasi kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini memungkinkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di dalam

---

[21] Pada kasus Amerika, partai politik yang lemah dipaksa bersaing dengan kekuatan politik baru yang lebih *flexible* dan *capable* oleh dukungan sumber dana dan daya, untuk menyalurkan kepentingan masyarakat. Cipto "Revolusi Partisipasi...", p. 18. Simak juga, Peter Hannam "Pengembangan Bentuk pembangunan Alternatif: Pengalaman LSM di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 4, 1988, p. 8-9. Simak juga, Kartjono "Demokratisasi di Tingkat *Grassroots*: Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat" dalam ***Prisma***, No. 6, 1988, p. 33-4.

[22] Gaffar "NGO/LSM...", p. 203-4.

negeri berkembang, bahkan sebagian dengan dukungan konsep maupun dana dari luar negeri. Di sisi lain, perlindungan masyarakat internasional atas peran kemasyarakatan mereka menjadikan pemerintah semakin kehilangan otoritas untuk melakukan kontrol seketat kegiatan politik formal. Pengawasan tokoh-tokoh masyarakat yang sebelumnya dikhawatirkan memunculkan gerakan politik yang tidak sejalan dengan pemerintah menjadi tidak efektif, karena peran mereka diambilalih kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang umumnya terdiri dari kaum muda terdidik dan terlepas dari ikatan ketokohan politik tradisional.[23]

Pola-pola gerakan LSM cukup beragam, di mana sebagian memfokuskan pada masalah-masalah sosial budaya dan tidak secara langsung terkait dengan politik, tapi sebagian lain tidak lepas dari isu-isu yang langsung bersinggungan dengan politik. Gerakan pro-demokrasi juga sering mengambil bentuk LSM yang mulai melakukan berbagai gerakan yang mengarah pada kajian lebih kritis terhadap realitas politik dalam negeri yang menjadi cikal bakal meningkatnya tuntutan demokratisasi. Setelah tradisi kritis mahasiswa mengalami stagnasi dan digantikan gerakan-gerakan moral, isu-isu yang diangkat LSM menjadi alternatif menarik untuk diapresiasi.[24]

Dimulai dari isu-isu partikular, seperti penggusuran, perburuhan, kekerasan oleh aparat keamanan, ketidakadilan hukum

---

[23] Sebagian besar mencatat bahwa mayoritas pengelola LSM terdiri dari lulusa perguruan tinggi, baik strata satu (S1), S2 maupun S3. Riswanda Imawan "Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan di Indonesia" dalam Riza Noer Arfani ed., ***Demokrasi Indonesia Kontemporer***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 173. Sebagai salah satu aktor perubahan sosial NGO mampu menggalang dukungan tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga dari publik internasional sebagai aktor lain. Simak Mas'oed, ***Negara, Kapital...***, p. 9.

[24] Basis gerakan pemuda dan kemasyarakatan umumnya terwakili dalam empat jenis pengelolmpokan: pertama, kegiatan mahasiswa intra kampus; organisasi mahasiswa ekstra-kampus; organisasi profesi dan kelompok-kelompok studi. Nur Iman Subono dan Ade Armando "Angkatan Muda dan Masalah Kenegaraan" dalam ***Prisma***, No. 6, 1987, p. 24-5.

dan gender hingga intervensi politik, fokus perhatian publik semakin mengerucut pada mempertanyakan keabsahan sistem sosial politik yang sedang berlangsung. Demonstrasi ratusan ribu mahasiswa di Jakarta sebelum jatuhnya rejim Orde Baru hanyalah kulminasi dari gerakan-gerakan LSM dan masyarakat di berbagai demonstrasi yang mulai marak beberapa waktu sebelumnya. Demonstrasi buruh di berbagai daerah, termasuk kasus Marsinah, mencuatnya perlawanan rakyat atas penggusuran tanah di Kedung Ombo atau perlawanan masyarakat dalam peristiwa Haur Koneng di Madura, meski sifatnya partikular dan segera dapat ditumpas, tapi secara simultan telah memberi andil dalam mendorong restrukturisasi politik secara total. Gelombang ketidakpuasan terhadap sistem yang sedang berjalan mulai menggejala dan meluas akibat peran aktor-aktor LSM dalam memberikan pembelaan ataupun mendorong masyarakat untuk memperjuangkan haknya.[25]

Gelombang ketidakpuasan mendapat lahan persemaian bersamaan dengan semakin intensifnya gerakan LSM dalam mengkritisi dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang. Secara tidak langsung dunia akademik juga mempunyai andil cukup signifikan, terutama dalam memberikan *reasoning* yang kuat bagi proses demokratisasi internasional. Kajian para pemerhati masalah Indonesia dari tokoh-tokoh lembaga pendidikan tinggi di luar negeri tampak mempengaruhi diskusi-diskusi akademik di dalam negeri. Maraknya diskusi yang mengangkat isu demokrasi, *civil society*, HAM, gender dan isu kemanusiaan lainnya sering kali mengarah pada tinjauan kritis atas situasi sosial politik aktual di dalam negeri. Hal ini juga dapat dicermati pada pemikiran dan isu-isu yang diangkat kam

[25] Ketika terjadi kebuntuan politik, kalangan muda dan kelompok-kelompok kajian memilih membangun basis dukungan dengan jalan mempengaruhi kesadaran kritis masyarakat, dengan mengadakan aksi-aksi yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Hal ini dikarenakan kebangkitan kepercayaan akan kemandirian rakyat kecil merupakan hal terpenting yang harus dibangun. Simak kembali Subono dan Armando "Angkatan Muda...", p. 25-6.

intelektual Indonesia yang kemudian mempelopori gerakan reformasi menampakkan pengaruh pemikiran-pemikiran para pengkaji masalah Indonesia dari kalangan Barat.[26]

Lembaga-lembaga swadaya seperti YLBHI, Walhi, YLKI, dan yang muncul kemudian TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan KONTRAS sering kali memperlihatkan kecenderungan berhadap-hadapan dengan pemerintah, dengan memberikan bantuan hukum, advokasi ataupun pendampingan terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara. Bahkan CSIS dan LP3ES yang pernah bekerja sama dengan pemerintah pada awal Orde Baru akhirnya juga harus melapaskan ikatan, karena adanya ketidaksesuaian antara tuntutan politik bidang garap konseptual mereka. Di luar lembaga-lembaga tersebut masih terdapat kelompok-kelompok studi dan gerakan terutama di kalangan akademisi, termasuk mahasiswa yang diskusi-diskusinya semakin mengarah pada pengembangan sikap kritis pada pemerintah. Fenomena tersebut bahkan muncul pada ICMI, lembaga yang dimotori tokoh sentral Orde Baru, Soeharto dan Habibie.[27]

LSM memperlihatkan satu bentuk perkembangan *civil society* yang dapat menggantikan organisasi-organisasi politik yang telah ada sebelumnya, yang rata-rata mengambil posisi politik yang kurang tegas pada pemerintah. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi berbagai organisasi sosial politik, terutama keagamaan Islam, selama

---

[26] Pada kurun akhir Orde Baru, analisis dan pemikiran pengamat asing lebih didengar kalangan akademisi Indonesia dibanding komentar tokoh-tokoh nasional, bahkan berakibat pada pencekalan beberapa di antara mereka. Karya-karya tokoh-tokoh nasional, seperti Amin Rais yang di kemudian hari mempelopori gerakan reformasi juga tidak lepas dari pengaruh analisis dan pemikiran tokoh seperti Liddle, Emmerson, D. Jackson atau Ben Anderson. Penulis.

[27] Emha Ainun Nadjib salah seorang pengurus ICMI meminta agar ICMI menyeponsori konferensi kecil tentang masalah Kedung Ombo, sebuah kasus yang sangat sensitif bagi Orde Baru. Demikian juga dengan seminar tentang HAM di sekretariat ICMI Jakarta, yang berujung ketegangan karena kritik yang ditujukan pada Soeharto. Hefner "Islam, State and Civil Society...", p. 29. Simak juga Gaffar "NGO/LSM...", p. 133.

pemerintahan Orde Baru memaksa mereka mengambil posisi antara ketegangan dan kooperatif, dan hanya sesekali melakukan perlawanan ketika timbul kebijakan yang secara mencolok bertentangan dengan idealisme dan kepentingan organisasinya.[28] Sementara itu gerakan LSM mempunyai andil dalam melakukan sosialisasi pemahaman atas situasi secara lebih kritis kepada masyarakat luas. LSM juga mempelopori terbentuknya kelompok-kelompok yang kemudian menggerakan massa untuk turun ke jalan menentang berbagai kebijakan pemerintah. Sekalipun tidak cukup tampak dalam percaturan sosial, namun kiprah LSM secara langsung ataupun tidak memberikan andil dalam mobilisasi massa di berbagai peristiwa demostrasi hingga memaksa bubarnya Orde Baru.

LSM tidak jarang memiliki keistimewaan. Mereka lebih terpercaya dibanding institusi pemerintah. Penyelenggaraan *International NGO Forum on Indonesia* (INGI) bahkan pernah berperan sebagai mediator dalam memuluskan pendanaan negara, di antaranya dalam membangun aliansi lembaga donor melalui *Intergovernmental Group on Indonesia* (IGGI) yang di kemudian hari berubah menjadi CGI. LSM asing yang semula mengalami keterbatasan akses terhadap masyarakat memperoleh kesempatan memperluas jaringannya di dalam negeri. Semakin merebaknya perkembangan LSM di dalam negeri menjadikan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai global mulai terangkat ke permukaan. Dengan sendirinya ini semakin menyulitkan posisi pemerintah yang kian hari kian ditentukan oleh penilaian publik internasional. Ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap kebaikan hati negara-

[28] Kasus ketegangan Abdurrahman Wachid sebagai pemimpin ormas Islam yang mendukung Megawati pada awal 1990-an memperlihatkan sulitnya sebuah ormas keagamaan harus membangun situasi konfliktif dengan pemerintah, yang mengakibatkan berbagai upaya mendongkelan dari jabatan pimpinan NU. Simak Cipto "***Revolusi Partisipasi***...", p. 22-3.

negara donor dihadapkan pada munculnya tekanan-tekanan akibat masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri.[29]

Pemerintah semakin tidak berdaya oleh berbagai tekanan yang mengatasnamakan globalisme. Muncul kecenderungan yang mengarah pada imperasi sosial, budaya, ekonomi, kultural dan politik Barat dibanding sebaliknya. Perkembangan teknologi yang didukung industri komunikasi dan informasi menjadikan dunia ketiga menjadi sasaran kritik media internasional, Barat. Kepentingan Barat yang mengangkat isu-isu global menyerang berbagai kawasan dunia yang tidak sejalan dengan tata nilai dan pola-pola hidup Barat. Demokrasi liberal berikut isu-isu sosial politik dan kemanusiaan seolah menjadi keharusan, bahkan bagi negara komunis yang sebelumnya menentang. Gagalnya komunisme menjadi pembenaran bagi liberalisme sebagai *proto type* tata kemanusiaan baru yang mendasari isu-isu kemanusiaan kontemporer. Setelah para pengelola negara gagal mengatasi berbagai persoalan, isu nasionalisme jatuh di bawah isu-isu kemanusiaan kontemporer.[30]

Kekuatan modal menjadikan negara-negara kreditor semakin mampu mengendalikan negara-negara kreditor dengan menempatkan persyaratan-persyaratan politis yang dilematis untuk dipenuhi. Dari sini dapat dipahami bahwa demokrasi bukan semata isu kemanusiaan, tapi juga menjadi isu politik yang efektif untuk membuka akses perekonomian yang lebih luas pada dunia ketiga, setelah situasi pasar di negara maju umumnya sudah mencapai titik kejenuhan. Sementara itu, banyak negara Asia yang merupakan pasar

---

[29] Hefner "Islam, State and Civil Society...", p. 131-2.

[30] Secara filosofis terdapat ketegangan antara komunitaruanis dan liberalisme, yang rupanya semakin menuju kepada satu titik terang di mana liberalisme lebih teruji dibanding rivalnya, komunitarianisme. Simak ulasan dialektiknya dalam Keraf "Membedah Politik Perizinan...", p. 24-6.

potensial mulai bangkit perekonomiannya dan kebetulan pemerintahan yang tidak demokratis kian goyah.[31]

Negara-negara dunia ketiga belum mampu membangun infrastruktur perekonomian yang kuat yang memungkinkan mereka melepaskan ketergantungan yang tinggi pada negara maju. Banyak negara dengan mudah ditekan oleh negara-negara maju dengan mengangkat isu-isu yang tidak terkait langsung dengan masalah ekonomi. Hanya negara-negara yang mampu membangun soliditas pemerintahan yang dapat melepaskan diri dari tekanan internasional dengan tingkat *bergaining* yang mampu menyelamatkan dari berbagai kondite buruk yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi.[32]

Berbeda dari Malaysia dan China misalnya, yang karena soliditas, dan mungkin juga telah mampu memperkembangkan infrastruktur perekonomiannya, mereka mampu menyelamatkan diri dari berbagai tekanan internasional. Sementara runtuhnya perekonomian Orde Baru, selain karena besarnya tekanan internasional dari berbagai lini, juga dikarenakan rapuhnya soliditas pemerintahan, terutama dalam hubungannya dengan kalangan pemilik modal atau pengusaha yang terkonsentrasi pada sekelompok kecil oportunis. Terusatnya pilar ekonomi pada sekelompok kecil konglomerat menjadikan basis ekonomi nasional begitu rapuh oleh munculnya sentimen negatif pasar. Meski tidak sebagaimana gerakan politik, secara ekonomi para pengusaha juga banyak menghadapi masalah dengan birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan menjadi penyumbang utama besarnya biaya ekonomi (*hight cost economy*).[33]

---

[31] Patrimonialisme Orde Baru kian goyah sejak kemerosotan harga minyak dekade 1980-an, yang mengakibatkan kemampuan pembiayaan di tingkat bawah mengalami penurunan secara drastis dan memaksa pemerintah melakukan berbagai deregulasi. Sutoro Eko "Birokrasi, Modernisasi dan Kapitalisme Orde Baru dalam ***Prisma***, No. 8, 1996, p. 36.

[32] Liddle "Introduction: Crafting Indonesian Democracy" dalam Liddle, ***Crafting Indonesian Democracy***, p. 3.

[33] ***Ibid.***

Dunia usaha yang didominasi sebagian kecil golongan minoritas dan asing dihadapkan pada tantangan persaingan global akibat ketidakmampuan melakukan perubahan signifikan untuk memperbaiki keadaan. Sampai detik terakhir Orde Baru masih menganggap kebijakannya sebagai pilihan akhir yang memuaskan dan tidak membutuhkan perbaikan berarti. Kalangan aparat berusaha mempertahankan *status quo*, meski sebenarnya sudah banyak menyimpang dan memerlukan tindakan tegas. Orde Baru terlambat, atau tidak mampu, merespon perubahan global yang sedemikian pesat dan selalu menyajikan tekanan demi tekanan yang mengarah pada krisis.[34]

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru tidak lepas dari berbagai peristiwa internasional yang sudah direspon berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai bentuk, sementara sikap dan kebijakan pemerintahan tidak berubah secara signifikan. Perkembangan sejak runtuhnya Uni Sovyet dan rejim-rejim komunis di berbagai negara tidak direspon Orde Baru dengan perubahan yang secara signifikan mampu menunjukkan itikad baik, sebagaimana ditunjukkan Deng Xiao Ping atau Mahathir Mohammad. Indonesia dengan mudah dihadapkan pada banyak tekanan internasional yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan paket bantuan ekonomi atau militer, tetapi dijadikan prasyarat pemberian paket-paket pinjaman dan kerjasama.[35]

Ketergantungan pada hutang luar negeri menjadikan posisi tawar negara menjadi lemah di mata negara-negara donor. Indonesia

---

[34] Dhakidae menyebut krisis ekonomi pada kurun akhir Orde Baru sebagai *the last biggest blow* di antara serangkaian krisis yang melingkupi pemerintahannya, setelah sebelumnyya terjadi benturan dengan kalangan NGO dalam kasus Kedung Ombo dan PDI. Simak kembali Dhakidae "The Long and Winding...", p. 71.

[35] Lemahnya *bergaining* menyebabkan Indonesia tidak mampu melakukan alih teknologi, terutama sejak Jepang mendominasi perekonomian kawasan. Mohtar Mas'oed "Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 2 1996, p. 4-5.

sudah kalah janji dengan Barat hingga harus melanjutkan berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya meski merugikan. Ketergantungan tinggi pada hutang luar negeri dengan distribusi terbatas pada pengusaha oportunis menyebabkan Indonesia mudah jatuh dalam krisis ekonomi saat para pengusaha menarik modalnya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan telah membuat struktur perekonomian Indonesia sedemikian rapuh oleh isu-isu politik. Fluktuasi rupiah di hadapan mata uang asing sedemikian rentan akibat ketergantungan tinggi terhadap Dolar dan Yen.[36]

Setiap momentum dalam negeri dapat dijadikan alasan negara-negara maju baik secara langsung maupun melalui PBB dan badan-badan dnia lainnya melakukan tekanan terhadap suatu pemerintahan. Di antara tekanan tersebut tampak pada munculnya kasus politik di Timor Timur yang terangkat semakin populer dalam wacana politik internasional dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM, dan mengakibatkan beberapa paket bantuan dihentikan. Integritas internasional yang lemah ditambah ketergantungan yang terlalu tinggi pada bantuan asing, mengharuskan Orde Baru kian dalam terjerat tekanan, terutama sejak digunakannya bantuan ekonomi sebagai instrumen politik. Padahal kasus yang sama dan mungkin lebih parah pada negara lain, seperti China dalam masalah Tibet, tidak harus menggoyahkan integritas nasionalnya.[37]

Munculnya berbagai peristiwa internasional menandai kian kuatnya imperasi global, yang sebagian mengarah pada tekanan politik, ekonomi bahkan militer. Meski sebenarnya secara

---

[36] Setelah menjadi korban pasar ekonomi eksklusif yang diciptakan Jepang, Indonesia harus menerima paksaan G7 di bawah komando Amerika membuka pasarnya dalam berbagai kesepakatan yang berhasil dirumuskan melalui GATT. ***Ibid.***, p. 5-6. Simak juga Alexander Iwan "Indonesia di Tengah Asia Timur dan Tenggara: Jaringan Bisnis Jepang dan Etnis Cina" dalam ***Prisma***, No. 2, 1996, p. 13-9.

[37] Dalam kasus Timor Timur, 12 November 1991, kongres Amerika Serikat memaksa Clinton untuk menghentikan program bantuan militer untuk Indonesia, IMET, pada tahun 1993 akibat tidak puas atas penyelesaian kasus tersebut. Cipto "Revolusi Partisipasi...", p. 19.

terminologis sudah dikenal sejak hampir setengah abad sebelumnya, bahkan menjadi klausul utama dalam Piagam PBB, tapi ironi yang dialami gerakan pro-demokrasi dalam peristiwa Tiananmen membuka jalan bagi keharusan akan ditegakkannya Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih konkrit. Bila sebelumnya HAM hanya dimaknai sebagai kebebasan suatu bangsa dari penguasaan bangsa lain, dimensi pemahaman HAM berkembang kian sofistikatif dan partikular yang menyentuh ranah-ranah lokal kedaerahan bahkan individual.[38]

Pengaruh global tidak dapat diabaikan atas berbagai perubahan domestik di Indonesia, selain respon publik dalam negeri sendiri oleh berbagai gerakan penyadaran yang dilakukan LSM dan pengaruh opini media massa. *Blow up* media massa secara besar-besaran menjadi satu bentuk penghakiman tersendiri. Tekanan-tekanan tersebut berdampak besar dalam mempengaruhi kepercayaan internasional pada suatu negara, di antaranya dengan melemahnya iklim investasi yang secara beruntun berdampak pula pada penurunan nilai tukar mata uang. Media massa juga dapat mempengaruhi opini masyarakat dalam negeri yang dapat mendorong terjadinya gejolak-gejolak politik, kecali pemerintah merasa perlu merespon tuntutan perubahan global dengan demokratisasi dan transparansi.[39]

---

[38] Baik NGO, media massa dalam negeri maupun masyarakat internasional berperan aktif dalam mengangkat kasus-kasus pelanggaran HAM. Di dalam negeri sendiri, sorotan mereka bahkan menyebabkan pembredelan sejumlah media massa, seperti Tempo, Editor dan Detik. Simak Dhakidae "The Long and Winding Road...", p. 71-2.

[39] Media massa diakui sebagai salah satu kekuatan yang efektif ikut bertanggung jawab atas ledakan partisipasi organisasi massa, di samping faktor internal dan eskternal, berupa pengaruh negara maju. Dewi Fortuna Anwar "Implikasi Interdependensi Internasional terhadap Politik Orde Baru" dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi eds., ***Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), p. 167-8.

C. Jatuhnya Orde Baru dan Jalan Baru Demokrasi

Seolah mengulang pengalaman Soekarno, rejim Orde Baru benar-benar tidak dapat bertahan lagi setelah mengalami kegagalan ekonomi yang parah. Hal ini memperlihatkan bahwa kemauan untuk berubah tidak hanya membutuhkan kesadaran akan perlunya sebuah perubahan. Sering kali keinginan untuk berubah membutuhkan momentum yang mampu memaksakan kemauan untuk berubah. Seolah mengulang pola pergantian pemerintahan sebelumnya, krisis ekonomi menjadi pertanda paling kentara lemahnya pemerintah, baik di mata masyarakat dalam maupun luar negeri. Pada tingkatan *grassroot*, gerakan massa menjadi terlalu mudah digalang untuk mengekspresikan ketidakpuasan pada pemerintah. Hal ini dikarenakan faktor penyebab kadang bukan yang terpenting, sebab yang diperlukan hanya rasionalisasi perlunya gerakan. [40]

Seolah mengulang periode akhir pemerintahan Soekarno, pemerintahan Orde Baru juga menghadapi kemunduran moral aparatnya. Kerugian terbesar tampak pada menurunnya etos kerja dan tanggung jawab aparat. Penurunan nilai tukar rupiah yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan penghasilan pegawai negeri kian tidak memadai untuk menunjang kebutuhan hidup yang kian meningkat. Akibatnya, kebiasaan mencari penghasilan tambahan di luar dinas atau dengan memanfaatkan birokrasi untuk mencari keuntungan pribadi kian meningkat. Semangat pemerintah Orde Baru membangun kekeluargaan dan mengurangi konflik menjadikan negara kehilangan kontrol, bahkan ketika perilaku penyelenggara negara dan pemerintahan mengarah pada tidak adanya memiliki itikat baik dalam tugas-tugas profesionalnya. Akibatnya, korupsi, kolusi dan nepotisme berlangsung nyaris tanpa kontrol, bahkan menjadi budaya tak terpisahkan dalam birokrasi. [41]

---

[40] Anwar "The Transition to Democracy...", p. 83.

[41] Mangunwijaya menyebutkan di antara problem demokrasi di Indonesia merupakan akibat persoalan yang kompleks, dimulai dari budaya. Simak Y.B. Mangunwijaya "Indonesian Problems and Prospects" dalam Liddle, ***Crafting Indonesian Democracy***, p. 83.

Pemerintahan tanpa kontrol selalu diikuti oleh berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang juga berlangsung tanpa kontrol. Kokohnya *Beamtenstaat* yang dibangun menempatkan birokrat dapat memainkan peran politik dalam menentukan berbagai kebijakan. Partisipasi yang kian apatis dari masyarakat akibat dipisahkannya mereka dari politik menyebabkan berbagai penyelewengan berlangsung tanpa kontrol berarti, yang akhirnya berkembang sebagai tata nilai yang sah. Tradisi pemberian uang suap untuk memuluskan proses adminstratif terjadi pada semua aspek kehidupan, mulai dari pengurusan surat-surat tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), pembayaran pajak kendaraan bermotor, proses penerimaan pegawai negeri dan militer, pinjaman uang di Bank hingga pencalonan dalam jabatan-jabatan tertentu.

Hal ini dengan sendirinya melemahkan pemerintahan baik dari segi penerimaan pendapatan, kualitas kerja di lapangan maupun kinerja aparatnya, dan belum termasuk korupsi uang negara dalam berbagai bentuk. Negara hanya dijadikan alat menumpuk kekayaan oleh para aparat pemerintahan dan kroni-kroninya untuk memuaskan kepentingan pribadinya sendiri, tanpa rasa tanggung jawab atas perkembangan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Negara benar-benar jatuh ke tangan sekelompok aparat yang hanya berusaha memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. [42]

Di tengah infrastruktur sosial ekonomi yang tidak siap Indonesia harus masuk dalam sistem ekonomi global yang secara total mengarah pada liberal kapitalistik. Kegagalan negara dalam memanfaatkan bantuan ekonomi luar negeri menampakkan bentuknya setelah secara total jatuh di bawah imperialisme global, di mana jalannya negara sangat ditentukan kebaikan hati negara-negara kreditur. Kemendesakan kebutuhan untuk segera membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah birokrasi yang buruk menjadikan

[42] Menurut Liddle, sebagaimana diulas Robinson, pemerintahan Orde Baru jatuh ke tangan birokrasi yang tidak bertanggung jawab, yang sarat korupsi dan beribu kelemahan lain dalam birokrasi. Richard Robinson, ***Sejarah Politik...***, p. 10. Fenomena ini juga tampak dari tingkat desa sampai pusat, dikarenakan loyalitas primer bukan didasarkan atas ideologi atau institusi, melainkan pada figur-figur pemegang kekuasaan. Eko “Birokrasi, Modernisasi...”, p. 30.

Indonesia jatuh dalam *kapitalisme semu*. Pertumbuhan ekonomi berkembang pesat hanya oleh dukungan konglomerasi pada sekelompok orang yang tidak mempunyai integritas nasionalisme yang memadai. Negara gagal mewujudkan pemerataan ekonomi, karena distribusi kesejahteraan terkonsentrasi pada sebagian kecil konglomerat. Kesediaan pemerintah bekerja sama hanya dengan kelompok yang disukai menyebabkan konsentrasi kesejahteraan ekonomi terpusat pada sekelompok orang.[43]

Hutang negara yang selalu bertambah setiap tahun tidak menghasilkan produktivitas yang memungkinkan beban negara semakin diperingan. Ketergantungan pada hutang semakin meningkat dan menjadikan Indonesia kian tidak berdaya oleh jeratan hutang dan tekanan demi tekanan dari luar negeri. Pada kurun akhir pemerintahan Orde Baru, IMF dan Bank Dunia seolah menjadi instrumen utama mengendalikan jalannya negara dan pemerintahan Indonesia. Hutang-hutang luar negeri baru dibangun dengan semakin banyak mempersyaratkan hal-hal yang sebenarnya mengubah tatanan yang pada awalnya menjadi penyokong utama tegaknya sebuah pemerintahan.[44]

Krisis politik paling parah selama pemerintahan Orde Baru diawali dengan berlangsungnya krisis moneter di Thailand Juli 1997. Gempuran para spekulan terhadap Bath, mata uang Thailand, memaksa pengelola negeri itu mengambangkan nilai tukar mata uangnya, yang semula bertahan 24 Bath per-Dollar AS dan turun menjadi 26,43 Bath. Secara simultan krisis tersebut menggoyang nilai tukar mata uang negara-negara tetangganya, Korea, Malaysia, Pilipina dan Indonesia. Indonesia yang semula tergolong paling aman dibanding yang lain, bahkan sempat berusaha membantu Thailand, ternyata justeru paling menderita menderita dengan semakin tidak terkendalinya penurunan nilai tukar rupiah dari semula Rp. 2.682 per

[43] ***Ibid.***, p. 35.

[44] Menyitir pernyataan Ramos Horta, Dhakidae sampai menyatakan bahwa that is Camdessus, the managing director of the IMF, who brought down Suharto.... Simak kembali Dhakidae "The Long and Winding...", p. 70. A. Sonny Keraf "Krisis Moneter: Diperlukan Reformasi Politik dan Moral" dalam ***Basis***, No. 03-04, Tahun ke-47, Maret-April 1998, p. 21.

Dollar AS, kemudian menjadi Rp. 2.755, merosot tajam hingga level Rp. 4.000, dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Bantuan IMF yang dipenuhi tarik-manarik kepentingan sama sekali tidak membantu perbaikan ekonomi.[45]

Pemerintahan Orde Baru tidak peka pada perkembangan situasi psikologis masyarakatnya. Saat masyarakat kehilangan respektasi terhadap pemerintah, Soeharto mengambil kebijakan yang tidak populer, seperti pengangkatan anggota keluarga dan kroninya, Siti Hargianti Indra Rukmana dan Bob Hasan sebagai menteri kabinet Pembangunan VII. Padahal kalangan mahasiswa dan masyarakat sudah mendesak agar pemerintah melakukan reformasi politik, termasuk suksesi, bahkan jauh hari sebelum Soeharto diangkat kembali menjadi presiden. Karena itu, tindakan-tindakan Soeharto semakin meningkatkan gerakan keprihatinan. Terlebih semenjak krisis ekonomi semakin parah, dengan melambungnya harga-harga barang, serta meningkatnya PHK. Gerakan mereka tidak surut sekalipun tindakan represif, yang disertai penangkapan dan penculikan ditempuh pemerintah. Bahkan ketika bentrokan, kerusuhan dan penjarahan merebak di berbagai tempat, Soeharto seolah merasa masih dapat mengatasinya.[46]

Tekanan demi tekanan ekonomi dari luar dan maraknya gelombang ketidakpuasan di dalam negeri menyebabkan pelaku pasar dalam negeri, terutama kalangan konglomerat kehilangan kepercayaan akan jaminan negara atas modal dan kelangsungan usaha mereka. Sentimen-sentimen negatif pasar dengan sangat mudah mempengaruhi para pengusaha mengalihkan modalnya ke luar negeri. Melemahnya perekonomian pemerintahan Orde Baru diwarnai kasus-

---

[45] Sementara itu, ketika Thailand dan Korea Selatan sudah mulai membaik, Indonesia justeru semakin tidak tertolong. Rupiah bahkan menembus angka fantastis di atas Rp. 10.000,- per Dollar AS. .Luhulima, ***Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto-Dan Beberapa Peristiwa Terkait***, (Jakarta: Kompas, 2001), p. 78-83.

[46] Kesediaan Soeharto untuk mengalah pada tuntutan mundur dari jabatan merupakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, yang menyebabkan ungkapan-ungkapannya untuk *lengser keprabon* sebagai upaya mengulur-ulur waktu (*buying time*). ***Ibid.***, p. 132.

kasus pelarian modal (*capital flight*) oleh sekelompok konglomerat yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah menghentikan *capital flight* menyebabkan kegagalan fiskal dan banyaknya perbankan sebagai lembaga keuangan kesulitan *kliring*. Akibat langsung yang dirasakan masyarakat luas adalah fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak terbendung menuju pada kemerosotan yang tajam. Ketika kalangan usahawan menilai iklim perekonomian tidak kondusif, mereka secara pragmatis mengalihkan modalnya ke luar negeri, dan secara otomatis meruntuhkan pertumbuhan semu yang pernah dibangun. [47]

Krisis yang berlangsung pada kurun akhir pemerintahan Orde Baru tampak sekali bukan semata persoalan ekonomi, melainkan juga menandai hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ketergantungan politisi kepada pemerintahan sebagai patronnya, menghilangkan kepekaan politik mereka terhadap kebutuhan akan perubahan. Kepekaan yang jauh lebih baik terhadap situasi politik justeru dimiliki para pelaku ekonomi dibanding para politisi sendiri. Karena itu, mereka segera menjual aset-asetnya di dalam negeri dan memilih tempat investasi yang lebih aman, sementara para politisi formal dengan penuh semangat mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk kesekian kalinya. [48]

---

[47] Sandaran perekonomian yang bertumpu pada pengusaha etnis Cina, di mana kepentingan pribadi pejabat sangat lekat, membuat situasi perekonomian berada pada posisi rawan. Frans-Magnis Suseno "Belajar dari Krisis" dalam ***Basis***, No. 03-4, Tahun Ke-47, Maret-April 1998, p. 11. Banyak Bank Nasional mengalami penarikan dana besar-besaran (*rush*), dan masyarakat jatuh dalam kepanikan yang mengakibatkan pembelian barang kebutuhan besar-besaran (*panic buying*). Abdul Rozaki dan A. Wisnuhardana "Gerakan Mahasiswa di Tengah Krisis Ekonomi Politik" dalam ***Ibid.***, p. 39.

[48] Sejak tahun 1990-an, tanda-tanda memuncaknya ketidakpuasan pada pemerintah sudah semakin tampak akibat berbagai kebijakan yang banyak melukai masyarakat, seperti dalam kasus Kedung Ombo yang di-*back up* mahasiswa, LBH, media massa bahkan INGI yang sebelumnya pernah membantu pemerintah; kasus Nipah; pemogokan buruh di Medan; kasus Amungme; Pembredelan harian Tempo, Editor dan Detik; PDI Megawati; dan kuningisasi. Simak Arief Budiman, ***Aktor***

Dalam situasi seperti itu, gerakan pro-demokrasi kian memperoleh momentum besar untuk melakukan mobilisasi massa. Perkembangan media massa yang semakin kritis sejak beberapa tahun sebelumnya selalu memperoleh topik hangat untuk diolah secara dramatis. Ekspose mediaatas berbagai kasus semakin memperjelas buruknya kinerja pemerintahan di mata publik internasional dan rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak dapat mempertahankan dukungan, bahkan dari tokoh legislatif. Harmoko yang sebelumnya merupakan simbul ABS (Asal Bapak Senang) di Indonesia memaksakan Soeharto meletakkan jabatan jauh sebelum waktunya. [49]

Berhentinya Soeharto dari jabatan presiden mengubah konstelasi kekuatan politik secara drastis, terutama bagi *prestise* kalangan militer. Militer, termasuk kepolisian, yang sebelumnya memainkan peran hegemonik kian kehilangan wibawa, yang mengakibatkan maraknya kerusuhan terjadi di berbagai tempat, pembakaran toko, penjarahan hutan dan perusakan fasilitas-fasilitas umum di berbagai tempat. Kesenjangan perekonomian antara Cina dan pribumi yang tidak pernah berhasil diatasi untuk kesekian kalinya melahirkan kerusuhan anti-Cina. Tekanan ekonomi sejak krisis ekonomi melanda negeri ini seolah menjadi pembenar bagi masyarakat untuk mengekspresikan kemarahan pada etnis Cina dengan tindakan-tindakan anarkhi, baik dalam bentuk pembakaran gedung maupun penjarahan harta benda. Ketimpangan ekonomi yang drastis menyebabkan etnis Cina yang sebelumnya selalu mendominasi perekonomian masyarakat negeri ini menjadi sasaran amuk massa. [50]

Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia, (Jakarta: Institut studi Arus Informasi, 2001), p. xxxix-xiii.

[49] Setelah didesak banyak kalangan, khususnya mahasiswa dan tokoh-tokoh nasional, Harmoko atas nama pimpinan DPR meminta Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. James Luhulima, ***Hari-hari Terpanjang...***, p. 139-0. Istilah Asal Bapak Senang (ABS) menjadi cara umum mempertahankan *status quo*, di mana penguasa dibentengi dengan pejabat-pejabat loyal. Eko "Birokrasi, Modernisasi..." , p. 33.

[50] Mengiringi hari-hari menjelang mundurnya Soeharto, militer sendiri sempat membuat kesalahan fatal dengan melakukan aksi-aksi peculikan, penghilangan orang serta penembakan terhadap demonstran. Mereka bahkan kehilangan wibawa

Lemahnya pemerintahan menjadi momentum gerakan disintegrasi di beberapa daerah untuk mengambil kesempatan. Mereka menemukan momentum penting untuk meningkatkan intensitas gerakannya. Konflik Papua, Aceh, Maluku Selatan dan Timor Timur menguat kembali. Timor Timur berpeluang paling besar untuk melepaskan diri karena belum terhapus dari agenda PBB dan masih besarnya dukungan internasional. Barangkali hampir sama dengan pengalaman Indonesia masa kemerdekaan, tokoh-tokoh sparatis Timor-Timur, Aceh, Papua dan Maluku Selatan memanfaatkan sulitnya situasi untuk mengintensifkan gerakan sparatisme. Disparitas sosial ekonomi antar daerah yang tidak cukup berhasil diatasi menjadi alasan perlunya kemerdekaan pada beberapa daerah. [51]

Memburuknya situasi sosial politik, ekonomi dan moral menjelang dan setelah turunnya Soeharto dari jabatan presiden, memberi perubahan besar terhadap iklim sosial politik nasional. Meski masih diliputi krisis yang kompleks, termasuk ancaman disintegrasi, tapi berakhirnya Orde Baru berdampak pada semakin meningkatnya kesadaran akan perlunya pengelolaan pemerintahan secara demokratis. Meski belum menyelesaikan keadaan secara radikal, tapi keharusan membangun *good governance* oleh pemerintahan sesudahnya, baik dalam konteks transparansi, penegakan hukum, penghargaan HAM, kebebasan pers dan menyatakan pendapat menjadi semakin tidak dapat ditawar. Kebebasan dan keterbukaan masyarakat terhadap informasi dan dukungan dari berbagai pihak, menyebabkan pemerintah manapun akan menghadapi tekanan publik

untuk mengendalikan kerusuhan di ibu kota yang diwarnai penjarahan dan pembakaran gedung dan aset-aset perekonomian, khususnya milik etnis Cina. Kerusuhan rasial mengakibatkan banyak etnis Tiong Hoa meninggalkan Indonesia. Bahkan kedutaan-kedutaan asing, termasuk IMF sendiri berbodong-bondong eksodud dengan pesawat *charter*. Luhulima, ***Hari-hari Terpanjang...***, p. 130-2.

[51] Kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan kekerasan aparat sering disinyalir sebagai faktor-faktor yang secara laten dapat memunculkan gelombang sparatisme. Musa Asy'ari "Presiden Megawati dan Tantangan negara Kesatuan" dalam Musa Asy'arie, ***Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan***, (Yogyakarta: LESFI, 2002), p. 93-5.

secara luas. Demokrasi semakin memperoleh kejelasan arah, setelah pemerintah dan masyarakat Indonesia semakin terbuka atas berbagai referensi untuk perbaikan-perbaikan berbagai aspek, politik, hukum dan penghargaan terhadap nilai-nilai HAM.[52]

Bubarnya Orde Baru memperlihatkan bahwa demokrasi tidak dapat didistorsi dengan alasan kepentingan kepribadian bangsa sebagaimana dalam pengalaman masa Soekarno maupun Soeharto. Perkembangan wacana global dan kecerdasan telah mengubah kesiapan demokratisasi di Indonesia. Sekalipun konflik SARA masih mewarnai trasformasi politik, namun secara umum masyarakat semakin rasional dalam menyikapi demokrasi. Sekalipun belum dalam wacana yang benar-benar jelas, masyarakat sudah lebih memahami posisi negara dan cara kerja yang demokratis. Dengan kata lain, otokrasi selama Orde Baru telah mengubah kultur, pemahaman, kesiapan maupun perilaku politik masyarakat dalam berdemokrasi.[53]

Ini terlihat dari pemahaman masyarakat atas berbagai penyelewengan dan persoalan-persoalan lain yang mengendap selama pemerintahan Orde Baru. Kritik terhadap penyelewengan pemerintah dan aparat-aparatnya muncul ke permukaan, tidak saja dalam wacana intelektual, melainkan sampai dalam pembicaraan masyarakat bawah. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai dapat memahami peran negara dan warganya secara lebih ideal, di mana rakyat mempunyai

---

[52] Upaya pendistorsian nilai-nilai humanisme yang sebelumnya banyak dilakukan dengan alasan tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, semakin sulit dilakukan. Simak kembali Keraf "Krisis Moneter...", p. 17-0.

[53] Berakhirnya Orde Baru diikuti dengan merebaknya analisis serta kajian yang luas terhadap sistem demokrasi, dengan menjadikan momentum mundurnya Soeharto dari jabatan presiden sebagai titik awal pembahasan. Banyak tulisan, seminar-seminar bahkan buku-buku terbit yang mengulas sebab-sebab kegagalan Orde Baru yang terarah pada kecenderungan untuk mengembalikan idealitas demokrasi, yang sedikit banyak mempengaruhi bangunan pemikiran masyarakat tentang demokrasi. Kritik sosial juga tidak lepas dari peran media sebagai penebar informasi dan sekaligus kritik atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat luas. Hal ini juga diikuti dengan kian merebaknya gerakan-gerakan LSM serta gerakan moral yang muncul sebagai wujudk keprihatinan atas kemerosotan moral bangsa. Dalam hal ini, Magnis-Suseno menyebutnya sebagai kebangkitan moral. Simak *Ibid.*, p. 13.

hak untuk memberikan koreksi atas kinerja aparat pemerintahan dan para politisinya. Tradisi kritik dan protes sosial semakin berkembang dalam alam kesadaran publik. Independensi media massa berperan besar mendorong dinamika tersebut, setelah kebebasan media tidak lagi dapat dikontrol penguasa dan partai politik penyelenggaranya, melainkan juga oleh khalayak luas. [54]

Orde Baru berkontribusi memudarkan daya tarik politik berbasis ideologi. Meski secara tradisional afilisasi masyarakat masih bertahan, tapi soliditas sentimen antar golongan sudah jauh berkurang. Perkembangan sosial yang semakin pragmatis, menyebabkan isu-isu ideologis tidak lagi menarik untuk diangkat. Meski partai-partai politik masih mengeksploitasi berbagai simbul, tapi dukungan konstituen mereka kian periferal dengan kadar fanatisme yang jauh lebih rendah dibanding era 1950-an atau 1960-an. Isu-isu ideologis secara bertahap digantikan isu-isu kesejahteraan, kejujuran dan integritas para politisi di mata masyarakat luas. [55]

Peningkatan pendidikan dan kebebasan media massa membuat masyarakat semakin rasional dalam menyikapi realitas politik. Lamban tapi pasti, masyarakat semakin otonom dalam menentukan pilihan, bahkan sebagian mulai mengarah pada kecenderungan tidak memilih, golput. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian penggalan sejarah era 1950-an yang terulang lagi, di mana negara kehilangan pihak-pihak yang sepenuhnya bertanggungjawab terhadap negara. Meski demokrasi pasca Orde Baru belum mencapai tahap di mana anggota badan legislatif secara moral menunjukkan rasa tanggung jawabnya pada konstituen, melainkan pada partai politiknya, tapi

[54] Idealitas demokrasi dengan berbagai elemennya menjadi bagian dari kesadaran semakin banyak orang, di mana kekuasaan pemerintahan bukan privillage sebagian kecil anak negeri. Dimak Juliantara, ***Negara Demokrasi...***, p. 44-50.

[55] Perkembangan kesadaran politik mengarah pada penerimaan atas pluralitas, dalam arti kebebasan berekspresi menurut keyakinan masing-masing. Tidak ada kelompok yang merasa cukup pantas memaksakan ideologinya, termasuk sekulerisme. Aliran atau politik mengalami – menurut istilah Afan Gaffar – Rejuvenansi Simak Afan Gaffar “Politik Indonesia 1990-an: Rejuvenansi Aliran?” dalam Gaffar, ***Politik Indonesia...***, p. 137.

arah dialektikanya potensial menuju pada kecenderungan perubahan yang lebih dinamis.[56]

Dukungan wacana demokrasi kian luas oleh banyaknya kajian dan wacana yang memadai dan kian mendewasakan masyarakat maupun para pengelola negara tentang kebutuhan demokrasi, tanpa keharusan membelokkannya menjadi model lain. Referensi tentang demokrasi tersebar luas dari dalam maupun luar negeri, berikut berbagai indikator yang diperlukan. Hal ini dapat dibandingkan dengan dialektika tahun 1950-an atau 1970-an, di mana pemerintah selalu dapat berkelit dengan mengatasnamakan jati diri bangsa untuk menghindari keharusan menerapkan demokrasi secara konsekwen.[57]

[56] Sekalipun masih dipenuhi tarik-menarik kepentingan, namun arah demokratisasi semakin jelas dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang mengatur jabatan presiden, transparansi, hukum, HAM dan masalah paling krusial sisa Orde Baru, Dwi-Fungsi ABRI. Reformasi Politik: Menuju Kehidupan Politik yang Lebih Demokratik" dalam ***Ibid.***, p. 163-72.

[57] Isu-isu humanitis yang berjalan seiring isu globalisme disikapi secara kritis, untuk tidak mengatakan ambigu, di mana globalisme ekonomi dipandang sebagai bentuk penjajahan, tetapi sebagian nilai-nilai Barat yang menyertainya secara imperatif tidak dapat ditolak, seperti HAM dan demokrasi. Gaffar sekali lagi membuat istilah, demokrasi yang *tidak lumrah*, untuk menghindari praktik-praktik demokrasi sebagaimana diciptakan Soekarno dan Soeharto tidak umum dipahami kebanyakan orang maupun dalam pengalaman empirik berbagai negara demokrasi di dunia. Gaffar "Mencari Format Demokrasi Indonesia" dalam ***Ibid.***, p. 354.

DEMOKRASI DAN ISLAM DALAM KULTUR SOSIAL POLITIK INDONESIA

A. Kompatabilitas Demokrasi dengan Kultur Sosial dan Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara baru yang terbentuk akibat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, wilayah yang kemudian menjadi negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, yang masing-masing independen, tidak terikat satu sama lain. Sebagian suku bangsa tersebut telah berkembang menjadi kerajaan yang tidak jarang terlibat persaingan, permusuhan dan peperangan untuk saling menguasai. Kesamaan pengalaman di bawah penjajahan Belanda merupakan dasar berdirinya wilayah kepulauan yang sangat luas ini menjadi sebuah negara. Karena itu, Dhakidae sebagaimana Geertz, menyebut Indonesia sebagai bangsa dari bangsa-bangsa (*nation of nations*).[1]

Kultur sosial politik yang berkembang di berbagai wilayah nusantara semula merupakan kultur kesukuan yang sebagian besar

[1] Dhakidae "The Long and Winding Road...", p. 68. Simak juga Liddle "Politics and Culture in Indonesia dalam Liddle, ***Leadership and Culture***, p. 63.

berkembang menjadi pedesaan. Desa merupakan komunitas independen yang saling tidak terikat satu sama lain, kecuali oleh kesamaan bahasa dan kemiripan tradisi. Pola ini bertahan hingga berdirinya berbagai kerajaan di nusantara. Masuknya pengaruh India dan Cina dan Islam diapresiasi sebagai tambahan khazanah budaya yang sebagian menjadi legitimasi kerajaan dengan berbagai tradisi dan sistem sosial politik feodalisnya di kota-kota kerajaan, sementara wilayah pedesaan, bahkan dalam struktur politik kerajaan tertentu masih bertahan sebagaimana sebelumnya, yang lebih egaliter dan penuh semangat kegotong-royongan.[2]

Feodalitas kerajaan nusantara sendiri tidak dapat diperbandingkan dengan hal yang sama dalam pengalaman Eropa, karena kerajaan nusantara sebagian besar masih merupakan satu bentuk paguyuban sederhana antar *klan* dengan pola kehidupan sosial ekonomi yang sederhana pula. Hanya beberapa kerajaan tertentu yang berkembang menjadi imperium yang membawahi beberapa komunitas di luar suku bangsanya, baik secara teritorial maupun pengaruh politik, seperti Sri Wijaya, Majapahit dan Mataram Islam. Kehidupan sosial ekonomi sebagian besar kerajaan nusantara masih bertumpu pada potensi agraris tradisional yang belum berkembang pada pola-pola penguasaan tanah oleh sekelompok aristokrat sebagaimana pengalaman Eropa. Karena itu, feodalitas kerajaan-

---

[2] Sekalipun pemerintahan di nusantara adalah feodal yang menganut otokrasi, namun di tingkatan desa sistem demokrasi tetap berlaku yang tumbuh sebagai adat istiadat. Di samping itu, feodalitas dalam masyarakat Indonesia berbeda dari pengalaman Barat, di mana pemilik tanah di Indonesia adalah masyarakat desa secara bersama-sama. Tiap-tiap orang yang akan menggunakan tanah untuk tujuan ekonomi memerlukan persetujuan dari kaumnya, dan dalam pengerjaannya selalu disertai kecenderungan bekerjasama secara gotong-royong. Kecenderungan demikian mengantarkan pada kebiasaan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sementara pada bangsa Barat, feodalisme menempatkan kepemilikan tanah sebagai dasar kemerdekaan. Bilamana seseorang kehilangan hak atas tanah berarti hilang kemerdekaannya, dan terpaksa menggantungkan diri, menjadi budak di pekarangan orang lain, di mana hal semacam itu tidak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Simak, Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 24-5.

kerajaan nusantara tidak dirasakan cukup menindas bagi kebanyakan rakyatnya.[3]

Di kawasan nusantara bahkan banyak anggota masyarakat, suku atau desa yang benar-benar independen karena belum terjangkau birokrasi kerajaan. Mereka hidup di wilayah suatu kerajaan tanpa secara struktural terikat oleh kaharusan-keharusan warga kerajaan pada umumnya. Karena itu, mayoritas rakyat nusantara cukup nyaman dengan sistem sosial politik yang ada. Kalaupun menghadapi kesulitan ekonomi, rata-rata lebih disebabkan faktor alam dan demografis yang belum memungkinkan mobilitas perekonomian berjalan dinamis.

Kecuali daerah-daerah tertentu, banyak sumber-sumber perekonomian belum dimanfaatkan sebagai komoditas ekonomi antar daerah, sehingga distribusi barang belum dinamis dan merata pada berbagai daerah. Sisa-sisa fenomena sosial ini masih dapat dicermati pada daerah-daerah tertentu di Indonesia sampai saat ini, terutama pada daerah-daerah terpencil yang belum ditunjang jalur transportasi memadai.

Melalui proses akulturasi dengan budaya, tradisi dan peradaban luar, bangsa-bangsa nusantara berkembang setapak demi setapak. Interaksi dengan beragam tradisi dan budaya luar, termasuk penyerapan beragam teknik dari bangsa India, Cina dan Arab secara gradual kian memperkaya khazanah tradisi dan peradaban nusantara. Saat kehadiran bangsa Eropa ke nusantara, sebenarnya kultur sosial politik bangsa nusantara belum sedemikian jauh berbeda dari kultur sosial politik bangsa lain yang selama beberapa abad sebelumnya berinteraksi dengan mereka, termasuk bangsa Eropa yang pertama-tama datang ke wilayah ini, sekalipun pada kurun yang sama Eropa tengah menapaki tahap perkembangan dinamis saat memasuki era *renaissance*. Dinamika pemikiran dan keagamaan berlangsung secara

[3] Pengalaman masyarakat nusantara di dalam struktur masyarakat feodal dapat simak kembali dalam penilaian Brandon, ***New Worlds for Old...***, p. 13-14.

akulturatif melalui proses sejarah yang wajar dan praktis tanpa konflik berarti. Tidak ada peristiwa-peristiwa sejarah menonjol yang menimbulkan pengalaman traumatik bagi warga negara di kawasan ini. Karena itu, perubahan pemikiran ataupun sistem sosial politik secara radikal sebagaimana terjadi di Eropa tidak pernah terjadi di Indonesia.[4]

Ketika Barat memulai perkembangan kultur sosial dan politik yang secara gradual mengarah pada demokratisasi, dinamika sosial dan politik nusantara justeru terhenti bahkan mengalami kemunduran ke arah pengentalan tradisi. Mereka menjaga jarak dari tradisi luar yang dikokohkan dengan berbagai pemikiran eskatologis. Penjajahan telah menutup akses interaksi bangsa nusantara dari bangsa lain, termasuk dengan bangsa penjajah sendiri. Selain itu, kehadiran penjajah telah menjadikan kerajaan-kerajaan nusantara tidak dapat berkembang bahkan kehilangan kekuasaan politik dan perekonomiannya. Sebagai kompensasinya, mereka memfokuskan diri pada sofistikasi masalah-masalah internal yang sebenarnya tidak begitu prinsip, terutama dalam penataan etiket dan seni budaya yang kian rumit.[5]

Kultur sosial politik feodal khas kerajaan nusantara bergeser menjadi sekedar aturan moral dan etiket yang tidak mempunyai makna politis yang berarti. Hingga kurun akhir masa kolonial, budaya feodal yang tumbuh di tengah masyarakat nusantara bukan lagi feodalitas yang mengandung konsekwensi kekuasaan, di mana sekelompok orang mempunyai hak untuk duduk dalam pemerintahan dan mewariskan kekuasaan pada sanak keluarganya. Kaum

[4] Ketika kesempatan pendidikan dibuka bagi kaum pribumi dan meningkatkan mobilitas sosial, namun secara kultural modernitas Eropa tidak terinduksi ke dalam kultur sosial politik khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin lokal. Hal ini dikarenakan kecenderungan Belanda mempertahankan dan mengokohkan herarkhi sosial. Kartodirdjo "Stratifikasi Sosial...", p. 56-7.

[5] Simak kembali Kian-Wie, "Kolonialisme dan Ekonomi Indonesia", p. 49-0, juga Kahin, ***Nationalism and Revolution..***, p. 18-9.

bangsawan hanya sekelompok orang yang karena alasan genetis, harus lebih dihormati secara moral dibanding anggota masyakat kebanyakan tanpa *privillage* untuk memerintah. Terlebih pada kurun akhir pemerintahan kolonial, hak politik para pemimpin lokal bahkan semakin ditentukan kebaikan kebaikan hati pemerintah kolonial, setelah pengalaman pendidikan memungkinkan rekrutmen aparat pemerintah secara meritokratis.[6]

Struktur budaya feodal yang tersisa hanya terletak pada melekatnya herarki pengaruh sosial dan bukan herarki kekuasaan, sebuah etiket tak tertulis yang mengharuskan mereka yang berstatus lebih rendah harus menghormati yang lebih tinggi dengan tata perilaku tertentu. Aturan tersebut menyerupai herarki organisasi modern sekalipun tidak dengan struktur dan batasan yang tegas. Aturan itupun hanya berlaku terbatas pada kelompok sosial tertentu dan tidak selalu sama antar kelompok. Realitas sosial politik Indonesia yang pliralistik dengan beragamnya komunitas kesukuan yang tercakup dalam struktur pemerintahan Indonesia modern, menjadikan feodalisme yang sifatnya ekslusif internal kelompok sosio kultural tidak berdampak berarti dalam struktur masyarakat Indonesia modern.

Kultur tersebut mengalami perubahan pada kurun akhir masa kolonial, di mana masuknya paham-paham pemikiran sosial politik Barat, termasuk gagasan-gagasan pembaharuan Islam, diapresiasi kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Apresiasi tersebut menandai tumbuh dan meluasnya kesadaran nasionalisme, di mana batas-batas etnisitas menjadi tereliminasi. Namun di sisi lain, perbedaan afiliasi ide dan pemikiran modern juga menimbulkan

---

[6] Sekalipun banyak di antara pemimpin lokal mewarisi jabatan secara turun temurun, namun dapat saja kehilangan hak bilamana pemerintah kolonial menghendaki. Simak kembali Poesponegoro, ***Sejarah Nasional Indonesia V***, p. 162, juga Kartodirdjo, ***Modern Indonesia: Tradition and Transformation***, p. 120, juga Onghokham "Revolusi Indonesia: Mitos atau Realitas" dalam ***Prisma***, No, 8, 1985, p. 4..

pengelompokan masyarakat secara lebih tegas berdasarkan batas-batas politik dan ideologi, yang sebagian mencerminkan batas-batas kultural. Batas-batas sosial dan budaya yang semula tidak menimbulkan konflik berarti dipertegas oleh batas-batas ideologi dan politik, yang secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok; nasionalis, Islam dan komunis, yang dalam perkembangannya pasca revolusi kemerdekaan ditambah kelompok yang mestinya terkategori profesional, yakni militer.[7]

Setelah jauh hari sebelumnya struktur sosial politik tradisional, kerajaan-kerajaan nusantara, kehilangan legitimasi untuk melanjutkan kekuasaan dan jauh dari kemungkinan melahirkan kembali otokrasi kerajaan di masa lalu, selepas penjajahan, Indonesia benar-benar berdiri tanpa didukung oleh struktur sosial politik tradisional. Kerajaan nusantara telah kehilangan momentum untuk bangkit kembali menegakkan kekuasaan yang pernah dinikmati leluhurnya. Hal ini disebabkan luasnya wilayah negara baru, Indonesia, tidak pernah berada dalam klaim kerajaan nusantara manapun. Selain itu, selama masa pergerakan dan revolusi, kerajaan kurang memainkan peran yang dapat mengokohkan kembali eksistensinya. Mereka sudah terlalu lama menikmati kenyamanan posisi di bawah struktur birokrasi pemerintah kolonial.

Karena itu, sejak masa pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan, tradisi sosial politik formal didominasi mereka yang berada di luar kendali dan pengaruh tradisi kerajaan. Sementara tradisi sosial politik mayoritas masyarakat negeri ini yang umumnya berada di pedesaan, juga mengikuti alur khas pedesaan yang tidak begitu lekat dengan herarki feodalitas kerajaan. Masyarakat di pedesaan terbiasa mengedepankan musyawarah dan gotong-royong,

---

[7] Sebagaimana diulas pada bagian terdahulu eksistensi pemerintahan RI masa revolusi masih tidak ubahnya sebuah induk organisasi pergerakan kemerdekaan dibanding pemerintahan sebuah negara yang mempunyai kekuatan memaksa. Di dalamnya terdapat banyak faksi perjuangan dan kepentingan, yang mana militer termasuk di dalamnya. Bab III, Sub B.3.

yang sebenarnya merupakan satu bentuk demokrasi tersendiri. Hanya saja pola relasi antar kekuatan di masyarakat pedesaan belum mengedepankan pola relasi yang rasional dengan berbagai aturan tertulis.

Meski demikian, aturan-aturan tak tertulis tersebut cukup mengikat dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk kesepakatan bersama antar warga desa. Paling tidak, setiap keputusan ditetapkan secara bersama-sama dan menjadi tata nilai yang mengikat bagi semua. Hal ini tentunya dapat disetarakan dengan pola *sharing* dalam demokrasi politik modern yang dilakukan dalam rangka membangun tata nilai dalam bentuk aturan tertulis yang mengikat semua pihak. [8]

Interaksi dengan Belanda tidak banyak mengubah kultur sosial politik masyarakat nusantara, bahkan dalam hal-hal tertentu kian menajamkan stratifikasi sosial maupun herarki feodal. Penjajahan yang berlangsung tiga setengah abad tidak menjadikan kultur sosial politik Barat tertransformasikan ke dalam kehidupan sosial politik masyarakat nusantara. Hal ini disebabkan pola penjajahan Belanda mengedepankan feodalitas di kalangan mereka sendiri, dengan membangun herarki sosial, Barat-Timur Asing–Bumi Putera. Terpusatnya kontrol politik pemerintahan di tangan pemerintah kolonial, mengakibatkan Belanda tidak sempat mewariskan satu kultur sosial politik yang mampu mempersiapkan masyarakat bangsa ini mengikuti jejak tradisi sosial politik Barat pada umumnya.[9]

---

[8] Menurut Sundhaussen, kultur pedesaan tersebut memungkinkan masayarakat desa yang lekat dengan kehidupan pertanian mempunyai bahan materi yang baik untuk mengapresiasi nilai-nilai demokrasi. Sundhaussen "Sebuah Agenda...", p. 16.

[9] Pembatasan relasi pemerintah kolonial dengan bangsa jajahan juga tercermin dalam penggunaan bahasa. Sebagaimana diulas pada bagian terdahulu pemerintah kolonial berusaha mempertahankan superioritasnya dengan membatasi penggunaan bahasa Belanda pada masyarakat pribumi, maka bahasa Melayu menjadi dominan dalam komunikasi, tidak saja dengan aparat pemerintahan Belanda, melainkan antar suku bangsa yang berbeda-beda. Bahasa Melayu pasaran tersebut bahkan

Tradisi sosial politik modern baru diapresiasi tokoh-tokoh pergerakan seiring perkembangan intelektual dan apresiasi mereka terhadap wacana pemikiran modern dan perkembangan di kawasan dunia lainnya, berupa paham-paham sosial politik. Apresiasi tersebut merupakan bibit terbentuknya kelompok-kelompok kekuatan sosial politik di Indonesia modern. Sekalipun masih berupa wacana yang baru memasuki taraf pengujian sejarah, namun apresiasi terhadap paham-paham sosial politik mampu menciptakan terbentuknya dukungan kekuatan sosial, yang sebagian disertai militansi yang tinggi. Kekuatan sosial politik Indonesia benar-benar muncul dari bawah akibat apresiasi terhadap ide-ide, berupa paham sosial politik, dan bukan mengangkat alasan etnisitas sebagai basis kekuatan. Paham sosial politik tersebut nantinya menggantikan sentimen primordial kesukuan dengan basis-basis sentimen ideologis. Merekalah yang pada kurun akhir pemerintahan Belanda menyuarakan kepentingan masyarakat bangsa ini dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).

Dengan demikian, tradisi demokrasi modern bukan sesuatu yang sengaja diwariskan Belanda melainkan hadir sebagai lompatan sejarah. Terbentuknya kekuatan-kekuatan sosial politik tersebut menjadi lompatan tradisi sosial politik ke arah tradisi demokrasi modern, yang berdiri di atas basis-basis ideologi politik. Konstelasi antar kekuatan sosial politik tersebut tidak memungkinkan cara lain untuk mengelolanya selain dengan jalan penerapan demokrasi. Tersisihnya kekuatan politik tradisional dari percaturan sosial politik menyebabkan tradisi demokrasi sedemikian lekat dalam masyarakat Indonesia modern. Kedekatan tradisi sosial politik masyarakat nusantara dengan demokrasi telah mendorong mereka sama sekali tidak menolak demokrasi sebagai tatanan dalam pemerintahan Indonesia modern. Hal ini tampak pada diterimanya rumusan

berkembang menjadi senjata melawan Belanda, menjadi simbul nasional, bahasa nasional, yang umum dipakai untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi nasionalisme. Simak kembali Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 51.

Pancasila sebagai dasar negara, yang di dalamnya hanya memungkinkan penerapan demokrasi meski belum jelas benar bentuknya, serta masih terbukanya beragam interpretasi.

Sekalipun belum didukung modernitas organisasi sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan sebagaimana Barat, pada dasarnya nilai-nilai demokrasi sama sekali tidak menunjukkan pertentangan dengan kultur sosial politik Indonesia. Terlebih sejak kurun akhir era kolonial, demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang mungkin digunakan dalam pengelolaan negara, tanpa ada alternatif lain. Tidak satupun elemen sosial politik ataupun kultural di Indonesia yang menolak, bahkan sekedar keberatan atas diterapkannya sistem sosial politik ini, baik dari penganut Islam maupun lainnya. Secara konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan tidak ada penolakan atas demokrasi, sekalipun keberadaannya masih menjadi wacana. Masyarakat bangsa ini tidak pernah memandang demokrasi sebagai masalah. Mereka tidak memperlihatkan adanya perasaan bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang asing, meski dalam pengalaman sejarah politik nusantara tidak pernah menjadi pola pengelolaan negara. Eksistensi negara Indonesia merdeka yang demokratis baru merupakan gagasan besar yang belum terbayangkan kerumitan dalam implemetasinya.[10]

Masa depan Indonesia modern benar-benar berada di tangan kekuatan-kekuatan yang berkedudukan setara, yang masing-masing merupakan penyumbang jasa bagi tegaknya kedaulatan. Pengalaman masa revolusi melahirkan melahirkan militer sebagai kekuatan baru, dengan basis legitimasi yang didasarkan atas jasa-jasa mereka selama masa perang. Banyaknya penyumbang jasa di tengah rapuhnya

[10] Sebagaimana pandangan Geertz, tradisi politik sipil di negara baru pada umumnya lemah dan persyaratan teknis untuk berfungsinya pembangunan sebuah negara kesejahteraan secara efektif kurang dipahami. Sementara itu sentimen primordial ditonjolkan sebagai batas satuan politik. Cliffort Geertz "Primordial Sentiments and Civil Politics in The New States" dalam Cliffort Geertz, ed., ***Old Societies and New States***, (New York: Free Press of Glencoe, 1963), p. 110.

pemerintahan selama masa revolusi menyebabkan kerumitan tersendiri dalam penerapan konstitusi. Hal ini tampak dari mudahnya konstitusi diubah selama masa revolusi, Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin. Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara masih semata ditempatkan sebagai gagasan besar yang terbuka atas munculnya beragam interpretasi.[11]

Selain Soekarno tidak banyak tokoh nasional yang mempertanyakan kesesuaian demokrasi Barat dengan situasi Indonesia. Fragmentasi politik dalam PPPI pada kurun akhir kolonialisme Belanda ditangkap Soekarno sebagai pertanda bahwa demokrasi di Indonesia akan menemui kegagalan di kemudian hari. Namun demikian, kegagalan nyata yang kemudian harus benar-benar dihadapi tidak mengurangi respektasi Soekarno maupun tokoh-tokoh nasional lainnya terhadap demokrasi sebagai sistem tatanan sosial politik ideal. Karena itu, Soekarno tidak tertarik untuk membangun sistem diktatur meski didukung kalangan militer. Soekarno tetap berusaha mempertahankan demokrasi meski dalam rupa demokrasi alternatif, Demokrasi Terpimpin. Upayanya mengikat perbedaan dalam NASAKOM, merupakan ekspresi dari obsesinya yang terlalu tinggi untuk membangun persatuan, yang sebenarnya mustahil diwujudkan.

Secara lebih pragmatis Soeharto sebenarnya hanya meneruskan kebingungan ini dengan satu pilihan pasti, kembali membangun paradigma demokrasi sendiri, Demokrasi Pancasila. Berbeda dari Soekarno yang selalu berusaha mengakomodir perbedaan dalam satu ikatan, Soeharto tidak dapat mentolerir perbedaan. Karena itu,

---

[11] Pancasila dan UUD 1945 menghadapi kenyataan sosial politik yang berbeda dengan hadirnya kekuatan-kekuatan sosial politik yang anti-agama. Komunisme yang jelas-jelas mendasarkan diri pada atheisme tetap dapat mengklaim sebagai pancasilais, yang mengakibatkan benturan dengan kalangan agama, Islam. Atheisme dalam komunisme merupakan sekulerisme dalam bentuk yang paling tinggi, paling murni dan konsekwen yang tidak mungkin ditolerir kalangan Islam. Nurcholish Madjid "Modernisasi Ialah Rasionalisasi, Bukan Westernisasi" dalam Nurcholish Madjid, **Islam, *Kemodernan dan Keindonesiaan***, p. 189.

demokrasi yang dicanangkannya disertai dengan penafian segala sesuatu yang dinilai berbeda. Dalam hal ini, nasib paling tragis harus dihadapi kaum komunis di Indonesia. Ambisi dan intoleransi yang tinggi kalangan komunis dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan menyebabkan mereka diyakini sebagai elemen yang harus diakhiri riwayatnya, terlebih dengan kesalahan sejarah yang fatal terhadap almamater Soeharto, Angkatan Darat.

Dengan demikian, pada dasarnya Soekarno dan Soeharto tidak dapat dipandang sebagai tokoh yang sama sekali anti-demokrasi. Mereka hanya tidak mampu mengoperasikan cara (demokrasi) liberal Barat dalam struktur masyarakat yang dipenuhi perbedaan-perbedaan diametral. Tindakan politik Soekarno bersama Militer dan Orde Baru yang berusaha membangun demokrasinya sendiri mencerminkan satu bentuk perang konsep dan interpretasi dalam rangka kontekstualisasi demokrasi di Indonesia, terutama dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas munculnya konflik-konflik politik dan ideologi yang tidak berkesudahan. Perjalanan demokrasi yang tidak konstruktif merupakan faktor aktual yang mendorong para penentu kebijakan membangun demokrasi alternatif, sekalipun pada akhirnya tidak dapat disebut sebagai demokrasi.

Mereka tidak puas dengan konsekwensi-konsewensi sosial politik yang diakibatkan oleh penerapan demokrasi yang dipenuhi berbagai intrik dan konflik kepentingan. Situasi tersebut mereka pandang semakin menjauhkan dari komitmen mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Tanpa mengurangi respektasinya terhadap nilai luhur demokrasi sebagai sistem penataan sistem sosial politik, para penentu kebijakan berupaya membangun formulasi demokrasi yang dinilai sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, meski faktanya sistem alternatif tersebut lebih menampilkan watak otoritarianisme.

Fenomena kegagalan demokrasi di Indonesia tampaknya berbeda dari yang terjadi kawasan lain sebagaimana generalisasi kalangan pengamat. Andrain misalnya menilai kecenderungan konflik dalam demokrasi diakibatkan masalah-masalah identitas regional

yang begitu peka dalam masyarakat Asia. Dengan menyamakan masyarakat Asia dengan perkembangan di Afrika, Andrain menilai tajamnya perbedaan nilai-nilai primordial (etnis dan bahasa), berbagai nilai sakral (agama), perbedaan pengaruh negara penjajahan dan perbedaan ideologi memecah belah setiap perasaan tentang identitas bersama.[12] Kalau dicermati pada kasus Indonesia, kecuali persoalan ideologi dan kepentingan jangka pendek, fragmentasi politik Indonesia sangat jarang bahkan tidak pernah mengusung persoalan etnis dan agama. Konflik primordial di Indonesia justeru terjadi dengan didasarkan atas basis-basis pemikiran yang berpijak pada tradisi konflik ideologi Barat.[13]

B. Islam Indonesia dan Demokrasi

Dibanding kawasan lain, penyebaran Islam secara luas di kawasan nusantara belum terkategori lama, bahkan berlangsung setelah pusat-pusat dunia Islam memasuki fase-fase kemunduran, meski secara militer masih disegani. Penyebaran Islam di nusantara terjadi pada puncak era dominasi corak pemikiran keagamaan dengan menonjolnya pemahaman sufistik, di mana masalah-masalah keduniaan kurang mendapatkan porsi perhatian dibanding sepiritualitas. Akibatnya konsentrasi politik di pusat-pusat dunia Islam tidak menampakkan kecenderungan untuk melakukan ekspansi wilayah seperti beberapa abad sebelumnya. Konsentrasi masyarakat Islam lebih terfokus pada masalah-masalah domestik dan

---

[12] Andrain, ***Kehidupan Politik...***, p. 399. Sebagaimana hasil pengamatan Feith yang diulas pada bagian terdahulu, konflik etnis dalam bentuk sikap anti-Cina bukan terjadi dalam wacana politik, melainkan kecemburuan sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh. Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 8-9.

[13] Mungkin fenomena konflik primordial etnis tepat untuk menggambarkan Pemilu Burundi 1993 yang berlangsung jujur dan adil tetapi menelan korban 50.000 orang dari suku Tutsi dan Hutu. Konflik-konflik SARA bukan akibat kebencian masa silam, melainkan perkembangan global yang didukung media mempertajam sesuatu yang sebenarnya tumpul. Simak Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 8.

keagamaan, di mana doktrin-doktrin sufistik dan fatalisme memasuki fase pengokohannya.[14]

Karena itu, Islam tidak terlalu sulit diterima bangsa-bangsa nusantara yang memang masih lekat dengan pola spiritualitas keagamaan sejenis, terutama Hindu dan Budha. Dalam banyak kasus, Islam bahkan hanya memberikan *label baru* pada tradisi-tradisi masyarakat sebelumnya, terutama yang dipengaruhi tradisi agama Hindu-Budha. Kecuali kerajaan Aceh, akses dan interaksi yang terjalin antara kerajaan-kerajaan nusantara dengan Turki sebagai pusat politik Islam tidak cukup intensif. Umat Islam nusantara tidak sempat merasakan konflik Islam-Kristen sebagaimana di kawasan lain. Pelayaran bangsa-bangsa nusantara sendiri tercatat hanya menjangkau daratan Arab dan Afrika Timur. Karena itu, pada awalnya Islam tidak begitu menonjol dalam membentuk sentimen keagamaan ketika berhadapan dengan penganut agama lain.

Umat Islam nusantara bahkan sangat terbuka dan menyambut baik kedatangan bangsa-bangsa asing manapun yang datang dan melakukan kontak dagang, karena para saudagar Islam nusantara sendiri terbiasa melanglang buana ke berbagai kawasan yang mayoritas penduduknya beragama lain. Karena coraknya yang demikian, motif-motif keagamaan kurang begitu menonjol digunakan sebagai alasan membendung masuknya penjajah, kecuali pada perang Aceh, Paderi dan Diponegoro. Penerimaan Islam oleh mayoritas masyarakat nusantara juga sangat beragam dan periferal, yang karenanya dapat dipandang sebagai penyebab rendahnya sentimen anti Barat-Kristen. Perlawanan terhadap kehadiran penjajah pada kurun awal tidak muncul atas dasar sentimen keagamaan, melainkan lebih memperlihatkan alasan politik dan ekonomi.

analisis Wertheim, sebagaimana diulas Kahin, yang menyatakan perluasan Islam nusantara sebagai akibat sentimen anti Kristen saat

---

[14] Nurcholish Madjid "Islam Indonesia Memasuki Zaman Modern" dalam ***Islam; Doktrin dan Peradaban***, p. xxxix.

masuknya Portugis, perlu dikritisi kembali. Sekalipun terdengar cukup logis, namun telaah tersebut kurang didukung fakta sejarah memadai. Hal ini dikarenakan Islam sudah lebih dulu menyebar sebelum kehadiran bangsa Barat. Situasi konfliktif dan penuh rivalitas antar kerajaan nusantara menyebabkan sebagian pemimpin kerajaan Islam memilih bekerja sama dengan pendatang Eropa ketika merasa terancam oleh kerajaan Islam lain, tanpa penentangan berarti dari tokoh-tokoh keagamaan ketika itu.[15]

Meski mayoritas penduduk beragama Islam, bukan berarti Islam menjadi kultur sosial politik dominan. Hingga akhir era kolonial, visi sosial politik masyarakat nusantara masih berkembang seperti sebelumnya. Meski pernah eksis sebagai agama resmi mayoritas kerajaan nusantara, pada dasarnya Islam belum banyak mengubah kultur dan sistem sosial politiknya. Bahkan ketika penerapan *syari'ah* diapresiasi beberapa kerajaan nusantara, seperti di Aceh, Palembang dan Maluku, Islam tetap tidak memberikan perubahan kultur, sistem dan pola perilaku sosial politik. Kehadiran Islam baru memberikan tambahan warna budaya yang tercermin dalam simbul-simbul tradisi dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan:

1. Corak budaya, sistem dan tradisi sosial politik masyarakat Islam nusantara tidak berbeda dari tradisi sosial politik pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Minor dan Selatan atau kawasan lain, sementara dunia Islam pada umumnya

[15] Meluasnya Islam disinyalir sebagai suatu pergerakan politis melawan penetrasi Kristen saat Portugis masuk ke nusantara. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 50-1. Padahal penolakan terhadap bangsa Portugis yang mengakibatkan pemindahan mereka pada kawasan Ambon yang kemudian membentuk komunitas Kristen dilatarbelakang oleh sikap dan perilaku orang-orang Portugis yang kurang menghargai norma-norma kemasyarakatan Maluku. Sebelum terjadinya berbagai insiden sosial, masyarakat Islam menyambut baik kehadiran mereka. Abdurrahman "Angin Baru..., p. 66-9.

tidak mengalami perubahan berarti sebagaimana pengalaman bangsa-bangsa Eropa.[16]

2. Sekalipun apresiatif terhadap tradisi dan budaya luar, masyarakat nusantara cenderung mengolahnya kembali hingga melahirkan kekhasan budayanya sendiri, sebagaimana tampak pada berbagai tradisi, seni, budaya, teknik bahkan bahasa yang senantiasa memperlihatkan adanya perpaduan unik antara unsur-unsur luar dengan lokal. Sebagaimana apresiasi mereka terhadap agama-agama sebelumnya, demikian pula dengan apresiasi mereka terhadap Islam yang melahirkan corak keislaman nusantara yang khas sejak periode awal penyebarannya hingga memasuki masa kemerdekaan, yang karenanya banyak yang menyebut Islam nusantara bercorak sinkretis, perpaduan antara Islam dengan nilai-nilai, budaya dan tradisi lokal.

3. Di nusantara, Islam tidak hadir sebagai sebuah revolusi keagamaan yang disertai dengan antipati terhadap agama dan kepercayaan lain, baik yang telah dianut masyarakat sebelumnya maupun para pendatang. Kronika sejarah masuknya agama di nusantara tidak memperlihatkan adanya perlawanan terhadap agama terdahulu ataupun yang datang kemudian. Karena itu, kasus-kasus pertentangan antar agama tidak banyak, bahkan tidak pernah muncul dalam catatan sejarah nusantara. Kasus-kasus yang pernah tercatat dalam sejarah menunjukkan bahwa konflik yang mengangkat isu keagamaan justeru terjadi internal umat Islam sendiri, terutama karena perbedaan aliran pemikiran atau akibat pengaruh gerakan pembaharuan keagamaan yang mengambil bentuk ideologis, dan peristiwanya justeru lebih menonjol pada kurun modern. Termasuk dalam hal ini adalah ketika masyarakat nusantara harus menyikapi kehadiran penjajah, sebagaimana pada kasus perang Paderi.

[16] Berbeda dari bangsa-bangsa lain, Eropa mengalami penyimpangan sejarah dengan terjadinya *renaissance* dan *Aufklaeruung*, di mana secara fundamental struktur berfikir masyarakatnya berubah yang mengakibatkan perubahan pola pikir, perilaku serta sikap mereka terhadap dunia. Romein, ***Aera Eropa...***, 66-70.

Apresiasi budaya luar sebagaimana berlangsung ratusan tahun sebelumnya terhenti total sejak benteng penjajahan menghalangi dinamika hubungan masyarakat nusantara dengan bangsa luar. Sementara itu, interaksi dengan penjajah menimbulkan sekat kultural tersendiri, di mana sebagian besar umat Islam cenderung menjaga jarak dari bangsa kolonial secara lebih ketat. Berbagai tata nilai baru yang membatasi kemungkinan interaksi budaya dibangun semakin kuat, yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan budaya yang terlalu tegas antara penjajah dengan pribumi. Di samping itu, pembatasan-pembatasan yang diterapkan penjajah menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat nusantara yang mampu mengapresiasi kemajuan Barat secara memadai.[17]

Dominasi Barat telah mengakibatkan interaksi budaya nusantara dengan budaya-budaya luar terhenti. Penjajah menjadi satu-satunya bangsa yang paling mungkin untuk berinteraksi. Interaksi dengan dunia luar hanya dapat dibangun kalangan Islam yang cukup kaya yang mampu menjalankan ibadah haji yang kadang disertai dengan kegiatan belajar di dunia Arab. Mereka umumnya menjadi tokoh di daerahnya baik akibat penghargaan terhadap capaian tingkat keagamaannya yang telah memenuhi kelima *rukun Islam* maupun karena wawasan yang lebih luas tentang dunia luar. Merekalah yang secara tradisional mampu memperkembangkan tradisi pembaharuan dengan mengapresiasi perkembangan di luar negeri.

Hingga menjelang kemerdekaan, perbedaan intensitas keagamaan tersebut bertahan sebagaimana sebelumnya, sampai masyarakat nusantara memasuki masa, di mana politik dan ideologi menjadi identifikasi diri dan kelompok. Realitas politik Islam Indonesia tampak pada afiliasi masyarakat terhadap partai politik

[17] Kalangan Islam tradisional mengendepankan perlawanan kultural dengan melarang penggunaan atribut dan berbagai norma tingkah laku yang menjadikannya mirip dengan bangsa kolonial, seperti menggunakan pantalon, dasi dan sebagainya. Nurcholish Madjid "Islam Indonesia Memasuki..., p. lxii.

yang hanya mencapai prosentase tertingginya 42 % dalam pemilu 1955 yang masih terbagi ke dalam beberapa partai politik. Kekuatan politik Islam mencapai tingkat soliditas lebih mapan pada masa pergerakan, di mana organisasi Islam berkembang menjadi organisasi sosial, dan kemudian politik. Besarnya jumlah penganut Islam tidak menunjukkan keberadaan Islam sebagai afiliasi politik mayoritas, yang berarti tidak menjadi warna kultur sosial politik dominan masyarakat nusantara. Islam bahkan tidak pernah menduduki posisi dominan yang mampu menentukan *mainstream* ideologi politik ataupun sistem pemerintahan selama percaturan politik dan pemerintahan pasca kemerdekaan.[18]

Kategorisasi masyarakat Islam oleh Geertz ke dalam *santri*, *abangan* dan *priyayi*, merepresentasikan perbedaan intensitas keislaman dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya Jawa. Sekalipun tidak dapat dipungiri, sedikit banyak juga melahirkan sekat sosial budaya di tengah masyarakat, perbedaan tersebut semula tidak mengemuka sebagai sesuatu yang menimbulkan konflik sosial. Perbedaan pola dan intensitas keberagamaan mungkin saja membatasi interaksi satu kelompok dengan kelompok lain, namun tidak berarti masyarakat hidup dalam situasi konfliktif.

Meski secara tradisional Islam Indonesia tidak sempat mengalami akulturasi yang sehat dengan budaya Barat, namun tokoh-tokoh Islam sangat apresiatif terhadap pembaharuan umat Islam di kawasan lain, yang sebenarnya juga tidak lepas dari apresiasi terhadap perkembangan Barat. Apresiasi terhadap modernitas Barat

[18] Besarnya pengikut SI lebih menunjukkan kecenderungan baru, di mana setiap orang memerlukan identifikasi diri. Karena itu, sebagaimana diulas Kahin, hampir setiap orang menyatakan diri sebagai anggota SI ketika organisasi tersebut berada pada masa kejayaannya. Ketika organisasi sosial politik semakin marak pada kurun berikutnya, organisasi Islam tidak lagi dominan. Sangat boleh jadi perkembangan paham-paham politik merupakan akibat politik kolonial yang cukup berhasil dalam membendung meluasnya pengaruh Pan-Islamisme di Indonesia. Kahin, ***Nationalism and Revolution...***, p. 61-2 dan 86-90.

terjadi secara tidak langsung, terutama melalui tokoh-tokoh pembaharu Islam di Timur Tengah. Sekalipun para islamolog mencacat bahwa pembaharuan Islam merupakan hasil kajian yang *original* kalangan Islam, namun jelas tidak dapat dipungkiri bahwa pembaharuan tersebut tidak lepas dari dominasi Barat serta percaturan sosial politik internasional, termasuk dunia Islam.

Penerimaan budaya Barat secara langsung lebih banyak didominasi kalangan yang tidak menjadikan Islam sebagai pijakan ideologi. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh nasional berpendidikan Barat yang kebanyakan kurang *concern* terhadap Islam. Namun demikian, bukan berarti umat Islam antipati terhadap kemajuan Barat terutama sistem demokrasi. Kalangan modernis Islam umumnya menyambut sistem demokrasi secara antusias, sama dengan tokoh-tokoh lain yang di kemudian hari menjadi *rival* ideologisnya. Demikian halnya kalangan Islam tradisional, yang meski persentuhan mereka dengan modernitas relatif kurang dibanding kalangan modernis, mereka juga tidak menunjukkan antipatinya terhadap demokrasi.

Sikap mereka pada demokrasi memang tidak sedemikian mendewakan sistem sosial politik tersebut, tapi jelas menerima tanpa antipati. Tidak hanya demokrasi yang disambut hangat kalangan Islam, melainkan juga berbagai macam ideologi Barat, bahkan yang mestinya anti-agama. Antipati terhadap ideologi baru tampak ketika komunisme nyata-nyata menunjukkan pertentangannya dengan Islam melalui berbagai cara. Sikap Islam terhadap perbedaan ideologi diekspresikan dengan cara-cara konstitusional, melalui prosedur dan mekanisme demokrasi. Eksekutor kematian demokrasi bukan dilakukan oleh tangan-tangan kalangan Islam, melainkan mereka yang berseberangan dengan Islam. Penodaan demokrasi lebih banyak dilakukan rival ideologis Islam, termasuk komunisme yang dengan intensitas tinggi melakukan berbagai tindakan provokatif baik dalam tataran politik kenegaraan maupun kemasyarakatan.

Meski belum banyak diwacanakan dari segi keagamaan, namun dapat dinyatakan bahwa Islam Indonesia sama sekali tidak menunjukkan pertentangan dengan sistem demokrasi baik secara konseptual maupun dalam perilaku politik para politisi Islam. Sampai detik terakhir berlangsungnya sistem demokrasi di Indonesia, masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, Islam bahkan merupakan satu-satunya kekuatan tersisa yang masih berusaha keras menuntut dihidupkannya sistem demokrasi, meski akhirnya mengalami kegagalan. Liddle menyatakan bahwa penentangan terhadap demokrasi semula justeru hasil mobilisasi sentimen kaum nasionalis, dan bukan Islam.[19]

Selama penerapan demokrasi maupun pemerintahan yang mengecewakan di awal kemerdekaan, Islam hanyalah salah satu aktor politik di antara aktor-aktor yang lain. Sepak terjang politik Islam sebenarnya juga masih tetap dalam kerangka mekanisme demokrasi. Bilamana tuntutan keras atas penerapan *syari'ah* oleh kalangan Islam yang berakibat kebuntuan konstituante dipandang sebagai penyebab kegagalan demokrasi, maka kalangan penentangnya juga layak memperoleh penilaian yang sama. Ini dikarenakan intoleransi dan ketidakmampuan membangun komunikasi politik yang konstruktif juga merupakan kebiasaan mereka yang tidak *concern* terhadap Islam. Bahkan secara ideologis dan dengan upaya-upaya sistematis mereka juga tak henti berusaha menyisihkan Islam dari percaturan sosial politik.[20]

---

[19] In the 1950s it was nationalist, not islamic, sentiment that was mobilizad against democracy. Simak kembali Liddle "Introduction: Crafting Indonesian Democracy", p. 7.

[20] Sejak kemerdekaan, tokoh-tokoh nasional yang umumnya berhaluan sekuler berusaha menghentikan gerakan politik Islam, yang mengakibatkan mereka kelompok mayoritas penduduk tetapi minoritas dalam politik. Bahtiar Effendy "Islam dan negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia" dalam ***Prisma***, No. 5, Mei 1995, p. 3-4.

KEGAGALAN DEMOKRASI DI INDONESIA MASA SOEKARNO DAN SOEHARTO

Pada dasarnya demokrasi merupakan cara mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat bangsa, yang mungkin saja digantikan cara lain bilamana ada yang lebih baik. Melalui proses pemilu yang demokratis kepentingan-kepentingan kelompok dalam masyarakat bangsa diolah hingga menghasilkan parlemen dan pemerintahan berikut berbagai instrumen-instrumennya yang akan menjalankan fungsi pengelolaan negara dan pemerintahan. Sementara parlemen memainkan peranan sebagai perwakilan masyarakat dalam membangun aturan dan mengawasi kinerja pemerintah.

.
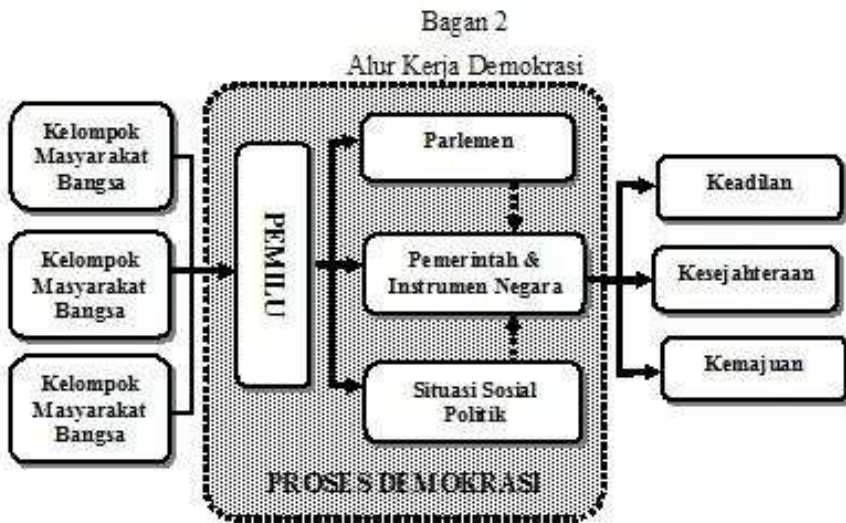
Dalam hal ini proses demokrasi ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian yang adil atas berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat dengan menentukan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Dengan begitu situasi sosial politik yang kondusif dapat dibangun atas dasar kepastian modalitas dukungan sosial masing-masing kelompok dalam *sharing* kekuasaan dan kesejahteraan secara adil. Pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat secara terkontrol. Secara sederhana, alur kerja demokrasi tersebut dapat digambarkan sebagaimana bagan 2.

Sebagai prosedur dan mekanisme politik sebenarnya demokrasi sudah dijalankan selama masa penerapan demokrasi konstitusional. Indonesia bahkan tercatat mampu melampaui proses pemilihan umum yang sangat demokratis dengan relatif lancar, tanpa masalah berarti. Hanya saja hasil dari mekanisme demokratis tersebut jauh dari idealitas yang diharapkan. Parlemen atau badan konstituante terbentuk, namun tak mampu menyelesaikan tugasnya sendiri. Dengan berbagai liku-likunya, pemerintahan berikut instrumen

pendukungnya juga terbentuk, namun kinerja yang mampu ditunjukkan jauh dari harapan.

Jangankan mewujudkan keadilan, kesejahteraan ataupun kemajuan bagi negara dan masyarakat, sedangkan membangun dirinya sendiri berfungsi layaknya sebuah pemerintahan yang mempunyai kewibawaan dan kekuatan memaksa saja tidak mampu. Pemerintahan hanya disibukkan beragam konflik politik yang berlarut-larut, ketidakjelasan sistem sosial politik dan bebagai aturan, bahkan nyaris mengantarkan pada perpecahan bangsa. Hasil dari mekanisme demokrasi tersebut bahkan melahirkan kekecewaan dan ketidakpercayaan pada demokrasi (liberal) sebagai sistem sosial politik ideal.

Berangkat dari problem akademik seperti disajikan pada bagian awal laporan penelitian ini, bahwa demokrasi tidak ubahnya dengan tanaman anggur California yang berbuah berbeda ketika ditanam di Probolinggo Jawa Timur, maka pemahaman atas perbedaan hasil tersebut perlu ditelusuri dari berbagai segi, baik dari segi demokrasi itu sendiri sebagai benih yang ditanam, perkembangan masyarakat Indonesia sebagai lahan di mana demokrasi ditanam, para pelaku politik utama sebagai penentu langsung berjalannya demokrasi, serta atmosfir sosial politik domistik maupun global yang melingkupi alam kesejarahan selama persemaian dan pertumbuhan demokrasi.

Analisis ini tentu saja berbeda dari yang disajikan para peneliti dan pengamat kebanyakan yang umumnya lekat dengan logika Parsonian, seperti tampak pada analisis Feith, Emmerson ataupun Liddle. Karena itu, penjelasan model Talcot Parson dicoba untuk dihindari dengan pertimbangan bahwa analisis para pengkaji masalah politik yang menekankan peran fungsi memperlihatkan sisi kelemahan terutama dalam menjelaskan perubahan masyarakat, sekalipun tetap harus diakui bahwa kajian ini tidak mungkin lepas sama sekali dari beberapa pandangan dan kesimpulan yang dibuat peneliti terdahulu yang menggunakan paradigma tersebut. Meski mungkin akan lebih condong pada tinjauan strukturalistik, namun

penelitian ini berusaha mengkaitkannya dengan pelaku, hingga diharapkan terbangun suatu pemahaman strukturatif. Artinya, fenomena penerapan demokrasi adalah bagian dari proses pembentukan perilaku dalam alur kesejarahan yang tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel pelaku semata, melainkan senantiasa kait-mengkait dengan konteks kesejarahan yang lebih luas.[1]

A. Kegamangan Wacana Demokrasi

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sebenarnya cukup apresiatif terhadap demokrasi baik secara konseptual maupun dalam praktik sosial dan poliyik. Tidak ada satupun kelompok yang menolak, bahkan sekedar mempertanyakannya. Ini terjadi karena

---

[1] Runtuhnya demokrasi konstitusional maupun tegaknya Demokrasi Terpimpin dinilai Feith sebagai akibat kekalahan kalangan pragmatis, adminsitratur atau pemecah masalah (*problem solver*) yang diidentifikasikan dengan tokoh-tokoh seperti Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo dan juga Sjahrir. Simak kembali Feith, ***The Decline of...***, p. 572-8, simak juga konstelasi segi tiga yang digambarkan dalam huruf T dalam Feith, ***Soekarno-Militer...***, p. 102-3. Sebagai fakta sejarah, kesimpulan tersebut mewakili konstelasi politik Indonesia pada masanya, dan harus diakui sangat membantu pemahaman dinamika demokrasi di Indonesia. Persoalannya, di luar konstelasi politik tersebut tentunya terdapat variabel-variabel lain, yang mungkin turut membentuk tradisi dan kecenderungan-kecenderungan sosial politik. Emmerson yang melihat akar kultural masyarakat Indonesia sebagaimana dipetakan Geertz ke dalam *Santri*, *Priyayi* dan *Abangan*, yang disederhanakan menjadi *Abangan-Santri* saja sebagai inti persoalan. Tesis utama Emmerson menyatakan bahwa kegagalan demokrasi tersebut sebagai akibat ketidakmampuan Orde Baru menunjukkan persaingan kekuatan kultural antara *Abangan-Santri*, di mana pemerintah yang didominasi kalangan yang tidak cukup dekat dengan ortodoksi agama dipandang merepresentasikan kultur *Abangan*. Pemerintah tidak berusaha mengintegrasikan kaum santri, tetapi berusaha membendung oposisi mereka dengan cara depolitisasi. Simak Emmerson, ***Indonesia's Elite***, p. 247. Hampir sama dengan Emmerson, Liddle juga melihat situasi Orde Baru sebagai pertarungan antara perspektif politik-kultur tradisional Jawa. Simak Liddle "Politics and Culture in Indonesia", p. 95-9.

masyarakat Indonesia sebenarnya juga tidak kering dari praktik demokrasi meski penerapannya terbatas pada konteks permasalahan yang sederhana dan belum menyangkut tatanan sosial politik dan pemerintahan yang kompleks. Hanya saja, hal itu belum untuk memberi jaminan penerapan demokrasi berlangsung konstruktif, apalagi menghasilkan perbaikan situasi sosial politik dan kesejahteraan sosial.

Tradisi demokrasi, dalam arti kebiasaan melakukan *sharing* pendapat dalam pengambilan keputusan, sangat boleh jadi sudah ada pada setiap bangsa, tapi bagaimanapun demokrasi modern adalah tata nilai Barat yang dibangun atas dasar pemikiran humanistik yang berkembang seiring dinamika peradaban Barat. Apresiasi terhadap demokrasi modern berarti penerimaan nilai-nilai baru oleh komunitas masyarakat yang kultur, tata nilai dan perkembangan sosialnya tidak sama persis dengan masyarakat Barat. Barat menerapkan demokrasi liberal saat masyarakatnya dari mula sudah menganut pola pikir liberal.[2] Sementara penerapannya di Indonesia berlangsung saat masyarakat masih berpola pikir komunalistik dan sangat tergantung pada keputusan *opinion leader*.

Tidak sebagaimana masuknya agama-agama dan tradisi luar, diterimanya demokrasi yang berbasis ideologi liberal memang tidak melalui proses adaptasi ataupun akulturasi secara wajar, di mana secara akulturatif masyarakat terbangun oleh pola pikir liberal. Padahal, diterimanya suatu paham sosial politik oleh suatu komunitas berarti pencangkokan budaya komunitas tertentu kepada komunitas lain. Sementara setiap komunitas tidak pernah hampa dari tradisi dan budaya yang tidak selalu mudah menyesuaikan dengan tradisi ataupun paham baru dari luar. Tanpa proses akulturasi yang wajar,

[2] Sesaui namanya, demokrasi liberal mestinya diterapkan pada negara yang sejak semula bersifat liberal baru demokratis. Simak C.B. Macpherson, ***The Real World of Democracy***, (Oxford: Clarendon Press, 1971), p.4.

maka munculnya berbagai distorsi dalam praktik maupun pemahaman demokrasi tidak dapat dihindari.

Akulturasi memang tidak selalu berjalan mulus, kecuali melampaui proses sejarah yang wajar dan memakan waktu cukup panjang. Pola penerimaan suatu ideologi secara tiba-tiba bukan tidak mungkin menimbulkan berbagai *komplikasi kultural*[3] dan sosial politik yang tidak selalu dapat diramalkan. Bisa jadi kultur setempat menjadi kacau-balau akibat tekanan kultur baru yang dipengaruhi paham ideologi dari luar, atau sebaliknya, ideologi yang diapresiasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akulturasi yang berhasil tanpa menimbulkan banyak konflik hanyalah penerimaan agama, tradisi dan budaya luar ke dalam kebudayaan nusantara, meski dengan konsekwensi implementasinya berbeda dari yang seharusnya. Persoalan, bahkan konflik, kemudian muncul tanpa dapat dihindari ketika gagasan-gagasan baru berkembang dan menuntut purifikasi yang hadir dalam bentuk imperasi ideologis. Sedangkan pola-pola ideologis cenderung berdimensi normatif yang tak membuka tawar-menawar hingga tidak memungkinan dialog berlangsung wajar.[4]

Demokrasi bukanlah sekedar persoalan prosedur-mekanistik, melainkan salah satu bagian dari tata nilai Barat yang dibangun atas dasar pemikiran humanistik dengan pola relasinya yang rasional. Demokrasi juga merupakan sebuah paham sosial politik, yang mengekspresikan cara pandang manusia terhadap dunia. Demokrasi setara dengan ideologi-ideologi lain, sosialisme, komunisme, fasisme dan sebagainya, sekalipun secara konseptual tidak didahului oleh satu proses ideologisasi yang spesifik, sebagaimana ideologi-ideologi pada

[3] Tercetak miring adalah istilah penulis sendiri

[4] Secara paradigmatik, kecenderungan tersebut dapat dibandingkan dengan pola pikir Marx. Di samping penuh pesan etika dan moral, juga diliputi eksplotasi kelas yang menampatkan yang lain (negara) sebagai ancaman (penindas). Benturan sosial akan selalu tak dapat dihindari karena karena memperjuangkannya memiliki nilai "jihad" (perjuangan) demokrasi yang luhur. Simak Macpherson, ***The Real World...***, p. 13-5.

umumnya. Konstruktif tidaknya jalannya demokrasi, dengan demikian, memerlukan dukungan pandangan hidup, pola pikir, sikap dan integritas moral yang khas, di samping dukungan situasi sosial politik yang mengiringi penerapannya.

Sekalipun sebagian nilai-nilainya sudah lekat dalam tradisi sosial dan penerapannya disambut hangat masyarakat negeri ini, namun sebenarnya penerapan demokrasi modern di Indonesia memang tidak terjadi melalui proses akulturasi dalam praktik sosial politik maupun diskursus pemikiran yang memadai. Dalam praktiknya, tidak ada satupun kerajaan nusantara pernah berkesempatan menerapkan demokrasi dalam mengelola sistem sosial politik dan pemerintahannya. Di samping selama kurun penjajahan mayoritas sudah kehilangan otoritasnya politiknya, visi para pejabat kerajaan jauh dari harapan untuk membangun tradisi demokrasi. Mereka bahkan mengokohkannya dalam etiket kultural di lingkungannya, sebagai kompensasi ketidakberdayaan mereka secara politik dan ekonomi di hadapan pemerintahan asing.

Keberadaan *Volksraad* juga tidak cukup memberi pengalaman demokrasi sekalipun dari segi istilah berarti dewan rakyat. Hal ini dikarenakan keberadaannya masih sekedar badan penasehat, di mana setiap keputusan sangat tergantung pada gubernur jenderal. Sekalipun tokoh-tokoh bumi putera yang duduk dalam *Volksraad* tidak merepresentasikan keterwakilan rakyat Indonesia, tapi harus diakui bahwa sedikir banyak telah memberikan pendidikan politik keparlemetariatan. Setidaknya, keberadaan mereka di lembaga tersebut menjadi bagian dari tangga perjuangan yang mampu mengantarkan pada gerakan kemerdekaan mendekati tujuan utamanya, kemerdekaan.

Pola-pola relasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi hanya hidup dalam kultur sosial di luar kerajaan. Sekalipun potensi-potensi demokrasi hanya berkembang dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan yang sederhana dan dalam jalinan komunikasi

politik antar kaum pergerakan, namun cukup mendukung meluasnya visi masa depan pemerintahan Indonesia di kemudian hari. Kebutuhan akan sistem demokrasi muncul seiring berkembangnya tuntutan kemerdekaan, di mana negara baru, Indonesia, tidak memungkinkan penerapan sistem lain selain demokrasi. Penerapan demokrasi di Indonesia terjadi begitu saja sebagai sebuah keharusan sejarah, keniscayaan tradisi dan kebiasaan seiring dinamika masyarakat bangsa ini ketika memasuki kurun modern.

Penerimaan paham demokrasi juga tidak pernah melalui wacana konseptual memadai, karena perhatian tokoh-tokoh nasional lebih banyak ditujukan pada masalah ideologi dan sangat sedikit yang mempersoalkan, dan apalagi mengupayakan kesiapan masyarakat untuk berdemokrasi. Secara diskursif pijakan konseptual demokrasi di Indonesia relatif kabur, tapi impian akan negara demokrasi sangat jelas. Demokrasi telah diterima sebagai sebuah prinsip umum, yang corak maupun bentuknya belum dipersoalkan, sekalipun implikasi dari setiap model demokrasi sudah barang tentu berbeda.

Demokrasi yang tersirat dalam Pancasila dan menjadi dasar negara bukan semata mengacu pada sistem demokrasi Barat, melainkan berangkat dari nilai-nilai keindonesiaan sendiri, terutama yang terkait dengan kebiasaan bermusyawarah. Diakomodasikannya sistem perwakilan merupakan hasil apresiasi terhadap tradisi Barat yang memang sudah terbiasa dengan sistem parlementariat. Lemahnya keterikatan para pelaku politik dan pemerintahan dengan aturan tertulis menyebabkan Pancasila yang hanya menyajikan prinsip-prinsip umum terbuka pada munculnya beragam penafsiran. Berbagai model demokrasi di Indonesia dapat saja berkembang dengan mendasarkan diri pada Pancasila. Karena itu, dalam praktiknya di kemudian hari berubah-ubah, dari sistem presidensiil menjadi parlementer, dan kemudian kembali presidensiil; serta dari demokrasi parlementer, terpimpin dan Pancasila.

Di samping itu, wacana demokrasi di dunia yang seharusnya menjadi referensi praktis maupun konseptual juga masih berada

dalam kegamangan. Demokrasi masih memasuki masa pengujian sejarah, antara demokrasi sosial yang menjelma ke dalam komunisme, dan demokrasi liberal yang lekat dengan kapitalisme. Keadaan ini mempengaruhi visi para pemimpin republik ini tentang idealitas corak demokrasi yang harus dianut. Kuatnya nasionalisme di kalangan tokoh dan pemimpin dunia ketiga serta kekhawatiran akan dampak perseteruan adi-daya, membuat mereka cenderung menghindar dari afiliasi politik maupun mengikuti salah satu model demokrasi kedua adi-daya.

Pada umumnya mereka tidak ingin menjadi negara liberal, sekaligus tidak ingin menganut komunis. Dorongan nasionalisme yang besar serta pertarungan kedua negara adi-daya yang gencar melakukan perluasan pengaruh, membuat setiap masyarakat bangsa memiliki kesempatan membangun pemahaman demokrasi yang berbeda dari keduanya. Di tengah menguatnya persaingan kedua ideologi yang saling mengklaim sebagai demokrasi ideal, para pemimpin negara dunia ketiga berkesempatan melakukan eksperimen demokrasinya sendiri. Situasi menjadi berbeda ketika pertarungan ideologi dunia pada akhirnya dimenangkan oleh kelompok liberal yang ditandai dengan runtuhnya pilar utama komunisme, Uni Sovyet. Referensi demokrasi ideal menjadi semakin jelas, di mana demokrasi liberal kian kokoh sebagai satu-satunya referensi dan parameter yang sulit ditolak.

Perjalanan sejarah Indonesia kurun awal sebenarnya juga menunjukkan bahwa secara implisit demokrasi liberal diakui sebagai solusi yang paling dapat diterima semua pihak. Para tokoh nasional tidak dapat mengingkari bahwa demokrasi liberal merupakan cara paling adil untuk membangun *sharing* kekuatan di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Kesulitan demokrasi muncul ketika konstelasi politik yang berkembang menempatkan isu-isu ideologis sebagai bahan perdebatan. Ideologi-ideologi sosial politik yang hadir di tengah kehampaan ruang pemikiran masyarakat bangsa ini dari pemikiran-pemikiran prograsif menjadikan ideologi dipuja setara

dengan agama, sebuah keyakinan yang mustahil dikompromikan dengan keyakinan lain. Di sisi lain, kalangan agama yang merasa terancam oleh kehadiran ideologi tersebut juga mengideologikan agama yang semula hanya menjadi bagian dari kultur sosial.

Rendahnya pengetahuan dan tingkat berfikir masyarakat, di samping atmosfir sosial politik global yang melingkupi ketika itu, memungkinkan berbagai paham ideologi dengan mudah diindoktrinasikan pada masyarakat luas. Kehadiran ideologi seolah menjadi obat kuat dengan efek samping jangka panjang. Wawasan tentang eksistensi kemanusiaan yang diusung oleh setiap ideologi membukakan kesadaran, semangat dan keinginan untuk merdeka, tapi sekaligus menajamkan fragmentasi sosial dalam bentuk konflik primordial. Ideologi merusak harmoni sosial masyarakat negeri ini, di mana karateristik masyarakat yang komunalistik, mengutamakan harmoni dan toleransi terhadap perbedaan, rusak akibat meningkatkan egoisme dan ambisi kepentingan ideologi politik.

Ini terjadi karena penerimaan ideologi belum sampai pada pengembangan ataupun penyesuaian dengan khazanah tradisi dan budaya Indonesia. Ideologi masih setara dengan agama yang harus diterima mentah-mentah, dibela antara hidup dan mati, bukan sebagai wacana yang harus dikembangkan. Paradigma perseteruan ideologi yang berlangsung dengan pola menguasai atau dikuasai menyebabkan revolusi politik seringkali menjadi cara paling favorit untuk memuluskan jalan penguasaan satu kelompok atas yang lain.

Demokrasi liberal potensial menjadi ajang pertarungan dan bukan *sharing* atau dialog antar kekuatan ketika diterapkan di tengah situasi sosial politik yang mengedepankan dialektika ideologis. Isu-isu ideologis sulit diputuskan melalui cara-cara parlementariat. Terlebih lagi bila ideologi tersebut ditunjang oleh fanatisme dan tajamnya sentimen antar kelompok gerakan sampai ke tingkat massa. Setiap gagasan hanya memberi pilihan untuk diterima atau ditolak, karena kekuatan logika cenderung dikebelakangkan jauh di bawah logika kekuatan.

Barangkali di sinilah letak kelemahan demokrasi liberal. Demokrasi dalam pengertian liberal kurang berdaya ketika digunakan dalam penyelesaian persoalan-persoalan ideologis. Apalagi bilamana ideologi yang digunakan mencapai taraf fanatisme dan sentimen antar golongan yang sangat tajam. Demokrasi dengan pola liberal hanya mampu memfasilitasi *sharing* dalam masalah distribusi kekuasaan dan kesejahteraan sosial ekonomi, tetapi sulit ketika diterapkan dalam menyelesaikan masalah perbedaan ideologis. Demokrasi yang diterapkan dalam konteks pertarungan ideologi bakan potensial mengelupaskan dimensi-dimensi etis dari kehidupan sosial dan politik yang memberikan jaminan bagi tegaknya sistem politik yang beradab.

Kegagalan demokrasi liberal yang tidak memberikan hasil seperti harapan menyebabkan Soekarno dan Soeharto, menyimpulkan bahwa demokrasi Barat tidak cocok dengan kondisi Indonesia. Barangkali karena nasionalisme yang terlalu tinggi, menjadikan mereka tidak menempatkan situasi sosial politik dalam negeri sebagai variabel yang harus menyesuaikan diri dengan demokrasi. Mereka bukan mengarahkan sikap masyarakat untuk menghargai aturan main dan etika demokrasi, melainkan memilih melakukan modifikasi demokrasi, dengan menciptakan demokrasi alternatif yang terkontrol, sekalipun pada akhirnya bukan demokrasi.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pada tingkatan makro, pola pikir falsifikasionistik, di mana sistem baru menggantikan sama sekali sistem sebelumnya, mendominasi alam pikiran para pemimpin negeri ini. Ketidakpuasan atas penerapan suatu sistem sosial politik akan cenderung digantikan dengan sistem yang lain. Karena itu, selain diwarnai antipati terhadap kolonialisme dan imperialisme, era Soekarno juga dipenuhi antipati terhadap hal-hal yang berbau Barat, termasuk model demokrasinya. Mereka diliputi oleh tingginya harapan untuk membangun sebuah negara nasional dengan menonjolkan ekonomi, sosial dan budaya, bahkan seni nasional yang menggantikan hal-hal berbau kolonial .

Pola ini berlangsung terus hingga masa pemerintahan Soeharto dan sesudahnya. Digunakannya terminologi "Orde Lama", "Cara Lama" atau "Pola-pola lama", Orde Baru" hingga "Orde Reformasi" senantiasa muncul dalam perbendaharaan bahasa politik, yang intinya menegaskan bahwa masa lalu atau hal-hal yang berkaitan dengan periode sebelumnya harus ditinggalkan. Nuansa ideologis nampak jelas tidak hanya pada dataran apresiasi dan afiliasi ontologisnya, tetapi juga merasuk pada dimensi-dimensi epistemologis. Cara berfikir ideologis menjadi pola umum dalam pemikiran, sikap dan tindakan politik. Ini mengakibatkan perubahan-perubahan dan solusi-solusi politik cenderung mengikuti alur berfikir yang radikal.

Demokrasi dalam tradisi pemikiran dan kultur sosial masyarakat pedesaan di Indonesia dan kaum pergerakan dihadapkan pada kompleksitas persoalan demokrasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Barangkali praktik demokrasi dalam masyarakat pedesaan, suku-suku bangsa dan kaum pergerakan di Indonesia terlalu sederhana dibanding sofistikasi persoalan riil yang harus dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan demokrasi sebagai wahana dialektika ideologi juga mendistorsi khazanah tradisi dan kultur yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam penerapan demokrasi, sehingga antara sistem dan kultur sosial politik berjalan saling menunjang.

Akselerasi penerimaan ideologi jauh melampaui dinamika kultural dan modalitas sosial masyarakat Indonesia menyebabkan penerapan demokrasi modern yang hanya memfasilitasi pergulatan paham-paham ideologi dan melahirkan semacam kejutan budaya. Berbeda dari akulturasi agama-agama di Indonesia, akulturasi paham ideologi, termasuk demokrasi liberal Barat berlangsung dengan terlebih dahulu memperkeruh kultur sosial politik dengan militansi ideologi. Terlalu kuatnya nilai-nilai baru sebagai doktrin menyebabkan tata nilai lama banyak diabaikan. Padahal tata nilai etika dan budaya yang sudah mengakar di Indonesia, seperti toleransi

dan saling hormat menghormati merupakan elemen yang mutlak diperlukan dalam membangun sebuah demokrasi yang konstruktif.

Di tengah situasi sosial politik yang mengedepankan dialektika ideologis, tampaknya demokrasi liberal potensial menjadi ajang pertarungan dan bukan *sharing* atau dialog antar kekuatan. Isu-isu ideologis sulit diputuskan melalui cara-cara parlementariat. Terlebih lagi bila ideologi tersebut ditunjang oleh fanatisme dan tajamnya sentimen antar kelompok gerakan sampai ke tingkat massa.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga berakibat dialektika terhadap wacana demokrasi lemah. Masyarakat menjadi terlalu mudah dikendalikan elit serta dikondisikan untuk mendukung ataupun menentang kebijakan politik terlepas benar ataupun salah. Ketika etika politik kalangan elit yang didukung masih rendah sementara kontrol dan sikap kritis masyarakat tidak berkembang, maka akan cenderung dimanfaatkan kalangan elit untuk melakukan manuver sah sekalipun tidak etis, bahkan irasional. Akibatnya demokrasi cenderung diperalat untuk memuluskan tujuan-tujuan politik sekalipun dengan muara lahirnya keputusan-keputusan yang tidak demokratis.

B. Perubahan Situasi Sosial

Bila ditelusuri dari perubahan konstelasi kekuatan politik yang berkembang selama kurun kesejarahan sejak kurun akhir masa kolonial dapat dipahami bahwa ketidakkonstruktifan penerapan demokrasi memiliki kaitan dengan perkembangan struktur sosial politik masyarakat bangsa ini sejak era kolonial ke nasional, di samping atmosfir sosial politik global yang tidak dapat diabaikan. Penerimaan masyarakat bangsa ini terhadap demokrasi tidak ditunjang oleh berbagai aspek yang memungkinkan demokrasi berlangsung wajar. Hingga akhir pemerintahan Orde Baru perjalanan demokrasi di Indonesia setidaknya melampaui 5 (lima) fase kesejarahan:

a. Fase pembentukan kekuatan sosial politik, yakni ketika mulai berlangsung pengelompokan masyarakat secara tegas menurut garis ideologi politik dan kepentingan, sejak masa pergerakan nasional.

b. Fase pengentalan dan fragmentasi kekuatan sosial politik, yang berlangsung selama tradisi parlementariat dalam KNIP yang menjadi ekspresi pertama identitas kelompok dalam percaturan politik.

c. Fase deviasi demokrasi, yang berlangsung selama penerapan Demokrasi Terpimpin, di mana tokoh sentral republik ini melakukan eksperimentasi demokrasi alternatif sebagai akibat ketidakpuasan mereka atas hasil yang dicapai dalam demokrasi konstitusional.

d. Fase konsolidasi deviasi demokrasi, yang berlangsung pada kurun pemerintahan Orde Baru, di mana setelah kegagalan Demokrasi Terpimpin membuka jalan bagi para penyokongnya membangun pemerintahan yang kuat meski praktis menjauhkan demokrasi dari praktik sosial politik masyarakat Indonesia.

e. Fase demokratisasi, yang berlangsung setelah runtuhnya Orde Baru, di mana para pengelola negara lebih siap menerapkan kembali demokrasi konstitusional. Kematangan konsep demokrasi serta kesiapan infrastruktur sosial, baik daya kritis masyarakat, media massa, dependensi publik, serta lunturnya legitimasi tokoh atau kelompok tertentu (militer), menjadikan potensi konflik ideologis dapat dengan sendirinya tereliminasi, serta memperkecil kemungkinan bangkitnya otoritarianisme.

Bagan 3
Pergeseran Fragmentasi Kekuatan sosial Politik Sejak Akhir Masa Kolonial Belanda, Jepang dan Awal Kemerdekaan

Kesulitan penerapan demokrasi dari segi pergeseran kekuatan sosial politik sejak masa kolonial, yang mementukan ketajaman tingkat fragmentasi politik pasca kemerdekaan, secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana bagan 3. Ketika berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kekuatan sosial politik Indonesia hanya merupakan subordinasi, atau bahkan sub-subordinasi, kekuasaan pemerintah kolonial, yang kurang berarti kekuatannya. Betapaun besar pengaruh sebuah kelompok sosial politik yang terbangun, seluruhnya berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Mereka bahkan tidak akan eksis kecuali dengan pengakuan resmi pemerintah kolonial. Sekalipun pertentangan antar ideologi dan kelompok sudah mulai muncul terutama antara SI dan PKI, namun konsentrasi setiap kelompok sosial politik lebih terfokus pada upaya mewujudkan kemerdekaan, yang sedikit banyak mengeliminir kerasnya konflik antar kelompok. Di samping itu, setiap kelompok masih harus tunduk pada kendali pemerintah kolonial sebagai musuh bersama mereka.

Politik pemerintah pendudukan Jepang memungkinkan nasionalisme masa pergerakan nasional memperoleh persemaian yang subur dan berkembang ke arah heroisme revolusioner. Dengan

sendirinya kelompok-kelompok sosial politik tersebut mengalami proses pengentalan ideologi dan militansi perjuangan secara meluas seiring fasilitasi organisasi-organisasi dan berbagai pelatihan yang diberikan Jepang. Karena itu, dalam bagan tersebut kekuatan kelompok-kelompok yang masa kolonial Belanda digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran menjadi lebih besar pada masa pendudukan Jepang. Sekalipun semakin besar, namun setiap kelompok belum cukup berarti dalam mengubah iklim sosial politik dalam negeri, karena pemerintah pendudukan Jepang masih jauh lebih dominan dalam menentukan stabilitas pemerintahan, yang memungkinkan konflik dan ketidaksejalanan antar kelompok tidak menimbulkan dampak yang berarti.

Setelah kemerdekaan diproklamirkan, kelompok-kelompok kekuatan politik dalam negeri menjadi kelompok tersisa, yang di samping harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan juga bersaing satu sama lain untuk menjadi yang paling dominan. Tidak adanya kelompok yang benar-benar dominan menjadikan konstelasi sosial politik potensial jatuh ke dalam konflik-konflik kepentingan. Situasi revolusioner menjadikan konstelasi kekuatan sosial politik pasca pendudukan Jepang menampakkan bahwa keberadaan mereka lebih mencerminkan faksi-faksi perjuangan dari pada elemen negara. Pada masa perang revolusi kemerdekaan inilah muncul kepentingan baru, militer, yang merasa memiliki andil besar dalam menegakkan kedaulatan RI selama perang.

Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh melalui proses revolusi panjang penuh pertumpahan darah, membawa dampak pada kurangnya kesinambungan struktur kekuasaan dari rejim kolonial ke nasional. Perpindahan kekuasaan secara total kepada pemerintahan yang sama sekali baru dan mengambang selama lima tahun menyebabkan munculnya terlalu banyak celah persoalan yang menyulitkan konsolidasi negara. Dengan proses kemerdekaan yang revolusioner, berarti secara tiba-tiba struktur lama digantikan struktur baru yang tidak jelas bentuknya. Keberlanjutan kekuasaan

dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional tidak dapat berlangsung secara linier yang memungkinkan struktur kekuasaan terjaga kewibawaannya sebagaimana penguasa sebelumnya. Sebagaimana mayoritas negara-negara baru pasca kolonial, Indonesia dihadapkan pada pluralitas kekuatan dan kepentingan sosial politik yang sangat kompleks. Pluralitas kekuatan tersebut menjadikan kekuatan sosial politik dalam negeri tidak mudah dikonsolidaskan. [5]

Berbagai kelemahan pemerintahan dan celah-celah tatanan sosial politik ketika itu memungkinkan berkembangnya iklim sosial politik yang mengabaikan etika dan menempatkan tanggung jawab nasional di bawah kepentingan pribadi dan kelompok. Di tengah situasi negara dan pemerintahan yang masih labil, tidak ada kekuatan yang benar-benar berkuasa dan mampu menjamin stabilitas sosial politik. Hal ini dikarenakan proses revolusi yang panjang melahirkan terlalu banyak kelompok-kelompok kekuatan yang turut menyumbangkan jasa dan harus diakomodir secara memuaskan dalam pengelolaan negara. Masa-masa yang semula diharapkan diisi dengan perbaikan kondisi dalam negeri, terutama kesejahteraan, teralihkan dalam rumitnya masalah *nation-building*.[6]

Di samping akibat konsolidasi dan tempaan militansi kelompok semasa pendudukan Jepang, revolusi yang panjang juga melahirkan terlalu banyak persoalan politik dan keamanan yang harus dihadapi dalam rangka konsolidasi negara. Karena itu, kemerdekaan penuh yang diraih masyarakat bangsa ini juga diikuti terlalu banyak konflik

[5] Pluralitas sendiri merupakan problem umum negera baru, di mana sangat jarang ada negara yang berpenduduk homogen, terutama negara bekas jajahan. Kurang dari 10 % negara di dunia yang berpenduduk homogen. Mereka rentan mengalami konflik SARA, di mana ada kecenderungan setiap kelompok untuk memonopoli politik untuk kepentingan kelompoknya. Geertz “Primordial Sentiments ...”, p. 123.

[6] Energi kriatif para pengelola negara tersedot habis-habisan dalam rangka pergolakan untuk menentukan bentuk negara bangsa yang hendak dibangun. Manuel Kaisiepo “Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Biroktasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru” dalam ***Jurnal Ilmu Politik***, No. 2, p. 22.

dalam negeri yang tidak mudah diselesiakan. Konflik-konflik yang semula hanya terjadi di lembaga parlementariat, KNIP, kemudian meluas pada berbagai sektor pemerintahan. Fragmentasi kekuatan sosial politik yang berimbang dan sulit membangun konsensus menyulitkan pembentukan pemerintahan yang benar-benar solid dan stabil. Karena itu, kurun ini marak dengan pemerintahan yang jatuh bangun dalam waktu relatif singkat.

Pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda yang tidak tulus meninggalkan problem disintegrasi di banyak wilayah. Di samping itu, setiap kebijakan senantiasa berada pada posisi dilematik, terutama karena lemahnya infrastruktur sosial ekonomi peninggalan kolonial dalam menunjang jalannya pemerintahan. Dalam situasi yang penuh konflik, gelombang ketidakpuasan dengan mudah dikobarkan baik di lembaga parlemen dan pemerintahan ataupun di tengah masyarakat. Konsolidasi negara yang belum efektif menjadikan terlalu banyak tindakan-tindakan yang tidak terkoordinasi dapat dilakukan aparat negara dan dikendalikan oleh negara.

Pemilihan umum yang diharapkan dapat menjadi solusi yang adil dan berhasil dilaksanakan secara jujur dan adil tidak mampu mengubah konstelasi politik secara signifikan. Tidak adanya satu kekuatan sosial politik yang benar-benar dominan menyebabkan persaingan terus berlanjut. Pemilu bahkan memperluas fragmentasi politik yang semula terpusat pada kalangan elit politik meluas ke tingkatan masyarakat bawah. Masyarakat turut terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok sosial politik dan semakin memperluas kerusakan harmoni sosial yang terjalin ratusan tahun sebelumnya. Perbedaan tradisi, sosial dan budaya masyarakat yang sebelumnya tidak banyak menimbulkan masalah, memperoleh legitimasi dan menjadi modal terjadinya konflik horizontal.

Bagan 4
Pola Fragmentasi Sosial Politik Sebelum dan Sesudah Pemilu 1955
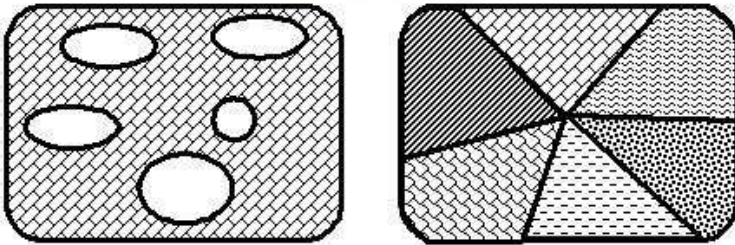
Perolehan suara dalam Pemilu seolah mempertegas sekat ideologis dan afiliasi politik masyarakat. Perkembangan sosial di Indonesia pasca pemilihan umum justeru mengubah konstelasi sosial politik menjadi semakin kontra produktif. Konflik politik yang sebelumnya lebih banyak mewarnai pertarungan politik elit melebar menjadi konflik sosial yang meluas hingga masyarakat bawah. Perubahan konstelasi sosial politik yang terbangun sebagai akibat pemilihan umum 1955 secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana bagan 4.

Sebelum Pemilu banyak anggota masyarakat yang tidak berafiliasi pada partai politik ataupun ideologi manapun. Fragmentasi politik semula hanya terjadi pada lingkaran mereka yang memang terlibat dalam partai politik. Masyarakat yang tidak terkait dengan partai politik hidup cukup harmonis dengan kultur dan tradisi sosial mereka. Perbedaan-perbedaan kultur dan tradisi tidak menimbulkan konflik berarti, karena masing-masing hanya disibukkan oleh persoalan domestik komunitasnya sendiri. Kondisi tersebut berbeda sesudah Pemilu, di mana hampir tidak satupun komunitas masyarakat yang tidak tercakup ke dalam suatu ikatan ideologi dan partai politik. Akibatnya, masyarakat secara *massive* tercerabut dari kultur tradisionalnya, di mana ideologi dan partai politik dengan

egoisme serta heroismenya menjadi identitas baru yang memilah dan memecah-belahkan masyarakat dari harmoni sosialnya. Friksi tersebut kian menajam oleh proses indoktrinasi dan pelatihan-pelatihan partai menyebabkan perbedaan sosial memperoleh sekat yang kokoh dan legitimasi untuk membangun konflik dan perseteruan.[7]

Di satu sisi, Ini menunjukkan keberhasilan pembangunan kesadaran politik yang memungkinkan seluruh elemen sosial terlibat dalam percaturan politik, tapi di sisi lain mengantarkan masyarakat bangsa pada situasi yang semakin sulit, di mana demokrasi menjadi semakin kehilangan rasionalitasnya. Pada dasarnya situasi ini telah menempatkan rakyat sebagai alat politik bagi kalangan elit, sedang idealnya demokrasi menuntut kemampuan bekerjasama secara bijak dan konstruktif para politisi. Ini baru terjadi manakala masyarakat sudah mampu menilai secara rasional sepak terjang para politisi. Runyamnya penerapan demokrasi di Indonesia terjadi karena rendahnya kemampuan berfikir masyarakat masih memungkinkannya dieksploitasi untuk mendukung kepentingan elit.

Lemahnya kontrol sosial membuka peluang demokrasi dimanfaatkan sebagai alat melanggengkan kekuasaan oleh para politisi. Demokrasi tidak ditempatkan sebagai ideologi dan aturan main yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan integritas moral. Perolehan suara partai-partai politik menjadi pembenar sikap dan tindakan politik kalangan politisi. *Sharing* politik yang seharusnya digunakan sebagai proses yang rasional justeru berlangsung secara irasional. Konflik politik yang sebelumnya hanya pada tingkatan elit

[7] Menurut Snyder, nasionalisme biasanya lemah sebelum demokratisasi, dan baru muncul selama tahap awal demokratisasi, yang diakibatkan oleh ulah kalangan elit yang berusaha menarik dukungan. Hanya saja, dalam kasus Indonesia tampaknya tidak demikian. Kekacauan politik sebelum Pemilu sudah kacau justeru diperluas oleh proses Pemilu yang demokratis. Namun demikian, tampaknya ada benarnya bahwa demokrasi yang setengah hati biasanya ditutupi dengan pengobaran nasionalisme. Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 23.

meluas menjadi konflik primordial pada masyarakat bawah secara hampir merata. Di tengah perkembangan situasi psikologis semacam ini tentu tidak memungkinkan demokrasi dapat melahirkan sebuah tatanan sosial politik yang konstruktif.

Pada dasarnya konflik politik lebih mewakili elit dari pada masyarakat. Karena itu, perluasan partisipasi politik pada kelompok sosial yang belum benar-benar membutuhkannya tampaknya hanya memperluas eskalasi konflik. Umumnya masyarakat lebih membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, bukan politik bahkan demokrasi. Ketika tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat masih tertinggal, mereka akan dengan mudah dieksploitasi politisi untuk menunjang kepentingannya, dan tidak demikian halnya dengan mereka yang pada kondisi sebaliknya. Di negara maju, di mana persoalan kesejahteraan tidak terlalu menjadi persoalan, tingkat partisipasi politik semakin rendah, karena perhatian orang lebih tertuju pada masalah-masalah *private*, makanan, tempat tinggal, seks dan hiburan.[8]

Pada masa demokrasi liberal, media massa memang menikmati kebebasan penuh, namun tidak disertai independensi. Kebebasan media massa belum ditunjang independensi dan kebutuhan masyarakat akan informasi serta kemampuan mereka mengaksesnya. Karena itu, keberadaan pers justru turut menyumbangkan penajaman fragmentasi sosial, karena tidak ditunjang independensi dan daya kritis pers sendiri maupun pembacanya. Afiliasi pers pada kepentingan politik menempatkannya hanya menjadi pembenar perbedaan dan pertentangan antar kelompok. Hegemoni partai politik dengan sendirinya sudah mensegmentasikan pembaca dari kalangan pendukung ideologi dan partai politik tertentu.

[8] Dengan mengambil kasus masyarakat Connecticut, dahl mendeskripsikan betapa perhatian masyarakat terhadap politik rendah. Robert A. Dahl, ***Who Governs?***, (New Haven and London: Yale University Press, 1978), p. 227.

Eksklusifitas kelompok kekuatan politik atas wacana publik menjadikan media massa berbasis partai dan aliran bukan memperkokoh demokrasi. Masyarakat hanya membaca media massa mereka sendiri, yang sudah barang tentu sarat dengan kepentingan dan tidak jarang dipenuhi agitasi-agitasi. Setiap informasi akan cenderung menjadi doktrin bagi pendukung penulisnya dan dianggap sebagai pendiskreditan oleh lawan opininya. Tidak ada komunitas yang mampu secara independen memberikan *counter balance* informasi, dan kalaupun ada pasti terlalu kecil dan tak mungkin terdengar.

Iklim politik era demokrasi liberal melahirkan dialektika politik dengan, meminjam istilah filsafat, pola pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) Kuhnian atau lebih parah lagi, falsifikasionis Popperian. Kekuasaan politik menjadi ajang perebutan dominasi antar kekuatan sosial politik. Setiap kekuatan yang bermaksud memegang dominasi kekuasaan harus menyingkirkan kelompok lain, tanpa ada kemungkinan *sharing* yang cukup berarti, karena kebenaran ditentukan sejauh mana sebuah kekuatan dapat mengeliminasi kelompok lain. Kecenderungan berfikir masyarakat yang dipenuhi nuansa ideologis berakibat dialektika yang terbangun cenderung mengarah pada kebuntuan komunikasi politik. Hal ini dikarenakan iklim ideologis telah menempatkan ideologi dan afiliasi politik tidak ubahnya dengan agama, di mana kebenaran merupakan pilihan-pilihan. Perpindahan ideologi dapat disikapi layaknya perpindahan agama, di mana sejumlah sentimen sosial akan harus dihadapi sebagai bentuk hukuman sosial.

Kuatnya fragmentasi kekuatan politik menyebabkan pemerintahan Indonesia periode awal tidak mampu membangun sistem sosial politik yang benar-benar solid. Akibatnya, para pengelola negara tidak mampu membangun konsensus yang dapat diterima dan mengikat semua pihak. Setiap kelompok terlalu independen untuk menentukan jalannya negara dan pemerintahan menurut idealisme masing-masing. Pengalaman demokrasi di Indonesia periode awal seolah membenarkan pendapat Sokrates,

bahwa demokrasi potensial melahirkan anarkhi, karena keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan hasil pemikiran rasional dan mendalam jatuh di bawah pertimbangan kehendak semata.

Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, penerapan demokrasi di tengah iklim ideologis menjadikannya sebagai kejutan sosial dan budaya yang keras, terlebih lagi pada negara yang sama sekali baru seperti halnya Indonesia. Selepas kekalahan Jepang, negeri ini seolah tak bertuan, di mana siapa saja dapat bersaing merebut kekuasaan di atasnya. Karena itu, tidak hanya lahirnya sebuah negara secara tiba-tiba saja sebagai kejutan, melainkan juga sistem sosial politik, tatanan sosial kemasyarakatan serta pola hubungan sosial yang dipaksa sejarah untuk berubah. Perubahan yang sedemikian radikal sudah barang tentu menyisakan banyak distorsi sosial dan budaya.

Bila dibandingkan dengan perkembangan negara-negara demokrasi maju di Eropa, demokrasi di Indonesia merupakan sebuah proses yang terlalu cepat. Penerapan demokrasi di Eropa merupakan hasil sebuah proses sejarah yang panjang berangkat dari kultur sosial politik monarkhi. Secara gradual kerajaan membukakan akses kekuasaan yang semakin luas pada rakyatnya. Perjalanan ke arah demokratisasi memakan waktu ratusan tahun seiring pergeseran kultur sosial politik dan tuntutan perubahan sosial politiknya. Secara sederhana barangkali perkembangan tersebut dapat digambarkan sebagaimana bagan 5.

Bagan 5
Pola Perkembangan Demokrasi di Barat

Raja
Aristokrat/Pengusaha
Rakyat Biasa/Laki-laki
Wanita, Kulit Hitam dsb.
Negara
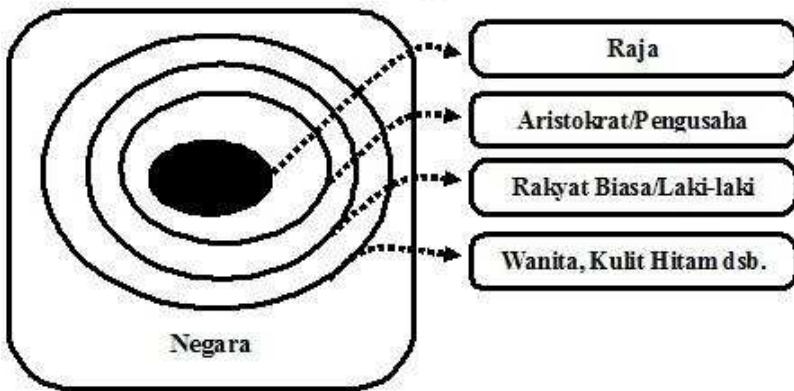
Seiring perkembangan perekonomian, kekuasaan yang semula terpusat pada raja, secara bertahap dibagikan kepada kalangan aristokrat. Kerajaan tetap mengendalikan stabilitas dan menentukan jalannya pemerintahan, sementara kepentingan kalangan aristokrat dan pengusaha dapat difasilitasi. Dalam perkembangan berikutnya, secara berturut-turut pemerintah membukakan akses bagi rakyat biasa dari kaum laki-laki dan buruh setelah mereka kesadaran akan hak-hak politik mereka berkembang. Seiring perkembangan kultur modern, kaum wanita, kulit hitam yang umumnya mantan budak, kaum imigran dan demikian seterusnya, juga menuntut akses yang sama.

Sebenarnya bangsa Eropa juga belum sepenuhnya demokratis saat hadir dan menguasai Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Kultur feodal sebagaimana dikeluhkan sebagai lawan demokrasi masih hidup dalam kultur mereka, bahkan hingga saat ini. Hanya saja, kalangan pemilik modal dan aristokratnya sudah cukup memperoleh manfaat dari struktur negara yang ada. Negara membukakan peran dalam memfasilitasi kepentingan-kepentingan ekonomi mereka. Demokratisasi Barat tidak dimulai dengan meruntuhkan struktur sosial politik sebelumnya, melainkan berkembang seiring dengan berbagai penyelesaian terhadap sumbatan-sumbatan akses.

Perluasan akses tersebut menjadikan struktur lama tetap bertahan sekalipun secara perlahan berkurang peranannya dalam percaturan sosial politik. Sementara itu struktur baru secara gradual hadir melengkapi struktur yang sudah terbangun, yang menjadikan demokratisasi berlangsung tanpa menimbulkan masalah berarti dan terus berkembang seiring perubahan sosial dan kebudayaan masyarakatnya.

Persoalannya, suratan sejarah menempatkan Indonesia dan mayoritas negara-negara di luar Eropa, tidak memiliki kesempatan semacam itu. Krisis politik akut hampir senantiasa mengiringi sejarah awal perjalanan negara. Indonesia memulai demokrasi dari situasi yang tidak kondusif, di mana kelompok-kelompok kekuatan sosial politik berkembang lebih dulu dibanding kekuasaan negara. Tidak ada pilar sosial politik yang cukup kuat yang mampu menjamin tegaknya komitmen nasional yang terpercaya serta penyiapan instrumen-instrumen sosial politik yang memungkinkan hukum, aturan dan etika sosial lain ditaati tanpa anarkhi.[9]

Dengan demikian, konflik politik dan kegagalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan masyarakat bangsa sebelumnya. Situasi yang mengiringi lahirnya negara-negara baru pasca kolonialisme secara *laten* maupun terang-terangan selalu meninggalkan potensi-potensi konflik yang tak selalu mudah untuk saling mengakomodasi. Alam kesejarahan yang melatarbelakangi munculnya negara baru saja yang membedakan tipologi kelompok-kelompok sosial politik terbentuk dan terfragmentasi.[10]

---

[9] Kecenderungan umum yang terjadi adalah bahwa partai politik yang pada hakekatnya merupakan alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar rakyat merasakan tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, justeru menjadikan partai sebagai tujuan dan negara sebagai alatnya. Hatta, ***Demokrasi Kita***, p. 14.

[10] Sebagai perbandingan, kasus Sudan memperlihatkan bagaimana ketegangan dalam proses pembentukan bangsa (*Tension of Nation-Building*) tampak antara kalangan Islam yang dominan dalam militer dengan umat Nasrani. Simak John O.

Dalam situasi seperti ini, otoritarianisme dengan berbagai variasinya sering kali tak dapat dihindarkan bagi kekuatan politik tertentu yang prihatin atas konsolidasi negara yang rapuh oleh fragmentasi sosial politik yang mengecewakan. Demokratisasi tanpa terlebih dahulu mengeliminir potensi-potensi konflik akan mengantarkan pada anarkhisme perebutan kekuasaan. Otoriterisme sering kali menjadi solusi untuk mengakhiri kerasnya konflik, karena perbedaan kepentingan kelompok-kelompok yang seharusnya menjadi penopang negara dan pemerintahan baru justeru menjadi titik masalah.

Situasi sosial ekonomi yang lemah pada negara-negara baru secara mekanistis akan selalu menjadi alasan dijatuhkannya sebuah pemerintahan. Ketidakpuasan akan sangat mudah menemukan pembenaran untuk menjatuhkan pemerintahan. Bagai lingkaran setan, ketidaksinambungan kebijakan pemerintahan akan menyulitkan pemerintah baru memperbaiki keadaan. Di sisi lain kegagalan dalam memperbaiki keadaan, yang memang tidak mudah, potensial mengantarkan pemerintahan pada ancaman mosi tidak percaya sebagaimana pendahulu pemerintahannya.

Kelompok-kelompok tertentu yang prihatin akan kondisi negara yang jauh dari harapan memandang daya tahan pemerintahan sebagai kebutuhan meski kadang konsekwensinya harus mengubah demokrasi dengan otoriterisme. Upaya Soekarno yang berusaha mengeliminir konflik dengan menyatukan tiga kekuatan sosial politik utama; nasionalis, Islam dan komunis (Nasakom) gagal mengantarkan pada soliditas kekuasaan. Konflik politik tidak selesai dengan menjadikan partai-partai politik sebagai simbul kekuasaan di bawah aliansi Soekarno-militer dan komunis, bahkan menjadikan intrik politik semakin kasar, terutama antara PKI dan Angkatan Darat yang berpuncak dengan terjadinya peristiwa G30S.

Voll "Imperialism, Nationalism and Missionaries; Lesson from Sudan for Twenty-First Century" dalam ***Islam and Christian-Muslim Relations***, Vol. 8, No. 1, 1997, p. 43-5.

Bagan 6
Pergeseran Struktur Kekuasaan Masa Demokrasi Konstitusional, Terpimpin dan Orde Baru
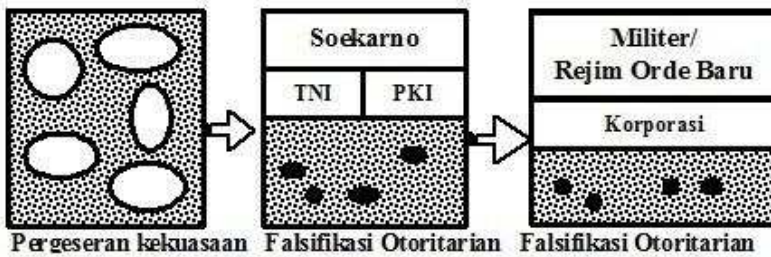
Pemberontakan PKI memberi legitimasi pada kalangan militer untuk tampil mengambilalih kekuasaan. Seiring soliditas militer, dialektika politik dikembangkan lagi oleh militer untuk membentuk pemerintahan dengan otoritas tunggal di bawah militer. Keputusasaan terhadap demokrasi mengantarkan militer membangun rejim otoriter. Orde Baru benar-benar tidak dapat memberikan kepercayaan kepada pihak manapun atas jaminan stabilitas sosial politik. Dari mereka negara mampu dikonsolidasikan secara penuh untuk pertama kalinya, meski harus dibayar dengan harga sosial yang mahal berupa kematian demokrasi. Kekuatan-kekuatan yang mungkin menyebabkan ketidaksolidan pemerintahan diperlemah dan hanya kekuatan korporatis yang mengokohkan pemerintahan yang diberikan tempat hidup dan berkembang. Pergeseran kekuatan sosial politik dari masa demokrasi liberal ke Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru dapat digambarkan sebagaimana bagan 6.

Sebagai sebuah paham sosial politik, demokrasi menuntut kondisi-kondisi yang memungkinkannya tumbuh secara wajar. Kegagalan demokrasi terjadi ketika penerapannya bukan dimulai dari suasana yang mapan. Pengalaman penerapan demokrasi di Indonesia tampaknya dapat dibandingkan dengan republik pertama di dunia, Perancis, yang harus mengalami *chaos* berkepanjangan dan jatuh bangunnya pemerintahan republik di bawah monarkhi otoritarian

ketika demokrasi dibangun dari kondisi yang tidak kondusif. Dibutuhkan harga sosial yang sangat mahal untuk mampu mengintegrasikan setiap kekuatan dalam satu kepentingan negara.

C. Iklim Global dan Kegagalan Demokrasi

Kegagalan demokrasi di Indonesia pada dasarnya bukan kasus tunggal. Banyak negara mengalami jalan sejarah serupa, di mana situasi pasca kemerdekaan diliputi konflik politik, instabilitas, dan berbagai gangguan keamanan dalam negeri yang mengantarkannya jatuh pada otoriterisme. Kegagalan demokrasi di Indonesia tidak memadai bila dipahami semata sebagai akibat konspirasi elit politik seperti pandangan Feith atau kultur politiknya Liddle. Pengaruh konstelasi sosial politik internasional sejak masa kolonial terhadap situasi dalam negeri suatu negara tidak dapat diabaikan, meski secara terminologis globalisme baru benar-benar popular pada era 1990-an.

Sebagaimana bagan 7, kurun akhir kolonial Belanda hingga fragmentasi politik pasca kemerdekaan menampakkan bahwa situasi internasional memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai arah dan perubahan politik di dalam negeri. Hal itu dapat ditelusuri dari munculnya berbagai peristiwa, seperti merebaknya isu nasionalisme dan paham sosial politik, diikuti pertistiwa kemerdekaan, munculnya otoritarianisme, serta gelombang demokratisasi dan jatuhnya rejim-rejim otokratik yang terjadi hampir bersamaan pada banyak negara.

Jauh hari sebelum masa kemerdekaan, konstelasi dunia sudah berada pada situasi saling mempengaruhi. Perubahan politik kolonial, bahkan *trend* kolonialisme sendiri, juga merupakan dampak dari perubahan pola pikir dan cara pandang manusia terhadap relasi antar sesamanya secara global. Perubahan cara pandang tentang pola hubungan antar manusia yang tidak lagi dapat mempertahankan pola eksploitasi penuh manusia pada manusia lain dengan mengabaikan masalah kesejahteraan memaksa Belanda mengubah politik

kolonialnya, yang diantaranya diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi bangsa bumi putera mengenyam kesempatan pendidikan yang memungkinkan mereka memperbaiki taraf kehidupannya serta mengapresiasi perkembangan dunia.

Bagan 7
Perubahan Konstelasi Global dan Kecenderungan Politik di Indonesia
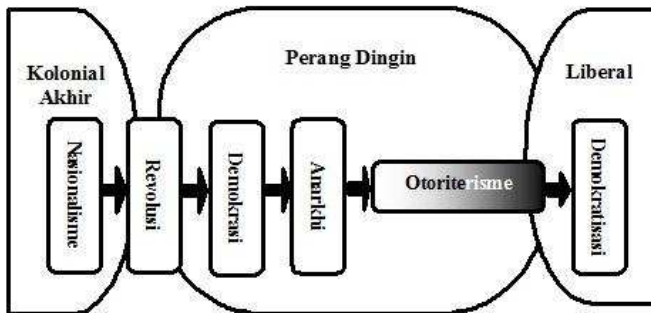
Perkembangan pemikiran dan semakin terbukanya informasi menjadikan ide-ide sosial politik yang semula berkembang di kawasan tertentu menyebar ke berbagai belahan dunia. Paham-paham ideologi, nasionalisme dan demokrasi menyebar ke berbagai bangsa, dan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim sosial politik besar-besaran di daerah-daerah jajahan. Secara serempak dan hampir merata, bangsa-bangsa terjajah bangkit kesadarannya untuk menuntut kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Karena itu, kurun akhir masa kolonial diwarnai dengan merebaknya semangat nasionalisme di berbagai penjuru dunia, dan tidak terkecuali di Indonesia.

Selama kurun akhir masa kolonial, meluasnya paham nasionalisme mendorong bangsa-bangsa terjajah berjuang untuk merdeka. Mereka bangkit dari tidur panjangnya di bawah kolonialisme, seiring meluasnya nasionalisme berikut paham-paham sosial politik yang menyertainya, yang melahirkan kelompok-kelompok pergerakan nasional di berbagai negara. Gerakan-gerakan tersebut merupakan *cikal bakal* berdirinya kelompok-kelompok sosial

politik yang nantinya berperan besar dalam menggalang kekuatan menuntut kemerdekaan. Setiap kelompok merupakan faksi-faksi perjuangan yang tumbuh secara independen tanpa satu koordinasi, yang biasanya bersatu dalam memerangi musuh bersama, penjajah, tetapi juga pelaku fragmentasi sosial politik di awal kemerdekaan.

Puncak gerakan nasionalisme tersebut mengantarkan pada kian intesifnya gerakan-gerakan revolusioner, yang dengan berbagai cara berusaha menegakkan kemerdekaan. Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara pada umumnya, masa pendudukan Jepang memiliki arti tersendiri bagi pemantapan patriotisme yang diliputi heroisme, keberanian melakukan konfrontasi fisik dengan bangsa asing, terutama akibat pelatihan-pelatihan paramiliter dan militer yang diberikan Jepang pada tahun-tahun terakhir masa pendudukannya. Di sisi lain, pelatihan Jepang dalam jangka panjang juga memberikan andil bagi kerasnya konflik antar golongan, di mana semangat heroisme anti-penjajah masih bertahan dalam persaingan ideologi.

Tumbuhnya faksi-faksi perjuangan dengan serangkaian ideologi sosial politik yang diusung memungkinkan gerakan kemerdekaan melibatkan kelompok sosial yang luas, memberi konstribusi besar pada keberhasilan revolusi kemerdekaan. Panjangnya sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin memperpanjang jasa setiap kelompok yang akan melegitimasi hak masing-masing untuk mengelola negara dan pemerintahan. Banyaknya kelompok penyumbang jasa bagi kemerdekaan mengharuskan pengelolaan negara menerapkan sistem demokrasi sebagai cara membagi kekuasaan secara adil bagi seluruh elemen perjuangan.

Berakhirnya perang dunia kedua, menandai hilangnya legitimasi penjajahan. Secara hampir bersamaan, hampir seluruh negara terjajah melapaskan diri, baik secara damai maupun peperangan. Indonesia termasuk di antara negara yang harus melalui revolusi panjang dengan akibat-akibat sosial politik yang rumit di dalam negeri. Kedaulatan penuh Indonesia, dengan demikian, juga ditunjang oleh iklim sosial politik dunia yang memang sudah tidak kondusif lagi bagi

kelangsungan kolonialisme. Bila tiga ratus tahun sebelumnya luasnya koloni menjadi salah satu simbul kejayaan (*glory*) negara, sebaliknya dengan pasca perang dunia kedua, di mana kolonialisme menjadi semacam aib di mata internasional.

Kuatnya cara berfikir revolusioner menjadikan setiap kelompok saling merebut kekuasaan, hingga menimbulkan ketegangan-ketegangan politik. Demokrasi tidak berjalan konstruktif akibat egoisme dan heroisme masa revolusi terbawa dalam percaturan politik. Semangat yang mestinya ditujukan pada musuh dari luar, untuk peperangan, digunakan juga untuk melawan rival politik.

Ketegangan tersebut tidak semata diakibatkan oleh friksi sosial politik di dalam negeri, melainkan juga karena masih adanya relasi sebagian kelompok dalam negeri, terutama komunisme, dengan negara adi-daya. Beberapa negara tak dapat menghindari perang saudara, di mana setiap kelompok didukung oleh kekuatan besar di luar negaranya. Kerasnya persaingan di dalam negeri negara-negara independen menjadikan demokrasi hanya menghasilkan anarkhi, akibat sulitnya konsolidasi kekuatan kekuatan sosial politik dalam negeri.

Meminjam telaah Mill, situasi ini memperlihatkan bahwa nasionalisme yang berkembang di Indonesia sebenarnya masih mentah. Paham kebangsaan masih diliputi oleh antipati pada orang asing dan kenetralan pada kesejateraan umum, serta yang tidak kalah pentingnya, kepentingan nasional. Nasionalisme belum ditempatkan sebagai kebersamaan, sebuah perasaan yang menasional sebagai warga negara yang sama di bawah pemerintahan, teritori dan kesejarahan yang sama pula. Padahal ekspresi nasionalisme sebenarnya mempersyaratkan tanggung jawab bersama untuk

membangun struktur sosial politik masyarakat kebangsaan yang stabil.[11]

Atmosfir internasional yang dibayang-bayangi perang dingin, menyebabkan demokrasi hanya menjadi pilihan-pilihan. Masa-masa tersebut menjadi kurun pengujian sejarah bagi seluruh paham ideologi, dan tidak terkecuali demokrasi. Demokrasi jatuh ke dalam dilema, di mana mengikuti komunisme akan bertentangan dengan kalangan agama (Islam) dan menganut liberal jelas bertentangan dengan semangat anti imperialisme dan kapitalisme yang sedang mencapai puncaknya.

Memuncaknya semangat revolusioner meningkatkan rasa harga diri setiap bangsa yang mendorong para pengelola negara dan pemerintahan berupaya membangun model demokrasinya sendiri, lepas dari dua model demokrasi besar yang sedang bersaing, sosialis-marxis dan liberal-kapitalis. Selama perang dingin negara-negara dunia ketiga menikmati independensinya dari pengaruh asing, sebab setiap upaya intervensi terhadap suatu negara akan menarik keterlibatan dua negara adi-daya yang bersaing pengaruh. Sisa-sisa heroisme masa revolusi juga menempatkan setiap intervensi akan membangkitkan antipati yang besar dan perlawanan yang keras dari dalam negeri.

Tingginya suasana ideologis menyebabkan demokrasi disikapi secara ideologis pula, dengan merumuskan ideologi alternatif. Sebagai ekspresi atas nasionalisme yang besar, para pemimpin negara dunia ketiga berupaya membangun model demokrasinya sendiri yang diklaim paling sesuai dengan kepribadian bangsanya. Keberadaan sebuah paham demokrasi alternatif juga mengekspresikan eksistensi sebuah negara merdeka, sebuah pernyataan tidak langsung bahwa suatu negara benar-benar tidak tergantung pada negara lain. Hanya saja, lemahnya konsep dan miskinnya pengujian sejarah menjadikan

---

[11] John Stuart Mill, ***Essays on Politics and Society***, (London: Routledge and Kegan Paul, 1977), Volume 10, p. 134-5.

model demokrasi alternatif tersebut, banyak menemui kegagalan, sebab dalam praktiknya, demokrasi alternatif tidak berbeda dari otokrasi yang mengatasnamakan demokrasi.

Bubarnya Uni Sovyet secara tidak langsung menandai kemenangan demokrasi liberal dalam pergulatan ideologi dunia. Demokrasi liberal seolah keluar sebagai pemenang setelah melampaui pengujian sejarah panjang yang sarat krisis selama perang dingin. Kemenangan demokrasi liberal menempatkan semua negara berada di bawah kontrol negara-negara maju yang seluruhnya menganut sistem liberal-kapitalis. Sejak saat itu, demokrasi modern memperoleh referensi yang benar-benar kokoh oleh sukses besar yang diraih negara-negara maju dalam berbagai bidang, yang menjadikannya harus kembali direspon oleh banyak negara.

Kurang dari setengah abad, Barat berhasil memperbaiki citra dirinya, di mana dosa-dosa penjajahan dilupakan, yang digantikan dengan penghakiman terhadap para pemimpin nasionalis yang gagal mewujudkan perbaikan bagi negaranya. Tekanan demi tekanan dari berbagai sektor memaksa setiap negara harus melakukan demokratisasi dengan tipologi liberal. Perkembangan media informasi dan komunikasi mengakibatkan tuntutan-tuntutan perubahan politik meluas dengan cepat, mulai dari reformasi damai sampai yang berdarah-darah. Masa ini dimarakkan oleh jatuhnya rejim-rejim totalitarian. Masyarakat sendiri sepertinya baru merasakan demokrasi sebagai kebutuhan setelah mengalami beratnya penindasan rejim otoritarian.

Sejak kemerdekaan, negara-negara baru, sebagaimana Indonesia, tidak dapat melepaskan diri dari situasi internasional yang sedikit banyak turut mempengaruhi jalannya pemerintahan dan konstelasi politik dalam negeri. Dengan demikian, iklim global secara signifikan memiliki hubungan kuat dalam menentukan iklim sosial politik dan jalannya demokrasi di negara-negara baru. Paling tidak, situasi internasional memberikan perspektif yang jelas tentang idealitas sistem sosial politik yang layak dijadikan anutan.

Sebenarnya demokrasi telah menjadi model yang tak dapat ditolak oleh kebanyakan negara baru yang memilih model republik, tetapi para pengelola negara tidak cukup kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan. Mereka kesulitan menerjemahkan demokrasi dalam tataran praktis yang sejalan dengan kondisi sosial politik yang dihadapi, sehingga tidak menghasilkan demokrasi yang terkonsolidasi.[12] Dalam hal ini, afiliasi ideologi yang menjadi *mainstream* suatu pemerintahan akan menentukan jalan mana yang harus ditempuh. Selain itu, kontrol negara-negara besar terhadap negara baru dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan politiknya pada suatu kawasan juga menentukan kelangsungan demokrasi pada kawasan lain.

Keberadaan kekuatan dominan pada satu negara, paling tidak, memungkinkan jaminan stabilitas pemerintahan dengan cara-cara yang lebih dapat menghindarkan pertumpahan darah yang lebih parah. Hal ini disebabkan awal kegagalan demokrasi yang umumnya dimulai dari kegagalan konsolidasi negara. Kesulitan para pengelola pemerintahan mengkonsolidasikan negara biasanya diikuti munculnya anarkhi-anarkhi sosial politik yang pada gilirannya akan mengganjal konstruktifitas jalannya demokrasi itu sendiri. Yang dilakukan Soekarno dan Soeharto adalah suatu upaya menjinakkan perbedaan yang terlalu tajam yang tidak memungkinkan demokrasi menjadi proses dialogis yang konstruktif.

Sejarah politik Malaysia,[13] Singapura dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa keterlibatan negara besar menentukan

---

[12] Demokrasi sudah terkonsolidasi bilamana terjadi dua kali pergantian pemerintahan (*two turnover rule*) melalui pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum yang jurdil, atau apabila demokrasi menjadi satu-satunya sistem permainan, sehingga tidak ada yang dapat berkuasa kecuali melalui pemilu yang jurdil. Juan Linz and Alfred Stepan, ***Problems of Democartic Transition and Consolidation***, (Baltimore: John Hopkins University Press, 1996), p. Bab.1

[13] Malaysia mencapai kemerdekaan dengan dialektika yang relatif sehat, di mana pemerintah kolonial, Inggris mampu menjadi penengah yang dapat menyelesaikan persoalan konstitusi dan bentuk negara sejak negara baru belum terbentuk. Simak

konstruktif tidaknya jalannya pemerintahan dan demokrasi. Kemerdekaan yang diperoleh tanpa setetes darah yang diperoleh Malaysia menempatkan negara besar, Inggris, secara langsung ataupun tidak perlu terlibat menjaga stabilitas politik dan perekonomian di wilayah tersebut, dengan serangkaian perjanjian yang menyertainya. Malaysia dapat memperoleh kemerdekaan dengan peralihan kekuasaan secara gradual tanpa terlalu bergejolak. Di sisi lain aset-aset Inggris terlindungi sampai batas waktu perjanjian, dan selanjutnya dapat menjadi modal kebangkitan perekonomian Malaysia. Malaysia sendiri, sekalipun tidak menjadi negara yang cukup demokratis, dan kemudian juga Singapura, dapat melanjutkan pembangunan negerinya secara lebih konstruktif.[14]

Demikian halnya Korea Selatan, di mana perlindungan Amerika Serikat atas wilayah tersebut memungkinkan stabilitas nasional terjaga. Proses demokratisasi dan pembangunan berjalan relatif tanpa kendala. Dependensi negara tersebut pada negara besar memungkinkan beban masalah negara dan pemerintahan terhindar tidak hanya terfokus pada konflik politik yang berkepanjangan sebagaimana Indonesia. Pengawasan Amerika serikat memungkinkan demokrasi memperoleh referensi dan arah yang yang jelas dengan sekecil mungkin menghidari konflik berkepanjangan.[15]

Tampaknya demokrasi memang tidak dapat tumbuh sendiri tanpa referensi dan itikat baik kelompok kuat untuk

Ahmad Fauzi Abdul Hamid "The Impact of British Colonialism on Malaysian Islam", p. 60-5

[14] Inggris menjadi penengah untuk menciptakan konstitusi yang demokratis, dan menfasilitasi *power sharing* antara elit Melayu yang berpandangan lintas-SARA dengan kelompok masyarakat Tionghoa. Namun demikian, tidak terhindarkan terjadinya kerusuhan pasca pemilihan umum. Snyder, ***Dari Pemungutan Suara...***, p. 325.

[15] Bagi negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada negara "paling demokratis", Amerika dan Eropa, harus siap menanggung konsekwensi penghentian bantuan ekonomi, politik dan militer bila tidak membukan jalan bagi demokratisasi di negaranya. Suhelmi, ***Pemikiran Politik...***, p. 296-7.

mewujudkannya. Demokrasi yang konstruktif membutuhkan dukungan pemerintahan yang kuat, yang mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam memperbaiki kondisi negara. Tanpa dukungan kekuatan dominan demokrasi akan berjalan ke arah yang tidak menentu, bahkan menuju arah berlawanan. Dibutuhkan penjaga yang mempersiapkan instrumen-instrumen sosial yang menjamin ketaatan hukum, aturan dan etika sosial lain yang memungkinkan anarkhisme akibat demokrasi dapat dieliminir semaksimal mungkin. Demokratisasi tanpa didahului dengan upaya-upaya mengeliminir potensi-potensi konflik hanya akan mengantarkan pada tujuan sebaliknya.

Dapat dibandingkan pengalaman negara-negara Asia Tenggara yang berjalan dengan independensi lebih tinggi dibanding keduanya, di mana rata-rata tidak hanya gagal dalam perbaikan kesejahteraan, melainkan juga harus jatuh di bawah rejim totaliter. Pengalaman Vietnam, Kamboja, Laos, Indonesia serta Thailand dan Philipina sebelum terlalu diitervensi Amerika Serikat harus menghadapi jalan sejarah yang hampir sama karena tidak adanya kekuatan dominan yang dapat memandu ke arah demokratisasi secara konstruktif.

Hal ini dikarenakan pada negara-negara bebas demokrasi berkembang menjadi ritualitas politik yang formalistik. Rakyat sebagai pemilih belum dapat memberikan kontrol terhadap partai politik, pemerintahan dan instrumen demokrasi lain, termasuk parlemen dan media massa. Semua aspek sosial politik yang menjadi pilar demokrasi potensial dimanipulasi elit politik yang menjadikan arah demokrasi berlangsung tidak menentu ataupun hanya berjalan formalistik. Rakyat hanya menjadi alat legitimatimasi kalangan elit untuk meraih posisi dan kekuasaan. Ketidaktahuan rakyat dapat dengan mudah dimanipulasi untuk menunjang kepentingan sesaat. Terlebih bilamana mereka masih dengan mudah digerakkan untuk menunjang kepentingan-kepentingan tertentu yang menimbulkan situasi kontraproduktif. Dengan penjelasan Huntington, globalisasi

media sering memuakkan bagi mereka yang gagal menikmati kemakmuran dunia di bawah pengaruh Barat.[16]

Berkembangnya momentum ke arah demokratisasi serta intensitas gerakan demokrasi bukan ditentukan oleh peningkatan *income* per-kapita atau kesejahteraan, melainkan sebaliknya. Di masyarakat yang sudah cukup mapan perekonomiannya, gerakan demokratisasi akan melahirkan kesulitan. Sebab persoalan mendasar bagi kebanyakan masyarakat bukanlah sebuah kebutuhan akan pemerintahan yang demokratis atau tidak, melainkan seberapa jauh kebutuhan sosial mereka terpenuhi atau difasilitasi negara. Sedangkan kemapanan ekonomi masyarakat hanya menentukan daya tahan pemerintahan, dan bukan jalan untuk demokratisasi.

Berdasarkan data-data dan analisis di muka dapat diajukan satu konstruksi teoretik yang kiranya dapat digunakan sebagai kerangka pemahaman atas munculnya suatu sistem sosial politik pada suatu negara. Terbentuknya suatu model demokrasi, baik yang kemudian menghasilkan suatu tatanan demokratis ataupun sebaliknya ditentukan oleh intensitas interaksi antara tiga aspek: Atmosfir global sebagai referensi maupun kekuatan pemaksa (A) ; Aktor politik utama di dalam negeri sebagai penentu perubahan kebijakan (B); dan kondisi masyarakat dalam negeri sebagai ralitas sosial politik sebagai partisipan tegaknya sebuah sistem (C).

Atmosfir global (A) baik dalam kedudukannya sebagai referensi wacana ataupun kekuatan sosial politik yang secara imperatif mampu memaksakan penerimaan suatu sistem baik pada aktor-aktor politik utama maupun dalam membangun wacana pemikiran di kalangan rakyat. Ketika hubungan aktor-aktor politik (B) dan ralitas politik dalam negeri (C) dengan kekuatan global (A) berjarak, maka perkembangan demokrasi potensial diselewengkan oleh B. Sebaliknya, ketika Hubungan tersebut semakin kuat, maka transformasi ke arah demokratisasi semakin kuat. Sedang bilamana

[16] Huntington, ***The Clash of Civilization...***, p. 25-62.

hanya salah satu dari B atau C yang merespon situasi global, maka akan terjadi kesenjangan sistem dan berujung pada instabilitas dalam negeri.

Bagan 8
Hubungan Tiga Aspek dengan Paradigma Demokrasi
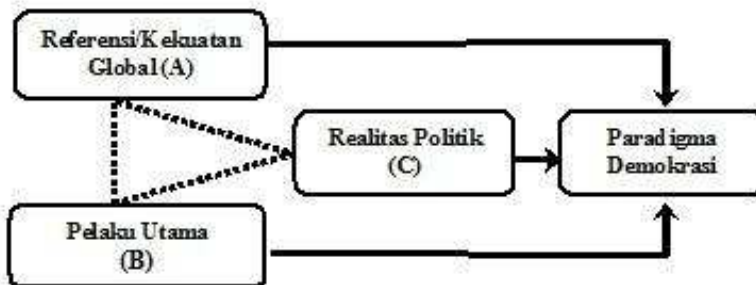
Kerangka berfikir ini tampaknya juga dapat digunakan untuk mencermati fenomena lain, seperti apresiasi terhadap HAM, gender, perekonomian ataupun isu-isu lain yang sudah mengglobal. Bila dampak globalitas terhadap perekonomian, perubahan gaya hidup dan pergeseran tata nilai kemanusiaan lain sudah biasa dikaitkan dengan situasi global dan regional, maka pemahaman terhadap fenomena politik mestinya tidak dapat mengabaikan pertimbangan ketiga aspek tersebut.

Bila dikaitkan dengan awal sejarah terbentuknya masyarakat bangsa ini, maka perjalanan demokrasi di Indonesia masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto menunjukkan adanya penyimpangan arah sejarah demokrasi, di mana minat yang besar terhadap demokrasi dan sejarah awal pemerintahan yang demokratis berujung pada otoritarianisme. Arah perjalanan menuju demokrasi atau sebaliknya dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut.

Bagan 9
Alur Sejarah Ke Arah Demokrasi Atau Otoriter
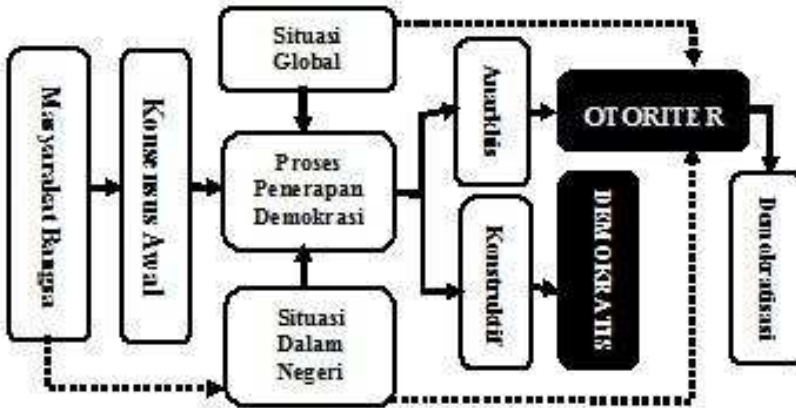
Kegagalan tersebut diakibatkan oleh paduan dampak dari tiga faktor, yaitu lemahnya konsensus awal penyelenggaraan negara, situasi global yang mengiringi dan situasi dalam negeri yang tidak kondusif. Konsensus awal dalam hal ini berkaitan dengan komitemen yang dapat menjadi pemersatu kepentingan, termasuk kepastian struktur kekuasaan yang akan melanjutkan pemerintahan di Indonesia maupun sistem yang akan digunakan. Sejak awal kelahirannya bangsa ini tidak memiliki kejelasan komitmen dan struktur utama yang akan melanjutkan kekuasaan Belanda secara damai, di mana hak dan cara untuk memerintah terbuka bagi semua kalangan untuk memperebutkan dan menentukannya.[17]

Iklim global yang diliputi pergulatan ideologi diapresiasi masyarakat dalam negeri dan melahirkan kelompok-kelompok

---

[17] Dengan pola demikian, negara sebenarnya rapuh dalam memperoleh pijakan ide nasional, yang bila diterapkan dalam iklim liberal negara hal ini berpotensi mengarah pada kehancuran. Simak Roger Scrutton "In Defence of The Nation" dalam Roger Scrutton, ***Ideas and Politics in Modern Britain***, (London: Macmillan, 1990), p. 68.

kekuatan berbasis ideologi. Mereka menjadi kekuatan yang saling bersaing menentukan jalannya sejarah Indonesia masa depan menurut idealitas ideologinya masing-masing. Berbagai perubahan yang terjadi selama revolusi menyebabkan konstitusi yang merupakan persoalan fundamental berada dalam posisi mengambang dan terbuka luas untuk diperdebatkan. Sentimen ideologis yang sangat kental mendorong setiap kelompok berusaha menentukan warna konstitusi yang sedapat mungkin memberikan resistensi terhadap dominasi lawan ideologisnya.

Sentimen ideologis memfragentasikan masyarakat bangsa ke dalam kelompok-kelompok sosial politik yang saling bertentangan. Sisa-sisa semangat revolusioner dan sentimen ideologis yang kuat merusak harmoni sosial politik dan budaya di dalam negeri. Masyarakat tersekat-sekat oleh dinding-dinding ideologis yang saling bertentangan, serta tercerabut dari etika social dan politik yang alamiah. Penajaman semangat primordial menjadikan perbedaan tidak berhenti sebagai wacana berfikir dan diskusi, melainkan juga membentuk pertentangan dalam bentuk konflik yang tak jarang berujung kekerasan. Situasi seperti ini tidak memungkinkan demokrasi berlangsung konstruktif, bahkan potensial melahirkan anarkhi, yang pada gilirannya membuka momentum bagi otoritarianisme menguat dan mengambil posisi sebagai jalan penyelesaian masalah.

Iklim global yang diliputi oleh rivalitas dua adi-daya menjadikan kekuatan besar dunia tidak berpengaruh langsung dan mengontrol negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang menikmati independensinya di hadapan dunia internasional dalam menentukan sistem sosial politik, termasuk menerapkan kediktaturan. Bahkan penggunakaan jalan militer untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri menjadi sesuatu yang biasa tanpa respon berarti dari dunia internasional.

Ketika iklim global mengalami pergeseran, di mana liberalisme menjadi satu-satunya kekuatan dominan, demokrasi memperoleh

referensi yang lebih meyakinkan, terlebih dengan dukungan kajian ilmiah di berbagai perguruan tinggi terhadap situasi politik Indonesia yang umumnya tak lepas dari kritisisme yang pernah disumbangkan ilmuwan Barat. Perkembangan pengaruh negara-negara liberal dengan berbagai kemajuannya, menjadikan demokrasi liberal dengan berbagai modifikasinya menjadi semacam parameter keberadaban sebuah bangsa. Kekuatan media massa yang umumnya pendukung liberalisme memperluas pengaruh tersebut pada segenap umat manusia di berbagai penjuru dunia, yang sekaligus memberikan imperasi kultural yang tidak mudah dibendung. Negara-negara yang terkondite tidak demokratis akan dengan sendirinya terhukum oleh tekanan internasional, di samping dari rakyatnya sendiri. Karena itu, secara hampir bersamaan gelombang demokratisasi merebak di berbagai negara, termasuk Indonesia.[18]

[18] Merebaknya gerakan demokratisasi yang meruntuhkan Orde Baru juga tidak lepas dari dukungan publikasi keilmuan politik, terutama yang dimotori ilmuwan-ilmuwan politik luar, seperti dari Amerika dan Australia, yang memberikan perhatian khusus terhadap perpolitikan Indonesia khususnya masa Orde Baru. Dapat dicermati referensi-referensi yang menjadi rujukan para tokoh nasional pada tahun-tahun 1990-an yang tak lepas dari nama-nama Ben Anderson, Liddle, McVey, Feith dan sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan penelusuran atas sejarah Indonesia sejak era pra-kolonial hingga perkembangan sosial politik masa Soekarno dan Soeharto dapat disimpulkan bahwa tesis Huntington tidak memadai untuk menjelaskan fenomena kegagalan demokrasi di Indonesia. Tesis yang menyatakan bahwa kegagalan demokrasi terjadi karena Islam tidak kompatabel dengan demokrasi tidak memperoleh evidensi empirik dalam sejarah politik Indonesia.

Kehadiran Islam hanya memberi warna kebudayaan bagi masyarakat nusantara, tanpa pernah berkembang seperti Eropa era *Dark Age*. Hingga kurun kemerdekaan, Islam yang lekat dengan paham deterministik (*jabbâriyah*) menjadi *mainstream* keagamaan dominan. Tradisi keagamaan tersebut cenderung menjauh dari hal-hal duniawi, termasuk politik. Kehadiran Islam tidak sempat menimbulkan sentimen berarti terhadap paham-paham baru, agama lain maupun sistem politik.

Khazanah tradisi masyarakat Indonesia sendiri tidak kering dari nilai-nilai inheren demokrasi. Itu sebabnya kultur sosial politik masyarakat Indonesia tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sejak masa pergerakan nasional, demokrasi modern telah menjadi bagian inheren dalam kesadaran

kebangsaan. Perkembangan sosial politik menyebabkan realitas sosial politik di masyarakat yang mayoritas beragama Islam tersebut tidak memungkinkan penerapan sistem lain selain demokrasi.

Runtuhnya demokrasi di Indonesia bukan terjadi di tangan kelompok politik Islam, tetapi di tangan kaum sekuler yang justeru bersebarangan dengan Islam. Islam tidak pernah menduduki posisi mayoritas ataupun memegang posisi politik yang sepenuhnya dapat menentukan perubahan politik secara signifikan. Kelompok politik Islam hanya subordinasi politik nasional yang nasibnya ditentukan oleh kehendak mereka yang tidak menaruh *concern* terhadap Islam.

Tidak ada sikap dan tindakan kalangan Islam yang secara signifikan dapat diindikasikan sebagai bentuk penolakan terhadap demokrasi. Kalangan Islam bahkan merupakan sedikit di antara kelompok politik yang paling konsisten menuntut ditegakkannya sistem demokrasi melalui institusi-institusi demokrasi politik. Persaingan ideologi yang dilakukan oleh kalangan Islam berlangsung dalam konteks demokrasi politik. Tindakan kontra demokrasi justeru ditunjukkan oleh kalangan komunis, Sukarno, Suharto dan militer yang berupaya keras membangun sistem diktatur secara sistematis.

Penyebab kegagalan demokrasi masa Soekarno dan Soeharto tidak dapat dialamatkan pada sebab inkompatabilias demokrasi dengan Islam, kultur sosial politik umat Islam, keberadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bahkan bukan karena sepak terjang politisi Islam. Kegagalan demokrasi di Indonesia merupakan peristiwa politik yang terjadi di luar persoalan agama ataupun politik keagamaan, yang dimotori kelompok dominan yang tidak berpretensi membela Islam.

Dari perspektif perkembangan sejarah dunia, kegagalan demokrasi di Indonesia bukan merupakan kegagalan tunggal, melainkan sebuah *trend* global. Pada kurun hampir bersamaan, problematika penerapan demokrasi juga dihadapi oleh berbagai

bangsa, baik yang mayoritas beragama Islam, Hindu, Budha, Kristen ataupun Katolik. Kegagalan demokrasi masa Soekarno dan Soeharto, dan banyak negara baru pada umumnya, terjadi karena demokrasi diterapkan di tengah perubahan politik yang revolusioner. Kegagalan politik terjadi akibat perubahan struktur kekuasaan dari rejim kolonial kepada rejim nasional yang belum jelas kredibilitasnya dibanding penguasa sebelumnya, penjajah.

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak berlangsung dan dibentuk melalui proses dialektika kesejarahan memadai. Penerapan demokrasi dimulai dari runtuhnya struktur kolonial yang diikuti peralihan kekuasaan secara revolusioner. Tidak ada struktur kekuasaan yang memiliki legitimasi memadai untuk melanjutkan kekuasaan kolonial.

Kondisi ini menjadikan pertarungan kekuasaan diliputi persaingan di antara berbagai kekuatan politik yang setara. Demokrasi bukan berperan sebagai jalan damai melainkan lahan pertarungan yang hasilnya selalu diliputi ketidakpuasan dan berbagai instrik tanpa ada struktur yang benar-benar dihormati. Demokrasi melahirkan kejutan kebudayaan, yang mengubah harmoni sosial menjadi situasi yang diliputi pertarungan.

Kelompok-kelompok kekuatan yang terbentuk selama masa pergerakan dan revolusi menjadi pihak-pihak yang saling bersaing menjadi pewaris kekuasaan. Struktur sosial politik yang berpijak pada kelompok-kelompok kekuatan sosial politik berbasis ideologi dan gerakan revolusioner menjadikan kekuasaan sebagai obyek rebutan dan berakibat jalannya demokrasi berlangsung tidak konstruktif. Masyarakat sulit membangun konsensus dan konsolidasi pengelolaan negara di masa depan dan rentan terhadap kegagalan konsolidasi politik.

Sejak awal kemerdekaan, negara tidak cukup efektif sebagai institusi pemaksa masyarakat untuk tertib mengikuti aturan negara. Semangat revolusioner membuat setiap orang mudah bertindak

sendiri, seperti ketika menyambut kembali kehadiran Belanda. Kegagalan mewujudkan pemerintahan yang solid dan perbaikan kondisi negara menimbulkan kekecewaan besar terhadap demokrasi, yang memunculkan otoriterisme masa Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Demokrasi Pancasila Soeharto. Meski demikian, keduanya tetap tidak sama sekali mengabaikan demokrasi. Soekarno dan Soeharto tidak dapat membiarkan otoriterisme yang mereka bangun berdiri tegak tanpa baju demokrasi.

Dengan demikian, kegagalan demokrasi di Indonesia masa Soekarno dan Soeharto terjadi karena momentum dan situasi yang mengiringinya tidak memungkinkan dialektika demokrasi berjalan wajar dan konstruktif. Mekanisme demokrasi mudah dimainkan secara tidak proporsional, tanpa ada kekuatan yang mampu menjaga mekanisme politik berjalan wajar. Demokrasi belum menjadi solusi, wahana distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. Demokrasi hanya menjadi ajang artikulasi eksistensi kelompok dan wahana pertarungan seperti situasi rivalistik di Eropa oleh *hypernationalism* sempit yang berlangsung sejak era *renaissance* sampai perang Dunia.

Merebaknya militansi ideologis sejak berkembangnya berbagai paham politik dan keagamaan yang mengideologi telah memperkeruh kultur sosial dan politik masyarakat. Hal ini menyulitkan komunikasi politik. Persaingan ideologis yang diliputi egosentrisme, menyebabkan nilai-nilai etika, moral dan komitmen terhadap kepentingan nasional terkubur di bawah kepentingan kelompok. Ketika demokrasi hanya menjadi arena perebutan kekuasaan, maka penerapan demokrasi potensial melahirkan anarkhi. Demokrasi kehilangan etika moral dan hanya menjadi menjadi ajang pertikaian yang menyisihkan integritas tanggungjawab nasional.

Situasi ideologis yang mengiringi penerapan demokrasi di Indonesia masa Soekarno menyebabkan pelaku-pelaku politik tercerabut dari tradisi budaya mereka, yang sebelumnya toleran terhadap perbedaan. Situasi yang mengiringi penerapan demokrasi diliputi alam pikiran yang sarat pertentangan hingga membentuk

dialektika *shifting paradigm*. Setiap perbedaan hanya mungkin disikapi dengan diterima atau ditolak, yang sudah barang tentu berujung pada kebuntuan. Pemahaman dan apresiasi para pelaku politik yang berlebihan terhadap paham-paham sosial politik menyebabkan mereka tidak mampu berdialog dan mengalami proses akulturasi secara wajar dengan tradisi dan paham pemikiran yang berbeda.

Kebuntuan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang menentukan jalannya tradisi politik dan pemerintahan kehilangan kepercayaan pada janji demokrasi, dan cenderung memposisikan diri sebagai yang paling tahu bagaimana menentukan jalannya negara dan pemerintahan. Mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengelola perbedaan, di samping tidak siap menerima konsekwensi-konsekwensi yang harus dihadapi dari proses demokrasi, sementara ketokohan mereka dan kelompoknya sebagai penyumbang jasa bagi tegaknya kemerdekaan menuntut dihargai dengan posisi-posisi yang tidak tergoyahkan.

Ketidaksiapan pemimpin Indonesia dalam menerima berbagai konsekwensi penerapan demokrasi bukan dikarenakan keislaman mereka, juga bukan akibat kultur budaya Jawa sebagaimana pandangan Liddle atau Emmerson, melainkan bagian dari bentuk pergulatan konsep pengelolaan negara ideal, yang karenanya diskursus politik selalu menyentuh masalah *nation-building*. Para pemimpin tersebut mempengaruhi dan membelokkan jalannya demokrasi, setelah hasil penerapan demokrasi melahirkan situasi yang tidak konstruktif dan tidak memuaskan visi nasionalisme mereka.

Di sisi lain, ketergantungan masyarakat pada pemimpin opini menjadikan mereka mudah digerakkan untuk kepentingan elit. Masyarakat Indonesia terfragmentasikan ke dalam berbagai kelompok kekuatan di saat mereka belum mampu bersikap kritis terhadap tokoh, aliran ataupun kepentingan tertentu, yang

menyebabkan mereka mudah dieksploitasi dan dimobilitasi untuk mendukung kepentingan di luar dirinya.

Dukungan situasi global baik sebagai referensi, imperasi kultural maupun politik relatif lemah. Atmosfir global yang diliputi ketegangan antar ideologi, pertarungan model demokrasi dan memuncaknya semangat nasionalisme menyebabkan situasi sosial politik dalam negeri juga diliputi ketegangan yang sama. Memuncaknya semangat nasionalisme memungkinkan sebuah masyarakat bangsa dan pemerintahan menjaga jarak dari pengaruh global ataupun negara lain. Karena itu, penerapan demokrasi di Indonesia lebih memperlihatkan kecenderungan *trial and error*, tanpa diskursus konseptual memadai maupun referensi praktik sosial politik yang meyakinkan.

Apalagi penerapan demokrasi berlangsung di tengah kegamangan wacana. Secara diskursif, wacana demokrasi diterapkan masih mengambang dan belum matang akibat situasi perang dingin. Penerapan demokrasi hanya menjadi pilihan-pilihan antara mengikuti salah satu di antara dua model demokrasi komunis dan liberal, atau menciptakan alternatif sendiri. Ketika hasil penerapan satu model demokrasi tidak sesuai harapan, para penentu kebijakan dengan mudah menarik kembali satu model untuk digantikan dengan yang lain.

Rekomendasi untuk Demokratisasi

Demokrasi tidak selalu dapat tumbuh sendiri secara konstruktif di suatu negara meski mayoritas warga negaranya menghendaki. Di awal persemaiannya, demokrasi membutuhkan dukungan kekuatan dominan baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai itikad baik untuk menjaga dan membantunya berkembang, dan bila perlu memaksakannya. Penerapan demokrasi di suatu negara dapat memperoleh referensi yang memadai setelah memperoleh dukungan

konseptual yang semakin mapan melalui berbagai kajian dan penelitian, peran media massa serta iklim global yang kondusif.

Kecenderungan umum yang mengemuka adalah menonjolkan jati diri, lepas dari pengaruh asing. Penyimpangan demokrasi di Indonesia juga dikarenakan otoriterisme dan cara-cara kekerasan masih menjadi cara umum penyelesaian masalah. Pada kurun yang sama kekerasan masih biasa dilakukan dalam penyelesaian berbagai masalah politik baik di Eropa, Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Atmosfir global yang masih diliputi suasana perang dan munculnya diktatur di berbagai negara seolah menjadi referensi yang dapat mengabsahkan cara-cara otoriter.

Atmosfir global menentukan kematangan wacana demokrasi dan visi global masyarakatnya. Runtuhnya Uni Sovyet berikut korporasi militernya yang menandai kegagalan demokrasi komunis kian memantapkan demokrasi liberal berikut isu-isu kemanusiaan baru yang menyertai, seperti HAM, perlindungan buruh, perlindungan anak, kesetaraan gender, termasuk demokratisasi, menjadi *trend* global yang mempengaruhi alam pikiran masyarakat Indonesia. Meski dengan berbagai modifikasinya, demokrasi liberal kembali menjadi referensi satu-satunya yang harus dibenarkan sebagai parameter idealitas demokrasi di Indonesia. Karena itu, tekanan-tekanan negara maju yang berpuncak pada krisis ekonomi menjadi momentum runtuhnya otoriterisme Orde Baru dan kian intensifnya tuntutan demokratisasi di dalam negeri.

Kajian sejarah idealnya mengarahkan pada penggalian makna-makna baru yang bermuara pada kearifan dalam menyikapi masa lalu, masa kini dan mendatang. Keterikatan sejarah dengan konteks waktu dan ruang menjadikan peristiwa sejarah tidak dapat direduksi pada persoalan pelaku semata, melainkan juga pada struktur kesejarahan yang melingkupinya. Sebagai sebuah kajian sejarah, penulis berharap kajian-kajian sejarah sosial politik mengedepankan pendekatan-

pendekatan yang lebih komprehensif, di mana pendekatan yang terlalu fungsionalistik perlu dihindarkan.

Pendekatan fungsional potensial mengarahkan peneliti dan pembaca terjebak pada pencarian *kambing hitam*, yang selalu menuntut adanya pihak-pihak harus bertanggungjawab dan dipersalahkan. Padahal mereka hanya produk suatu masa yang memilih tindakan-tindakan tertentu karena didorong oleh pemahaman dan tuntutan sejarah yang mereka hadapi pada kurun kesejarahan mereka sendiri. Tak seorangpun dapat menentukan awal dan masa lalu sejarah, tapi selalu ada harapan menjalani dan mengakhirinya dengan lebih baik. Karenanya, persoalan yang menyangkut hukum idealnya diselesaikan secara hukum dan bukan oleh sejarah.

Kajian demokrasi dalam disertasi ini dengan sangat terpaksa dibatasi hingga kurun pemerintahan Orde Baru. Padahal perkembangan pada masa sesudahnya menyajikan fenomena yang tidak kalah menarik. Karena itu, penulis berharap suatu saat dapat melanjutkan kajian ini hingga masa yang lebih dekat dengan masa hidup yang tengah penulis jalani, hingga perjalanan kesejarahan demokrasi di negeri ini dapat direkonstruksi secara lebih utuh dan berkesinambungan. Namun demikian, penulis juga berharap para pengkaji lain dapat mencermati tulisan penulis atau melanjutkan bagian sejarah yang belum tercover dalam penelitian ini, agar pemahaman situasi di Indonesia dapat memberikan sumbangan berharga bagi perbaikan negeri ini di masa mendatang.

Di samping kesiapan prosedur, mekanisme dan komponen-komponen sosial politik, secara kultural demokrasi memerlukan beberapa prasyarat, di antara yang paling relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Kepercayaan yang kuat pada demokrasi Demokrasi harus dibangun sebagai sebuah keyakinan sebagai sistem tatanan sosial politik yang secara meyakinkan menjamin hak asasi dan tanggung jawab setiap warga negara di hadapan hukum dan

pemerintahan. Kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui berbagai cara, di antaranya: *Pertama*, Intensifikasi kajian demokrasi agar demokrasi menjadi bagian dari kesadaran umum masyarakat, dan bukan elit-elit tertentu. Bila perlu masyarakat juga dapat bersikap lebih kritis terhadap demokrasi itu sendiri, agar manipulasi terhadap demokrasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dapat dihindari. *Kedua*, jaminan kebebasan sekaligus independensi pers agar dialektika sosial berkembang dinamis.

2. Kekokohan pilar-pilar kultural demokrasi, berupa: *Pertama*, kepercayaan pada sistem, bukan orang. Masyarakat perlu diberdayakan dalam membangun sistem sebagai pijakan dan bukan pada tokoh. Demokratisasi perlu ditunjang kepercayaan masyarakat pada sistem dan bukan manusianya. Selama kepercayaan lebih terkonsentrasi pada aspek manusia, maka demokrasi sebenarnya masih berada pada situasi yang rapuh. Moralitas elit tidak lagi dapat dipercayakan pada jasa-jasanya pada masa lalu ataupun faktor-faktor genetisnya, melainkan harus dijaga dengan kontrol publik. *Kedua*, Budaya tertib dan ketaatan hukum dan ketertiban dengan independensi birokrasi

Di samping itu, sikap kritis terhadap pranata sosial politik, hukum dan praktik pemerintahan perlu dilakukan secara terus-menerus, agar perbaikan demi perbaikan tatanan sosial maupun praktik pemerintahan dapat dilakukan secara evolutif tanpa merusak situasi. Dalam hal ini tidak hanya kebebasan pers, melainkan juga independensinya memiliki peranan penting sebagai kontrol publik sekaligus pembentuk opini yang demokratis. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum, melainkan dapat turut memainkan peran sebagai partisipan yang turut bertanggung jawab pada jalannya pemerintahan.

Demokrasi hanya dapat memberikan jaminan perbaikan situasi sosial politik, bahkan kesejahteraan bila para pelakunya mampu menunjukkan integritas moral dan ketaatan pada hukum dan aturan yang berlaku. Kepantasan tindakan berupa ketertiban dan etika politik para pelaku dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintahan yang kuat, yang memiliki integritas dan beritikad baik dibutuhkan sebagai pengawal yang menjamin jalannya proses demokratisasi. Dengan demikian dialektika demokrasi tidak berlangsung falsifikasionistik popperian ataupun mengikuti alur *shifting paradigm* kuhnian. Demokratisasi akan berbuah baik manakala tuntutan sosial bergerak ke arah memperkaya khazanahnya, dan bukan secara revolusioner meruntuhkan atau saling berebut dominasi.

Demokratisasi harus dimulai dari membangun pribadi-pribadi demokratis, di mana kesediaan saling mendengarkan antar sesama dengan penuh penghargaan mutlak diperlukan dan tak dapat ditawar lagi. Hal yang perlu dipikirkan kemudian adalah konseptualisasi lebih lanjut perihal pengembangan etika demokrasi, di antaranya dengan mengikis radikalitas berfikir, bersikap dan bertindak, tanpa menghilangkan sikap kritis. Karena itu, kritisisme sendiri masih harus dibedakan dari hujatan, caci maki dan pemaksaan kehendak, sehingga dapat dipisahkan antara gagasan murni dengan kehendak yang umumnya dipenuhi subyektivitas dan interes.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. ***Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)***, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.

Abdullah, Amin. ***Falsafah Kalam di Era Posmodernism***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abdullah, Taufiq. ed., ***Manusia dalam Kemelut Sejarah***, Jakarta: LP3ES, 1981.

Abdullah, Taufik., eds., ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam***, Jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

______, ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara***, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2002.

______, ***Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini***, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2002.

Abdul Azis, Yaya M. ***Visi Global; Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Abeyasekere, Susan., ed., ***From Batavia to Jakarta: Indonesia's Capital 1930's to 1980's***, Clayton: Monash University, The Annual Indonesia Lecture Series, 1985.

Adams, Cindy. ***Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia***, Jakarta: Gunung Agung, 1992.

Agung, Anak Agung Gde. ***Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

______. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy*, The Hague: Mounton & co., 1973.

Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Iqra', 2001.

Alfian, *Militer dan Politik, Pengalaman Beberapa Negara*, (Djakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan, 1970.

Analisa CSIS, No. 2, Maret-April, 1996.

______, No. 3, Mei-Juni, 1996

Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Jatayu, 1985.

Anderson, Bennedict R.O.G. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, terj. Revianto Budi Santosa, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.

______. *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia*, terjemahan Didin Sholahuddin, Yogyakarta: Qalam, 2002.

______. *Some Aspect of Indonesian Politics under Japanese, 1944-1945*, Ithaca: Cornell University Press, 1961.

Anderson, Bennedict R.'OG. dan Audrey Kahin, eds., *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to Debate*, (Ithaca-New York: Cornell Univerity Press for Cornell Modern Indonesia Project, 1982.

Andrain, Charles F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992, p. 366.

Anwar, Yozal. *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

______. *Protes Kaum Muda: Kisah Bubarnya PKI, Jatuhnya Soekarno; Tenggelamnya KAMI*, Jakarta: Variasi Jaya/Kartini Group, 1980.

Arief, Sritua. ***Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik***, (Jakarta: UI Press, 1990.

Arif, Saiful. ***Ilusi Demokrasi***, Jakarta: Desantara Utama, 2003.

Archipel, Vol. II, No. 57, 1999.

Arfani, Riza Noer., ed., ***Demokrasi Indonesia Kontemporer***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Asy'arie, Musa. ***Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan***, (Yogyakarta: LESFI, 2002.

Al-Attas, Syed Naqquip. ***Preliminary Statement on General Theory of Islamisation of The Malay-Indonesia Archipelago***, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1969.

Azis, Yaya M. Abdul. ***Visi Global; Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bangkit, No. 2, 1993.

______. No, 4, 1993.

Barraclough, Geoffrey. eds., ***The Times Atlas of World History***, Revised Edition, London, Times Book Limited, 1984.

Basis, edisi Juni 1992.

______, No. 02, Januari-Februari 1993.

______, No. 3-4, Tahun Ke-47, Maret-April 1998.

______, Nomor 01-02, Januari-Februari 1999,

______, Nomor 03-04, Maret-April 1999.

______, Nomor 05-06 Mei-Juni 1999.

______, Nomor 11-12, November-Desember 1999.

______, Nomor 01-04, Tahun Ke-50, Maret-April 2001.

______, No. 01-02 Tahun Ke-52, Januari-Februari 2003.

______, No. 11-12, Tahun Ke-52, November-Desember 2003.

Benda, Harry J. ***Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Masa pendudukan Jepang***, Jakarta: Pustaka Jaya, 1990.

Berkes, N. ***The Development of Seculerism in Turkey***, Montreal: McGill University Press, 1964.

BIJDRAGEN Tot de – land – en Volkenkundo, Journal of the Humanities and Social Science of South East Asia and Oceanian, 158.1., 2002.

Bourchier, David. and John Ledge, eds., ***Demokrasi di Indonesia Tahun 1950-an dan 1990-an***, terjemahan n.n., Melbourne: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1994.

Brandon, William. ***New Worlds for Old: Reports from New World and Their Effect on The Development of Social Thought in Europe 1500-1800***, Athens: Ohio State University Press, 1986.

Budiarjo, Miriam. ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

______. ***Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Budiman, Arief. ***Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia***, Jakarta: Institut studi Arus Informasi, 2001.

______. ***Ilmu Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi***, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

______, ed., ***State and Civil Society in Indonesia***, (Clayton: centre of Southeast Studies Monash University, 1992.

Carr, William G. ***One World in The Making; The United Nations***, Second Edition, Boston, et.al.,: Ginn and Company, t.t.

Chandra, Bipan. ***Nationalism and Colonialism in Modern India***, New Delhi: Orient Longman Limited, 1990.

Cribb, Robert. ed., ***The Indonesian Killings 1965-1966***, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1990.

Crouch, Harold. ***Militer dan Politik di Indonesia***, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Dahl, Robert A. ***Perihal Demokrasi***, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

______. ***Who Governs?***, New Haven and London: Yale University Press, 1978.

De Graff, H.J. ***Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung***, Edisi Revisi, editor Eko Endarmoko dan Jaap Erkelen, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002.

Department of Information Republic of Indonesia, ***The Indonesia Revolution, Basic Documents and The Idea of Guided Democracy***, Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia, Desember 1964.

Department of Information Republic Indonesia, ***ORBA, A Guided to The New Order Government Policy***, (Jakarta: Department of Information Republic Indonesia, 1967.

Departemen Penerangan RI., ***Prasaran-prasaran pada Seminar Pantjasila***, Jakarta: Departemen Penerangan 1959.

Dhofier, Zamakhsyari. ***Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai***, Jakarta: LP3ES, 1982.

Diamond, L., J.J. Linz dan S.M. Lipset, eds., ***Democracy in Developing Countries***, vol. III, (Boulder: Lynne Rienner, 1989.

Drakard Jane. and John Legge, ***Indonesian Independece Fifty Years 0n 1945-1995***, Clayton: Monash Asia Institute, Annual Indonesia Lecture Series, No. 20 1996.

Eatwall, Roger. dan Anthony Wright eds., ***Ideologi Politik Kontemporer***, terj. R. M. Ali, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.

Emmerson, Donald K. ***Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*** (Ithaca: Cornell University Press, 1976.

______, ed., ***Student and Politics in Developing Nations***, London: Pallnall Press, 1968.

Feith, Herbert. ***Pemilihan Umum 1955 di Indonesia***, terjemahan Nugroho Katjasungkana dkk., Jakarta: Gramedia, 1999.

______. ***Soekarno – Militer dalam Demokrasi Terpimpin*** (***Dynamic of Guided Democracy***), terjemahan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

______. ***The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia***, Ithaca-London: Cornell University Press, 1978.

Feillard, Andrée. ***NU vis a vis Negara; Pencarian Bentuk dan Makna***, terjemahan Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Forum Keadilan, No. 29, 3 November 2003.

Frederick William H., dan Soekri Soeroto, eds., ***Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi***, Jakarta: LP3ES, 1982.

Fukuyama, Francis. ***The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal***, terj. M.H. Amrullah, Yogyakarta: CV Qalam, 2003.

Gaffar, Afan. ***Javanese Voters: A Case study of Election under a Hegemony Party System***, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

______. ***Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Geertz, Clifford. ***Islam Observed***, Chicago: The University of Chicago Press, 1975.

______, ***The Religion of Java***, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1960.

______. ed., ***Old Societies and New States***, New York: Free Press of Glencoe, 1963.

Gibb, H.A.R. ***Aliran-aliran Modern dalam Islam***, Jakarta: Tintamas, 1954.

Giddens, Anthony. ***A Contemporary Critique of Historical Materialism***, London: Macmillan, 1981.

______. ***The Third Way, The Renewal of Social Democracy***, Cambridge: Polity Press, 1999.

Haji Abdullah, Abdul Rahman. ***Penjajahan Malaysia, Cabaran dan Warisannya***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Hamdard Islamicus, Vol. XXII, No. 1.

______, Vol. XVIII, No. 4.

______, Vo. XXII, No. 2.

Haris, Syamsuddin. ***Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman,*** Jakarta: LP3ES, 1994.

Haris, Syamsuddin. dan Riza Sihbudi eds., ***Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Hasbi, Artani. ***Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Politik Islam***, Jakarta: Gema Media Pratama, 2001.

Hatta, Mohammad. ***Demokrasi Kita***, Djakarta: Pandji Majarakat, t.t.

______, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1979.

______, *Indonesia Merdeka; Pidato Pembelaan di Hadapan Pengadilan Den Haag*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

______. *Permulaan Pergerakan Nasional*, Jakarta: Idayu Press, 1977.

______. *Pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai Kemakmuran Yang Merata*, Jakarta: Idayu, 1972.

______. *Potrait of a Patriot: Selected Writtings by Mohammad Hatta*, The Hague: Mouton, 1972.

______. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Djakarta: Tintamas, 1970.

______. *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1977.

Hatta Mohammad. dan Tim Lima, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1977.

Hikam, Mohammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Hodgson, Marshal. *The Venture of Islam*, jilid 2, Cichago: The University of Chichago Press, 1974.

Hoodbhoy, Pervez. *Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas, antara Sains dan Ortodoksi Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu, Bandung: Mizan, 1996.

Horowitz, Louis Irving. *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Bina Karya, 1985.

Hourani, Albert. *Islam dalam Pandangan Eropa*, terjemahan Imam Baihaqi dan Ahmad Baidlowi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, New York: Simon and Schuster, 1996.

Iljas, Bachtiar. *Perang Vietnam dan Netralisasi Asia Tenggara*, Djakarta: Delegasi, 1964.

Al-Imam, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam*, terj. Muhammad Azhar, Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004.

Imawan, S.J. *KAMI: Kebangkitan Angkatan 66*, (Padang: Srana Dwipa, 1966.

Indonesia, Cornell Southeast Asia Program, No. 56, 1993.

______, No. 60, 1995.

______, No. 69, 2000.

Ingleson, John. *Jalan ke Pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1983.

Izebegovic, Alija Ali. *Membangun Jalan Tengah, Islam antara Timur dan Barat*, terjemahan Nurul Agustina dkk., (Bandung: Mizan, 1992.

Ja'far, T.B. Massa. *Proses Demokratisasi di Indonesia; Suatu Analisis Proposisi Samuel P. Huntington 1988-1996*, Yogyakarta: Tesis pada Universitas Gadjah Mada, 1997.

Al-Jāmi'ah, No. 64, Vol. XII, 1999.

Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 8, No. 1, 1997.

Izebegovic, Alija Ali. *Membangun Jalan Tengah, Islam antara Timur dan Barat*, terjemahan Nurul Agustina dkk., Bandung: Mizan, 1992.

Jong, L.D., dan Arifin Bey, eds., ***Pendudukan Jepang, Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda***, Jakarta: Kesaint Blanc, 1987.

Juliantara, Dadang. ***Negara Demokrasi untuk Indonesia***, Solo: Pondok Edukasi, 2002.

Jan M. Romein, ***Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum***, Bandung- Djakarta - Amsterdan: Ganaco NV, 1956.

Jurnal Ilmu Politik, No. 2, 1987.

Jurnal Ilmu Politik, No. 12, 1993.

Jurnal Ulumul Qur'an, No. 5, Vil. IV, 1993.

Kagan, Donald., Steven Ozment dan Frank M. Turner, ***The Western Heritage***, Volume I, New York: Macmillan Publishing Company, 1987.

Kagan, Donald., Steven Ozment dan Frank M. Turner, ***The Western Heritage***, Volume II, New York: Macmillan Publishing Company, 1987.

Kahin, George McTurnan. ***Nationalism and Revolution in Indonesia***, Thaca-New York: Cornell University Press, 1959.

Kansil, C.S.T. ***Pantjasila dan Undang-undang Dasar Falsafah Negara***, Djakarta: Pradnja Paramita, 1971.

Karim, M. Rusli. ***Perjalanan Partai-partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut***, Jakarta: Rajawali, 1983.

Kartodirdjo, Sartono. ***Modern Indonesia: Tradition and Transformation***, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 1984.

______. ***Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional***, Jakarta: Gramdia, 1990.

______, ***Struktur Sosial dari Masjarakat Tradisionil dan Kolonial***, Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, 1969.

______, ***Lembaran Sedjarah***, Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, No. 1, Desember 1967.

______, ***Lembaran Sedjarah***, Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, No. 1, Desember 1967.

Kartodirdjo, Sartono., Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia II***, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

Kees Bertens, ***Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles***, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Kor, Martin. ***Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan***, terjemahan A.B. Widyanta, Jakarta: Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2001.

______. ***Globalisasi dan Perangkap Negara-negara Selatan***, terjemahan A.B. Widyanta, Jakarta: Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2001.

Larson, George D. ***Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942***, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Lev, Daniel S. ***The Transition to Guided Democracy: Indonesia Politics, 1957-1959***, Ithaca-New York: Cornell University Press, 1966.

Liddle, R. William. Ed, ***Crafting Indonesia Democracy***, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001.

______. ***Leadership and Culture in Indonesian Politics***, (Sydney: Allen & Unwin, 1996.

______, ed., ***Political Partisipation in Modern Indonesia***, (New Haven: Yale University Southeast Asian Studies, 1973.

Linz, Juan. and Stepan, Alfred. ***Problems of Democartic Transition and Consolidation***, Baltimore: John Hopkins University Press, 1996.

Loebis, Abu Bakar. ***Kilas Balik Revolusi: Kenangan Saksi dan Pelaku***, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.

Luhulima, ***Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto-Dan Beberapa Peristiwa Terkait***, Jakarta: Kompas, 2001.

Macpherson, C.B. ***The Real World of Democracy***, Oxford: Clarendon Press, 1971.

Madjid, Nurcholish. ***Islam Doktrin dan Peradaban***, cetakan ke-II Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

______, ***Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan***, cetakan kelima, Banduung: Mizan, 1993.

Mahasin, Aswab. dan Ismet Natsir, eds., ***Cendekiawan dan Politik***, (Jakarta: LP3ES, 1988.

Malik, Adam. ***Sepuluh Tahun Politik Luar negeri Orde Baru***, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.

Marbun, B.N. ***Kamus Politik***, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Markoff, John ***Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik***, terj. Ari Setyaningrum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Mas'oed, Mochtar. ***Negara, Kapital dan Demokrasi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

McKay, John P., Benneth D. Hill dan John Buckler, eds., ***A History of World Societies***, Boston, et.all.: Houghton Mifflin Company, t.t.

Menara Tebuireng, Vol. 1, No. 2, 2005.

Meyer, Thomas. ***Sosial Demokrasi dalamTeori dan Praktik, Pengalaman Kaum Sosial Demokrat Jerman***, terj. Imam Yudotomo, Yogyakarta: Central For Social Democratic Studies, 2003.

Masyarakat Indonesia, Tahun Ke-VII, No. 1-2, 1980.

Mawas Diri, November 1986.

McGlynn, John. eds., ***Indonesian Heritage: Language and Literatur***, Singapore: Archipelago Press, 1998.

Menara Tebuireng, Vol. 1, No. 2, 2005.

Mernissi, Fatima. ***Islam dan Demokrasi, Antologi Ketakutan***, terj. Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Miksic, John. eds., ***Indonesian Heritage: Ancient History***, Jakarta: Buku Antar Bangsa for Grolier International Inc., 1996.

Mill, John Stuart. ***Essays on Politics and Society***, Volume 10, London: Routledge and Kegan Paul, 1977.

Missiology: En International Review, Vol. XXXII, No. 2, April 2004.

Mommsen, Wolfgang J. ***Theories of Imperialism***, terjemahan P.S. Falla dari bahasa Jerman New York: Random House, 1977.

Munandar, Haris. ***Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Murtopo, Ali ***Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun***, Jakarta: CSIS, 1972.

Al-Mushir, Vol. 34, No. 1, 1992.

Nasution, Adnan Buyung. ***Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstitusi 1956-1959***, Jakarta: Grafiti, 1995.

Nasution, A.H. *Demokrasi Pantjasila di Masa Sekarang dan Masa Mendatang*, Malang: Laboratorium Pantjasila IKIP Malang, 1971.

______. *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid VII, Jakarta: Masagung, 1988.

Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Pemikiran Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

______, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Cetakan V, Bandung: Mizan, 1998.

Noer, Deliar. *Ideologi, Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.

______. *Mohammad Hatta; Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990.

______. *Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.

______, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1945*, London et.al.: Oxford University Press, 1973.

Notosusanto, Nugroho. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966*, (Djakarta: Department of Defence and Security, Centre for Armed Forces History, 1970.

______. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

______, *The PETA Army During Japanese Occupation of Indonesia, 1943-1945*, Djakarta: Department of Defence and Scurity, Centre for Armed Forces History, 1974.

O'Donnell, Guillermo. dan Phillipe C. Scmitter, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, 1993.

Onghokham, *Runtuhnya Hindia-Belanda*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Paulus, B.P. ***Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda***, Jakarta: Alumni, 1979.

Peterson, Thomas G. ***The Origin of The Cold War***, Second Edition, Lexington et.all.: D.C. Heath and Company, 1974.

Poesponegoro Marwati Djoened. dan Nugroho Notosusanto, ***Sejarah Nasional Indonesia II-VI***, edisi ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Prasaran-prasaran pada Seminar Pantjasila, Jakarta: Departemen Penerangan 1959.

Pringgodigdo, A.G. ***Sekitar Pantjasila***, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1978.

Prisma, No. 7, 1978.

______, No. 9, 1979.

______, No. 8, 1983.

______, No. 8, 1984.

______, No. 11, 1984.

______, Ekstra 1984.

______, No. 6, 1985.

______, No. 8, 1985.

______, No. 8, 1986.

______, No. 6, 1987.

______, No. 4, 1988.

______, No. 5, 1988.

______, No. 6, 1988.

______, No. 5, 1988.

______, No. 2, 1991.

______, No. 3, 1991.

______, No. 8, 1991.

______, No. 2, 1992.

______, No. 4, 1994.

______, No. 10 1994.

______, No. 5, 1995.

______, No. 2 1996.

______, No. 3, 1996.

______, No. 7, 1996.

______, No. 8, 1996.

Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol 2 No 1, Januari 2000.

Prospektif, No. 5, 1993.

Putra Agung, Anak Agung Gde. ***Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial***, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, ,

Pye, Lucian W. ***Aspect of Political Development***, (Massacuset: The Little Brown and Company, 1966.

Rais, M. Amin.ed.,, ***Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri***, (Jakarta: Rajawali Press, 1992.

______. ***Moralitas Politik Muhammadiyah***, (Yogyakarta: Dinamika, 1995.

Ramage, Douglas E. ***Politics in Indonesia: Islam and the Ideologi of Tolerance***, (London-New York: Routlege, 1995), p. 150.

Ricklefs, M.C. ***Sejarah Indonesia Modern***, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Robinson, Ricard. ***Sejarah Politik Orde Baru***, terjemahan Aboeprijadi dkk., (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984.

Roeder, O.G. *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*, edisi revisi, (Jakarta: Gunung Agung, 1976.

Rose, Mavis. *Biografi Politik Mohammad Hatta*, terjemahan Hermawan Sulistyo, Jakarta: Gramedia, 1991.

Sastroamidjoyo, Ali. *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Jakarta: Kinta, 1974.

Scherer, Savitri Prastiti. *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran Priyayi-priyayi Nasional jawa awal Abad 20*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985.

Scruton, Roger. *A Dictionary of Political Thought*, London: The Macmillan Press, 1983.

______. *Ideas and Politics in Modern Britain*, London: Macmillan, 1990.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)*, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1985.

Sihombing, O.D.P. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang*, Djakarta: Sinar Djaya, 1962.

Simanjuntak, P.N.H. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Singh, Bilveer. *Dwi Fungsi ABRI: Asal-usul, Aktualiasai dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Siregar, Hariman. *Hati Nurani seorang Demonstran*, Jakarta: Mantika Media Utama, 1994.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Sjahrir, Sutan. *Out of Exile*, New York: The John Day Coy., 1949.

Soebiantoro, M. ***Perkembangan Demokrasi di Indonesia; Analisis Hubungan Legislatif dan Eksekutif***, Yogyakarta: Tesis pada Universitas Gadjah Mada, 1996.

Soeharto, ***Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi Seperti Dipaparkan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.***, (Jakarta: PT Lamtoro Gung Persada, 1989.

Sjahrir, Sutan. ***Out of Exile***, New York: The John Day Coy., 1949.

Sjahrir, ***Sosialisme Pembangunan***, Jakarta: Lappenas, 1982.

Snyder, Jack. ***Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, Demokratisasi dan Konflik Nasionalis***, terj. Martin Aleida dan Parakitri T. Simbolon, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.

Soekarno, ***Di Bawah Bendera Revolusi***, Jilid I, Djakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963.

_____. ***Di Bawah Bendera Revolusi***, jilid II, Djakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965.

Soehino, ***Ilmu Tata Negara***, cetakan ke-II Yogyakarta: Liberty, 1986.

Suharto, P. dan S. Zainul Ihsan, ed., ***Aku Pemuda di Hari Esok***, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Suhelmi, Ahmad. ***Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan***, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sumardjo, Soepeno. ***Non-Blok sebagai Wadah Perjuangan Dunia Ketiga***, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.

Suprayitno, ***Pemilu Dari Masa Ke Masa***, Jakarta: Teguh Pertiwi Mandiri, 1993.

Surjomihardjo, Abdurrachman. ***Budi Utomo Cabang Betawi***, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

______. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*, Jakarta: Idaju, 1979.

Stvdia Islamica, Vol. MCMLXXX, 1980.

Surjomihardjo, Abdurrahman. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.

_____, *Budi Utomo Cabang Betawi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*, Yogyakarta: Liebe Book Press, 2004.

Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta: UI-Press, 1990.

Tanya, Victor. *HMI: Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta: PSH, 1982.

Taylor, Alastair M. *Indonesian Independece and The United Nations*, Ithaca-New York: Cornell University Press for Carnegie Endowment for International Peace, 1960.

The Muslim World, Vol. LXXXVIII, No. 1., January 1998.

______, Vol. LXXXVII, No. 1, Januari 1997.

______, Vol. 90, No. 1 &2, Spring 2000.

______, Vol. 9 No. 2, April 2003.

TIM ISAI, *Bayang-bayang PKI*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1995.

Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Tim Cidesindo, *Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan G 30 S/PKI*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999.

Treanor, Paul. ***Kebohongan Demokrasi***, terj. Imron Rosyadi dan Muhammad Nastain, Yogyakarta: Institut Tafsir Wacana, 2001.

USC Foundation dan SATUNAMA, ***Globalisasi dan NGO***, (Yogyakarta: USC Foundation dan SATUNAMA, 1997.

Van Neil, Robert. ***Munculnya Elit Modern Indonesia***, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Verkuyl, J. ***Ketegangan antara Imperialisme dan Kolonialisme Barat dan Zending pada Masa Politik Kolonial Etis***, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1990.

Wibisono, Chistianto. ***Aksi-aksi Tritura: Kisah Sebuah Partnership 10 Januari – 11 Maret 1966***, (Jakarta: Departemen Pertahanan – Keamanan, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1970.

Wiranatakusumah, A.A. ***Demokrasi dalam Islam, Teori dan Praktik***, terj. Muhammad Tahrir Ibrahim, Bandung: NV Masa Baru, t..t.

Yaqin, Haqqul. ***Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia 1997-2001***, Yogyakarta: Tesis pada IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Yatim, Badri. ***Soekarno, Islam dan Nasionalisme***, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

BIOGRAFI PENULIS

Irfan Tamwifi adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Come Join Us!

PPDB

Tahun Ajaran 2022/2023

Penerimaan Peserta Didik Baru

GELOMBANG I 13 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022

GELOMBANG II 1 Februari 2022 s/d Kuota terpenuhi

PENDAFTARAN

Online : bit.ly/ppdbsdi2022

Offline : kantor SD Islam Darush Sholihin

PUSAT INFORMASI 0856-0635-8795

  SD Islam Darush Sholihin